SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor 55).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.

6. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Renja-PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan dibidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2027 digunakan sebagai:

a. dasar penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
b. pedoman penyempurnaan rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota;
c. pedoman dalam penyusunan KUA PPAS APBD Tahun 2027;
d. bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah hingga triwulan II Tahun 2027.

Pasal 3

RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 4

(1) Sistematika RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 adalah sebagai berikut:
   a. bab I : pendahuluan;
   b. bab II : gambaran Umum Kondisi Daerah;
   c. bab III: kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
   d. bab IV: sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
   e. bab V: arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
   f. bab VI: rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
   g. bab VII: kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
   h. bab VIII: penutup.

(2) Rincian lebih lanjut mengenai RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

ISWANDI IBRAHIMSYAH, S.H., M.H.,CLA.,CLCP
NIP 19790711 200701 1 006

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Juni 2026

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

DENNY HARIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2026 NOMOR 11

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD 2027

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pembangunan Wilayah yang Merata, Sumber Daya Manusia (SDM) Berkarakter dan Ekonomi Bernilai Tambah Menuju Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI yang Makmur



Pemerimtah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya, dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 dengan tema "**Pembangunan Wilayah yang Merata, SDM Berkarakter dan Ekonomi Bernilai Tambah Menuju Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI yang Makmur**", telah selesai disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dokumen ini memiliki nilai strategis sebab merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya, RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 serta Rancangan RKP Tahun 2027 dan program strategis nasional. Penyusunan RKPD dilakukan dengan memerhatikan kondisi terkini daerah, permasalahan pembangunan, dan isu strategis.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, Kita perlu saling bersinergi dan berkolaborasi dalam mengimplementasikan rencana dengan sebaik-baiknya.

Tanjung Selor, 26 Juni 2026

Gubernur Kalimantan Utara

Ttd

Drs. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR		xii
BAB I.	**PENDAHULUAN**	**I.1**
1.1	Latar Belakang	I.1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I.6
1.3	Hubungan Antar Dokumen	I.9
1.4	Maksud dan Tujuan	I.11
1.5	Sistematika Dokumen RKPD	I.11
BAB II.	**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**	**II.2**
2.1	Gambaran Umum Daerah	II.1
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II.264
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	II.299
2.4	Isu Strategis Daerah	II.314
2.5	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	II.325
2.6	Penerapan Inovasi Daerah	II.327
BAB III.	**KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**	**III.1**
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III.1
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III.18
3.3	Sumber Pendanaan Non APBD	III.53
BAB IV.	**SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**	**IV.1**
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV.1
4.2	Prioritas Pembangunan Tahun 2027	IV.37
4.3	Strategi dan Arah Kebijakan	IV.50

BAB V.	**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA**	**V.1**
5.1	Sasaran Indikator Makro Kabupaten/Kota	V.1
5.2	Strategi Pembangunan Kewilayahan	V.8
BAB VI.	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**	**VI.1**
6.1	Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027	VI.1
6.2	Dukungan Terhadap Perencanaan Pembangunan Nasional	VI.21
BAB VII.	**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**VII.1**
BAB VIII.	**PENUTUP**	**VIII.1**
8.1	Kaidah Pelaksanaan	VIII.1
8.2	Pengendalian dan Evaluasi	VIII.2
8.3	Perubahan RKPD	VIII.3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ibukota, Luas, Jumlah Kecamatan, dan Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kota	II.2
Tabel 2.2	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara	II.5
Tabel 2.3	Hasil Hutan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024	II.7
Tabel 2.4	Luas Jasa Lingkungan berdasarkan Status Jasa di Provinsi Kalimantan Utara	II.7
Tabel 2.5	Jasa Wisata hutan di Provinsi Kalimantan Utara	II.8
Tabel 2.6	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Penangkapan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II.10
Tabel 2.7	Area Tambak di Wilayah Pesisir pada Setiap Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara	II.12
Tabel 2.8	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penangkapan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.14
Tabel 2.9	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian di Provinsi Kalimantan Utara (Miliar Rupiah) Tahun 2021-2025	II.15
Tabel 2.10	Indeks Ketahanan Energi Nasional Tahun 2020-2024	II.16
Tabel 2.11	Penilaian Indeks Ketahanan Daerah per Aspek	II.16
Tabel 2.12	Intensitas Energi Primer Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II.16
Tabel 2.13	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.17
Tabel 2.14	Perwilayahan Pariwisata di Provinsi Kalimantan Utara	II.19
Tabel 2.15	Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.19
Tabel 2.16	Status Daya Dukung Penyediaan Air Provinsi Kalimantan Utara	II.20
Tabel 2.17	Status Daya Dukung Penyediaan Air Kabupaten/Kota	II.21
Tabel 2.18	Status Daya Dukung Penyediaan Pangan di Provinsi Kalimantan Utara	II.24
Tabel 2.19	Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.26

Tabel 2.20	Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Utara 2021-2025	II.28
Tabel 2.21	Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara 2021-2025	II.28
Tabel 2.22	Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Utama di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025	II.29
Tabel 2.23	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.30
Tabel 2.24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Utara	II.32
Tabel 2.25	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Provinsi Kalimantan Utara	II.32
Tabel 2.26	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara di Provinsi Kalimantan Utara	II.34
Tabel 2.27	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan di Provinsi Kalimantan Utara	II.35
Tabel 2.28	Indeks Kualitas Air Laut di Provinsi Kalimantan Utara	II.35
Tabel 2.29	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Utara	II.36
Tabel 2.30	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.39
Tabel 2.31	Tingkat Pengurangan Sampah di Perkotaan	II.39
Tabel 2.32	Indeks Risiko per Ancaman Bencana Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	II.42
Tabel 2.33	Penurunan Emisi GRK	II.43
Tabel 2.34	Luasan Kawasan Terdampak Bencana Alam di Provinsi Kalimantan Utara	II.44
Tabel 2.35	Jumlah Desa Berdasarkan Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota	II.46
Tabel 2.36	Luas Areal dengan Jasa Ekosistem Pencegahan Bencana Banjir di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota	II.47
Tabel 2.37	Luas Areal dengan Jasa Ekosistem Pencegahan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota	II.49

Tabel 2.38	Luas Areal dengan Jasa Ekosistem Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota	II.51
Tabel 2.39	Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2021-2025	II.51
Tabel 2.40	Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Kelamin 2021-2025	II.56
Tabel 2.41	Persebaran dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara 2025	II.57
Tabel 2.42	Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029	II.59
Tabel 2.43	Proyeksi Kepadatan Penduduk Bruto Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029	II.60
Tabel 2.44	Proyeksi Kepadatan Penduduk Netto Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029	II.61
Tabel 2.45	Proyeksi Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029	II.62
Tabel 2.46	PDRB ADHK Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (Miliar Rupiah)	II.65
Tabel 2.47	PDRB ADHB Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (Miliar Rupiah)	II.67
Tabel 2.48	Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (%)	II.68
Tabel 2.49	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025 (%)	II.74
Tabel 2.50	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dan 2025 (%)	II.75
Tabel 2.51	PDRB ADHB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah)	II.78
Tabel 2.52	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.81
Tabel 2.53	Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.85
Tabel 2.54	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.88
Tabel 2.55	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Kalimantan Utara Tahun 2025	II.89

Tabel 2.56	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2023-2025 (ribu rupiah)	II.92
Tabel 2.57	Umur Harapan Hidup (UHH) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2023-2025 (tahun)	II.97
Tabel 2.58	Cakupan Kinerja Penanganan Tuberkulosis (TBC) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.102
Tabel 2.59	Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025	II.104
Tabel 2.60	Angka Kesakitan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025	II.105
Tabel 2.61	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2023-2025 (Tahun)	II.109
Tabel 2.62	Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2023-2025 (Tahun)	II.113
Tabel 2.63	Indeks Kesejahteraan Sosial Kalimantan Utara Tahun 2025	II.119
Tabel 2.64	Indeks Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2025	II.122
Tabel 2.65	Indeks Perlindungan Anak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2024	II.128
Tabel 2.66	PDRB Industri Pengolahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.138
Tabel 2.67	PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.138
Tabel 2.68	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.139
Tabel 2.69	Penduduk Usia 15+ yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025	II.141
Tabel 2.70	Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.145
Tabel 2.71	Indeks Pembangunan Statistik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	II.152
Tabel 2.72	Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021–2025	II.152

Tabel 2.73	Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota Tahun 2024	II.153
Tabel 2.74	Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.154
Tabel 2.75	Net Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.156
Tabel 2.76	Top 5 Sebaran Investasi di Kalimantan Utara Berdasarkan Negara dan Sektor Tahun 2025	II.159
Tabel 2.77	Kondisi Jalan Kewenangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.163
Tabel 2.78	Jenis Permukaan Jalan Kewenangan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2025	II.165
Tabel 2.79	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Minum Layak di Provinsi Kalimantan Utara (%) Tahun 2025	II.166
Tabel 2.80	Persentase Rumah Tangga menurut Kepemilikan Fasilitas Buang Air Besar di Provinsi Kalimantan Utara (%) Tahun 2025	II.167
Tabel 2.81	Perkembangan Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa di Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018-2024 dan Indeks Desa (ID) Tahun 2025	II.172
Tabel 2.82	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.176
Tabel 2.83	Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.176
Tabel 2.84	Indeks Daya Saing Daerah Kalimantan Utara Tahun 2022-2025	II.183
Tabel 2.85	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2025	II.184
Tabel 2.86	Pencapaian Target SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023	II.185
Tabel 2.87	Capaian Mutu SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023	II.187
Tabel 2.88	Capaian Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023	II.189
Tabel 2.89	Capaian Mutu SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023	II.191
Tabel 2.90	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023	II.194
Tabel 2.91	Indikator dan Data SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023	II.194
Tabel 2.92	Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023	II.196

Tabel 2.93	Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023	II.198
Tabel 2.94	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023	II.200
Tabel 2.95	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023	II.201
Tabel 2.96	Realisasi Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Tahun 2024	II.202
Tabel 2.97	Capaian Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024	II.204
Tabel 2.98	Capaian Penerapan SPM Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan Tahun 2024	II.204
Tabel 2.99	Perhitungan Nilai Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi KLB Provinsi Tahun 2024	II.206
Tabel 2.100	Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024	II.207
Tabel 2.101	Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024	II.208
Tabel 2.102	Capaian SPM Trantibumlinmas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	II.209
Tabel 2.103	Rekapitulasi Capaian SPM BPBD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	II.210
Tabel 2.104	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	II.212
Tabel 2.105	Realisasi Capaian Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025	II.218
Tabel 2.106	Realisasi Capaian Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025	II.224
Tabel 2.107	Realisasi Capaian Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025	II.232
Tabel 2.108	Realisasi Capaian Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025	II.237
Tabel 2.109	Realisasi Capaian Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025	II.244
Tabel 2.110	Realisasi Capaian Pelaksanaan SPM Bidang Sosial Tahun 2025	II.248
Tabel 2.111	Capaian Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara	II.268
Tabel 2.112	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025	II.269

Tabel 2.113	Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025	II.272
Tabel 2.114	Rekapitulasi Capaian SKPD pada Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025	II.293
Tabel 2.115	Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025	II.297
Tabel 2.116	Isu Strategis Provinsi Kalimantan Utara	II.315
Tabel 2.117	Keterkaitan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan Prioritas Daerah Tahun 2027	II.326
Tabel 2.118	Inovasi Daerah Tahun 2025	II.328
Tabel 3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah	III.3
Tabel 3.2	Postur Makro Fiskal Jangka Menengah (% PDB)	III.4
Tabel 3.3	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Utara Menurut Daerah September 2024 - Maret 2025	III.12
Tabel 3.4	Target Indikator Makro Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027	III.18
Tabel 3.5	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	III.20
Tabel 3.6	Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	III.23
Tabel 3.7	Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	III.26
Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2028	III.29
Tabel 3.9	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2028	III.37
Tabel 3.10	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2028	III.43
Tabel 3.11	Proyeksi Penerimaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027	III.44
Tabel 3.12	Persandingan Proyeksi Pengeluaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027	III.46
Tabel 3.13	Realisasi dan Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2028	III.51
Tabel 3.14	Proyek Provinsi Kalimantan Utara dalam RKP Tahun 2027	III.54
Tabel 4.1	Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN	IV.2
Tabel 4.2	Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2027	IV.3

Tabel 4.3	Keterkaitan Asta Cita RPJMN dan Misi RPJMD	IV.13
Tabel 4.4	Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027	IV.15
Tabel 4.5	Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027	IV.17
Tabel 4.6	Program Unggulan Daerah Provinsi Kalimantan Utara	IV.44
Tabel 4.7	Strategi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara	IV.50
Tabel 4.8	Penyelaraan Misi, Strategi, dan Arah Kebijakan	IV.51
Tabel 4.9	Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Rancangan RKP Tahun 2027	IV.61
Tabel 5.1	Sasaran Indikator Makro Kabupaten/Kota pada RKPD Tahun 2027	V.2
Tabel 5.2	Strategi Pembangunan Kewilayahan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara	V.9
Tabel 6.1	Rancangan Pagu Anggaran Berdasarkan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027	VI.2
Tabel 6.2	Penandanaan Sub Kegiatan untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	VI.6
Tabel 6.3	Program Strategis Nasional (ProSN)	VI.22
Tabel 6.4	Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 tentang Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro-SN) Provinsi Kalimantan Utara	VI.24
Tabel 6.5	Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 tentang Dukungan terhadap Program Tematik Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara	VI.36
Tabel 6.6	Dukungan Rencana Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 Terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU)	VI.40
Tabel 7.1	Keselarasan Sasaran Indikator Makro Nasional dengan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027	VII.1
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027	VII.2
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027	VII.3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RKPD Provinsi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I.10
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kalimantan Utara	II.3
Gambar 2.2	Produksi Ikan dan Udang di Provinsi Kalimantan Utara	II.13
Gambar 2.3	Status Daya Dukung Daya Tampung Penyedia Air Provinsi Kalimantan Utara	II.22
Gambar 2.4	Status Daya Dukung Daya Tampung Penyedia Pangan di Provinsi Kalimantan Utara	II.24
Gambar 2.5	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2021-2025	II.27
Gambar 2.6	Peta Sebaran Tingkat Kerusakan Ekosistem Gambut di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	II.37
Gambar 2.7	Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Utara 2021-2025	II.41
Gambar 2.8	Peta indeks Kerentanan Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Utara	II.46
Gambar 2.9	Luas Areal dengan Tingkat Bahaya Banjir di Provinsi Kalimantan Utara (Ha)	II.48
Gambar 2.10	Luas Areal dengan Tingkat Bahaya Tanah Longsor	II.49
Gambar 2.11	Proporsi Bencana di Provinsi Kalimantan Utara	II.50
Gambar 2.12	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.54
Gambar 2.13	Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025	II.55
Gambar 2.14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2021-2025 (%)	II.63
Gambar 2.15	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah) Tahun 2021-2025	II.69
Gambar 2.16	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.70
Gambar 2.17	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2021-2025 (%)	II.72

Gambar 2.18	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2025 (%)	II.73
Gambar 2.19	PDRB ADHB per Kapita Provinsi Kalimantan Utara dan PDB ADHB per Kapita Indonesia Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah)	II.76
Gambar 2.20	PDRB ADHB per Kapita Menurut Provinsi Tahun 2025 (Juta Rupiah)	II.77
Gambar 2.21	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2021-2025	II.79
Gambar 2.22	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi Tahun 2025 (%)	II.80
Gambar 2.23	Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara (%), Agustus 2023–Agustus 2025	II.81
Gambar 2.24	Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2021-2025	II.82
Gambar 2.25	Indeks Gini Menurut Provinsi Tahun 2025	II.84
Gambar 2.26	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2021-2025	II.86
Gambar 2.27	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi Tahun 2025	II.87
Gambar 2.28	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2021-2025 (ribu rupiah)	II.90
Gambar 2.29	Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Hasil Long Form SP2020 Tahun 2021-2025	II.93
Gambar 2.30	Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.95
Gambar 2.31	Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024	II.98
Gambar 2.32	Prevalensi Stunting Berdasarkan Kelompok Umur di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	II.99
Gambar 2.33	Prevalensi Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2024	II.100
Gambar 2.34	Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II.101
Gambar 2.35	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2025	II.103

Gambar 2.36	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2021-2025 (Tahun)	II.105
Gambar 2.37	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025 (Tahun)	II.107
Gambar 2.38	Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2021-2025 (Tahun)	II.110
Gambar 2.39	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025 (Tahun)	II.111
Gambar 2.40	Capaian Angka Partisipasi Murni Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.114
Gambar 2.41	Capaian Angka Partisipasi Kasar Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.116
Gambar 2.42	Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.120
Gambar 2.43	Nilai Indikator Penyusun IZN BAZNAS Provinsi Kalimantan Utara	II.123
Gambar 2.44	Jumlah Produk Bersertifikat Halal Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025	II.124
Gambar 2.45	Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2020-2024	II.125
Gambar 2.46	Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2020-2024	II.126
Gambar 2.47	Indeks Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II.128
Gambar 2.48	Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II.129
Gambar 2.49	Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.131
Gambar 2.50	Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.132
Gambar 2.51	Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II.134
Gambar 2.52	Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II.135
Gambar 2.53	Angka Ketergantungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.137
Gambar 2.54	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023-2025	II.140

Gambar 2.55	Persentase Tenaga Kerja Formal Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.142
Gambar 2.56	Rasio Kewirausahaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2025	II.143
Gambar 2.57	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual Provinsi Kalimantan Utara (%) Tahun 2025	II.144
Gambar 2.58	Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II.146
Gambar 2.59	Indeks Ekonomi Biru Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	II.148
Gambar 2.60	Indeks Pembangunan TIK Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II.149
Gambar 2.61	Sub Indeks Pembangunan TIK Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II.150
Gambar 2.62	Desa dan Kelurahan Blankspot di Provinsi Kalimantan Utara	II.150
Gambar 2.63	Capaian Indeks KAMI di Provinsi Kalimantan Utara	II.151
Gambar 2.64	Perkembangan Realisasi Investasi di Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.158
Gambar 2.65	Peringkat Realisasi Investasi (Rp Triliun) Kabupaten/Kota Tahun 2025	II.160
Gambar 2.66	Indeks Layanan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II.161
Gambar 2.67	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Tahun 2023-2025	II.169
Gambar 2.68	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025 (%)	II.173
Gambar 2.69	Inflasi Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2021-2025	II.175
Gambar 2.70	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.178
Gambar 2.71	Indeks Rasa Aman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2023	II.179
Gambar 2.72	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	II.179
Gambar 2.73	Indeks Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Dimensi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	II.180
Gambar 3.1	PDRB ADHB dan PDRB ADHK Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	III.10

Daftar Gambar

Gambar 3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2021-2025 (%)	III.11
Gambar 3.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	III.14
Gambar 3.4	Gini Ratio Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025	III.14
Gambar 3.5	Proyeksi Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027	III.30
Gambar 3.6	Proyeksi Proporsi Komponen Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027	III.40
Gambar 4.1	Asta Cita Sebagai Prioritas Pembangunan	IV.37
Gambar 4.2	Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat	IV.38
Gambar 4.3	Tema, Prioritas Nasional, dan PKPN pada RKP Tahun 2027	IV.39
Gambar 4.4	Tema RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027	IV.40
Gambar 4.5	Keterkaitan Isu Strategis, Sasaran, dan Prioritas Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027	IV.44
Gambar 4.6	Keselarasan Program Unggulan Kalimantan Utara dengan Kebijakan Nasional Tahun 2027	IV-49
Gambar 4.7	Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029	IV.60

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029. RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian, penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 selain berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, juga pada RKP Tahun 2027 dan program strategis nasional.

Dokumen RKPD mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing

kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan

4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Kalimantan Utara Tahun 2027 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang selaras dengan kebijakan nasional. Tema pembangunan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2027 adalah "**Pembangunan Wilayah yang Merata, SDM Berkarakter dan Ekonomi Bernilai Tambah Menuju Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI yang Makmur**". Tema ini mengarahkan pada pembangunan wilayah yang merata.

Dokumen RKPD disusun dengan memertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan analisis data capaian beberapa indikator makro di tahun 2025, kondisi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren perbaikan secara umum, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Beberapa indikator utama memperlihatkan kinerja yang membaik, antara lain Indeks Pembangunan Manusia, serta indikator sosial ekonomi seperti persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka yang cenderung menurun, menandakan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun laju pertumbuhannya belum sepenuhnya optimal.

Di sisi lain, masih terdapat indikator yang menjadi tantangan utama untuk ditingkatkan, khususnya indikator yang berkaitan dengan pemerataan pembangunan antarwilayah, ketimpangan ekonomi, serta kualitas dan stabilitas kinerja ekonomi di beberapa kabupaten/kota yang perkembangannya relatif lebih lambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun capaian pembangunan tahun 2025 lebih baik dibandingkan tahun 2024, upaya percepatan dan penguatan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan berkeadilan masih diperlukan agar peningkatan

kinerja pembangunan dapat berlangsung lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Utara.

Sejalan dengan itu, perencanaan pembangunan tahun 2027 di Kalimantan Utara menerapkan beberapa prinsip, antara lain inklusif, berkeadilan, responsif gender, dan berkelanjutan. Pembangunan inklusif adalah pendekatan pembangunan yang memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses, kesempatan, dan manfaat pembangunan secara setara, tanpa terkecuali. Prinsip ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi juga oleh kelompok rentan dan termarjinalkan, seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, masyarakat adat, perempuan, anak, dan penduduk wilayah terpencil.

Pembangunan berkeadilan menekankan pada pemerataan hasil dan manfaat pembangunan antarindividu, antarkelompok sosial, dan antarwilayah, guna mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan spasial. Prinsip ini tidak selalu berarti perlakuan yang sama bagi semua pihak, melainkan perlakuan yang proporsional sesuai dengan tingkat kebutuhan dan ketertinggalan. Pembangunan berkeadilan dapat diwujudkan melalui intervensi afirmatif bagi wilayah tertinggal, perbatasan, dan pedalaman, serta kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah.

Perencanaan juga menerapkan prinsip pembangunan responsif gender, yakni pendekatan pembangunan yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, peran, dan pengalaman antara laki-laki dan perempuan, serta bertujuan mengurangi kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan pembangunan tidak bersifat netral gender, melainkan harus secara sadar mengidentifikasi dan mengatasi ketimpangan yang ada. Penerapan prinsip responsif gender dilakukan melalui pengarusutamaan gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Selanjutnya, pembangunan berkelanjutan merupakan prinsip pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi

kebutuhannya. Prinsip ini mengintegrasikan tiga pilar utama, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, dalam satu kerangka pembangunan yang saling mendukung. Pembangunan berkelanjutan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) karena dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan output dan pendapatan, tetapi juga dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam secara efisien serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk emisi GRK.

Penyusunan RKPD Tahun 2027 dilakukan melalui beberapa tahapan, yang dimulai sejak Desember Tahun 2025 dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lambat akhir Juni 2026. Tahapan penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 meliputi:

1. Persiapan Penyusunan RKPD

   Tahap ini mulai dilakukan pada Desember 2025 dengan pembentukan tim penyusun RKPD, pengumpulan data dan informasi, pelaksanaan koordinasi Bappeda dan Litbang dengan seluruh perangkat daerah untuk persiapan penyusunan Rancangan Awal RKPD dan penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, serta penyusunan jadwal pelaksanaan penyusunan RKPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

   Rancangan awal mulai disusun pada Desember 2025 sampai dengan Maret 2026. Salah satu tahapan dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD adalah Konsultasi Publik, yang bertujuan untuk memperoleh masukan/saran bagi penyempurnaan Rancangan Awal RKPD dengan melibatkan pemangku kepentingan. Selanjutnya, Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah dan telah diverifikasi oleh Bappeda dan Litbang, menjadi masukan bagi penyusunan Rancangan RKPD.
3. Penyusunan Rancangan RKPD

   Dalam tahap ini dilakukan penyempurnaan Rancangan Awal menjadi Rancangan RKPD berdasarkan beberapa masukan, antara lain dari: 1)

pokok-pokok pikiran DPRD, 2) Rancangan Renja Perangkat Daerah, dan 3) Usulan dari kabupaten/kota.

4. Musrenbang RKPD

   Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan dalam rangka pembahasan rancangan RKPD. Pelaksanaan Musrenbang RKPD menghasilkan berita acara yang menjadi masukan bagi penyusunan Rancangan Akhir RKPD.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

   Rancangan akhir disusun sebagai penyempurnaan Rancangan RKPD dengan memperhatikan berita acara Musrenbang RKPD. Rancangan Akhir tersebut dilakukan reviu oleh APIP untuk memastikan bahwa Rancangan Akhir RKPD telah disusun sesuai dengan informasi dalam RPJMD dan disusun sesuai tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan. Rancangan Akhir RKPD selanjutnya disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan fasilitasi.

6. Penetapan RKPD

   Rancangan akhir RKPD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil fasilitasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, paling lambat minggu keempat Juni 2026.

Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 menerapkan pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif dan pendekatan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Sedangkan pendekatan politis dilaksanakan melalui pelibatan DPRD pada saat konsultasi publik, musrenbang RKPD, maupun melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Selanjutnya, secara substansi penyusunan RKPD menerapkan beberapa pendekatan:

1) Pendekatan Holistik-Tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

2) Pendekatan Integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3) Pendekatan Spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 disusun dengan memedomani dan memerhatikan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya. Dasar hukum penyusunan RKPD, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,

sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017–2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 54); dan
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 55).

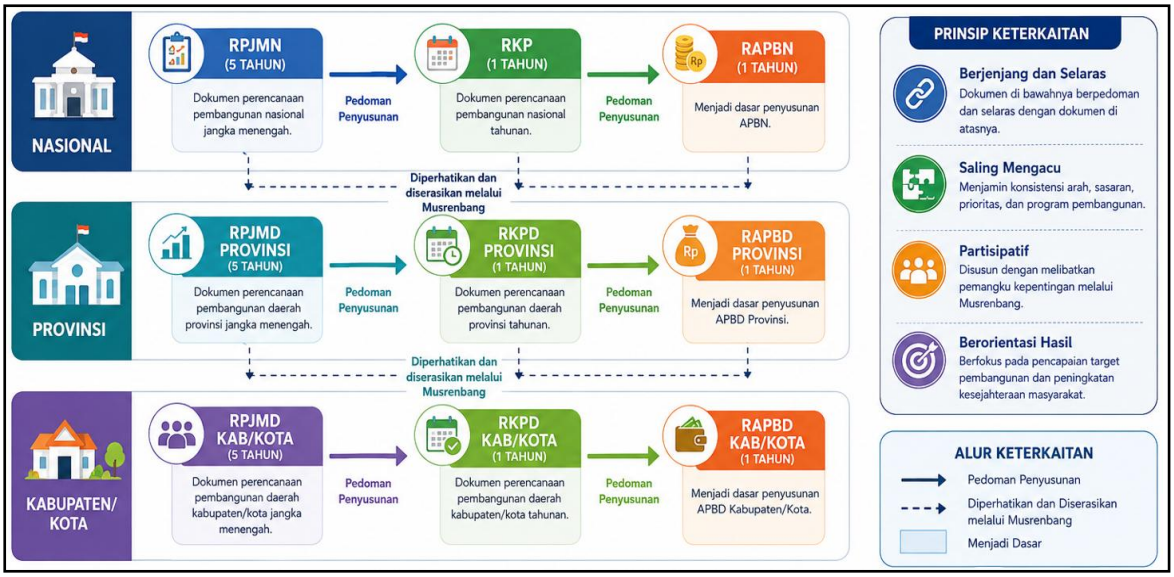
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RKPD disusun berpedoman pada RPJMD, RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD menjadi pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan.

Mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah dengan pembangunan nasional Tahun 2027. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2027 diarahkan selain mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah, juga mendukung prioritas nasional dan program strategis nasional.

Gambar 1.1.

Keterkaitan RKPD Provinsi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diolah

Selanjutnya, RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027, serta Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027 yang menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun 2027.

Dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 akan menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Penyelarasan perencanaan provinsi dan kabupaten/kota diharapkan akan menghasilkan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 disusun dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2027, yang disusun selaras dengan RPJMD serta prioritas nasional dan menerapkan prinsip pembangunan inklusif, berkeadilan, responsif gender, dan berkelanjutan.

Tujuan dari penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027, yaitu:

1. Teridentifikasinya kinerja pembangunan daerah serta permasalahan dan isu daerah.
2. Ditetapkannya sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2027 dan dukungannya terhadap pencapaian prioritas nasional tahun 2027.
3. Tersedianya pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
4. Tersedianya pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027.
5. Tersedianya instrumen penilaian kinerja pembangunan daerah yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta pelaporan lainnya.
6. Tersedianya pedoman untuk penyusunan RKPD kabupaten/kota Tahun 2027.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 terdiri dari 8 (delapan) bab, dengan uraian secara umum sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD Tahun 2027.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah yang didukung dengan data dan informasi beberapa tahun terakhir, serta pencapaian kinerja RPJMD dan RKPD tahun sebelumnya. Berdasarkan capaian kinerja Pembangunan, dirumuskan permasalahan pembangunan, serta diidentifikasi isu strategis daerah. Pada bab ini juga disajikan pokok-pokok pikiran DPRD dan inovasi daerah.

Bab III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional. Selain itu pada bab ini memuat analisis keuangan daerah dan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah tahun 2027 untuk mendanai pembangunan. Potensi pendanaan Pembangunan daerah dari sumber-sumber pendanaan lainnya diluar APDB provnsi juga dimuat pada bab ini.

Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disertai target tahun 2027 serta strategi dan arah kebijakan untuk mencapai sasaran. Selain itu dimuat juga tema dan prioritas pembangunan Kalimantan Utara Tahun 2027 dengan memperhatikan sinergi dengan prioritas dan kebijakan nasional tahun 2027. Pada bab ini dimuat juga program prioritas pembangunan daerah yang ditentukan berdasarkan cascading kinerja.

Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Bab ini memuat arah kebijakan pembangunan untuk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Pada bagian ini memuat arahan target indikator kinerja makro pembangunan kabupaten/kota yang menunjang pencapaian target provinsi. Selain itu dimuat juga arah

pengembangan kewilayahan bupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan kewilayahan provinsi.

Bab VI. Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab ini memuat tentang rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan target capaian kinerja dan pagu anggaran tahun 2027 serta perencanaan prakiraan maju tahun 2028. Penyajian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan juga disajikan untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu, bab ini juga memuat dukungan program perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara terhadap prioritas nasional (PN), Program Strategins Nasional (ProSN), dan tematik pembangunan lainnya.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini menyajikan pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam bentuk penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027 dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2027.

Bab. VIII Penutup

Bab ini memuat hal-hal yang dipandang penting dan perlu dilakukan untuk implementasi rencana pembangunan tahun 2027.

BAB 2
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Daerah

Bab ini menyajikan gambaran secara umum mengenai kondisi Provinsi Kalimantran Utara sebagai landasan dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2027. Bab ini memuat analisis berbagai aspek pembangunan daerah, meliputi kondisi geografis, demografi, perekonomian, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, infrastruktur, daya saing daerah, tata kelola pemerintahan, serta capaian indikator makro dan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan perkembangan daerah hingga tahun 2025. Analisis tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan yang perlu ditangani pada tahun 2027. Substansi di bab ini menjadi acuan penting dalam penyusunan sasaran, prioritas, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan Tahun 2027 sekaligus sebagai dasar untuk memastikan pencapaian target RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029 secara bertahap, terarah, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional maupun kebutuhan pembangunan daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Provinsi Kalimantan Utara terletak di bagian Utara Pulau Kalimantan dengan posisi antara 114°35’22”-118°03’00” Bujur Timur dan antara 1°21’36” – 4°24’55” Lintang Utara. Provinsi ini secara geostrategis berada di perbatasan negara, sehingga memiliki posisi strategis dalam pertahanan dan keamanan negara. Provinsi ini juga berada di jalur pelayaran Alur Laut Kepulauan Indonesia (*Archipelagic Sea Lane Passage*) yang merupakan pintu keluar/outlet ke Asia Pasifik.

Kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari wilayah pegunungan dan wilayah kepulauan. Pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Utara terletak di Kabupaten Nunukan, Bulungan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Jumlah pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Utara adalah 196 pulau dengan luas total mencapai 3.597 Km^2. Pulau-pulau terbesar diantaranya yaitu Pulau Tarakan (249 Km^2), Pulau Sebatik (245 Km^2), Pulau Nunukan (233 Km^2), dan Pulau Tanah Merah (352 Km^2). Provinsi ini memiliki garis pantai sepanjang 3.955 km, yang meliputi 908 km (23%) garis pantai daratan, dan 3.047 Km (77%) garis pantai kepulauan.

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara adalah 70.101 Km^2, dengan lautan yang memiliki luas 11.579 Km^2 atau 13 persen dari luas wilayah total. Provinsi Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan negara Malaysia pada negara bagian Sabah di sebelah utara dan Sarawak di sebelah barat. Sementara sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Berau, Kutai Timur dan Kutai Barat (Provinsi Kalimantan Timur).

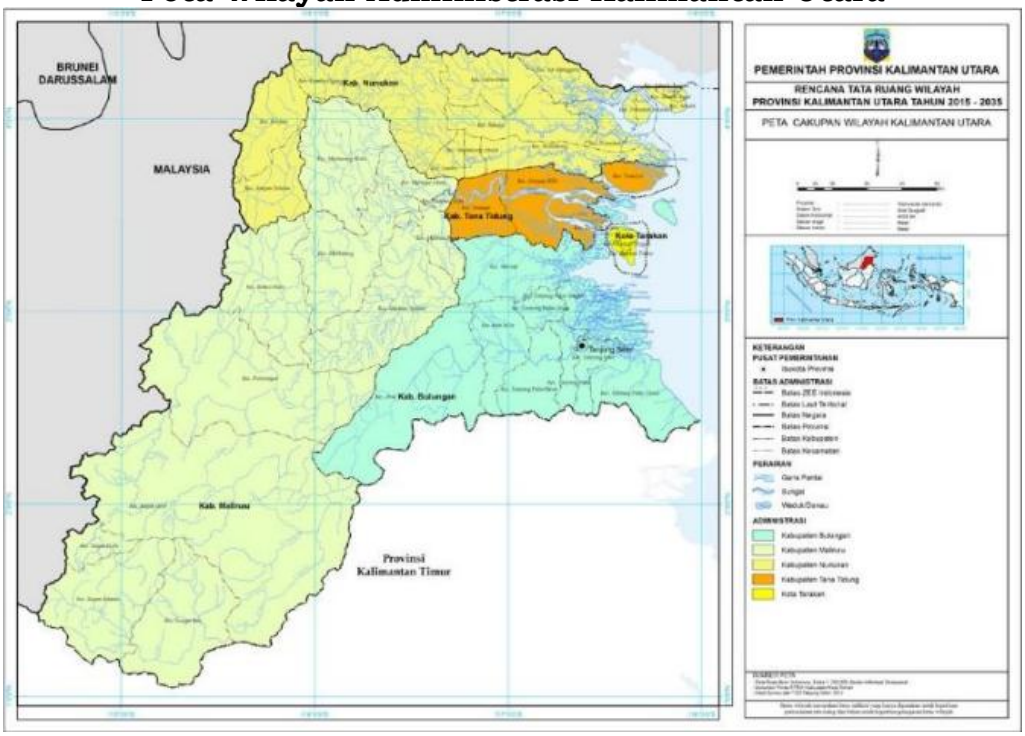
Tabel 2.1
Ibukota, Luas, Jumlah Kecamatan, dan Jumlah Desa
Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas (km^2)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
Malinau	Malinau Kota	38.902	15	109
Bulungan	Tanjung Selor	13.880	10	81
Tana Tidung	Tideng Pale	3.504	5	32
Nunukan	Nunukan	13.564	21	240
Tarakan	Tarakan	251	4	20
Kalimantan Utara	Bulungan	70.101	55	482

Sumber: BPS Kalimantan Utara, 2025

Secara administrasi wilayah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 kabupaten/kota dengan luas daratan masing-masing kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Malinau 38.902 km^2, Kabupaten Bulungan 13.880 km^2, Kabupaten Tana Tidung 3.504 km^2, Kabupaten Nunukan 13.564 km^2, dan Kota Tarakan 251 km^2. Selain itu, terdapat 196 pulau yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, yang sekitar 58,67 persen pulau diantaranya terdapat di Kabupaten Bulungan.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kalimantan Utara



Sumber: Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 2023-2042

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam suatu daerah sangat bergantung pada kondisi geografis, dan iklim wilayahnya. Sumber daya alam tersebut, selanjutnya menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan ekonomi, dan lebih lanjut lagi mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Namun demikian, dalam mengelola pemanfaatannya, tetap harus memperhatikan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan, dengan harapan ketahanan ekologi tetap terjaga dan perekonomian dapat berjalan.

Posisi geografis dan kondisi iklim menjadikan ketersediaan sumber daya alam yang beragam di Provinsi Kalimantan Utara. Keberagaman tersebut mencakup sumber daya alam hayati dan non hayati, potensi sumber daya kelautan dan kepesisiran, serta pariwisata berbasis alam. Berikut disajikan terkait potensi sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Utara.

1. Hutan

Kalimantan Utara memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 6631/MenLHK-PKTL/KUH/PIA.2/10/ 2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara, luas kawasan hutan yaitu sekitar 5.657.120,14 ha. Luasnya kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara merupakan potensi yang sangat besar bagi pemerintah Kalimantan Utara dalam pengelolaan hutan.

Tabel 2.2
Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

No.	Kabupaten/ Kota	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan						
		Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi dapat dikonversi	Areal Penggunaan Lain	Jumlah Luas Hutan dan Perairan
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	Malinau	696.642,58	988.017,02	1.545.892,31	375.548,72	30.174,11	324.691,48	3.636.274,74
2	Bulungan	205.594,03	-	465.097,91	272.791,71	5.596,71	429.203,18	949.080,36
3	Tana Tidung	-	-	9.084,28	153.005,90	9.678,05	169.530,96	171.768,23
4	Nunukan	150.459,78	284.073,98	169.713,70	274.082,76	14.598,87	461.421,55	892.929,09
5	Tarakan	7.067,72	-	-	-	-	17.282,89	7.067,72
Provinsi Kalimantan Utara		**1.059.764,11**	**1.272.092,00**	**2.189.788,20**	**1.075.429,09**	**60.047,74**	**1.402.131,06**	**5.657.120,14**

Sumber: RPJPD Kalimantan Utara 2025-2045

Pemerintah menetapkan HL, HK, HP, dan HPT sebagai hutan tetap yang hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan kehutanan atau lewat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). HPK dan Area Penggunaan Lain (APL) dapat dicadangkan untuk kegiatan pemanfaatan lain, misalnya pertanian dan perkebunan yang kewenangan pelepasan kawasan ada di menteri untuk HPK dan bupati untuk APL. Hal tersebut terkait dengan rencana pengelolaan kawasan perbatasan, pengelolaan kawasan lindung, dan pengelolaan kawasan budidaya yang termasuk ke dalam ruang lingkup program-program kegiatan *Heart of Borneo* (*HoB)* atau Kawasan Jantung Borneo.

Kabupaten Malinau merupakan kabupaten terluas baik dilihat dari wilayah maupun kawasan hutan. Hutan Produksi Terbatas merupakan kawasan hutan yang paling luas di antara bentuk kawasan hutan lainnya yaitu 1.545.892,31 ha. Wilayah dengan kawasan hutan paling kecil yaitu Kota Tarakan dengan hutan lindung seluas 7.067,72 ha. Hutan Suaka Alam dan Pelestarian Alam yang dimaksud merupakan Kawasan Konservasi Taman Nasional Kayan Mentarang seluas 1.272.092,00 ha yang terdapat di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Kawasan konservasi tersebut merupakan wilayah pemangkuan pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Dominasi wilayah hutan di Provinsi Kalimantan Utara, menjadikan hutan memiliki banyak potensi dan fungsi secara ekonomis melalui hasil hutan dan ekologis melalui jasa ekosistem. Secara ekonomis, hasil pemanfaatan hutan di Provinsi Kalimantan Utara dapat berupa produksi hutan kayu dan non kayu. Produksi hasil hutan kayu menunjukkan adanya jumlah yang fluktuatif dengan tren yang menurun. Berdasarkan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (2024), pada tahun 2024, terdapat 7 perizinan berusaha pengelolaan hasil hutan (PBPHH) yang aktif dari 31 PBPHH yang tersedia. Sedangkan, produksi hutan non kayu dapat berupa stok cadangan karbon, jasa ekosistem, dan produk kehutanan berupa tanaman obat, madu, ekstrak tanaman dan lain-lain yang secara keseluruhan belum dapat diidentifikasi secara kuantitatif. Hasil non kayu terus dikembangkan guna mengurangi pemanfaatan hasil kayu mengingat besarnya potensi hutan Kalimantan Utara yang sangat luas untuk menghasilkan karbon sebagai penyerap CO_2 dan dapat menstabilkan iklim dunia. Hal ini diharapkan dapat selaras dengan upaya dan peran sektor kehutanan di Indonesia dalam menghadapi perkembangan tantangan

kehutanan dan dampak perubahan iklim. Hal ini juga selaras dengan prinsip multi usaha kehutanan yang meliputi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan.

Tabel 2.3
Hasil Hutan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024

Keterangan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi hasil hutan kayu	m^3	1.375.690,56	1.484.807,43	1.453.642,67	1.636.055,00	1.546.911,62
Produksi kayu bulat	m^3	1.294.479,12	1.369.565,00	1.341.107,60	1.516.176,41	1.426.411,52
Produksi kayu olahan	m^3	81.211,44	115.242,43	112.535,07	119.878,59	120.500,10

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dalam Sidara Cantik, 2025

Kemudian secara ekologis, hutan provinsi turut memiliki kontribusi terhadap lingkungan melalui jasa lingkungan dan wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan. Potensi jasa lingkungan tersebut meliputi penyerap dan penyimpan karbon, penyedia pangan, penyedia air, pengatur air, pengatur iklim, mitigasi bencana banjir, mitigasi bencana longsor, dan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Kontribusi jasa lingkungan dan wisata pada Provinsi Kalimantan Utara dapat dirincikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Luas Jasa Lingkungan berdasarkan Status Jasa di Provinsi Kalimantan Utara

Jasa Lingkungan	Luas Status Jasa Lingkungan (Ha)				
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Penyediaan pangan	156.444	4.409.511	2.199.845	225.795	3.126
Penyediaan air	13.820	2.410.609	3.274.129	895.208	400.954
Pengatur pemurnian air	3.986.374	1.709.005	540.191	723.686	35.466
Pengatur iklim	4.921.367	1.476.279	222.609	353.060	21.405
Mitigasi bencana banjir	5.391.297	1.164.455	324.638	97.488	16.844
Mitigasi bencana longsor	5.440.652	716.859	513.971	310.410	12.828
Mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan	3.953.559	2.132.002	692.890	185.839	30.432

Sumber: Dokumen Renja Folu NetSink Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 2.5
Jasa Wisata hutan di Provinsi Kalimantan Utara

A. KPPP 2 Bebatu dan sekitarnya **Tema: Wisata Minat Khusus**					
DTW Unggulan			**DTW Penunjang**		
No.	**Nama DTW**	**Lokasi**	**No.**	**Nama DTW**	**Lokasi**
1.	-	-	1.	Bekantan Mangrove Desa Sengkong	Kecamatan Sesayap Hilir
B. KPPP 3 Binusan dan sekitarnya **Tema: Wisata Alam**					
DTW Unggulan			**DTW Penunjang**		
No.	**Nama DTW**	**Lokasi**	**No.**	**Nama DTW**	**Lokasi**
1.	Kebun Raya dan Air Terjun Binusan	Kecamatan Nunukan	1.	Hutan Mangrove Belaga One	Kecamatan Nunukan Selatan
			2	Hutan Mangrove Sei Fatimah	Kecamatan Nunukan
C. KSPP 1 Tanjung Selor dan sekitarnya **Tema: Wisata Budaya dan Wisata Sungai**					
DTW Unggulan			**DTW Penunjang**		
No.	**Nama DTW**	**Lokasi**	**No.**	**Nama DTW**	**Lokasi**
1.	-	-	4.	Mangrove Ardimulyo Kecamatan Tanjung Palas Utara	
D. KSPP 2 Gunung Rian dan sekitarnya **Tema: Wisata Alam dan Budaya**					
DTW Unggulan			**DTW Penunjang**		
No.	**Nama DTW**	**Lokasi**	**No.**	**Nama DTW**	**Lokasi**
1.	-	-	1.	Hutan Mangrove Tideng Pale Timur	Kecamatan Sesayap
			2.	Ekowisata Kujau	Kecamatan Betayau
			3.	RTH Joesoef Abdullah	Kecamatan Sesayap
			4.	Hutan Pinus	Kecamatan Sesayap
E. KSPP 4 Long Bawan dan sekitarnya **Tema: Wisata Alam**					
DTW Unggulan			**DTW Penunjang**		
No.	**Nama DTW**	**Lokasi**	**No.**	**Nama DTW**	**Lokasi**
1.	Bukit Yuvai Semaring	Kecamatan Krayan	1.	-	-
F. KSPP 6 Setulang-Pulau Sapi dan sekitarnya **Tema: Wisata Budaya dan Alam**					
DTW Unggulan			**DTW Penunjang**		
No.	**Nama DTW**	**Lokasi**	**No.**	**Nama DTW**	**Lokasi**
1.	Hutan Adat Tane Olen	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	1.	-	-

Sumber: Dokumen Ripparda Provinsi Kalimantan Utara

Pemanfaatan sumber daya hutan pada hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi diharapkan dapat dirasakan bagi masyarakat dalam maupun sekitar kawasan hutan. Pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung, legalitas pemanfaatan akses oleh masyarakat setempat dapat didorong dengan percepatan legalitas Perhutanan Sosial. Pengelolaan Perhutanan Sosial, sebagai Program Prioritas Nasional, dilakukan dalam skema kelola kawasan, kelola lembaga, dan kelola sosial ekonomi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari. Kinerja kelola kawasan ditunjukkan dengan areal indikatif Persetujuan Perhutanan Sosial baru mencapai luasan 162.185 ha dari luasan PS Kalimantan Utara yaitu 522.418 Ha. Kinerja kelola lembaga ditunjukkan oleh masih terdapat 7 KTH yang belum diberikan akses legal dari total 97 KTH yang teregistrasi. Kelola sosial ekonomi masyarakat ditunjukkan dengan kurangnya sarana prasarana peningkatan ekonomi produktif masyarakat serta kurangnya pendampingan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pemanfaatan hutan sesuai peraturan yang berlaku menjadi hambatan utama bagi masyarakat tersebut untuk dapat mengelola hasil sumber daya hutan secara optimal.

2. Kelautan dan Perikanan

Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Utara merupakan laut sehingga mempunyai sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpahnya. Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sementara ini masih didominasi dengan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap dan budidaya setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Pendapatan dari sektor perikanan di Provinsi Kalimantan Utara cukup besar karena hasil produksi perikanan seperti kepiting, udang, dan ikan diekspor keluar negeri. Provinsi Kalimantan Utara dikenal sebagai salah satu daerah penghasil udang organik yang menjadi komoditas ekspor penting di Indonesia.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki wilayah pesisir yang panjang, dengan panjang garis pantai mencapai 3.995 km. Panjang garis pantai tersebut kurang lebih 0,5% dari panjang garis pantai Indonesia, yaitu sepanjang 81.000 km. Selain memiliki pesisir yang cukup panjang, Provinsi Kalimantan Utara juga memiliki wilayah perairan laut dengan potensi

sumber daya perikanan yang cukup besar. Provinsi Kalimantan Utara bersama dengan Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara berhadapan langsung dengan WPP 716 (Wilayah Pengelolaan Perikanan). Kawasan WPP 716 mempunyai potensi lestari sebesar 476.432,00 ton/tahun dan Provinsi Kalimantan Utara sementara ini baru dapat memanfaatkan sekitar 6% saja. Potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah utama yang menjadi hambatan peningkatan produksi perikanan laut adalah armada perikanan tangkap masih sangat terbatas (mayoritas berukuran <10 GT) dan pada tahun 2023 hanya ada satu kapal ikan dengan tonase 30 GT. Hal ini disebabkan belum adanya pelabuhan perikanan yang memadai, karena saat ini hanya ada pelabuhan perikanan pantai (PPP) sehingga tidak layak untuk pendaratan kapal ikan dengan tonase >30 GT. Sedangkan armada yang berukuran <10 GT hanya mampu menjangkau perairan laut tidak lebih dari 4 mil laut, sehingga potensi perikanan yang besar belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Selain perikanan tangkap laut, juga memiliki perairan umum (perikanan tangkap di perairan umum), yaitu sungai dan danau yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menangkap ikan. Namun demikian, hasil tangkapan dari perairan umum memang tidak sebesar hasil perikanan tangkap laut. Meskipun demikian, perairan umum masih potensial untuk dikembangkan secara proporsional, sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi perikanan terutama perikanan tangkap. Berikut data produksi dan nilai produksi perikanan tangkap dengan capaian terakhir tahun 2024.

Tabel 2.6
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Penangkapan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Tahun	Perikanan Tangkap Laut		Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan		Perikanan Budidaya	
	Volume (Ton)	Nilai (Juta Rp)	Volume (Ton)	Nilai (Juta Rp)	Volume (Ton)	Nilai (Juta Rp)
2020	25.230,04	775.771,13	574,30	21.892	536.897,93	1.890.136,36
2021	33.151,95	890.698,08	546,59	20.558,44	642.010,36	2.052.148,37
2022	29.709,68	807.578,65	587,30	24.032,75	803.336,59	3.236.732,17
2023	31.789,24	1.030.027,85	745,87	31.156,96	981.131,02	2.874.364,32
2024	23.509,98	796.801,53	882,48	38.663,44	873.223,40	2.294.414,52

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2025 dan 2026

Dalam lima tahun terakhir, sektor perikanan di Kalimantan Utara menunjukkan dinamika yang mencerminkan perubahan struktural dalam kontribusi sub-sektor perikanan tangkap dan budidaya. Perikanan tangkap

laut mengalami fluktuasi, dengan volume tertinggi pada 2021 sebesar 33.151,95 ton, namun menurun drastis pada 2024 menjadi 23.509,98 ton. Meskipun sempat meningkat dari segi nilai ekonomi hingga mencapai Rp1.030 miliar pada 2023, penurunan volume pada 2024 turut menekan nilai menjadi Rp796,80 miliar. Sementara itu, perikanan tangkap di perairan umum daratan menunjukkan tren positif, baik dari sisi volume maupun nilai, yang mengindikasikan potensi perairan darat semakin dioptimalkan sebagai alternatif sumber daya perikanan. Hal ini penting karena menunjukkan upaya diversifikasi sumber daya perikanan dalam menghadapi tantangan di laut seperti overfishing dan degradasi habitat.

Perikanan budidaya tampil sebagai sektor yang paling dominan dan stabil dalam menyokong ketahanan pangan dan ekonomi perikanan di Kalimantan Utara. Volume produksi budidaya meningkat tajam dari 536.897,93 ton pada 2020 menjadi puncaknya 981.131,02 ton pada 2023, meskipun sedikit menurun pada 2024. Dari sisi nilai, sektor ini mencapai angka tertinggi pada 2022 sebesar Rp3.236,73 miliar, menunjukkan tingginya permintaan pasar terhadap produk budidaya. Penurunan pada 2023 menjadi Rp2.874,36 miliar dapat menjadi sinyal adanya tantangan dalam efisiensi produksi atau akses pasar. Namun pada tahun 2024 sedikit mengalami peningkatan kembali menjadi Rp2.294.41 miliar. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa perikanan budidaya memiliki peran strategis yang semakin besar dalam pembangunan ekonomi biru di Provinsi Kalimantan Utara, serta menjadi potensi andalan dalam menghadapi tekanan terhadap sumber daya alam laut dan perairan daratan.

Namun demikian, dalam pengembangan perikanan budidaya, juga bukan tanpa tantangan dan hambatan. Beberapa permasalahan utama dalam pengembangan perikanan budidaya di Provinsi Kalimantan Utara diantaranya, seperti keterbatasan bibit baik untuk bibit rumput laut, ikan, maupun benur udang. Sedangkan, untuk budidaya ikan dan udang masalah lainnya ada pakan ikan/udang dan status lahan budidaya khususnya untuk tambak yang mayoritas berada pada kawasan hutan, baik HK (hutan produksi), APL (area penggunaan Lain), maupun HPK (Hutan Produksi Konversi).

3. Pesisir

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, garis pantai dan wilayah laut 12 mil dengan panjang garis pantai 3.519,19 km dan batas wilayah laut 12 mil dengan luas 7.316,43 km^2 atau setara dengan 731.642,77 ha. Area tambak dengan luas 116.465,37 Ha. Area tambak di Provinsi Kalimantan Utara tersebar di Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung. Adapun untuk Kabupaten Malinau tidak memiliki luasan tambak di wilayah pesisir. Luasan area tambak terluas di Provinsi Kalimantan Utara berada di Kabupaten Nunukan yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Area Tambak di Wilayah Pesisir pada Setiap Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara

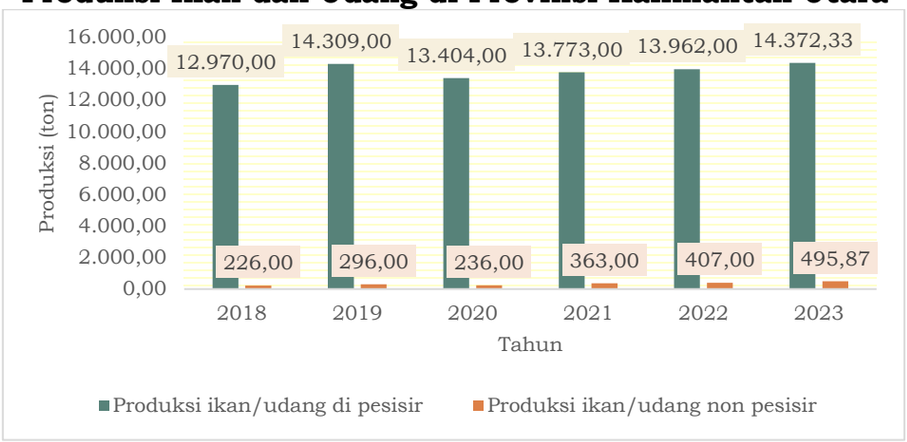
No.	Kabupaten/Kota	Luas Tambak (Ha)
1	Tarakan	599,97
2	Bulungan	66.619
3	Nunukan	12.285,40
4	Tana Tidung	36.961
Provinsi Kalimantan Utara		116.465,37

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Kawasan pesisir di Provinsi Kalimantan Utara area dengan luasan tambak sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah merupakan kawasan penyumbang produksi perikanan yang cukup besar. Produksi perikanan budidaya khususnya ikan bandeng dan udang yang dibudidayakan di kawasan pesisir mencapai 14.372,33 ton pada data termutakhir tahun 2023.

Berdasarkan data dari BPS, menunjukkan bahwa produksi perikanan budidaya di Provinsi Kalimantan Utara sebagian besar merupakan hasil budidaya di tambak (kawasan pesisir) yaitu mencapai 96-99% dari total produksi ikan/udang budidaya atau 32-34% dari total produksi ikan/udang diluar dari rumput laut. Dengan demikian kawasan pesisir dapat dikatakan sebagai kawasan utama atau tulang punggung dalam produksi perikanan budidaya khususnya ikan bersirip dan udang. Namun demikian, produktivitas budidaya ikan/udang di tambak di Provinsi Kalimantan Utara masih rendah (rata-rata 95,84 kg/ha/tahun). Peningkatan produktivitas tambak di Provinsi Kalimantan Utara akan dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir, mengingat hasil produksinya mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan sudah dikenal di pasar internasional sebagai produk udang organik.

Gambar 2.2
Produksi Ikan dan Udang di Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2025

4. Pertanian

Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan luas lahan pertanian yang cukup besar. Ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor penunjang dalam mengembangkan pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peran vital dalam ekonomi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Atas dasar tersebut, kegiatan pertanian di provinsi ini harus didorong untuk berkembang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep pengembangan dan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumber daya alam daerah secara berkelanjutan, yaitu dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial secara seimbang.

Dalam pembangunan pertanian sebagai pilar ekonomi masyarakat, maka harus memperhatikan atau menetapkan komoditas unggulan yang ramah lingkungan dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pertanian tanaman pangan yang potensial untuk dikembangkan meliputi padi dan palawija (jagung, kacang-kacangan), ubi-ubian, dan hortikultura (sayuran dan buah-buahan). Beras merupakan bahan makanan pokok masyarakat, sehingga untuk dapat mencukupi kebutuhan beras secara aman, maka tanaman padi mendapat skala prioritas dalam pengembangan dan peningkatan produksi untuk dapat mengimbangi pertambahan penduduk agar tidak terjadi bahaya kelaparan. Namun demikian, Provinsi Kalimantan Utara) sampai saat ini belum mampu swasembada beras dan masih harus

mendatangkan beras dari luar wilayah terutama dari Pulau Jawa untuk mencukupi kebutuhan beras penduduk.

Tabel 2.8
Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penangkapan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025

Komponen	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Provinsi Kalimantan Utara	Luas Panen Padi (Ha)	8.881	8.604	6.500	8.282	10.210
	Produksi Padi (Ton)	29.967	30.533	23.602	30.080	38.038
	Produktivitas (Ton/Ha)	3,37	3,55	3,63	3,63	3,72

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2025 dan 2026

Luas panen padi mengalami fluktuasi sejak tahun 2021 sampai 2025, dimana pada tahun 2021 yaitu sebesar 8.881 Ha dan menurun hingga tahun 2023 menjadi 6.500 Ha, namun pada tahun berikutnya kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 10.210 Ha pada tahun 2025. Produksi padi juga demikian yang mengalami fluktuasi sejak tahun 2021 hingga tahun 2025, dengan capaian terendah yaitu pada tahun 2023 yang hanya 23.602 Ton dan capaian tertinggi pada tahun 2025 yang mencapai 38.038 Ton. Sedangkan untuk produktivitas mengalami peningkatan dari yang semula 3,37 Ton/Ha pada tahun 2021 dan meningkat hingga tahun 2025 menjadi 3,72 Ton/Ha. Kondisi ini disebabkan semakin menurunnya luas lahan pertanian di Provinsi Kalimantan Utara akibat alih fungsi lahan. Lahan pertanian berkelanjutan harus dijaga secara berkesinambungan di Provinsi Kalimantan Utara.

5. Pertambangan

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi yang baik dalam bidang pertambangan. Hal ini tentunya akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pertambangan. Kalimantan utara juga memiliki lahan yang cukup luas, yang dapat dilakukannya kegiatan pertambangan.

PDRB ADHB pada sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2021 sebesar 30.397,76 Miliar rupiah dan meningkat hingga tahun 2023 menjadi 50.337,80 Miliar rupiah, namun pada tahun berikutnya kembali menurun hingga menjadi 41.873,08 Miliar rupiah pada tahun 2025. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian di Provinsi Kalimantan Utara (Miliar Rupiah) Tahun 2021-2025

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertambangan minyak, gas dan panas bumi	3.396,76	4.222,09	3.842,24	3.481,03	3.362,66
2	Pertambangan batubara dan lignit	20.174,15	38.752,99	38.985,20	30.661,72	30.010,92
3	Pertambangan bijih logam	2.057,67	2.300,66	2.231,18	2.139,53	2.529,80
4	Pertambangan dan penggalian lainnya	4.769,18	4.924,66	5.279,19	5.881,71	5.969,69
Pertambangan dan Penggalian		**30.397,76**	**50.200,40**	**50.337,80**	**42.163,99**	**41.873,08**

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2026

Aktivitas pertambangan yang dilakukan antara lain pertambangan minyak gas dan panas bumi, pertambangan batu bara dan lignit, pertambangan biji logam, pertambangan dan penggalian lainnya. Potensi terbesar berada pada lapangan usaha untuk pertambangan batu bara dan lignit, dimana pada tahun 2025 nilainya mencapai 30.010,92 Miliar rupiah.

6. Energi

Energi memiliki peran penting dan strategis dalam mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Kenaikan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi juga berimplikasi pada peningkatan kebutuhan energi sehingga pentingnya pengelolaan energi yang optimal dan efisien secara berkelanjutan dan bertanggungjawab.

Pada skala nasional, kondisi ketersediaan energi digambarkan dalam indeks ketahanan energi yang diukur melalui indikator 4A yaitu: *availability* (ketersediaan secara fisik), *accessibility* (kemudahan dalam mendapatkannya), *affordability* (keterjangkauan terhadap harganya), dan *acceptability* (bagaimana kualitas yang dapat diterima) yang juga secara umum digambarkan melalui elemen bauran energi serta keberlanjutan sistem penyediaan-permintaan energi yang ada. Pada tahun 2024, indeks ketahanan energi nasional sesuai dengan aspek penilaian dapat ditunjukkan sebagaimana berikut.

Tabel 2.10
Indeks Ketahanan Energi Nasional Tahun 2020-2024

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks	69,10	79,83	78,58	88,99	80,96

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian ESDM, 2025

Tabel 2.11
Penilaian Indeks Ketahanan Daerah per Aspek

Aspek	Ketersediaan	Aksesibilitas	Pengembangan Teknologi dan Efisiensi (Keterjangakauan)	Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial (Penerimaan)
Bobot (persen)	40,65	26,12	19,1	14,13
Parameter	• Diversifikasi energi • Potensi energi baru dan terbarukan	• Kehandalan infrastruktur BBM • Kehandalan infrastruktur Gas • Kehandalan infrastruktur LPG Kehandalan infrastruktur listrik • Optimalisasi pemanfaatan batu bara • Penyiapan infrastruktur EBT	• Efiesiensi penggunaan energi • Produktivitas energi sektoral • Harga BBM • Tarif listrik • Harga LPG	• Emisi Gas Rumah Kaca

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian ESDM

Penyediaan energi di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat dari Intensitas Energi Primer yang menjadi ukuran besaran energi primer yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output ekonomi seperti Pendapatan Domestik Bruto. Intensitas Energi Primer di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.12
Intensitas Energi Primer Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
SBM/Rp Miliar	38,988	34,628	34,088	45,624	Belum rilis

Sumber: Proyeksi Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara

Intensitas energi primer di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa provinsi membutuhkan banyak energi untuk menghasilkan satu unit output ekonomi, yang dapat diartikan ada penggunaan energi yang tidak efisien, atau ada sektor yang sangat bergantung pada energi.

Secara lebih rinci kondisi penyediaan energi di Provinsi Kalimantan Utara dapat digambarkan melalui kondisi kelistrikan dan kondisi potensi air dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara. Berikut adalah data energi listrik dan air yang tersedia:

a. Listrik

Listrik merupakan barang kebutuhan utama manusia yang berbahan dasar dari barang tambang. Aktivitas manusia sangat bergantung pada ketersediaan listrik, khususnya di zaman serba modern ini. Biasanya pembangkit listrik menggunakan energi alternatif seperti angin, air dan cahaya matahari. Namun, ada pula barang tambang yang berfungsi sebagai pembangkit listrik, yaitu batu bara.

Ketersediaan tenaga listrik akan memicu tumbuhnya industri turunan dan pendukung dari industri pengolahan mineral. Misalnya nikel, akan memicu industri baja tahan karat (*stainless steel*) dan industri pendukungnya seperti industri gas, industri pengolahan air, industri listrik dan industri konstruksi lainnya. Efek berantai akan membuat konsumsi dalam wilayah tersebut meningkat sehingga rencana investasi lainnya akan lebih *feasible*. Efek berantai ini akan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi dan PDRB.

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, pada tahun 2024 Kota Tarakan memiliki jumlah pelanggan listrik terbesar di Provinsi Kalimantan Utara yaitu 35,96 persen dari total jumlah pelanggan di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Bulungan memiliki jumlah pelanggan listrik terbesar kedua yaitu sebesar 26,10 persen. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Nunukan yang memiliki jumlah pelanggan listrik sebesar 23,84 persen. Sedangkan Kabupaten Tanah Tidung memiliki jumlah pelanggan listrik paling rendah yaitu hanya 3,51 persen.

Tabel 2.13
Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Malinau	18.039	19.298	20.862	23.031	28.103
Bulungan	44.029	47.861	53.670	56.718	59.851
Tana Tidung	6.574	6.784	7.235	7.635	-
Nunukan	44.655	45.306	49.517	51.801	55.528
Tarakan	66.930	70.524	74.312	78.139	81.537
Kalimantan Utara	**180.227**	**189.773**	**205.596**	**217.324**	**-**

Sumber: BPS, Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2026

b. Air

Di Provinsi Kalimantan Utara, air menjadi bagian dari kekayaan alam dan sebagai sumber mata pencaharian yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Air memiliki banyak manfaat atau kegunaan bagi kelangsungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan dan tentunya semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini.

Energi air adalah satu dari lima sumber terbesar energi terbarukan. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik dan pembangkit listrik tenaga air tanpa meninggalkan emisi gas rumah kaca seperti yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Berbeda dengan sumber energi terbarukan lainnya air akan terus menghasilkan tenaga non-stop dan ketersediaannya terus dihasilkan oleh adanya siklus hidrologi. PLTMH (Pembangkit listrik tenaga mikro hidro) di Desa Long Berini, Kecamatan Bahan Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dengan kapasitas 26 kW menjadi salah satu contoh diversikasi pemanfaatan sumber daya air menjadi energi baru terbarukan sekaligus sebagai energi alternatif pendukung dalam pemenuhan kebutuhan energi di Provinsi Kalimantan Utara.

7. Pariwisata

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi perekonomian wilayah. Eksistensinya mampu menjadi generator sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan penyedia akomodasi. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sektor pariwisata turut berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian wilayah adalah melalui besar jumlah kunjungan maupun jumlah wisatawan, serta kontribusinya terhadap PDRB. Masing-masing kabupaten/kota memiliki obyek wisata andalan dan yang potensial berkembang di masa depan. Berikut merupakan tabel perwilayahan destinasi pariwisata, kawasan pengembangan pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Tabel 2.14
Perwilayahan Pariwisata di Provinsi Kalimantan Utara

DESTINASI PARIWISATA PROVINSI (DPP)	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI (KPPP)	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)
DPP 1 Bulungan, Tana Tidung, dan Tarakan DPP 2 Nunukan dan Malinau	KPPP 1 Pantai Tana Kuning dan sekitarnya KPPP 2 Bebatu dan sekitarnya; KPPP 3 Binusan dan sekitarnya; KPPP 4 Sei Menggaris dan sekitarnya; KPPP 5 Lumbis Pansiangan dan sekitarnya;dan KPPP 6 Long Alango-Long Pujungan dan sekitarnya;	KSPP 1 Tanjung Selor dan sekitarnya KSPP 2 Gunung Rian dan sekitarnya; KSPP 3 Kota Tarakan dan sekitarnya; KSPP 4 Pulau Sebatik dan sekitarnya; KSPP 5 Long Bawan dan sekitarnya; dan KSPP 6 Setulang-Pulau Sapi dan sekitarnya

Sumber: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Utara

Sementara itu, jumlah kunjungan wisatawan sepanjang tahun 2021 hingga 2025 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2021 yaitu berjumlah 810.039 orang dan mengalami kenaikan serta penurunan pada tahun berikutnya hingga menjadi 1.718.844 orang pada tahun 2025. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah Wisatawan Mancanegara (Wisman) pada tahun 2025 jauh lebih sedikit jika dibanding Wisatawan Nusantara (Wisnus) yang mencapai 1.698.620 orang.

Kunjungan wisatawan di Provinsi Kalimantan Utara dipengaruhi oleh pengembangan daya tarik destinasi, promosi pariwisata, kualitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif secara berkesinambungan. Peningkatan kunjungan wisatawan sangat penting untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata.

Tabel 2.15
Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021-2025

Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Wisatawan Mancanegara (Wisman)	408.371	592.888	520.906	988.946	20.224
Wisatawan Nusantara (Wisnus)	401.668	570.619	493.257	962.342	1.698.620
Jumlah Kunjungan Wisatawan	**810.039**	**1.163.507**	**1.014.163**	**1.951.288**	**1.718.844**

Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2026

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan adalah batas teratas dari pertumbuhan suatu populasi saat jumlah populasi tidak dapat didukung lagi oleh sarana, sumber daya dan lingkungan yang ada. Daya dukung lingkungan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan hasil atau produk di suatu daerah dari sumber daya alam yang terbatas dengan mempertahankan jumlah dan kualitas sumber dayanya. Sesuai dengan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa daya dukung lingkungan tidak hanya diukur dari kemampuan lingkungan dan sumber daya alam dalam mendukung kehidupan manusia, tetapi juga dari kemampuan menerima beban pencemaran dan bangunan. Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi dua komponen yaitu kapasitas penyediaan (*supportive capacity*) dan kapasitas tampung limbah (*assimilative capacity*). Kapasitas penyediaan (*supportive capacity*) adalah kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan makhluk hidup secara optimum dalam periode waktu yang panjang. Adapun kapasitas tampung limbah (*assimilative capacity*) adalah kemampuan lingkungan untuk menampung/menyerap zat energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan di dalamnya. Berdasarkan UU 32/2009, *supportive capacity* merupakan daya dukung lingkungan hidup.

1. Penyediaan Air

Analisis ambang batas dan status DDLH penyedia air secara kuantitatif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: perhitungan ketersediaan air, perhitungan kebutuhan air untuk lahan dan domestik, perhitungan ambang batas penduduk, serta penentuan status DDLH penyedia air di setiap grid. Daya dukung dan daya tampung air di Provinsi Kalimantan Utara merupakan agregasi nilai DDDTLH seluruh grid-grid pada wilayah yang telah dikaji jasa ekosistemnya/jasa lingkungannya, dan teridentifikasi bahwa untuk daya dukung dan daya tampung penyedia air "Belum Terlampaui".

Tabel 2.16
Status Daya Dukung Penyediaan Air Provinsi Kalimantan Utara

Ketersediaan (m^3/tahun)	Kebutuhan Air Total (m^3/tahun)	Indikasi Status	Belum Terlampaui		Terlampaui	
			(ha)	(%)	(ha)	%
91.170.199.901,80	5.024.576.396,36	Belum Terlampaui	6.839.654,86	97,6	170.463,14	2,4

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029

Berdasarkan Lampiran I Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.146/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2023 Tanggal 17 Februari 2023 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, Provinsi Kalimantan Utara berada pada indikasi status belum terlampaui. Adapun luas areal yang status penyediaan airnya sudah terlampaui terhitung seluas 20.416,95 ha atau hanya sebesar 0,29% dari total luas wilayah provinsi.

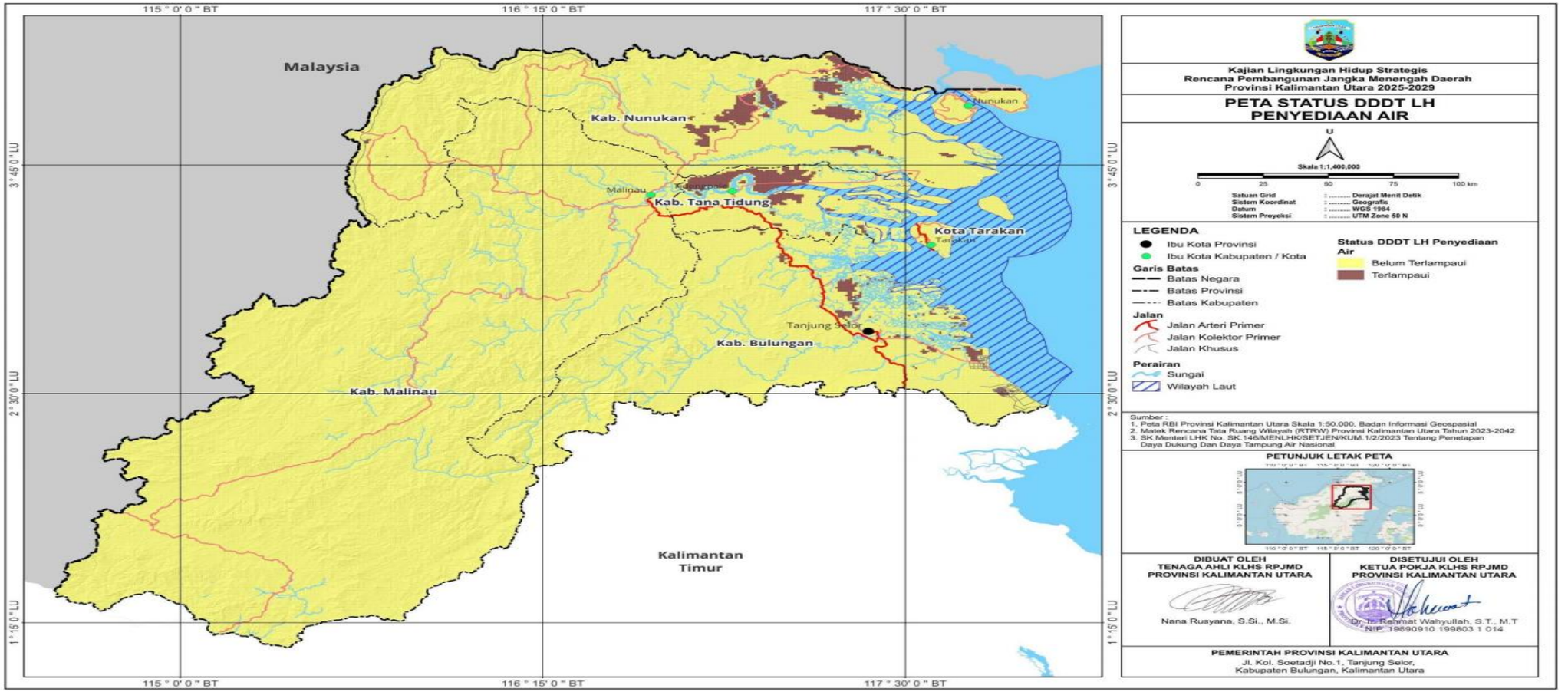
Tabel 2.17
Status Daya Dukung Penyediaan Air Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Luas Menurut Status (Ha)		Luas (Ha)
		Belum Terlampaui	Terlampaui	
1	Bulungan	1.256.705	31.505	1.288.210
2	Malinau	3.954.814	1.132	3.955.946
3	Nunukan	1.347.571	96.102	1.443.673
4	Tana Tidung	255.342	42.207	297.549
5	Kota Tarakan	24.655	86	24.741
Luas Total		6.760.475	249.643	7.010.118
Persentase (%)		**97,6**	**2,4**	

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029

Hasil analisis spasial dengan penutupan lahan tahun 2021, luas penyedia air yang terlampaui bertambah menjadi 249.643 ha atau sebesar 3,56%. Sedangkan luas penyedia air yang belum terlampaui yaitu 6.760.475 ha atau sebesar 96,44%. Daerah dengan luas penyedia air belum terlampaui yang paling besar terdapat di Kabupaten Malinau. Berikut disajikan distribusi dari status daya dukung daya tampung penyedia air di Provinsi Kalimantan Utara.

Gambar 2.3
Status Daya Dukung Daya Tampung Penyedia Air Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara

2. Penyediaan Pangan

Penentuan status DDLH indikatif jasa lingkungan penyedia pangan dilakukan melalui perhitungan ambang batas penduduk. Ambang batas penduduk adalah jumlah penduduk maksimal yang dapat dilayani oleh ketersediaan jasa lingkungan, dan status DDLH indikatif dapat diketahui dengan membandingkan antara ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk pada waktu tertentu.

Perhitungan DDLH penyedia pangan dengan pendekatan kuantitatif dilakukan melalui perhitungan selisih dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing jasa ekosistem. Perhitungan DDLH penyedia pangan dilakukan pada peta dengan resolusi 30”x30” (±0.9 km x 0.9 km) dalam bentuk grid, sehingga pada setiap luasan area tersebut, dapat diketahui jumlah kebutuhan pangan, ketersediaan pangan, ambang batas penduduk, dan status DDLH-nya.

Ambang batas penduduk diperoleh melalui pembagian ketersediaan bahan pangan atau energi pangan dengan kebutuhan energi pangan per kapita. Hasil perhitungan DDDTLH penyedia pangan menunjukkan bahwa jika nilai Daya Dukung Daya Tampung pada grid ke-I bernilai positif, maka menunjukkan bahwa Daya Dukung Daya Tampung pada grid yang dihitung masih mampu mendukung kebutuhan pangan pada wilayah grid tersebut. Namun, jika nilai Daya Dukung Daya Tampung pada grid ke-I bernilai negatif, maka daya dukung dan daya tampung penyedia pangan pada wilayah grid telah melampaui ambang batasnya. Daya dukung dan daya tampung penyedia pangan di Provinsi Kalimantan Utara merupakan agregasi nilai DDDTLH seluruh grid-grid pada wilayah yang telah dikaji jasa ekosistemnya/jasa lingkungannya, dan teridentifikasi bahwa untuk daya dukung dan daya tampung penyedia pangan “Belum Terlampaui”.

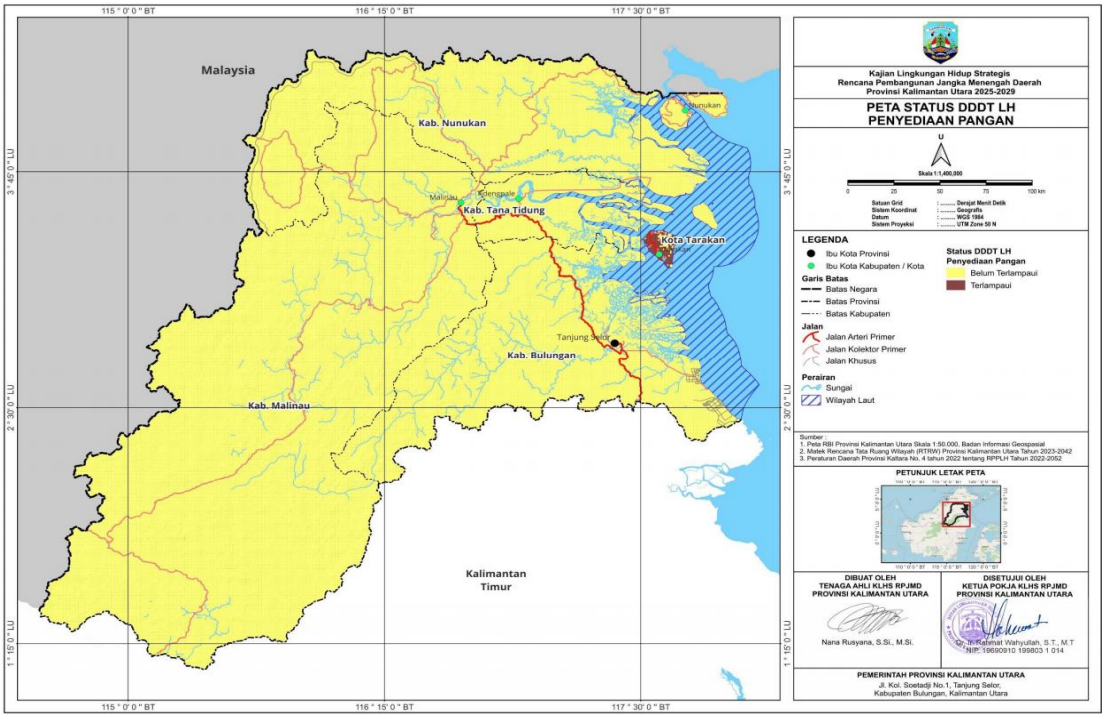
Tabel 2.18
Status Daya Dukung Penyediaan Pangan di Provinsi Kalimantan Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas Menurut Status (Ha)		Luas (Ha)
		Belum Terlampaui	Terlampaui	
1	Bulungan	1.370.995	-	1.370.995
2	Kota Tarakan	4.765	19.718	24.483
3	Malinau	3.902.853	-	3.902.853
4	Nunukan	1.421.956	647	1.422.602
5	Tana Tidung	289.186	-	289.186
Luas Total		**6.989.753**	**20.364**	**7.010.118**
Persentase (%)		**99,71**	**0,29**	

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2030

Status daya dukung penyediaan pangan di Kota Tarakan sebagian besar sudah terlampaui. Namun secara keseluruhan, pada tahun 2021 hanya 0,29% dari wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang daya dukung penyediaan pangannya sudah terlampaui dan lokasinya sebagian besar berada di Kota Tarakan seluas 19.718 ha dan di Kabupaten Tana Tidung seluas 647 ha. Berikut disajikan distribusi dari status daya dukung daya tampung penyedia pangan di Provinsi Kalimantan Utara.

Gambar 2.4
Status Daya Dukung Daya Tampung Penyedia Pangan di Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

1. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks ketahanan pangan yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan sub sistem yang membentuk sistem ketahanan pangan.

Indeks ketahanan pangan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan intervensi dan lokus program penguatan ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian merupakan penyesuaian dari indeks yang telah ada berdasarkan ketersediaan data tingkat kabupaten/kota. Sembilan Indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Pilar pertama yaitu ketersediaan yang perlu dipenuhi adalah ketersediaan pangan domestik, cadangan pangan, dan kegiatan ekspor-impor terkait pangan. Pada pilar kedua yaitu keterjangkauan, indikator yang perlu dipenuhi yaitu terkait distribusi, stabilitas harga, distribusi logistik, daya beli masyarakat, dan manajemen stok. Terakhir yaitu pilar pemanfaatan pangan yang perlu dipenuhi adalah perbaikan pola konsumsi, gizi, dan keamanan mutu pangan.

Hasil perhitungan IKP berdasarkan pada 9 indikator untuk wilayah kabupaten dan 8 indikator untuk wilayah kota dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang

berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah. IKP mencerminkan pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten kota. Indeks Ketahanan Pangan di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.19
Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Pangan				
	2021	2022	2023	2024	2025
Bulungan	77,19	77,00	77,11	76,61	70,81
Malinau	73,66	67,25	73,08	74,67	68,83
Nunukan	76,25	75,87	76,17	78,80	76,02
Tana Tidung	56,00	57,17	60,54	61,25	64,83
Kota Tarakan	82,02	77,90	86,06	87,53	72,89
Provinsi Kalimantan Utara	**73,02**	**71,04**	**74,59**	**75,77**	**72,55**

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2026

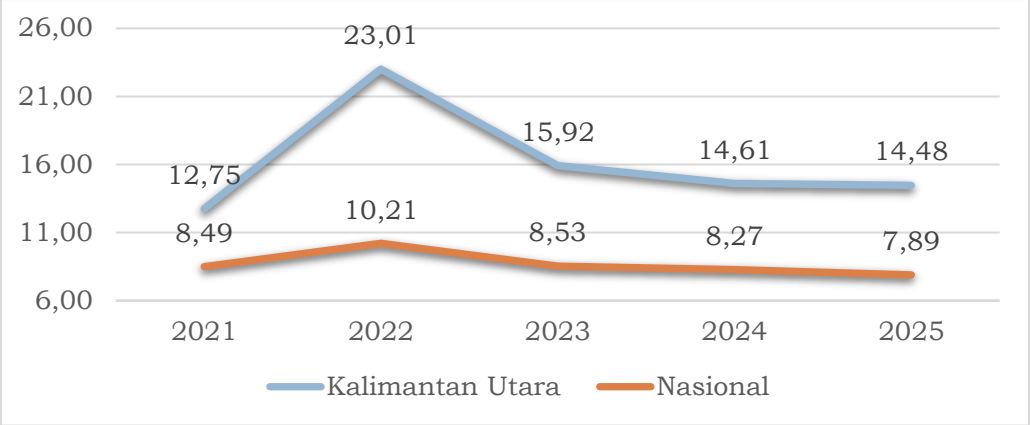
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Indeks Ketahanan Pangan di Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2021 sampai 2025 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2021 yaitu sebesar 73,02 dan berfluktuasi hingga tahun 2025 menjadi 72,55. Secara umum, Kota Tarakan memiliki nilai IKP yang lebih baik bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan wilayah dengan nilai IKP paling rendah berada di Kabupaten Tana Tidung. Nilai IKP kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan. Wilayah ini bergantung pada suplai pangan dari wilayah lain yang merupakan daerah sentra untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, secara keseluruhan dari nilai IKP yang diperoleh selama lima tahun berturut-turut menunjukkan bahwa Kalimantan Utara termasuk ke dalam kategori IKP sangat tahan.

2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat. *Undernourishment* berbeda dengan

malnutrition dan *undernutrition*, dimana *malnutrition* dan *undernutrition* adalah *outcome* terkait status gizi. Walaupun *undernourishment* adalah kondisi individu, namun karena pertimbangan konsep dan data yang tersedia, indikator ini hanya dapat diaplikasikan untuk mengestimasi pada level suatu populasi atau kelompok individu, bukan pada level individu itu sendiri, sehingga indikator ini tidak tepat digunakan untuk mengidentifikasi individu mana dari populasi tersebut yang mengalami *undernourished* (ketidakcukupan konsumsi pangan). Berikut disajikan capaian dari prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2021-2025.

Gambar 2.5
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2021-2025



Sumber: BPS RI, 2026

Capaian prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Kalimantan Utara mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2021 yaitu sebesar 12,75 dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 23,01, namun pada tahun berikutnya kembali menurun menjadi hanya 14,48 di tahun 2025. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Kalimantan Utara pada periode tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nasional, dimana pada tahun 2025 prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan nasional yaitu sebesar 7,89, sedangkan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun yang sama yaitu 14,48. Dengan kondisi tersebut, maka diperlukan upaya yang dapat memberikan intervensi dengan optimal terhadap penurunan prevalensi ketidakcukupan

konsumsi pangan di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya dalam memenuhi target nasional, sebesar 5% hingga tahun 2030.

3. Konsumsi Listrik Per Kapita

Kondisi kelistrikan ini dapat digambarkan melalui rasio elektrifikasi yang menunjukkan jumlah rumah tangga yang terjangkau jaringan kelistrikan. Lebih lanjut, Rasio elektrifikasi dihitung sebagai perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses listrik dengan total jumlah rumah tangga di wilayah tersebut.

Tabel 2.20
Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Utara 2021-2025

Nama Data	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Provinsi Kalimantan Utara	%	80,71	86,44	91,19	95,08	96,86

Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Rasio elektrifikasi Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 yaitu sebesar 80,71 persen dan mengalami peningkatan hingga tahun 2025 menjadi 96,86 persen. Tren peningkatan capaian kinerja selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara telah berjalan secara efektif dan berkesinambungan. Ke depan, peningkatan kinerja kuantitatif tersebut perlu diiringi dengan penguatan aspek kualitas layanan, tata kelola, serta pengawasan agar manfaat pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan oleh masyarakat.

Tabel 2.21
Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Utara 2021-2025

Kabupaten/Kota	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Bulungan	Persen	84,53	95,01	98,75	99,17	98,54
Malinau	Persen	75,56	79,63	84,25	88,72	87,98
Nunukan	Persen	71,00	75,51	83,65	91,40	96,04
Tana Tidung	Persen	75,13	79,05	83,99	90,06	94,59
Tarakan	Persen	88,44	93,05	96,38	98,58	99,59

Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan data tabel diatas, dijelaskan bahwa pada tahun 2025 Kabupaten Malinau masih memiliki rasio elektrifikasi terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, yaitu sebesar 87,98 persen, sedangkan Kota Tarakan pada tahun yang sama memiliki rasio elektrifikasi tertinggi yaitu sebesar 99,59 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa akses terhadap layanan energi kelistrikan masih belum merata. Berikut disajikan Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Utama di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

Tabel 2.22
Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Utama di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	Bukan Listrik
Malinau	88,78	10,79	0,43
Bulungan	99,11	0,89	-
Tana Tidung	94,46	5,54	-
Nunukan	98,52	1,48	-
Tarakan	99,84	-	0,16
Kalimantan Utara	**97,73**	**2,16**	**0,11**

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka, 2026

Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan memastikan akses listrik yang merata, termasuk di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dengan semakin meratanya akses listrik bagi masyarakat, diharapkan dapat menciptakan dampak ikutan yang positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Utara, seperti peningkatan produktivitas ekonomi, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat.

4. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Infrastruktur yang juga memiliki arti penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat adalah infrastruktur air minum. Jangkauan layanan infrastruktur air minum dapat dilihat melalui akses rumah tangga terhadap air minum layak. Air minum yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup

dengan layak. Berikut adalah capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.23
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025

Kabupaten	2021	2022	2023	2024	2025
Malinau	70,85	74,65	73,56	72,60	85,46
Bulungan	75,44	73,88	77,49	73,67	77,15
Tana Tidung	85,88	93,15	95,61	94,40	90,93
Nunukan	85,46	94,42	93,43	93,13	93,96
Tarakan	98,73	99,64	99,91	99,23	99,10
Kalimantan Utara	**86,80**	**89,96**	**90,19**	**89,42**	**91,59**

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka, 2026

Akses rumah tangga terhadap air minum layak di Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2021 sampai 2025 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dengan capaian terendah yaitu pada tahun 2021 yang hanya 86,80 persen dan capaian tertinggi pada tahun 2025 yang mencapai 91,59 persen. Selama periode tersebut terjadi peningkatan sebesar 4,79 persen.

Meski cenderung meningkat, namun upaya untuk meningkatkan cakupan layanan air minum yang layak bagi masyarakat perlu untuk dioptimalkan kembali di Provinsi Kalimantan Utara, dengan pertimbangan capaian yang masih belum memenuhi target yang ditetapkan nasional dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni sebesar 100%. Secara lebih khusus lagi, apabila ditinjau dari capaian kabupaten/kota, Kabupaten Malinau dan Bulungan perlu secara akseleratif meningkatkan capaian terhadap indikator ini. Ketercapaian pemenuhan terhadap indikator ini cukup memiliki urgensi yang tinggi bagi masyarakat, dengan pertimbangan kebutuhan air menjadi sangat vital bagi kehidupan dan lebih luas lagi bagi pembangunan daerah.

Akses terhadap air minum yang layak dan sistem pengolahan air limbah domestik yang memadai merupakan bagian penting dari pelayanan dasar bidang pekerjaan umum yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Pemenuhan

layanan ini diatur melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah provinsi bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan air minum dan pengelolaan air limbah domestik pada kawasan strategis provinsi dan lintas kabupaten/kota, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari serta menyediakan layanan pengolahan air limbah domestik di wilayahnya masing-masing. Namun hingga saat ini, capaian pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum di Provinsi Kalimantan Utara belum sepenuhnya optimal. Akses rumah tangga terhadap air minum layak dan aman masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah pedalaman dan kawasan perbatasan.

Demikian pula dengan penyediaan sistem pengolahan air limbah domestik, yang belum merata baik dari sisi cakupan maupun efektivitas pengelolaan limbah cair rumah tangga. Capaian akses air minum layak dan aman di Provinsi Kalimantan Utara masih berada di bawah rata-rata nasional, dan belum seluruh kabupaten/kota memiliki unit layanan pengelolaan air limbah domestik yang berfungsi secara optimal. Kondisi ini berimplikasi terhadap kesehatan lingkungan serta peningkatan risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan penyakit kulit. Peningkatan layanan layak yang dilakukan secara paralel dengan peningkatan layanan aman melalui penyediaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal untuk pengangkutan berkala setiap 3-5 tahun, serta pengelolaannya di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja regional atau di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Pemenuhan layanan dasar ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan yang sehat, berkelanjutan, serta berkontribusi langsung terhadap upaya pengurangan Tingk dan ketimpangan wilayah.

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan indikator yang menggambarkan kondisi pengelolaan lingkungan yang menjadi bahan informasi pendukung proses pengambilan kebijakan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks lingkungan hidup mencakup akumulasi dari tiga komponen yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas air laut, dan indeks kualitas tutupan lahan yang memiliki bobot nilai untuk setiap komponennya.

Tabel 2.24
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Utara

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
IKLH Kaltara	80,95	80,67	80,77	79,95	85,99

Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren fluktuatif pada periode tahun 2021-2025, dengan kecenderungan meningkat signifikan di tahun 2025. Walau demikian, pada tahun 2024 nilai IKLH Kalimantan Utara sempat mengalami penurunan ke 79,95. Hal ini menunjukkan kelestarian lingkungan di Provinsi Kalimantan Utara perlu untuk dioptimalkan lagi pengelolaannya. Secara lebih lanjut lagi, komponen indeks kualitas lingkungan hidup disajikan sebagai berikut:

a. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air merupakan tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu. Semakin tinggi suatu indeks kualitas air, semakin baik status mutu air tersebut.

Tabel 2.25
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Provinsi Kalimantan Utara

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks kualitas Air	57,34	54,46	55,93	54,31	73,14

Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air pada tahun 2021 hingga 2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 hingga 2022, secara tren, Indeks Kualitas Air mengalami kondisi yang relatif menurun. Meskipun sempat naik tipis pada 2023, tren umumnya mengindikasikan degradasi yang berkelanjutan. Kondisi ini berpotensi memperburuk kesehatan masyarakat akibat peningkatan paparan polusi dan berkurangnya kualitas air serta udara. Penurunan kualitas lingkungan juga dapat mengganggu kesejahteraan, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam.

Walaupun pada tahun 2024 nilai IKA sempat turun, namun di tahun 2025 meningkat secara sifnifikan menjadi 73,14. Peningkatan IKA sebagai salah satu komponen pembentuk IKLH menunjukkan bahwa kondisi mutu sumber daya air di Kalimantan Utara mengalami perbaikan dan semakin mendukung keberlanjutan lingkungan serta kehidupan masyarakat. Kenaikan indeks ini mengindikasikan bahwa kualitas air sungai, danau, maupun badan air lainnya semakin baik ditinjau dari parameter fisik, kimia, dan biologis, sehingga tingkat pencemaran air relatif lebih terkendali. Kondisi tersebut umumnya mencerminkan adanya perbaikan pengelolaan lingkungan, pengendalian limbah domestik dan industri, serta meningkatnya kesadaran dalam menjaga kelestarian sumber daya air.

b. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah hasil pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pencemaran udara di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara dihitung menggunakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP 45/MENLH/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara. Parameter ISPU adalah diameter partikulat (PM10), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO_2), nitrogen dioksida (NO_2), dan ozon (O_3). Semakin tinggi hasil pengukurannya, semakin berbahaya kualitas udara tersebut. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kalimantan Utara tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.26
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara
di Provinsi Kalimantan Utara

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kualitas Udara	93,43	94,52	93,91	92,99	91,25

Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Perkembangan Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi kualitas udara yang secara umum masih berada pada kategori baik, meskipun mengalami kecenderungan penurunan secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Nilai IKU meningkat dari 93,43 pada tahun 2021 menjadi 94,52 pada tahun 2022, namun setelah itu mengalami penurunan menjadi 93,91 pada 2023, 92,99 pada 2024, dan kembali turun menjadi 91,25 pada tahun 2025. Meskipun penurunannya relatif tidak terlalu besar, tren tersebut menunjukkan adanya peningkatan tekanan terhadap kualitas udara di Kalimantan Utara seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, transportasi, pembangunan kawasan perkotaan, serta potensi aktivitas industri dan pembakaran lahan pada wilayah tertentu.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah indeks yang mengukur kualitas beberapa aspek seperti aspek konservasi dan aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial. Indeks ini dihitung dengan mengakumulasi nilai beberapa indeks penyusun yang diberikan bobot, yaitu indeks tutupan hutan, indeks *performance* hutan, indeks kondisi tutupan tanah, indeks konservasi badan air, dan indeks kondisi habitat. Nilai yang dihasilkan dari pengukuran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pembukaan lahan, kebakaran hutan dan lahan, penebangan liar, rehabilitasi hutan dan lahan, rehabilitasi kawasan pesisir, pemulihan lahan bekas tambang, dan pemulihan lahan terkontaminasi B3. Semakin tinggi nilai terukur, semakin baik kualitas tutupan lahannya.

Tabel 2.27
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan di Provinsi Kalimantan Utara

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kualitas Lahan	99,96	100	100	100	100

Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Indeks Kualitas Tutupan Lahan mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2025. Peningkatan ini terjadi karena semakin bertambahnya luasan tutupan lahan baik dari lahan bekas pertambangan maupun lahan lainnya yang tidak tergarap lagi. Pada tahun 2025, indeks tutupan lahan meningkat cukup signifikan menjadi 100. Kategori capaian tersebut tergolong pada kategori sangat baik. Dengan demikian tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Utara perlu untuk diperhatikan melalui upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti pemanfaatan lahan sesuai tata ruang, mempertahankan cakupan kawasan hutan primer untuk dilindungi, serta mempertahankan luasan ruang terbuka hijau.

d. Indeks Kualitas Air Laut

Indeks kualitas air laut atau IKAL merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Baku mutu yang digunakan dalam mengukur kualitas air laut dapat dibagi menjadi dua peruntukan yaitu untuk wisata bahari dan biota laut. Indeks kualitas air laut memiliki peranan penting dalam menggambarkan kondisi pencemaran pada ekosistem pesisir dan laut.

Tabel 2.28
Indeks Kualitas Air Laut di Provinsi Kalimantan Utara

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kualitas Air Laut	81,52	84,85	83,4	84,65	88,58

Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kondisi kualitas air laut di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan fluktuasi dengan

tren peningkatan. Dalam hal ini kondisi ekosistem pesisir dan laut perlu menjadi perhatian khusus mengingat adanya ekosistem pesisir dan laut ini berperan penting dalam jasa lingkungan dan kondisi ekonomi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang juga akan berpengaruh pada kondisi kualitas air laut.

e. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut

Indeks kualitas ekosistem gambut atau IKEG merupakan nilai yang menggambarkan kondisi ekosistem gambut dihitung melalui nilai komposit dari beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks tersebut dihitung menggunakan pendekatan perhitungan dari parameter luas terdampak kanal, luas areal bekas kebakaran, dan luas tutupan lahan baik pada fungsi lindung dan fungsi budidaya.

Tabel 2.29
Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Utara

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	84,9	79,49	79,20	79,61	100

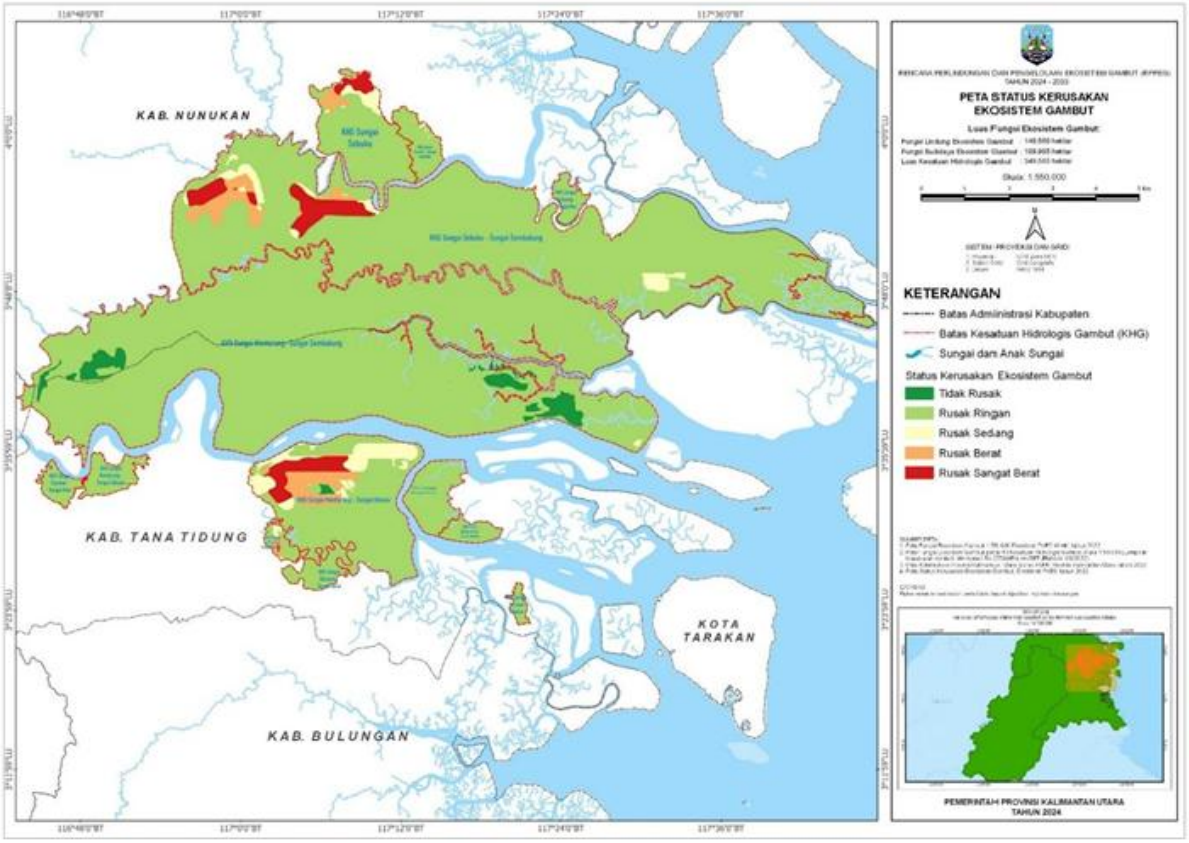
Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kondisi kualitas ekosistem gambut di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021-2023 dengan nilai 84,9 menjadi 79,2, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan perlu menjadi perhatian khusus.

Penurunan kualitas ekosistem gambut disebabkan adanya indikasi perubahan penutupan lahan, adanya perizinan di atas lahan hutan gambut, dan adanya area perhutanan sosial pada ekosistem gambut. Dengan adanya kegiatan tersebut, kondisi ekosistem gambut dapat terganggu dan menimbulkan kerusakan. Berdasarkan analisis data kerusakan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut (PKEG) – KLHK tahun 2022, terdapat 5 (lima) kategori kerusakan mulai dari kategori tidak rusak sampai kategori rusak sangat

berat, yang memiliki persebaran di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana berikut.

Gambar 2.6
Peta Sebaran Tingkat Kerusakan Ekosistem Gambut di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024



Sumber: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Utara 2024-2053

Dalam peta tersebut, terdapat kerusakan ekosistem gambut dengan didominasi dengan kategori rusak ringan dan terdapat beberapa kawasan dengan kategori rusak sedang, berat, dan sangat berat. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) juga akan menjadi salah satu faktor dalam penentuan indeks kualitas lahan. Pemulihan ekosistem gambut erat kaitannya dengan tata air gambut agar gambut tetap basah, tidak mengalami kekeringan dengan menjaga tinggi muka air tanah < 0,4 m. Penurunan tinggi muka air tanah akan menyebabkan gambut mudah terbakar dan berpotensi kehilangan air yang pada musim kemarau dapat menyebabkan kekeringan.

Ekosistem gambut memiliki peranan penting secara ekologis yang sangat rentan apabila terjadi gangguan dan salah kelola. Oleh karena itu, melihat dari kondisi kualitas ekosistem gambut yang menurun tersebut, perlunya perhatian khusus dalam perlindungan dan pemanfaatannya termasuk perlindungan dari dampak suatu pembangunan termasuk di dalamnya adalah peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah. Pejabat pengawas perlu menjadi perhatian terutama dalam pengawasan terkait penaatan kewajiban perusahaan yang terdapat di ekosistem gambut.

Terkait dengan pelaku usaha yang memiliki konsesi di ekosistem gambut, terdapat kewajiban pelaku usaha yaitu kewajiban dalam penyusunan dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut sesuai PP 71/2014 jo PP 57/2016 tentang perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut. Berdasarkan Dokumen RPPEG Provinsi Kalimantan Utara (2023), fungsi lindung pada ekosistem gambut telah dibebani izin pemanfaatan perkebunan sawit dan kehutanan seluar 81.589,42 ha atau sekitar 54 persen. Sedangkan fungsi budidaya ekosistem gambut telah dibebani izin sebanyak 30 persen atau seluas 71.252,72 ha.

2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses terhadap sanitasi layak juga menjadi bagian penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Melalui sanitasi yang layak diharapkan dapat memutus siklus penyakit dan mengurangi potensi pencemaran air. Akses rumah tangga terhadap sanitasi layak juga cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Namun demikian, capaian tersebut masih perlu untuk terus ditingkatkan, hingga memenuhi target nasional yakni 90%. Adapun secara lebih khusus, apabila ditinjau dari capaian kabupaten/kota, Kabupaten Nunukan menjadi daerah yang memiliki akses sanitasi layak paling rendah di Provinsi Kalimantan Utara hingga tahun 2025. Kondisi tersebut tentu perlu untuk menjadi perhatian, dengan pertimbangan sanitasi yang layak sangat mempengaruhi komponen pembangunan yang lain, seperti terhadap penuntasan stunting.

Adapun capaian akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.30
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025

Kabupaten	2021	2022	2023	2024	2025
Malinau	67,88	89,90	89,24	89,29	90,52
Bulungan	93,04	92,37	93,54	94,91	94,01
Tana Tidung	83,29	70,89	90,67	96,03	97,88
Nunukan	78,49	72,59	74,31	76,42	78,38
Tarakan	77,58	83,95	84,57	84,64	84,93
Kalimantan Utara	**79,80**	**82,22**	**84,22**	**85,17**	**86,00**

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka, 2025

3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah di Provinsi Kalimantan Utara semakin mengalami peningkatan. Kondisi tersebut tentunya tidak terlepas dari pertambahan jumlah penduduk yang juga semakin meningkat, dan diversifikasi aktivitas dari masyarakat dan menghasilkan keluaran berupa persampahan. Tercatat hingga tahun 2024, timbulan sampah di Provinsi Kalimantan Utara yang berhasil terhimpun mencapai 51.567,58 ton dalam kurun waktu satu tahun terakhir, dengan total sampah harian sebesar 141,28 ton. timbulan sampah ini tentu memerlukan perhatian yang lebih untuk meningkatkan efektivitas pengelolaannya. Berikut disajikan capaian sampah perkotaan yang tertangani dengan data termutakhir tahun 2023.

Tabel 2.31
Tingkat Pengurangan Sampah di Perkotaan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persen	55,29	63,50	74,65	72	t.a.d

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

Timbulan sampah terolah di Kalimantan Utara, belum mencapai angka yang ditargetkan oleh nasional, yakni untuk penanganan sampah sebesar 80%.Pengolahan timbulan sampah di fasilitas yang memadai

bukan lagi sekadar opsi, namun merupakan kebutuhan dengan urgensi tinggi dalam upaya menciptakan daerah yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Peningkatan proporsi sampah yang diolah dengan tepat, diharapkan tidak hanya dapat mengurangi tekanan terhadap lingkungan, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan ekonomi sirkular yang inklusif.

4. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

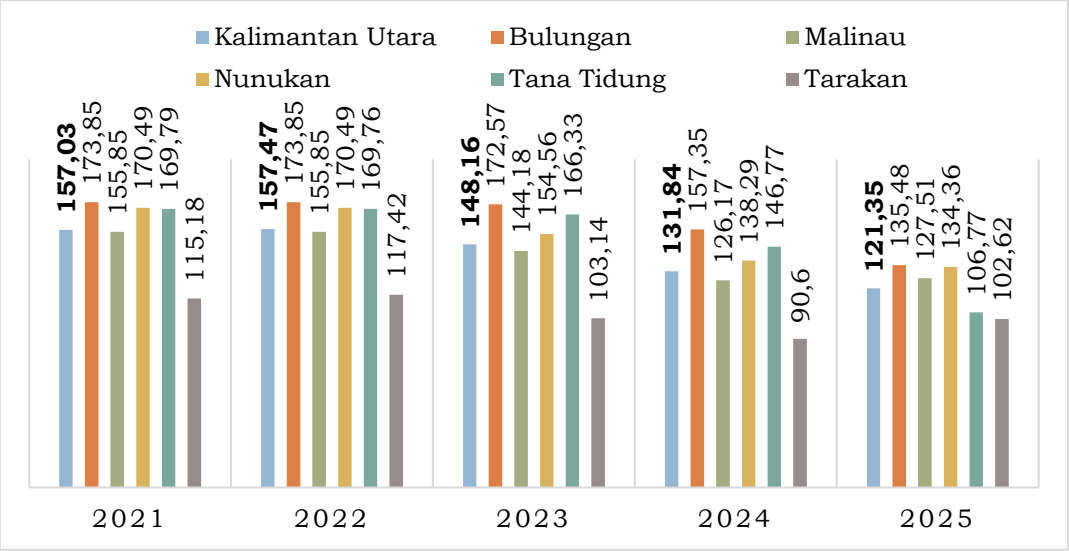
Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Layanan pengumpulan sampah yang efektif tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga pada kesehatan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam. Untuk menilai efektivitas layanan ini, digunakan indikator proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah. Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah.

2.1.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

1. Indeks Risiko Bencana

Dari segi fisiografis hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara berada pada Cekungan Tarakan yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) cekungan tersier utama yang terdapat di bagian timur continental margin Kalimantan yang dicirikan oleh hadirnya batuan sedimen klastik sebagai penyusunnya yang dominan. Provinsi Kalimantan Utara mempunyai potensi bencana hidrometeorologi khususnya bencana banjir dan kebakaran hutan, serta potensi gempa dan tsunami karena berbatasan dengan Selat Makassar.

Gambar 2.7
Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Utara 2021-2025



Sumber: BNPB, 2026

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir nilai IRB di Kalimantan Utara terus mengalami penurunan sejak tahun 2022 hingga 2025, walaupun tahun 2022 sempat mengalami peningkatan. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2025, Provinsi Kalimantan Utara memiliki indeks risiko sedang dengan nilai indeks 121,35. Nilai IRB pada tahun 2025 dihitung menggunakan baseline yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan, sehingga tidak untuk dibandingkan dengan hasil perhitungan IRB pada periode tahun 2015-2024. Hal tersebut menunjukkan penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Utara terus ditingkatkan. Sementara nilai IKD rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 0,57.

Indeks risiko per ancaman bencana ber wilayah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.32
Indeks Risiko per Ancaman Bencana Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Bencana	Bulungan		Nunukan		Tana Tidung		Malinau		Kota Tarakan	
	Skor	Kelas Risiko	Skor	Kelas Risiko	Skor	Kelas Risiko	Skor	Kelas Risiko	Skor	Kelas Risiko
Multi ancaman	173,85	Tinggi	170,49	Tinggi	169,76	Tinggi	155,85	Tinggi	117,42	Sedang
Banjir	36	Tinggi	24	Tinggi	34,98	Tinggi	-	-	-	-
Gempa bumi	10,8	Sedang	10,8	Sedang	10,5	Sedang	10,8	Sedang	8,79	Sedang
Tsunami	16	Sedang	4,8	Sedang	9,33	Sedang	4	Rendah	11,81	Sedang
Kebakaran hutan	36	Tinggi	36	Tinggi	34,98	Tinggi	36	Tinggi	29,28	Tinggi
Tanah longsor	24	Tinggi	24	Tinggi	11,66	Sedang	24	Tinggi	9,76	Sedang
Gelombang ekstrim dan abrasi	24	Tinggi	24	Tinggi	23,32	Tinggi	-	-	-	-
Kekeringan	24	Tinggi	36	Tinggi	34,98	Tinggi	36	Tinggi	19,52	Tinggi
Cuaca ekstrim	13,6	Tinggi	13,6	Tinggi	10,11	Sedang	13,6	Tinggi	11,06	Sedang

Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana 2024

Indeks Risiko Bencana pada setiap kabupaten/kota menunjukkan bahwa bencana kebakaran hutan dan kekeringan memiliki indeks risiko yang tinggi. Adapun berdasarkan Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 2023-2024 menunjukkan bahwa seluruh kabupaten dan kota memiliki kawasan rawan bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi yang tinggi. Kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi pada Kabupaten Bulungan, Nunukan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan serta kawasan rawan bencana kebakaran hutan tingkat tinggi pada Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung.

2. Penurunan Emisi GRK

Perubahan iklim merupakan ancaman yang telah nyata dirasakan Indonesia, bahkan telah menyebabkan kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana hidrometeorologi ini. Salah satu tujuan nasional 13 TPB adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Provinsi Kalimantan Utara menjadi salah satu daerah yang juga turut memberikan dukungan terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global tersebut. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan hasil capaian penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) yang terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2020-2023. Artinya, capaian tersebut bernilai positif dan perlu untuk semakin dioptimalkan capaiannya, dengan harapan dapat semakin memberikan kontribusi terhadap upaya penanganan dampak perubahan iklim yang secara nyata telah dirasakan.

Tabel 2.33
Penurunan Emisi GRK

Komponen	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	67,7	81,6	87,5	101,1	t.ad

Sumber: Satu data Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Lebih lanjut lagi, peningkatan ketahanan bencana dan iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko

bencana dan adaptasi perubahan iklim melalui penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan iklim. Ancaman perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Utara antara lain meningkatkan kerentanan terhadap bencana banjir, kekeringan, tanah longsor dan kebakaran hutan. Berikut disajikan hasil inventaris kejadian bencana alam di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.34
Luasan Kawasan Terdampak Bencana Alam
di Provinsi Kalimantan Utara

Nama Data	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Kawasan Rawan Longsor	Hektar	4.336.672	4.316.755	5.907.422	5.907.422	5.907.422
Luas Kawasan Rawan banjir	Hektar	1.100.493	1.310.560	772.692	772.692	772.692
Luas Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	Hektar	6.263.941	6.911.866	2.948.610	2.948.610	2.948.610
Luas Kawasan Rawan Gempa Bumi	Hektar	7.002.188	6.937.043	7.546.770	7.546.770	7.546.770
Luas Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Abrasi	Hektar	71.514	32.839	31.539	31.539	31.539
Luas Kawasan Rawan Tsunami	Hektar	34.861	33.308	50.754	50.754	50.754
Luas Kawasan Rawan Kekeringan	Hektar	0	6.939.501	7.546.770	7.546.770	7.546.770
Luas Kawasan Rawan Epidemi Wabah Penyakit	Hektar	0	6.868.360	2.776.762	2.776.762	2.776.762
Jumlah Luas Kawasan Rawan Bencana Alam	**Hektar**	**18.809.669**	**33.482.639**	**27.581.319**	**27.581.319**	**27.581.319**

Sumber: Satu data Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Indonesia sangat berkepentingan dalam menangani penanggulangan pemanasan global dan perubahan iklim. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi 31 – 43 % pada tahun 2030, dengan sektor kehutanan dan lahan gambut sebagai target utama reduksi emisi. Hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam dokumen Enhanced NDC tahun 2022. Kebijakan nasional terkait perubahan juga iklim telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan GRK dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional. Provinsi Kalimantan Utara juga berkomitmen untuk mendukung target nasional dengan dikeluarkannya SK Gubernur Tahun 2015 tentang POKJA RAD GRK dalam rangka melaksanakan tugas Rencana Aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Kalimantan Utara dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Dalam Dokumen RAD GRK, emisi terbesar di Provinsi Kalimantan Utara adalah bidang penggunaan lahan, kehutanan dan lahan gambut. Lima kegiatan utama dari Provinsi Kalimantan Utara yang akan menjadi prioritas utama aksi mitigasi bidang berbasis lahan. Aksi–aksi mitigasi prioritas Provinsi Kalimantan Utara adalah: 1. Patroli pengamanan hutan; 2. Reboisasi/rehabilitasi lahan di lima kabupaten/kota; 3. Penanaman pohon mangrove; 4. Pengembangan hutan tanaman rakyat; 5. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan terbuka. Relevansi muatan RPPEG dengan RAD GRK Provinsi Kalimantan Utara sangat kuat dan relevan, di mana RPPEG akan mendukung dan memperkuat implementasi penurunan emisi gas rumah kaca khususnya pada lahan gambut.

Lebih lanjut lagi, menurut Sistem lnformasi dan Data lndeks Kerentanan Perubahan lklim (SIDIK) teridentifikasi sebanyak 9 desa di 4 kecamatan di Kabupanten Bulungan yang berada pada tingkat “sangat rentan” terhadap perubahan iklim. Adapun jumlah desa dengan tingkat sangat rentan di Provinsi Kalimantan Utara selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

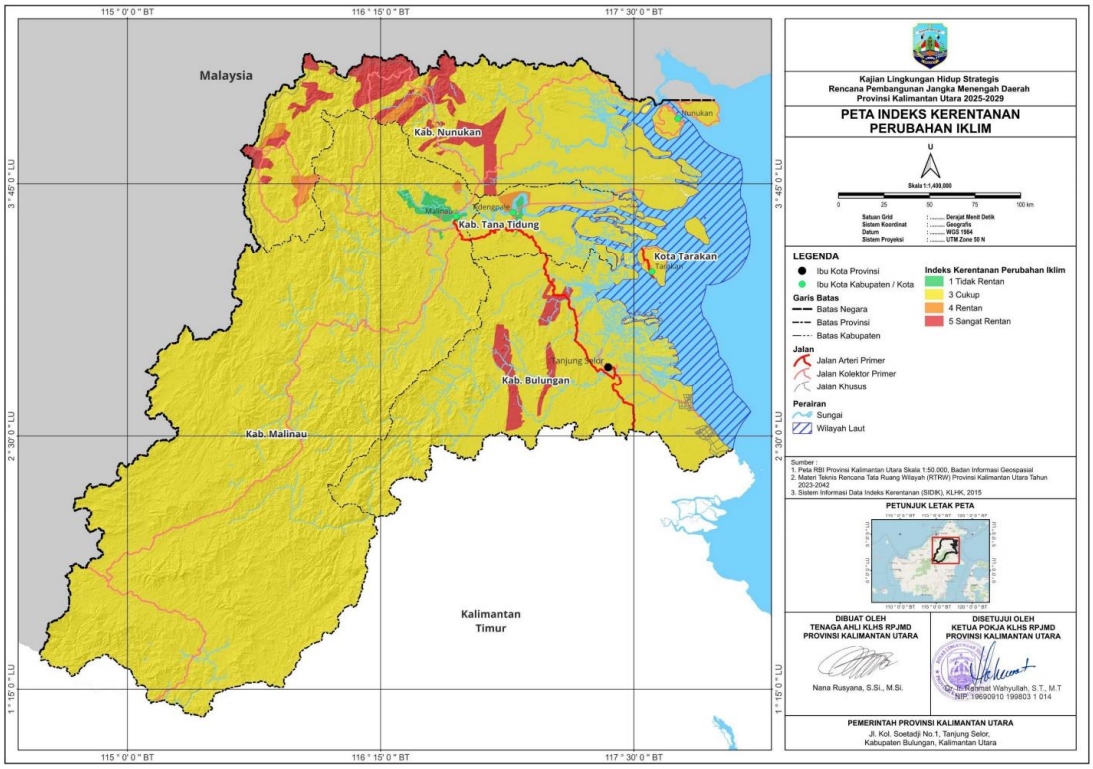
Tabel 2.35
Jumlah Desa Berdasarkan Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jumlah desa menurut tingkat kerentanan berdasarkan Data SIDIK					Total
	Tidak Rentan	Agak Rentan	Cukup Rentan	Rentan	Sangat Rentan	
Malinau	21	15	68	2	3	109
Bulungan	13	20	39	0	9	81
Tana Tidung	1	7	14	0	1	23
Nunukan	1	33	129	20	53	236
Tarakan	8	0	11	1	0	20
Kalimantan Utara	**44**	**75**	**261**	**23**	**66**	**469**
Persentase	9,38	15,99	55,65	4,90	14,07	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

Lebih lanjut lagi, sebaran dari kerentanan perubahan iklim di Provinsi Kalimantan utara disajikan sebagai berikut ini.

Gambar 2.8
Peta Indeks Kerentanan Perubahan Iklim
Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

Provinsi Kalimantan Utara didominasi dengan nilai indeks kerentanan perubahan iklim dengan kategori yang cukup, dan beberapa

wilayah memiliki kategori sangat rentan. Sebagian besar wilayah dengan kategori sangat rentan berada di wilayah pesisir, yang mana pada zona tersebut seringkali lebih sensitif terhadap dampak yang ditimbulkan dari dinamika perubahan iklim global. Lebih lanjut lagi rincian dari potensi kebencanaan yang dipengaruhi oleh dinamika perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Utara diuraikan sebagai berikut:

a. Kerentanan Bencana Banjir

Banjir besar terjadi pada periode tahunan, lima tahunan atau sepuluh tahunan dengan jumlah debit air melebihi kapasitas daya tampung sungai. Di samping faktor curah hujan, banjir juga disebabkan oleh berkurangnya daya tampung sungai akibat erosi maupun longsoran sedimen yang masuk ke badan sungai, sedangkan di daerah perkotaan sedimentasi juga disebabkan oleh pembuangan sampah yang sembarangan. Selama periode tahun 2015 hingga Juni 2023, tercatat sebanyak 128 kejadian bencana banjir, dengan kejadian terbanyak di Kabupaten Nunukan dengan jumlah 48 kejadian.

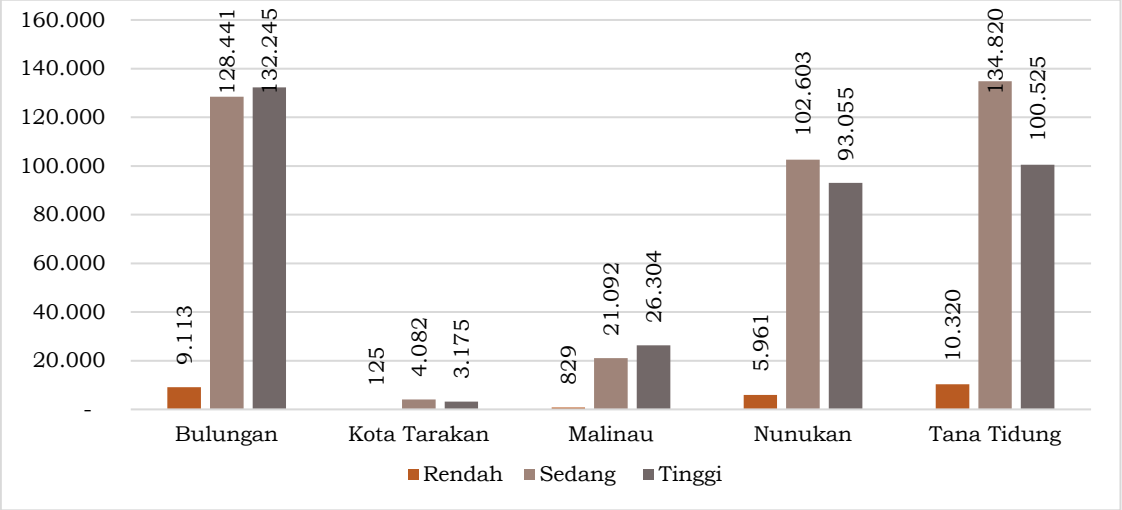
Tabel 2.36
Luas Areal dengan Jasa Ekosistem Pencegahan Bencana Banjir di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Luas Menurut Kategori (ha)					Luas Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bulungan	12.677	51.829	110.347	266.739	937.078	1.378.669
Malinau	1.921	7.168	10.277	407.936	3.476.314	3.903.611
Nunukan	1.721	23.557	90.147	372.184	872.766	1.360.374
Tana Tidung	1.214	12.159	115.949	121.722	92.015	343.059
Kota Tarakan	-	3.653	2.622	11.138	6.992	24.405
Luas	17.533	98.361	329.342	1.179.718	5.385.164	7.010.118
Persentase	0,25	1,40	4,70	16,83	76,82	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029

Jasa ekosistem pencegahan terhadap bencana banjir di Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh kategori sangat tinggi dengan persentase 76,82% atau seluas 5.385.164 ha, dan yang terluas berada di Kabupaten Malinau.

Gambar 2.9
Luas Areal dengan Tingkat Bahaya Banjir di Provinsi Kalimantan Utara (Ha)



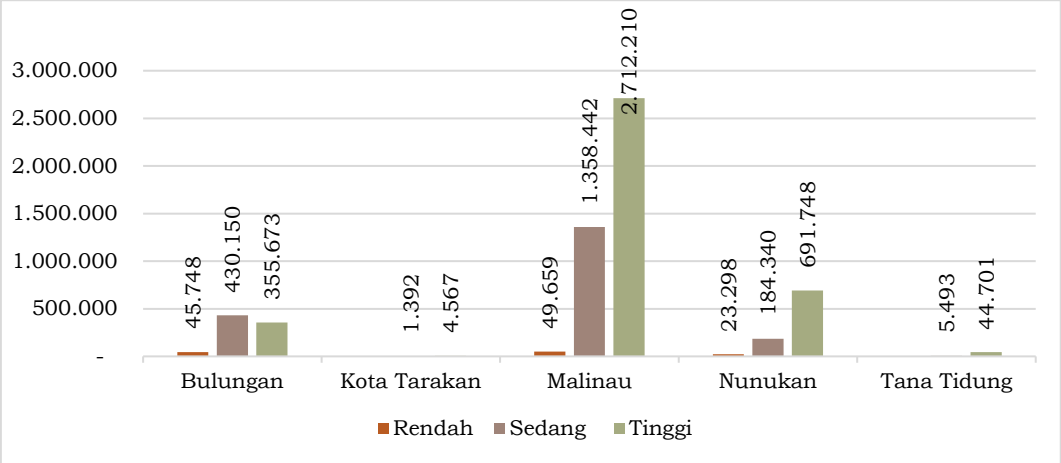
Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029

Wilayah Kabupaten Bulungan seluas 132.245 ha teridentifikasi merupakan areal yang tingkat bahaya banjirnya berada dalam kategori tinggi. Demikian halnya di Kabupaten Nunukan seluas 93.055 ha dan Kabupaten Tana Tidung seluas 100.525 ha juga teridentifikasi tinggi bahaya banjir. Sementara di Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan, luas areal dengan bahaya banjir yang tinggi masih berada di bawah tiga kabupaten lainnya.

b. Kerentanan Bencana Tanah Longsor

Provinsi Kalimantan Utara mempunyai potensi atau kerawanan terhadap gerakan tanah. Gerakan tanah sangat dipengaruhi kestabilan lereng yang sangat bergantung oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lereng antara lain besarnya lereng, komponen penyusun lereng, struktur geologi yang ada pada lereng tersebut, sedangkan faktor eksternal antara lain tutupan lereng (vegetasi), intensitas dan besarnya curah hujan, kondisi muka air tanah, getaran atau gempa bumi. Getaran tanah terjadi jika gaya pendorong melebihi gaya penahan pada suatu lereng. Selama periode tahun 2015 hingga bulan Juni 2023, tercatat sebanyak 252 kejadian bencana tanah longsor, dan yang terbanyak berada di Kota Tarakan dengan jumlah 210 kejadian.

Gambar 2.10
Luas Areal dengan Tingkat Bahaya Tanah Longsor



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029

Areal dengan tingkat bahaya tanah longsor kategori tinggi tidak teridentifikasi di Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung. Paling luas berada di Kabupaten Malinau seluas 2.712.210 ha dan di Kabupaten Nunukan seluas 691.746 ha. Kabupaten Malinau menjadi wilayah yang paling rawan akan bahaya tanah longsor.

Tabel 2.37
Luas Areal dengan Jasa Ekosistem Pencegahan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Luas Menurut Kategori (ha)					Luas Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bulungan	-	147.419	108.379	261.642	861.229	1.378.669
Malinau	507	9.147	26.724	170.262	3.696.971	3.696.971
Nunukan	5.499	47.096	309.229	191.064	807.485	1.360.374
Tana Tidung	6.904	107.342	87.540	89.827	51.445	343.059
Kota Tarakan	-	5.046	4,665	10.422	4.272	24.405
Luas	**12.911**	**316.051**	**536.538**	**723.217**	**5.421.402**	**7.010.118**
Persentase	**0,18**	**4,51**	**7,65**	**10,32**	**77,34**	**100,00**

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029

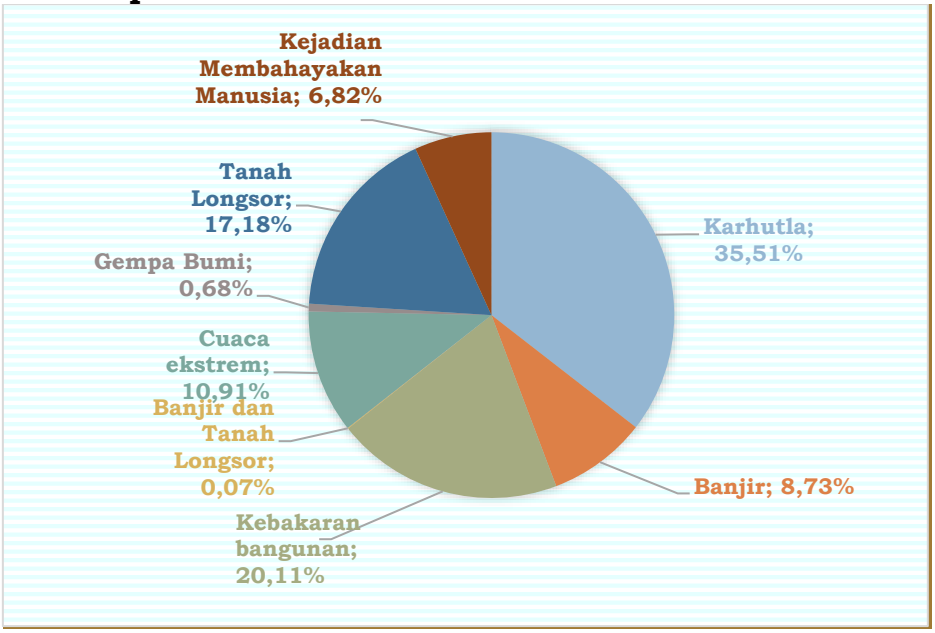
Luas areal dengan jasa ekosistem pencegahan bencana tanah longsor memiliki luas terbesar pada kategori sangat tinggi dengan persentase 77,34%. Sedangkan pada kategori sangat rendah memiliki persentase 0,18%. Wilayah paling luas dengan kategori sangat tinggi yaitu Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan memiliki luasan paling kecil

untuk kategori sangat tinggi. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Malinau, sebagian wilayah Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan mempunyai risiko sangat tinggi.

c. Kerentanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Sebesar 35% bencana yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara berupa kebakaran hutan dan lahan. Penyebabnya beragam, mulai dari musim kemarau, siklus El Nino, pembukaan lahan dengan cara dibakar, sampai pada pembakaran hutan yang disengaja untuk kepentingan pemanfaatan sumber daya alam.

Gambar 2.11
Proporsi Bencana di Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029

Jasa ekosistem pencegahan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan didominasi oleh kategori sangat tinggi dengan persentase 56,28% atau seluas 3.945.254 ha, dan yang terluas berada di Kabupaten Malinau. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Luas Areal dengan Jasa Ekosistem Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Luas Menurut Kategori (ha)					Luas Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bulungan	12.677	57.517	182.788	695.829	429.857	1.378.669
Malinau	2.191	8.986	91.731	942.695	2.858.007	3.903.611
Nunukan	12.000	52.474	308.117	397.608	590.175	1.360.374
Tana Tidung	4.302	64.439	104.363	104.822	65.134	343.059
Kota Tarakan	-	3.653	9.685	8.986	2.080	24.405
Luas	**31.170**	**187.069**	**696.684**	**2.149.941**	**3.945.254**	**7.010.118**
Persentase	**0,44**	**2,67**	**9.94**	**30,67**	**56,28**	**100,00**

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029

Kabupaten Malinau memiliki kerawanan paling tinggi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan juga sering terjadi. Selain karena kegiatan *illegal logging*, kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi karena perubahan iklim yang cukup signifikan. Mitigasi bencana hutan dan lahan perlu menjadi prioritas utama di wilayah Kalimantan Utara.

3. Indeks Ketahanan Daerah

Pengukuran terhadap indeks ketahanan daerah bertujuan untuk menilai kapasitas penanggulangan bencana pada suatu wilayah administrasi dengan asumsi bahwa bahaya dan ancaman bencana serta kerentanan di wilayah tersebut bernilai tetap. Indeks ketahanan daerah dilakukan untuk memonitor adanya penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah dalam mengurangi indeks risiko bencana. Penguatan kapasitas kelembagaan dilaksanakan secara lintas sektor di bawah koordinasi BPBD.

Tabel 2.39
Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Ketahanan Daerah	0,2739	0,2657	0,4276	0,558	0,57

Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2026

Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, terutama sejak tahun 2023. Nilai indeks pada tahun 2021 tercatat sebesar 0,2739 dan sedikit menurun menjadi 0,2657 pada tahun 2022, namun kemudian meningkat tajam menjadi 0,4276 pada tahun 2023, naik lagi menjadi 0,558 pada tahun 2024, dan mencapai 0,57 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas ketahanan daerah terhadap risiko bencana dan gangguan pembangunan semakin membaik dari tahun ke tahun. Kondisi ini mengindikasikan adanya penguatan pada aspek kesiapsiagaan, tata kelola kebencanaan, kemampuan respons, serta kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana dan risiko lingkungan.

Kenaikan indeks ketahanan daerah juga mencerminkan bahwa pembangunan di Kalimantan Utara mulai semakin memperhatikan aspek ketangguhan wilayah dan pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, capaian indeks yang masih berada pada level menengah menunjukkan bahwa penguatan ketahanan daerah masih perlu terus ditingkatkan, terutama mengingat karakteristik Kalimantan Utara yang memiliki wilayah pesisir, kawasan perbatasan, daerah aliran sungai, serta kawasan hutan yang rentan terhadap bencana banjir, longsor, abrasi, dan dampak perubahan iklim.

2.1.1.7. Demografi

Demografi memainkan peran krusial dalam proses perencanaan suatu wilayah. Hal tersebut dikarenakan perubahan dalam struktur penduduk berdampak secara langsung terhadap kebutuhan akan infrastruktur, pelayanan publik, dan perencanaan tata ruang. Elemen-elemen seperti laju pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan, serta pola migrasi turut menentukan arah perkembangan suatu wilayah dan kemampuannya dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Wilayah dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi membutuhkan strategi perencanaan yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan akan hunian, sistem transportasi, dan sarana

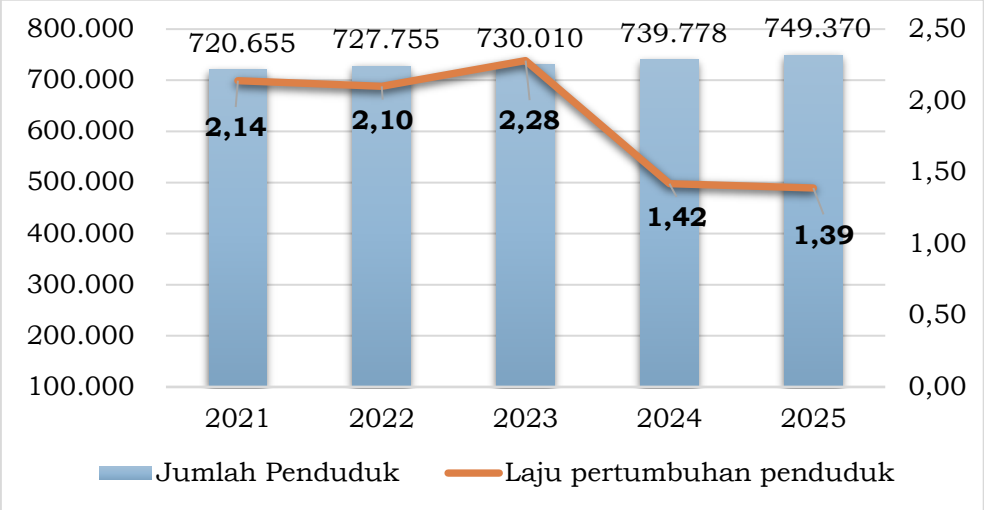
publik. Selain itu, arus perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan mengakibatkan perubahan sosial dan ekonomi yang perlu direspons melalui kebijakan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, penggunaan data demografi secara terpadu dalam perencanaan wilayah menjadi hal yang esensial guna mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi demografi Provinsi Kalimantan Utara bersifat fluktuatif, dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian, serta mobilitas penduduk masuk dan keluar wilayah. Data demografis mencakup jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan, dan struktur komposisi penduduk. Informasi ini menjadi fondasi dalam menyusun proyeksi kependudukan untuk lima tahun mendatang di Provinsi Kalimantan Utara.

1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator utama dalam analisis demografi suatu wilayah. Jumlah penduduk mencerminkan besaran populasi yang menetap di suatu daerah pada periode tertentu, sedangkan laju pertumbuhan penduduk menggambarkan dinamika perubahan jumlah penduduk akibat kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk. Analisis terhadap kedua aspek ini penting untuk memahami perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan infrastruktur serta layanan publik di suatu wilayah. Dengan mengetahui tren pertumbuhan penduduk, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Berikut merupakan grafik jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 hingga 2025 di Provinsi Kalimantan Utara.

Gambar 2.12
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara dalam Angka 2021-2025

Badan Pusat Statistik melalui laporan tahunan Provinsi Kalimantan Utara dalam Angka 2025 menyebutkan bahwa terdapat 749.370 penduduk yang berada di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025. Data tersebut merupakan gabungan dari 393.130 penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan 356.240 lainnya adalah perempuan. Jumlah tersebut telah mengalami peningkatan sebanyak 9.592 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya.

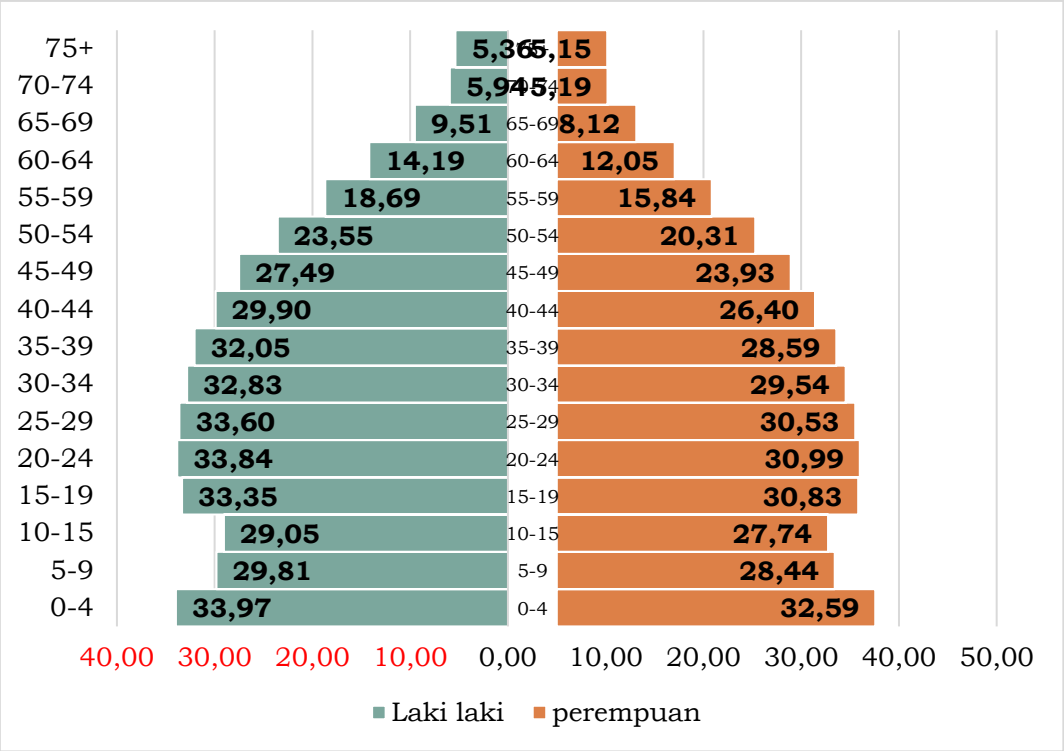
Laju pertumbuhan penduduk selama periode tahun 2021 sam,pai 2025 mengalami tren penurunan walaupun pada tahun 2021 sempat meningkat. Laju pertumbuhan penduduk terendah terjadi di tahun 2025 sebesar 1,39 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk masih terjadi tetapi dengan kecepatan yang jauh lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Komposisi Penduduk

Struktur penduduk Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur menunjukkan komposisi penduduk yang masih didominasi oleh kelompok usia muda dan usia produktif, yang tercermin dari besarnya proporsi penduduk pada kelompok umur anak hingga usia kerja awal. Distribusi penduduk laki-

laki dan perempuan relatif seimbang pada hampir seluruh kelompok umur, meskipun pada beberapa kelompok usia tertentu terlihat kecenderungan jumlah laki-laki sedikit lebih besar dibanding perempuan. Pola ini menggambarkan karakteristik wilayah yang masih berkembang dengan dinamika mobilitas penduduk yang cukup tinggi, terutama pada kelompok usia produktif yang umumnya berkaitan dengan aktivitas ekonomi, pekerjaan, dan migrasi tenaga kerja. Struktur demografi tersebut memberikan potensi bonus demografi, yaitu kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok usia nonproduktif, sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah apabila didukung oleh ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

Gambar 2.13
Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

Di sisi lain, distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk secara bertahap menurun pada kelompok usia yang lebih tua, yang merupakan pola umum dalam

struktur piramida penduduk berkembang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kalimantan Utara masih berada pada fase struktur penduduk yang relatif muda, sehingga kebutuhan terhadap layanan pendidikan, kesehatan ibu dan anak, serta penciptaan kesempatan kerja bagi generasi muda akan terus meningkat.

3. Rasio Penduduk

Rasio penduduk di Provinsi Kalimantan Utara dapat dianalisis melalui perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Penghitungan rasio ini berperan dalam memahami proporsi penduduk laki-laki dan perempuan, yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih terarah. Perbandingan jumlah penduduk ini tercermin dalam data rasio jenis kelamin atau *sex ratio* yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Tabel 2.40
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Kelamin 2021-2025

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
2021	379.879	340.776,0	720.655	111,5
2022	383.382	344.373	727.755	111,3
2023	384.010	346.000	730.010	111,0
2024	388.620	351.150	739.780	110,7
2025	393.130	356.240	749.370	110,4

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

Perubahan demografi dapat dilihat dari komposisi jenis kelamin, untuk membantu penyusunan perencanaan kebijakan berdasarkan karakteristik setiap sumber daya manusia yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Data sex ratio di Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2021 hingga 2025 didominasi laki-laki dengan jumlah paling besar dibandingkan perempuan. Besarnya angka sex ratio tahun 2025 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 110,4 menunjukkan bahwa di antara 100 penduduk perempuan terdapat 111 penduduk laki-laki di Provinsi Kalimantan Utara. Angka sex ratio ini

mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu 111,5. Penurunan angka sex ratio disebabkan karena banyaknya kelahiran bayi perempuan, bertambahnya jumlah penduduk perempuan melalui migrasi masuk, dan adanya penurunan jumlah laki-laki di Provinsi Kalimantan Utara.

4. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan indikator yang menggambarkan bentuk penyebaran dan pemerataan penduduk di suatu wilayah. Indikator kepadatan penduduk menghitung jumlah individu pada suatu populasi dibagi dengan satuan luas atau ruang yang ditempati pada periode tertentu. Data terkait tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.41
Persebaran dan Kepadatan Penduduk
Provinsi Kalimantan Utara 2025

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk Bruto (jiwa per km$^{2)}$	Kepadatan Penduduk Netto (jiwa per km$^{2)}$
Malinau	87.490	2	2.251
Bulungan	162.400	12	1.690
Tana Tidung	28.820	8	1.929
Nunukan	213.980	16	3.266
Tarakan	256.670	1.023	6.929
Provinsi Kalimantan Utara	749.370	10	3.001

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

Jumlah penduduk sebesar 749.370 jiwa tersebar ke dalam lima kabupaten/kota yang ada. Kota Tarakan menjadi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 256.670 jiwa. Sedangkan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kabupaten Tana Tidung dengan jumlah penduduknya 28.820 jiwa.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki kepadatan penduduk bruto sebesar 10 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk bruto menghitung semua area dalam suatu wilayah sehingga area yang tidak ditinggali juga terhitung. Untuk mengetahui kepadatan penduduk netto area yang dihitung hanya area permukiman sehingga menjadikan kepadatan

penduduk netto sebesar 3.001 jiwa/km^2. Kota Tarakan menjadi kabupaten/kota dengan kepadatan penduduk tertinggi baik untuk kepadatan penduduk bruto maupun netto. Kepadatan penduduk bruto Kota Tarakan sebesar 1.023 jiwa/km^2 dengan kepadatan netto sebesar 6.929 jiwa/km^2. Kabupaten Malinau menjadi kabupaten dengan kepadatan bruto terendah yaitu sebesar 2 jiwa/km^2 dengan kepadatan nettonya sebesar 2.251 jiwa/km^2. Kabupaten Bulungan menjadi kabupaten dengan kepadatan netto terendah yaitu sebesar 1.690 jiwa/km^2 dan kepadatan bruto sebesar 12 jiwa/km^2.

5. Proyeksi Penduduk

Proyeksi demografi berfokus untuk menganalisis perkembangan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan pengelompokannya, seperti data penduduk berdasarkan jumlah, kepadatan penduduk, dan penduduk berdasarkan umur di Provinsi Kalimantan Utara. Data tersebut dianalisis lebih mendalam untuk mengetahui kondisi penduduk lanjut usia, penduduk usia sekolah, rasio ketergantungan, dan bonus demografi. Berikut merupakan hasil proyeksi kependudukan di Provinsi Kalimantan Utara selama rentang tahun 2025 hingga 2029.

a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan penduduk

Proyeksi penduduk memiliki peran strategis dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang. Proyeksi ini memberikan estimasi mengenai jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu, seperti merujuk pada tren historis maupun pengaruh kebijakan yang sedang atau akan diterapkan. Informasi dari proyeksi penduduk sangat berguna sebagai dasar penetapan kebijakan dan penentuan target dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, ketahanan pangan, perumahan, dan sektor strategis lainnya.

Proyeksi penduduk juga berfungsi sebagai alat untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi efektivitas program pembangunan,

mengidentifikasi kesenjangan pelaksanaan perencanaan, serta menyusun kebijakan lanjutan secara lebih terarah. Dalam analisis proyeksi, aspek-aspek seperti jumlah penduduk, laju pertumbuhan, dan tingkat kepadatan menjadi indikator utama yang saling melengkapi dan memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika kependudukan suatu wilayah. Proyeksi demografi di Provinsi Kalimantan Utara menggunakan data tahun 2020 sebagai acuan dasar. Berikut ini disajikan hasil proyeksi jumlah dan pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Utara untuk periode tahun 2025 hingga 2029.

Tabel 2.42
Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2025-2029

No	Wilayah	Jumlah Penduduk 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk Provinsi Kalimantan Utara (Jiwa)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Malinau	85.530	88.985	90.101	91.197	92.268	93.312
2	Bulungan	158.050	156.246	158.206	160.130	162.011	163.844
3	Tana Tidung	27.470	28.161	28.514	28.861	29.200	29.530
4	Nunukan	207.870	212.741	215.409	218.029	220.590	223.086
5	Tarakan	251.090	263.120	266.420	269.661	272.828	275.915
	Kalimantan Utara	730.010	749.370	758.770	768.000	777.020	785.810

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara 2020-2035, Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Provinsi Kalimantan Utara 2023

Hasil proyeksi penduduk dalam kurun waktu perencanaan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara, di mana BPS melakukan penghitungan proyeksi penduduk yang didasarkan pada penduduk menurut usia. Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk tersebut, laju pertumbuhan penduduk dalam rentang waktu tersebut memiliki kecenderungan menurun, salah satu penyebabnya adalah dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB). Pada tahun 2025, pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Utara ini diproyeksikan sebesar 1,38 persen dan menunjukkan penurunan hingga tahun 2029 menjadi 1,13 persen.

b. Kepadatan Penduduk

Aspek demografi yang juga menjadi pokok pertimbangan kebijakan adalah tingkat kepadatan penduduk. Provinsi Kalimantan Utara memiliki peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat yang dirumuskan harus didasarkan pada kondisi kependudukan dalam hal ini tingkat kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk dilihat dari perbandingan kondisi demografi dengan geografis daerah. Berikut merupakan hasil proyeksi kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 hingga 2029.

Tabel 2.43
Proyeksi Kepadatan Penduduk Bruto Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

No	Wilayah	Luas Wilayah (Km²)	Proyeksi Kepadatan Penduduk Bruto Provinsi Kalimantan Utara				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Malinau	38.902	2	2	2	2	2
2	Bulungan	13.880	11	11	12	12	12
3	Tana Tidung	3.504	8	8	8	8	8
4	Nunukan	13.564	16	16	16	16	16
5	Tarakan	251	1.048	1.061	1.074	1.087	1.099
	Kalimantan Utara	**70.101**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara 2020-2035, Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Provinsi Kalimantan Utara 2023

Berdasarkan hasil proyeksi dapat diketahui pula prediksi kepadatan penduduk baik bruto maupun netto di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 hingga 2029. Pada tahun 2023, kepadatan penduduk bruto di provinsi ini tercatat sebesar 10 jiwa/km^2, dengan kepadatan penduduk bruto tertinggi tercatat di Kota Tarakan dengan besaran 1.000 jiwa/km^2, sementara kepadatan penduduk bruto terendah tercatat di Kabupaten Malinau dengan besaran dua jiwa/km^2. Pada tahun 2025, kepadatan penduduk bruto di provinsi ini meningkat menjadi 11 jiwa/km^2 dan menunjukkan besaran yang sama sampai dengan tahun 2029. Kota Tarakan masih menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk bruto tertinggi dengan besaran masing-masing 1.099

jiwa/km^2 dan Kabupaten Malinau secara bruto tetap tercatat memiliki kepadatan penduduk sebesar dua jiwa/km^2.

Tabel 2.44
Proyeksi Kepadatan Penduduk Netto Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2025-2029

No	Wilayah	Luas Permukiman/ Lahan Terbangun (Km^2)	Proyeksi Kepadatan Penduduk Netto Provinsi Kalimantan Utara				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Malinau	39,53	2.251	2.279	2.307	2.334	2.361
2	Bulungan	92,45	1.690	1.711	1.732	1.752	1.772
3	Tana Tidung	14,6	1.929	1.953	1.976	2.000	2.022
4	Nunukan	65,13	3.266	3.307	3.347	3.387	3.425
5	Tarakan	37,97	6.929	7.016	7.101	7.184	7.266
	Kalimantan Utara	**249,69**	**3.001**	**3.039**	**3.076**	**3.112**	**3.147**

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara 2020-2035, Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Provinsi Kalimantan Utara 2023

Berdasarkan kepadatan penduduk nettonya, besaran kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 2.924 jiwa/km^2 pada tahun 2023. Capaian tersebut menunjukan kecenderungan meningkat dalam rentang tahun perencanaan, di mana pada tahun 2025 kepadatan netto di provinsi ini tercatat sebesar 3.001 jiwa/km^2 dan dalam perkembangannya bertumbuh menjadi 3.147 jiwa/km^2. Wilayah dengan capaian kepadatan netto tertinggi di provinsi ini tercatat di Kota Tarakan dengan besaran 6.929 jiwa/km^2 di tahun 2025 dan bertumbuh menjadi 7.266 jiwa/km^2 di tahun 2029. Sementara itu, Kabupaten Bulungan merupakan wilayah dengan besaran kepadatan penduduk netto terendah di provinsi ini dengan capaian 1.772 jiwa/km^2.

c. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan penduduk usia kerja dengan penduduk usia tidak bekerja. Angka ketergantungan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Angka ini berfungsi untuk menilai beban yang ditanggung oleh

penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin tinggi angka ketergantungan maka semakin tinggi beban penduduk produktif membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi dan sebaliknya.

Tabel 2.45
Proyeksi Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2025-2029

No	Indikator	Proyeksi Rasio Ketergantungan (Persen)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	<15 th dan >64 th	220.870	224.620	228.900	233.530	238.340
2	15-64 th	528.500	534.150	539.100	543.490	547.470
3	Rasio Ketergantungan	41,79	42,05	42,46	42,97	43,53

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara 2020-2035, Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Provinsi Kalimantan Utara 2023

Hasil proyeksi menurut kelompok umur di Provinsi Kalimantan Utara baik jumlah penduduk non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) maupun penduduk produktif (15-64 tahun) menunjukkan kecenderungan meningkat. Jumlah penduduk usia non produktif meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,92 persen per tahun, di mana pada tahun 2025 jumlah penduduk non produktif ini tercatat sebanyak 220.870 jiwa dan meningkat menjadi 238.340 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk usia produktif menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,89 persen per tahun. Pada tahun 2025, jumlah penduduk produktif di provinsi ini tercatat sebesar 528.500 jiwa dan meningkat menjadi 547.470 jiwa di tahun 2029.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

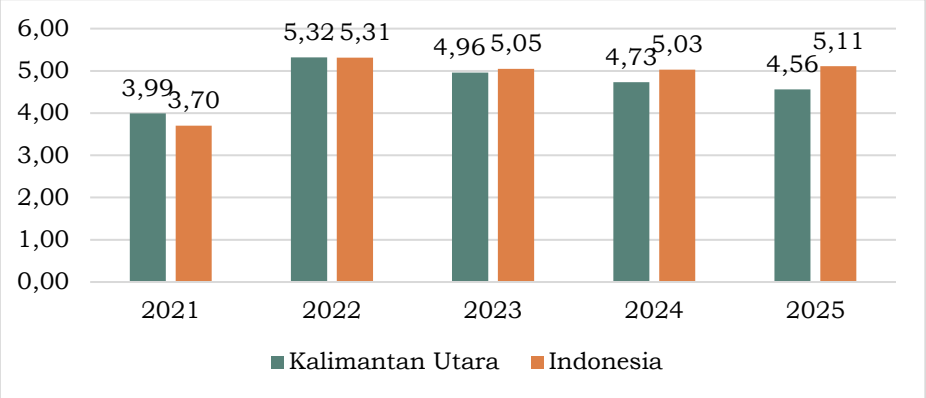
1. Laju Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui sejumlah indikator salah satunya laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang mengukur pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu yang ditunjukkan oleh perubahan nilai Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan selisih nilai PDRB ADHK tahun tertentu (*t*) terhadap tahun sebelumnya *(t-1)*. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi mengindikasikan aktivitas ekonomi yang semakin menguat.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kalimantan Utara selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kalimantan Utara atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2025, mencapai 76.468,9 miliar rupiah. Angka tersebut naik dari 73.134,4 miliar rupiah pada tahun 2024.

Gambar 2.14
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: BPS RI, 2025

Ekonomi Kalimantan Utara tahun 2025 tumbuh sebesar 4,56 persen, melambat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 4,73 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh pertumbuhan semua kategori lapangan usaha kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,17 persen.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi

adalah Konstruksi sebesar 11,17 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,99 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,84 persen. Sementara itu, Pertambangan dan Penggalian yang memiliki peran dominan terkontraksi 1,09 persen. Sedangkan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 2,60 persen.

Secara keseluruhan, Pulau Kalimantan menyumbang perekonomian Indonesia sebesar 8,12 persen di Tahun 2025. Struktur ekonomi wilayah Pulau Kalimantan didominasi oleh Provinsi Kalimantan Timur sebesar 46,31 persen dan yang paling kecil Provinsi Kalimantan Utara sebesar 8,13 persen.

Tabel 2.46
PDRB ADHK Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)					LPE (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.301,51	11.719,33	12.229,9	12.444,2	12.767,3	2,6
B	Pertambangan dan Penggalian	16.710,77	17.913,47	18.561,4	18.613,8	18.410,0	-1,09
C	Industri Pengolahan	5.548,87	5.768,31	5.879,5	6.188,5	6.744,6	8,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	46,81	50,13	59,4	59,4	61,9	4,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	43,79	45,96	48,7	52,3	53,5	2,39
F	Konstruksi	7.858,10	7.680,74	8.351,6	9.349,8	10.394,3	11,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.282,83	7.949,28	8.453,7	9.288,2	10.202,3	9,84
H	Transportasi dan Pergudangan	3.826,14	4.223,34	4.457,1	4.702,9	4.982,4	5,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	881,96	978,42	1.059,0	1.178,8	1.296,5	9,99
J	Informasi dan Komunikasi	2.090,22	2.267,20	2.414,3	2.538,0	2.653,8	4,56
K	Jasa Keuangan	746,25	814,49	915,4	974,0	1.011,5	3,85
L	Real Estate	587,53	615,49	637,7	666,0	707,1	6,17
M,N	Jasa Perusahaan	149,04	158,57	164,1	169,2	173,5	2,52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.171,73	3.268,51	3.370,9	3.518,1	3.517,0	-0,03
P	Jasa Pendidikan	1.670,88	1.782,71	1.875,5	1.978,0	2.010,5	1,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	817,90	828,81	848,8	874,5	912,3	4,32
R,S,T, U	Jasa Lainnya	428,66	469,62	504,4	538,7	570,4	5,89
PDRB Migas		**63.162,97**	**66.534,39**	**69.831,5**	**73.134,4**	**76.468,9**	**4,56**
PDRB Tanpa Migas		**61.213,74**	**64.571,38**	**67.948,3**	**71.445,4**	**74.810,0**	**4,69**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara didorong oleh kinerja positif seluruh lapangan usaha, khususnya sektor perdagangan besar dan eceran; pertanian, kehutanan dan perikanan; dan pertambangan dan penggalian. Kinerja ketiga sektor tersebut menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian daerah beberapa tahun terakhir. Pada saat pandemi COVID-19 terjadi, kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tetap tumbuh positif yakni sebesar 4,3 persen menjadi penyelamat perekonomian daerah dari kontraksi yang jauh lebih dalam. Komoditas udang, ikan, rumput laut, dan kelapa sawit menjadi komoditas unggulan daerah yang mendorong PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus mengalami kenaikan.

Selama lima tahun terakhir struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan penggalian; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing–masing lapangan usaha pembentukan PDRB Kalimantan Utara.

Struktur PDRB Kalimantan Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 masih didominasi oleh lima lapangan usaha utama,. Kelima lapangan tersebut yaitu Pertambangan dan Penggalian sebesar 26,84 persen; diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,87 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,73 persen; Konstruksi sebesar 13,70 persen; serta Industri Pengolahan sebesar 8,75 persen. Peran kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Utara mencapai 77,89 persen.

Tabel 2.47
PDRB ADHB Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.084,95	19.554,49	20.956,7	21.698,8	23.207,7
B	Pertambangan dan Penggalian	30.397,76	50.200,40	50.337,8	42.164,0	41.873,1
C	Industri Pengolahan	9.929,87	10.773,85	11.326,6	12.153,2	13.657,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	61,45	69,19	86,1	86,6	90,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	68,07	73,30	78,1	86,2	89,6
F	Konstruksi	15.135,25	15.199,54	16.892,5	18.994,0	21.378,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13857,59	15476,14	17.053,0	19.075,0	21.419,3
H	Transportasi dan Pergudangan	6.986,81	8.714,53	10.366,3	11.066,3	11.619,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.667,88	1.913,63	2.132,8	2.432,4	2.769,1
J	Informasi dan Komunikasi	2.940,89	3.333,65	3.627,3	3.856,5	4.097,3
K	Jasa Keuangan	1.248,10	1.408,83	1.607,9	1.731,2	1.820,1
L	Real Estate	820,52	868,92	905,4	958,5	1.031,4
M,N	Jasa Perusahaan	245,05	267,80	281,4	296,5	311,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.192,66	5.530,71	5.926,3	6.239,0	6.202,3
P	Jasa Pendidikan	2.823,48	3.088,48	3.363,2	3.625,6	3.755,9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.261,85	1.303,59	1.379,8	1.443,2	1.534,5
R,S,T,U	Jasa Lainnya	808,05	897,91	986,4	1.069,8	1.168,7
PDRB Migas		**111.530,22**	**138.674,96**	**147.307,7**	**146.976,7**	**156.025,7**
PDRB Tanpa Migas		**108.133,47**	**134.452,87**	**143.465,5**	**143.495,7**	**152.663,1**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

Tabel 2.48
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2021-2025 (%)

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,22	14,10	14,23	14,76	14,87
B	Pertambangan dan Penggalian	27,26	36,20	34,17	28,69	26,84
C	Industri Pengolahan	8,90	7,77	7,69	8,27	8,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,05	0,05	0,06	0,06
F	Konstruksi	13,57	10,96	11,47	12,92	13,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,42	11,16	11,58	12,98	13,73
H	Transportasi dan Pergudangan	6,26	6,28	7,04	7,53	7,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,50	1,38	1,45	1,65	1,77
J	Informasi dan Komunikasi	2,64	2,40	2,46	2,62	2,63
K	Jasa Keuangan	1,12	1,02	1,09	1,18	1,17
L	Real Estate	0,74	0,63	0,61	0,65	0,66
M,N	Jasa Perusahaan	0,22	0,19	0,19	0,20	0,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,66	3,99	4,02	4,24	3,98
P	Jasa Pendidikan	2,53	2,23	2,28	2,47	2,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,13	0,94	0,94	0,98	0,98
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,72	0,65	0,67	0,73	0,75
Total		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

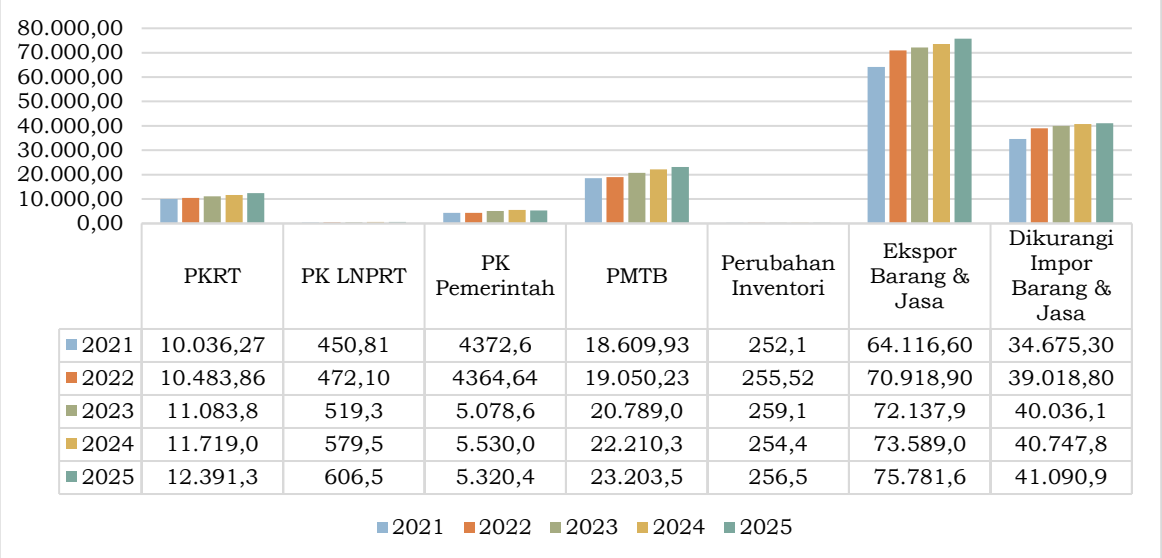
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

Selama lima tahun terakhir (2021–2025) struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan penggalian; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing–masing lapangan usaha pembentukan PDRB Kalimantan Utara. terhadap Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 26,84 persen (menurun dari 27,26 persen pada tahun 2021). Selanjutnya Lapangan Usaha Pertanian,

Kehutanan dan Perikanan sebesar 14,87 persen (menurun peranannya dari 16,22 persen pada tahun 2021); selanjutnya Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,73 persen (meningkat dari 12,42 persen pada tahun 2021). Konstruksi sebesar 13,70 persen (meningkat dari 13,57 persen di tahun 2021); dan lapangan usaha Industri Pengolahan 8,75 persen (angka ini menurun dari 8,90 persen di tahun 2021).

Diantara kelima lapangan usaha tersebut, Kontruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan kategori yang mengalami peningkatan peranan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2021. Sebaliknya Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian; dan Industri Pengolahan peranannya mengalami penurunan. Sementara itu peranan lapangan usaha lainnya, masing–masing kurang dari 7,5 persen.

Gambar 2.15
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (miliar rupiah) Tahun 2021-2025



	PKRT	PK LNPRT	PK Pemerintah	PMTB	Perubahan Inventori	Ekspor Barang & Jasa	Dikurangi Impor Barang & Jasa
2021	10.036,27	450,81	4372,6	18.609,93	252,1	64.116,60	34.675,30
2022	10.483,86	472,10	4364,64	19.050,23	255,52	70.918,90	39.018,80
2023	11.083,8	519,3	5.078,6	20.789,0	259,1	72.137,9	40.036,1
2024	11.719,0	579,5	5.530,0	22.210,3	254,4	73.589,0	40.747,8
2025	12.391,3	606,5	5.320,4	23.203,5	256,5	75.781,6	41.090,9

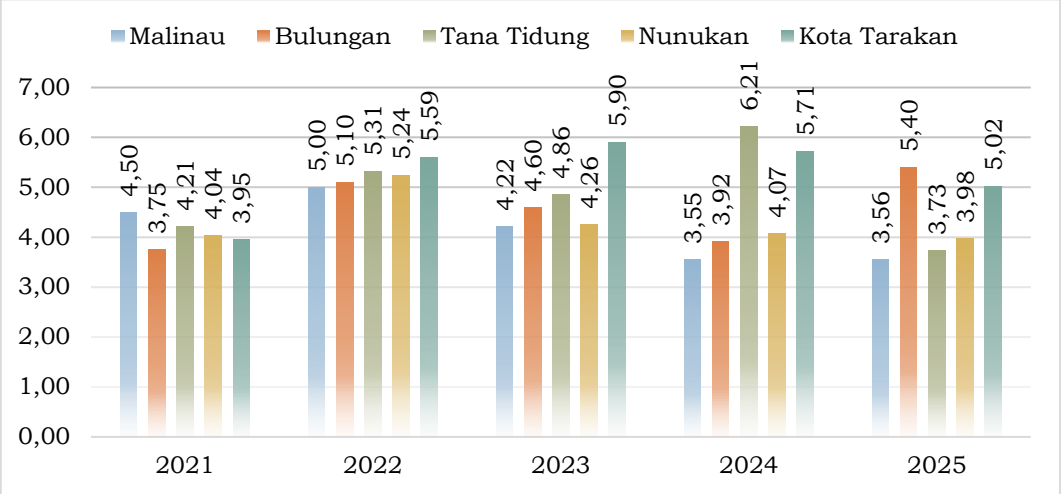
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh komponen PDRB Pengeluaran. Pada tahun 2025, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,74 persen; diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit

Rumah Tangga (PK LNPRT) sebesar 4,66 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,47 persen; dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 2,98 persen. Sementara itu, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi sebesar 3,79 persen dan Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar 0,84 persen.

Struktur PDRB Kalimantan Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Kalimantan Utara masih didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 102,60 persen; Komponen PMTB sebesar 28,38 persen; Komponen PK-RT sebesar 14,85 persen; Komponen PK-P sebesar 6,57 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 0,74 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,24 persen. Sementara komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 53,37 persen.

Gambar 2.16
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara juga didorong oleh pertumbuhan PDRB di tingkat kabupaten/kota. Secara umum, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022, kemudian pertumbuhan cenderung melambat secara moderat hingga tahun

2025. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemulihan ekonomi awal didorong oleh bertumbuhnya kembali aktivitas ekonomi, sementara pada periode selanjutnya pertumbuhan mulai kembali pada tingkat yang lebih normal dan berkelanjutan.

Data tahun 2025 menunjukkan adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antarwilayah. Kabupaten Bulungan mencatat laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan capaian sekitar 5,40 persen, yang mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan penguatan sektor-sektor produktif di wilayah tersebut. Di sisi lain, Kabupaten Malinau menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah, yaitu sekitar 3,56 persen.

Pertumbuhan PDRB setiap kabupaten/kota memberikan kontribusi yang berbeda. Pada Tahun 2025, pertumbuhan PDRB Kota Tarakan menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dengan kontribusi mencapai 37,68 persen diikuti oleh Kabupaten Nunukan sebesar 26,92 persen, Kabupaten Bulungan sebesar 17,39 persen, Kabupaten Malinau sebesar 11,87 persen, dan Kabupaten Tana Tidung sebesar 6,15 persen. Rendahnya kontribusi Kabupaten Tana Tidung terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat dari nilai PDRB daerah yang berada di bawah kabupaten/kota lainnya. PDRB Kabupaten Tana Tidung sebesar 4,64 triliun rupiah sedangkan PDRB Kota Tarakan mencapai 28,47 triliun rupiah pada tahun 2025.

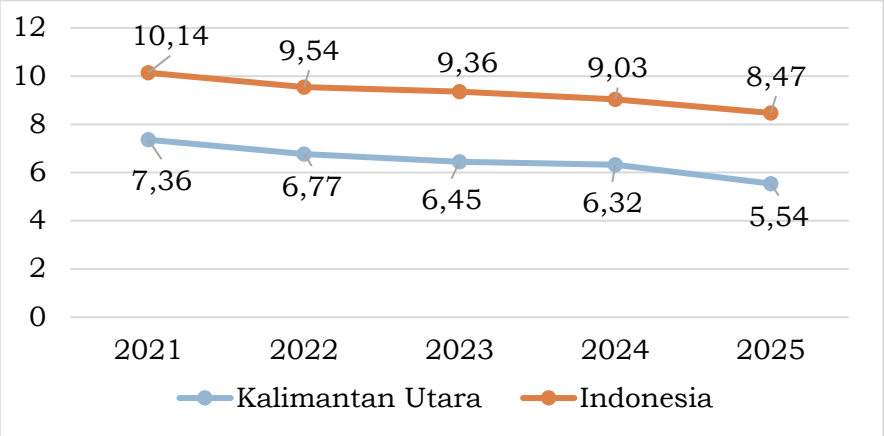
2. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan digambarkan oleh indikator persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terhadap total penduduk di suatu wilayah. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung, seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, harga barang dan jasa, dan lainnya.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara kondisi Maret 2025 mencapai 42,57 ribu penduduk (5,54 persen), terdiri dari 25,56 ribu penduduk miskin di wilayah perkotaan dan 17,01 ribu penduduk miskin di wilayah perdesaan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

(Susenas), pada Maret 2025 Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara mencapai Rp 884.970,00.

Gambar 2.17
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2021-2025 (%)



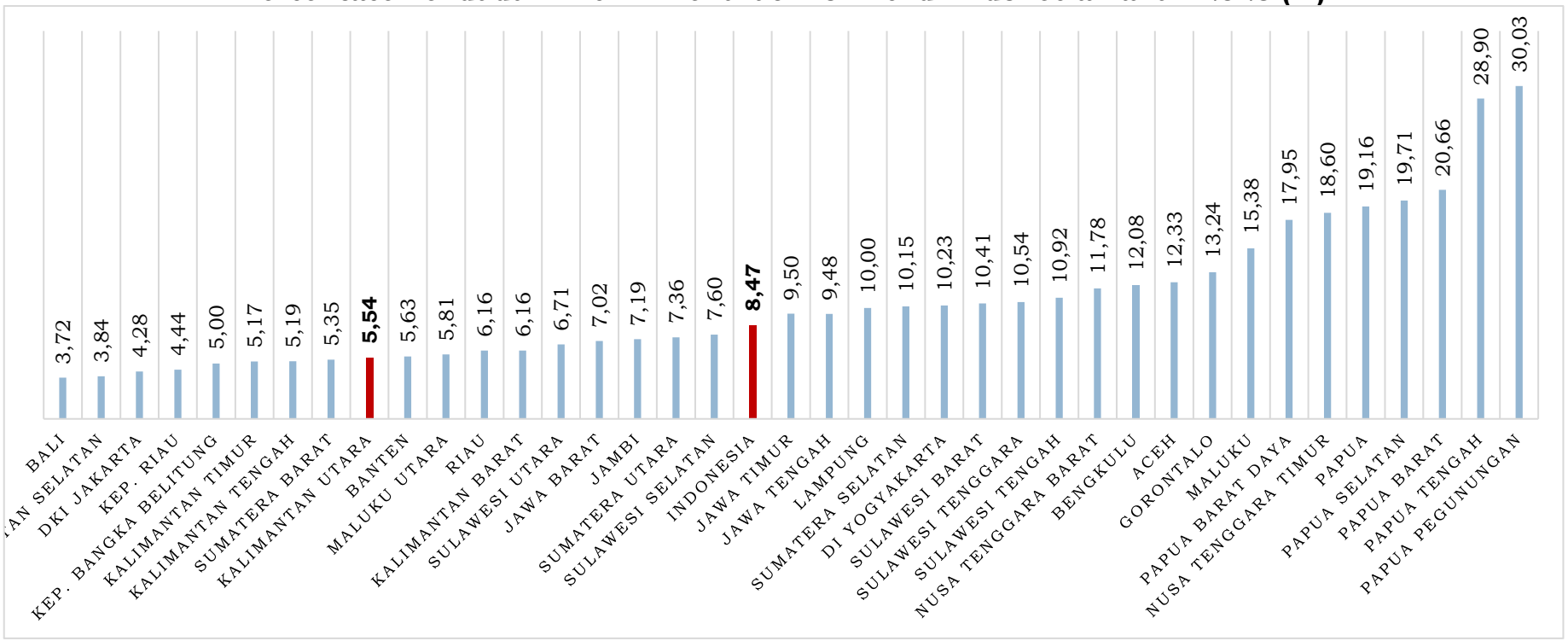
Sumber: BPS RI, 2026

Ket: menggunakan data Maret 2025

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan penurunan rata-rata sebesar 1,98 persen per tahun selama periode 2021-2024. Namun pada tahun 2025 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara mengalami sedikit peningkatan menjadi 5,47 persen. Namun demikian, selama kurun waktu tahun 2021 sampai 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara lebih rendah dibandingkan dengan nasional.

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara kondisi Maret 2025 adalah 0,75 dimana Indeks Kedalaman Kemiskinan di perkotaan mencapai 0,81 dan Indeks Kedalaman Kemiskinan di perdesaan mencapai 0,65. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara kondisi Maret 2025 adalah 0,29 dimana Indeks Keparahan Kemiskinan di perkotaan mencapai 0,39 dan Indeks Keparahan Kemiskinan di perdesaan mencapai 0,12.

Gambar 2.18
Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2025 (%)



Sumber: BPS RI, 2026

Ket.: menggunakan data Maret 2025

Data pada gambar di atas menunjukkan posisi tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 berada pada urutan terendah ke-9 dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Namun, jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di wilayah Pulau Kalimantan, tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara merupakan yang tertinggi ke-2.

Penurunan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara didorong oleh berbagai upaya Pemerintah Daerah dalam menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Kondisi ini dapat dilihat dari keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menurunkan jumlah penduduk miskin meskipun garis kemiskinan menunjukkan kenaikan. Terjaganya kenaikan garis kemiskinan tersebut mengindikasikan pengendalian harga barang kebutuhan pokok berjalan dengan baik.

Tabel 2.49
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025 (%)

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Malinau	7,30	6,64	6,54	6,94	5,56
Bulungan	10,03	9,32	8,99	8,76	7,26
Tana Tidung	5,15	4,45	4,62	4,47	4,56
Nunukan	6,79	6,13	5,53	5,73	5,27
Tarakan	6,71	6,30	6,10	5,56	5,03

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026
Ket.: menggunakan data Maret 2025

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara juga dipengaruhi oleh kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di dalamnya. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Bulungan yakni mencapai 7,26 persen pada tahun 2025, sedangkan kemiskinan terendah terjadi di Kabupaten Tana Tidung yaitu 4,56 persen. Keempat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren penurunan kemiskinan selama periode 2021-2025. Tingkat kemiskinan yang beragam menjadi sebuah penanda bahwa penanganan kemiskinan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara masih menjadi tantangan mengingat karakteristik wilayah yang berbeda antara kabupaten/kota yang satu dengan yang lainnya.

Lebih lanjut, perkembangan tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan dalam upaya pengurangan kemiskinan paling rentan. Persentase kemiskinan ekstrem berhasil turun dari 0,41 persen pada tahun 2024 menjadi 0,23 persen pada tahun 2025, yang mengindikasikan bahwa jumlah penduduk dengan kondisi kesejahteraan sangat rendah semakin berkurang. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa intervensi pemerintah daerah melalui program perlindungan sosial, bantuan pangan, peningkatan akses layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat mulai memberikan dampak positif terhadap kelompok masyarakat paling miskin dan rentan.

Di tingkat kabupaten/kota, seluruh wilayah juga mengalami penurunan kemiskinan ekstrem. Kabupaten Malinau masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi pada tahun 2025 sebesar 0,49 persen, meskipun mengalami penurunan cukup besar dari 0,93 persen pada 2024. Sebaliknya, Kota Tarakan menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem terendah yaitu 0,15 persen, diikuti Kabupaten Tana Tidung sebesar 0,17 persen.

Tabel 2.50
Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dan 2025 (%)

	Kabupaten/Kota	2024	2025	Perubahan
1	Malinau	0,93	0,49	-0,44
2	Bulungan	0,30	0,18	-0,12
3	Tana Tidung	0,25	0,17	-0,08
4	Nunukan	0,43	0,24	-0,19
5	Tarakan	0,28	0,15	-0,13
	Kalimantan Utara	**0,41**	**0,23**	**-0,18**

Sumber: BPS RI, 2026

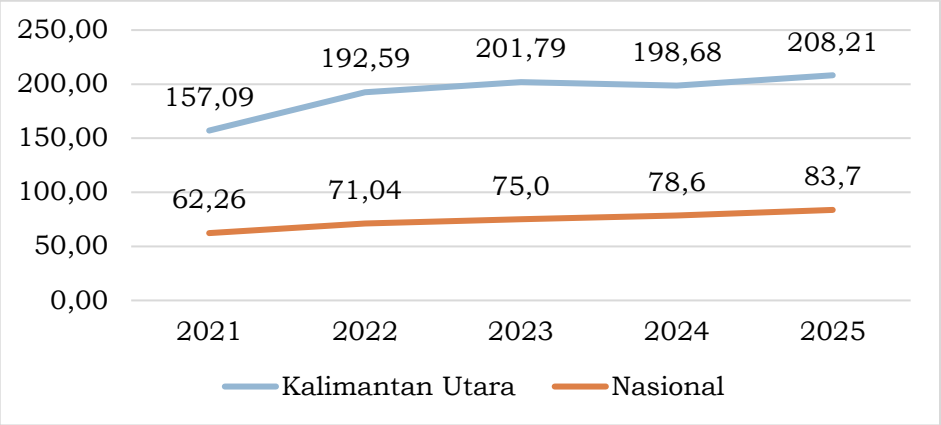
Penurunan kemiskinan ekstrem di seluruh kabupaten/kota mengindikasikan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dan meningkatnya efektivitas program perlindungan sosial, bantuan ekonomi, serta intervensi penanggulangan kemiskinan. Kabupaten Malinau mencatat penurunan terbesar sebesar 0,44 poin persen, yang menunjukkan adanya kemajuan cukup signifikan di wilayah

pedalaman. Sementara itu, Kabupaten Nunukan juga mengalami penurunan cukup besar dari 0,43 persen menjadi 0,24 persen, meskipun wilayah perbatasan tersebut masih menghadapi tantangan aksesibilitas dan pemerataan layanan dasar.

3. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang menunjukkan tingkat produktivitas penduduk di suatu wilayah. Indikator ini juga digunakan sebagai indikator kesejahteraan karena dianggap mampu menggambarkan tingkat pendapatan setiap penduduk sebagai imbal hasil atas nilai tambah yang dihasilkan terhadap perekonomian daerah. Berikut ini adalah besaran PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Utara.

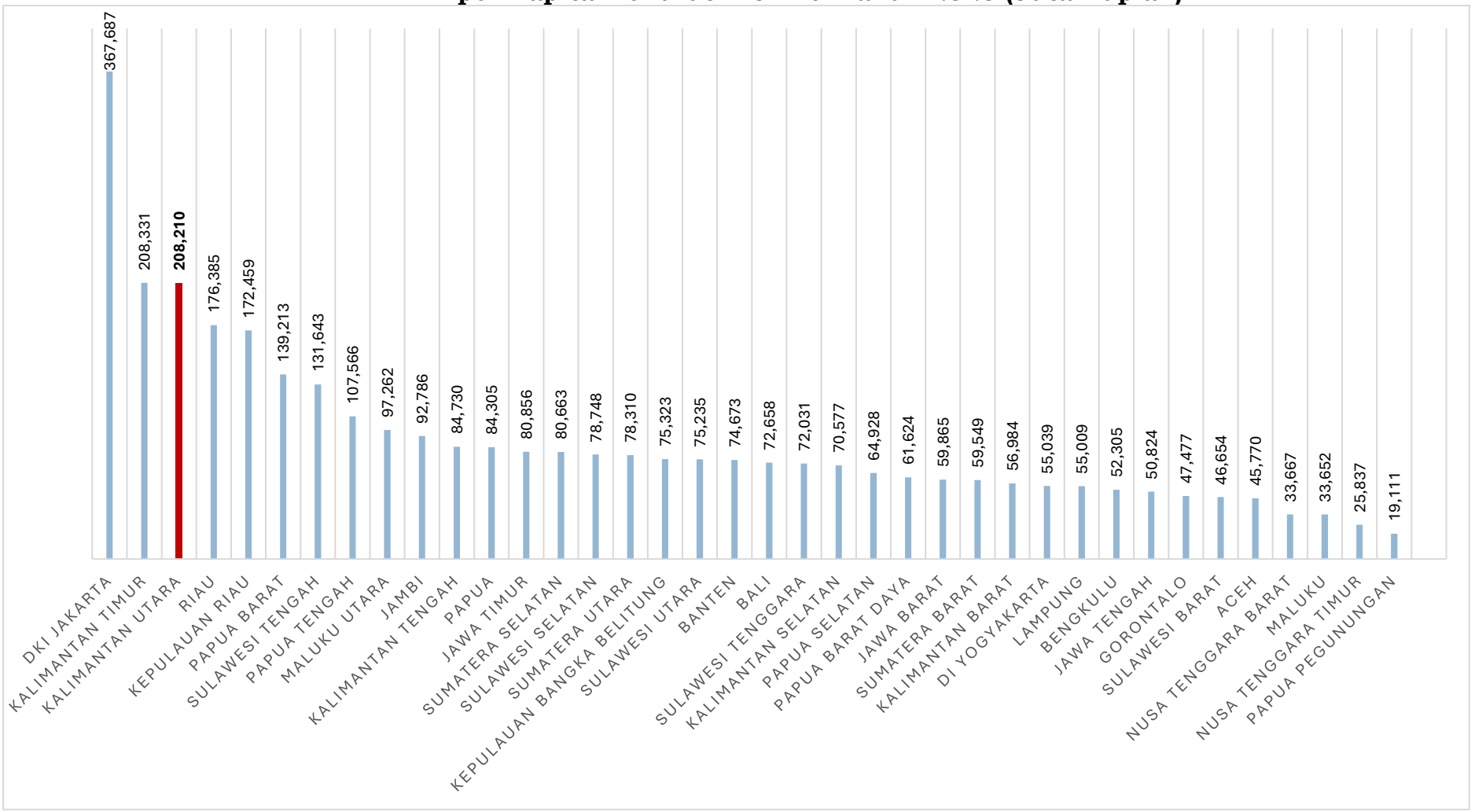
Gambar 2.19
PDRB ADHB per Kapita Provinsi Kalimantan Utara dan PDB ADHB per Kapita Indonesia Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS RI, 2026

PDRB nominal per kapita Provinsi Kalimantan Utara lebih tinggi dibandingkan dengan PDB Indonesia selama periode 2021-2025. PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Utara lebih tinggi hingga 148,82 persen dibandingkan PDB nasional pada tahun 2025. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan tahun 2024 namun PDRB per kapita ADHB Kalimantan Utara pada tahun 2025 mencapai 208,21 juta rupiah atau mengalami kenaikan 4,93 persen atau sebesar 9,78 juta rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 2.20
PDRB ADHB per Kapita Menurut Provinsi Tahun 2025 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS RI, 2026

PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 merupakan ketiga tertinggi setelah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Timur. Tingginya PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara didorong oleh karakteristik perekonomian yang sama yakni ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian, khususnya komoditas batu bara. PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta merupakan yang tertinggi mencapai 367,687 juta rupiah. Berbeda dengan Provinsi Kalimantan Utara, perekonomian DKI Jakarta ditopang oleh sektor jasa sehingga nilai tambah yang dihasilkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang masih bergantung pada sektor primer.

Tabel 2.51
PDRB ADHB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Malinau	154,010	211,913	218,442	209,057	215,362
Bulungan	131,808	156,183	162,192	160,813	169,985
Tana Tidung	258,113	330,501	337,976	335,175	338,606
Nunukan	147,671	195,654	204,595	192,001	199,721
Tarakan	170,703	190,207	208,143	221,044	233,098
Kalimantan Utara	**157,09**	**192,59**	**201,790**	**198,680**	**208,210**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

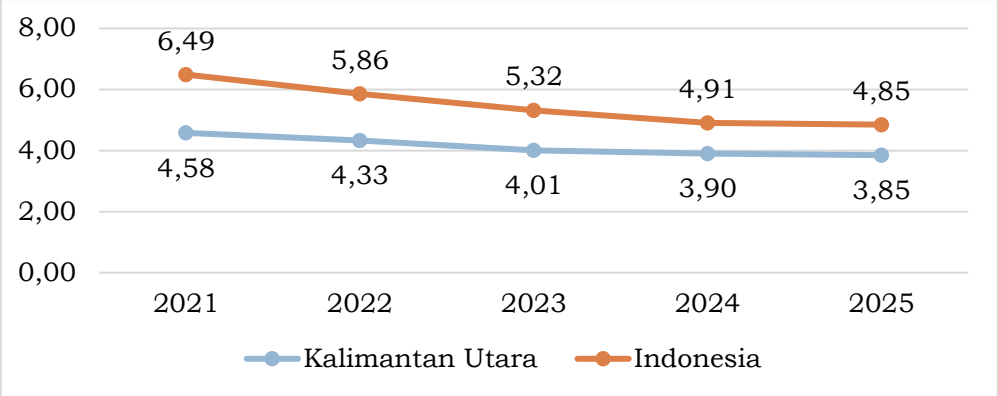
PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Utara didorong oleh PDRB yang dihasilkan oleh kabupaten/kota di wilayahnya. Capaian tertinggi tercatat di Kabupaten Tana Tidung dengan PDRB per kapita mencapai 338,606 juta rupiah sedangkan terendah tercatat di Kabupaten Bulungan sebesar 169,985 juta rupiah pada tahun 2025.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah juga dapat dilihat dari kondisi ketenagakerjaan. Pembangunan ekonomi yang inklusif diharapkan dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan sehingga setiap penduduk dapat menghasilkan nilai tambah terhadap perekonomian daerah yang kemudian berdampak pada tingkat kesejahteraan. Tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk

menggambarkan kondisi tenaga kerja di suatu wilayah. Berikut ini adalah tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara.

Gambar 2.21
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2021-2025

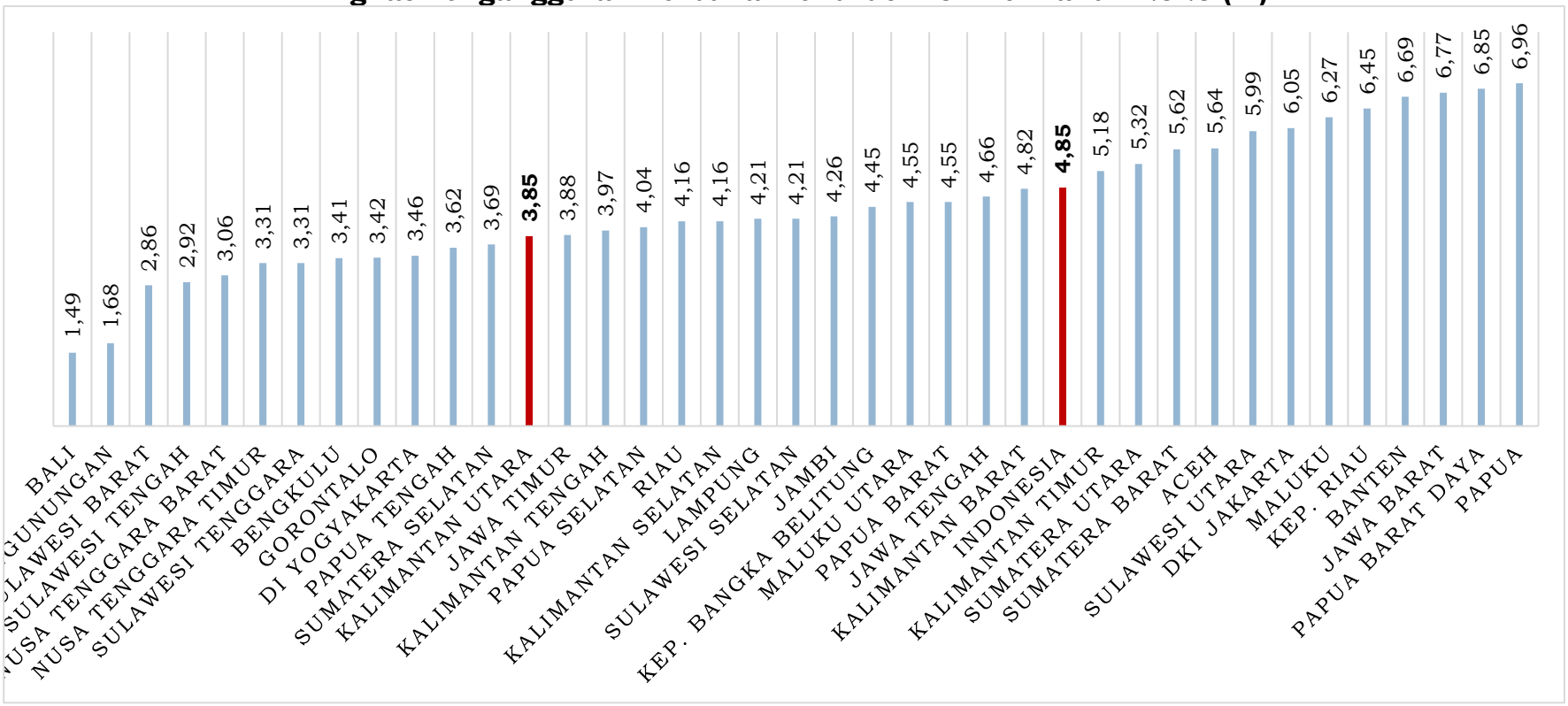


Sumber: BPS RI, 2026

Kondisi TPT di Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan tren perbaikan yang relatif konsisten, meskipun sempat mengalami fluktuasi pada fase pemulihan ekonomi pascapandemi. TPT Kalimantan Utara menurun dari tingkat yang lebih tinggi pada awal periode menjadi 3,90 persen pada tahun 2024, kemudian kembali menurun menjadi sekitar 3,85 persen pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan adanya peningkatan kemampuan perekonomian daerah dalam menyerap tenaga kerja, seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi dan pembangunan di berbagai sektor.

Jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka nasional, TPT Kalimantan Utara secara konsisten berada di bawah rata-rata nasional sepanjang periode pengamatan. Pada tahun 2025, TPT nasional tercatat masih berada di kisaran sekitar 4,85 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian Kalimantan Utara. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara agregat pasar tenaga kerja di Kalimantan Utara relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional, meskipun skala ekonomi provinsi lebih kecil. Keunggulan ini mencerminkan peran sektor-sektor padat karya dan aktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal dalam menjaga tingkat penyerapan tenaga kerja.

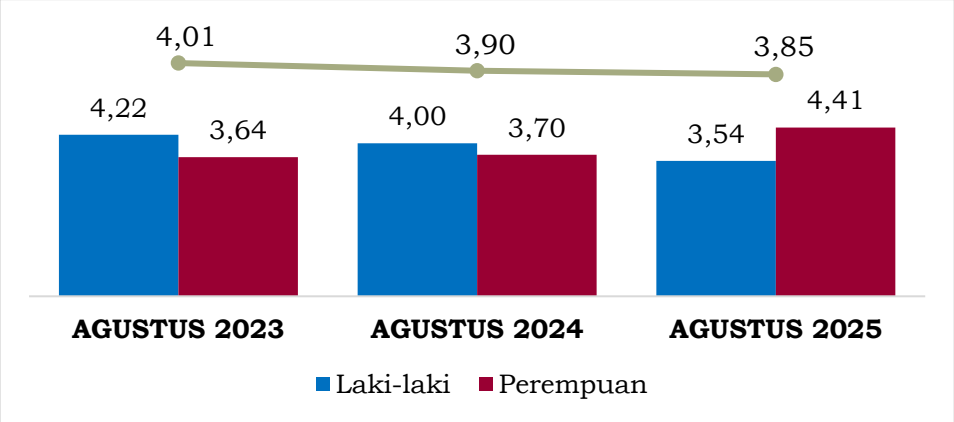
Gambar 2.22
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi Tahun 2025 (%)



Sumber: BPS RI, 2026

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan 37 provinsi lainnya di Indonesia, capaian TPT Provinsi Kalimantan Utara tercatat berada pada urutan ke-13, sekaligus menempati urutan pertama terbaik apabila dibandingkan dengan empat provinsi lainnya di Pulau Kalimantan.

Gambar 2.23
Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara (%), Agustus 2023–Agustus 2025



Sumber: BPS Kalimantan Utara, 2026

Pada Agustus 2025, TPT laki-laki sebesar 3,54 persen, yang mana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan sebesar 4,41 persen. Apabila dibandingkan dengan TPT Agustus 2024, TPT laki-laki pada Agustus 2025 menurun sebesar -0,46 persen poin sedangkan TPT perempuan meningkat sebesar 0,71 persen poin. Secara keseluruhan, TPT pada Agustus 2023 hingga Agustus 2025 mengalami tren penurunan yang konsisten dari 4,01 persen hingga 3,85 persen.

Tabel 2.52
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Malinau	4,14	3,3	3,19	3,10	3,42
Bulungan	4,54	5,03	4,54	4,33	4,14
Tana Tidung	5,26	3,33	3,24	3,67	3,68
Nunukan	4,24	2,74	2,69	2,71	2,61
Tarakan	4,94	5,76	5,25	5,11	5,06
Kalimantan Utara	**4,58**	**4,33**	**4,01**	**3,90**	**3,85**

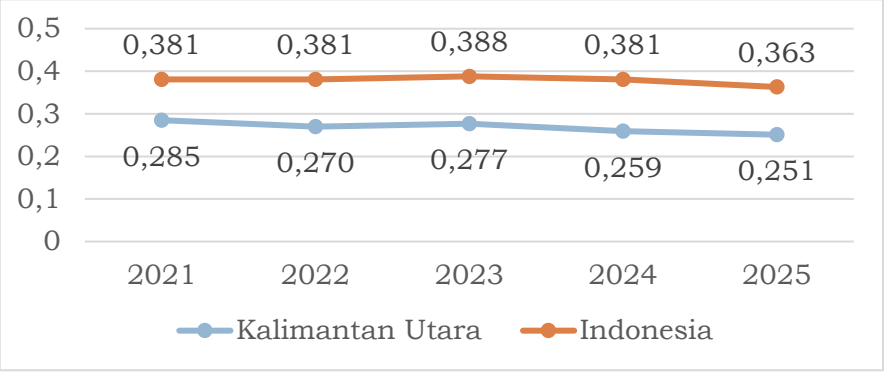
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

Capaian TPT di lima kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Hal tersebut ditandai dengan turunnya TPT di seluruh kabupaten/kota selama periode 2021-2025. TPT tertinggi tercatat di Kabupaten Tarakan mencapai 5,06 persen sedangkan terendah tercatat di Kabupaten Nunukan yang hanya sebesar 2,61 persen pada tahun 2025.

5. Indeks Gini

Pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh kelompok masyarakat akan tetapi pada kenyataannya pelaksanaan pembangunan ekonomi di suatu wilayah tidak selalu merata. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan di antara kelompok masyarakat. Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan masyarakat, yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing–masing kelompok penduduk. Besaran nilai Indeks Gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Capaian Indeks Gini yang semakin mendekati nol dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik, sebaliknya apabila angka koefisien semakin mendekati satu, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar.

Gambar 2.24
Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia
Tahun 2021-2025

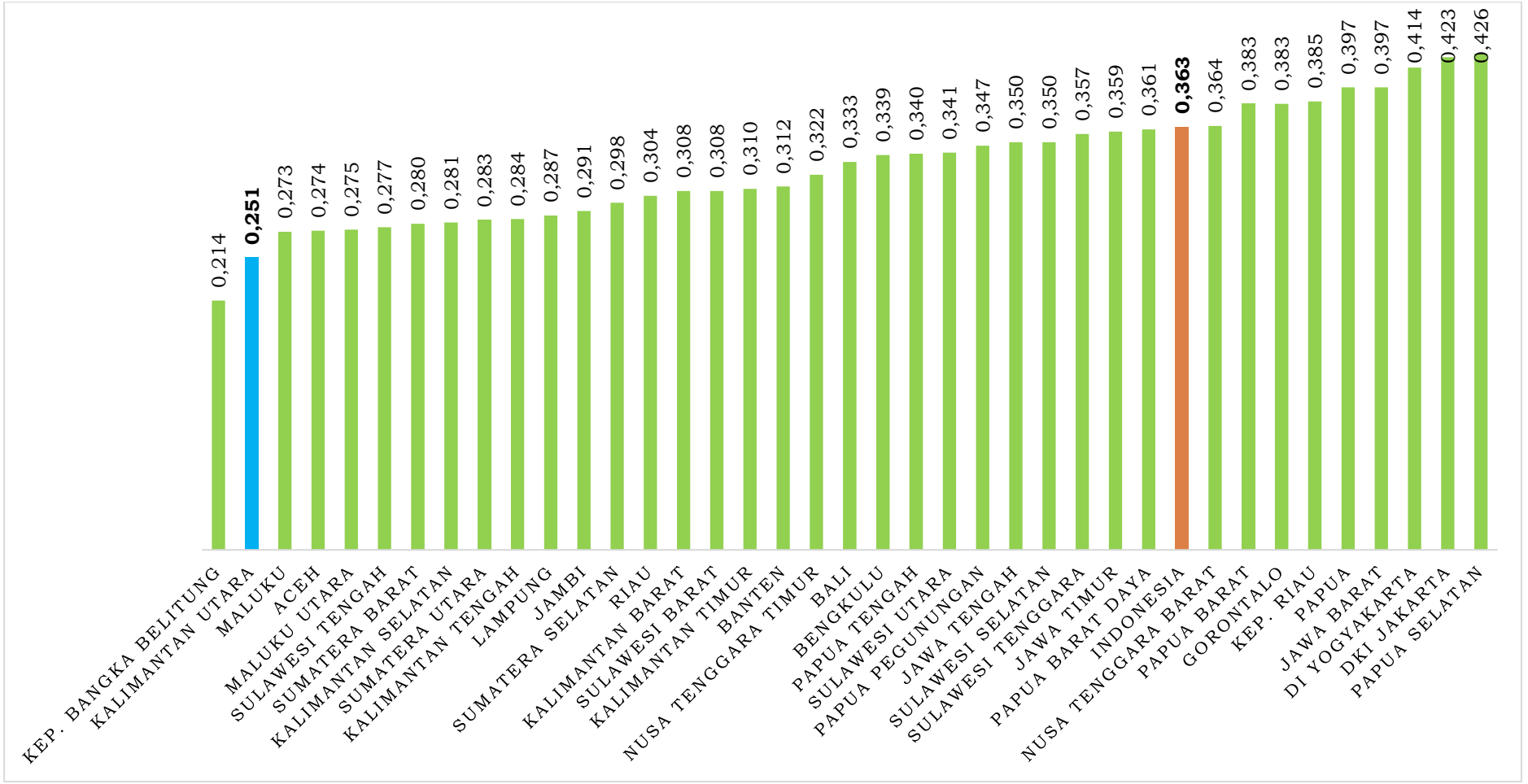


Sumber: BPS RI, 2026

Indeks Gini baik di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kondisi yang semakin membaik, yang ditunjukkan dengan menurunnya nilai Indeks Gini sebesar 0,034 poin periode 2021-2025. Dalam rentang waktu yang sama, capaian Indeks Gini di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kondisi yang lebih baik apabila dibandingkan dengan capaian nasional, di mana dalam kurun waktu tersebut kondisi ketimpangan Provinsi Kalimantan Utara berada dalam kategori ketimpangan rendah atau di bawah 0,3.

Apabila dibandingkan dengan 37 provinsi lain di Indonesia berdasarkan data Maret 2025, capaian Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara berada pada urutan kedua setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan empat provinsi lain di Pulau Kalimantan, maka capaian Provinsi Kalimantan Utara menempati pada urutan pertama terbaik. Rendahnya nilai indeks gini di Provinsi Kalimantan Utara mengindikasikan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat tergolong rendah meskipun jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinannya, kondisi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara masih perlu untuk ditingkatkan.

Gambar 2.25
Indeks Gini Menurut Provinsi Tahun 2025



Sumber: BPS RI, 2026

Ket: menggunakan data Gini Rasio September 2025

Capaian Indeks Gini menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara cukup beragam, di mana dalam rentang waktu lima tahun terakhir seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kondisi yang semakin membaik, walaupun pada Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan cenderung meningkat. Secara keseluruan, ketimpangan di kabupaten/kota masih berada pada kriteria rendah. Ketimpangan tertinggi tercatat pada Kabupaten Tana Tidung yaitu sebesar 0,275, sedangkan ketimpangan terendah tercatat di Kota Tarakan sebesar 0,238. Pada tahun 2025, ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan lebih besar jika dibandingkan tahun 2024.

Tabel 2.53
Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Malinau	0,304	0,260	0,285	0,283	0,249
Bulungan	0,338	0,287	0,305	0,274	0,275
Tana Tidung	0,312	0,279	0,281	0,280	0,275
Nunukan	0,261	0,265	0,262	0,270	0,257
Tarakan	0,261	0,267	0,253	0,232	0,238
Kalimantan Utara	**0,285**	**0,270**	**0,277**	**0,259**	**0,251**

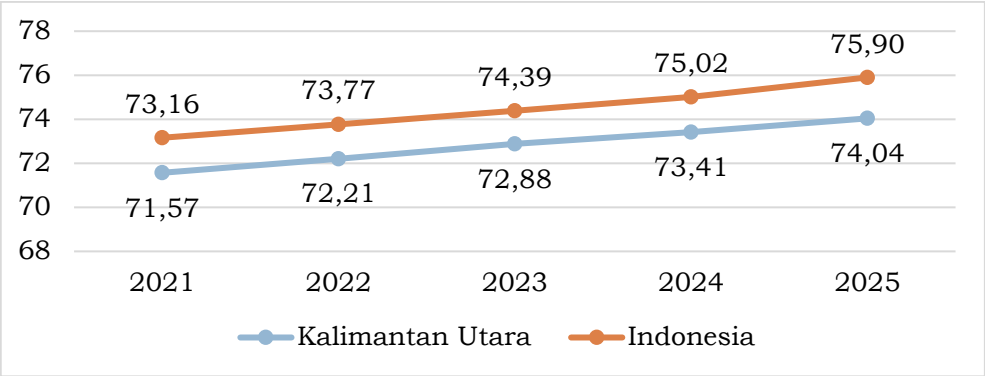
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Ket: Data September 2025

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. IPM dapat digunakan untuk melihat keberhasilan suatu daerah dalam melakukan pembangunan manusia yang telah dilakukan. Pencapaian pembangunan manusia ini diukur melalui tiga dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Berikut adalah capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara.

Gambar 2.26
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2021-2025

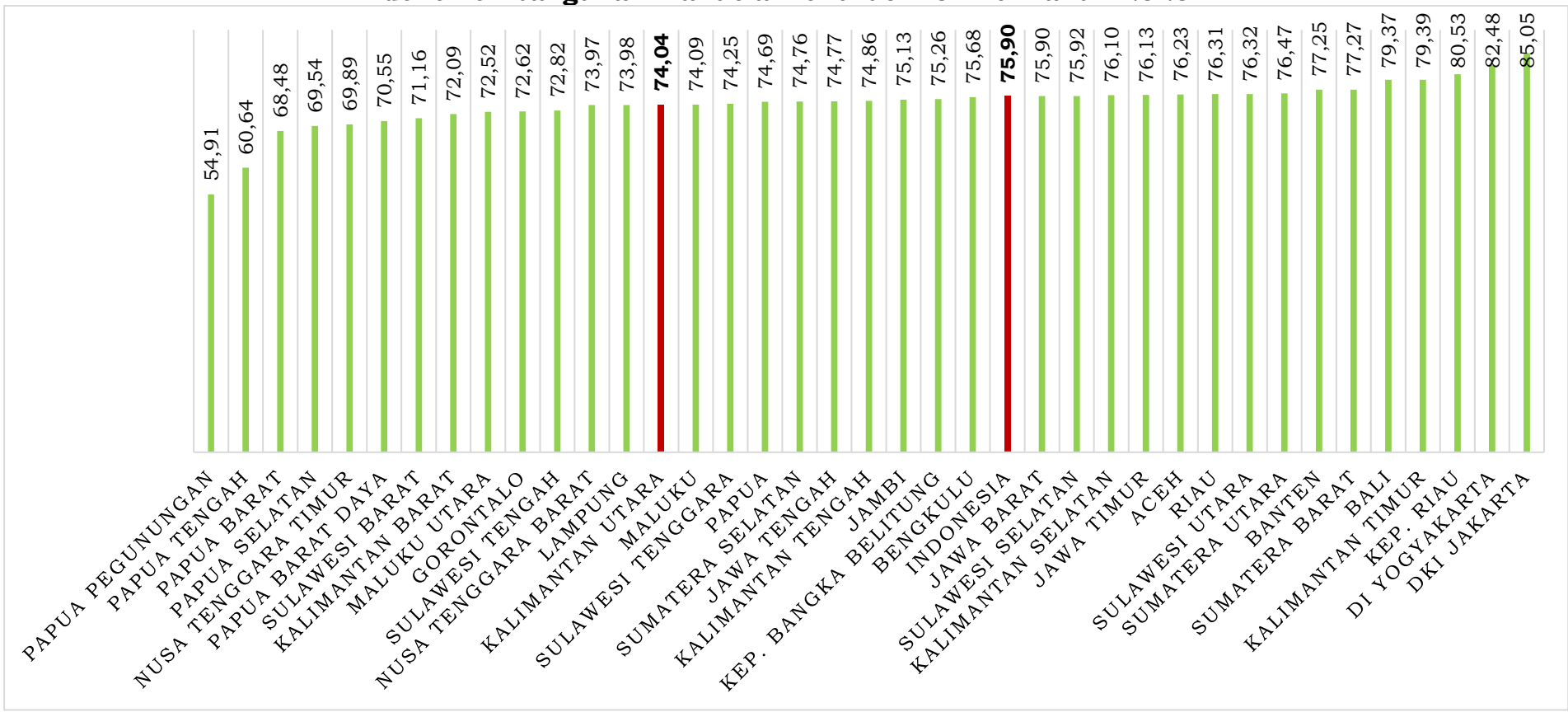


Sumber: BPS RI, 2026

Capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,62 persen per tahun. Pada tahun 2025, IPM Kalimantan Utara mencapai angka 74,04 mengalami kenaikan sebesar 2,47 poin dibandingkan tahun 2021. Pada periode 2021-2025, IPM Provinsi Kalimantan Utara tergolong tinggi tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM nasional. Pada tahun 2025, IPM Provinsi Kalimantan Utara lebih rendah 1,86 poin dibandingkan dengan nasional.

Capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara menempati urutan ke-25 apabila dibandingkan dengan 37 provinsi lain di Indonesia. Sementara itu, jika dibandingkan dengan empat provinsi lain di Pulau Kalimantan, provinsi ini menempati urutan keempat setelah Provinsi Kalimantan Timur (79,39), Provinsi Kalimantan Selatan (76,10), dan Provinsi Kalimantan Tengah (74,86). Capaian tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih memiliki tugas untuk terus bekerja keras dalam mengupayakan peningkatan pembangunan manusia di daerah.

Gambar 2.27
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi Tahun 2025



Sumber: BPS RI, 2026

Capaian IPM di lima kabupaten/kota menunjukkan kecenderungan meningkat pada periode 2021-2025, meskipun masih terdapat satu wilayah dengan capaian IPM pada kriteria sedang, yakni Kabupaten Nunukan dengan capaian sebesar 69,87 pada 2025. Sementara itu, empat wilayah lainnya telah mampu mencapai kriteria IPM tinggi, sekaligus memiliki capaian yang telah melampaui capaian IPM provinsi. Kota Tarakan merupakan wilayah dengan capaian IPM tertinggi di provinsi ini dengan capaian 78,62, dan diikuti oleh Kabupaten Malinau sebesar 75,21 dan Kabupaten Bulungan sebesar 74,53.

Tabel 2.54
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Malinau	73,12	73,55	74,00	74,72	75,21
Bulungan	72,27	72,56	73,20	73,83	74,53
Tana Tidung	68,59	69,45	70,06	70,95	71,86
Nunukan	67,18	67,88	68,43	69,27	69,87
Tarakan	76,30	76,75	77,61	78,03	78,62
Kalimantan Utara	**71,57**	**72,21**	**72,88**	**73,41**	**74,04**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

Indeks Pembangunan Manusia menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan adanya perbedaan capaian yang cukup nyata antara laki-laki dan perempuan pada seluruh wilayah. IPM laki-laki di Kalimantan Utara mencapai 77,77, sedangkan perempuan sebesar 69,51, sehingga terdapat gap pembangunan manusia yang masih cukup lebar. Kota Tarakan mencatat capaian IPM tertinggi baik pada laki-laki maupun perempuan, dengan IPM total sebesar 78,62, yang menunjukkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat relatif lebih baik dibanding kabupaten lainnya. Sebaliknya, Kabupaten Nunukan memiliki IPM terendah sebesar 69,87, diikuti Tana Tidung sebesar 71,86, yang mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di wilayah perbatasan dan daerah dengan aksesibilitas terbatas masih menghadapi tantangan yang cukup besar.

Tabel 2.55

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Kalimantan Utara Tahun 2025

Kabupaten/Kota dan Provinsi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Malinau	79,75	67,61	75,21
Bulungan	79,6	69,78	74,53
Tana Tidung	76,54	62,67	71,86
Nunukan	74,17	64,17	69,87
Tarakan	82,3	77,63	78,62
Kalimantan Utara	**77,77**	**69,51**	**74,04**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

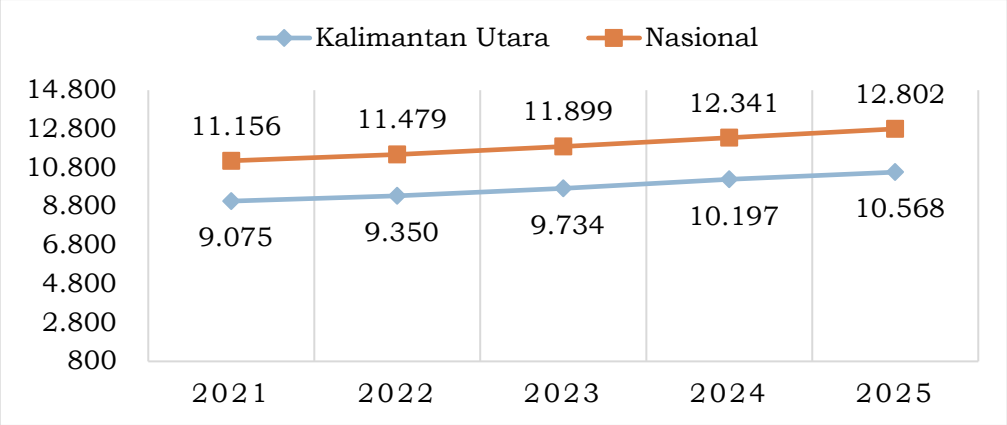
Perbedaan IPM antara laki-laki dan perempuan di seluruh kabupaten/kota menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam pembangunan manusia masih menjadi isu penting di Kalimantan Utara. Gap terbesar terlihat di Kabupaten Tana Tidung dan Malinau, di mana IPM perempuan masih jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi belum sepenuhnya setara. Sementara itu, Kota Tarakan menunjukkan kesenjangan gender yang relatif lebih kecil dibanding daerah lain, yang mencerminkan akses layanan dasar dan peluang ekonomi perempuan yang lebih baik di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, percepatan pembangunan manusia di Kalimantan Utara tidak hanya perlu difokuskan pada peningkatan IPM secara umum, tetapi juga pada pengurangan kesenjangan gender melalui penguatan akses pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan secara lebih merata di seluruh wilayah.

7. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita disesuaikan adalah rata-rata biaya konsumsi penduduk (makanan & non-makanan) selama setahun yang disesuaikan dengan paritas daya beli untuk mencerminkan standar hidup layak. Indikator ini merupakan indikator kunci dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur daya beli masyarakat.

Pengeluaran per kapita disesuaikan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 sampai 2025 terus mengalami peningkatan, dari yang semula 9.075 ribu rupiah pada tahun 2021 menjadi 10.568 ribu rupiah di tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun terus meningkat, namun pengeluaran per kapita disesuaikan di Provinsi Kalimantan Utara pada periode tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran per kapita disesuaikan nasional. Dimana untuk pengeluaran per kapita disesuaikan nasional pada tahun 2025 sudah mencapai 12.802 ribu rupiah.

Gambar 2.28
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2021-2025 (ribu rupiah)



Sumber: BPS RI, 2026

Perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan menurut jenis kelamin di Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2023–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten pada seluruh kabupaten/kota, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2025, pengeluaran per kapita laki-laki di Provinsi Kalimantan Utara mencapai Rp14,92 juta, sedangkan perempuan hanya sebesar Rp6,94 juta. Kota Tarakan secara konsisten mencatat pengeluaran per kapita tertinggi dengan total mencapai Rp12,96 juta pada 2025, menunjukkan tingkat aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat yang relatif lebih baik dibanding daerah lain. Sebaliknya, Kabupaten Nunukan dan Tana Tidung

masih memiliki pengeluaran per kapita terendah, meskipun keduanya juga menunjukkan peningkatan bertahap dari tahun ke tahun.

Dilihat berdasarkan jenis kelamin, pengeluaran per kapita laki-laki pada seluruh kabupaten/kota masih jauh lebih tinggi dibanding perempuan. Kesenjangan tersebut terlihat cukup signifikan di seluruh wilayah, terutama di Kabupaten Malinau dan Tana Tidung, yang menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi dan akses pendapatan perempuan masih relatif lebih rendah dibanding laki-laki. Sementara itu, Kota Tarakan menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik karena pengeluaran per kapita perempuan lebih tinggi dibanding daerah lainnya di Kalimantan Utara, yang mengindikasikan peluang ekonomi perempuan di wilayah perkotaan lebih berkembang.

Tabel 2.56

Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2023-2025 (ribu rupiah)

Kabupaten/Kota dan Provinsi	2023			2024			2025		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Malinau	15.742	5.655	10.708	16.439	5.921	11.190	16.709	6.113	11.436
Bulungan	15.398	6.886	10.205	15.955	7.054	10.581	16.631	7.320	10.997
Tana Tidung	12.309	4.228	8.386	12.781	4.379	8.707	13.126	4.534	9.037
Nunukan	11.299	4.788	7.787	11.984	5.074	8.265	12.298	5.410	8.598
Tarakan	16.675	10.425	11.992	17.316	10.812	12.451	17.928	11.242	12.961
Kalimantan Utara	13.703	6.384	9.734	14.345	6.704	10.197	14.916	6.937	10.568

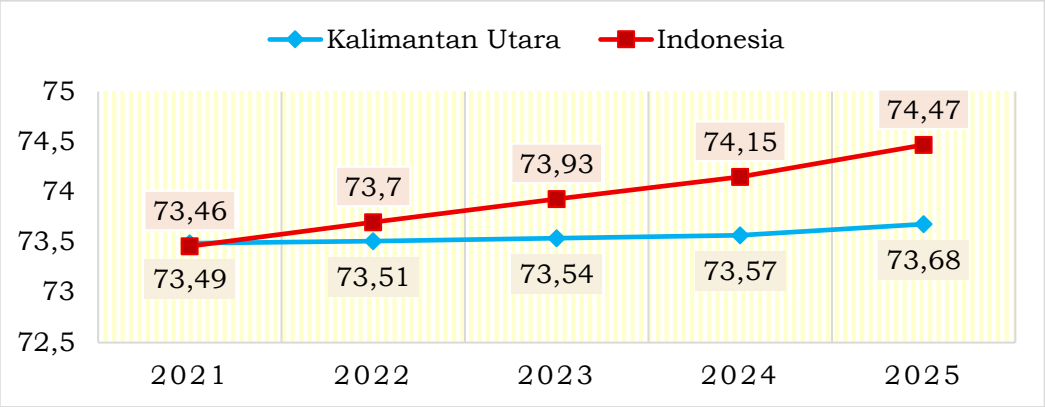
Sumber: BPS Kalimantan Utara, 2026

2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua

a. Usia Harapan Hidup (UHH)

Pembangunan kesehatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Salah satu indikator yang mencerminkan kualitas kesehatan yakni usia harapan hidup (UHH). UHH merupakan rata-rata banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir pada tahun suatu tahun tertentu. UHH menjadi salah satu indikator pembentuk dari indeks pembangunan manusia (IPM). Semakin tinggi UHH mengindikasikan semakin baik derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah. Berikut capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Kalimantan Utara.

Gambar 2.29
Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Hasil Long Form SP2020 Tahun 2021-2025



Sumber: BPS RI, 2026

Selama periode 2021-2025, capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren yang meningkat. Selama periode tersebut, capaian UHH Provinsi Kalimantan Utara meningkat sebesar 0,19 poin. Kenaikan UHH mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara berjalan cukup baik. Pada tahun 2025, capaian UHH Provinsi Kalimantan Utara sebesar 73,68. Artinya, bayi

yang baru lahir di tahun 2025 memiliki kesempatan rata-rata usia hingga 73,68 tahun.

Pada tahun 2021, capaian UHH Provinsi Kalimantan Utara berada di atas nasional. Namun, pada periode tahun 2022-2025 capaian UHH Provinsi Kalimantan Utara berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara cenderung melambat. Dilihat dari rata-rata pertumbuhan UHH Provinsi Kalimantan Utara selama lima tahun terakhir sebesar 0,06 persen, sedangkan rata-rata nasional sebesar 0,34 persen. Dengan demikian, dibutuhkan upaya percepatan pembangunan kesehatan yang signifikan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

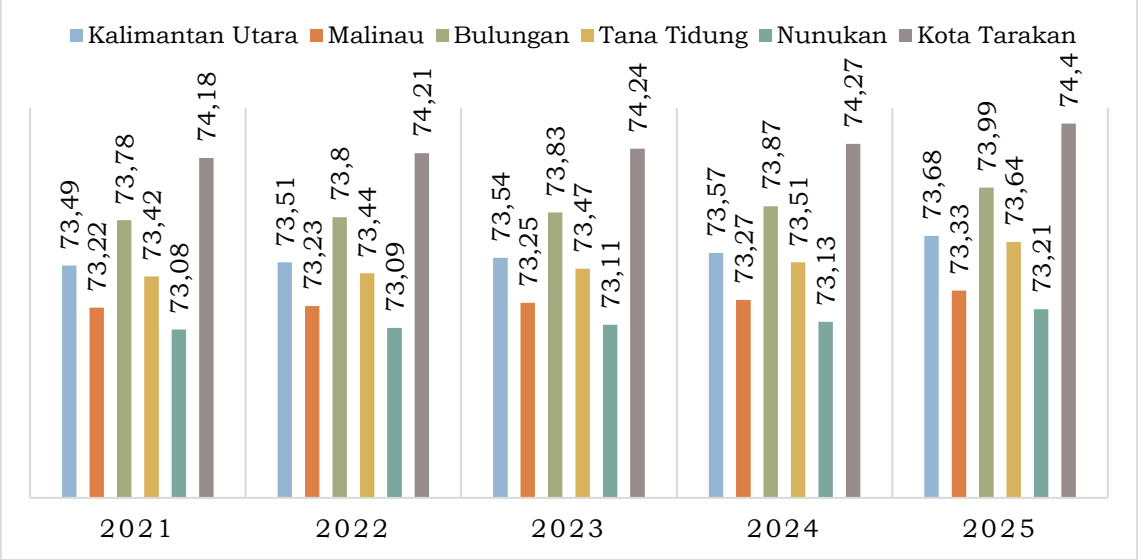
Disisi lain, capaian indikator Usia Harapan Hidup (UHH) belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh aspek pelayanan dasar kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. SPM kesehatan mencakup 12 jenis layanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah, antara lain pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, dan nifas; pelayanan bayi dan balita; pelayanan imunisasi dasar; serta penanggulangan penyakit menular seperti tuberkulosis dan HIV. Oleh karena itu, untuk menilai capaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh, diperlukan pula pemantauan dan pelaporan capaian indikator SPM kesehatan di seluruh kabupaten/kota. Hal ini penting agar kebijakan dan program intervensi kesehatan dapat lebih tepat sasaran dan berkeadilan, terutama di daerah-daerah dengan akses layanan kesehatan yang masih terbatas. Kedepan, integrasi data capaian SPM kesehatan dalam perencanaan pembangunan daerah akan menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan pemenuhan hak dasar kesehatan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Utara.

Usia Harapan Hidup (UHH) dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, akses pemenuhan gizi, penerapan pola hidup bersih dan sehat, serta penyediaan fasilitas sanitasi, air bersih dan pengelolaan sampah yang memadai. Dalam peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat, pemerintah Provinsi

Kalimantan Utara berhasil mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) dengan persentase 84,67 persen kepesertaan jaminan kesehatan aktif pada tahun 2024.

Selama periode 2021-2025, Usia harapan hidup (UHH) kabupaten/kota di Kalimantan Utara menunjukkan tren yang meningkat. Hal tersebut menunjukkan adanya kemajuan pembangunan kesehatan pada masing-masing daerah. Capaian UHH paling tinggi terdapat pada dua daerah yaitu Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan. Kedua daerah tersebut memiliki capaian UHH di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2025, UHH Kota Tarakan 74,4 dan Kabupaten Bulungan 73,99. Tingginya kualitas kesehatan pada kedua daerah tersebut disebabkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang cukup baik. Kota Tarakan sebagai pusat perkotaan dan Kabupaten Bulungan sebagai pusat pemerintahan memiliki pembangunan yang relatif berkembang, sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan layanan kesehatan yang memadai.

Gambar 2.30
Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kalimantan Utara, 2025

Ket.: UHH menggunakan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (LP SP2020)

Sedangkan tiga daerah lainnya memiliki capaian UHH di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2025, capaian UHH pada

ketiga daerah tersebut yakni Kabupaten Tana Tidung sebesar 73,64, Kabupaten Malinau 73,33, dan Kabupaten Nunukan 73,21. Belum optimalnya kualitas kesehatan pada ketiga daerah tersebut disebabkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang masih kurang. Dengan demikian, pemerintah baik provinsi maupun kabupaten perlu memberikan perhatian lebih untuk pembangunan kesehatan pada ketiga wilayah tersebut.

Lebih lanjut, UHH dapat ditinjau berdasarkan jenis kelamin. Perkembangan UHH menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin di Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2023–2025 menunjukkan tren peningkatan yang cukup positif di seluruh wilayah. Secara provinsi, UHH total meningkat dari 72,69 tahun pada 2023 menjadi 73,68 tahun pada 2025, yang mengindikasikan adanya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat, akses pelayanan kesehatan, serta kondisi sosial ekonomi yang semakin membaik. Kota Tarakan secara konsisten mencatat UHH tertinggi dengan capaian 74,40 tahun pada 2025, sedangkan Kabupaten Nunukan memiliki UHH relatif lebih rendah sebesar 73,21 tahun. Meskipun demikian, seluruh kabupaten/kota menunjukkan peningkatan usia harapan hidup pada tahun 2025 dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Dilihat berdasarkan jenis kelamin, perempuan di seluruh kabupaten/kota memiliki UHH yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Di tingkat Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025, UHH perempuan mencapai 76,02 tahun, sedangkan laki-laki sebesar 71,45 tahun. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki tingkat ketahanan hidup yang lebih baik dibanding laki-laki, yang umumnya dipengaruhi oleh faktor biologis, perilaku kesehatan, serta pola risiko penyakit dan kecelakaan. Gap UHH terbesar terlihat di Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan, sedangkan Kota Tarakan menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik dengan tingkat UHH laki-laki dan perempuan yang sama-sama tinggi dibanding wilayah lainnya. Perkembangan UHH berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.57

Umur Harapan Hidup (UHH) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2023-2025 (tahun)

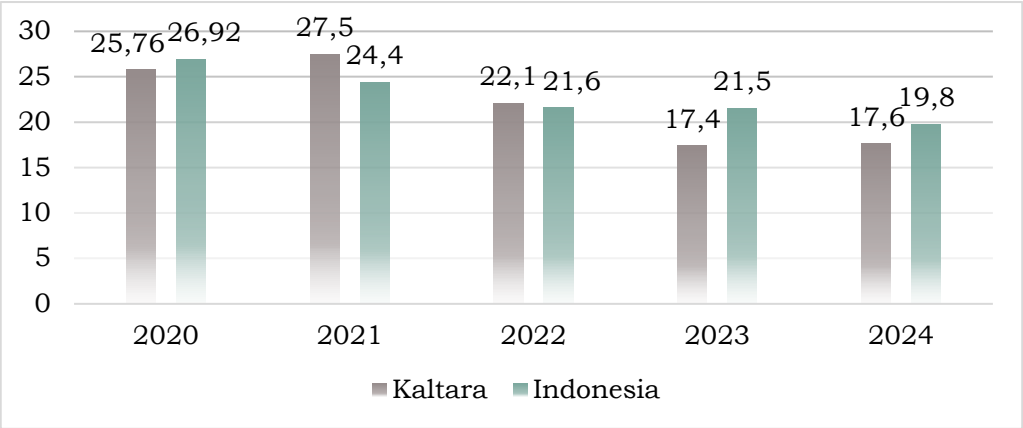
Kabupaten/Kota dan Provinsi	2023			2024			2025		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Malinau	71,30	71,75	71,51	71,32	71,76	71,53	72,02	75,55	73,33
Bulungan	71,72	73,74	72,78	71,75	73,75	72,81	72,38	76,44	73,99
Tana Tidung	70,77	71,70	71,53	70,78	71,72	71,57	71,42	75,98	73,64
Nunukan	70,65	72,24	71,42	70,66	72,25	71,44	71,14	75,38	73,21
Tarakan	73,51	74,63	74,08	73,54	74,65	74,11	73,67	77,01	74,40
Kalimantan Utara	70,72	74,75	72,69	70,76	74,79	72,73	71,45	76,02	73,68

Sumber: BPS Kalimantan Utara, 2026

b. Prevalensi Stunting

Selain UHH, capaian kesehatan lain yang perlu diperhatikan yaitu prevalensi stunting. Stunting merupakan salah satu isu yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Stunting memiliki dampak tidak hanya pada tinggi badan, namun juga berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak dimasa mendatang serta kemampuan daya tahan tubuh yang rentan terhadap penyakit-penyakit kronis. Berikut capaian prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020-2024.

Gambar 2.31
Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024



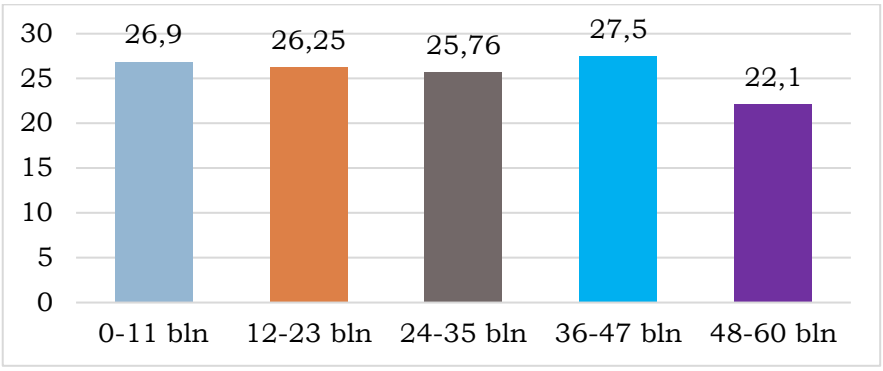
Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Selama periode 2020-2024, prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Utara menunjukan trend fluktuatif. Capaian stunting tertinggi pada tahun 2021 sebesar 27,5 persen dan terendah pada tahun 2023 sebesar 17,4 persen. Pada tahun 2024, capaian stunting Kaltara 17,6 persen. Capaian tersebut lebih rendah 2,2 persen dibanding capaian nasional sebesar 19,8 persen. Kondisi tersebut menunjukan upaya penanganan stunting serta perbaikan gizi di Provinsi Kalimantan Utara berjalan cukup baik. Namun demikian, upaya penanganan stunting masih perlu ditekan hingga titik optimal. Adapun penyebab stunting diataranya asupan gizi ibu hamil dan balita yang yang belum memenuhi standar gizi seimbang, edukasi terkait pola asuh yang baik masih kurang, akses sanitasi aman dan air bersih belum merata pada semua wilayah, pelayanan kesehatan yang belum optimal, serta perkawinan usia anak yang berpotensi pada kehamilan

bersiko. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dengan pendekatan ke hulu mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, dan balita. Upaya tersebut memerlukan kerjasama lintas sektor mulai dari kecamatan, kelurahan, puskesmas, perangkat daerah terkait, hingga pihak swasta dan masyarakat.

Data tahun 2024 menujukkan bahwa prevalensi stunting ha,pir merata di seluruh kelompok umur yakni antara 22 sampau 27 persen, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah. Prevalensi stunting terbanyak berada pada kelompok umur 36-47 bulan yakni sebanyak 27,5 persen. Sementara pada kelompok umur 48-61 bulan memiliki angka prevalensi stunting yang paling rendah yaitu 22,1 persen.

Gambar 2.32
Prevalensi Stunting Berdasarkan Kelompok Umur di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

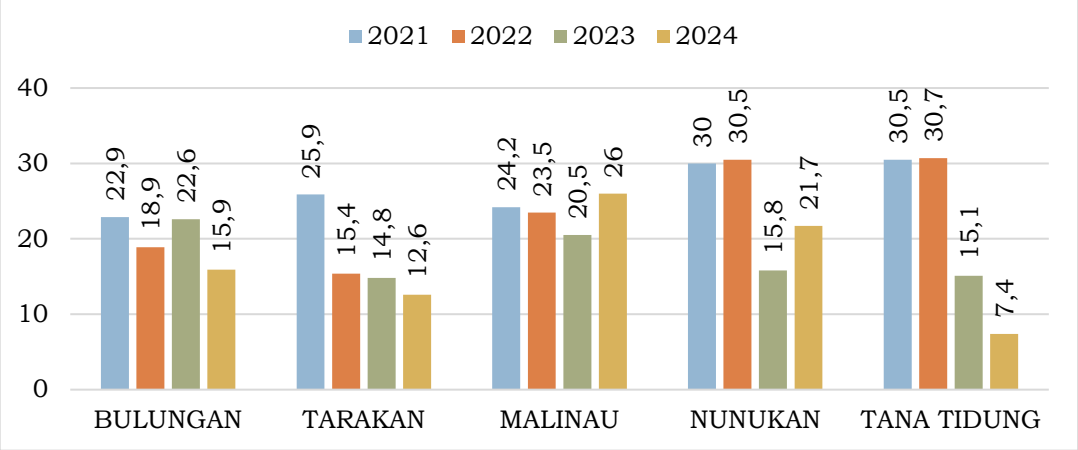


Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Prevalensi stunting kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2021–2024 menunjukkan tren yang secara umum mengalami penurunan, meskipun masih terdapat fluktuasi pada beberapa daerah. Kota Tarakan mencatat penurunan paling konsisten dari 25,9 persen pada 2021 menjadi 12,6 persen pada 2024, sedangkan Kabupaten Tana Tidung mengalami penurunan sangat signifikan dari 30,5 persen pada 2021–2022 menjadi 7,4 persen pada 2024. Kabupaten Bulungan juga menunjukkan perbaikan dengan prevalensi stunting turun dari 22,9 persen menjadi 15,9 persen pada periode yang sama. Kondisi ini mengindikasikan bahwa intervensi percepatan penurunan stunting di beberapa wilayah mulai menunjukkan hasil yang positif.

Di sisi lain, perkembangan prevalensi stunting antar kabupaten/kota masih menunjukkan ketimpangan capaian. Kabupaten Malinau menjadi daerah dengan prevalensi stunting relatif tinggi dan fluktuatif, yaitu dari 24,2 persen pada 2021 menjadi 26 persen pada 2024, meskipun sempat menurun pada 2023. Kabupaten Nunukan juga masih menghadapi tantangan karena prevalensi stunting tetap berada pada level cukup tinggi, yaitu 21,7 persen pada 2024, meskipun telah menurun dibanding tahun 2021 dan 2022 yang mencapai sekitar 30 persen. Perbedaan capaian ini menunjukkan bahwa efektivitas intervensi penanganan stunting belum merata antarwilayah dan masih dipengaruhi oleh kondisi akses pelayanan kesehatan, kualitas sanitasi, pola asuh, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Gambar 2.33
Prevalensi Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota
Tahun 2021-2024



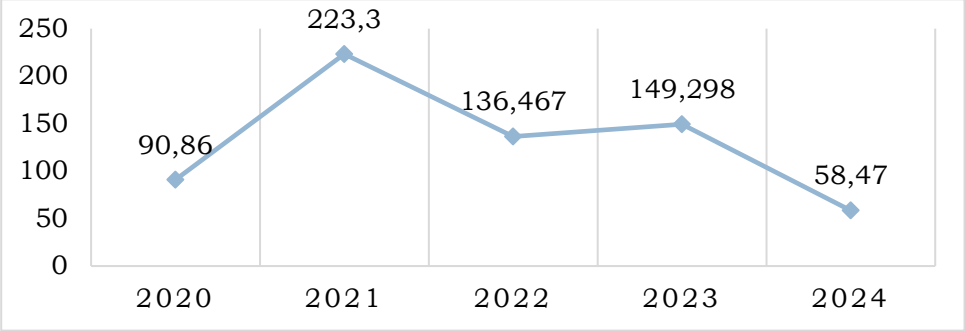
Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2025

c. Angka Kematian Ibu (AKI)

Selama periode 2020-2024, Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Kalimantan Utara memiliki trend cukup fluktuatif. Peningkatan paling tajam pada tahun 2021 sebesar 223,3 per 100.000 KH dan paling rendah tahun 2024 sebesar 58,47 per 100.00 KH. Capaian AKI tahun 2024 sudah berada dibawah target SDGs 2030 sebesar 70 per 100.000 KH. Namun demikian, upaya penurunan angka kematian ibu harus ditingkatkan hingga titik optimal yakni tidak ada kasus kematian atau 0 kasus.

Secara umum, angka kematian ibu disebabkan faktor langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung (komplikasi obstetri) diantaranya pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, dan komplikasi keguguran tidak aman. Penyebab tidak langsung diantaranya kurangnya akses pelayanan kesehatan terutama didaerah terpencil dan perbatasan, keterbatasan fasilitas kesehatan rujukan, rendahnya cakupan pemeriksaan kehamilan (ANC), status gizi ibu hamil yang kurang baik, keterbatasan transportasi ke temat rujukan, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut perlu menjadi perhatian dalam periode pembangunan mendatang, sehingga angka kematian ibu dapat ditekan.

Gambar 2.34
Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2020-2024



Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2025

d. Penanganan Tuberkulosis (TBC)

Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *mycrobacterium tuberculosis* yang dapat menyerang paru dan organ lainnya. Kinerja penanganan TBC dapat diukur melalui beberapa indiaktor diantaranya cakupan penemuan dan pengobatan Tuberkulosis *(treatment coverage)* dan angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*). *Treatment Coverage* merupakan proporsi penderita TBC yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan sesuai standar dibandingkan dengan estimasi total kasus TBC yang ada di masyarakat. Selama periode 2020-2024, cakupan penemuan dan pengobatan Tuberkulosis *(treatment coverage)* menunjukan trend yang meningkat.

Selama periode tersebut cakupan *treatment coverage* meningkat dari 41,8 persen menjadi 66,2 persen atau meningkat sebanyak 24,4 persen. Kondisi tersebut menunjukan proporsi penderita TBC yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan sesuai standar semakin meningkat. Namun demikian, capaian tersebut masih dibawah target nasional sebesar >80%. Dengan demikian, upaya penemuan dan pengobatan TBC masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.58
Cakupan Kinerja Penanganan Tuberkulosis (TBC) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	41,7	53,15	66,2	60,36	66,84
2	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	75,08	80,41	78,19	77	68,66

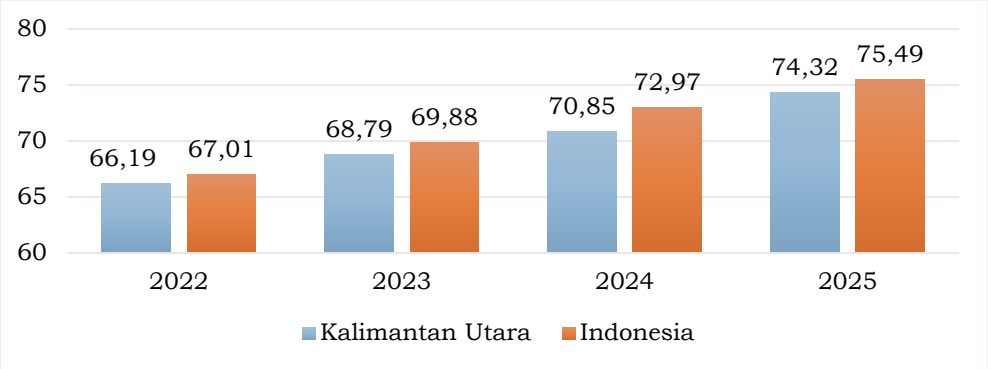
Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2026

Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate/TSR*) merupakan tingkat kesembuhan dan pengobatan lengkap pasien TBC dibandingkan jumlah seluruh pasien TBC yang memulai pengobatan pada periode tertentu. Selama periode 2021-2025, angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis di Provinsi Kalimantan Utara cukup fluktuatif. Capaian terendah tahun 2025 sebesar 68,66 persen dan capaian tertinggi tahun 2022 sebesar 80,41 persen. Penurunan angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (TBC) di Kalimantan Utara ke 68,66% pada tahun 2025 kemungkinan besar disebabkan oleh tantangan dalam kesinambungan pengobatan pasien dan peningkatan kasus TB Resisten Obat (RO). Kendala geografis dan operasional di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan juga sering menghambat pemantauan rutin. Dengan demikian, upaya kesembuhan dan pengobatan lengkap pasien TBC di Provinsi Kalimantan Utara masih perlu ditingkatkan.

e. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

Selama periode 2022-2025, Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Kalimantan Utara terus mengalami peningkatan. Namun demikian, capaian selama periode tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional. Sebagai perbandingan pada tahun 2025 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kalimantan Utara yaitu sebesar 74,32 persen, sedangkan nasional yaitu mencapai 75,49 persen. Rendahnya capaian Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dipengaruhi beberapa faktor diantaranya faktor administrasi (validasi data), kondisi ekonomi, dan kebijakan kepesertaan.

Gambar 2.35
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2025



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

f. Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan

Selain umur harapan hidup, kondisi kesehatan masyarakat juga tercermin dari indikator morbiditas. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional pada Maret 2025 menunjukkan bahwa terdapat 21,76 persen penduduk di Provinsi Kalimantan Utara mempunyai keluhan kesehatan, meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 19,93 persen. Angka ini diukur dengan menggunakan pendekatan penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir dari pelaksanaan survei. Keluhan kesehatan yang dimaksud yaitu keadaan seseorang yang mengalami

gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal atau hal lain.

Jika ditinjau menurut jenis kelamin, persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten dengan persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan tertinggi yaitu Kabupaten Tana Tidung, dengan persentase 29,48 persen, sedangkan yang terendah adalah Kota Tarakan dengan persentase 18,20 persen.

Tabel 2.59
Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

	Jenis Kelamin		
Kabupaten/Kota	**Laki-laki (%)**	**Perempuan (%)**	**Total (%)**
Malinau	22,52	25,67	24,03
Bulungan	23,95	31,50	27,57
Tana Tidung	25,94	33,36	29,48
Nunukan	18,93	22,25	20,50
Tarakan	14,65	21,91	18,20
Kalimantan Utara	**19,06**	**24,68**	**21,76**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, BPS

Sementara itu, untuk angka kesakitan, persentasenya lebih kecil dibandingkan dengan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Hal ini berarti, tidak semua penduduk yang mengalami keluhan kesehatan merasa aktivitasnya menjadi terganggu. Tahun 2025, angka kesakitan di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 10,23 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,95 persen. Sama halnya dengan persentase keluhan kesehatan, angka kesakitan penduduk perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Angka kesakitan penduduk perempuan mencapai 11,61 persen, sedangkan penduduk laki-laki hanya 8,94 persen.

Tabel 2.60
Angka Kesakitan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

	Jenis Kelamin		
Kabupaten/Kota	**Laki-laki (%)**	**Perempuan (%)**	**Total (%)**
Malinau	12,98	14,42	13,67
Bulungan	12,89	17,64	15,16
Tana Tidung	9,31	11,79	10,50
Nunukan	7,68	10,20	8,88
Tarakan	6,58	8,85	7,69
Kalimantan Utara	**8,94**	**11,61**	**10,23**

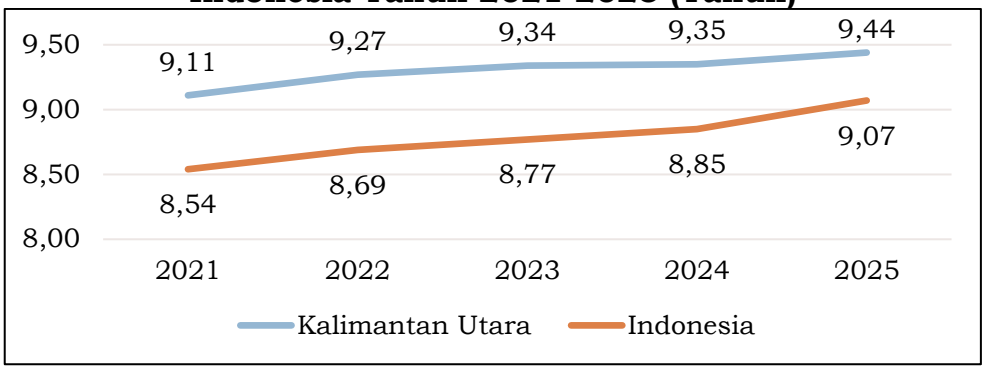
Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2025

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

a. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Pendidikan merupakan aspek yang cukup berpengaruh terhadap terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun hasil pembangunan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Kedua indikator tersebut menjadi salah satu komponen pembentuk dari indeks pembangunan manusia (IPM). Semakin tinggi capaian RLS dan HLS mencerminkan semakin tinggi akses masyarakat terhadap layanan pendidikan formal baik ditingkat dasar, menengah hingga tinggi. Pendidikan yang lebih tinggi dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan tingkat kemiskinan. Berikut capaian RLS dan HLS Provinsi Kalimantan Utara.

Gambar 2.36
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2021-2025 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

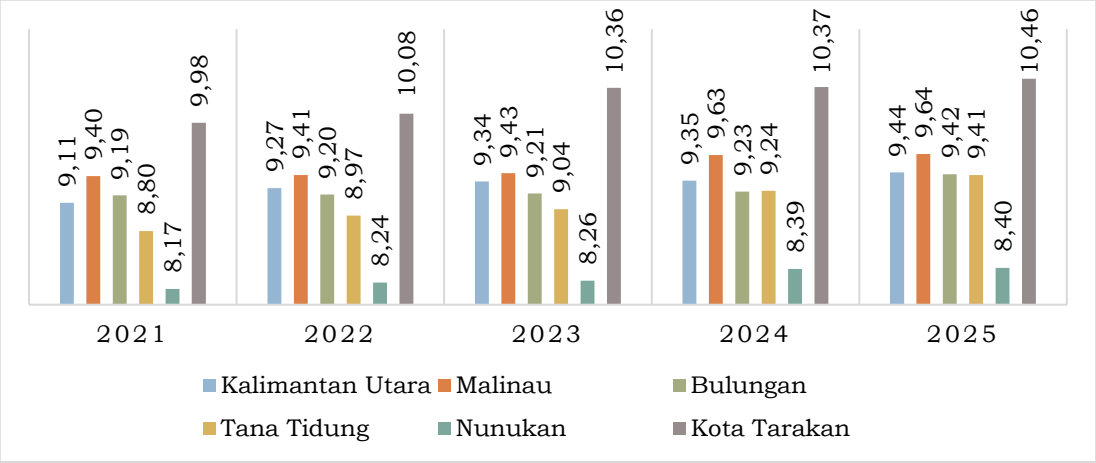
Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan dalam menempuh pendidikan formal. Selama periode 2021-2025, capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren yang meningkat. Selama periode tersebut, capaian RLS Provinsi Kalimantan Utara meningkat sebesar 0,33 poin. Kenaikan RLS mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk yang mengenyam pendidikan formal, sehingga diharapkan memiliki tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang lebih baik. Pada tahun 2025, capaian RLS Provinsi Kalimantan Utara sebesar 9,44. Artinya, rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Utara telah menempuh pendidikan formal selama 9,44 tahun atau setara kelas 3 SMP.

Capaian RLS Provinsi Kalimantan Utara selalu berada di atas Indonesia. Artinya, pembangunan pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara masih lebih baik dibanding rata-rata nasional. Namun demikian, jika dilihat dari tren peningkatan selama lima tahun, maka peningkatan RLS Provinsi Kalimantan Utara masih lebih rendah. RLS Provinsi Kalimantan Utara meningkat 0,33 poin, sedangkan RLS Indonesia meningkat 0,53 poin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan RLS Provinsi Kalimantan Utara cenderung lambat. Untuk itu, dibutuhkan upaya percepatan pembangunan bidang pendidikan sehingga tetap memiliki capaian yang lebih tinggi dibanding nasional, serta dapat mewujudkan SDM yang berkualitas.

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan rata-rata sekolah dan meningkatkan kualitas SDM secara lebih luas. Peningkatan akses pendidikan dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana layanan pendidikan, peningkatan jumlah dan distribusi guru dan tenaga pendidikan, serta peningkatan upaya promosi dan edukasi terkait pentingnya pendidikan sebagai bekal masa depan. Sedangkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta kualitas proses pembelajaran dan fasilitas belajar yang memadai.

Selama periode 2021-2025, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) kabupaten/kota di Kalimantan Utara menunjukkan tren yang meningkat. Hal tersebut menunjukkan adanya kemajuan pembangunan pendidikan pada masing-masing daerah. Capaian RLS paling tinggi terdapat pada dua daerah yaitu Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau. Kedua daerah tersebut memiliki capaian RLS di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2025, RLS Kota Tarakan 10,46 dan Kabupaten Malinau 9,64. Tingginya capaian RLS disebabkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan yang cukup baik, serta dukungan kebijakan yang berpengaruh terhadap akses pendidikan.

Gambar 2.37
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

Sedangkan tiga daerah lainnya memiliki capaian RLS di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Bulungan 9,42, Kabupaten Tana Tidung 9,41, dan Kabupaten Nunukan 8,40. Kabupaten Bulungan sebagai pusat pemerintahan memiliki RLS di bawah rata-rata Provinsi. Belum optimalnya capaian pendidikan pada ketiga daerah tersebut disebabkan akses dan kualitas layanan pendidikan yang masih kurang. Dengan demikian, pemerintah baik provinsi maupun kabupaten perlu memberikan perhatian lebih untuk pembangunan pendidikan pada ketiga wilayah tersebut.

Selanjutnya bila ditinjau dari jenis kelamin, RLS menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2023–2025 menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil di seluruh wilayah. Di tingkat provini, RLS meningkat dari 9,34 tahun pada 2023 menjadi 9,44 tahun pada 2025, yang menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Provinsi Kalimantan Utara telah menempuh pendidikan hingga setara kelas IX atau awal jenjang pendidikan menengah.

Kota Tarakan secara konsisten mencatat capaian RLS tertinggi dengan nilai 10,46 tahun pada 2025. Kondisi ini mencerminkan akses pendidikan dan kualitas layanan pendidikan yang relatif lebih baik dibanding kabupaten lainnya. Sebaliknya, Kabupaten Nunukan masih memiliki RLS terendah yaitu 8,40 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata lama pendidikan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut masih relatif lebih rendah dibanding daerah lain.

Dilihat berdasarkan jenis kelamin, capaian RLS laki-laki pada seluruh kabupaten/kota masih sedikit lebih tinggi dibanding perempuan, meskipun selisihnya cenderung tidak terlalu besar. Di Provinsi Kalimantan Utara, RLS laki-laki mencapai 9,80 tahun, sedangkan perempuan sebesar 9,30 tahun. Gap pendidikan gender terbesar terlihat di Kabupaten Tana Tidung dan Bulungan, sementara Kota Tarakan menunjukkan kesenjangan yang relatif kecil antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akses pendidikan perempuan di beberapa wilayah masih menghadapi tantangan, meskipun secara umum kesenjangan pendidikan gender di Kalimantan Utara mulai semakin menyempit.

Tabel 2.61
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2023-2025 (Tahun)

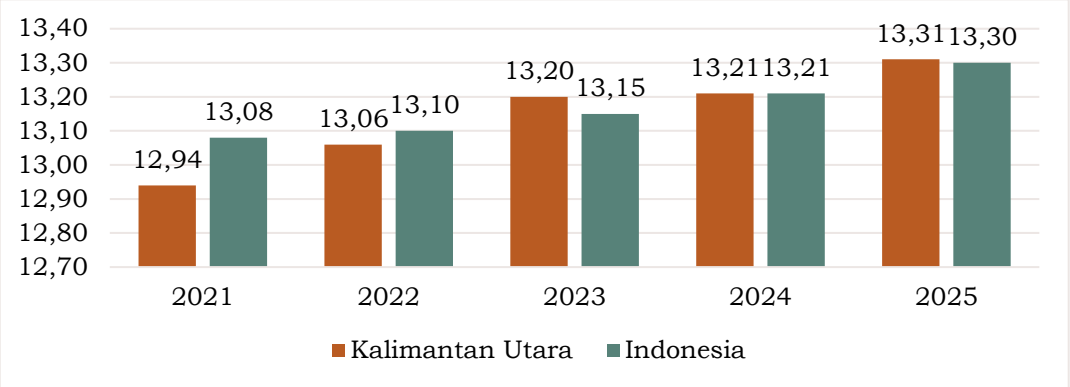
Kabupaten/Kota dan Provinsi	2023			2024			2025		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Malinau	9,63	8,90	9,43	9,85	9,04	9,63	9,91	9,05	9,64
Bulungan	9,78	8,83	9,21	9,79	8,95	9,23	9,81	9,22	9,42
Tana Tidung	9,63	8,51	9,04	9,80	8,72	9,24	9,96	8,90	9,41
Nunukan	8,62	8,20	8,26	8,63	8,33	8,39	8,64	8,34	8,40
Tarakan	10,65	10,29	10,36	10,66	10,30	10,37	10,68	10,39	10,46
Kalimantan Utara	9,78	9,17	9,34	9,79	9,21	9,35	9,80	9,30	9,44

Sumber: BPS Kalimantan Utara, 2026

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan perkiraan jumlah tahun sekolah yang dapat ditempuh oleh anak-anak pada usia tertentu di suatu wilayah. Selama periode 2021-2025, capaian harapan lama sekolah (HLS) Provinsi Kalimantan Utara memiliki tren meningkat. Selama periode tersebut, capaian HLS naik 0,37 poin. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 dan 2023 dengan kenaikan sebesar 0,12 dan 0,14. Selain itu, capaian HLS Provinsi Kalimantan Utara berhasil melewati rata-rata nasional di tahun 2025.

Gambar 2.38
Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2021-2025 (Tahun)



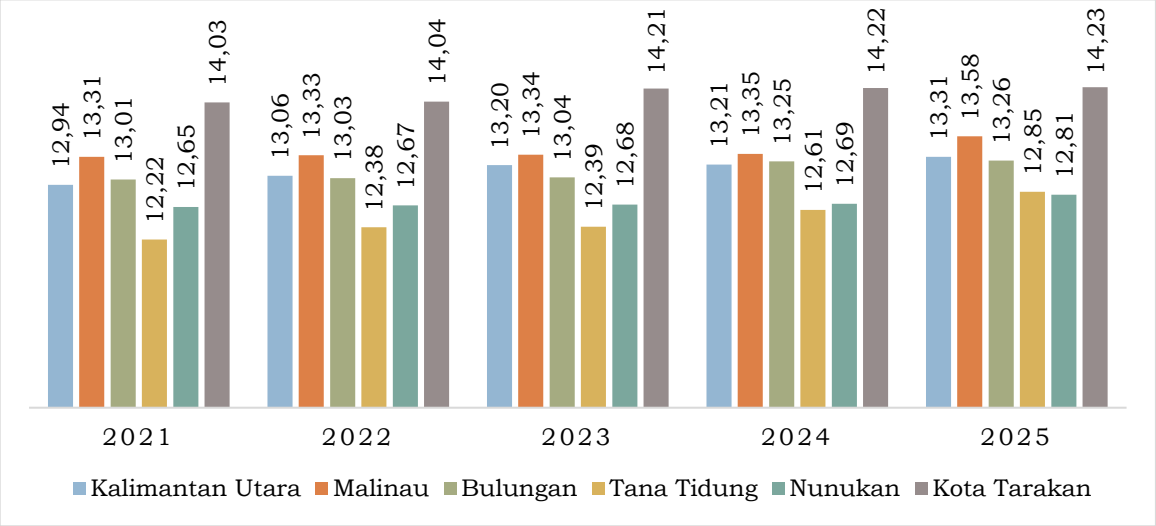
Sumber: BPS RI, 2026

Kenaikan HLS mengindikasikan bahwa peluang untuk menempuh pendidikan formal ke jenjang lebih tinggi semakin besar. Pada tahun 2025, HLS Provinsi Kalimantan Utara 13,31. Artinya, anak-anak di Kalimantan Utara diproyeksikan dapat menempuh pendidikan hingga 13,31 tahun atau setara kelas Diploma I. Hal tersebut mencerminkan akses pendidikan yang cukup baik, tetapi belum mencapai tingkat pendidikan tinggi secara luas.

Selama periode 2021-2025, Harapan Lama Sekolah (HLS) kabupaten/kota di Kalimantan Utara menunjukkan tren yang meningkat. Hal tersebut menunjukkan peluang untuk menempuh pendidikan formal ke jenjang lebih tinggi semakin besar. Dari lima kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, hanya dua daerah yang memiliki capaian di bawah rata-

rata Provinsi yakni Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung. Hal tersebut berkorelasi dengan capaian RLS yang masih kurang. Dengan demikian, peningkatan akses pendidikan pada kedua daerah tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih, sehingga dapat meningkatkan peluang pendidikan masyarakat ke jenjang lebih tinggi.

Gambar 2.39
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

Perkembangan HLS menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin di Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2023–2025 menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil di hampir seluruh wilayah. Di tingkat provinsi, HLS meningkat dari 13,20 tahun pada 2023 menjadi 13,31 tahun pada 2025, yang menunjukkan bahwa anak usia sekolah di Kalimantan Utara secara rata-rata memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga jenjang awal pendidikan tinggi.

Kota Tarakan secara konsisten mencatat HLS tertinggi dengan capaian 14,23 tahun pada 2025, mencerminkan akses dan keberlanjutan pendidikan yang relatif lebih baik dibanding daerah lainnya. Sebaliknya, Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan masih memiliki HLS yang relatif lebih rendah dibanding wilayah lain, meskipun tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Dilihat berdasarkan jenis kelamin, perempuan di sebagian besar kabupaten/kota memiliki HLS yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Secara provinsi pada tahun 2025, HLS perempuan mencapai 13,74 tahun, sedangkan laki-laki sebesar 13,01 tahun. Gap tersebut menunjukkan bahwa peluang perempuan untuk melanjutkan pendidikan cenderung lebih tinggi dibanding laki-laki. Kondisi ini terlihat sangat jelas di Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau, di mana HLS perempuan jauh lebih tinggi dibanding laki-laki. Sementara itu, Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung menunjukkan kesenjangan gender yang relatif kecil. Fenomena ini dapat mengindikasikan meningkatnya kesadaran dan partisipasi pendidikan perempuan di Kalimantan Utara.

Tabel 2.62
Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2023-2025 (Tahun)

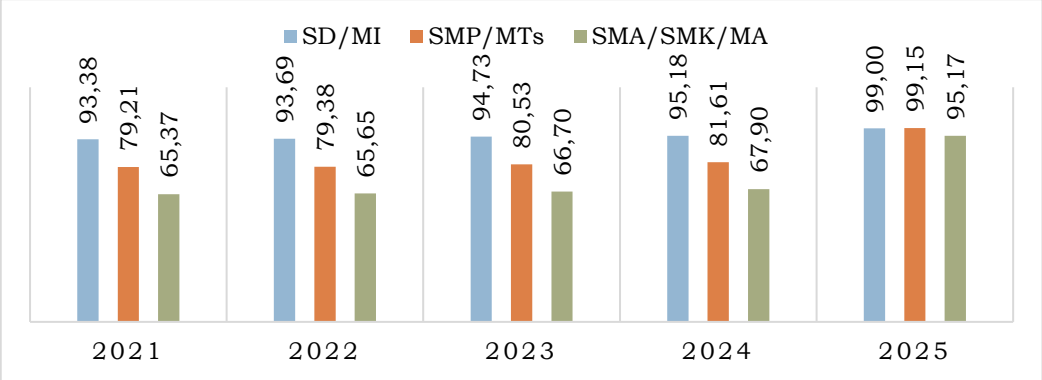
Kabupaten/Kota dan Provinsi	2023			2024			2025		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Malinau	13,22	13,86	13,34	13,23	13,87	13,35	13,47	13,88	13,58
Bulungan	13,23	13,02	13,04	13,32	13,24	13,25	13,33	13,26	13,26
Tana Tidung	12,59	12,27	12,39	12,61	12,50	12,61	12,85	12,75	12,85
Nunukan	12,67	12,74	12,68	12,68	12,75	12,69	12,91	12,76	12,81
Tarakan	13,56	14,76	14,21	13,57	14,77	14,22	13,58	14,78	14,23
Kalimantan Utara	12,97	13,63	13,20	12,98	13,64	13,21	13,01	13,74	13,31

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

c. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Semakin tinggi nilai APM menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah yang menafaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya semakin tinggi. Berikut merupakan data capaian APM Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 hingga 2025.

Gambar 2.40
Capaian Angka Partisipasi Murni Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Indonesia, 2026

Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Kalimantan Utara mengalami tren peningkatan selama periode 2021 hingga 2025. Pada jenjang SD/MI, APM meningkat dari 93,38 persen pada tahun 2021 menjadi 99,00 persen pada tahun 2025 yang menandakan tingkat keterjangkauan layanan pendidikan dasar yang mendekati universal. Pada jenjang SMP/MTs, APM tumbuh dari 79,21 persen menjadi 99,15 persen pada periode yang sama, sedangkan pada jenjang SMA/SMK/MA meningkat dari 65,37 persen menjadi 95,17 persen. Peningkatan pada jenjang menengah dan menengah atas ini mencerminkan keberhasilan berbagai program perluasan akses peserta didik di luar pendidikan dasar.

Peningkatan akses pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti peningkatan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, pemberian bantuan biaya pendidikan dan

beasiswa bagi keluarga kurang mampu, serta penguatan program transisi antar jenjang pendidikan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menengah, penambahan fasilitas pendidikan vokasi, serta perbaikan akses transportasi turut mendukung kenaikan partisipasi sekolah.

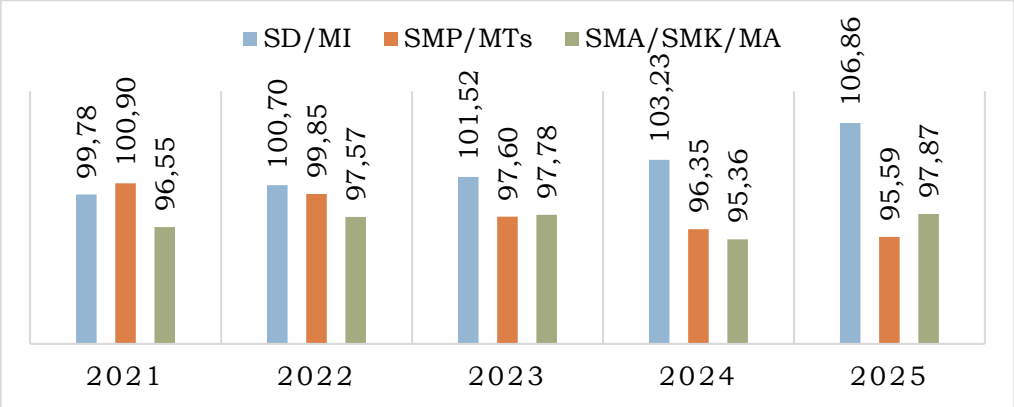
Meskipun demikian, kesenjangan partisipasi antar jenjang masih menjadi tantangan. Perbedaan yang cukup tinggi antara APM pendidikan dasar dan pendidikan menengah atas mengindikasikan adanya penurunan jumlah masyarakat yang mengakses pendidikan pada transisi SMP/MTs ke SMA/SMK/MA. Penurunan ini dapat mengindikasikan dua hal, yakni ada banyak penduduk usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya atau melanjutkan pendidikan di luar Provinsi Kalimantan Utara, sehingga terdapat ketidakcocokan data. Kedua probabilitas tersebut dapat disebabkan salah satunya oleh keterbatasan akses dan fasilitas pendukung pada sektor pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan APM pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesadaran masyarakat, melainkan juga perlu adanya strategi afirmatif melalui program beasiswa transisi, penguatan layanan pendidikan berbasis komunitas, optimalisasi transportasi sekolah, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran jarak jauh untuk menjangkau daerah dengan hambatan geografis. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemerataan akses pendidikan, sekaligus memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Utara.

d. Angka Partisipasi Kasar

APK merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Semakin tinggi APK, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat untuk bersekolah. Sebaliknya, jika APK rendah, maka

partisipasi masyarakat untuk bersekolah menjadi semakin rendah. Berikut capaian APK Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2025.

Gambar 2.41
Capaian Angka Partisipasi Kasar Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021-2025



Sumber: BPS RI, 2026

Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Kalimantan Utara untuk semua jenjang pendidikan mengalami trend yang beragam. Pada jenjang SD/MI, APK naik sebanyak 7,08 poin dalam rentang 5 tahun terakhir. Kenaikan ini menunjukkan adanya cakupan layanan yang tidak hanya menjangkau anak usia sekolah dasar sesuai kelompok umurnya, tetapi juga mereka yang berada di luar kelompok usia sekolah dasar, termasuk peserta didik yang terlalu muda saat mulai menduduki bangku sekolah dasar, terlambat masuk sekolah di luar usia yang ditetapkan, atau kembali bersekolah.

Pada jenjang SMP/MTs, APK Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan sebesar 5,31 poin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sementara itu, APK jenjang SMA/SMK/MA sejak tahun 2021 sampai 2025 mengalami fluktuasi dengan kondisi pada tahun 2025 yaitu sebesar 97,87. Penurunan APK untuk kedua jenjang ini menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Capaian APK di Kalimantan Utara selama 5 tahun terakhir dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: (1) pemulihan dan percepatan pendaftaran sekolah pasca-pandemi COVID-19; (2) perluasan akses melalui pembangunan unit sekolah baru dan rehabilitasi sarana-

prasarana di daerah terpencil; (3) program wajib belajar 12 tahun yang diiringi dengan penyediaan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan; (4) penguatan pendidikan vokasi yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja; dan (5) peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menengah.

Tantangan yang perlu diantisipasi adalah memastikan bahwa capaian APK yang tinggi juga diikuti oleh peningkatan mutu pembelajaran, mengurangi angka putus sekolah, serta menekan disparitas antar wilayah dan kelompok sosial-ekonomi. Strategi yang dapat dilakukan mencakup optimalisasi transportasi sekolah di daerah sulit akses, pemanfaatan pembelajaran berbasis teknologi, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Dengan langkah tersebut, diharapkan Provinsi Kalimantan Utara dapat mempertahankan APK di atas 100 persen pada semua jenjang, sekaligus memastikan kualitas pendidikan yang merata dan berkelanjutan.

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

a. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Perlindungan sosial menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang tangguh dan inklusif, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik. Salah satu indikator yang mencerminkan perlindungan yakni cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menerapkan beberapa kebijakan dan program untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja. Kebijakan tersebut diantaranya Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2014 tentang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Adanya regulasi tersebut diharapkan bisa meningkatkan cakupan kepesertaan dan memberikan kemanfaatan bagi perlindungan pekerja, baik pekerja formal, informal bahkan pekerja rentan. Pada tahun 2024, cakupan jaminan ketenagakerjaan Kalimantan Utara sebesar 77,23 persen. Capaian tersebut meningkat dari tahun sebelumnya 76,71 persen. Dengan demikian,

upaya pemenuhan *universal coverage* Jamsostek (UCJ) telah dilakukan, namun masih perlu ditingkatkan pada periode mendatang.

Selain kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan sosial berkaitan dengan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial. Adapun SPM bidang sosial kewenangan provinsi yakni rehabilitasi disabilitas dalam panti, rehabilitasi anak terlantar didalam panti, lanjut usia terlantar, dan jaminan sosial saat dan setelah tanggap darurat bencana. Saat ini, layanan rehabilitasi sosial di Provinsi Kalimantan Utara masih perlu ditingkatkan, terutama untuk penyandang disabilitas atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Pemenuhan SPM sosial tidak hanya bertujuan untuk memastikan hak dasar kelompok rentan, tetapi juga memiliki dampak strategis dalam upaya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

b. Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 menunjukkan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat yang berada pada kategori menengah dengan capaian indeks sebesar 49,83. Di antara kabupaten/kota, Kota Tarakan memiliki nilai IKESOS tertinggi sebesar 56,14, diikuti Kabupaten Tana Tidung sebesar 55,48, yang menunjukkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat relatif lebih baik dibanding wilayah lainnya. Sebaliknya, Kabupaten Nunukan memiliki nilai IKESOS terendah sebesar 43,57, diikuti Kabupaten Bulungan sebesar 45,40. Perbedaan capaian ini mengindikasikan bahwa kualitas kesejahteraan sosial masyarakat antarwilayah di Kalimantan Utara masih menunjukkan disparitas yang cukup nyata, terutama antara wilayah perkotaan dan wilayah perbatasan atau pedalaman.

Pada dimensi kebutuhan dasar, Provinsi Kalimantan Utara mencatat nilai sebesar 54,53, yang menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara umum sudah relatif cukup baik. Kabupaten Tana Tidung memiliki capaian tertinggi pada dimensi ini sebesar 65,83, menunjukkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan relatif lebih baik dibanding daerah

lain. Sebaliknya, Kabupaten Malinau memiliki capaian terendah sebesar 48,72, meskipun nilainya tidak terpaut terlalu jauh dibanding wilayah lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses pelayanan dasar di beberapa wilayah masih memerlukan penguatan, terutama pada daerah dengan tantangan geografis dan aksesibilitas yang lebih sulit.

Tabel 2.63
Indeks Kesejahteraan Sosial Kalimantan Utara Tahun 2025

Kabupaten/Kota dan Provinsi	IKESOS	Dimensi Kebutuhan Dasar	Dimensi Peranan Sosial	Dimensi Keberdayaan Ekonomi
Malinau	46,62	48,72	39,11	50,81
Bulungan	45,40	49,51	33,71	51,40
Tana Tidung	55,48	65,83	54,37	49,64
Nunukan	43,57	53,62	29,24	47,69
Tarakan	56,14	56,97	54,15	57,07
Kalimantan Utara	**49,83**	**54,53**	**43,72**	**51,32**

Sumber: Kementerian Sosial, 2026

Pada dimensi peranan sosial, nilai Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 43,72, yang merupakan dimensi dengan capaian paling rendah dibanding dimensi lainnya. Kabupaten Nunukan memiliki nilai terendah sebesar 29,24, sedangkan Tana Tidung dan Tarakan mencatat capaian tertinggi di atas 54 poin. Rendahnya dimensi peranan sosial di beberapa wilayah menunjukkan bahwa partisipasi sosial, kohesi masyarakat, dan akses terhadap perlindungan sosial masih menghadapi tantangan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh keterbatasan akses layanan sosial, kondisi wilayah yang tersebar, serta belum optimalnya penguatan kelembagaan sosial masyarakat di beberapa daerah .

Sementara itu, pada dimensi keberdayaan ekonomi, Provinsi Kalimantan Utara mencatat nilai sebesar 51,32, yang menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi masyarakat mulai berkembang meskipun belum merata antarwilayah. Kota Tarakan memiliki nilai tertinggi sebesar 57,07, menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat perkotaan yang relatif lebih kuat dan produktif. Sebaliknya, Kabupaten Nunukan memiliki capaian terendah sebesar 47,69, yang mengindikasikan bahwa pemberdayaan

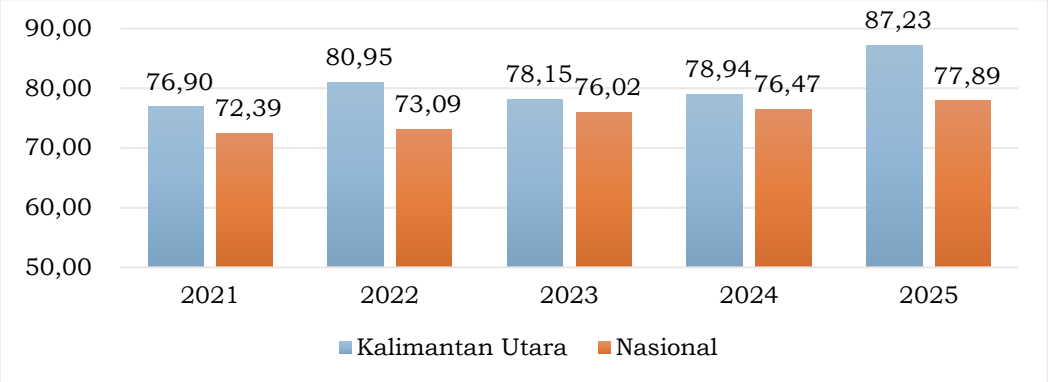
ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan masih perlu diperkuat. Variasi capaian antarwilayah tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja produktif, dan peningkatan akses masyarakat terhadap aktivitas ekonomi masih menjadi tantangan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial secara lebih merata di Kalimantan Utara.

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan masyarakat. Upaya keberlanjutan dibutuhkan untuk membangun, memelihara, dan menguatkan toleransi serta kerja sama antarumat beragama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) hadir sebagai instrumen untuk mengukur tingkat harmoni antar pemeluk agama di suatu wilayah. Indeks ini tidak hanya menggambarkan kondisi aktual kerukunan, tetapi juga memberikan pemetaan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk memperkuat kohesi sosial. Berikut merupakan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Utara.

Gambar 2.42
Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021-2025



Sumber: Indeks Kerukunan Umat Beragama, Kemenag, 2026

Selama 5 (lima) tahun terakhir, Indeks Kerukunan Umat Beragama nasional mengalami peningkatan setiap tahun, sedangkan Provinsi Kalimantan Utara mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. IKUB Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 sebesar 76,90 dan mengalami kenaikan serta penurunan pada tahun berikutnya hingga menjadi 87,23 di tahun 2025. Meskipun berfluktuasi, capaian IKUB Provinsi Kalimantan Utara berada di atas capaian nasional. IKUB Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 menduduki peringkat pertama di Indonesia. Hal itu dapat mengindikasikan bahwa Provinsi Kalimantan Utara memiliki karakter masyarakat yang terbuka, inklusif, dan hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman agama dan budaya.

Capaian IKUB Kalimantan Utara yang lebih tinggi dibandingkan skor nasional menunjukkan tingkat toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang relatif tinggi di provinsi tersebut. Peningkatan cukup tinggi terjadi pada tahun 2025 yang dapat dipengaruhi oleh penguatan program moderasi beragama, peran tokoh agama dan masyarakat adat, serta stabilitas sosial-politik di wilayah tersebut.

2. Indeks Zakat Nasional

Laporan perkembangan Indeks Zakat Nasional (IZN) BAZNAS se-Kalimantan Utara untuk periode 2023 hingga 2025 ini disusun untuk memotret perjalanan tata kelola zakat secara komprehensif. Dalam penyajian data tahun 2025, laporan ini menghadirkan dua perspektif indikator, yaitu Nilai 1 dan Nilai 2, sebagai instrumen evaluasi yang saling melengkapi. Nilai 1 merupakan representasi dari capaian aktual berdasarkan input data riil tahun 2025 yang mencerminkan kondisi terkini di lapangan. Fluktuasi yang muncul pada nilai ini dipandang sebagai dinamika alami dalam proses penguatan sistem pelaporan digital yang sedang terus disempurnakan oleh setiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di tingkat daerah.

Di sisi lain, Nilai 2 dihadirkan sebagai representasi dari Proyeksi Performa Optimal atau standar capaian terbaik (Best-Ever Performance) yang pernah diraih oleh masing-masing OPZ melalui modifikasi KDZ tahun

2024. Penggunaan indikator Nilai 2 ini bertujuan positif, yakni untuk menjaga kontinuitas narasi keberhasilan bagi daerah yang sedang dalam proses sinkronisasi data, sekaligus menjadi tolok ukur motivasi (*benchmarking*) bagi daerah yang performanya sedang stabil. Dengan menampilkan potensi maksimal yang pernah dicapai, Nilai 2 berfungsi sebagai pengingat akan kapasitas sesungguhnya dari setiap BAZNAS daerah dalam memberikan layanan terbaik. Sinergi kedua nilai ini membuktikan komitmen BAZNAS se-Kalimantan Utara untuk terus bertumbuh dan menjaga optimisme dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang unggul, akuntabel, dan berdampak luas bagi umat.

Tabel 2.64
Indeks Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2025

No	Nama BAZNAS	Nilai IZN			
		2023	2024	2025 (1)	2025 (2)
1	BAZNAS Prov. Kalimantan Utara	0,33	0.44	0,53	0,53
2	BAZNAS Kab. Bulungan	0,39	0	0,42	0,42
3	BAZNAS Kab. Malinau	0	0	0	0
4	BAZNAS Kab. Nunukan	0,42	0,45	0	0,45
5	BAZNAS Kab. Tana Tidung	0,38	0	0	0
6	BAZNAS Kota Tarakan	0,63	0	0,83	0,83

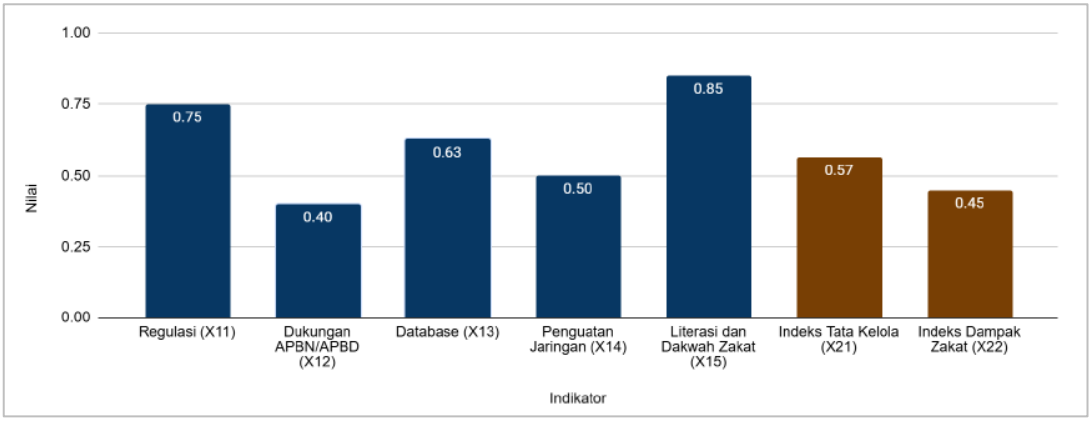
Sumber: Badan Amil Zakat Nasional, 2026

Dari 3 BAZNAS yang mengisi IZN di Provinsi Kalimantan Utara secara umum memiliki nilai Dimensi Makro yang tinggi jika dibandingkan dengan Dimensi Mikro. Hasil Penghitungan IZN dan KDZ Tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai tertinggi di Prov. Kalimantan Utara diraih oleh BAZNAS Kota Tarakan dengan nilai 0,83 atau termasuk kategori Berkelanjutan. Selanjutnya disusul oleh BAZNAS Prov. Kalimantan Utara dengan nilai 0,53 atau termasuk kategori Stabil.

Secara Kewilayahan, pengelolaan zakat di Provinsi Kalimantan Utara berada pada kategori Baik dengan nilai dimensi makro (0,61). Secara tata kelola dan dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Utara berada pada kategori Cukup Baik dengan nilai

dimensi mikro (0,50). Secara umum, pengelolaan zakat di Provinsi Kalimantan Utara masuk pada kategori Stabil dengan nilai IZN (0,53).

Gambar 2.43
Nilai Indikator Penyusun IZN BAZNAS Provinsi Kalimantan Utara



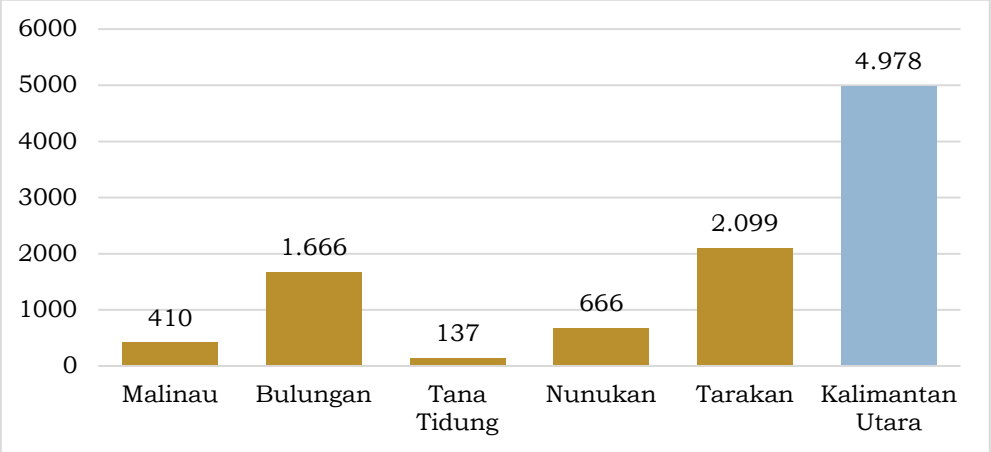
Sumber: Badan Amil Zakat Nasional, 2026

Jika dilihat berdasarkan nilai masing-masing indeks indikator penyusunan IZN, indikator literasi & dakwah digital (0,85) merupakan indikator yang memiliki nilai tertinggi atau masuk pada kategori Sangat Baik. Selanjutnya, indikator regulasi (0,75) dan database (0,63) berada pada kategori Baik. Sementara itu, indikator indeks tata kelola (0,57), penguatan jaringan (0,52) dan indeks dampak zakat (0,45) berada pada kategori Cukup Baik, sedangkan indikator dukungan APBN/APBD (0,40) berada pada kategori Kurang Baik. Dengan demikian, berdasarkan analisis IZN tahun 2025, BAZNAS Prov. Kalimantan Utara secara umum sudah memiliki nilai indeks yang baik, akan tetapi masih diperlukan penguatan pada aspek dukungan APBN/APBD dari pemerintah setempat.

3. Jumlah Produk Tersertifikasi Halal

Indikator ini bertujuan agar produk halal Indonesia memiliki daya saing di pasar global dan menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, jumlah produk bersertifikasi halal di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 sebesar 4.978 produk.

Gambar 2.44
Jumlah Produk Bersertifikat Halal Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2025



Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2026

Pada tahun 2025, jumlah produk bersertifikasi halal di setiap kabupaten/kota di Kalimantan Utara menunjukkan variasi yang cukup besar. Kota Tarakan mencatat jumlah tertinggi dengan 2.099 produk bersertifikasi halal, diikuti oleh Kabupaten Bulungan sebanyak 1.666 produk. Kabupaten Nunukan memiliki 666 produk bersertifikasi halal, sementara Kabupaten Malinau mencatat 410 produk. Di sisi lain, Kabupaten Tana Tidung memiliki jumlah paling sedikit, yaitu 137 produk bersertifikasi halal.

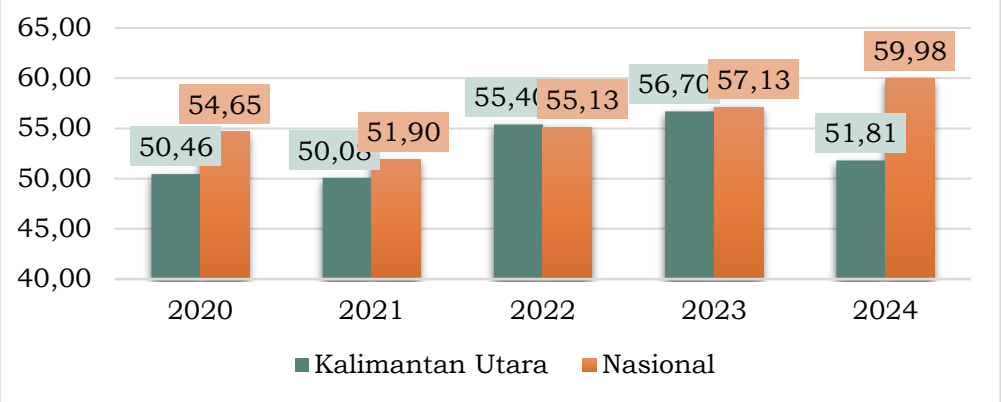
4. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) hadir sebagai instrumen untuk mengukur dan mengevaluasi capaian pembangunan kebudayaan secara komprehensif. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai kondisi kebudayaan suatu negara atau daerah serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Berikut merupakan capaian IPK Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 hingga 2024.

Dinamika Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kalimantan Utara dalam rentang tahun 2020 hingga 2024 secara umum mengalami fluktuasi. Penurunan data IPK yang cukup signifikan baik di tingkat provinsi maupun nasional terjadi pada tahun 2021 sebagai salah satu dampak pandemi

COVID-19 yang membatasi aktivitas kebudayaan, seperti pagelaran seni, kegiatan komunitas budaya, dan pelestarian warisan budaya yang membutuhkan interaksi sosial. Peningkatan capaian IPK terjadi kembali pada tahun 2022 dan 2023 yang menandakan bahwa adanya upaya pemulihan budaya pasca pandemi, termasuk kebijakan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menghidupkan kembali kegiatan seni dan budaya, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal. Namun pada tahun 2024 IPK Provinsi Kalimantan Utara kembali mengalami penurunan kembali menjadi hanya 51,81.

Gambar 2.45
Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2020-2024



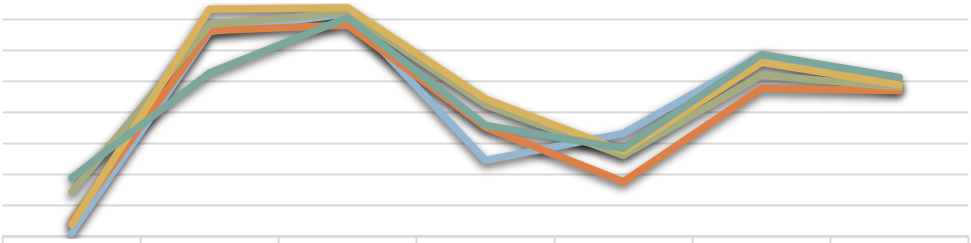
Sumber: Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, 2025

Fluktuasi data capaian IPK di Provinsi Kalimantan Utara dipengaruhi oleh banyak hal, seperti revitalisasi warisan budaya lokal, seperti seni tradisional, rumah adat, dan bahasa daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, dukungan kebijakan pemerintah daerah termasuk bantuan bagi pelaku seni dan budaya, pemanfaatan teknologi digital untuk promosi budaya lokal dan menarik generasi muda dalam pelestarian budaya.

Nilai IPK di Provinsi Kalimantan Utara tersusun oleh tujuh dimensi kebudayaan, yakni ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Capaian dimensi budaya literasi, pendidikan dan ketahanan sosial budaya menempati posisi tertinggi dalam struktur IPK Kalimantan Utara. Dimensi

Pendidikan dari 71,11 pada tahun 2020 menjadi 78,39 pada tahun 2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi hanya 57,80. Demikian pula dimensi Ketahanan Sosial Budaya yang meningkat dari 76,92 pada tahun 2020 menjadi 78,78 di tahun 2023, namun menurun pada tahun 2024 menjadi hanya 75,62. Untuk dimensi budaya literasi, pada tahun 2020 berada pada angka 63,58, menurun pada tahun 2021 menjadi 52,79, namun pada tahun berikutnya kembali meningkat menjadi 63,71 di tahun 2024.

Gambar 2.46
Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2020-2024



	Ekonomi Budaya	Pendidikan	Ketahanan Sosial Budaya	Warisan Budaya	Ekspresi Budaya	Budaya Literasi	Gender
2020	5,99	71,11	76,92	29,54	38,21	63,58	53,86
2021	9,69	71,40	73,21	40,19	22,63	52,79	52,02
2022	19,29	73,39	77,30	47,42	31,13	57,00	53,19
2023	8,76	78,39	78,78	49,34	32,44	61,11	53,94
2024	23,87	57,80	75,62	40,83	33,43	63,71	56,31

Sumber: Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, 2025

Ketiga dimensi ini mencerminkan keberhasilan program-program pembangunan yang mendorong akses pendidikan budaya, pelestarian nilai-nilai lokal, serta penguatan integrasi sosial di tengah masyarakat multikultural. Dimensi ekonomi budaya menunjukkan capaian terendah dan berfluktuasi. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2020 yang dapat dipengaruhi oleh pandemi, dan belum menunjukkan pemulihan signifikan pada 2023. Namun pada tahun 2024 dimensi ekonomi budaya menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan menjadi 23,87.

Dimensi Warisan Budaya mengalami tren peningkatan dari 29,54 pada tahun 2020 menjadi 49,34 pada tahun 2023 yang mencerminkan peningkatan dalam pelestarian objek pemajuan kebudayaan. Namun pada

tahun 2024 dimensi ini menurun menjadi hanya 40,83. Dimensi Gender relatif stagnan dalam rentang 52-55 yang menandakan masih terbatasnya partisipasi perempuan dalam proses pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Namun dimensi gender mengalami perbaikan dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 56,31.

Capaian tujuh dimensi pembangunan kebudayaan di Provinsi Kalimantan Utara memerlukan beberapa kebijakan, seperti penguatan peran budaya dalam pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif, festival budaya, dan inkubasi bisnis berbasis warisan lokal, revitalisasi ekspresi budaya melalui peningkatan dukungan terhadap komunitas seni dan penyediaan ruang budaya publik, pengarusutamaan gender dalam pembangunan kebudayaan dengan memperluas partisipasi perempuan dalam sektor seni, budaya, dan pengambilan keputusan, peningkatan kualitas pendidikan budaya dan literasi, termasuk melalui integrasi nilai budaya dalam kurikulum pendidikan formal dan nonformal, dan penguatan ketahanan sosial budaya sebagai fondasi kohesi sosial di tengah keberagaman etnis dan budaya lokal.

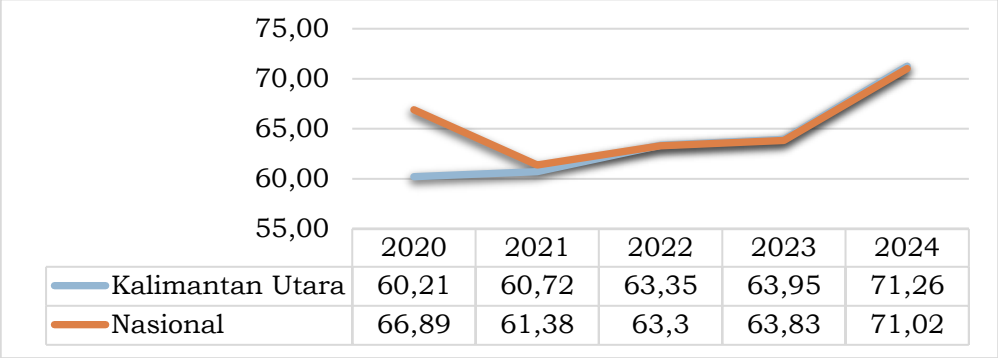
2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator penting dalam mengukur sejauh mana hak-hak anak terlindungi dan terpenuhi, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta partisipasi anak dalam pembangunan. Data pada gambar di bawah menunjukkan perkembangan IPA Provinsi Kalimantan Utara dibandingkan dengan rata-rata nasional selama lima tahun terakhir. Secara umum, Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan dalam capaian indeks. Pada tahun 2020, IPA Kalimantan Utara berada di angka 60,21 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 71,26. Sejak tahun 2020 sampai 2021 IPA Kalimantan Utara selalu lebih rendah dibandingkan dengan IPA Nasional, namun pada tahun 2022 sampai 2024 IPA Kalimantan Utara lebih tinggi dari IPA Nasional. Capaian IPA Nasional pada

tahun 2024 yaitu sebesar 71,02, sedangkan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun yang sama yaitu sebesar 71,26.

Gambar 2.47
Indeks Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Utara	60,21	60,72	63,35	63,95	71,26
Nasional	66,89	61,38	63,3	63,83	71,02

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025

Capaian tahun 2022 menjadi momentum penting bagi Kalimantan Utara karena mulai tahun ini, IPA daerah melampaui angka nasional. Ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan layanan perlindungan anak, seperti penguatan sistem pengaduan kekerasan terhadap anak, pemberdayaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), serta pengembangan kebijakan ramah anak di tingkat daerah mulai menunjukkan hasil yang positif.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu mempertahankan dan memperkuat pencapaian ini dengan strategi yang lebih sistematis dan partisipatif, termasuk pelibatan masyarakat, penguatan kelembagaan perlindungan anak, serta investasi berkelanjutan dalam pendidikan, kesehatan, dan partisipasi anak.

Tabel 2.65
Indeks Perlindungan Anak menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2024

Kabupaten/Kota dan Provinsi	2021	2022	2023	2024
Malinau	60,270	61,170	56,920	69,020
Bulungan	62,960	62,500	58,790	71,110
Tana Tidung	60,650	61,620	63,600	79,340
Nunukan	54,330	59,660	62,860	68,350
Tarakan	65,410	63,200	62,510	68,960
Kalimantan Utara	60,72	63,35	63,95	71,26

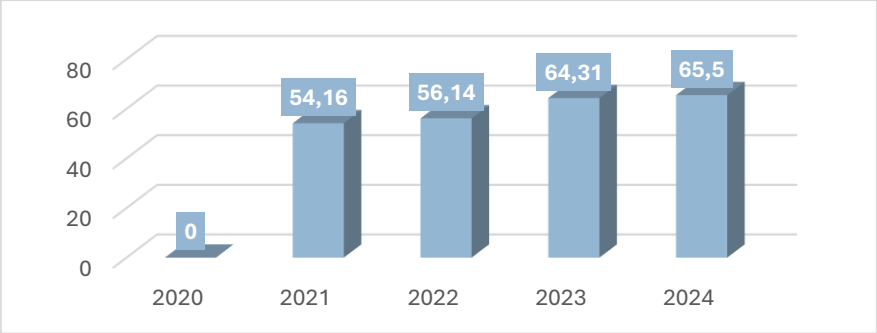
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan berfluktuatif cenderung meningkat, sedangkan Kabupaten Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan capaiannya selalu meningkat. Capaian tertinggi pada Tahun 2024 adalah Kabupaten Tana Tidung sebesar 79,340, sedangkan terendah adalah Kabupaten Nunukan sebesar 68,350.

2. Indeks Kualitas Keluarga

Keluarga merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing. Kualitas keluarga yang baik berkontribusi pada terbentuknya individu yang sehat, cerdas, dan berkarakter, yang pada akhirnya menjadi motor penggerak pembangunan. Kualitas keluarga salah satunya dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). iBangga merupakan indikator komposit yang menggambarkan kondisi ketahanan, kebahagiaan, dan kesejahteraan keluarga. Indeks ini memuat tiga dimensi utama, yakni Ketentraman (aspek ketahanan keluarga), Kemandirian (aspek kesejahteraan keluarga), dan Kebahagiaan (aspek kepuasan dan kualitas relasi dalam keluarga). Berikut merupakan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 hingga 2024.

Gambar 2.48
Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2020-2024



Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Kinerja iBangga Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2020–2024. iBangga pada tahun 2020 belum memiliki capaian karena baru ditetapkan pada tahun 2021. Capaian iBangga mengalami peningkatan dengan optimal sebesar 11,34 poin dalam 4 tahun terakhir. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga, meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengasuhan positif, semakin baiknya akses masyarakat terhadap layanan perlindungan keluarga dan anak, pendidikan dan kesehatan, serta semakin menguatnya ketahanan keluarga.

Peningkatan iBangga Kalimantan Utara secara berkelanjutan mencerminkan bahwa kebijakan pembangunan keluarga mulai menunjukkan hasil positif. Ini dapat dikaitkan dengan implementasi program-program yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, seperti penguatan fungsi Pusat Kesejahteraan Sosial dan layanan konseling keluarga. Kalimantan Utara masih perlu memperkuat intervensi di wilayah perbatasan dan pedalaman, memperluas cakupan program ketahanan keluarga, serta meningkatkan literasi pengasuhan dan keuangan keluarga.

3. Indeks Ketimpangan Gender

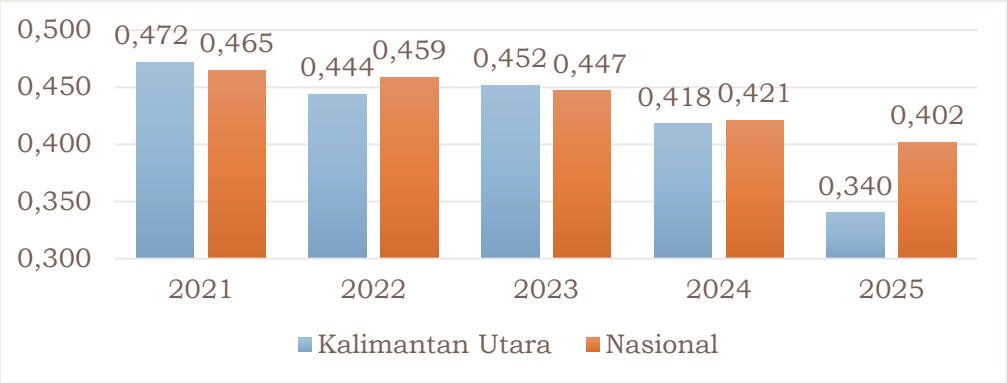
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan salah satu ukuran yang dianggap lebih tepat menggambarkan pemberdayaan sekaligus kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan. IKG menunjukkan kerugian atau kehilangan potensi pembangunan manusia karena ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses kebutuhan dasar.

Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan tren perbaikan yang cukup signifikan. Nilai IKG menurun dari 0,472 pada tahun 2021 menjadi 0,444 pada 2022, kemudian sempat meningkat tipis menjadi 0,452 pada 2023, sebelum kembali turun menjadi 0,418 pada 2024 dan mencapai 0,340 pada tahun 2025. Penurunan nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan gender di Kalimantan Utara semakin

berkurang dari tahun ke tahun. Semakin rendah nilai IKG berarti semakin kecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi.

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, perkembangan IKG Kalimantan Utara menunjukkan perbaikan yang cukup progresif. Pada tahun 2021–2024, nilai IKG Kalimantan Utara masih berada sedikit di atas nasional, yang berarti tingkat ketimpangan gender di daerah relatif lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Namun pada tahun 2025, IKG Kalimantan Utara turun signifikan menjadi 0,340, jauh lebih baik dibanding nasional yang berada pada 0,402. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan kesenjangan gender di Kalimantan Utara mulai memberikan hasil yang cukup positif dan bahkan melampaui capaian nasional.

Gambar 2.49
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025



Sumber: BPS RI, 2026

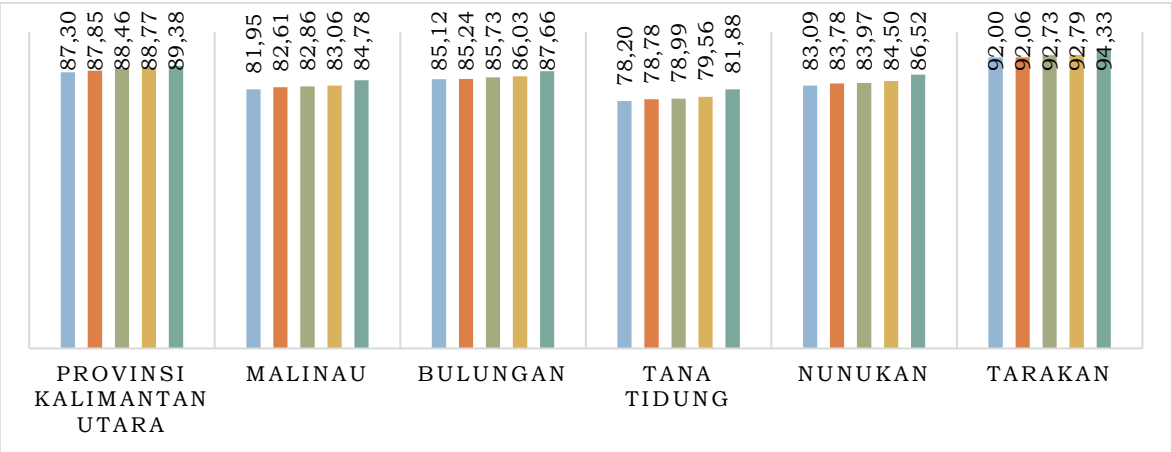
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di suatu wilayah. IPG merefleksikan capaian pembangunan manusia yang dihitung secara spesifik berdasarkan perbedaan peran, akses, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPG tidak hanya menilai perkembangan umum kualitas hidup penduduk, tetapi juga

menekankan aspek keadilan dan kesetaraan dalam distribusi hasil pembangunan.

Berdasarkan data IPG Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 hingga 2025 secara umum terjadi tren peningkatan yang stabil baik pada tingkat provinsi maupun di sebagian besar kabupaten/kota. IPG Provinsi Kalimantan Utara meningkat dari 87,30 pada tahun 2021 menjadi 89,38 pada tahun 2025, yang mengindikasikan adanya kemajuan dalam pembangunan yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan. Secara spesifik, semua daerah menunjukkan kecenderungan peningkatan IPG tiap tahunnya, meskipun dengan kecepatan yang bervariasi. Semakin tinggi nilai IPG, semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, dan semakin menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses, kesempatan, dan peran yang setara dalam berbagai bidang kehidupan.

Gambar 2.50
Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021-2025



Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2026

Pencapaian IPG menjadi salah satu tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berperspektif gender. Hal ini juga sejalan dengan komitmen global dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan ke-5 yaitu Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Seluruh Perempuan dan Anak Perempuan. Upaya peningkatan IPG tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang mendorong

akses setara terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang adil, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, integrasi perspektif gender dalam seluruh program pembangunan daerah menjadi strategi utama untuk memperkecil ketimpangan dan memastikan seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh manfaat yang setara dari hasil pembangunan.

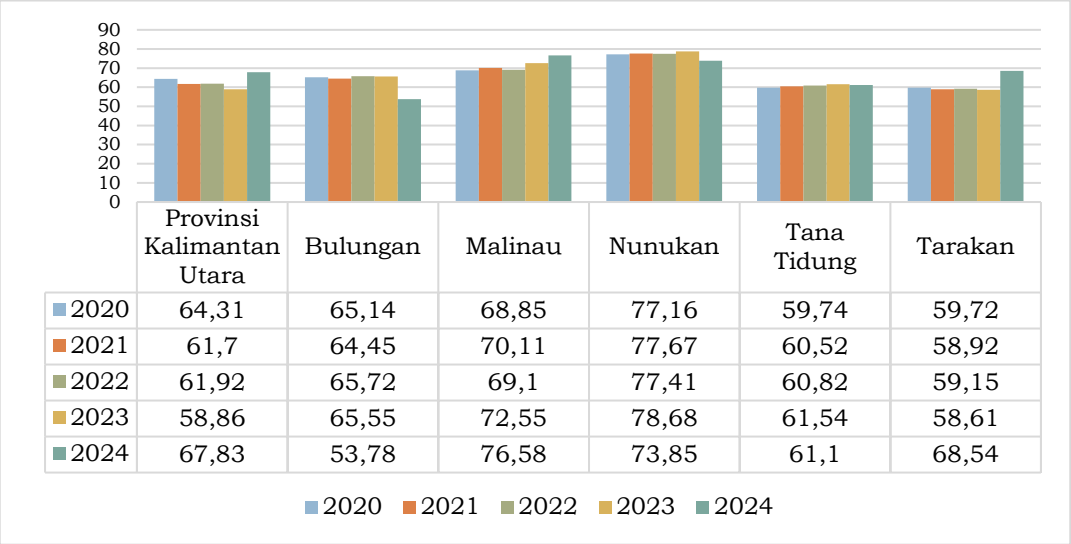
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Dalam rangka mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan dan inklusif, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. IDG merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, capaian IDG menjadi gambaran seberapa besar kontribusi perempuan dalam pembangunan dan sejauh mana upaya pemberdayaan gender telah berjalan efektif di suatu daerah.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Utara dan kabupaten/kota di dalamnya menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan IDG dari 64,31 pada tahun 2020 menjadi titik terendah 58,86 pada 2023, kemudian berhasil melakukan *bounce back* menjadi 67,83 pada 2024.

Kabupaten Bulungan cenderung stabil di kisaran 65, namun mengalami penurunan signifikan di 2024 menjadi 53,78. Kabupaten Malinau menunjukkan tren positif yakni meningkat dari 68,85 menjadi 76,58 dalam empat tahun terakhir. Kabupaten Nunukan memiliki IDG tertinggi dibanding daerah lain, yakni mencapai 78,68 pada 2023 meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi 73,85 di 2024. Kabupaten Tana Tidung menunjukkan tren peningkatan bertahap hingga selisih 1,36 poin dalam empat tahun terakhir. Kota Tarakan mengalami fluktuasi, namun cenderung meningkat dari 59,72 pada tahun 2020 menjadi 68,54 pada tahun 2024

Gambar 2.51
Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024



	Provinsi Kalimantan Utara	Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung	Tarakan
2020	64,31	65,14	68,85	77,16	59,74	59,72
2021	61,7	64,45	70,11	77,67	60,52	58,92
2022	61,92	65,72	69,1	77,41	60,82	59,15
2023	58,86	65,55	72,55	78,68	61,54	58,61
2024	67,83	53,78	76,58	73,85	61,1	68,54

Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2025

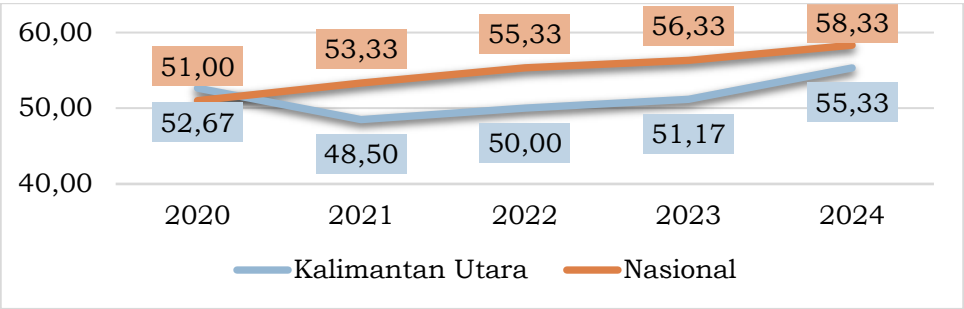
Peningkatan IDG menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan ke-5, yaitu Kesetaraan Gender. Sebaliknya, capaian IDG yang rendah atau fluktuatif mengindikasikan adanya ketimpangan partisipasi perempuan yang dapat berdampak pada terhambatnya optimalisasi potensi sumber daya manusia secara menyeluruh.

6. Indeks Pembangunan Pemuda

Pemuda merupakan agen perubahan dan aset penting dalam pembangunan suatu daerah. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) digunakan untuk mengukur sejauh mana pemuda memiliki akses dan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti tingkat kesejahteraan, partisipasi, dan kualitas hidup pemuda dalam suatu wilayah. Indeks Pembangunan Pemuda mencakup berbagai dimensi utama, seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, serta akses terhadap teknologi dan

informasi. Semakin tinggi skor IPP, semakin baik kondisi yang mendukung perkembangan dan pemberdayaan pemuda sebagai individu yang produktif, inovatif, dan berdaya saing.

Gambar 2.52
Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2020-2024



Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara terdapat persentase pemuda sebesar 24,03 persen. Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan IPP sebesar 4,17 poin dari 51,17 pada tahun 2023 menjadi 55,33 di tahun 2024. Kenaikan yang cukup tinggi berasal dari domain partisipasi dan kepimpinan sebanyak 13,33 poin. Domain kesehatan dan kesejahteraan juga mengalami kenaikan dari 57,50 menjadi 65. Sementara itu, tiga domain lain yaitu domain pendidikan, lapangan dan kesempatan kerja, serta gender dan diskriminasi mengalami stagnasi masing-masing dengan poin 70, 45 dan 56,67.

Grafik di atas menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi Kalimantan Utara dibandingkan dengan rata-rata nasional Indonesia selama periode 2020 hingga 2024. Sejak tahun 2021, nilai IPP Kalimantan Utara terus mengalami peningkatan, namun masih berada di bawah IPP nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada awal periode, pembangunan pemuda di Kalimantan Utara berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2021, terjadi penurunan signifikan pada IPP Kalimantan Utara menjadi 48,50, sementara IPP nasional justru meningkat menjadi 53,33.

Kondisi ini dipengaruhi oleh domain kesehatan dan kesejahteraan (65) memiliki nilai yang lebih rendah dari capaian nasional, kemudian

domain partisipasi dan kepemimpinan (40) memiliki nilai capaian yang lebih rendah dari capaian nasional. Sedangkan untuk domain pendidikan (70), lapangan dan kesempatan kerja (45) serta gender dan diskriminasi (56,67) memiliki capaian yang sama dengan nilai nasional.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki keunggulan pada empat indikator yaitu angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, tingkat pengangguran terbuka dan persentase pemuda yang aktif dalam organisasi. Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki indikator yang menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan di bawah capaian nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikator yang menjadi kelemahan di Provinsi Kalimantan Utara namun demikian tetap perlu memperhatikan dan mempertahankan indikator secara keseluruhan.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

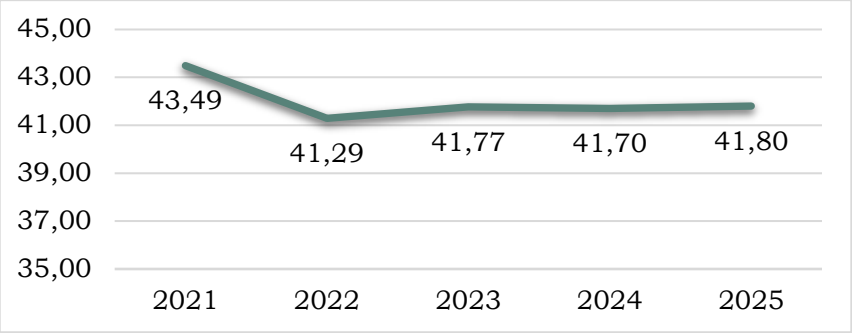
4.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing SDM juga tidak terlepas dari dinamika angka ketergantungan, yakni rasio antara penduduk usia tidak produktif (anak-anak dan lansia) dengan penduduk usia produktif. Angka ketergantungan merupakan indikator untuk mengetahui beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Angka ketergantungan penduduk Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dengan sedikit penurunan dibanding awal periode. Pada tahun 2021 angka ketergantungan tercatat sebesar 43,49, kemudian menurun cukup signifikan menjadi 41,29 pada tahun 2022, sebelum kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 41,77 pada 2023 dan berada pada kisaran 41,7–41,8 pada tahun 2024–2025.

Pola ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 41–42 penduduk usia tidak produktif, yang terdiri dari kelompok usia anak dan lanjut usia. Penurunan angka ketergantungan dari tahun 2021 ke tahun-tahun berikutnya mengindikasikan bahwa proporsi penduduk usia produktif di Kalimantan Utara semakin meningkat dibandingkan kelompok usia nonproduktif.

Gambar 2.53
Angka Ketergantungan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kalimantan Utara, 2026

4.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1. PDRB Industri Pengolahan

Produk domestik regional bruto (PDRB) industri pengolahan adalah nilai total produksi barang dan jasa dari sektor industri pengolahan di suatu wilayah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Sektor industri pengolahan mencakup kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti industri makanan, tekstil, kimia, logam, dan sebagainya. Indikator ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita.

Nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren yang meningkat sebesar 3.727,39 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2025. Walaupun nilai PDRB meningkat, namun kontribusi PDRB pada sektor industri pengolahan terhadap total PDRB mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2025, sektor ini memberi kontribusi sebesar 8,75 terhadap perekonomian Kalimantan Utara.

Faktor penentu PDRB industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Utara adalah nilai produksi industri. Variabel ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan bahan baku, infrastruktur dan konektivitas, investasi dan kebijakan pemerintah, sumber daya manusia dan teknologi serta permintaan pasar dan ekspor. Faktor-faktor tersebut harus mendapat intervensi kebijakan yang baik agar nilai PDRB industri

pengolahan di Provinsi Kalimantan Utara bisa meningkat secara berkesinambungan.

Tabel 2.66
PDRB Industri Pengolahan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021-2025

Tahun	Miliar Rp	Persen
2021	9.929,87	8,90
2022	10.773,85	7,77
2023	11.326,56	7,69
2024	12.153,16	8,27
2025	13.657,26	8,75

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

2. PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Produk domestik regional bruto (PDRB) penyediaan akomodasi dan makan minum adalah nilai total *output* ekonomi yang dihasilkan oleh sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita serta indikator makro ekonomi lainnya.

Tabel 2.67
PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025

Tahun	Miliar Rp	Persen
2021	1.667,88	1,50
2022	1.913,63	1,38
2023	2.132,80	1,45
2024	2.432,42	1,65
2025	2.769,14	1,77

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

Nilai PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren yang meningkat sebesar 1.101,26 miliar rupiah pada tahun 2020 hingga 2025. Walaupun persentase PDRB industri pengolahan terhadap total PDRB mengalami tren yang fluktuatif. Faktor penentu PDRB sektor akomodasi dan makan minum di suatu wilayah, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara, dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti pariwisata dan mobilitas penduduk, infrastruktur

dan aksesibilitas, daya beli dan konsumsi masyarakat, investasi dan kebijakan pemerintah, serta digitalisasi dan teknologi. Faktor-faktor tersebut harus mendapat intervensi kebijakan yang baik agar nilai PDRB akomodasi dan makan minum di Provinsi Kalimantan Utara bisa meningkat secara berkesinambungan.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ekonomi yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja, yaitu mereka yang berusia 15 tahun ke atas, yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik dengan memiliki pekerjaan maupun sedang aktif mencari pekerjaan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana penduduk usia kerja berkontribusi dalam pasar tenaga kerja, sehingga dapat mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam sektor ekonomi. TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk yang berpartisipasi dalam dunia kerja, sementara TPAK yang rendah dapat mengindikasikan adanya hambatan dalam akses ke pekerjaan, seperti keterbatasan kesempatan kerja, tingkat pendidikan, atau faktor sosial lainnya. Berikut adalah data TPAK di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.68
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota dan Provinsi	2021	2022	2023	2024	2025
Malinau	71,49	73,55	74,26	73,23	76,52
Bulungan	68,62	64,24	71,86	71,89	72,96
Tana Tidung	67,35	74,49	75,88	74,01	73,69
Nunukan	66,11	69,1	71,93	75,53	72,26
Tarakan	63,34	65,49	66,14	63,64	62,18
Kalimantan Utara	**66,24**	**67,62**	**70,35**	**70,35**	**69,55**

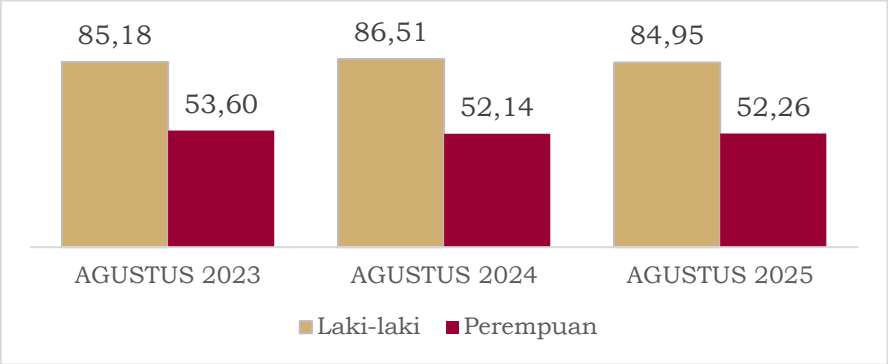
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

Kondisi tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, namun secara umum masih berada pada tingkat partisipasi yang relatif tinggi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) provinsi meningkat dari 66,24 persen

pada 2021 menjadi 70,35 persen pada 2023–2024, sebelum kembali sedikit menurun menjadi 69,55 persen pada 2025. Pola ini mengindikasikan bahwa keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi sempat menguat pascapemulihan ekonomi, meskipun pada tahun terakhir terlihat adanya tekanan atau penyesuaian kembali dalam pasar tenaga kerja daerah.

Jika ditinjau antar kabupaten/kota, terdapat kesenjangan partisipasi tenaga kerja yang cukup jelas. Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan secara konsisten mencatat TPAK tertinggi, dengan Malinau mencapai 76,52 persen pada 2025, mencerminkan tingginya keterlibatan penduduk dalam aktivitas ekonomi, terutama pada sektor-sektor berbasis sumber daya alam dan kegiatan produktif lokal. Sebaliknya, Kota Tarakan menunjukkan TPAK terendah, bahkan cenderung menurun hingga 62,18 persen pada 2025, yang mengindikasikan adanya tantangan spesifik di wilayah perkotaan, seperti keterbatasan kesempatan kerja formal atau meningkatnya penduduk usia kerja yang belum terserap pasar kerja.

Gambar 2.54
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023-2025



Sumber: Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Provinsi Kalimantan Utara 2025, BPS Kalimantan Utara

Nilai TPAK berdasarkan jenis kelamin pada Agustus 2023 hingga Agustus 2025 mengalami kesenjangan gender yang signifikan, di mana partisipasi laki-laki mendominasi lebih dari 84 persen sementara perempuan stagnan di kisaran 52-53 persen. Meskipun TPAK laki-laki

sempat meningkat menjadi 86,51 persen pada Agustus 2024, tahun selanjutnya mengalami penurunan menjadi 84,95 persen pada Agustus 2025. Sementara itu, TPAK perempuan cenderung menurun sedikit hingga menyentuh 52,26 persen pada Agustus 2025.

Dari 380.572 penduduk yang bekerja pada Agustus 2025, status pekerjaan utama penduduk yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan/ pegawai, hampir separuh dari total penduduk bekerja, diikuti penduduk yang berusaha sendiri (19,02 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap (12,73 persen), pekerja keluarga/tidak dibayar (10,24 persen), berusaha dibantu buruh tetap (4,01 persen), pekerja bebas di pertanian (4,61 persen), dan yang paling sedikit adalah pekerja bebas non pertanian (1,83 persen).

Tabel 2.69
Penduduk Usia 15+ yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

No.	Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	Berusaha sendiri	49.028	23.371	72.399	19,02
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	31.750	16.712	48.462	12,73
3	Berusaha dibantu buruh tetap	11.792	3.470	15.262	4,01
4	Buruh/karyawan/pegawai	124.375	56.574	180.949	47,55
5	Pekerja bebas di pertanian	8.451	9.110	17.561	4,61
6	Pekerja bebas non pertanian	5.538	1.420	6.958	1,83
7	Pekerja keluarga/tidak dibayar	15.666	23.315	38.981	10,24
	Total	246.600	133.972	380.572	100

Sumber: BPS Kalimantan Utara Dalam Angka, 2026

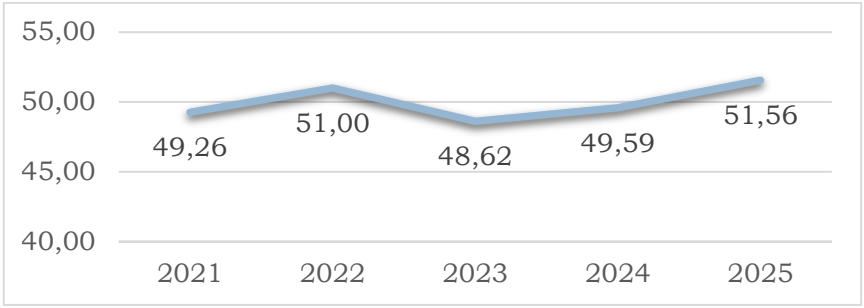
Jika dilihat menurut kategorinya, lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kalimantan Utara adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, berikutnya kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, dan kategori administrasi pemerintahan. Sedangkan menurut tingkat pendidikan, lebih dari 56 persen penduduk bekerja memiliki pendidikan terakhir SMA ke bawah.

4. Persentase Tenaga Kerja Formal

Persentase tenaga kerja formal adalah proporsi penduduk yang bekerja dengan status sebagai buruh/karyawan/pegawai atau berusaha yang dibantu oleh buruh tetap, dibandingkan dengan total penduduk yang sedang bekerja. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak pekerja yang memiliki kepastian pendapatan, jam kerja yang teratur, dan akses ke jaminan sosial atau kesehatan.

Perkembangan persentase tenaga kerja formal di Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang relatif fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan pada akhir periode. Persentase tenaga kerja formal meningkat dari 49,26 persen pada tahun 2021 menjadi 51 persen pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 48,62 persen pada tahun 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 49,59 persen pada 2024 dan mencapai 51,56 persen pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh tenaga kerja di Kalimantan Utara pada tahun 2025 telah bekerja pada sektor formal yang umumnya memiliki kepastian kerja, pendapatan lebih stabil, dan perlindungan ketenagakerjaan yang lebih baik dibanding sektor informal.

Gambar 2.55
Persentase Tenaga Kerja Formal Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021-2025



Sumber: BPS RI, 2026

Peningkatan tenaga kerja formal pada tahun 2025 mengindikasikan adanya perbaikan struktur pasar kerja dan berkembangnya sektor ekonomi formal di Kalimantan Utara, terutama pada sektor industri, perdagangan, jasa, dan aktivitas usaha yang mulai berkembang seiring peningkatan investasi dan pembangunan wilayah. Namun demikian,

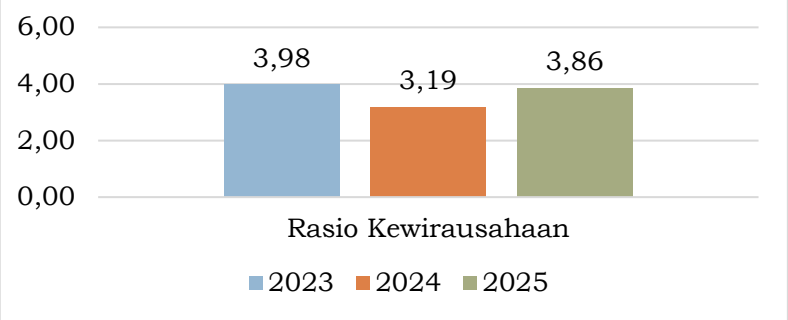
fluktuasi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa struktur ketenagakerjaan daerah masih cukup sensitif terhadap dinamika ekonomi dan perubahan aktivitas usaha. Masih besarnya proporsi tenaga kerja informal juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih bekerja pada sektor dengan produktivitas dan perlindungan kerja yang relatif rendah.

5. Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Data pada gambar di bahwa menunjukka bahwa Rasio Kewirausahaan Daerah di Kalimantan Utara selama 3 (tiga) tahun terakhir menglami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Tahun 2025 mencatat Rasio Kewirausahaan Daerah sebesar 3,86. Ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap. Terdapat orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

Gambar 2.56
Rasio Kewirausahaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2023-2025

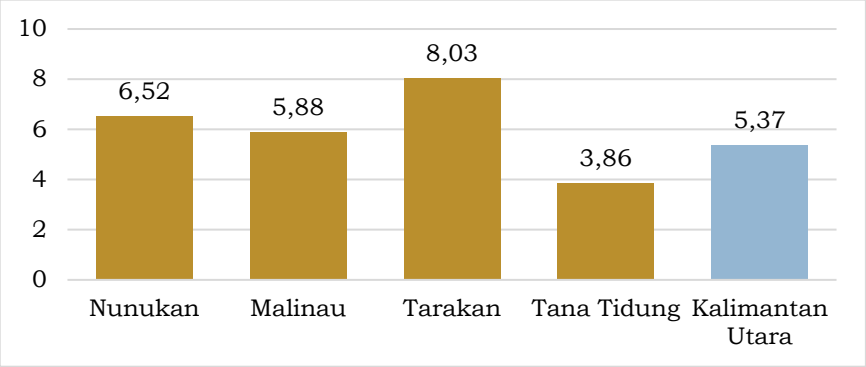


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026, diolah

6. Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaku ekonomi kreatif dalam memperkuat daya saing melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Berdasarkan data tahun 2025, Dinas Pariwisata Kalimantan Utara mencatat persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 5,37%.

Gambar 2.57
Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual Provinsi Kalimantan Utara (%) Tahun 2025



Sumber: Dinas Pariwisata Kalimantan Utara, 2026

Pada tahun 2025, persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual di kabupaten/kota di Kalimantan Utara menunjukkan perbedaan antardaerah. Kota Tarakan mencatat persentase tertinggi sebesar 8,03%, diikuti oleh Kabupaten Nunukan sebesar 6,52% dan Kabupaten Malinau sebesar 5,88%. Sementara itu, Kabupaten Tana Tidung memiliki persentase sebesar 3,86%, menjadikannya wilayah dengan nilai terendah di antara kabupaten/kota yang ditampilkan pada data tersebut. Adapun Kabupaten Bulungan belum memiliki data untuk tahun 2025.

7. Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah (IID) merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu berinovasi dalam mendukung pembangunan, meningkatkan efisiensi tata

kelola pemerintahan, serta memperkuat daya saing wilayahnya dalam berbagai sektor. Indeks ini mencerminkan kapasitas suatu daerah dalam menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan berbagai bentuk inovasi, baik dalam aspek kebijakan, program, maupun layanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Melalui IID, dapat diketahui bagaimana pemerintah daerah beradaptasi terhadap tantangan pembangunan, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, serta menghadirkan solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas layanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 2.70
Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Inovasi Daerah (IID) *)	39,63	46,37	45,86	53,35	50,84
Predikat IID	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri 2021-2026

Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang secara umum mengalami peningkatan, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Nilai IID meningkat dari 39,63 pada tahun 2021 menjadi 46,37 pada tahun 2022, kemudian sedikit menurun menjadi 45,86 pada tahun 2023, sebelum meningkat cukup signifikan menjadi 53,35 pada tahun 2024. Pada tahun 2025 nilai IID kembali mengalami penurunan moderat menjadi 50,84, namun tetap lebih tinggi dibandingkan capaian tahun-tahun awal periode pengamatan. Meskipun terjadi fluktuasi, Kalimantan Utara secara konsisten mempertahankan predikat “Inovatif” selama lima tahun berturut-turut, yang menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi tata kelola, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.

Peningkatan indeks inovasi daerah tersebut mengindikasikan bahwa kapasitas inovasi pemerintah daerah mulai berkembang, terutama dalam mendorong transformasi pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan, dan penguatan tata kelola pembangunan. Namun demikian, fluktuasi nilai IID dari tahun ke tahun juga menunjukkan bahwa penguatan ekosistem

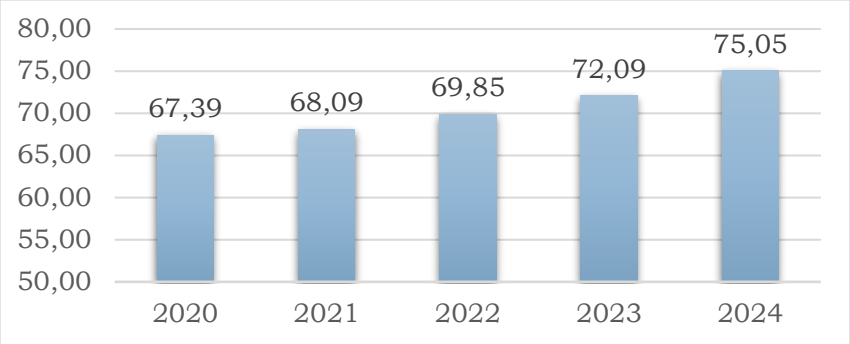
inovasi daerah masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas inovasi dan keberlanjutan implementasinya.

4.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

1. Indeks Ekonomi Hijau

Pembangunan ekonomi saat ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan yang tinggi tetapi juga memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mengukur sejauh mana pembangunan ekonomi menggunakan prinsip yang berkelanjutan, maka digunakan indikator Indeks Ekonomi Hijau. Indeks Ekonomi Hijau merupakan indikator yang terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Gambar 2.58
Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2020-2024



Sumber: Bappenas, 2025

Realisasi Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Nilai indeks naik dari 67,39 pada tahun 2020 menjadi 68,09 pada tahun 2021, 69,85 pada tahun 2022, 72,09 pada tahun 2023, dan mencapai 75,05 pada tahun 2024. Secara kumulatif, indeks meningkat sebesar 7,66 poin dalam lima tahun terakhir atau rata-rata sekitar 1,92 poin per tahun. Peningkatan yang konsisten tersebut mengindikasikan bahwa arah pembangunan ekonomi Kalimantan Utara semakin mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta

penguatan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Indeks Ekonomi Hijau di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 yaitu sebesar 67,39 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 72,09. Capaian indeks ekonomi hijau Provinsi Kalimantan Utara merupakan yang tertinggi di wilayah Kalimantan dan masuk ke dalam rentang Nilai Baik Tier 1. Faktor utama yang mendorong tingginya capaian tersebut adalah luasnya tutupan hutan dari luas daratan dimana 85,23 persen wilayah Provinsi Kalimantan Utara berupa hutan. Selain itu, capaian dari 16 indikator terpilih sebagian besar menunjukkan kondisi yang semakin baik seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran yang semakin turun serta meningkatnya nilai PDRB per kapita, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan beberapa indikator lainnya.

2. Indeks Ekonomi Biru

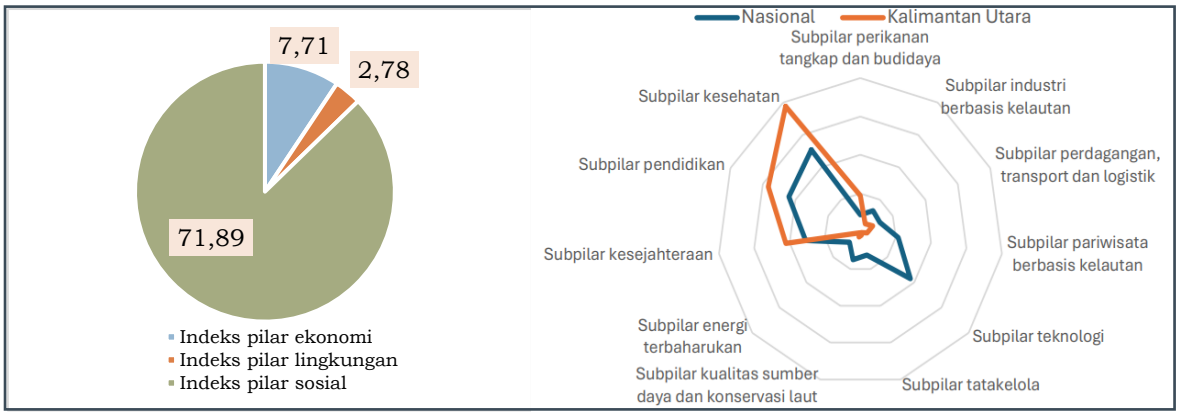
Potensi perairan Indonesia begitu kaya akan tetapi belum dimanfaatkan dengan optimal. Pemanfaatan sumber daya laut dapat mendorong peningkatan nilai tambah perekonomian daerah yang diharapkan dapat turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indeks ekonomi biru merupakan indikator yang mengukur kontribusi sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap kemajuan ekonomi biru. Perhitungan dilakukan menggunakan beberapa indikator makro yang mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terkait dengan sektor ekonomi biru.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Bappenas, indeks ekonomi biru di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 sebesar 33,47. Pada lingkup Pulau Kalimantan, nilai indeks ekonomi biru Kalimantan Utara menempati posisi tertinggi, lalu diikuti dengan Kalimantan Timur sebesar 31,30, Kalimantan Barat sebesar 30,34, Kalimantan Selatan sebesar 26,44, dan Kalimantan Tengah sebesar 24,28.

Capaian Indeks Ekonomi Biru (IBEI) Kalimantan Utara berada di bawah rata-rata nasional pada pilar ekonomi dan lingkungan, sementara pada pilar sosial nilainya relatif lebih tinggi. Pada level subpilar,

Kalimantan Utara menunjukkan capaian lebih baik pada subpilar kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan perikanan tangkap dan budidaya, namun tertinggal cukup jauh pada subpilar teknologi, pariwisata bahari, serta perdagangan, transportasi, dan logistik. Subpilar kesejahteraan, energi terbarukan, serta kualitas sumber daya laut juga masih berada di bawah capaian nasional. Potensi pengembangan ekonomi maritim provinsi ini cukup besar mengingat posisi strategis di perbatasan negara dengan Malaysia dan perbatasan dengan IKN, namun memerlukan investasi dalam infrastruktur maritim, pengembangan sumber daya manusia, dan sistem tata kelola.

Gambar 2.59
Indeks Ekonomi Biru Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024



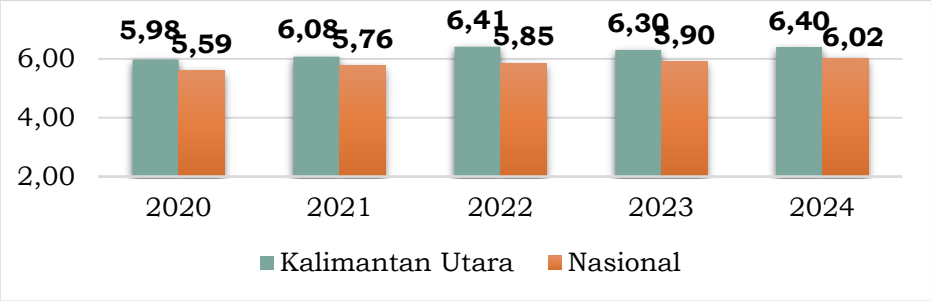
Sumber: Indeks Ekonomi Biru Indonesia 2024, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2025

Dengan nilai 33,47, Kalimantan Utama masuk pada Kuadran IV: Diperlukan Intervensi (Ekonomi Rendah, Lingkungan Rendah). Kelompok ini menghadapi tantangan ganda dengan kinerja di bawah rata-rata nasional untuk Pilar Ekonomi dan Lingkungan. Ini adalah area yang memerlukan intervensi paling fundamental. Mayoritas provinsi dalam kuadran ini menunjukkan kinerja sosial yang terbatas atau relatif rendah, yang ditunjukkan dengan gelembung berukuran kecil hingga sedang. Ini mengkonfirmasi bahwa tantangan ekonomi dan lingkungan yang rendah juga berdampak pada pencapaian pilar sosial yang terbatas.

4.1.3.4. Transformasi Digital

Transformasi digital telah menjadi pengarusutamaan dalam pembangunan daerah yang meliputi pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan mencetak talenta digital. Pengembangan transformasi digital bertujuan untuk mendukung aspek pelayanan kepada masyarakat dan tata kelola pemerintahan. Transformasi digital di Provinsi Kalimantan Utara salah satunya dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Indeks Pembangunan TIK ini merupakan indikator untuk mengukur perkembangan TIK di suatu wilayah yang dinilai dari infrastruktur TIK, penggunaan TIK, dan keahlian TIK.

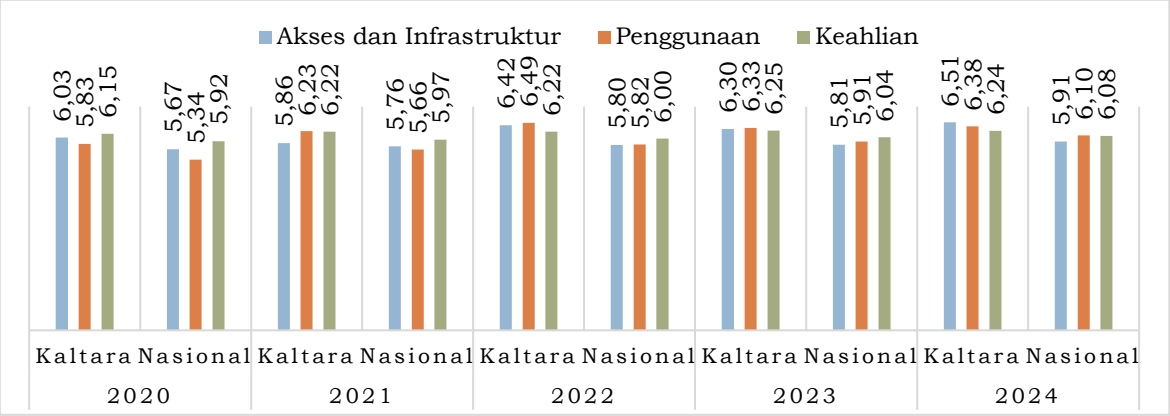
Gambar 2.60
Indeks Pembangunan TIK Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2020-2024



Sumber: Indeks Pembangunan TIK, BPS, 2020-2024

Dalam kurun waktu lima tahun sejak tahun 2020, Indeks Pembangunan TIK di Provinsi Kalimantan Utara terus mengalami peningkatan yang cukup konstan, namun sempat mengalami penurunan 0,11 poin pada tahun 2023. Selama kurun waktu tersebut, Indeks Pembangunan TIK Provinsi Kalimantan Utara lebih tinggi dari pada Indeks Pembangunan TIK Nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan transformasi digital di provinsi tersebut lebih pesat dibandingkan pengembangan transformasi digital secara rata-rata nasional. Dilihat dari sub indeks penyusunnya, ketiga sub indeks pembangunan TIK di Provinsi Kalimantan Utara dapat digambarkan sebagai berikut.

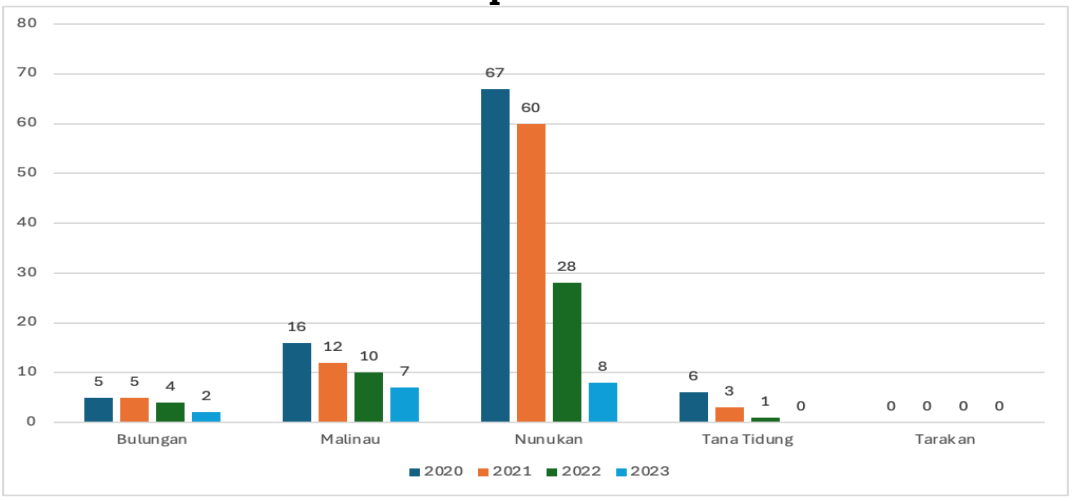
Gambar 2.61
Sub Indeks Pembangunan TIK Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2020-2024



Sumber: Indeks Pembangunan TIK, BPS, 2020-2024

Pembangunan teknologi informasi komunikasi berkaitan dengan ketersediaan layanan internet yang telah menjangkau desa dan kelurahan di kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara. Masih ada beberapa desa dan kelurahan yang berada dalam zona *blankspot* internet. Desa dan kelurahan *blankspot* di Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu tahun 2020-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.62
Desa dan Kelurahan Blankspot di Provinsi Kalimantan Utara



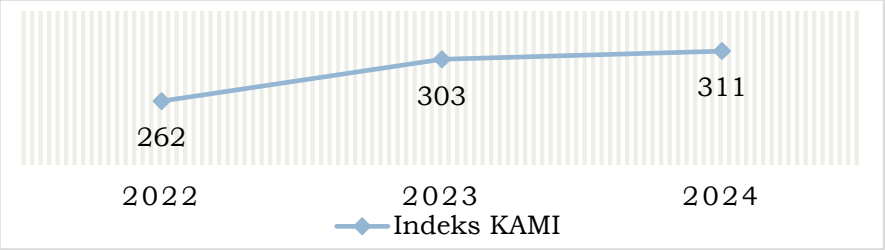
Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2024

Berdasarkan gambar tersebut, jumlah desa dan kelurahan *blankspot* di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami tren

penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan internet telah menjangkau desa dan kelurahan. Jumlah desa/kelurahan *blankspot* tertinggi berada di Kabupaten Nunukan yaitu delapan desa/kelurahan, sedangkan Kota Tarakan telah bebas dari *blankspot.* Jangkauan layanan internet di desa dan kelurahan telah menjadi kebutuhan untuk mendukung pelayanan publik.

Dalam pengembangan transformasi digital, persandian juga berperan penting dalam kaitannya dengan keamanan siber dan sandi di pemerintah daerah. Capaian dari penilaian kematangan keamanan siber dan sandi dapat dilihat dari Indeks Keamanan Informasi (KAMI). di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.63
Capaian Indeks KAMI di Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Capaian Indeks KAMI di Provinsi Kalimantan Utara mengalami tren peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa keamanan informasi telah diterapkan dalam organisasi perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Semakin meningkatnya indeks, organisasi dapat meningkatkan keamanan informasi, mengurangi risiko, memenuhi kepatuhan, membangun kepercayaan, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Aspek keamanan informasi dan digital berkaitan erat dengan ketersediaan tim tanggap insiden siber atau yang biasa dikenal dengan *Computer Security Incident Response Team (CSIRT).* Kondisi CSIRT di Provinsi Kalimantan Utara ditunjukkan dengan jumlah instansi pemerintahan yang terbentuk CSIRT, yang hingga tahun 2024 telah ada satu instansi pemerintahan yang memiliki tim tersebut.

Dalam mendukung upaya pengembangan transformasi digital yang berkaitan dengan statistik telah diukur dengan Indeks Pembangunan Statistik melalui hasil penilaian EPSS pada tahun 2024. Indeks Pembangunan Statistik di Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

Tabel 2.71
Indeks Pembangunan Statistik Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Indeks	Predikat
Bulungan	3,34	Baik
Malinau	2,34	Cukup
Nunukan	2,61	Baik
Tana Tidung	2,34	Cukup
Kota Tarakan	2,92	Baik
Provinsi Kalimantan Utara	**2,83**	**Baik**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2024

Berdasarkan data tersebut, Kota Tarakan memiliki Indeks Pembangunan Statistik tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara, bahkan nilai indeksnya berada di atas nilai indeks provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan statistik di kota tersebut telah berjalan dengan baik.

Sebagai bagian dari strategi percepatan transformasi digital, Provinsi Kalimantan Utara juga telah menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indikator ini menjelaskan terkait sejauh mana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diterapkan di suatu daerah. Indeks SPBE memiliki tiga domain utama, yaitu domain kebijakan, domain tata kelola, dan domain layanan. Tiga domain ini menjadi kerangka dasar dalam mewujudkan integrasi bisnis, data dan informasi, hingga keamanan elektronik.

Tabel 2.72
Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021–2025

Indeks		
Tahun	**Nilai**	**Kategori**
2021	2,38	Cukup
2022	1,98	Kurang
2023	2,83	Baik
2024	3,79	Sangat Baik
2025	3,87	Sangat Baik

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2026

Indeks Maturitas SPBE Provinsi Kalimantan Utara mengalami kinerja fluktuatif dan cenderung naik. Indikator ini sempat menurun sebesar 0,40 poin pada tahun 2022, namun kembali meningkat drastis hingga tahun 2025 menjadi 3,87 dengan kategori Sangat Baik.

Bila ditelaah sampai ke kabupaten/kota, maka data tahun 2024 menunjukkan Kabupaten Malinau memiliki indeks SPBE lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya karena memiliki kinerja dengan kategori cukup. Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Bulungan memiliki predikat sangat baik dengan nilai Indeks Maturitas SPBE 3,93 dan berada di atas nilai Indeks Maturitas SPBE Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa digitalisasi pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara sudah optimal, namun masih menghadapi tantangan di level pemerintah kabupaten/kota terutama Kabupaten Malinau. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara, sarana dan prasarana TIK, dan sebagainya.

Tabel 2.73
Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota Tahun 2024

Nama Instansi	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	**3,79**	**Sangat Baik**
Pemerintah Kab. Bulungan	3,93	Sangat Baik
Pemerintah Kab. Malinau	2,45	Cukup
Pemerintah Kab. Nunukan	2,89	Baik
Pemerintah Kab. Tana Tidung	2,84	Baik
Pemerintah Kota Tarakan	3,11	Baik

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025

4.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur nilai investasi yang dilakukan dalam bentuk penambahan, perbaikan, atau penggantian aset tetap di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Aset tetap yang dimaksud mencakup barang-barang berumur panjang yang digunakan

dalam proses produksi, seperti bangunan, infrastruktur, mesin-mesin industri, kendaraan operasional, serta peralatan lainnya yang berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi ekonomi. PMTB menjadi salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, karena mencerminkan tingkat investasi yang dilakukan oleh sektor swasta maupun pemerintah dalam rangka memperkuat struktur ekonomi dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Semakin tinggi nilai PMTB, semakin besar pula potensi peningkatan produktivitas dan daya saing suatu daerah, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah data PMTB Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.74
Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Pembentukan Modal Tetap Bruto Utara (Miliar Rupiah)	31.788,17	33.825,73	38.317,21	41.862,70	44.275,2
Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto Utara (%)	28,50	24,39	26,01	28,48	28,38

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 12.487,03 miliar rupiah dari tahun 2021 hingga 2025. Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya investasi dalam berbagai sektor, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi peningkatan PMTB ini antara lain pertumbuhan investasi di sektor infrastruktur dan industri, yang didorong oleh proyek pembangunan jalan, pelabuhan, dan kawasan industri strategis. Ekspansi sektor pertambangan, perkebunan, dan energi juga menjadi pendorong utama, mengingat Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Selain itu, peningkatan investasi dari sektor swasta maupun pemerintah, baik dalam bentuk

pembangunan gedung, peralatan industri, maupun teknologi, turut berkontribusi terhadap kenaikan PMTB.

Faktor lain yang mempengaruhi peningkatan ini adalah kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong investasi dan kemudahan berusaha, termasuk insentif bagi investor serta pengembangan kawasan ekonomi khusus. Selain itu, peningkatan belanja modal dan proyek strategis nasional yang berfokus pada percepatan pembangunan di Kalimantan Utara turut mempercepat pertumbuhan investasi di wilayah ini. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, peningkatan PMTB di Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan.

2. Net Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor barang dan jasa merupakan selisih antara nilai total ekspor dan impor barang serta jasa yang terjadi dalam suatu negara atau wilayah selama periode tertentu. Indikator ini mencerminkan seberapa besar kontribusi perdagangan internasional terhadap perekonomian suatu daerah dan menjadi salah satu faktor utama dalam perhitungan produk domestik regional bruto (PDRB) dengan pendekatan pengeluaran.Net ekspor yang bernilai positif menunjukkan bahwa suatu negara atau wilayah memiliki surplus perdagangan, di mana nilai ekspor lebih besar dibandingkan impor, sehingga terjadi aliran devisa masuk yang dapat memperkuat perekonomian domestik. Sebaliknya, net ekspor yang bernilai negatif mengindikasikan defisit perdagangan, di mana impor lebih besar dari ekspor, yang dapat menyebabkan ketergantungan terhadap produk luar negeri dan berpotensi melemahkan neraca pembayaran. Dalam konteks pembangunan ekonomi, net ekspor barang dan jasa menjadi indikator penting dalam mengukur daya saing suatu negara di pasar global, ketahanan ekonomi terhadap perubahan perdagangan internasional, serta efektivitas kebijakan yang mendukung peningkatan ekspor dan pengelolaan impor secara berkelanjutan. Berikut adalah data tentang net ekspor barang dan jasa Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.75
Net Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Net Ekspor Barang dan Jasa (Miliar Rupiah)	54.466,19	77.749,15	78.586,66	71.852,01	76.815,09
Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa (%)	28,01	30,63	38,96	40,84	43,35

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2026

Net ekspor barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dengan kenaikan sebesar 22.348,90 miliar rupiah dari tahun 2021 hingga 2025. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan daya saing produk ekspor daerah serta meningkatnya kontribusi sektor perdagangan luar negeri terhadap perekonomian wilayah. Faktor utama yang mendorong peningkatan net ekspor ini antara lain pertumbuhan produksi dan ekspor komoditas unggulan, seperti hasil tambang, kelapa sawit, serta produk olahan kayu dan perikanan. Permintaan yang tinggi dari pasar internasional, terutama dari negara tujuan ekspor utama, turut berperan dalam peningkatan nilai ekspor daerah. Selain itu, pengembangan industri hilirisasi yang semakin pesat juga meningkatkan nilai tambah produk ekspor, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap neraca perdagangan daerah.

Selain faktor produksi dan industri, peningkatan infrastruktur pendukung ekspor, seperti pelabuhan, jalur transportasi, serta kawasan industri dan perdagangan, turut memperlancar arus barang ke pasar internasional. Kebijakan pemerintah dalam mendorong ekspor, seperti insentif perdagangan, perjanjian dagang, serta fasilitasi ekspor bagi pelaku usaha, juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan net ekspor.

3. Realisasi Investasi

Perkembangan realisasi investasi di Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang secara umum mengalami peningkatan signifikan, meskipun pada tahun terakhir terjadi

perlambatan. Total realisasi investasi gabungan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) meningkat tajam dari Rp5,74 triliun pada 2021 menjadi Rp32,14 triliun pada 2024, sebelum menurun menjadi Rp27,43 triliun pada 2025. Lonjakan investasi tersebut mencerminkan meningkatnya daya tarik Kalimantan Utara sebagai kawasan tujuan investasi, terutama seiring berkembangnya proyek strategis nasional, penguatan konektivitas wilayah, dan pengembangan kawasan industri berbasis sumber daya alam.

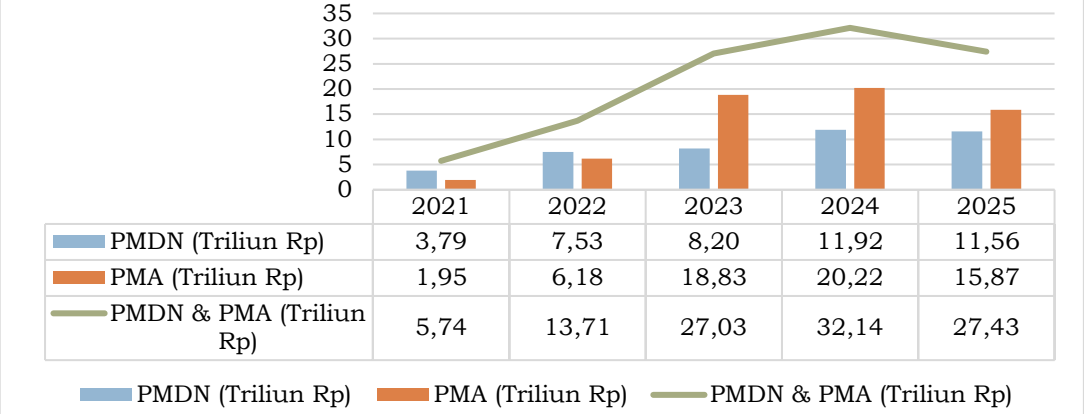
Dari sisi PMDN, realisasi investasi menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil dan konsisten. PMDN meningkat dari Rp3,79 triliun pada 2021 menjadi Rp11,92 triliun pada 2024, meskipun sedikit menurun menjadi Rp11,56 triliun pada 2025. Stabilnya PMDN menunjukkan bahwa kepercayaan pelaku usaha domestik terhadap prospek ekonomi Kalimantan Utara masih cukup kuat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengembangan infrastruktur, sektor perdagangan, industri pengolahan, dan sektor berbasis sumber daya lokal mulai memberikan dampak positif terhadap minat investasi domestik di daerah.

Sementara itu, perkembangan PMA menunjukkan pertumbuhan yang jauh lebih agresif dibanding PMDN. Realisasi PMA meningkat sangat signifikan dari Rp1,95 triliun pada 2021 menjadi Rp20,22 triliun pada 2024, sebelum turun menjadi Rp15,87 triliun pada 2025. Besarnya peningkatan PMA mengindikasikan bahwa Kalimantan Utara semakin dipandang sebagai wilayah strategis untuk investasi berskala besar, khususnya pada sektor industri, energi, dan pengolahan sumber daya alam. Namun demikian, penurunan PMA pada 2025 menunjukkan bahwa investasi asing masih cukup sensitif terhadap dinamika ekonomi global, kepastian usaha, dan perkembangan proyek investasi strategis.

Jika dibandingkan antara PMDN dan PMA, terlihat bahwa kontribusi PMA terhadap total investasi daerah menjadi semakin dominan sejak tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi Kalimantan Utara dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak ditopang oleh masuknya modal asing berskala besar. Meskipun kondisi tersebut memberikan dorongan kuat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, ketergantungan yang terlalu besar

terhadap PMA juga dapat menimbulkan kerentanan apabila terjadi perlambatan investasi global atau perubahan iklim investasi internasional. Oleh karena itu, penguatan investasi domestik tetap menjadi penting untuk menjaga stabilitas investasi daerah secara jangka panjang.

Gambar 2.64
Perkembangan Realisasi Investasi di Kalimantan Utara
Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
PMDN (Triliun Rp)	3,79	7,53	8,20	11,92	11,56
PMA (Triliun Rp)	1,95	6,18	18,83	20,22	15,87
PMDN & PMA (Triliun Rp)	5,74	13,71	27,03	32,14	27,43

Sumber: BKPM, 2026

Sebaran investasi di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 menunjukkan bahwa investasi daerah masih sangat dipengaruhi oleh beberapa negara utama dengan nilai investasi yang cukup dominan. Singapura menjadi negara asal investasi terbesar dengan realisasi mencapai Rp12,59 triliun, jauh melampaui negara lainnya, yang menunjukkan tingginya kepercayaan investor Singapura terhadap prospek ekonomi Kalimantan Utara. Posisi berikutnya ditempati oleh Malaysia sebesar Rp2,89 triliun, sedangkan investasi dari negara lain seperti Kepulauan Virgin Inggris, R.R. Tiongkok, dan Seychelles masih berada pada skala yang jauh lebih kecil. Dominasi investasi Singapura mengindikasikan bahwa struktur investasi asing di Kalimantan Utara masih cukup terkonsentrasi pada negara tertentu, sehingga diperlukan upaya diversifikasi sumber investasi untuk meningkatkan ketahanan dan stabilitas investasi daerah.

Dari sisi sektor usaha, investasi di Kalimantan Utara tahun 2025 didominasi oleh sektor Industri Logam Dasar dengan nilai mencapai

Rp12,53 triliun, yang menunjukkan bahwa arah investasi daerah sangat terkait dengan pengembangan industri berbasis hilirisasi sumber daya alam dan industri strategis. Selain itu, sektor aktivitas penyewaan dan sewa usaha tanpa hak opsi juga mencatat investasi cukup besar sebesar Rp6,34 triliun, diikuti sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin sebesar Rp2,07 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi di Kalimantan Utara mulai bergerak menuju penguatan sektor industri dan infrastruktur penunjang ekonomi skala besar.

Tabel 2.76
Top 5 Sebaran Investasi di Kalimantan Utara
Berdasarkan Negara dan Sektor Tahun 2025

No.	Investasi Berdasarkan Negara	Investasi Berdasarkan Sektor
1	Singapura (Rp12,59 T)	Industri Logam Dasar (Rp12,53 T)
2	Malaysia (2,89 T)	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Usaha Tanpa Hak Opsi (Rp6,34 T)
3	Kepulauan Virgin Inggris (Rp0,23 T)	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin (Rp2,07 T)
4	R.R. Tiongkok (Rp0,11 T)	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan, dan Kegiatan YBDI (Rp1,93 T)
5	Seychelles (Rp0,04 T)	Industri Kertas dan Barang dari Kertas (Rp1,36T)

Sumber: BKPM, 2026

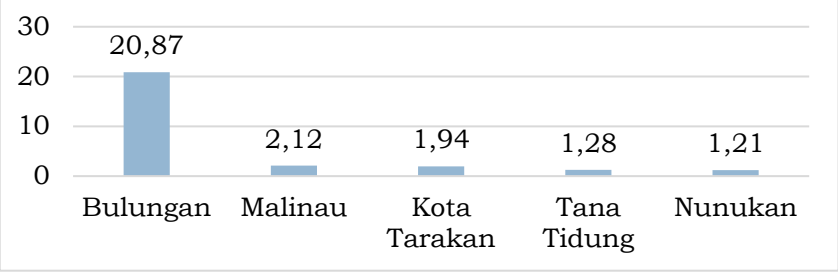
Di sisi lain, masuknya sektor pertanian, peternakan, dan kegiatan terkait ke dalam lima besar investasi menunjukkan bahwa sektor primer masih memiliki daya tarik ekonomi yang kuat di Kalimantan Utara. Sementara itu, investasi pada industri kertas dan barang dari kertas juga mengindikasikan mulai berkembangnya aktivitas pengolahan hasil sumber daya alam. Secara keseluruhan, pola investasi tersebut menggambarkan bahwa transformasi ekonomi Kalimantan Utara mulai mengarah pada pengembangan industri hilirisasi dan infrastruktur pendukung, namun tetap memerlukan penguatan tata kelola investasi, diversifikasi sektor ekonomi, dan peningkatan nilai tambah agar investasi yang masuk mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi daerah.

Data BKPM menunjukkan realisasi investasi di kabupaten/kota pada Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 menunjukkan adanya

konsentrasi investasi yang sangat dominan di wilayah tertentu. Kabupaten Bulungan menempati peringkat pertama dengan nilai realisasi investasi mencapai Rp20,87 triliun, jauh melampaui kabupaten/kota lainnya. Dominasi investasi di Bulungan menunjukkan kuatnya daya tarik wilayah tersebut sebagai pusat pengembangan industri, logistik, dan kawasan strategis ekonomi di Kalimantan Utara. Besarnya investasi di Bulungan juga mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek strategis di wilayah tersebut menjadi faktor utama yang mendorong masuknya modal investasi dalam skala besar.

Sementara itu, daerah lain masih menunjukkan nilai investasi yang relatif jauh lebih rendah. Kabupaten Malinau berada pada posisi kedua dengan realisasi investasi sebesar Rp2,12 triliun, diikuti Kota Tarakan sebesar Rp1,94 triliun, Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp1,28 triliun, dan Kabupaten Nunukan sebesar Rp1,21 triliun. Kesenjangan nilai investasi antarwilayah tersebut menunjukkan bahwa distribusi investasi di Kalimantan Utara masih belum merata dan masih terpusat pada wilayah yang memiliki infrastruktur, aksesibilitas, dan kawasan pengembangan ekonomi yang lebih kuat.

Gambar 2.65
Peringkat Realisasi Investasi (Rp Triliun) Kabupaten/Kota
Tahun 2025



Sumber: BKPM, 2026

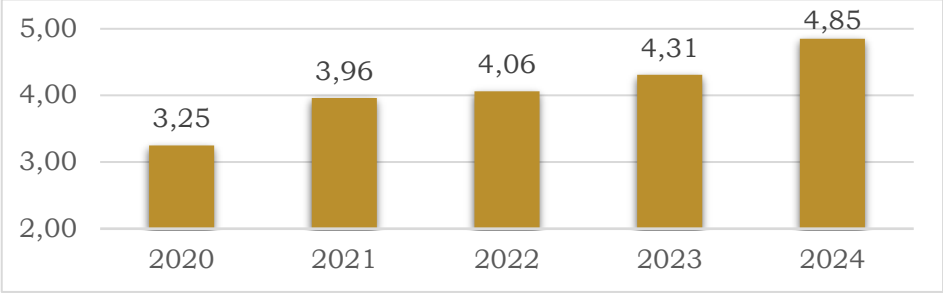
4.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Indeks Layanan Infrastruktur

Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi merujuk kepada kondisi terwujudnya integrasi antara kawasan perkotaan

dengan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kondisi ini memerlukan prasyarat berupa ketersediaan infrastruktur wilayah yang andal dan merata. Kualitas infrastruktur daerah di Provinsi Kalimantan Utara dapat diindikasikan melalui data indeks layanan infrastruktur. Indeks layanan infrastruktur menggambarkan kinerja penyediaan dan pembangunan infrastruktur yang mencakup ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, infrastruktur layanan dasar permukiman, dan kelistrikan.

Gambar 2.66
Indeks Layanan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024



Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Indeks layanan infrastruktur di Kalimantan Utara mengalami peningkatan selama tahun 2020-2024, dimana pada tahun 2020 yaitu hanya sebesar 3,25 dan mencapai nilai 4,85 pada tahun 2024. Capaian ini diperoleh berdasarkan komponen perhitungan indeks layanan infrastruktur antara lain persentase jalan kondisi baik, persentase panjang jalan per jumlah kendaraan, persentase layanan air minum, dan rasio elektrifikasi.

2. Kondisi Jalan

Total panjang jalan kewenangan provinsi cenderung stagnan selama periode 2021-2024, yakni mencapai 851,88 km. Jika dilihat berdasarkan kondisi, sekitar 83,17 persen kondisi jalan kewenangan provinsi termasuk dalam kategori rusak berat pada tahun 2024. Selanjutnya pada tahun 2025 tingkat kemantapan jalan Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan dari 15,692% menjadi 47,666%, karena ada perubahan SK Jalan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan SK No. 100.3.3.1/544/2025, dengan

panjang keseluruhan jalan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara berubah dari 851,877 km menjadi 266,013 km. Beberapa ruas jalan yang mengalami perubahan status menjadi jalan Nasional (upgrade), yaitu ruas jalan Pahlawan dan Aji Iskandar Kota Tarakan, serta perubahan status menjadi jalan Kabupaten/Kota (downgrade), yaitu ruas jalan Amal Lama Kota Tarakan, Amal Baru Kota Tarakan, dan Ring Road Malinau: Simpang Sempayan-Simpang Batu Kajang. (Data kemantapan merupakan data sementara, karena Data Dasar Prasarana Provinsi Kalimantan Utara TA 2025 masih menunggu hasil verifikasi dari Kementerian PU).

Dari tabel diatas diketahui bahwa panjang jalan provinsi dengan kondisi baik pada tahun 2025 yaitu sebesar 115,349 km dan kondisi sedang sebesar 11,450 km. Jika dibandingkan dengan total panjang ruas jalan seluruhnya (266,013 km) maka diperoleh nilai untuk jalan mantap yaitu sebesar 47.67%.

Hambatan yang dalam pencapaian kinerja indikator antara lain:

a. Keterbatasan ruang fiskal dan ketergantungan pada DAK sehingga volume pekerjaan fisik masih terbatas. Masih banyaknya ruas jalan provinsi dalam kondisi tanah atau belum terbuka yang menjadi beban kemantapan jalan, dimana untuk jalan dengan jenis permukaan tanah ini masuk dalam kategori rusak berat. Untuk meningkatkan statusnya menjadi kondisi mantap diperlukan penganggaran yang sangat besar.
b. Kondisi geografis, cuaca ekstrem, dan akses ke wilayah perbatasan yang menyulitkan pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan rutin tepat waktu.

Tabel 2.77
Kondisi Jalan Kewenangan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021-2025

Kondisi Jalan	2021		2022		2023		2024		2025	
	km	%	km	%	km	%	km	%	km	%
Baik	119,86	14,07	110,27	12,94	116,65	13,69	124,99	14,67	115,349	43,31
Sedang	7,63	0,90	10,26	1,20	11,66	1,37	11,66	1,37	11,45	4,30
Rusak	5,3	0,62	6,28	0,74	6,69	0,79	6,69	0,79	1,1	0,41
Rusak Berat	719,08	84,41	725,07	85,11	716,89	84,15	708,54	83,17	138,414	51,97
Total	851,88	100,00	851,88	100,00	851,88	100,00	851,88	100,00	266,313	100,00

Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2026

Kondisi jenis permukaan jalan belum mengalami peningkatan yang signifikan selama kurun waktu 2021-2024. Hal ini terlihat dali proporsi jalan dengan permukaan tanah yang mencapai lebih dari 70 persen selama 2021-2024. Selanjutnya berdasarkan perubahan SK Jalan Provinsi Kalimantan Utara, dijelaskan bahwa pada tahun 2025 panjang keseluruhan jalan di Provinsi Kalimantan Utara yaitu sepanjang 266,01 km, dengan jenis permukaan aspal yaitu sepanjang 117,28 km atau 44,09 persen, beton 12,04 km atau 4,53 persen, kerikil 16,72 km atau 6,29 persen dan tanah 119,97 km atau 45,10 persen.

Tabel 2.78
Jenis Permukaan Jalan Kewenangan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2025

Jenis Permukaan	2021		2022		2023		2024		2025	
	km	%	Km	%	km	%	km	%	km	%
Aspal	107,89	12,66	116,95	13,73	133,57	15,68	138,67	16,28	117,28	44,09
Beton	10,66	1,25	11,54	1,35	11,51	1,35	11,46	1,35	12,04	4,53
Kerikil	84,36	9,90	84,14	9,88	77,39	9,08	62,61	7,35	16,72	6,29
Tanah	648,97	76,18	639,25	75,04	629,41	73,88	639,14	75,03	119,97	45,10
Total	**851,88**	**100,00**	**851,88**	**100,00**	**851,88**	**100,00**	**851,88**	**100,00**	**266,01**	**100,00**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2025 dan Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2026

3. Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Minum Layak

Persentase rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara yang telah menggunakan sumber air minum bersih mencapai 84,84 persen. Air bersih yang dimaksud di sini yaitu yang berasal dari ledeng, air kemasan, pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) lebih dari 10 meter. Sementara itu, akses air minum layak yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/ cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Persentase rumah tangga yang mempunyai akses air minum layak sebesar 91,59 persen.

Tabel 2.79
Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Minum Layak di Provinsi Kalimantan Utara (%) Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Sumber Air Minum Bersih	Sumber Air Minum Layak
Malinau	82,87	85,46
Bulungan	80,08	77,15
Tana Tidung	89,71	90,93
Nunukan	76,34	93,96
Tarakan	94,01	99,10
Kalimantan Utara	**84,84**	**91,59**

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2025

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih tertinggi adalah Kota Tarakan, mencapai 94,01 persen, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Nunukan, hanya 76,34 persen. Untuk akses terhadap air minum layak, hampir seluruh rumah tangga (99,10 persen) di Kota Tarakan telah memiliki akses terhadap air minum layak. Namun Kabupaten Bulungan masih perlu perhatian khusus dari pemerintah agar air minum layak dapat diakses oleh lebih banyak rumah tangga lagi.

4. Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Fasilitas Buang Air Besar

Untuk sarana sanitasi, 94,15 persen rumah tangga telah memiliki fasilitas buang air untuk digunakan anggota rumah tangga sendiri. Kepemilikan jamban sendiri sangat penting dalam suatu rumah tangga terkait dengan kebersihan dan pencegahan penyakit yang banyak bersumber dari kotoran manusia. Walaupun demikian, masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar, sekitar 1,51 persen. Kabupaten dengan persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar tertinggi adalah Kabupaten Nunukan.

Tabel 2.80
Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Fasilitas Buang Air Besar di Provinsi Kalimantan Utara (%) Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Ada di Gunakan hanya ART sendiri	Ada, digunakan bersama atau umum	Tidak Ada/ Tidak Diguna kan
Malinau	93,49	5,81	NA
Bulungan	95,90	1,87	1,91
Tana Tidung	97,62	2,22	NA
Nunukan	91,08	4,66	3,69
Tarakan	95,46	4,30	NA
Kalimantan Utara	**94,15**	**4,12**	**1,51**

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2025

Dari 98,27 persen rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar dengan penggunaan sendiri, bersama atau umum, 95,57 persen menggunakan jenis kloset leher angsa. Namun masih ada sekitar 1,38 persen rumah tangga menggunakan jenis kloset plengsengan, dan 3,05 persen menggunakan jenis kloset cemplung/cubluk. Hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Malinau, Bulungan dan Tana Tidung telah menggunakan jenis kloset leher angsa dengan persentase diatas 99 persen. Sedangkan di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan masing-masing baru 92,20 persen dan 94,44 persen yang menggunakan kloset jenis leher angsa, sisanya masih menggunakan kloset jenis plengsengan dan cemplung.

Berdasarkan tempat pembuangan akhir tinja tahun 2025, 81,20 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara menggunakan tengki septik, 11,17 dibuang ke lubang tanah, 6,84 persen dibuang ke

kolam/sawah/Sungai/danau/ laut, dan 0,62 persen menggunakan IPAL. Kabupaten/kota dengan persentase rumah tangga yang menggunakan tengki septik tertinggi adalah Kabupaten Bulungan sebesar 94,66 persen, sedangkan yang terkecil adalah Kabupaten Malinau hanya 58,03 persen, dimana 38,16 persen rumah tangga di Kabupaten Malinau menggunakan lubang tanah sebagai tempat pembuangan akhir tinja.

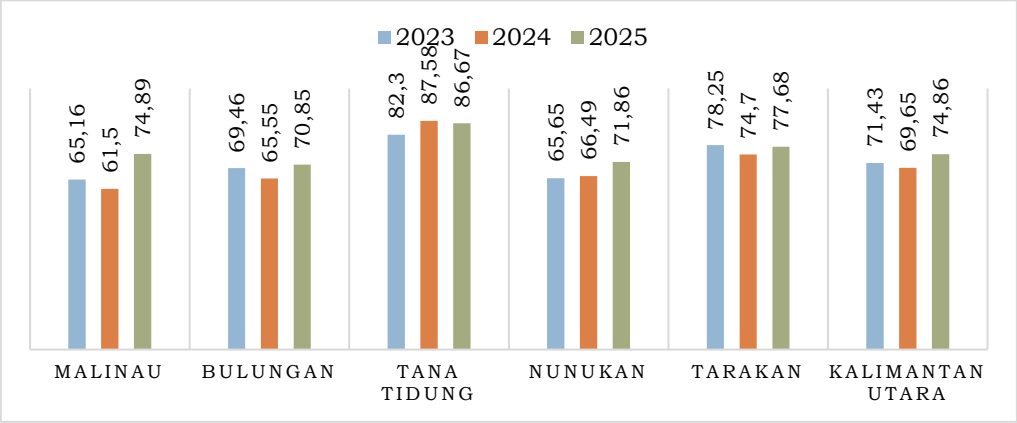
5. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

Perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2023–2025 menunjukkan tren yang secara umum mengalami perbaikan pada tahun 2025 setelah sempat menurun pada tahun 2024. Capaian meningkat dari 71,43 persen pada 2023 menjadi 74,86 persen pada 2025, yang menunjukkan adanya peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang lebih layak.

Bila ditelaah pada tingkat kabupaten/kota, maka Kabupaten Tana Tidung secara konsisten mencatat capaian tertinggi dibanding kabupaten/kota lain, yaitu sebesar 82,30 persen pada 2023, meningkat menjadi 87,58 persen pada 2024, dan tetap tinggi pada 86,67 persen tahun 2025. Sebaliknya, Kabupaten Malinau dan Nunukan masih memiliki tingkat akses hunian layak yang relatif lebih rendah dibanding wilayah lainnya, meskipun mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2025.

Peningkatan akses hunian layak tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan perumahan dan infrastruktur permukiman di Kalimantan Utara mulai menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang lebih memadai. Namun demikian, masih adanya kesenjangan antar kabupaten/kota menunjukkan bahwa pemerataan akses hunian layak belum sepenuhnya tercapai, khususnya di wilayah perbatasan dan pedalaman yang menghadapi tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur dasar, dan biaya pembangunan yang relatif tinggi.

Gambar 2.67
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Tahun 2023-2025



Sumber: BPS Kalimantan Utara, 2026

6. Persentase Desa Mandiri

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Alat ukur yang digunakan dalam mengukur pembangunan desa di Indonesia selama beberapa tahun terakhir adalah Indeks Desa Membangun (IDM). Namun sejak tahun 2025, IDM digantikan dengan Indeks Desa (ID). Indeks Desa adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran yang berkelanjutan. Desa Mandiri merupakan komponen penentu dalam penghitungan Indeks Desa. Desa Mandiri adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Selain kategori Desa Mandiri, pada pengitungan IDM terdapat kriteria desa yang lain, yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, dan Desa Maju.

Perkembangan status desa di Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan arah yang sangat positif menuju peningkatan kemandirian desa. Hal ini terlihat dari semakin berkurangnya jumlah desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal, serta meningkatnya jumlah desa maju dan mandiri dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021

masih terdapat 6 desa sangat tertinggal dan 194 desa tertinggal, namun pada tahun 2025 seluruh desa sangat tertinggal berhasil dihapus dan desa tertinggal turun drastis menjadi 60 desa. Sebaliknya, jumlah desa maju meningkat dari 47 desa pada 2021 menjadi 82 desa pada 2025, sementara desa mandiri meningkat signifikan dari 31 desa menjadi 77 desa. Kondisi ini menunjukkan adanya transformasi pembangunan desa yang semakin progresif dan merata di Kalimantan Utara.

Secara persentase, struktur status desa di Kalimantan Utara juga mengalami perubahan yang cukup signifikan menuju kategori yang lebih maju. Proporsi desa berkembang memang masih mendominasi pada tahun 2025 sebesar sekitar 51,01 persen, namun persentase desa mandiri meningkat tajam dari 6,94 persen pada 2021 menjadi 17,23 persen pada 2025, sementara desa maju meningkat dari 10,51 persen menjadi 18,34 persen. Sebaliknya, proporsi desa tertinggal turun drastis dari 43,40 persen menjadi 13,42 persen. Pergeseran ini menunjukkan bahwa pembangunan desa di Kalimantan Utara bergerak menuju peningkatan kapasitas ekonomi, sosial, dan tata kelola desa yang lebih baik.

Jika dibandingkan antar kabupaten, Kabupaten Malinau menunjukkan perkembangan yang sangat baik dalam peningkatan desa mandiri dan maju. Desa mandiri meningkat dari 13 desa pada 2021 menjadi 29 desa pada 2025, sementara desa tertinggal berhasil ditekan dari 31 desa menjadi nol desa. Kabupaten Bulungan juga memperlihatkan perkembangan yang konsisten, dengan desa mandiri meningkat dari 7 menjadi 13 desa dan desa maju dari 10 menjadi 22 desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan penguatan ekonomi desa mulai memberikan dampak nyata terhadap peningkatan status desa di kedua wilayah tersebut.

Di sisi lain, Kabupaten Nunukan masih menjadi wilayah dengan tantangan terbesar dalam pembangunan desa, meskipun juga mengalami perbaikan signifikan. Kabupaten ini memiliki jumlah desa tertinggal paling tinggi sepanjang periode pengamatan, yaitu 161 desa pada 2021, meskipun berhasil turun menjadi 60 desa pada 2025. Desa berkembang meningkat cukup besar dari 45 desa menjadi 135 desa, namun jumlah desa maju

justru berfluktuasi dan menurun pada 2025 menjadi 13 desa setelah sempat mencapai 20 desa pada 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses peningkatan status desa di wilayah perbatasan dan pedalaman Nunukan masih menghadapi tantangan struktural, terutama terkait aksesibilitas, pelayanan dasar, dan pemerataan pembangunan wilayah.

Kabupaten Tana Tidung menunjukkan perkembangan yang relatif stabil dengan dominasi desa berkembang dan peningkatan bertahap desa maju serta mandiri. Desa mandiri meningkat dari 1 desa pada 2021 menjadi 11 desa pada 2025, sedangkan desa tertinggal berhasil dihapus sejak tahun 2022. Meskipun jumlah desa di kabupaten ini relatif lebih sedikit dibanding daerah lain, tren peningkatan status desa menunjukkan bahwa penguatan pelayanan dasar dan pembangunan ekonomi lokal mulai berjalan efektif. Kondisi ini mencerminkan bahwa wilayah dengan jumlah desa lebih kecil memiliki peluang lebih cepat dalam mendorong transformasi status desa apabila didukung intervensi pembangunan yang terarah.

Tabel 2.81
Perkembangan Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa di Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018-2024 dan Indeks Desa (ID) Tahun 2025

NO	KABUPATEN	SANGAT TERTINGGAL					TERTINGGAL					BERKEMBANG					MAJU					MANDIRI				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	BULUNGAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	56	50	45	42	39	10	15	18	21	22	7	9	11	11	13
2	MALINAU	0	0	0	0	0	31	20	16	6	0	51	56	53	52	49	14	18	18	24	31	13	15	22	27	29
3	NUNUKAN	6	2	0	0	0	161	120	80	49	60	45	82	121	140	135	10	17	13	20	13	10	11	18	23	24
4	TANA TIDUNG	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	17	13	7	7	5	13	15	18	14	16	1	4	7	11	11
JUMLAH		**6**	**2**	**0**	**0**	**0**	**194**	**140**	**96**	**55**	**60**	**169**	**201**	**226**	**241**	**228**	**47**	**65**	**67**	**79**	**82**	**31**	**39**	**58**	**72**	**77**
PERSENTASE (%)		**1,34**	**0,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,40**	**31,32**	**21,48**	**12,30**	**13,42**	**37,81**	**44,97**	**50,56**	**53,91**	**51,01**	**10,51**	**14,54**	**14,99**	**17,67**	**18,34**	**6,94**	**8,72**	**12,98**	**16,11**	**17,23**

Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2026

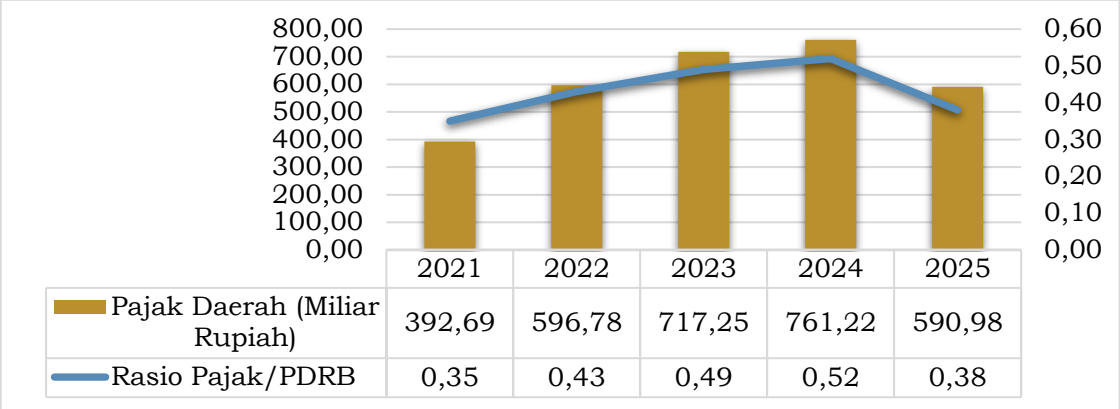
4.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Bagian ini menjelaskan kondisi tentang stabilitas ekonomi makro yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan. Penjelasan ini dilengkapi dengan indikator Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB dan tingkat inflasi.

1. Rasio Pajak terhadap PDRB

Rasio pajak terhadap PDRB menggambarkan seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB di daerah. Rasio pajak terhadap PDRB yang semakin tinggi menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerah melalui APBD semakin baik.

Gambar 2.68
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025 (%)



	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Daerah (Miliar Rupiah)	392,69	596,78	717,25	761,22	590,98
Rasio Pajak/PDRB	0,35	0,43	0,49	0,52	0,38

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Kalimantan Utara dan dan Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2026

Penerimaan pajak daerah Provinsi Kalimantan Utara terus menunjukkan kenaikan selama periode 2021-2024. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan rasio pajak daerah terhadap PDRB semakin meningkat beriringan dengan perekonomian daerah yang semakin menguat. Rasio pajak daerah terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan sebesar 0,17 poin selama periode 2021-2024. Kenaikan tertinggi tercapai pada tahun 2022 dimana pajak daerah

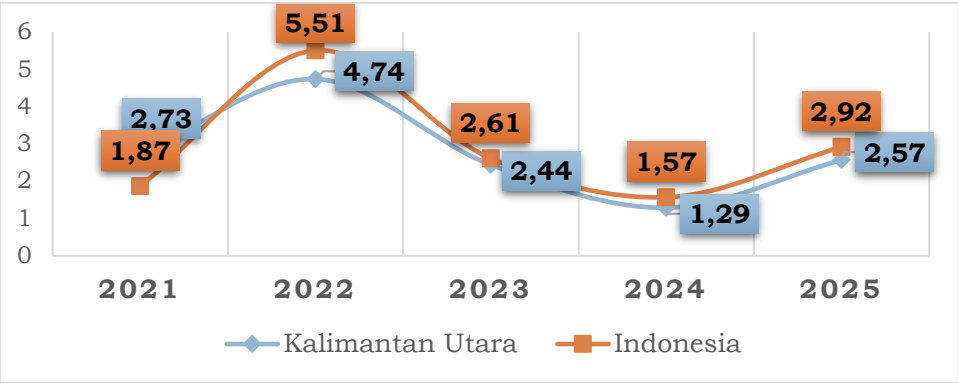
mengalami kenaikan hingga 204,09 miliar rupiah dan mendorong kenaikan rasio pajak sebesar 0,08 poin. Namun demikian, terjadi penurunan Penerimaan pajak daerah pada tahun 2025 menjadi hanya 590,98 miliar rupiah atau turun sebesar 170,24 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2024. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap pertumbuhan rasio pajak daerah terhadap PDRB yang mengalami penurunan menjadi 0,38.

2. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro daerah yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus. Indikator yang digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah ini diukur secara periodik dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang didapatkan melalui survei biaya hidup (SBH) di sejumlah daerah.

Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Utara merupakan gabungan dari inflasi di Kota Tarakan dan Tanjung Selor dan sejak tahun 2024 ditambah dengan Nunukan. Secara umum, tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Utara selama 5 (lima) tahun terakhir sejalan dengan pergerakan inflasi di tingkat nasional. Pada tahun 2021-2023, inflasi di Provinsi Kalimantan Utara masih bergerak di kisaran sasaran inflasi nasional tetapi pada tahun 2024 pergerakan harga semakin melemah dengan tingkat inflasi sebesar 1,29 persen. Selanjutnya, inflasi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 mengalami peningkatan dengan tingkat inflasi sebesar 2,57 persen. Peningkatan ini selaras dengan peningkatan inflasi di tingkat nasional yakni 2,92. Pada tahun 2025, terdapat 10 komoditas yang paling dominan memberikan andil/sumbangan inflasi di Kalimantan Utara yaitu emas perhiasan, tarif air minum PAM, tarik rumah sakit, ikan bandeng, beras, daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, nasi dengan lauk, telur ayam ras, dan bawang merah.

Gambar 2.69
Inflasi Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia
Tahun 2021-2025



Sumber: BPS RI, 2026

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Aspek ini menjelaskan tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Adapun indikator yang digunakan dalam menggambarkan kinerja aspek pelayanan umum, antara lain adalah Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai SAKIP, Indeks Maturitas SPBE, dan Indeks Pelayanan Publik. Secara lebih mendalam, capaian tiap indikator yang diraih oleh Provinsi Kalimantan Utara akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator paling makro yang memberikan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja birokrasi di suatu instansi pemerintah. Pemenuhan indikator ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan *good governance,* di mana suatu pemerintah daerah dapat mencapai tingkat integritas dan kinerja yang tinggi. Semakin tinggi Indeks Reformasi Birokrasi, maka kinerja pemerintah daerah dianggap semakin efektif, efisien, serta bebas KKN. Berikut ini merupakan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.82
Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021-2025

Indeks Reformasi	
Tahun	**Nilai**
2021	B
2022	B
2023	BB
2024	A
2025	80,3 (A)

Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2026

Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan setiap tahun, dengan tahun 2025 mencapai 80,3 (A). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan reformasi birokrasi di Provinsi Kalimantan Utara sudah berjalan optimal. Kondisi ini disebabkan oleh adanya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan guna memastikan kinerja yang bertanggung jawab untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat akuntabilitas suatu pemerintah daerah adalah Nilai SAKIP. Indikator ini meninjau empat aspek utama dalam tata kelola pemerintahan, yakni perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi. Semakin tinggi nilai SAKIP, maka semakin selaras antara apa yang direncanakan dan apa yang direalisasikan dalam bentuk capaian yang bertanggung jawab. Adapun capaian Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.83
Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025

Nilai SAKIP		
Tahun	**Nilai**	**Predikat**
2021	72,13	BB
2022	73,08	BB
2023	73,41	BB
2024	71,05	BB
2025	71,42	BB

Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2026

Secara umum, capaian nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Utara meningkat selama beberapa tahun terakhir, walaupun pada tahun 2024 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar 71,42 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

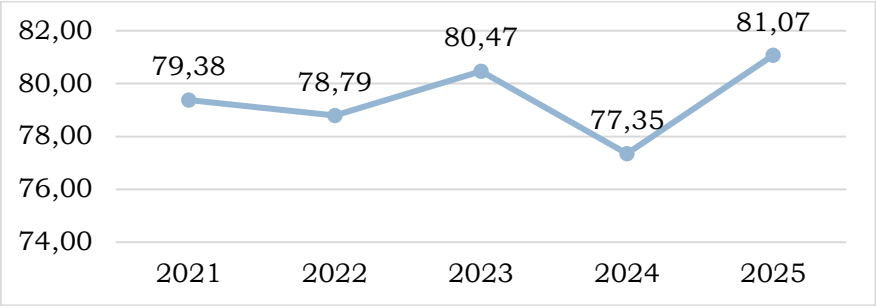
1. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia merupakan pengukuran pembangunan politik dari dua sisi yaitu sisi pemerintah dan sisi masyarakat. Perhitungan IDI menggunakan metode terbaru mencakup tiga ranah, yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Tiga aspek IDI memiliki perwakilan indikator berkaitan dengan aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi. Semenjak tahun 2021, perhitungan IDP menggunakan metode baru dengan mengombinasikan perhitungan kuantitatif dan kualitatif.

Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun secara umum berada pada kategori yang relatif baik. Nilai IDI tercatat sebesar 79,38 pada tahun 2021, kemudian sedikit menurun menjadi 78,79 pada tahun 2022, sebelum meningkat menjadi 80,47 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 77,35, yang menunjukkan adanya penurunan kualitas indikator demokrasi pada periode tersebut. Namun demikian, pada tahun 2025 IDI kembali meningkat secara tajam menjadi 81,07, yang merupakan capaian tertinggi selama periode pengamatan. Adapun kinerja demokrasi di Provinsi

Kalimantan Utara pada periode tahun 2021 sampai 2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.70
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, 2026

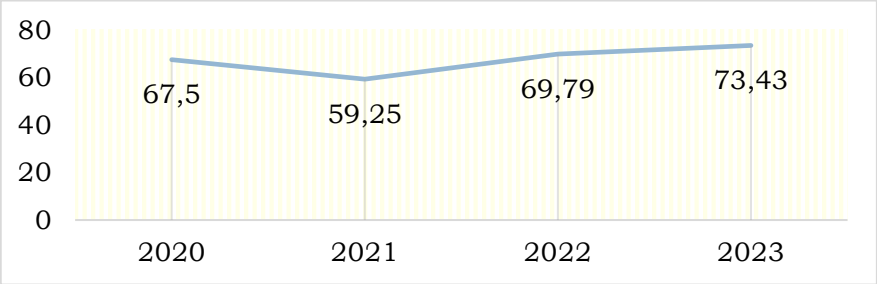
Fluktuasi nilai IDI tersebut mengindikasikan bahwa kualitas demokrasi di Kalimantan Utara masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan sipil, hak politik, dan kelembagaan demokrasi. Penurunan pada tahun 2024 dapat mencerminkan adanya dinamika sosial politik atau penurunan pada aspek tertentu dalam indikator demokrasi, sementara peningkatan signifikan pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola demokrasi dan partisipasi masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa sistem demokrasi di daerah masih bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual.

2. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman atau IRA merupakan indikator rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Rasa Aman menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 30 Ayat 1 mendefinisikan rasa aman sebagai suatu hak yang diterima secara pribadi oleh manusia atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Indeks rasa aman digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dirasakan masyarakat dalam suatu wilayah.

Indeks rasa aman Provinsi Kalimantan Utara mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung naik. Penurunan kineja IRA terjadi pada tahun 2021, sebesar 8,25 poin. Akan tetapi, pada tahun 2022 hingga 2023 mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat rasa aman semakin baik. Adapun Indeks rasa aman Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.71
Indeks Rasa Aman Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2020-2023

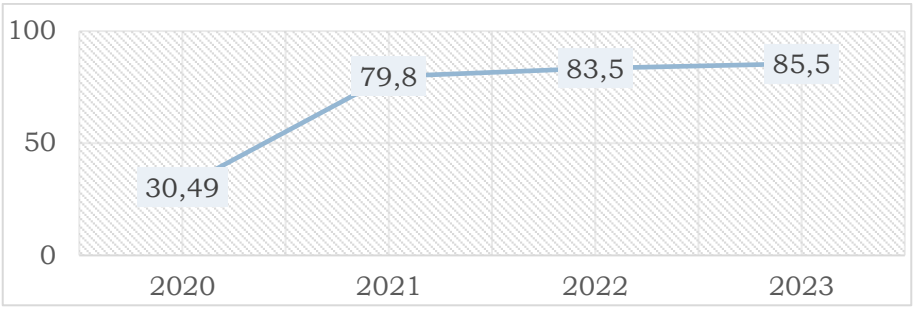


Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2024

3. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum atau IKKU merupakan instrumen dari implementasi penegakan Perda dan Perkada dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (tibumtranmas). Pada IKKU Provinsi Kalimantan Utara menggunakan tindak kejahatan yang dilaporkan bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi. Data tersebut menggambarkan situasi keamanan daerah/wilayah tersebut melalui pencatatan kejadian kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat.

Gambar 2.72
Indeks Ketentraman dan Ketertiban



Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2024

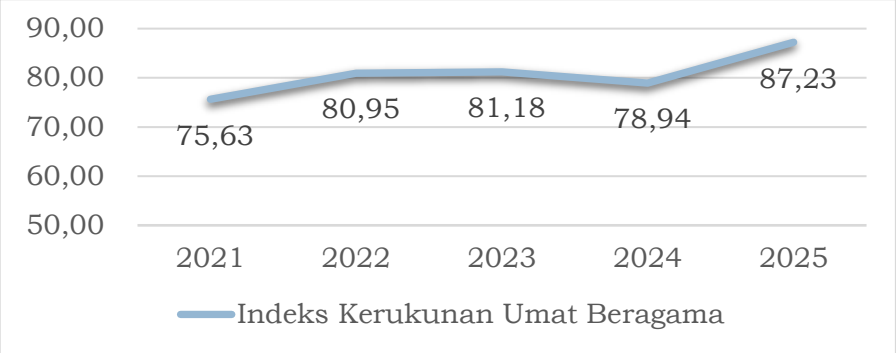
Data indeks ketentraman dan ketertiban pada tahun 2020 hingga 2023, indeks ketentraman dan ketertiban mengalami peningkatan secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondusifitas daerah semakin baik.

4. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks kerukunan umat beragama yang diatur berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 yaitu instrumen atau alat pengukuran bagi capaian program kerukunan yang berlandaskan pada toleransi, kesetaraan, dan kebagian. Data indeks kerukunan umat beragama dilakukan melalui survei oleh Puslitbang Bimas, Diklat Kementerian Agama, dan instansi terkait. Skor indeks kerukunan umat beragama berada pada rentang 0 hingga 100, yang semakin tinggi nilainya menunjukkan kerukunan umat beragama pada wilayah yang diteliti sangat tinggi.

Indeks KUB selama periode 2021-2025 menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung meningkat, dengan capaian tertinggi yaitu pada tahun 2025 yang mencapai 87,23. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama perlu diperhatikan karena dapat berpotensi mengganggu stabilitas wilayah. Penurun ini disebabkan oleh adanya penurunan nilai pada seluruh dimensi, yaitu dimensi toleransi, kerja sama, dan kesetaraan.

Gambar 2.73
Indeks Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Dimensi
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025



Sumber: Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2026

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

a. Indeks Daya Saing Daerah

Menjelaskan tentang ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antarnegara yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan. Narasi mengenai sub bagian ini direpresentasikan melalui Indeks Daya Saing Daerah.

Indeks Daya Saing Daerah atau IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing yang merepresentasikan tingkat produktivitas pada provinsi dan kabupaten/kota. Konsep IDSD menggabungkan level makro pada institusi publik dengan level mikro pada perusahaan/industri. Penggabungan perspektif makro-mikro memiliki tiga faktor daya saing, yaitu faktor ketersediaan kebutuhan fundamental *(basic requirement factors),* faktor penguat efisiensi *(efficiency enhancers),* dan faktor inovasi dan kecanggihan (*innovation* and *shopistication factors*). Faktor daya saing tersebut dimasukkan pada 12 pilar Indeks Daya Saing Daerah. 12 pilar tersebut dielaborasikan oleh pengukuran IDSD, yaitu lingkungan pendukung (institusi, infrastruktur, adopsi TK, dan stabilitas ekonomi makro), sumber daya manusia (kesehatan dan keterampilan), pasar (pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar), dan ekosistem inovasi (dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi). Pengukuran IDSD distandarisasi dengan rentang skor 0 hingga 5 pada seluruh indikator.

Capaian IDSD Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2022–2025 menunjukkan tren peningkatan yang relatif moderat namun stabil. Nilai indeks meningkat dari 3,19 pada tahun 2022 menjadi 3,26 pada 2023 dan 2024, kemudian kembali meningkat menjadi 3,29 pada tahun 2025. Perkembangan ini menunjukkan bahwa upaya penguatan fondasi daya saing daerah berjalan secara bertahap, terutama melalui peningkatan kualitas lingkungan usaha, kapasitas sumber daya manusia, dan

penguatan pasar regional, meskipun masih terdapat beberapa pilar yang mengalami fluktuasi kinerja.

Dilihat berdasarkan pilar pembentuknya, peningkatan daya saing Kalimantan Utara terutama didorong oleh pilar infrastruktur dan adopsi teknologi (Pilar 4) yang meningkat secara konsisten dari 3,22 (2022) menjadi 4,40 pada 2025, menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan konektivitas dan transformasi digital daerah. Selain itu, pilar stabilitas ekonomi makro dan pasar produk (Pilar 5 dan Pilar 6) juga relatif stabil pada kisaran nilai tinggi, menandakan semakin kuatnya aktivitas ekonomi daerah. Namun demikian, beberapa pilar masih menjadi tantangan, khususnya pilar ekosistem inovasi dan kapasitas riset (Pilar 7, 11, dan 12) yang nilainya masih relatif rendah dan berfluktuasi, mencerminkan keterbatasan inovasi daerah, kolaborasi riset, serta hilirisasi pengetahuan menjadi nilai ekonomi.

Tabel 2.84
Indeks Daya Saing Daerah Kalimantan Utara Tahun 2022-2025

Provinsi	Lingkungan Pendukung				SDM				Pasar		Ekosistem Inovasi		Skor
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	IDSD
Tahun 2022													
Nasional	4,14	2,91	3,57	3,05	3,76	3,73	2,68	3,73	2,66	1,31	5,00	2,61	**3,26**
Kalimantan Utara	4,46	2,95	3,89	3,22	4,00	3,90	1,81	4,71	2,74	0,30	5,00	1,25	**3,19**
Tahun 2023													
Nasional	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,01	**3,44**
Kalimantan Utara	4,55	1,94	3,98	3,79	3,97	3,92	1,81	4,53	1,54	4,06	3,30	1,81	**3,26**
Tahun 2024													
Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	**3,43**
Kalimantan Utara	4,36	2,53	3,58	4,32	3,98	4,10	1,65	3,51	2,65	4,13	2,18	2,15	**3,26**
Tahun 2025													
Nasional	4,30	3,37	3,68	4,02	3,79	3,67	2,55	2,96	2,90	4,38	2,79	3,54	**3,50**
Kalimantan Utara	4,30	2,91	3,71	4,40	3,98	3,81	1,78	3,14	2,71	4,16	2,07	2,50	**3,29**

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2026
Keterangan:

Pilar 1	Institusi	Pilar 7	Pasar Produk
Pilar 2	Infrastruktur	Pilar 8	Pasar Tenaga Kerja
Pilar 3	Adopsi TIK	Pilar 9	Sistem Keuangan
Pilar 4	Stabilitas Ekonomi Makro	Pilar 10	Ukuran Pasar
Pilar 5	Kesehatan	Pilar 11	Dinamisme Bisnis
Pilar 6	Keterampilan	Pilar 12	Kapabilitas Inovasi

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, indeks daya saing Kalimantan Utara masih berada sedikit di bawah rata-rata nasional pada periode tersebut. Pada tahun 2025, IDSD nasional mencapai 3,50, sementara Kalimantan Utara berada pada 3,29. Kondisi ini menunjukkan adanya gap daya saing yang masih perlu diperkecil. Perbedaan ini terutama dipengaruhi oleh rendahnya kinerja pada pilar inovasi, kesiapan teknologi lanjutan, dan penguatan kelembagaan ekonomi berbasis pengetahuan. Oleh karena itu, peningkatan daya saing Kalimantan Utara ke depan perlu diarahkan pada penguatan ekosistem inovasi daerah, peningkatan kualitas SDM berbasis keterampilan masa depan, serta percepatan transformasi ekonomi menuju sektor bernilai tambah tinggi agar posisi daya saing daerah semakin mendekati bahkan melampaui capaian nasional.

Selanjutnya, capaian skor IDSD kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara juga menunjukkan tren peningkatan selama tahun 2022 hingga 2025. Capaian tertinggi tahun 2025 diperoleh Kota Tarakan yakni sebesar 3,87, bahkan capaian ini telah melampaui skor IDSD Provinsi Kalimantan Utara. Pencapaian skor IDSD yang cukup baik di tingkat kabupaten/kota ini mengindikasikan adanya tren positif dalam tingkat produktivitas daerah. Hal ini mencerminkan bahwa daerah memiliki kapasitas yang semakin kuat dalam mengelola potensi sumber daya, memperbaiki kualitas infrastruktur, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta memperkuat tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah.

Tabel 2.85
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten /Kota
di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2025

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
Malinau	2,59	2,8	3,06	3,15
Bulungan	2,87	3,23	3,53	3,65
Tana Tidung	-	2,76	3,03	3,12
Nunukan	2,86	2,82	3,28	3,32
Kota Tarakan	3,41	3,49	3,81	3,87

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2026

2.1.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.1.5.1 Penerapan SPM Tahun 2023

1. Bidang Pendidikan

Capaian pelaksanaan penerapan SPM bidang urusan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.86
Pencapaian Target SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	ELEMEN DATA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pendidikan Menengah	Jumlah Anak Usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi Dalam pendidikan menengah	Jumlah Anak berpartisipasi dalam pendidikan menengah Jumlah Anak Usia 16 - 18 tahun	100%	89,69%	89,69%
		Rata-rata kompetensi Literasi berdasarkan Asesmen Nasional		1,85	1,83	98,92%
		Rata-rata kompetensi Literasi berdasarkan Asesmen Nasional		1,75	1,69	96, 57 %
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Anak Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam anak berkebutuhan khusus yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Jumlah Anak Usia 4–18 tahun berkebutuhan khusus yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Jumlah Anak Usia 4–18 tahun berkebutuhan khusus	100%	= (524/570) x100% 0,9193	91,93%
		Rata-rata kompetensi Literasi berdasarkan Asesmen Nasional		1,8	1,65	90%
		Rata-rata kompetesi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1,7	1,51	88,82%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	ELEMEN DATA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1,8	1,74	99,67%
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1,7	1,65	97,06%
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1,85	1,83	98,92%
		Rata-rata kompetesi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1,75	1,69	96,57%

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Selain itu, dalam pencapaian target standar pelayanan minimal bidang pendidikan tersebut tidak telepas dari mutu pelayanan dasar. Adapun mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memastikan mutu pelayanan dasar terpenuhi guna mendukung tercapainya target SPM sebagimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.87
Capaian Mutu SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS PARIPURNA**			99.79 %
1	**Pendidikan Menengah**				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlaya**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	27432	27432	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	100.00 %
	1. Buku teks pelajaran	59,304	59,304	0	100.00 %
	2. Perlengkapan belajar	4,351	4,351	0	100.00 %
	3. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1,023	1,023	0	100.00 %
	4. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	99	99	0	100.00 %
	5. Penyediaan biaya personil peserta didik	30,714	30,714	0	100.00 %
	6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1363	1363	0	100.00 %
	7. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	99	99	0	100.00 %
	8. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	168	168	0	100.00 %
2	**Pendidikan Khusus**				99.58 %

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum**	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	545	545	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	97.92 %
	1. Materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas	545	545	0	100.00 %
	2. Perlengkapan belajar	545	545	0	100.00 %
	3. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	6	5	0	100.00 %
	4. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	150	150	0	100.00 %
	5. Penyediaan biaya personil peserta didik	545	545	0	100.00 %
	6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	125	125	0	100.00 %
	7. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	6	6	0	100.00 %
	8. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	31	31	0	100.00 %

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

2. Bidang Kesehatan

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2023, Adapun capaian SPM bidang Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.88
Capaian Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Tahun 2023		
			Jumlah Warga Negara yang berhak mendapatkan layanan	Jumlah Warga Negara yang terlayani	Capaian
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1.000	1.000	100%
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1.000	1.000	100%

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

a. Daerah rawan bencana di Kaltara (berdasarkan pemetaan rawan bencana BPBD):
   1) Kabupaten Bulungan, Kecamatan Peso, rawan bencana tanah longsor. Jumlah penduduk yang ada di wilayah kecamatan Peso sebanyak 4.068 orang
   2) Kabupaten Malinau, desa salap, dengan jumlah penduduk 464 orang serta desa belayan dengan jumlah penduduk 2.144 orang. Kedua desa berada di wilayah rawan banjir.
   3) Kabupaten Nunukan, Kecamatan Lumbis dengan jumlah penduduk 5.209 orang serta Kecamatan Sembakung dengan jumlah penduduk 6.102 orang. Kedua kecamatan berada di wilayah rawan banjir.

   Total jumlah penduduk yang menjadi sasaran SPM: 17.987 jiwa.

b. Total jumlah penduduk yang menjadi sasaran SPM: 17.987 jiwa, dan seluruh wilayah yang masuk di dalam peta rawan bencana telah dilakukan edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana.

Tabel 2.89
Capaian Mutu SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS**			**100.00 %**
1.	**Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi**				**100.00 %**
		Tidak Terdapat Bencana (Tidak Akan Masuk Kedalam Perhitungan)			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	17000	0	1700	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**100.00 %**
	1. Obat-obatan dan Bahan medis habis pakai	1000	1000		
	2. Makanan tambahan/pendamping untuk kelompok rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak [PMBA] dll.)	1000	1000		
	3. Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Hyegiene Kit dan Family Kit)	0	0		
	4. Dokter	6	6		
	5. Perawat	7	7		
	6. Bidan	1	1		
	7. Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, Kesehatan reproduksi, dan lain-lain	4	4		

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			Total Pencapaian
	8. Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	1	1		
	9. Apoteker dan/atau Asisten Apoteker	2	2		
	10. Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	2	2		
2.	**Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi**				
		Ya Terjadi			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayan**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	**1000**	**1000**	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**100.00 %**
	1. Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	1000	1000	0	100.00 %
	2. Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin	1000	1000	0	100.00 %
	3. Wadah pengiriman spesimen (Specimen Carrier)	1000	1000	0	100.00 %
	4. Tempat sampah biologis	100	100	0	100.00 %
	5. Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/lembar KIE, Alat tulis yang diperlukan	1000	1000	0	100.00 %
	6. Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	1000	1000	0	100.00 %
	7. Alat pemeriksaan fisik (Stestoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	1000	1000	0	100.00 %
	8. Dokter	6	6	0	100.00 %
	9. Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	2	2	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			Total Pencapaian
	10 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	1	1	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	1	1	0	100.00 %
	12 . Tenaga Laboratorium	2	2	0	100.00 %
	13 . Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	2	2	0	100.00 %
	14 . Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis	1	1	0	100.00 %

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

3. Bidang Pekerjaan Umum

Adapun realisasi pencapaian pelaksanaan SPM bidang Pekerjaan Umum tahun 2023 dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.90
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Keterangan
		Indikator	Capaian Tahun 2023	
1.	Pelayanan dan Penyediaan Air Minum	Persentase sistem penyediaan air minum (SPAM) yang terbangun dan dikelola	1 Paket	
		- Jumlah pengembangan bangunan sistem distribusi air minum yang tersedia		
		- Jumlah bangunan sistem distribusi air bersih	-	
2.	Pengelolaan Air Limbah	Persentase sistem pengelolaan air limbah yang dibangun dan dikelola	-	
		- Jumlah bangunan prasarana dan sarana air limbah/tinja	-	

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

4. Bidang Perumahan Rakyat

Adapun realisasi pencapaian pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat tahun 2023 dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.91
Indikator dan Data SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Keterangan
		Indikator	Capaian Tahun 2023	
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah rumah yang dibangun untuk korban bencana provinsi	-	Belum ada dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi Kabupaten/Kota. (dasar aturan : PERMEN PUPR 29/PRT/M/2018)
		- Renovasi rumah swadaya	-	
		- Pembangunan Kembali	-	
		- Penyediaan rumah/relokasi type 36	-	
		- Bantuan akses rumah sewa	-	
		- Pendampingan	-	

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Keterangan
		Indikator	Capaian Tahun 2023	
2.	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Kena Relokasi Program Pemerintah Daerah	- Pembinaan	-	Belum ada penyediaan rumah layak huni relokasi program pemerintah untuk memenuhi jumlah kekurangan sewa lebih dari 50 unit (dasar aturan dan dasar hukum : PERMEN PUPR 29/PRT/M/2018)
		- Penyuluhan	-	
		- Pelayanan Informasi	-	
		Pendataan Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi terkena Dampak Bencana Provinsi Kalimantan Utara	-	
		Bantuan Teknis Pendampingan penggantian kerugian	-	
			-	
		Penyusunan DED Rumah Umum dan Rumah Khusus	-	
		Pembangunan rumah susun umum	-	
		Pembangunan rumah khusus	-	
		Pengadaan tanah untuk relokasi	-	

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Tabel 2.92
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00 %**
1.	**Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi**				**100.00 %**
		Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	**1**	**1**	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**100.00 %**
	1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	1	1	0	100.00 %
	2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	1	1	0	100.00 %
	3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	1	1	0	100.00 %
	4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	1	1	0	100.00 %
2.	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi**				**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	**1**	**1**	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**100.00 %**
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	1	1	0	100.00 %
	2 . Subsidi uang sewa	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan rumah layak huni	1	1	0	100.00 %

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam pelaksanaan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.93
Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00 %**
1.	**Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Provinsi**				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	**1**	**1**	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**100.00 %**
	1 . Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Kerugian Materil	1	1	0	100.00 %
	2 . Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Kerugian Pelayanan Pengobatan	1	1	0	100.00 %
	3 . Standar Operasional Prosedur Satpol PP	23	23	0	100.00 %
	4 . Standar Sarana Prasarana Satpol PP	34	34	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			Total Pencapaian
	5 . Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dan Anggota Perlindungan Masyarakat	3	3	0	100.00 %
	6 . Standar Pelayanan Yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perkada	1	1	0	100.00 %

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

6. Bidang Sosial

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 adalah 100% dengan rincian serta jenis pelayanan tercantum pada table dibawah ini:

Tabel 2.94
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Realisasi		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Rehabilitasi Sosail Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas telantar di dalam panti	2023	100 %	100%	100%
		Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar Anak Telantar di dalam Panti	2023	100 %	100 %	100 %
		Persentase (%) Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	2023	100 %	100%	100%
		Persentase (%) Lanjut Usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Di Dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis	2023	0 %	0 %	0 %
		Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti				
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Realisasi		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
		Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saaat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	2023	100 %	100%	100%

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Tabel 2.95
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)
1	Persentase (% Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Dalam Panti	100 %	100 %
2	Persentase (% Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Dalam Panti	100 %	100 %
3	Persentase (%) Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Dalam Panti	100 %	100%
4	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Dalam Panti	100 %	0
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100%

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas Pencapaian indokator kinerja dari lima Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 yang terealisasi yaitu Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi serta Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti sebesar 100% sehingga persentase pencapaian kinerja berdasarkan kriteria kinerja masuk pada kriteria baik.

2.1.5.2 Penerapan SPM Tahun 2024

1. Bidang Pendidikan

Dalam rangka pemenuhan akses, mutu pendidikan hingga pendidik dan tenaga kependidikan tersebut maka ditetapkanlah Indeks SPM sebagai pengukuran capaian Standar Pelayanan Minimal. Indeks SPM merupakan kalkulasi capaian daerah berdasarkan komponen Capaian Penerima Layanan Dasar dan Mutu Layanan Pendidikan yang menggambarkan capaian keseluruhan standar pelayanan minimal. Adapun Penerima Layanan Dasar dan Mutu Layanan Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan maka Capaian SPM Dinas Pendidikan danyang tertuang dalam aplikasi E-SPM dirincikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.96
Realisasi Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Keterangan
PENDIDIKAN MENENGAH						
PENERIMA LAYANAN DASAR						
A	Jumlah Yang Harus Dilayani	32272	Peserta Didik	32272	100,00	
MUTU LAYANAN DASAR						
SMA						
1	Angka Partisipasi Kasar	0	%	0	100,00	Tutup Mutu
2	Anggka Partisipasi Sekolah	77,02	%	77,02	100,00	
3	Kemampuan Literasi	70,44	Nilai	70,44	100,00	
4	Kemampuan Numerasi	58,33	Nilai	58,33	100,00	
5	Perbedaan Skor Literasi	0	Nilai	0	100,00	Tutup Mutu
6	Perbedaan Skor Numerasi	0	Nilai	0	100,00	Tutup Mutu
7	Indeks Iklim Keamanan	73,14	Nilai	73,14	100,00	
8	Indeks Iklim Kebhinekaan	75,45	Nilai	75,45	100,00	
9	Indeks Iklim Inklusivitas	58,82	Nilai	58,82	100,00	
10	Kecukupan Formasi Guru ASN	0	%	0	100,00	Tutup Mutu
11	Indeks Distribusi Guuru	0	%	0	100,00	Tutup Mutu
12	Proporsi PTK Bersertifikat	0	%	0	100,00	Tutup Mutu
13	Proporsi PTK Penggerak*	0	%	0	100,00	Tutup Mutu

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Keterangan
SMK						
1	Angka Partisipasi Kasar	0	%	0	100,00	Tutup Mutu
2	Anggka Partisipasi Sekolah	76	%	77,02	100,00	
3	Kemampuan Literasi	67	Nilai	67,08	100,00	
4	Kemampuan Numerasi	56	Nilai	56,38	100,00	
5	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	88	%	88,81	100,00	
6	Kepuasan Dunia Kerja terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	61	%	61,65	100,00	
7	Perbedaan Skor Literasi	0	Nilai	0	100,00	Tutup Mutu
8	Perbedaan Skor Numerasi	0	Nilai	0	100,00	Tutup Mutu
9	Indeks Iklim Keamanan	71	Nilai	71,31	100,00	
10	Indeks Iklim Kebhinekaan	75	Nilai	75,23	100,00	
11	Indeks Distribusi Guru	0,34	%	0,34	100,00	
12	Indeks Iklim Inklusivitas	57	Nilai	57,09	100,00	
13	Kecukupan Formasi Guru ASN	0	%	0	100,00	Tutup Mutu
14	Proporsi PTK Bersertifikat	0	%	0	100,00	Tutup Mutu
15	Proporsi PTK Penggerak*	0	%	0	100,00	Tutup Mutu
PENDIDIKAN KHUSUS						
PENERIMA LAYANAN DASAR						
A	Jumlah Yang Harus Dilayani	728	Peserta Didik	728	100,00	
MUTU LAYANAN DASAR						
SLB						
1	Angka Partisipasi Kasar	0	%	0	100,00	Tutup Mutu
2	Anggka Partisipasi Sekolah	73,00	%	73,92	100,00	
3	Kemampuan Literasi	63,00	Nilai	63,20	100,00	
4	Kemampuan Numerasi	65,00	Nilai	65,87	100,00	
5	Perbedaan Skor Literasi	0	Nilai	0	100,00	Tutup Mutu
6	Perbedaan Skor Numerasi	0	Nilai	0	100,00	Tutup Mutu
7	Indeks Iklim Keamanan	77,00	Nilai	77,10	100,00	
8	Indeks Iklim Kebhinekaan	70,00	Nilai	70,89	100,00	
9	Indeks Iklim Inklusivitas	63,00	Nilai	63,42	100,00	
10	Kecukupan Formasi Guru ASN	0	%	0	100,00	Tutup Mutu
11	Indeks Distribusi Guuru	0	%	0	100,00	Tutup Mutu
12	Proporsi PTK Bersertifikat	0	%	0	100,00	Tutup Mutu
13	Proporsi PTK Penggerak*	0	%	0	100,00	Tutup Mutu

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Adapun berdasarkan perhitungan capaian indikator kinerja penerima layanan dan mutu layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, maka capaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 100% atau TUNTAS PARIPURNA.

2. Bidang Kesehatan

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2024, Adapun capaian SPM bidang Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.97
Capaian Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2024		
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Capaian = (4):(3)x100%
-1	-2	-3	-4	-5
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	1.000	1.000	100%
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	1.000	1.000	100%

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Tabel 2.98
Capaian Penerapan SPM Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Indikator Capaian	Jumlah orang yang berhak	Jumlah orang yang terlayani	Capaian =(4):(3)X 100%
1	2	3	4	5
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar?	13.095	12.046	91,90%
2. Ibu Bersalin	jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)?	12.771	12.251	95,90%
3. Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar?	124.477	12.022	96,30%

No	Indikator Capaian	Jumlah orang yang berhak	Jumlah orang yang terlayani	Capaian =(4):(3)X 100%
4. Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	47.213	42.538	90,10%
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	102.702	94.658	92,10%
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang berusia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar?	297.303	246.438	82,80%
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar?	33.959	32.596	95,90%
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar?	64.078	51.678	80,60%
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabet Melitus	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar?	12.318	12.318	100%
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODG) Berat	Jumlah orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar?	1.375	1.169	85,00%
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar?	13.632	12.539	91,90%
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus	Jumlah orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar?	18.557	18.222	98,10%

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Pada tahun 2024 telah terjadi bencana tingkat provinsi sehingga kegiatan berfokus pada kegiatan tanggap darurat bencana yaitu dengan terlaksananya pelayanan kesehatan dengan menyediakan posko kesehatan di wilayah terjadinya bencana, distribusi logisitik dan SDM serta pengobatan dan rujukan pasien ke

fasyankes Tingkat pertama. Berikut kami sajikan tabel jenis bencana dan Kabupaten/Kota terdampak bencana.

Tabel 2.99
Perhitungan Nilai Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi KLB Provinsi Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
2 .	**Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi**					100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:		1000	1000	**0**	**100.00 %**
Ya Terjadi Kejadian luar Biasa						
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani /**	100 %
1	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	Unit	5	5	**0**	**100.00 %**
2	Profilaksis/Vitamin/Obat/ Vaksin	Unit	5	5	**0**	**100.00 %**
3	Wadah pengiriman specimen Specimen Carrier)	Unit	5	5	**0**	**100.00 %**
4	Tempat sampah biologis	Unit	5	5	**0**	**100.00 %**
5	Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/ lembar KIE, Alat tulis yang diperlukan	*	1000	1000	**0**	**100.00 %**
6	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	Unit	5	5	**0**	**100.00 %**
7	Alat pemeriksaan fisik (Stestoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis	Unit	5	5	**0**	**100.00 %**
8	Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	2	2	**0**	**100.00 %**
9	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	2	2	**0**	**100.00 %**
10	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	4	4	**0**	**100.00 %**

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
11	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	1	1	**0**	**100.00 %**
12	Tenaga kesehatan: Tenaga Laboratorium	Orang	3	3	**0**	**100.00 %**
13	Tenaga kesehatan: Tenaga penyuluh/promosi	Orang	5	5	**0**	**100.00 %**
14	Tenaga kesehatan: Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	1	1	**0**	**100.00 %**

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

3. Bidang Pekerjaan Umum

Realisasi capaian dari pelaksanaan SPM bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 dilaporkan pada tabel berikut:

Tabel 2.100
Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Anggaran
		Indikator	Capaian Tahun 2024	
1.	Fasilitasi kerja sama pengelolaan SPAM Regional Lintas kabupaten/kota	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	-	-
		Jumlah mutu (barang/jasa/ SDM) yang harus dilayani/dipenuhi: Rekapitulasi SPAM Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	5 Kabupaten/Kota	Rp. 12,279,050,000
2.	Fasilitasi kerja sama	Persentase Pencapaia Penerima Layanan Dasar (80%)	-	-

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Anggaran
		Indikator	Capaian Tahun 2024	
	pengelolaan air limbah domestik lintas kabupaten/kota	Jumlah mutu (barang/jasa/SDM) yang harus dilayani/dipenuhi: Rekapitulasi SPALD Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	5 Kabupaten / Kota	Rp 7,221,100,366

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

4. Bidang Perumahan Rakyat

Berdasarkan pada hasil realisasi yang dilaksanakan pada tahun 2024, diketahui bahwa dilakukan pembangunan dua unit rumah bagi korban bencana yang dilakukan di Kabupaten Malinau. Namun tidak ada kegiatan fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

Tabel 2.101
Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Anggaran
		Indikator	Capaian Tahun	
	Program Pengembangan Perumahan			
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Tidak LayakHuniBagi KorbanBencana Provinsi	Rehabilitasi Rumah	-	-
		Pembangunan Kembali Rumah	2 Unit Rumah	Rp.448.968.000
		Pemukiman Kembali	-	-
		BantuanAkses Rumah Sewa	-	-
2	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Kena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Penggantian hak atas penguasaaan tanah dan/atau bangunan (Penggantian Uang dan Pembangunan Kembali)	-	-
		Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni (Subsidi Uang Sewa dan Akses Tinggal Rumah Layak Huni Milik Pemerintah Daerah)	-	-

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam pelaksanaan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.102
Capaian SPM Trantibumlinmas Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban UmumProvinsi				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANANDASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	220	220	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia**	100.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa / SDM				
	1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	**0**	**100.00 %**
	2 . Warga negara yang memperoleh Pelayanan kerugian pelayanan Pengobatan	0	0	**0**	**100.00 %**
	3. Standar sarana prasarana Satpol PP	1	1	**0**	**100.00 %**
	4. Standar operasional prosedur Satpol PP	9	9	**0**	**100.00 %**
	5. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat	90	90	**0**	**100.00 %**
	6 . Standar pelayanan yang t erkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakanh ukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1	1	**0**	**100.00 %**

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Berdasarkan rekapitulasi capaian SPM BPBD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, seluruh kabupaten/kota telah menunjukkan tingkat pemenuhan Indeks Pencapaian SPM Kebencanaan yang sangat tinggi, dengan capaian berkisar antara 91,93 persen hingga 100 persen. Kabupaten Bulungan mencatat capaian tertinggi sebesar 100 persen, diikuti Tarakan dan Tana Tidung masing-masing 98,33 persen, Nunukan 97,01 persen, serta Malinau 91,93 persen sebagai capaian terendah namun masih berada pada kategori sangat baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kebencanaan di seluruh kabupaten/kota Kalimantan Utara telah berjalan secara optimal, meskipun peningkatan kapasitas dan kualitas layanan masih perlu terus dilakukan, terutama di daerah dengan capaian yang relatif lebih rendah agar pemerataan standar pelayanan minimum dapat tercapai secara menyeluruh.

Tabel 2.103
Rekapitulasi Capaian SPM BPBD Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	2024				
			Tarakan	Bulungan	Nunukan	Malinau	Tana Tidung
	Indeks Pencapaian SPM Kebencanaan	%	**98,33%**	**100%**	**97,01%**	**91,93%**	**98,33%**
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana						
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	95%	100%	100%	87%	100%
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100%	100%	99,09%	100%	95%

No	Indikator	Satuan	2024				
			Tarakan	Bulungan	Nunukan	Malinau	Tana Tidung
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana						
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100%	100%	91,94%	88,80%	100%

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

6. Bidang Sosial

Target dan indikator kinerja pencapaian SPM Bidang Sosial Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.104

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Hasil Capaian										
		Penerima Layanan Dasar (Bobot Nilai 80%)					Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot Nilai 20%)					Indeks Capaian SPM
		Indikator	Target	Jumlah yang harus di layani	Jumlah yang terlayani	Capaian	Indikator	Target	Jumlah Mutu yang harus dilayani/ dipenuhi	Jumlah Mutu yang terlayani/ terpenuhi	Capaian	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandan Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	100%	13	13	100%	Penyediaan [illegible]	100%	13	13	100%	**100%**
							Penyediaan Sandang	100%	13	13	100%	
							Penyediaan Asrama Yang Mudah Di Akses	100%	13	13	100%	
							Penyediaan Alat Bantu	100%	13	13	100%	
							Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Dalam Panti	100%	13	13	100%	
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial	100%	13	13	100%	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Hasil Capaian										
		Penerima Layanan Dasar (Bobot Nilai 80%)					Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot Nilai 20%)					Indeks Capaian SPM
		Indikator	Target	Jumlah yang harus di layani	Jumlah yang terlayani	Capaian	Indikator	Target	Jumlah Mutu yang harus dilayani/ dipenuhi	Jumlah Mutu yang terlayani/ terpenuhi	Capaian	
							Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	100%	13	13	100%	
							Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti Kepemilikan NIK	100%	13	13	100%	
							Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	100%	13	13	100%	
							Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga / Bukti	100%	13	13	100%	
							Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100%	13	13	100%	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	100%	822	822	100%	Pengasuhan	100%	822	822	100%	**100%**
							Penyediaan	100%	822	822	100%	
							Penyediaan Sandang	100%	822	822	100%	
							Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	100%	822	822	100%	
							Penyediaan Perbekalan Kesehatan Didalam Panti	100%	822	822	100%	
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial	100%	822	822	100%	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Hasil Capaian										
		Penerima Layanan Dasar (Bobot Nilai 80%)					Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot Nilai 20%)					Indeks Capaian SPM
		Indikator	Target	Jumlah yang harus di layani	Jumlah yang terlayani	Capaian	Indikator	Target	Jumlah Mutu yang harus dilayani/ dipenuhi	Jumlah Mutu yang terlayani/ terpenuhi	Capaian	
							Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	100%	822	822	100%	
							Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, Dan Kartu Identitas Anak	100%	822	822	100%	
							Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	100%	822	822	100%	
							Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga / Bukti Keberadaan Keluarga	100%	822	822	100%	
							Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100%	822	822	100%	
							Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti	100%	822	822	100%	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	100%	42	42	100%	Penyediaan	100%	42	42	100%	**100%**
							Penyediaan Sandang	100%	42	42	100%	
							Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	100%	42	42	100%	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Hasil Capaian										Indeks Capaian SPM
		Penerima Layanan Dasar (Bobot Nilai 80%)					Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot Nilai 20%)					
		Indikator	Target	Jumlah yang harus di layani	Jumlah yang terlayani	Capaian	Indikator	Target	Jumlah Mutu yang harus dilayani/ dipenuhi	Jumlah Mutu yang terlayani/ terpenuhi	Capaian	
							Penyediaan Alat Bantu	100%	42	42	100%	
							Penyediaan Perbekalan Kesehatan Didalam Panti	100%	42	42	100%	
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial	100%	42	42	100%	
							Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	100%	42	42	100%	
							Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti Kepemilikan NIK	100%	42	42	100%	
							Akses Ke Layanan Kesehatan Dasar	100%	42	42	100%	
							Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga	100%	42	42	100%	
							Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100%	42	42	100%	
							Pemulasaraan	100%	5	5	100%	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Hasil Capaian										
		Penerima Layanan Dasar (Bobot Nilai 80%)					Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot Nilai 20%)					Indeks Capaian SPM
		Indikator	Target	Jumlah yang harus di layani	Jumlah yang terlayani	Capaian	Indikator	Target	Jumlah Mutu yang harus dilayani/ dipenuhi	Jumlah Mutu yang terlayani/ terpenuhi	Capaian	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	100%	11	11	100%	Penyediaan Permakanan	100%	11	11	100%	**100%**
							Penyediaan Sandang	100%	11	11	100%	
							Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	100%	11	11	100%	
							Penyediaan Perbekalan Kesehatan Didalam Panti	100%	11	11	100%	
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial	100%	11	11	100%	
							Pemberian Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-Hari	100%	11	11	100%	
							Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	100%	11	11	100%	
							Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah Dan/Atau Kartu Identitas	100%	11	11	100%	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Hasil Capaian										
		Penerima Layanan Dasar (Bobot Nilai 80%)					Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot Nilai 20%)					Indeks Capaian SPM
		Indikator	Target	Jumlah yang harus di layani	Jumlah yang terlayani	Capaian	Indikator	Target	Jumlah Mutu yang harus dilayani/ dipenuhi	Jumlah Mutu yang terlayani/ terpenuhi	Capaian	
							Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	100%	11	11	100%	
							Pemulangan Ke Daerah Asal	100%	11	11	100%	
5	Perlindunga dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan setelah tanggap darurat bencana skala provinsi	100%	Tidak terjadi bencana skala provinsi	Tidak terjadi bencana skala provinsi	100%	Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan					
							Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/ kegiatan/ sub kegiatan	100%	5 Kabupatan /Kota	5 Kabupaten/ Kota	100%	**100%**

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

2.1.5.3 Penerapan SPM Tahun 2025

1. Bidang Pendidikan

a. Realisasi Capaian Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan

Dalam rangka pemenuhan akses, mutu pendidikan hingga pendidik dan tenaga kependidikan tersebut maka ditetapkanlah Indeks SPM sebagai pengukuran capaian SPM. Indeks SPM merupakan kalkulasi capaian daerah berdasarkan komponen Capaian Penerima Layanan Dasar dan Mutu Layanan Pendidikan yang menggambarkan capaian keseluruhan standar pelayanan minimal. Adapun Penerima Layanan Dasar dan Mutu Layanan Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan maka Capaian SPM Dinas Pendidikan dan yang tertuang dalam aplikasi e-SPM dirincikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.105
Realisasi Capaian Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00 %**
1 .	Pendidikan Menengah					100.00 %
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (16-18 tahun)	Persentase	78.89	0	0.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI :	Orang	30382	30382	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	SMA (2025)					100.00 %
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	72.81	72.81	0.00	100.00 %
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	60.32	60.32	0.00	100.00 %
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	71.71	71.71	0.00	100.00 %
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72.65	72.65	0.00	100.00 %
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59.09	59.09	0.00	100.00 %
	SMK (2025)					100.00 %
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	69.54	69.54	0.00	100.00 %
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	58.61	58.61	0.00	100.00 %
	3 . Tingkat penyerapan lulusan SMK	Persentase	86.66	86.66	0.00	100.00 %
	4. Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Persentase	70.35	70.35	0.00	100.00 %
	5 . Indeks iklim keamanan	Nilai	70.38	70.38	0.00	100.00 %
	6 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72.15	72.15	0.00	100.00 %
	7 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57.18	57.18	0.00	100.00 %
2 .	Pendidikan Khusus					100.00 %
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (4-18 tahun) PENYANDANG DISABILITAS	Persentase	73.93	0	0.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI :	Orang	660	660	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	SDLB (2025)					100.00 %
	1 . Indeks iklim keamanan	Nilai	71.67	71.67	0.00	100.00 %
	2 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73.67	73.67	0.00	100.00 %
	3 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	67.33	67.33	0.00	100.00 %
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	80.39	80.39	0.00	100.00 %
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	74.17	74.17	0.00	100.00 %
	SMPLB (2025)					100.00 %
	1 . Indeks iklim keamanan	Nilai	82	82	0.00	100.00 %
	2 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	81	81	0.00	100.00 %
	3 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	82.5	82.5	0.00	100.00 %
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	80.98	80.98	0.00	100.00 %
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	78.95	78.95	0.00	100.00 %
	SMALB (2025)					100.00 %
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	79.5	79.5	0.00	100.00 %
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	71.07	71.07	0.00	100.00 %
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	78.5	78.5	0.00	100.00 %
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	77.5	77.5	0.00	100.00 %
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	80.5	80.5	0.00	100.00 %

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

b. Permasalahan SPM Bidang Pendidikan

Meskipun indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal

Pendidikan telah tercapai, masih terdapat sejumlah permasalahan sebagai berikut:

1) Belum tersedianya daftar anak usia 16–18 tahun yang tidak bersekolah, sehingga intervensi pemerintah provinsi masih terbatas pada anak yang terancam putus sekolah.
2) Belum meratanya sarana dan prasarana pada satuan pendidikan yang berdampak pada terbatasnya daya tampung bagi anak usia sekolah.
3) Belum memadainya sarana dan prasarana akses menuju lokasi satuan pendidikan, sehingga menyulitkan mobilitas peserta didik.
4) Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.
5) Masih terdapat lulusan SMK yang bekerja tidak sesuai dengan bidang keahlian, bahkan sebagian tidak bekerja karena menikah atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
6) Masih terdapat lulusan yang belum memiliki sertifikat kompetensi.
7) Terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan kompetensi keahlian di satuan pendidikan.
8) Hasil pemetaan dan pendistribusian guru menunjukkan Provinsi Kalimantan Utara masih kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK).
9) Jumlah PTK bersertifikat pendidik, kompeten, dan Guru Penggerak masih terbatas.
10) Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik masih perlu ditingkatkan.

c. Solusi SPM Bidang Pendidikan

Untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan SPM Pendidikan Tahun 2025 tersebut, dirumuskan beberapa alternatif solusi sebagai berikut:

1) Melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam pendataan anak

tidak sekolah melalui sensus/survei yang terkoordinasi dengan BPS, Disdukcapil, DPMPD, cabang dinas, serta pemerintah desa dan kecamatan.

2) Melakukan pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) minimal dua kali dalam setahun guna menjamin kesesuaian data melalui supervisi, pendampingan, verifikasi, validasi, dan evaluasi satuan pendidikan.
3) Menyusun *roadmap* pengembangan pendidikan yang memuat analisis kebutuhan sarana dan prasarana sebagai dasar penganggaran pembangunan satuan pendidikan.
4) Menyediakan sarana mobilitas berupa bus sekolah.
5) Melibatkan perangkat daerah terkait dalam peningkatan akses menuju satuan pendidikan, seperti pembangunan jalan, jaringan, dan listrik.
6) Melakukan survei atau FGD untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat mengenai manfaat pendidikan.
7) Memberikan bantuan biaya pendidikan.
8) Mendorong *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), meliputi penyelarasan kurikulum berbasis industri, pengembangan kompetensi PTK dan peserta didik, pemagangan, serta pemberian beasiswa.
9) Memfasilitasi penambahan jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
10) Melakukan pembinaan talenta peserta didik melalui pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), serta Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN).
11) Melibatkan perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan dalam penguatan manajemen Bursa Kerja Khusus guna meningkatkan penyerapan lulusan SMK melalui job matching dan job fair.

12) Menguatkan tata kelola dan manajemen SMK menuju status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
13) Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja.
14) Melakukan pendataan dan analisis kelebihan serta kekurangan jam mengajar pada setiap mata pelajaran guna pemerataan PTK, serta mengusulkan formasi ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15) Memberikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi PTK.
16) Memfasilitasi pelatihan, magang, dan pendampingan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.
17) Memfasilitasi PTK dalam pengembangan konten digital pembelajaran.
18) Membentuk komunitas belajar serta memastikan keterlibatan aktif guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah melalui monitoring minimal satu kali dalam tiga bulan.

2. Bidang Kesehatan

a. Realisasi Capaian Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan

Realisasi capaian dari pelaksanaan SPM bidang Kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 dilaporkan pada tabel berikut:

Tabel 2.106
Realisasi Capaian Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00 %**
1 .	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA PROVINSI	Orang	1000	1000	0	100.00 %
	A . JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (PRA KRISIS KESEHATAN) : Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	1000	1000	0	100.00 %
	B . JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (TAHAP TANGGAP DARURAT) : Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	1000	1000	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	PRA KRISIS KESEHATAN					100.00 %
	1 . Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (peserta/masyarakat)	Orang	1000	1000	0.00	100.00 %
	2 . Tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga non kesehatan	Orang	14	14	0.00	100.00 %
	3 . Sarana dan prasarana	Unit	58	58	0.00	100.00 %
	TAHAP TANGGAP DARURAT					100.00 %
	1 . Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	Orang	1000	1000	0.00	100.00 %
	2 . Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) meliputi pemberian ASI dan MP ASI	Orang	400	400	0.00	100.00 %
	3 . Makanan tambahan untuk ibu hamil Kekurangan Enegi Kronis (KEK) dan balita bermasalah gizi	Orang	120	120	0.00	100.00 %
	4 . Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Individu Kit)	Orang	300	300	0.00	100.00 %
	5 . Tenaga medis : Dokter	Orang	2	2	0.00	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2	2	0.00	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2	2	0.00	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	2	2	0.00	100.00 %
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	2	2	0.00	100.00 %
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan lingkungan	Orang	2	2	0.00	100.00 %
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	2	2	0.00	100.00 %
	12. Tenaga kesehatan terlatih di bidang kesehatan jiwa atau tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan kesehatan jiwa	Orang	1	1	0.00	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
2 .	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi dan atau Berpotensi KLB					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA PROVINSI DAN ATAU BERPOTENSI KLB	Orang	1000	1000	0	100.00 %
	A . JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (BERPOTENSI KLB) : Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	1000	1000	0	100.00 %
	B . JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (KONDISI TERJADI KLB) : Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	1000	1000	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	BERPOTENSI KLB					100.00 %
	1 . Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	Unit	1000	1000	0.00	100.00 %
	2 .Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin	Paket	1000	1000	0.00	100.00 %
	3 . Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrier	Unit	5	5	0.00	100.00 %
	4 . Tempat sampah biologis	Unit	5	5	0.00	100.00 %
	5 . Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, alat tulis yang diperlukan	Formuli r	1000	1000	0.00	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	6 . Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen, tes diagnostik cepat, dll)	Unit	1000	1000	0.00	100.00 %
	7 . Alat pemeriksaan fisik (Stestoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, dll)	Unit	5	5	0.00	100.00 %
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	2	2	0.00	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	2	2	0.00	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	2	2	0.00	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	12 . Tenaga Laboratorium	Orang	2	2	0.00	100.00 %
	13 . Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	2	2	0.00	100.00 %
	14 . Petugas penanggung jawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	2	2	0.00	100.00 %
	KONDISI TERJADI KLB					100.00 %
	1 . Tata laksana kasus (Perawatan dan pengobatan) bagi penduduk yang terinfeksi KLB di Rumah Sakit	Orang	100	100	0.00	100.00 %

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

b. Permasalahan SPM Bidang Kesehatan

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM di Provinsi maupun kabupaten/kota pada tahun 2025 setiap daerah mengalami kendala yang cukup signifikan dalam penerapannya khususnya pada tahap pengawasan, monitoring dan evaluasi. Adapun masalah dan kendala yang dihadapi yakni:

1) Situasi Krisis Kesehatan akibat Bencana dan atau KLB merupakan kondisi yang tidak dapat diprediksi secara pasti kapan terjadi dan besaran resiko dampak akibat terjadinya, sehingga perlu kesiapsiapgaan/ mitigasi meliputi fase pra-bencana, saat bencana dan pasca bencana menyesuaikan beban ketersediaan anggaran yang dialokasikan oleh daerah. Kegiatan monitoring, evaluasi maupun bimbingan teknis tetap harus dilakukan baik melalui pertemuan tidak langsung (daring internet) maupun dengan monitoring dan evaluasi secara berkala ke daerah kabupaten/kota untuk dapat mengantisipasi situasi berpotensi kejadian luar biasa.
2) Dalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025, semua jenis KLB yang mungkin terjadi seperti KLB penyakit Influenza (infeksi saluran pernafasan), KLB penyakit tular vector atau arbovirosis, PD3I maupun keracunan pangan tidak terpisahkan penganggarannya, namun tersedia anggaran pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan/ bencana dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB, dengan proporsi minimalis.
3) Secara teknis, frekuensi dan intensitas kejadian bencana, baik alam maupun nonalam, didasarkan pada kasus yang terjadi pada tahun berjalan serta laporan tahun-tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan jumlah masyarakat yang berisiko terdampak krisis kesehatan di wilayah kabupaten/kota berisiko tinggi. Namun demikian, waktu dan besaran dampak bencana maupun Kejadian Luar Biasa (KLB) tidak dapat diprediksi secara pasti. Kondisi ini menuntut ketersediaan logistik pendukung,

seperti obat- obatan, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP), dalam jumlah yang memadai serta dengan masa kedaluwarsa yang cukup panjang untuk menghindari pemborosan.

4) Di sisi lain, adanya batasan kewenangan dalam kerangka otonomi daerah antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi mengharuskan pemerintah provinsi menunggu laporan resmi atau permintaan bantuan berupa Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat Bencana atau SK Penetapan KLB dari kabupaten/kota. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi provinsi untuk menetapkan status tanggap darurat tingkat provinsi serta menyalurkan bantuan dan Dana Siap Pakai (DSP) yang penggunaannya dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Proses pengumpulan data sasaran sering kali tidak menjadi prioritas utama pada saat terjadi bencana, KLB, atau wabah. Selain itu, jumlah petugas di lapangan yang mampu melakukan pengumpulan data secara akurat masih terbatas;
6) Kejadian bencana, KLB, atau wabah tidak dapat diprediksi waktu terjadinya maupun besaran dampaknya. Kondisi di lapangan sering kali berbeda dengan estimasi yang telah dibuat. Di sisi lain, logistik penanganan bencana dan KLB memiliki masa kedaluwarsa serta keterbatasan kapasitas penyimpanan, sehingga tidak dapat diadakan dalam jumlah besar sekaligus;
7) Tenaga kesehatan yang telah dilatih untuk menjadi anggota Tim Gerak Cepat (TGC) dan Emergency Medical Team (EMT) sering mengalami rotasi atau perpindahan tugas. Akibatnya, petugas terlatih tidak selalu tersedia ketika dibutuhkan pada saat terjadi KLB atau bencana.
8) Program SPM bidang kesehatan telah memperoleh alokasi anggaran dengan persentase yang dinilai cukup dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Renstra dan Renja. Namun demikian, kegiatan terkait tidak dapat dianggarkan dalam jumlah

besar karena apabila tidak terjadi bencana, KLB, atau wabah, penyerapan anggaran tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

9) Adanya otonomi daerah pada tingkat kabupaten/kota menyebabkan kejadian bencana, KLB, atau wabah yang masih dapat ditangani oleh pemerintah daerah tidak selalu segera dilaporkan kepada pemerintah provinsi. Selain itu, penetapan skala bencana, KLB, atau wabah oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi terkadang dipengaruhi oleh pertimbangan kebijakan yang bersifat politis
10) Pengadaan obat-obatan, alat kesehatan, bahan habis pakai, serta bahan tambahan makanan bagi penduduk kelompok rentan baru dapat direalisasikan pada akhir tahun karena harus menunggu proses pergeseran anggaran. Akibatnya, distribusi logistik baru dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

c. Solusi SPM Bidang Kesehatan

Adapun untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan SPM Kesehatan di Tahun berikutnya, terdapat beberapa solusi dilhat dari aspek situasi dan kondisi persiapan penerapan SPM Tahun 2025 sebagai berikut:

1) Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan dalam perencanaan anggaran, telah diklasifikasikan penjabaran tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Puskesmas guna mencapai Indikator Kinerja masing-masing daerah. Terkhusus pencapaian SPM provinsi, momenklatur penganggaran telah memisahkan antara pos alokasi tiap indikator SPM.
2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis dilakukan secara berkesimabungan sehingga peninjauan secara langsung ke lapangan dapat dilaksanakan secara efektif dan

efisien dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

3. Bidang Pekerjaan Umum

a. Realisasi Capaian Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum

Realisasi capaian dari pelaksanaan SPM bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 dilaporkan pada tabel berikut:

Tabel 2.107
Realisasi Capaian Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00 %**
1 .	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota melalui penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota					100.00 %
Tidak Ada SPAM Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota) Tidak Ada SPAM Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)						
			Tersedia (Harus Terlayani)	Termanfaatkan (Harus Dilayani)	Selisih	
	KAPASITAS AIR CURAH SD KONDISI SAAT INI *Tidak masuk dalam hitungan	Liter/Detik	0	0	0	0.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	31814	0	31814	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)				-100%	100.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/ SDM) YANG HARUS DILAYANI/ DIPENUHI					100.00 %
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang memiliki SPAM lintas Kabupaten/Kota					100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	1 . Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah	0	0	0	100.00 %
	2 . Rekapitulasi SPAM Kab/Kota *Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)*	Jumlah Kab/Kota	5	5	0	100.00 %
	3 . Format Tahapan		Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)			100.00 %
	1.PENDATAAN					100.00 %
	FORM 3.A.1 KONDISI SPAM REGIONAL					100%
	FORM 3.A.2 KONDISI SPALD REGIONAL					100%
	2.PERHITUNGAN					100.00 %
	FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL					100%
	FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD REGIONAL					100%
	3.PERENCANAAN					100.00 %
	FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM PROVINSI					100%
	FORM 3.C.2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK					100%
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota					100.00 %
Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)						
			Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih	
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI)	Orang	0	0	0	0.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	109455	0	109455	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)				-100%	100.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/ SDM) YANG HARUS DILAYANI/ DIPENUHI					100.00 %
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang tidak memiliki SPALD regional lintas Kabupaten/Kota					100.00 %
	1 . Pemberian Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah	0	0	0	100.00 %
	2 . Rekapitulasi SPAM Kab/Kota *Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)*	Jumlah Kab/Kota	5	5	0	100.00 %
	3 . Format Tahapan		Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)			100.00 %
	1.PENDATAAN					100.00 %
	FORM 3.A.1 KONDISI SPAM REGIONAL					100%
	FORM 3.A.2 KONDISI SPALD REGIONAL					100%
	2.PERHITUNGAN					100.00 %
	FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL					100%
	FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD REGIONAL					100%
	3.PERENCANAAN FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM PROVINSI					100.00 % 100%
	FORM 3.C.2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK					100%

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

b. Permasalahan SPM Bidang Pekerjaan Umum

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum antara lain:

1) Kurangnya sumber air baku untuk daerah yang dikelilingi lautan.
2) Masih terbatasnya penyediaan air bersih oleh PDAM.
3) Besarnya biaya operasional penyediaan air bersih.
4) Minimnya sumber daya/jaringan listrik untuk pengelolaan air bersih.
5) Hal kritis dalam Penyediaan Air Bersih Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
6) konflik air baku maupun pendistribusiannya (antar warga, antar desa).
7) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk pengolahan air limbah dan persampahan.
8) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih menggunakan sistem open dumping.
9) Belum optimalnya sistem pengolahan air limbah dan sampah.
10) Terjadi perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di tengah pelaksanaan kegiatan, sehingga memerlukan waktu penyesuaian dan pemahaman kembali terhadap kegiatan SPM yang sedang berjalan.
11) Pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 baru dilaksanakan pada tanggal 11 November 2025.
12) Ketersediaan SDM yang memahami pelaksanaan SPM pada bidang Cipta Karya masih terbatas.
13) Kondisi geografis kabupaten/kota yang berjauhan memerlukan biaya yang cukup besar untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional.

c. Solusi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum antara lain:

1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan provinsi dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air minum dan air limbah.
2) Meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan air limbah.
3) Meningkatkan manajemen pengelolaan lembaga layanan air minum dan air limbah.
4) Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan sistem air minum dan air limbah.

4. Bidang Perumahan Rakyat

a. Realisasi Capaian Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat

Realisasi capaian dari pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 dilaporkan pada tabel berikut:

Tabel 2.108
Realisasi Capaian Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00 %**	
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi					100.00 %	
	Bencana Meliputi :						
	a) Letusan gunung berapi;						
	b) Gempa bumi;						
	c) Tanah longsor;						
	d) Gelombang pasang;						
	e) Banjir bandang; dan/atau						
	f) Bencana lainnya.						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
			Target 100% (SPM)	Target (Harus Dilayani)	Capaian (Terlayani)		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	8	8	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/ SDM) YANG HARUS DILAYANI/ DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0	100.00 %	
	2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	2	2	0	100.00 %	
	3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0	100.00 %	
	4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0	100.00 %	
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi					100.00 %	
	Relokasi Program Pemerintah Meliputi :						
	a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha;						
	b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;						
	c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;						
	d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau						
	e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana)						
Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah							
	Tidak Terjadi Bencana (Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Verifkasi oleh Sekber Pusat (contoh : dokumen RP3KP, dsb.) Tidak Masuk Kedalam Perhitungan						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
			Target 100% (SPM)	Target (Harus Dilayani)	Capaian (Terlayani)		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)				-100%	100.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SD M) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Format Tahapan		Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)			100.00 %	
	1.PENDATAAN					100.00 %	
	FORM 4.A.1 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA PROVINSI PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%	
	FORM 4.A.2 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%	
	FORM 4.A.3 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA PROVINSI PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%	
	FORM 4.A.7 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH					100%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	FORM 4.A.8 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH PROVINSI (10 - 15 HA) PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH					100%	
	FORM 4.A.9 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH					100%	
	2.PERHITUNGAN					100.00 %	
	FORM 4.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%	
	FORM 4.B.2 PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA					100%	
	FORM 4.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI:					100%	
	FORM 4.B.6 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI					100%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH						
	3.PERENCANAAN					100.00 %	
	FORM 4.C.1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA PROVINSI					100%	
	FORM 4.C.3 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PROVINSI					100%	

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

b. Permasalahan Bidang Perumahan Rakyat

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025 hingga triwulan 4 antara lain:

1) Terkait adanya efisiensi anggaran, beberapa kegiatan yang mendukung adanya pengisian form menjadi tidak dapat terpenuhi seperti Form 4.A.2 dan 4.A.3 yang sebelumnya telah dianggarkan. sehingga pelaksanaan kegiatan ini akan menyesuaikan kembali dengan kondisi anggaran dan kemampuan.
2) Hingga triwulan 2, dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih menuggu SK Penetapan lokasi penerima bantuan dari Kabupaten Malinau sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan di Kabupaten Malinau berdasarkan pada SK terdampak bencana dan pendataan yang telah dilakukan tahun sebelumnya, sehingga perlunya koordinasi lebih efektif lagi terhadap Kabupaten Penerima Manfaat.
3) Tidak dapat mengupload Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau RP3KP Provinsi Kalimantan Utara, dalam E-SPM.
4) Terkait kondisi geografis di Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki sungai-sungai besar dan topografi dataran rendah menjadikan kawasan di beberapa permukiman rentan terhadap banjir terutama akibat hujan deras di hulu, banjir kiriman dan pasang air laut.
5) Kondisi adat yang terdapat di Provinsi Kalimantan Utara di beberapa Kabupaten, sangat kuat terhadap tanah leluhur sehingga beberapa penanganan seperti pembangunan baru dan relokasi rumah perlu pendekatan yang lebih terhadap masyarakat lokal.
6) Perlunya peningkatan SDM tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mensinkronkan data by name by

address yang dibutuhkan dalam tiap penanganan ataupun keterisian form kegiatan berdasarkan hasil survey di lapangan. Baik data di Provinsi maupun sebarannya di Kabupaten/Kota.

7) Kondisi kendala pembayaran di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, menjadikan pembayaran untuk Pengawasan pelaksanaan pembangunan rumah bagi korban bencana tidak dapat direalisasikan. sehingga pembayaran atau realisasi untuk anggaran kegiatan SPM ini hanya sampai 86%.

c. Solusi Bidang Perumahan Rakyat

1) Perlunya peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM di bidang Perumahan yang lebih intensif melalui pembinaan dan pelatihan.
2) Kolaborasi terkait data *by name by address* terutama pada penerima manfaat yang telah ditetapkan pada dtsen secara nasional.

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

a. Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi capaian dari pelaksanaan SPM bidang Trantibumlinmas di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 dilaporkan pada tabel berikut:

Tabel 2.109
Realisasi Capaian Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00 %**
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	393	393	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU BARANG/JASA/ SDM) YANG HARUS DILAYANI/ DIPENUHI					100.00 %
	1 . Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Unit	20	20	0.00	100.00 %
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam	Dokumen	6	6	0.00	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023					
	3 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	20	20	0.00	100.00 %
	4 . Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Dokume n	1	1	0.00	100.00 %
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	orang	1	0	1.00	100.00 %
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	orang	1	0	1.00	100.00 %

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

b. Permasalahan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Pencapaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2025 pada Perangkat Daerah Satpol-PP Provinsi Kalimantan Utara belum maksimal sehingga perlu menindaklanjuti beberapa permasalahan. Adapun beberapa permasalahan adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya Personel yang memiliki keahlian dan ketrampilan sesuai standar pelayanan; dan
2) Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung tupoksi guna mendapatkan capaian SPM.
3) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki peta rawan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan peta rawan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) sebagai acuan dalam mendata warga negara yang berada pada radius 0–50 meter dari lokasi penegakan Perda. Oleh karena itu, pada tahun 2025 proses pendataan warga negara masih dilakukan secara manual atau melalui data dari RT dan RW.
4) Dalam proses perencanaan dan perhitungan kebutuhan anggaran, sering kali muncul permasalahan berupa ketidaksesuaian antara hasil perhitungan kebutuhan anggaran dengan kemampuan keuangan daerah.
5) Terdapat kendala dalam menentukan prioritas warga negara yang menjadi sasaran pelayanan SPM oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara, khususnya dalam mengidentifikasi warga negara yang tergolong tidak mampu.
6) Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan SPM di Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga tidak seluruh subkegiatan SPM dapat terakomodasi dalam penganggaran.
7) Perbedaan karakteristik dan kondisi geografis wilayah di Provinsi Kalimantan Utara menyebabkan pelaksanaan kegiatan

SPM menjadi kurang optimal.

c. Solusi Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Adapun solusi atau tindaklanjut yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Diperlukan pelatihan/penyegaran bimtek pelayanan prima kepada petugas secara berkelanjutan; dan
2) Diperlukan tambahan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pencapaian SPM.

d. Bidang Sosial

a. Realisasi Capaian Pelaksanaan SPM Bidang Sosial

Realisasi capaian dari pelaksanaan SPM bidang Sosial di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 dilaporkan pada tabel berikut:

Tabel 2.110
Realisasi Capaian Pelaksanaan SPM Bidang Sosial Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					**100.00 %**
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	18	18	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	18	18	0	100.00 %
	(daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)					
						100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	2 . Penyediaan sandang *(berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)*	Orang	18	18	0	100.00 %
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses *(daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)*	Orang	18	18	0	100.00 %
	4 . Penyediaan alat bantu *(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan alat bantu lainnya sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas termasuk pemeliharaan alat)*	Orang	18	18	0	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti *(obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)*	Orang	18	18	0	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	18	18	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	(diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial)					
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri *(diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)*	Orang	18	18	0	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK *(dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)*	Orang	18	15	3	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	18	18	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga *(pencarian keluarga Penyandang Disabilitas Telantar untuk tujuan reunifikasi)*	Orang	18	18	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga *(pemulangan dan penyatuan kembali Penyandang Disabilitas Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)*	Orang	18	18	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	307	307	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Pengasuhan *(upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan yang terbaik bagi anak)*	Orang	307	307	0	100.00 %
	2 . Penyediaan permakanan *(daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)*	Orang	307	307	0	100.00 %
	3 . Penyediaan sandang *(berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)*	Orang	124	124	0	100.00 %
	4 . Penyediaan asrama yang mudah diakses *(daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)*	Orang	307	307	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti *(obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)*	Orang	307	307	0	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial *(diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial)*	Orang	307	307	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri *(diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)*	Orang	307	307	0	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak *(dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)*	Orang	0	0	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	307	307	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga *(pencarian keluarga anak Telantar untuk tujuan reunifikasi)*	Orang	307	307	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga *(pemulangan dan penyatuan kembali anak Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)*	Orang	307	307	0	100.00 %
	12 . Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti *(Akses layanan kepada Anak Terlantar yang disediakan melalui keluarga asuh, perwalian, atau pengangkatan anak, Identifikasi calon keluarga pengganti bagi Anak Telantar yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan, dan/atau pendampingan dalam keluarga berdasarkan asesmen Pekerja Sosial)*	Orang	0	0	0	100.00 %
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	44	44	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/ SDM) YANG HARUS DILAYANI/ DIPENUHI					100.00 %
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	44	44	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	(daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)					
	2 . Penyediaan sandang *(berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)*	Orang	42	42	0	100.00 %
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses *(daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)*	Orang	41	41	0	100.00 %
	4 . Penyediaan alat bantu *(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)*	Orang	39	39	0	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti *(obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)*	Orang	39	39	0	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	39	39	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	(diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial)					
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri *(diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)*	Orang	39	39	0	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK *(dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)*	Orang	0	0	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	44	44	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga *(pencarian keluarga lanjut usia Telantar untuk tujuan reunifikasi)*	Orang	25	25	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga *(pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)*	Orang	39	39	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	12 . Pemulasaraan *(proses persiapan dan perawatan jenazah termasuk tindakan pembersihan, pemakaian kain kafan dan pelaksanaan ritual tertentu sesuai dengan agama Lanjut Usia Telantar)*	Orang	5	5	0	100.00 %
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	15	15	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Penyediaan permakanan *(daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)*	Orang	15	15	0	100.00 %
	2 . Penyediaan sandang *(berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)*	Orang	15	15	0	100.00 %
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses *(daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta*	Orang	15	15	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)					
	4 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti *(obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)*	Orang	15	15	0	100.00 %
	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial *(diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/ gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial)*	Orang	15	15	0	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri *(diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)*	Orang	15	15	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	15	15	0	100.00 %
	(bimbingan keterampilan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gelandangan dan pengemis dalam hal tertentu yang dapat					

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	berguna bagi dirinya dan lingkungan sosialnya)					
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak *(dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)*	Orang	0	0	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	15	15	0	100.00 %
	10 . Pemulangan ke daerah asal *(pemulangan ke daerah asal sampai ibukota daerah asal Kabupaten/Kota)*	Orang	15	15	0	100.00 %
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi					100.00 %
Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan) Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)				-100%	100.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Format Tahapan		Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)			100.00 %
	1.PENDATAAN					100.00 %
	FORM 6.A.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS					100%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	FORM 6.A.2 REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DI DALAM PANTI DAN/ATAU LEMBAGA BAIK MILIK PEMERINTAH MAUPUN MASYARAKAT PROVINSI :					100%
	FORM 6.A.3 REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DI LUAR PANTI DAN/ATAU LEMBAGA (BERBASIS KELUARGA/MASYARAKAT/KOMUNITAS) PROVINSI					100%
	FORM 6.A.4 REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI					100%
	FORM 6.A.5 REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA PROVINSI					100%
	FORM 6.A.6 DATA DAN REKAPITULASI JUMLAH SUMBERDAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL (SDM KESOS) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA					100%
	FORM 6.A.7 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR					100%
	PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI					
	2.PERHITUNGAN					100.00 %
	FORM 6.B.1 PENGHITUNGAN PENYANDANG DISABILITAS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI					100%
	FORM 6.B.2 PENGHITUNGAN ANAK TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI					100%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	FORM 6.B.3 PENGHITUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI					100%
	FORM 6.B.4 PENGHITUNGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI					100%
	FORM 6.B.5 PENGHITUNGAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI WILAYAH PROVINSI					100%
	3.PERENCANAAN					100.00 %
	FORM 6.C.1 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI PROVINSI					100%
	FORM 6.C.2 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG ANAK TERLANTAR DALAM PANTI					100%
	FORM 6.C.3 RENCANA PEMENUHAN LANSIA TERLANTAR DALAM PANTI					100%
	FORM 6.C.4 RENCANA PEMENUHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS LANSIA DALAM PANTI					100%
	FORM 6.C.5 RENCANA PEMENUHAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL DIWILAYAH PROVINSI					100%

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

b. Permasalahan Pencapaian SPM Bidang Sosial

Penerapan SPM pada bidang sosial masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi optimalisasi pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat. Beberapa permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data
   a) Masih sulitnya mengumpulkan data BNBA yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan karena akses yang belum terjangkau imbas luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
   b) Masih sulitnya mengumpulkan data BNBA yang sesuai dengan data yang terfilter didalam Data DTKS.
   c) Masih sulitnya mengumpulkan data populasi bagi penerima layanan di Provinsi Kalimantan Utara sehingga penargetan tidak dapat dilakukan secara aktual.
   d) Pengumpulan data BNBA yang dilakukan secara manual membuat rekap data yang dimiliki dapat berubah dan kurang terintegrasi secara baik.
   e) Ketidakpemilikan UPT. Dinas Sosial Provinsi membuat harus mengumpulkan data secara manual melalui data dari lembaga-lembaga kesejahteraan sosial milik swasta sebagai daftar penerima layanan.
   f) Pada pengumpulan data dibagian rehabilitasi gelandangan dan pengemis, provinsi kalimantan utara tidak memilik panti milik swasta maupun pemerintah sehingga pengumpulan data tidak dapat dilakukan sehingga mengharuskan provinsi kalimantana utara membuat surat pernyataan ketidakpemiilikan panti sosial untuk gelandagan dan pengemis.
   g) Sulitnya mendapatkan data yang akurat dari kabupaten/kota se- Provinsi Kalimantan Utara terkait jumlah korban bencana yang menerima bantuan pada indikator perlindungan sosial korban bencana alam dan

sosial provinsi.

2) Perhitungan Kebutuhan
   a) Masih kurangnya pemahaman terkait pengisian tahapan perhitungan kebutuhan yanng harus dianggarkaan pada dokumen perencanaan.
   b) Perhitungan kebutuhan yang sudah dihitung tidak akan sesuai dengan kesanggupan anggaran yang dimiliki oleh daerah.
3) Perencanaan dan Penganggaran
   a) Anggaran untuk penerapan SPM bidang Sosial khususnya indikator perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi dirasa tidak dapat memenuhi keseluruhan indikator tersebut, sebagaimana diketahui kab/kota di Provinsi Kalimantan Utara adalah daerah rawan bencana yang setiap tahun selalu terjadi bencana alam maupun sosial.
   b) Anggaran SPM Bidang Sosial khususnya bidang rehabilitasi sosial sangat minim, sehingga pemutakhiran data sangat sulit di lakukan karena persebaran penduduk di Kalimantan Utara yang sangat luas membuat pendataan harus di lakukan dengan memakan biaya yang cukup besar terlebih untuk transportasi. Hal ini menyebabkan perencanaan pemberian bantuan sosial harus diproses menyesuaikan ketersediaan anggaran yang diberikan yang menyebabkan pemenuhan SPM berjalan kurang optimal.
   c) Ketersediaan data yang dimiliki sebagai dasar penganggaran tidak mempengaruhi pemberian anggaran diberikan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

4) Pelaksanaan

Pelaksanaan pemenuhan SPM tidak dapat menjangkau secara keseluruhan populasi penerima layanan dikarenakan anggaran yang terbatas.

a) Belum maksimalnya penggunaan data sehingga penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kabupaten/kota sehingga menjadi penghambat dalam penyusunan program dan distribusi kegiatan untuk kabupaten/ kota.
b) Ketidakpemilikan panti milik provinsi menjadi salah satu penyebab dalam pemenuhan pelaksanaan penerima layanan dasar sehingga setiap pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar ini bergantung pada lembaga kesejahteraan sosial miliki swasta sehingga menyebabkan penerima layanan tidak dapat dilakukan secara optimal.

5) Lain-lain

a) Banyaknya ketegori indikator kinerja yang tidak dapat ditutup mutu layanannya sehingga mempengaruhi total capaian.
b) Pengaruhnya pengisian angka 0 pada indikator pencapaian sehingga mempengaruhi total pencapaian.
c) Masih terdapatnya perubahan target pada indikator lanjut usia hal, baik itu permakanan, sandang, pembekalan kesehatan, dan pemulasaran hal ini dikarenakan adanya Lansia yang meninggal seiring berjalannya waktu tahun berjalan, sehingga tim pengampu harus merubah target dan menyesuaikan dengan jumlah lansia yang menerima bantuan berdasarkan kondisi faktual di dalam panti lansia.

c. Solusi Pencapaian SPM Bidang Sosial

Adapun solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan SPM tersebut perlu

dirumuskan secara komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Melakukan sinkronisasi satuan data pada tiap Sub kegiatan yang akan dihimpun sehingga membuat tahapan pengumpulan data dapat berjalan dengan lebih baik.
2) Perlu adanya penambahan dukungan personal dan Alokasi anggaran sehingga membuat pelayanan dasar dapat berjalan lebih optimal.
3) Meningkatkan sinkronisasi dan sistem pelaporan kinerja dinas sosial kabupaten/kota se Kalimantan Utara.
4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan serta mengikutsertkan pegawai yang ada di lingkup Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara pada setiap kegiatan pelatihan/diklat baik ditingkat daerah maupun nasional yang membahas terkait urusan SPM.
5) Membuat SK Penetapan Target sebelum tahun berjalan dimulai dan membuat SK Perubahan Target ketika tahun berjalan untuk menjadi pemenuhan dan pelaksanaan target di setiap indikator terlaksana sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2025

Evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2025 menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara secara umum berada pada tren yang positif. Hal ini ditandai dengan membaiknya sejumlah indikator makro dan sosial ekonomi utama. Perbaikan tersebut mencerminkan efektivitas kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan, meskipun pada saat yang sama masih dijumpai sejumlah tantangan struktural yang perlu ditangani secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Perbandingan capaian antartahun memperlihatkan bahwa sebagian besar indikator strategis mengalami peningkatan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Namun demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata nasional maupun provinsi lain, posisi relatif Kalimantan Utara masih berada pada kelompok menengah ke bawah, khususnya pada indikator pembangunan manusia, pendidikan, dan kontribusi ekonomi regional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah telah bergerak ke arah yang benar, tetapi laju peningkatannya belum cukup cepat untuk mengejar ketertinggalan.

Beberapa indikator kinerja yang dapat mewakili gambaran kondisi daerah secara umum diuraikan sebagai berikut:

a. Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan dari 73,41 pada Tahun 2024 menjadi 74,04 pada Tahun 2025. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Namun demikian, capaian IPM Kalimantan Utara masih berada di bawah rata-rata nasional, serta tertinggal dibandingkan beberapa provinsi lain di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Dari sisi pendidikan, indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari 13,21 tahun pada 2024 menjadi 13,31 tahun pada 2025, sementara Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 9,35 tahun menjadi 9,44 tahun pada periode yang sama. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan akses pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Namun, capaian tersebut masih mencerminkan keterbatasan dalam mendorong keberlanjutan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, khususnya di wilayah perbatasan dan pedalaman.

Secara keseluruhan, peningkatan indikator pembangunan manusia di Kalimantan Utara telah menunjukkan arah yang positif, tetapi belum cukup kuat untuk mempersempit kesenjangan antarprovinsi, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang lebih fokus pada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan.

b. Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara mengalami perlambatan dari 4,98 persen pada 2024 menjadi 4,56 persen pada 2025. Penurunan ini menunjukkan dinamika ekonomi daerah yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun struktur ekonomi yang masih bergantung pada sektor tertentu. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 yang berada pada kisaran ±5,11 persen, kinerja ekonomi Kalimantan Utara masih relatif lebih rendah. Hal ini menandakan perlunya diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor bernilai tambah agar pertumbuhan ekonomi daerah lebih stabil dan kompetitif.

Struktur ekonomi Kalimantan Utara masih didominasi oleh sektor primer, khususnya pertambangan dan penggalian serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dominasi sektor-sektor tersebut menyebabkan perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan permintaan global. Oleh karena itu, evaluasi kinerja ekonomi menegaskan pentingnya percepatan transformasi ekonomi melalui hilirisasi, pengembangan industri pengolahan, dan diversifikasi sektor ekonomi non-ekstraktif.

Nilai PDRB per kapita Kalimantan Utara meningkat dari Rp78,6 juta pada 2024 menjadi Rp83,7 juta pada 2025, menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pendapatan ekonomi masyarakat. Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian nasional sebesar Rp208,21 juta, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar, yang mencerminkan bahwa tingkat produktivitas ekonomi daerah masih relatif lebih rendah. Hal ini menegaskan perlunya transformasi ekonomi menuju sektor industri dan jasa bernilai tambah tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih signifikan.

c. Ketenagakerjaan dan Kemiskinan

Dari aspek ketenagakerjaan, perkembangan indikator Tahun 2025 menunjukkan dinamika yang cukup positif, meskipun belum sepenuhnya merata antar kabupaten/kota. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) relatif stabil, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

menunjukkan kecenderungan menurun di beberapa wilayah. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan serapan tenaga kerja, terutama pada sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan fisik dan jasa.

Nilai TPT Kalimantan Utara menunjukkan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja, dengan penurunan dari 3,90 persen pada 2024 menjadi 3,85 persen pada 2025. Capaian ini jauh lebih baik dibandingkan tingkat nasional yang mencapai 4,85 persen, menunjukkan bahwa kemampuan penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Utara relatif lebih kuat. Kondisi ini mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih mampu menciptakan kesempatan kerja, meskipun tantangan ke depan tetap pada peningkatan kualitas pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja.

Persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan dari 6,32 persen pada Maret tahun 2024 menjadi 5,54 persen pada Maret 2025, atau turun sebesar 0,78 poin. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah daerah mulai memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dibandingkan dengan kondisi nasional, tingkat kemiskinan Kalimantan Utara juga berada jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,47 persen pada tahun 2025, dengan selisih 2,93 poin.

d. Pemerataan Pembangunan Wilayah

Evaluasi terhadap pemerataan pembangunan menunjukkan bahwa kesenjangan antardaerah masih menjadi isu penting di Kalimantan Utara. Perbedaan capaian IPM, pendidikan, kemiskinan, dan kinerja ekonomi antar kabupaten/kota relatif signifikan, terutama antara wilayah perkotaan dan wilayah perbatasan atau pedalaman. Faktor geografis, keterbatasan infrastruktur dasar, serta akses terhadap layanan publik menjadi penyebab utama terjadinya ketimpangan tersebut.

Indeks Gini Kalimantan Utara menunjukkan perbaikan distribusi pendapatan, dengan penurunan dari 0,259 pada 2024 menjadi 0,251 pada 2025. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan nasional yang berada pada 0,363, yang berarti tingkat ketimpangan pendapatan di Kalimantan Utara

relatif lebih baik dan lebih merata. Kondisi ini menjadi modal positif bagi pembangunan inklusif, meskipun tetap perlu dijaga agar pertumbuhan ekonomi tidak meningkatkan kesenjangan antarwilayah maupun antar kelompok masyarakat.

Pada tabel di bawah, disajikan data capaian pembangunan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 dan 2025 yang dibandingkan dengan nasional. Tabel ini memberi gambaran secara umum mengenai perkembangan pembangunan di Kalimantan Utara.

Tabel 2.111
Capaian Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara

Indikator	Kaltara 2024	Kaltara 2025	Nasional 2025
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,41	74,04	75,90
Pertumbuhan Ekonomi (c to c) (%)	4,98	4,56	5,11
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,90	3,85	4,85
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,32	5,54*	8,47*
Indeks Gini	0,259	0,251	0,363
PDRB per Kapita (juta rp)	78,6	83,7	208,21

Sumber: Diolah dari BPS RI, 2026

Ket.: * menggunakan data Maret 2025

2.2.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun 2025 dapat diukur melalui pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD, pencapaian IKU Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik, dimana sebagian besar indikator mampu mencapai lebih dari 90 persen dari target yang ditetapkan.

Tabel 2.112
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
INDIKATOR TUJUAN					
1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,34	3,29	98,50
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,80	4,56	95,00
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	83,00	80,3	96,75
4	Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	51,25	49,83	97,23
5	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	46,96	63,82*	135,90
INDIKATOR SASARAN					
1	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	70,47	75,05*	106,50
2	Indeks Ekonomi Biru	Angka	36,59	33,47*	91,47
3	Indeks Modal Manusia	Angka	0,56	0,55	98,21
4	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	40,58	45,58	112,32
5	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	79,24	87,23	110,08
6	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	57,87	51,81*	89,53
7	Indeks Pembangunan Gender	Angka	89	89,38	100,43
8	Nilai SAKIP	Angka	72,52	71,42	98,48
9	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	74,997	74,997*	100,00
10	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,25	3,86	90,82
11	Indeks Inovasi Daerah	Angka	58,45	50,84	86,98
12	Survei Penilaian Integritas KPK	Angka	70	73,14	104,49
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,69	3,85	95,66
14	Tingkat Kemiskinan	%	5,07	5,54	92,11
15	Indeks Gini	Angka	0,256	0,251	101,95
16	Persentase desa wilayah perbatasan yang berstatus maju dan mandiri	%	22,06	22,06	100,00
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	77,77	85,99	110,57
18	Indeks Risiko Bencana	Angka	157,62	121,35	123,01

Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Kalimantan Utara Tahun 2025, Bapperida

Ket: * data tahun 2024

Pada kelompok indikator tujuan, capaian tertinggi dicapai oleh Indeks Daya Saing Daerah sebesar 98,50 persen, Indeks Kesejahteraan Sosial sebesar 97,23 persen, dan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 96,75 persen. Sementara itu, Laju Pertumbuhan Ekonomi terealisasi sebesar

4,56 persen dari target 4,80 persen atau mencapai 95,00 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah mampu menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat meskipun masih menghadapi tantangan perlambatan ekonomi global dan nasional. Adapun indikator Penurunan Intensitas Emisi GRK belum dapat dievaluasi karena realisasinya masih menunggu rilis resmi dari Kementerian PPN/Bappenas.

Selanjutnya, Indeks Infrastruktur Daerah mencatat capaian 112,32 persen, jauh melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur di Kalimantan Utara. Selain itu, Indeks Modal Manusia mencapai 98,21 persen, menunjukkan perkembangan positif kualitas kesehatan, pendidikan, dan produktivitas penduduk. Di sisi lain, Indeks Ekonomi Hijau dan Indeks Ekonomi Biru masing-masing mencapai 97,60 persen dan 91,47 persen, yang mengindikasikan bahwa transformasi menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan telah berjalan meskipun masih memerlukan penguatan, khususnya pada sektor ekonomi biru yang berbasis kelautan dan pesisir.

Dalam aspek sosial dan budaya, capaian yang sangat menonjol terlihat pada Indeks Kerukunan Umat Beragama yang mencapai 87,23 atau 110,08 persen dari target. Kondisi ini menunjukkan terpeliharanya kehidupan sosial yang harmonis dan toleran di tengah keberagaman masyarakat Kalimantan Utara. Indeks Pembangunan Gender juga berhasil melampaui target dengan capaian 100,43 persen, mengindikasikan semakin baiknya kesetaraan akses dan kesempatan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, Indeks Pembangunan Kebudayaan hanya mencapai 89,53 persen sehingga menjadi salah satu indikator yang masih memerlukan perhatian untuk memperkuat pelestarian nilai budaya dan identitas daerah di tengah dinamika pembangunan dan modernisasi.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, kinerja yang cukup baik ditunjukkan oleh Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencapai target secara penuh (100 persen) dan Survei Penilaian Integritas KPK yang

melampaui target dengan tingkat capaian 104,49 persen. Hal ini menunjukkan semakin kuatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. Namun demikian, beberapa indikator masih memerlukan perbaikan, seperti Indeks Pelayanan Publik yang mencapai 90,82 persen, Nilai SAKIP sebesar 98,48 persen, dan terutama Indeks Inovasi Daerah yang hanya mencapai 86,98 persen. Capaian tersebut menunjukkan perlunya penguatan budaya inovasi, transformasi digital, serta peningkatan kualitas pelayanan publik agar mampu mendukung percepatan pembangunan daerah secara lebih efektif.

Pada aspek kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup, beberapa indikator menunjukkan hasil yang sangat baik. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 110,57 persen dan Indeks Risiko Bencana mencapai 123,01 persen, yang menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana. Persentase desa wilayah perbatasan yang berstatus maju dan mandiri juga berhasil mencapai target 100 persen, mencerminkan kemajuan pembangunan kawasan perbatasan. Namun demikian, indikator Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka masih belum mencapai target dengan tingkat capaian masing-masing 92,11 persen dan 95,66 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas lingkungan, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan terus membaik, tantangan utama pembangunan Kalimantan Utara masih terletak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan percepatan penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.

2.2.3 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan sekumpulan indikator yang mewakili penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik yang bersifat makro maupun terkait urusan pemerintahan daerah dalam bentuk Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pencapaian target IKD tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan hasil yang relatif baik pada sejumlah

indikator strategis, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Tabel 2.113
Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**				
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	77,02	72,56	94,21
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	14,23	14,48	98,24
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/ kapita	1.686,3	1.006*	59,66
4	Intensitas Energi Primer	SBM/ Rp Miliar	115,0	37,0098*	32,18
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	77,77	85,99	110,57
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	48,32	0	0,00
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	6,00	4,34	72,33
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	16,00	48,04	300,25
9	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	91,00	N/A	-
10	Persentase Penurunan Emisi GRK				
	a. Kumulatif	%	34,65	13,91*	40,14
	b. Tahunan	%	45,93	Belum dirillis oleh Kementerian PPN/Bappenas	-
11	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	46,96	63,82*	135,90
12	Indeks Risiko Bencana	Indeks	157,62	121,35	123,01
13	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,57	0,55*	96,49
14	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	7,95	1,39	17,48
15	Kepadatan Penduduk	Orang/ km2	10,00	10,21	102,10
16	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	0,434	Belum dirilis oleh Kementerian LH	-

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,80	4,56	95,00
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,07	5,54	90,73
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	227,10	208,21	91,68
4	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0,70	0,65	92,86
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,69	3,85	95,66
6	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	50,56	51,56	101,98
7	Indeks Gini	Angka	0,256	0,251	101,95
8	Indeks Modal Manusia	Angka	0,56	0,55	98,21
9	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,96	73,68	99,62
10	Angka Kematian Ibu (AK)	Angka	122	77,77	136,25
11	Angka Kematian Balita (AKB)	Angka	15	10,73	128,47
12	Cakupan Imunisasi Bayi	%	85	56*	65,88
13	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	%	25		-
14	Prevalensi Stunting	%	15,50	9,5	138,71
15	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):				
	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	90,00	66,84	74,27
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	90,00	68,66	76,29
16	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	98,60	74,32	75,38
17	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
	i) Literasi Membaca	%	20,00	20	100,00
	ii) Numerasi	%	20,00	0	
18	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				0,00
	i) Literasi Membaca	%	44,82	35,72	79,70
	ii) Numerasi	%	32,18	21,72	67,50
19	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,7	9,44	97,32
20	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,32	13,31	99,92
21	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	68,00	35,87	52,75
22	Indeks Literasi Digital	Angka	58,52	48,91**	83,58
23	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	59,22	64,8	109,42
24	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	79,24	87,23	110,08

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
25	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	57,87	51,81*	89,53
26	Indeks Perlindungan Anak	Angka	64,75	71,26*	110,05
27	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	77,50	sudah tidak dirilis oleh Kemenko SDM	-
28	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,43	0,34	120,93
29	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	58,00	63,56	109,59
30	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	14,68	14,5	98,77
31	Persentase desa wilayah perbatasan yang berstatus maju dan mandiri	%	22,06	22,06	100,00
32	Indeks Pencapaian SPM	Angka	98,90	100	101,11
33	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional	%	80,5	74,32	92,32
34	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	36	47	130,56
35	Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	%	25	N/A	-
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Angka Ketergantungan	%	41,79	41,79	100,00
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,63	8,75	101,39
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,75	1,77	101,14
4	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	16.794	20.224	120,42
5	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap Nasional	%	0,06	0,06*	100,00
6	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	%	1,50	1,07*	71,33
7	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	%	99,05	99,04*	99,99
8	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,37	3,86	114,54
9	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,31	0,11*	35,48
10	*Return on Aset* (ROA) BUMD	%	0,97	N/A	-
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,56	69,55	98,57
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	53,56	52,26	97,57
13	Indeks Inovasi Daerah	Angka	58,45	50,84	86,98
14	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	70,47	75,05*	106,50
15	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Angka	36,59	33,47*	91,47
16	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	25,5	30,8*	120,78

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
17	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	6,50	6,40*	98,46
18	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Angka	8,4	8,61*	102,50
19	Kontribusi PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	26,20	28,38	108,32
20	Kontribusi PDRB Ekspor Barang dan Jasa	%	20,32	16,8	82,68
21	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	40,58	45,58	112,32
22	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	74,85	74,86	100,01
23	Persentase Desa Mandiri	%	17,23	17,23	100,00
24	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,70	0,38	54,29
25	Tingkat Inflasi	%	2,50	2,57	97,20
26	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	77,18	52,63*	68,19
27	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	40,00	12,16*	30,40
28	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	18,97	11,20	59,04
29	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	0,23	N/A	-
30	Nilai Transaksi Saham per Kapita Per Provinsi	Rupiah	3.449.809,08	5.967.126,65	172,97
31	Total Kredit/PDRB	%	12,00	12,00	100,00
32	Inklusi Keuangan	%	97,30	80,51	82,74
33	Jumlah Kerjasama Provinsi	Angka	18,00	28	155,56
34	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,49	0,53	108,16
35	Aset Perbankan Syariah/PDRB	%	1,38	0,31	22,46
36	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	2.232	4.978	223,03
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	97,00	96,7*	99,69
2	Indeks Pemdi (Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Angka	3,79	4,45	117,41
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,25	3,86	90,82
4	Indeks Integritas Nasional	Angka	75,22	73,14	97,23
5	Persentase Penegakan Perda	%	95,00	65	68,42
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	92,50	91,9*	99,35
7	Indeks Demokrasi Indonesia	%	79,50	81,07	101,97
8	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,34	3,29	98,50
9	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	68,50	N/A	-
10	Indeks Ketahanan Nasional	Angka	2,55	Belum Rilis	-

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
11	Nilai LPPD	Angka	2,80		-
V					
A	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**				
1	**Bidang Pendidikan**				
1	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	%	79,53	100	125,74
2	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%	75,02	100	133,30
3	Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	73,41	72,81	99,18
4	Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	61,92	60,32	97,42
5	Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	70,84	69,54	98,16
6	Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	60,81	58,61	96,38
7	Rata-rata kompetensi literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	81,99	80,39	98,05
8	Rata-rata kompetensi numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	74,77	74,17	99,20
9	Rata-rata kompetensi literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	81,48	80,98	99,39
10	Rata-rata kompetensi numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	79,20	78,95	99,68
11	Rata-rata kompetensi literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	80,40	79,5	98,88
12	Rata-rata kompetensi numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	71,57	71,07	99,30
13	Tingkat penyerapan lulusan SMK	%	87,20	86,66	99,38
14	Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79,54	70,35	88,45
15	Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMA	Nilai	81,97	71,71	87,48
16	Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMK	Nilai	71,58	70,38	98,32

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
17	Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SDLB	Nilai	72,17	71,67	99,31
18	Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMPLB	Nilai	83,20	82	98,56
19	Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMALB	Nilai	79,80	78,5	98,37
20	Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMA	Nilai	73,65	72,65	98,64
21	Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMK	Nilai	73,45	72,15	98,23
22	Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SDLB	Nilai	74,67	73,67	98,66
23	Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMPLB	Nilai	82,80	81	97,83
24	Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMALB	Nilai	79,50	77,5	97,48
25	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMA	Nilai	60,59	59,09	97,52
26	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMK	Nilai	59,48	57,18	96,13
27	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SDLB	Nilai	68,63	67,33	98,11
28	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMPLB	Nilai	83,90	82,5	98,33
29	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMALB	Nilai	82,10	80,5	98,05
2	**Bidang Kesehatan**				
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	122,00	77,77	136,25
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	15,50	9,5	138,71
3	Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	%	100,00	100	100,00
4	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100,00	100	100,00
5	Persentase pelayanan kesehatan pengurangan risiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB	%	100,00	100	100,00
6	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	%	100,00	100	100,00

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
3	**Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Provinsi	%	35,00	33,57	95,91
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob di wilayah kewenangan Provinsi	%	0,00	0	-
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan Provinsi	%	59,00	59	100,00
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan Provinsi	%	28,81	42,07	146,03
5	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	0,00	0	_
6	Persentase kabupaten/kota yang dibina penyelenggaraan SPAM	%	100,00	100	100,00
7	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	86,17	86,00	99,80
8	Persentase kabupaten/kota yang dibina dalam sistem pengelolaan air limbah domestic	%	100,00	100	100,00
9	Persentase kabupaten/kota yang dibina sistem pengelolaan persampahan	%	0,00	100	_
10	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	%	16,69	47,67	285,62
11	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi	%	90,00	59,23	65,81
12	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	80,00	0	0,00
4	**Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				
1	Persentase warga negara korban bencana provinsi yang memperoleh rumah layak huni	%	3,40	100	2.941,18

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0,00	tidak dapat dilaksanakan	
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	5,75	16,96	294,96
4	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	20,00	20	100,00
5	**Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**				
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100,00	100	100,00
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	95,00	64,71	68,12
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	orang	3,00	3*	100,00
4	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100,00	90*	90,00
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan masyarakat	%	85,00	80*	94,12
6	Presentase Pegawai anggota Satpol PP yang ditingkatkan menjadi pejabat fungsional	%	21,00	N/A	_
7	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	5,00	N/A	_
8	Persentase Dokumen Layanan Pencegahan Kebakaran	%	20,00	N/A	_
9	Persentase Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang sah dan legal	%	0,00	N/A	_
10	Persentase Aparatur pemadam kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	%	0,00	N/A	_
11	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang ditingkatkan untuk mengisi jabatan fungsional	%	0,00	0	_
12	Persentase Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang telah dilakukan pembinaan	%	0,00	N/A	_

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
13	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang sesuai dengan standar	%	15,00	N/A	_
14	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100,00	N/A	_
15	Persentase penanganan pra bencana	%	60,00	100	166,67
16	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100,00	100	100,00
17	Persentase penanganan pasca bencana	%	100,00	100	100,00
18	Persentase Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	20,00	N/A	_
6	**Bidang Sosial**				
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100,00	85,71	85,71
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100,00	42,3	42,30
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100,00	95,35	95,35
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100,00	100	100,00
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan /atau gelandangan dan pengemis di dalam panti yang layak dan sesuai standar	%	100,00	100*	100,00
6	Persentase Pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan /atau gelandangan dan pengemis sesuai standar kompetensi dan/atau layanan	%	100,00	100*	100,00
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	100,00	100	100,00

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana yang disediakan sesuai standar	%	100,00	100*	100,00
9	Persentase pekerja sosial /tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100,00	100*	100,00
10	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100,00	100*	100,00
11	Persentase sarana prasarana bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang disediakan secara layak dan sesuai standar	%	100,00	100*	100,00
12	Persentase Pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	%	100,00	100*	100,00
13	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	45,57	100	219,44
14	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	100,00	100*	100,00
B.	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**				
1	**Bidang Tenaga Kerja**				
1	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	%	100,00	80,56	80,56
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	3,59	3,26*	90,81
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Org	195.015.175	192.958.577 *	98,95
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	4,45	4,75	106,74

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	%	53,20	51,2*	96,24
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	2,66	1,11	41,73
2	**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,00	89,38	100,43
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,42	0,34	80,95
3	Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD	%	3,29	3,4	103,34
4	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100,00	100	100,00
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100,00	100	100,00
3	**Bidang Pangan**				
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	%	100,00	248,48	248,48
2	Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Skor 0-100	86,70	86,2	99,42
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	17,00	10,91	64,18
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	85,00	82,67*	97,26
4	**Bidang Pertanahan**				
1	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	20,03	20,03	100,00
2	Persentase Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	33,33	Tahun 2025 tidak ada kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan mediasi	_

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
3	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu kota atau kabupaten lengkap secara berkualitas	%	40,00	40,00	100,00
4	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	98,16	57,24	58,31
5	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diselesaikan tepat waktu	%	50,00	50,00	100,00
6	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Provinsi	%	44,71	57,24	128,03
7	Persentase jumlah kab/kota yang telah memanfaatkan Peta Nilai Tanah dalam pelayanan BPHTB	%	100,00	100,00	100,00
8	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	%	99,86	99,86	100,00
5	**Bidang Lingkungan Hidup**				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Indeks	77,77	85,99	110,57
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	50,00	44,44	88,88
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi	Indeks	49,42	49,92*	101,01
6	**Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	65	100*	153,85
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	62	70,67*	113,98
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	62	72*	116,13
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	96	98,82*	102,94

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	50	68,05	136,10
6	Jumlah Data Profile Kependudukan yang disusun	%	100	100	100,00
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	10	5*	50,00
7	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**				
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	6,94	17,23	248,27
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	1,57	1,57	100,00
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	20	20	100,00
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	3,01	3,01	100,00
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	1,41	1,41	100,00
8	**Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	%	2,25	2,25	100,00
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	68,00	65,37	96,13
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,46	5,65	45,35
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	25,67	27,6	107,52
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks (skala 0-100)	67,05	69,8	104,10
9	**Bidang Perhubungan**				
1	Konektivitas Provinsi	Rasio	0,13	0,76	584,62
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan daerah	%	48,88	43,72*	89,44
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	100	0	0,00

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
4	Persentase Jumlah Kendaraan Bermotor yang laik jalan	%	73,50	73,18*	99,56
10	**Bidang Komunikasi dan Informatika**				
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	51,80	100	193,05
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	100,00
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	60	100	166,67
11	**Uusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	16,54	13,73	83,01
2	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	0,96	25,53	2.659,38
3	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	0,52	0,32*	61,54
4	Pertumbuhan Wirausaha	%	1,92	1,12*	58,33
12	**Bidang Penanaman Modal**				
1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	%	3,00	-14,66	-488,67
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100,00	77,63	77,63
13	**Bidang Kepemudaan dan Olahraga**				
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi	Indeks	58,00	63,56	109,59
2	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	%	0,12	40	33.333,33
14	**Bidang Statistik**				
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,76	2,76*	100,00
15	**Bidang Persandian**				
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintahan daerah	%	43,12	43,9	101,81
16	**Bidang Kebudayaan**				
1	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	0,36	90,9	25.250,00
2	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	%	0,31	0,26*	83,87

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi di bidang kebudayaan	%	0,48	0,43*	89,58
17	**Bidang Perpustakaan**				
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	73,50	58,89	80,12
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	68,00	35,87	52,75
18	**Bidang Kearsipan**				
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	55,00	49,33	89,69
C	**Urusan Pemerintahan Pilihan**				
1	**Bidang Kelautan dan Perikanan**				
1	Persentase Kawasan konservasi daerah yang operasional	%	33,50	77,58	231,58
2	Produksi Perikanan Tangkap	%	88,00	4,19	4,76
3	Produksi Perikanan Budi Daya	%	81,00	95,85	118,33
4	Produksi Garam	%	0,00	tidak ada potensi	-
5	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	%	85,00	60,45	71,12
2	**Pilihan Bidang Pariwisata**				
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	1,75	1,77	101,14
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang)	%	10,00	-93,75	-937,50
3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,06	0,06*	100,00
4	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	4,00	5,37	134,25
3	**Bidang Pertanian**				
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	2,00	16,64	832,00
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	1,00	7,56	756,00
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	2,00	-0,11	-5,50
4	**Bidang Kehutanan**				
1	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	100,00	100	100,00
2	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB daerah	%	3,34	3,19	95,51

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
3	Persentase Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarkatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan	%	100,00	60,5	60,50
5	**Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**				
1	Persentase cekungan air tanah dalam provinsi yang telah di tetapkan	%	0,00	0*	-
2	Penerimaan Nilai perolehan air tanah telah ditetapkan melalui perda/pergub	ada/tidak ada	ada	Ada*	100,00
3	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan	%	62,00	43,9	70,81
6	**Bidang Perdagangan**				
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah per provinsi	%	3,8	2,8*	73,68
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen per Provinsi	%	100	100	100,00
3	Nilai Ekspor Barang Per Provinsi	%	93,48	55,26	59,11
7	**Bidang Perindustrian**				
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi:				
	1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	%	3,50	3,37*	96,29
	2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi	%	8,63	8,75	101,39
	3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	Ribu	33.326	27.192*	81,59
	4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	USD Milyar	0,50	0,48*	96,00
	5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	Rp Triliun	15,84	14,7*	92,80
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	19,00	18,74*	98,63
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan	%	20,00	19,44*	97,20

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
	Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan				
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	%	80,00	100*	125,00
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	80,00	100*	125,00
8	**Bidang Transmigrasi**				
1	Nilai Rata-rata Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans)	Nilai	62,30	59,12*	94,90
2	Pendapatan Perkapita di Wilayah Transmigrasi	Rp	2.989.092,67	2.858.461*	95,63
D	**Urusan Penunjang Pemerintahan**				
1	**Perencanaan**				
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100,00	100*	100,00
2	**Keuangan**				
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	28,92	20,26	70,06
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	30,00	31,14	103,80
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	92,22	80	86,75
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	5,95	5,95*	100,00
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	40,00	37,65	94,13
6	Persentase Penurunan SILPA	%	-88,45	-88,28*	99,81
3	**Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**				
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	74,50	N/A	-
4	**Penelitian dan Pengembangan**				
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	38,00	13*	34,21

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	Persentase jumlah inovasi daerah yang dilaporkan dalam *Innovative government award*	%	50,00	43,62	87,24
5	**Pengawasan**				
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori /Opini	WTP	WTP*	100,00
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai (1-5)	3,10	3,11	100,32
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai (2-5)	3,10	3,04	98,06
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai (1-5)	3,00	3,07	102,33
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	80,00	74,29	92,86
6	**Fungsi Pengadaan**				
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	poin	19,25	22	114,29
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	poin	30,00	30	100,00
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	poin	40,00	40	100,00
7	**Hubungan dengan Perwakilan Daerah**				
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100,00	Tepat	100,00
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	78,00	37,5	48,08
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	78,00	68,18*	87,41
8	**Pelayanan Publik**				
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	92,93	76,1	81,89

Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Kalimantan Utara Tahun 2025, Bapperida

Berdasarkan data pada tabel di atas, pada aspek geografi dan demografi, capaian yang menonjol terlihat pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencapai 85,99 atau 110,57 persen dari target, serta timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah yang mencapai 48,04 persen atau 300,25 persen dari target yang ditetapkan. Selain itu, Indeks Risiko Bencana menunjukkan kinerja yang baik dengan realisasi 121,35 dibandingkan target 157,62, yang mengindikasikan penurunan tingkat risiko bencana di Kalimantan Utara. Sebaliknya, indikator akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum

perpipaan, konsumsi listrik per kapita, dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) masih belum mencapai target yang diharapkan.

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, beberapa indikator utama menunjukkan perkembangan yang positif. Prevalensi stunting berhasil ditekan hingga 9,5 persen atau mencapai 138,71 persen dari target, sementara angka kematian ibu dan angka kematian balita juga berada di bawah target yang ditetapkan sehingga menghasilkan tingkat capaian masing-masing sebesar 136,25 persen dan 128,47 persen. Di sisi lain, indikator ekonomi masyarakat seperti laju pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,56 persen dari target 4,80 persen, sedangkan tingkat kemiskinan masih berada pada angka 5,54 persen atau lebih tinggi dibanding target 5,07 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan kualitas hidup masyarakat belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan ekonomi secara optimal.

Pembangunan sumber daya manusia menunjukkan capaian yang cukup beragam. Indeks Ketimpangan Gender membaik dengan realisasi 0,34 dibanding target 0,43, menghasilkan capaian sebesar 120,93 persen. Indeks Pembangunan Pemuda mencapai 63,56 atau 109,59 persen dari target, sedangkan Indeks Perlindungan Anak mencapai 71,26 atau 110,05 persen. Namun demikian, masih terdapat tantangan pada Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang hanya mencapai 35,87 atau 52,75 persen dari target, serta Indeks Literasi Digital yang baru mencapai 83,58 persen dari target yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan literasi masyarakat dan transformasi digital sebagai bagian dari peningkatan kualitas SDM daerah.

Pada aspek daya saing daerah, capaian positif ditunjukkan oleh rasio kewirausahaan daerah yang mencapai 3,86 persen atau 114,54 persen dari target, jumlah wisatawan mancanegara yang mencapai 20.224 orang atau 120,42 persen dari target, serta porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer yang mencapai 30,8 persen atau 120,78 persen dari target. Selain itu, Indeks Infrastruktur Daerah juga melampaui target dengan capaian 112,32 persen. Kinerja tersebut menunjukkan adanya

peningkatan daya saing ekonomi daerah yang didukung oleh sektor pariwisata, infrastruktur, dan energi berkelanjutan.

Meskipun demikian, sejumlah indikator daya saing masih menghadapi kendala. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) hanya mencapai 71,33 persen dari target, sedangkan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB baru mencapai 35,48 persen dari target yang ditetapkan. Demikian pula, inklusi keuangan, kontribusi ekspor barang dan jasa, serta persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja sesuai bidang keahliannya masih berada di bawah target. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penguatan sektor usaha produktif, akses pembiayaan, dan keterkaitan antara pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja masih menjadi tantangan pembangunan daerah.

Pada aspek pelayanan umum, capaian terbaik terlihat pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencapai nilai 4,45 atau 117,41 persen dari target, serta Indeks Demokrasi Indonesia yang mencapai 101,97 persen dari target. Kinerja ini menunjukkan adanya kemajuan dalam tata kelola pemerintahan, transformasi digital, dan kualitas demokrasi di daerah. Selain itu, Persentase Capaian Aksi HAM dan Indeks Reformasi Hukum juga mendekati target yang ditetapkan.

Di sisi lain, beberapa indikator pelayanan umum masih memerlukan perhatian serius, terutama persentase penegakan perda yang hanya mencapai 68,42 persen dari target serta Indeks Pelayanan Publik yang baru mencapai 90,82 persen dari target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan regulasi daerah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat masih perlu terus ditingkatkan agar sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dijalankan pemerintah daerah.

Secara sektoral, urusan pemerintahan menunjukkan sejumlah capaian yang sangat baik. Pada bidang pendidikan, angka partisipasi sekolah usia 16–18 tahun dan partisipasi penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus masing-masing mencapai 125,74 persen dan 133,30 persen dari target. Pada bidang kesehatan, keberhasilan penurunan stunting dan angka kematian ibu menjadi capaian yang menonjol. Sementara itu, pada bidang lingkungan hidup, Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup mencapai 85,99 atau 110,57 persen dari target. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia, pelayanan dasar, serta kualitas lingkungan hidup tetap menjadi sektor yang memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

2.2.4 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025

Berdasarkan rekapitulasi capaian perangkat daerah pada Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Kalimantan Utara Triwulan IV Tahun 2025 yang bersumber dari SIPD, rata-rata capaian indikator program tingkat pemerintah daerah mencapai 66,02 persen, sedangkan rata-rata capaian indikator subkegiatan sebesar 78,18 persen. Dari pagu RKPD sebesar Rp3,193 triliun, realisasi keuangan tercatat sebesar Rp2,348 triliun atau 73,51 persen. Capaian subkegiatan yang lebih tinggi daripada indikator program menunjukkan bahwa pelaksanaan keluaran operasional relatif telah berjalan, tetapi belum seluruhnya terkonversi menjadi hasil program. Kondisi ini juga mengindikasikan masih adanya persoalan dalam pengisian, pengukuran, atau konsistensi target indikator program pada sejumlah perangkat daerah.

Kinerja antarperangkat daerah memperlihatkan kesenjangan yang cukup lebar. Sejumlah perangkat daerah mampu mencapai 100 persen pada indikator program sekaligus indikator subkegiatan, antara lain Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Kepegawaian Daerah, dan Dinas Kesehatan. Namun, capaian indikator yang tinggi tidak selalu diikuti realisasi keuangan yang seimbang. Dinas Kesehatan, misalnya, mencatat capaian indikator program dan subkegiatan masing-masing 100 persen, tetapi realisasi keuangannya hanya 20,57 persen. Perbedaan yang sangat besar tersebut perlu ditelaah untuk memastikan kesesuaian antara definisi target kinerja, periode pengukuran, sumber data realisasi, serta keterkaitan antara keluaran kegiatan dan penggunaan anggaran.

Pada sisi lain, rendahnya nilai indikator program pada beberapa perangkat daerah tidak dapat serta-merta diartikan bahwa seluruh

program gagal dilaksanakan. Terdapat perangkat daerah yang mencatat indikator program 0 persen, tetapi indikator subkegiatannya relatif tinggi, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan capaian subkegiatan 100 persen, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100 persen, serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa 100 persen. Pola tersebut mengindikasikan bahwa indikator program kemungkinan belum memiliki target, belum diinput, atau belum terukur secara memadai dalam sistem evaluasi.

Realisasi keuangan juga menunjukkan beberapa nilai di atas 100 persen, yaitu Sekretariat DPRD sebesar 121,91 persen, Biro Perekonomian 104,54 persen, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 102,76 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa nilai realisasi yang dicatat melampaui pagu RKPD pada tabel rekapitulasi. Kondisi ini perlu direkonsiliasi dengan dokumen penganggaran terakhir untuk memastikan apakah terjadi perubahan pagu yang belum diperbarui dalam RKPD, penggunaan basis pagu yang berbeda, atau ketidaksesuaian penarikan data antara sistem perencanaan dan sistem keuangan.

Pada tabel di bawah dimuat rekapitulasi capaian SKPD pada Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

Tabel 2.114
Rekapitulasi Capaian SKPD pada Evaluasi Hasil RKPD
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

No.	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		Realisasi Keuangan	
			Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	701.269.571.244,00	70,43	100	564.682.130.710,00	80,52
2	Cabang Dinas Tarakan	0,00	0	0	969.939.419,00	0
3	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	0,00	0	0	1.114.614.206,00	0
4	Dinas Kesehatan	437.874.101.699,00	100	100	90.062.395.456,00	20,57
5	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK	0,00	0	0	112.023.452.026,00	0
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	304.277.038.330,00	0	100	161.050.417.061,00	52,93
7	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja	19.669.948.099,00	100	72,86	14.769.116.054,00	75,08

No.	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		Realisasi Keuangan	
			Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.726.235.629,00	100	98,2	11.535.437.249,00	90,64
9	Dinas Sosial	17.280.864.789,00	100	69,14	5.582.307.284,00	32,3
10	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu	0,00	0	0	2.743.592.557,00	0
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.853.528.693,00	100	100	9.883.840.775,00	83,38
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16.396.129.331,00	0	53,22	13.055.211.316,00	79,62
13	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0	0	468.311.246,00	0
14	Dinas Lingkungan Hidup	15.549.896.246,00	91,49	97,52	13.671.794.094,00	87,92
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.261.540.743,00	0	100	8.058.314.043,00	97,54
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.008.762.350,00	100	89,1	10.197.086.240,00	92,63
17	Dinas Perhubungan	33.171.154.787,00	0	57,03	25.363.463.183,00	76,46
18	UPTD Pelabuhan Tengkayu I	0,00	0	0	1.000.159.191,00	0
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	36.027.108.066,00	100	86,65	34.334.244.860,00	95,3
20	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	11.639.180.157,00	100	94,07	10.814.849.750,00	92,92
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	60.719.373.509,00	0	66,32	53.246.994.768,00	87,69
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.190.225.567,00	100	100	6.764.399.004,00	94,08
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	28.566.074.990,00	100	82,57	23.396.879.225,00	81,9
24	UPTD Pelabuhan Tengkayu II	0,00	0	0	1.689.482.885,00	0
25	UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau	0,00	0	0	258.392.552,00	0
26	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	0,00	0	0	222.082.437,00	0
27	Dinas Pariwisata	15.755.805.088,00	68,36	56,53	13.328.567.374,00	84,59
28	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	73.047.845.462,00	100	94	75.066.436.607,00	102,76
29	Dinas Kehutanan	99.377.201.478,00	0	12,34	19.683.567.599,00	19,81
30	UPT KPH Kota Tarakan	0,00	0	0	6.496.252.364,00	0
31	UPT KPH Kabupaten Nunukan	0,00	0	0	5.937.127.396,00	0
32	UPT KPH Kabupaten Malinau	0,00	0	0	5.370.637.105,00	0
33	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung	0,00	0	0	6.700.609.432,00	0
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	18.589.336.337,00	0	73,04	14.320.362.680,00	77,04
35	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	15.135.956.546,00	41,15	74,27	14.086.315.241,00	93,07
36	Biro Administrasi Pembangunan	2.485.523.181,00	96,3	67,47	1.166.213.136,00	46,92
37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.276.808.060,00	100	64,68	2.191.796.931,00	96,27
38	Biro Hukum	3.932.250.497,00	99,6	90,08	3.730.706.014,00	94,87
39	Biro Kesejahteraan Rakyat	57.784.028.745,00	0	76,65	54.995.318.016,00	95,17
40	Biro Organisasi	2.489.150.882,00	66,67	75	2.448.684.018,00	98,37

No.	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		Realisasi Keuangan	
			Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
41	Biro Umum	121.301.777.290,00	90,95	92,74	110.376.013.613,00	90,99
42	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.901.289.978,00	0	100	1.739.549.574,00	91,49
43	Biro Administrasi Pimpinan	8.399.053.171,00	0	85,71	7.864.434.595,00	93,63
44	Biro Perekonomian	1.118.325.393,00	66,67	90,08	1.169.102.666,00	104,54
45	Sekretariat DPRD	134.833.083.376,00	66,67	100	164.372.138.894,00	121,91
46	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	26.156.184.674,00	98,87	92,35	19.199.649.786,00	73,4
47	Badan Pendapatan Daerah	71.453.182.332,00	0	25,85	55.009.644.332,00	76,99
48	UPT Bapenda Bulungan	0,00	0	0	3.209.425.753,00	0
49	UPT Bapenda Nunukan	0,00	0	0	2.718.390.797,00	0
50	Badan Keuangan dan Aset Daerah	681.922.269.518,00	100	93,14	512.350.724.857,00	75,13
51	Badan Kepegawaian Daerah	15.052.470.763,00	100	100	12.250.183.109,00	81,38
52	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.985.781.438,00	0	0	0,00	0
53	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.667.162.405,00	19,66	97,58	5.870.998.233,00	88,06
54	Badan Penghubung	29.889.329.954,00	100	70,23	16.208.666.099,00	54,23
55	Inspektorat	34.773.759.783,00	0	96,49	28.216.819.648,00	81,14
56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.747.732.821,00	0	10,34	4.593.954.456,00	27,43
JUMLAH		**3.193.556.043.402,00**	**66,02**	**78,18**	**2.347.631.197.916,00**	**73,51**

Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025, SIPD

Keterangan:

- Perhitungan nilai SKPD/unit menggunakan rata-rata indikator program yang memiliki target, dengan nilai maksimum 100.
- Perhitungan nilai rata-rata pada baris JUMLAH tingkat Pemerintah Daerah hanya mencakup SKPD/unit yang memiliki target indikator program.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian program dan sub kegiatan RKPD tahun 2025, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang relevan untuk menjelaskan pencapaian kinerja. Faktor pendorong pencapaian kinerja sub kegiatan dan program, secara umum meliputi:

1. Komitmen perangkat daerah dalam melaksanakan program dan sub kegiatan sesuai target Renja Perangkat Daerah dan RKPD sehingga sebagian besar indikator kinerja dapat direalisasikan.
2. Sinkronisasi antara RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan RPJMD, sehingga pelaksanaan kegiatan memiliki arah yang jelas dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

3. Dukungan pendanaan APBD yang memadai terhadap program prioritas sehingga pelaksanaan sub kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.
4. Koordinasi yang baik antara perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program.
5. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan program sehingga kendala dapat diidentifikasi lebih awal dan dilakukan penyesuaian pelaksanaan sub kegiatan.
6. Meningkatnya kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, yang berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan program serta percepatan pencapaian indikator kinerja.

Sementara secara umum faktor penghambat pencapaian kinerja sub kegiatan dan program, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Keterbatasan waktu pelaksanaan, sehingga beberapa sub kegiatan belum dapat mencapai target kinerja secara optimal.
2. Proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan waktu cukup panjang sehingga mempengaruhi percepatan realisasi fisik maupun keuangan.
3. Perubahan kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah yang mengharuskan penyesuaian pelaksanaan kegiatan.
4. Kondisi geografis Kalimantan Utara yang luas, terpencil, dan berbatasan langsung dengan negara lain sehingga distribusi pelayanan, mobilisasi sumber daya, dan pelaksanaan kegiatan memerlukan waktu serta biaya lebih besar.
5. Keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas teknis pada sebagian perangkat daerah maupun pelaksana sub kegiatan sehingga mempengaruhi kualitas dan kecepatan pelaksanaan program.
6. Kondisi eksternal, seperti cuaca, akses transportasi, serta dinamika ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan beberapa kegiatan di lapangan.

Lebih lanjut, dari hasil evaluasi dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja bidang urusan pemerintahan daerah. Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa urusan pelayanan dasar dan urusan yang didominasi kegiatan operasional rutin cenderung memiliki capaian indikator program dan sub kegiatan yang lebih baik. Sebaliknya, urusan yang didominasi pekerjaan konstruksi, pengadaan barang dan jasa, penelitian, serta kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas sektor menunjukkan realisasi yang lebih rendah pada tahun berjalan. Dokumen evaluasi juga memperlihatkan adanya variasi capaian antar bidang urusan, dengan urusan Perdagangan, Lingkungan Hidup, dan Sosial termasuk yang memiliki capaian sub kegiatan tinggi, sedangkan Pertanahan, Kebudayaan, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, serta Pariwisata masih memerlukan percepatan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran. Faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja bidang urusan pemerintahan daerah secara umum dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.115

Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Bidang Urusan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Pendidikan	Pelaksanaan layanan pendidikan berjalan rutin, dukungan BOS dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota mempercepat pencapaian indikator layanan dasar.	Pembangunan fisik sarana prasarana membutuhkan proses pengadaan yang panjang, keterbatasan guru pada wilayah terpencil, serta kondisi geografis.
Kesehatan	Program pelayanan kesehatan telah memiliki mekanisme operasional yang mapan, dukungan fasilitas kesehatan dan koordinasi lintas sektor cukup baik.	Distribusi tenaga kesehatan belum merata, akses pelayanan di wilayah perbatasan masih terbatas, serta pengadaan alat kesehatan memerlukan waktu.
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan teknis telah tersedia sehingga sebagian pekerjaan dapat segera dimulai.	Dominasi kegiatan konstruksi menyebabkan realisasi awal tahun rendah akibat proses tender, perizinan, cuaca, dan mobilisasi material.
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kegiatan fisik telah dipersiapkan sejak awal tahun sehingga penyerapan relatif lebih cepat.	Pelaksanaan bergantung pada kesiapan lahan, dokumen teknis, dan kondisi lapangan.

Bidang Urusan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Lingkungan Hidup	Program pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, dan perlindungan lingkungan bersifat berkelanjutan sehingga indikator relatif mudah dicapai. Capaian sub kegiatan termasuk yang tertinggi.	Sebagian kegiatan rehabilitasi lingkungan dan konservasi membutuhkan koordinasi lintas instansi serta partisipasi masyarakat.
Perhubungan	Dukungan terhadap pelayanan transportasi dan keselamatan lalu lintas tetap berjalan sesuai rencana.	Infrastruktur transportasi yang luas serta biaya operasional tinggi menyebabkan sebagian kegiatan belum optimal.
Perdagangan	Monitoring distribusi barang dan pelayanan perdagangan dapat dilaksanakan sejak awal tahun sehingga capaian sub kegiatan sangat tinggi.	Tingginya capaian sebagian dipengaruhi target triwulanan yang relatif kecil sehingga perlu dijaga konsistensinya hingga akhir tahun.
Perindustrian, Koperasi dan UKM	Pembinaan pelaku usaha, UMKM dan koperasi berlangsung secara rutin melalui pelatihan dan fasilitasi.	Rendahnya kapasitas usaha, akses pembiayaan dan pemasaran masih menjadi kendala peningkatan outcome program.
Penanaman Modal	Pelayanan perizinan semakin terdigitalisasi sehingga pelayanan investasi semakin baik.	Realisasi investasi dipengaruhi kondisi ekonomi nasional dan keputusan investor yang berada di luar kendali pemerintah daerah.
Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan	Potensi sumber daya alam besar serta dukungan program nasional mendorong pelaksanaan kegiatan produksi dan pemberdayaan masyarakat.	Cuaca, hama penyakit, keterbatasan sarana produksi, infrastruktur pendukung dan akses wilayah mempengaruhi capaian indikator.
Kehutanan	Dukungan program rehabilitasi hutan, perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan mendukung peningkatan kinerja.	Luas kawasan hutan, akses lapangan yang sulit, serta perlunya koordinasi dengan pemerintah pusat menyebabkan sebagian kegiatan memerlukan waktu lebih panjang.
Pariwisata dan Kebudayaan	Promosi destinasi dan penyelenggaraan event mendukung peningkatan aktivitas sektor pariwisata.	Realisasi anggaran relatif rendah karena sebagian besar kegiatan dilaksanakan pada semester II, sedangkan kebudayaan masih menunjukkan capaian kinerja yang rendah.
Sosial	Bantuan sosial dan pelayanan rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara rutin sehingga capaian sub kegiatan termasuk tinggi.	Ketepatan data sasaran penerima manfaat dan dinamika kondisi sosial masyarakat memerlukan proses verifikasi yang cukup panjang.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pendampingan desa, pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat telah memiliki mekanisme pelaksanaan yang jelas.	Kapasitas aparatur desa yang bervariasi serta luasnya wilayah binaan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program.
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen perencanaan daerah telah disusun sesuai jadwal sehingga penyerapan anggaran	Kegiatan penelitian dan pengembangan membutuhkan proses kajian yang cukup panjang sehingga capaian fisik

Bidang Urusan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	pada urusan perencanaan relatif tinggi.	belum optimal pada awal pelaksanaan.
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Pelayanan administrasi kepegawaian berjalan secara berkelanjutan.	Pelaksanaan pelatihan sangat bergantung pada jadwal penyelenggaraan sehingga realisasi awal tahun masih rendah.
Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian	Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik terus berjalan.	Sebagian pengadaan perangkat dan aplikasi masih berproses sehingga realisasi, terutama pada urusan statistik, masih rendah.
Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana	Kegiatan operasional bersifat rutin dan didukung koordinasi lintas instansi.	Sebagian kegiatan bergantung pada kondisi kejadian di lapangan sehingga realisasinya bersifat situasional.

Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025, SIPD, diolah

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap data dan informasi yang terdapat dalam gambaran umum kondisi daerah, serta dengan memperhatikan hasil evaluasi atas kinerja pembangunan pada periode sebelumnya, diperoleh rumusan permasalahan utama di Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut:

1. Kondisi Perekonomian yang Cenderung Melambat

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dari 5,32 persen pada tahun 2022 menjadi 4,56 persen pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa akselerasi ekonomi daerah mulai memasuki fase normalisasi setelah sebelumnya mengalami pertumbuhan yang relatif lebih tinggi. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh melambatnya beberapa sektor utama yang selama ini menjadi penopang ekonomi daerah, terutama sektor berbasis sumber daya alam dan perdagangan yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas, permintaan pasar, serta dinamika investasi.

Data kabupaten/kota menunjukkan bahwa beberapa wilayah mengalami perlambatan cukup signifikan, seperti Kabupaten Tana Tidung

yang turun dari 6,21 persen menjadi 3,73 persen, serta Kota Tarakan dari 5,71 persen menjadi 5,02 persen, sehingga turut menahan laju pertumbuhan ekonomi provinsi secara keseluruhan.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dalam empat tahun terakhir mengindikasikan belum kuatnya struktur ekonomi daerah dan ketergantungan tinggi terhadap sektor tertentu. Perlambatan ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kalimantan Utara masih menghadapi tantangan dalam menciptakan sumber pertumbuhan yang lebih beragam dan berkelanjutan. Ketergantungan terhadap investasi skala besar dan sektor primer menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah cenderung fluktuatif ketika terjadi penyesuaian aktivitas usaha atau perlambatan investasi. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara tetap berada pada level positif dan relatif stabil, yang menunjukkan bahwa fundamental ekonomi daerah masih cukup kuat. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan hilirisasi industri, pengembangan sektor jasa dan ekonomi lokal, serta peningkatan konektivitas dan produktivitas wilayah agar pertumbuhan ekonomi dapat kembali meningkat secara lebih merata dan berkelanjutan.

2. Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota

Persentase penduduk miskin di Kalimantan Utara terus mengalami penurunan hingga tahun 2025 menjadi 5,54 persen, turun 1,82 poin dari 2021 yang sebesar 7,36 persen. Meskipun terjadi penurunan selama 5 tahun terakhir, namun persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara masih berada pada urutan ke-9 penduduk miskin terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia serta masih berada diatas capaian persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Timur (5,17%) dan Kalimantan Tengah (5,19%). Untuk itu, diperlukan langkah-langkah guna menekan kembali angka persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara, sehingga capaiannya masih bisa untuk diturunkan kembali.

Tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan masih adanya kesenjangan antara daerah yang satu

terhadap daerah yang lain. Kemiskinan tertinggi tercatat di Kabupaten Bulungan yakni mencapai 7,26 persen pada tahun 2025, sedangkan yang terendah tercatat di Kabupaten Tana Tidung sebesar 4,56 persen.

Kondisi serupa juga ditunjukkan oleh capaian indikator PDRB per kapita dimana pada tahun 2025 Kabupaten Tana Tidung tercatat mencapai 338,60 juta rupiah sedangkan Kabupaten Bulungan sebesar 169,98 juta rupiah. Kesenjangan capaian pembangunan di antara daerah tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pemerataan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. Apabila persoalan ini dibiarkan tanpa adanya dukungan intervensi yang tepat, maka kesenjangan wilayah dan kesejahteraan antar penduduk di Provinsi Kalimantan Utara dikhawatirkan akan semakin besar. Pemerataan akses infrastruktur perekonomian dan infrastruktur dasar menjadi hal yang utama guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Permasalahan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 sampai 2025 juga berada di bawah capaian nasional. Permasalahan utama pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara meliputi ketergantungan tinggi pada sektor pertambangan, infrastruktur yang terbatas, serta kendala modal dan sumber daya manusia.

Permasalahan lainnya yaitu menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja. Secara keseluruhan, kondisi tenaga kerja di Kalimantan Utara mencerminkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada peningkatan partisipasi angkatan kerja secara agregat, tetapi juga pada pemerataan dan kualitas penyerapan tenaga kerja antarwilayah. Daerah dengan TPAK tinggi perlu didukung dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan produktivitas, sementara wilayah dengan TPAK rendah memerlukan penciptaan lapangan kerja yang lebih adaptif terhadap karakteristik ekonomi lokal. Diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan kembali TPAK melalui peningkatan kualitas pendidikan dan

pelatihan vokasi, perluasan investasi di sektor padat karya, serta dukungan bagi UMKM.

Secara dinamika, meskipun terdapat kecenderungan perbaikan ketimpangan pendapatan di beberapa kabupaten/kota, laju perbaikannya belum merata dan masih menghadapi tantangan struktural. Ketimpangan pendapatan di tingkat kabupaten/kota tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas pertumbuhan tersebut, khususnya sejauh mana pertumbuhan mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan ketimpangan pendapatan di Kalimantan Utara memerlukan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan, dengan penekanan pada pemerataan akses terhadap kesempatan ekonomi, penguatan usaha mikro dan kecil, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah yang masih tertinggal.

3. Jangkauan dan Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan yang Belum Optimal

Pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, jangkauan dan mutu layanan dasar masih belum sepenuhnya merata, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Keterbatasan infrastruktur, distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang belum merata, serta hambatan geografis menjadi faktor yang mempengaruhi aksesibilitas dan kualitas layanan. Dalam aspek pendidikan, kondisi tersebut menyebabkan angka partisipasi kasar khususnya untuk jenjang SMP/MTs mengalami penurunan. Distribusi dan kompetensi guru, serta sarana dan prasarana pendidikan yang memadai masih perlu ditingkatkan.

Dalam aspek kesehatan, akses dan kualitas layanan kesehatan masih perlu ditingkatkan. Pada kesehatan ibu dan anak, masih

ditemukannya kematian ibu serta bayi dan balita kekurangan gizi. Pada tahun 2024, AKI Provinsi Kalimantan Utara sebesar 58,47. Kondisi tersebut mengindikasikan layanan kesehatan ibu dan bayi seperti tingkat kunjungan ibu hamil, persentasi melahirkan di fasilitas kesehatan, kunjungan bayi, imunisasi dasar lengkap, dan sebagainya masih perlu ditingkatkan. Selain itu, penanganan dan pencegahan terhadap penyakit menular dan tidak menular juga perlu dioptimalkan. Hal dasar yang perlu mendapat perhatian lebih yakni pemenuhan, pemerataan, peningkatan kompetensi SDM kesehatan, serta peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan pada semua jenjang fasilitas kesehatan.

4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Belum Optimal

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih perlu untuk ditingkatkan di Provinsi Kalimantan Utara. Kondisi tersebut diantaranya ditunjukkan dengan capaian indeks kualitas lingkungan hidup yang masih belum optimal. Lebih lanjut lagi, apabila ditinjau dari sisi komponen pembentuknya, indeks kualitas udara menjadi penyumbang nilai capaian dari indeks kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Utara, yang ditunjukkan dengan cenderung menurunnya nilai atas komponen tersebut. Walaupun tahun 2025 IKLH menunjukkan peningkatan signifikan namun semua komponen pembentuk indeks ini tetap perlu mendapat perhatian.

Apabila ditinjau dari sisi pengelolaan sampah di Provinsi Kalimantan Utara, juga menunjukkan masih perlu ditingkatkannya intervensi terhadap aspek ini. Sebagai gambaran pada tahun 2023 persentase sampah perkotaan yang tertangani yaitu sebesar 72 persen atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 74,65 persen.

Untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah dimaksud maka perlunya pengelolaan secara terintegrasi dan berbasis hulu-hilir (dari masing-masing rumah tangga hingga ke tempat pembuangan akhir) menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan pengoptimalannya, dalam mereduksi timbulan sampah. Melalui pola pengelolaan sampah yang

demikian, seringkali dinilai cukup efektif dan efisien dalam mengurai permasalahan persampahan.

Permasalahan lain, berbagai wilayah termasuk di Provinsi Kalimantan Utara juga dihadapkan pada permasalahan global berupa perubahan iklim global yang dapat memberikan dampak ikutan dalam berbagai lini pembangunan, terlebih lagi Provinsi Kalimantan Utara memiliki wilayah pesisir, yang seringkali dapat merasakan dampaknya secara signifikan. Merespon atas fenomena tersebut, maka juga perlu untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan yang tepat terkait pola adaptasi dan mitigasinya. Lebih lanjut, adanya fenomena iklim global yang semakin dinamis tersebut, juga berpeluang atas kemunculan berbagai potensi kebencanaan. Artinya, antara pengelolaan lingkungan terhadap intensitas dan frekuensi kebencanaan suatu wilayah seringkali memiliki keterkaitan. Dengan demikian, secara komprehensif juga perlu untuk dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang mendukung upaya penanggulangan bencana daerah, dengan tujuan dapat meningkatkan ketangguhan daerah dalam merespon bencana yang berpotensi timbul.

5. Belum Meratanya Infrastruktur Dasar dan Penunjang Perekonomian

Infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian yang belum merata di Provinsi Kalimantan Utara masih menjadi permasalahan pembangunan daerah, terutama di kawasan perbatasan dan daerah terpencil. Kondisi ini terlihat dari belum meratanya sarana dan prasarana dasar permukiman, belum optimalnya konektivitas wilayah dan akses transportasi, dan akses layanan internet yang belum menjangkau seluruh wilayah. Pada wilayah sekitar perkotaan juga masih terdapat infrastruktur berupa jalan dan drainase dengan kondisi yang belum memadai.

Belum meratanya sarana dan prasarana dasar permukiman ditunjukkan dengan belum meratanya akses masyarakat terhadap sanitasi layak, belum optimalnya pelayanan ke rumah tangga untuk memiliki akses terhadap sumber air minum layak, masih adanya rumah tidak layak huni, dan belum optimalnya penataan kawasan kumuh. Selanjutnya, belum

optimalnya konektivitas wilayah ditunjukkan dengan belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi, dan masih rendahnya ketersediaan dan kualitas jalan daerah, sedangkan belum meratanya jaringan telekomunikasi ditunjukkan dengan masih adanya *blankspot*. Secara umum, belum optimalnya layanan infrastruktur dasar terutama infrastruktur konektivitas mengakibatkan tingginya harga logistik dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

6. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan terutama terjadi pada aspek akuntabilitas daerah. Hal ini ditunjukkan dengan cenderung menurunnya nilai SAKIP daerah. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian ke depan karena dapat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah dan pelayanan publik. Aspek akuntabiltas yang perlu ditingkatkan, yaitu aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi.

Selain akuntabilitas kinerja, perlu juga memperhatikan kualitas pelayanan publik terutama dalam memastikan akses pelayanan publik yang mudah dan terjangkau terutama bagi wilayah-wilayah yang sulit secara geografis melalui peningkatan infrastruktur TIK. Selain itu, penguatan pelayanan publik yang inklusif untuk kelompok rentan juga perlu dilakukan karena masih belum optimal. Penguatan sistem pemerintahan yang berintegritas, partisipatif, dan inovatif juga harus menjadi perhatian ke depan.

2.3.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kalimantan Utara secara umum diuraikan sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

Permasalahan utama pada urusan pendidikan di Kalimantan Utara adalah ketimpangan akses dan kualitas layanan pendidikan antarwilayah, khususnya antara wilayah perkotaan dan pedalaman/perbatasan. Indikator pendidikan menunjukkan bahwa capaian rata-rata lama sekolah

dan harapan lama sekolah masih relatif rendah, terutama di kabupaten dengan kondisi geografis sulit. Keterbatasan sarana prasarana pendidikan menengah dan pendidikan vokasi, distribusi guru yang belum merata, serta akses pendidikan lanjutan yang masih terbatas menjadi faktor penghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata di seluruh wilayah provinsi.

2. Urusan Kesehatan

Pada urusan kesehatan, permasalahan pembangunan ditandai oleh belum meratanya akses dan kualitas layanan kesehatan, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan. Ketersediaan fasilitas kesehatan rujukan, tenaga medis, dan sarana penunjang kesehatan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Meskipun indikator kesehatan menunjukkan perbaikan secara umum, masih terdapat tantangan dalam menurunkan kesenjangan derajat kesehatan masyarakat antar kabupaten/kota serta meningkatkan efektivitas layanan kesehatan preventif dan promotif.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan utama pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah keterbatasan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas, khususnya jalan penghubung antarwilayah, infrastruktur air minum, sanitasi, dan pengendalian banjir. Di sisi penataan ruang, masih terdapat tantangan dalam sinkronisasi rencana tata ruang dengan dinamika pemanfaatan ruang, termasuk tumpang tindih peruntukan lahan dengan kawasan hutan dan kawasan lindung. Kondisi ini berimplikasi pada keterlambatan pembangunan infrastruktur dan terbatasnya ruang pengembangan kegiatan ekonomi produktif.

Sehubungan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal, akses rumah tangga terhadap air minum layak di Kalimantan Utara menunjukkan tren fluktuatif, permasalahan paling menonjol terdapat di Kabupaten Malinau dan Bulungan. Selain itu, layanan pengelolaan air limbah domestik belum merata dan belum optimal, sehingga berpotensi

menimbulkan risiko kesehatan lingkungan dan memperlebar kesenjangan kualitas hidup antarwilayah, terutama di kawasan pedalaman dan perbatasan.

4. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)

Permasalahan pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum terutama berkaitan dengan luas wilayah dan keterbatasan jangkauan pengawasan, yang memengaruhi efektivitas penegakan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Wilayah perbatasan dan kawasan terpencil menghadapi tantangan khusus dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban sosial. Selain itu, kapasitas sarana prasarana dan sumber daya aparatur Trantibumlinmas masih perlu ditingkatkan agar mampu merespons dinamika sosial dan potensi gangguan ketertiban secara lebih cepat dan efektif.

5. Urusan Sosial

Permasalahan urusan sosial di Kalimantan Utara tercermin dari masih adanya kelompok masyarakat rentan yang memerlukan perlindungan sosial berkelanjutan, seperti penduduk miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat di wilayah terpencil. Penurunan persentase penduduk miskin belum sepenuhnya diikuti oleh pengurangan kerentanan sosial, yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih berada pada kondisi rentan jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Selain itu, keterbatasan data terpadu dan akurasi sasaran penerima bantuan sosial masih menjadi tantangan dalam meningkatkan efektivitas intervensi sosial.

6. Urusan Tenaga Kerja

Kondisi tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, namun secara umum masih berada pada tingkat partisipasi yang relatif tinggi. Jika ditinjau antar kabupaten/kota, terdapat kesenjangan partisipasi tenaga

kerja yang cukup jelas. Secara keseluruhan, kondisi tenaga kerja di Kalimantan Utara mencerminkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada peningkatan partisipasi angkatan kerja secara agregat, tetapi juga pada pemerataan dan kualitas penyerapan tenaga kerja antarwilayah.

Meskipun TPT Kalimantan Utara relatif rendah dan cenderung membaik, tantangan ketenagakerjaan masih tetap ada, terutama terkait kualitas dan keberlanjutan pekerjaan. Penurunan TPT belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas pekerjaan, karena masih terdapat risiko dominasi pekerjaan informal dan keterbatasan lapangan kerja formal yang produktif.

Selanjutnya, perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2023–2025 menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan. TPAK laki-laki berada pada level sangat tinggi, yaitu 85,18 persen pada 2023, meningkat menjadi 86,51 persen pada 2024, sebelum sedikit menurun menjadi 84,95 persen pada 2025. Sementara itu, TPAK perempuan hanya berada pada kisaran 52–53 persen, yaitu 53,60 persen pada 2023, turun menjadi 52,14 persen pada 2024, dan sedikit meningkat menjadi 52,26 persen pada 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pasar kerja masih jauh lebih rendah dibanding laki-laki, sehingga terdapat kesenjangan gender yang cukup signifikan dalam keterlibatan ekonomi masyarakat.

Rendahnya TPAK perempuan mengindikasikan masih adanya berbagai tantangan struktural yang mempengaruhi akses dan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, seperti keterbatasan kesempatan kerja yang ramah perempuan, beban domestik dan pengasuhan keluarga, serta belum meratanya akses terhadap pendidikan dan keterampilan kerja yang relevan. Selain itu, struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor-sektor tertentu juga dapat membatasi ruang partisipasi perempuan pada pekerjaan formal dan produktif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pembangunan yang lebih responsif gender.

7. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penurunan ketimpangan gender di Kalimantan Utara mengindikasikan adanya kemajuan dalam peningkatan kesetaraan gender, khususnya pada akses pendidikan, kesehatan, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Namun demikian, masih diperlukan penguatan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa penurunan ketimpangan gender berlangsung secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.

Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, permasalahan pembangunan tercermin dari masih terbatasnya kesetaraan peran dan akses perempuan dalam pembangunan, serta tantangan perlindungan anak di lingkungan keluarga dan sosial. Indikator kesetaraan gender menunjukkan bahwa peningkatan peran perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan masih perlu didorong secara optimal. Di sisi lain, penguatan sistem perlindungan anak, termasuk pencegahan kekerasan dan eksploitasi, masih memerlukan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, peningkatan usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah (HLS) dan pendapatan per kapita disesuaikan sebagai komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Utara mencerminkan adanya kemajuan pembangunan aspek tersebut dan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian, masih adanya disparitas antarwilayah dan kesenjangan UHH, RLS, dan HLS antara laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat masih perlu diperkuat, khususnya di wilayah perbatasan dan pedalaman. Peningkatan pengeluaran per kapita di Kalimantan Utara mencerminkan adanya pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga. Namun demikian, kesenjangan pengeluaran antara laki-laki dan

perempuan menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah belum sepenuhnya inklusif dan setara gender.

8. Urusan Pangan

Permasalahan utama pada urusan pangan yaitu menurunnya Indeks Ketahanan Pangan di Provinsi Kalimantan Utara, hal ini disebabkan oleh aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang belum optimal. Permasalahan lainnya yaitu masih tingginya Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan dan capaiannya masih berada diatas capaian nasional.

9. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa berkaitan dengan belum meratanya tingkat kemandirian desa. Meskipun terjadi penurunan jumlah desa tertinggal, masih terdapat desa dengan kapasitas ekonomi dan kelembagaan yang lemah. Keterbatasan akses modal, pendampingan usaha, serta pemanfaatan potensi lokal menjadi hambatan utama dalam mendorong desa berkembang dan mandiri. Hal ini berdampak pada lambatnya pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan desa–kota.

10. Urusan Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup menunjukkan tren fluktuatif dan permasalahan yang terjadi yaitu belum optimalnya Indeks Kualitas Air dan Udara. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan lingkungan akibat aktivitas ekonomi dan perubahan tutupan lahan yang memerlukan pengelolaan lebih berkelanjutan.

Meskipun daya dukung dan daya tampung lingkungan secara agregat masih tergolong belum terlampaui, terdapat indikasi tekanan lingkungan pada wilayah tertentu, seperti penyediaan air, ekosistem gambut, dan kualitas lingkungan perkotaan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa pembangunan ke depan perlu lebih memperhatikan

keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, agar daya dukung alam tetap terjaga dalam jangka panjang.

11. Urusan Perhubungan

Urusan perhubungan menghadapi permasalahan berupa belum optimalnya sistem transportasi yang terintegrasi, baik darat, laut, maupun sungai. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan layanan angkutan publik menyebabkan tingginya biaya logistik dan mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan. Kondisi ini berdampak langsung pada daya saing ekonomi daerah serta akses masyarakat terhadap pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi.

12. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pada urusan komunikasi dan informatika ditandai oleh kesenjangan akses jaringan telekomunikasi dan internet antarwilayah. Meskipun cakupan layanan TIK terus meningkat, masih terdapat wilayah dengan kualitas jaringan yang rendah atau belum stabil. Keterbatasan ini menghambat pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik, pengembangan ekonomi digital, serta peningkatan literasi digital masyarakat, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan.

13. Urusan Kebudayaan

Permasalahan utama pada urusan kebudayaan yaitu menurunnya Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2024 yang hanya 51,81 dan capaiannya dibawah capaian nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya penurunan dimensi ekspresi budaya, terbatasnya akses bahan bacaan dan keterbatasan tenaga pengajar muatan lokal.

14. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama pada urusan kelautan dan perikanan yaitu menurunnya produksi perikanan di Provinsi Kalimantan Utara khususnya untuk perikanan tangkap laut dan perikanan budidaya. Selain itu,

meskipun memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar, pemanfaatannya masih belum optimal, khususnya pada perikanan tangkap laut yang terkendala oleh keterbatasan armada, skala kapal kecil (<10 GT), serta belum tersedianya pelabuhan perikanan yang memadai. Pemanfaatan potensi WPP 716 masih sangat rendah, sehingga nilai ekonomi sektor ini belum maksimal. Pada sisi perikanan budidaya, produktivitas tambak masih rendah meskipun luas tambak besar, serta menghadapi kendala bibit, pakan, dan status lahan budidaya yang sebagian berada di kawasan hutan.

15. Urusan Pariwisata

Permasalahan pada sektor pariwisata yaitu menurunnya jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2025. Disamping itu, permasalahan lainnya adalah belum optimalnya kualitas destinasi, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta belum kuatnya ekosistem ekonomi kreatif lokal. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah masih relatif terbatas, sehingga potensi besar pariwisata berbasis alam, budaya, dan pesisir belum sepenuhnya mampu menjadi penggerak ekonomi daerah secara signifikan dan merata.

16. Urusan Pertanian

Permasalahan utama sektor pertanian adalah belum optimalnya luas panen dan produksi padi, yang disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian. Kalimantan Utara belum mampu swasembada beras dan masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Meskipun daya dukung penyediaan pangan secara agregat masih “belum terlampaui”, terdapat wilayah tertentu terutama kawasan perkotaan, yang daya dukungnya telah melampaui ambang batas. Hal ini menunjukkan kerentanan ketahanan pangan lokal, khususnya pada wilayah dengan ketergantungan tinggi terhadap distribusi antarwilayah.

17. Urusan Kehutanan

Dominasi kawasan hutan yang luas merupakan potensi sekaligus tantangan. Permasalahan utama terletak pada belum optimalnya

pemanfaatan hutan secara lestari dan bernilai tambah bagi masyarakat, terbatasnya legalitas akses masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial, serta masih rendahnya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

18. Penelitian dan Pengembangan

Inovasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara belum optimal. Indikator Indeks Inovasi Daerah sebagai indikator yang menggambarkan pengembangan dan penerapan inovasi di sebuah daerah pada tahun 2025 menunjukkan penurunan nilai dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, di antaranya minimnya inovasi baru yang berskala besar, yang menyebabkan peningkatan skor tidak cukup signifikan untuk mendorong perubahan predikat. Selain itu, proses adaptasi dan implementasi inovasi masih belum optimal, baik dalam hal pemanfaatan teknologi, digitalisasi layanan publik, maupun efektivitas kebijakan inovatif yang diterapkan.

Faktor lainnya yang turut berkontribusi terhadap stagnasi ini meliputi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang mendukung pengembangan inovasi, serta kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga riset dalam menciptakan inovasi yang lebih berdampak luas. Selain itu, inovasi yang ada masih bersifat sektoral dan belum diadopsi secara menyeluruh di berbagai bidang pemerintahan maupun pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk mendorong peningkatan predikat inovasi daerah, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk penguatan ekosistem inovasi, peningkatan investasi dalam riset dan teknologi, serta percepatan adopsi kebijakan inovatif yang dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

2.4 Isu Strategis Daerah

Identifikasi isu strategis memainkan peran penting yang menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan serta tantangan yang dihadapi pada suatu daerah. Rumusan isu strategis diperoleh dengan memertimbangkan berbagai hal antara lain potensi daerah, permasalahan pembangunan, Isu KLHS RPJMD, serta isu-isu di tingkat global, nasional, dan regional. Isu-isu strategis pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi pertimbangan penyusunan rencana pembangunan tahun 2027, dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.116
Isu Strategis Provinsi Kalimantan Utara

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
• Potensi bonus demografi • Sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya perikanan dan kelautan • Keberadaan ekosistem mangrove dan gambut • Potensi parawisata alam dan budaya • Potensi pengembangan EBT	• Kondisi Perekonomian yang Cenderung Melambat • Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan antar kabupaten/ kota	• Belum optimalnya penciptaan nilai tambah sektor sektor ekonomi basis/unggulan	• Konstelasi Perdagangan Global • Tata Kelola Keuangan Global • Pertumbuhan Kelas Menengah • Geopolitik dan Geoekonomi	• Pergeseran struktur kelas masyarakat • Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif • Geopolitik dan geoekonomi	• Ketergantungan perekonomian daerah sektor hulu disertai lambatnya proses hilirisasi dan diversifikasi industri • Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan, transmigrasi, dan perbatasan negara • Kurangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan	• Produktivitas ekonomi daerah yang inklusif, bernilai tambah dan berkelanjutan • Transformasi ekonomi hijau, ekonomi biru dan penyediaan energi baru terbarukan
	• Jangkauan dan mutu pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masih belum optimal	• Peningkatan kualitas dan cakupan layanan dasar	• Demografi Global	• Rendahnya kualitas sumber daya manusia	• Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan	• SDM berkualitas dan kohesivitas masyarakat
	• Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang belum optimal	• Belum optimalnya implementasi kebijakan dan aturan berbasis ekologis	• Perubahan Iklim • Persaingan Sumber Daya Alam	• Krisis lingkungan	• Tingginya konversi hutan menjadi lahan tidak produktif	• Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari dan Berkelanjutan
	• Belum meratanya infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian	• Peningkatan kualitas dan cakupan layanan dasar • Pengelolaan kawasan perbatasan yang belum optimal	• Perkembangan Teknologi • Urbanisasi Dunia	• Rendahnya produktivitas	• Minimnya ketersediaan sarana dan prasaran layanan dasar yang memenuhi SPM	• Konektivitas wilayah dan aksesibilitas layanan dasar yang merata dan berkeadilan
	• Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	• Potensi segregasi dan konflik sosial		• Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah		• Tata kelola pemerintahan dan tata kelola perbatasan yang berkualitas

Sumber: hasil analisis, 2026

Isu strategis pembangunan di Kalimantan Utara, secara umum meliputi:

1. Produktivitas Ekonomi Daerah yang Inklusif, Bernilai Tambah dan Berkelanjutan

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar sebagai modal utama pembangunan ekonomi daerah. Potensi tersebut meliputi sektor pertambangan, kehutanan, pertanian, perikanan dan kelautan, energi baru terbarukan, serta sumber daya pesisir dan ekosistem mangrove yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan ekologis yang tinggi. Selain itu, posisi strategis Kalimantan Utara sebagai provinsi perbatasan negara yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan berada pada jalur perdagangan internasional memberikan peluang besar bagi pengembangan investasi, industri, perdagangan, logistik, dan ekonomi lintas batas. Potensi tersebut didukung oleh ketersediaan kawasan hutan yang mencapai 5,66 juta hektare, garis pantai sepanjang hampir 4.000 kilometer, wilayah pesisir yang luas, serta sumber daya perikanan dan kelautan yang masih belum dimanfaatkan secara optimal.

Meskipun memiliki sumber daya yang melimpah, struktur perekonomian Kalimantan Utara masih didominasi oleh sektor primer yang menghasilkan nilai tambah relatif rendah. Kontribusi sektor primer terhadap perekonomian daerah pada tahun 2024 mencapai 43,51 persen, dimana sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 28,72 persen. Pada tahun 2025, sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kalimantan Utara dengan kontribusi sebesar 27,89 persen terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam mentah, khususnya komoditas pertambangan yang sangat dipengaruhi oleh dinamika harga pasar global. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor ekstraktif menyebabkan perekonomian daerah rentan terhadap gejolak eksternal serta menimbulkan tantangan dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu,

transformasi struktur ekonomi menuju ekonomi yang lebih beragam, produktif, dan berdaya tahan menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.

Di sisi lain, potensi pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif berbasis sumber daya terbarukan masih sangat besar. Sektor perikanan budidaya menunjukkan peran yang semakin strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, dengan nilai produksi yang mencapai lebih dari Rp2,29 triliun pada tahun 2024. Sektor ini juga memiliki nilai PDRB ADHK yang cukup besar selama beberapa tahun terakhir, dan mencapai Rp5.495,06 miliar pada tahun 2025. Kawasan pesisir dan tambak yang luas juga menjadi tulang punggung produksi udang organik dan komoditas perikanan unggulan yang memiliki daya saing ekspor. Pada sektor pertanian, peningkatan luas panen, produksi, dan produktivitas padi menunjukkan peluang untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Sementara itu, kekayaan sumber daya hutan, jasa lingkungan, cadangan karbon, dan ekosistem mangrove memberikan peluang besar untuk mengembangkan ekonomi hijau, ekonomi biru, perdagangan karbon, ekowisata, serta industri berbasis hasil hutan bukan kayu yang bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan.

Transformasi ekonomi daerah perlu diarahkan pada percepatan hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan investasi produktif, pengembangan kawasan industri, penguatan rantai nilai sektor pertanian dan perikanan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi lokal. Upaya tersebut juga perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan konektivitas wilayah, pengembangan infrastruktur logistik, transformasi digital, inovasi daerah, serta pemanfaatan peluang ekonomi kawasan perbatasan. Penguatan keterkaitan antara sektor primer dengan sektor industri pengolahan dan jasa menjadi penting untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memperbesar nilai tambah yang dinikmati masyarakat Kalimantan Utara.

Pembangunan ekonomi daerah juga harus mampu menjamin inklusivitas dan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok masyarakat. Keterlibatan perempuan, pemuda, masyarakat

desa, pelaku UMKM, nelayan, petani, masyarakat adat, serta kelompok rentan lainnya dalam aktivitas ekonomi produktif perlu terus diperkuat. Pengembangan ekonomi daerah tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu mengurangi kesenjangan wilayah, menurunkan tingkat kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, produktivitas ekonomi yang inklusif harus menjadi fondasi utama pembangunan daerah agar pertumbuhan ekonomi yang tercipta dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam perspektif keberlanjutan, pembangunan ekonomi Kalimantan Utara perlu dilaksanakan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan rendah karbon. Luas kawasan hutan, jasa lingkungan, ekosistem mangrove, serta potensi energi baru terbarukan yang dimiliki merupakan modal penting dalam mendukung agenda ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pemanfaatan sumber daya alam perlu dilakukan secara bijaksana melalui penguatan praktik produksi berkelanjutan, pengurangan intensitas emisi gas rumah kaca, rehabilitasi ekosistem pesisir dan mangrove, peningkatan efisiensi energi, serta optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan dan nilai tambah yang lebih tinggi, tetapi juga mampu menjaga ketahanan lingkungan, meningkatkan resiliensi daerah terhadap perubahan iklim, dan menjamin keberlanjutan pembangunan Kalimantan Utara dalam jangka panjang.

2. Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru dan Penyediaan Energi Baru Terbarukan

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi besar untuk mengembangkan transformasi ekonomi hijau yang berkelanjutan. Provinsi Kalimantan Utara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, provinsi ini dapat mendorong sektor-sektor ramah lingkungan, seperti pertanian, perikanan, kehutanan lestari, pariwisata berbasis alam dan

industri hijau. Upaya ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap industri ekstraktif yang berisiko merusak lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Pengembangan ekonomi biru juga menjadi fokus strategis bagi Provinsi Kalimantan Utara. Letak Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan laut memberikan peluang besar dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pengelolaan yang tepat dan penerapan teknologi ramah lingkungan di sektor ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut.

Penerapan ekonomi hijau dalam pariwisata dapat mencakup pengurangan jejak karbon melalui energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan transportasi berkelanjutan; efisiensi penggunaan air, energi, dan bahan baku; pemberdayaan masyarakat lokal; serta konservasi keanekaragaman hayati. Adapun ekonomi biru dalam pariwisata menitikberatkan pada pengembangan wisata bahari dan pesisir (seperti selam, snorkeling, wisata perahu), pelestarian ekosistem laut (terumbu karang, mangrove, pantai), pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, dan penguatan pariwisata berbasis masyarakat. Implementasinya membutuhkan dukungan pengembangan produk wisata berkelanjutan, edukasi dan peningkatan kesadaran wisatawan, penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan (pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, organisasi non-pemerintah), serta penyusunan kebijakan dan regulasi yang kondusif. Dengan langkah-langkah tersebut, pariwisata dapat menjadi agen perubahan yang memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penyediaan energi baru dan terbarukan (EBT) merupakan bagian penting dari transformasi ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara. Potensi energi surya, air, dan bioenergi di wilayah ini sangat menjanjikan untuk dikembangkan sebagai alternatif energi yang bersih dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur EBT tidak hanya menunjang kebutuhan

energi lokal, tetapi juga membuka peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja hijau.

Integrasi antara pembangunan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pengembangan energi terbarukan di Provinsi Kalimantan Utara menjadi kesempatan besar bagi Provinsi Kalimantan Utara untuk menjadi model pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan ramah lingkungan. Intervensi isu ini juga akan dilakukan melalui pendekatan kerangka ekosistem risen dan inovasi sehingga dapat menyelesaikan masyarakat tersebut ke titip paling optimal.

3. Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Kohesivitas Masyarakat

Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan Indonesia menghadapi tantangan pembangunan diantaranya peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan penguatan kohesivitas masyarakat. Dalam peningkatan kualitas SDM, Provinsi Kalimantan Utara masih menghadapi beberapa permasalahan seperti belum meratanya akses dan kualitas pendidikan, kurangnya tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan yang memadai, kurangnya akses pelatihan vokasional, serta ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri lokal. Peningkatan SDM yang berkualitas menjadi hal mendesak mengingat kebutuhan tenaga kerja terampil disektor unggulan seperti industri, pertanian, dan pariwisata. Adapun strategi yang perlu diperhatikan dalam pembangunan kedepan diantaranya peningkatan kualitas pendidikan dasar hingga menengah, pengembangan pusat pelatihan vokasional, serta peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah, industri, dan lembaga pendidikan untuk program magang dan penempatan kerja.

Pengembangan SDM yang berkualitas dilakukan sejalan dengan penguatan kohesivitas masyarakat. Kohesivitas masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial ditengah kemajemukan etnis, budaya, dan agama di Kalimantan Utara. Keargaman ini menjadi potensi sekaligus tantangan yang harus dijaga agar tidak menimbulkan

gesekan/konflik sosial. Perlu upaya sistematis dalam membangun dialog antar komunitas, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu, pelaksanaan forum lintas budaya perlu dilakukan secara rutin. Pelibatan tokoh adat, pemuda, perempuan dan stakeholder lainnya dalam seluruh proses pembangunan, serta mendorong kegiatan sosial bersama seperti gotong royong dan festival budaya. Dengan demikian, peningkatan SDM yang berkualitas dan kohesivitas masyarakat memerlukan sinergi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, sehingga dapat terwujud pembangunan yang lebih inklusif, harmonis, dan berdaya saing.

Dengan demikian, peningkatan SDM yang berkualitas dan kohesivitas masyarakat memerlukan sinergi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, sehingga dapat terwujud pembangunan yang lebih inklusif, harmonis, dan berdaya saing. Selain itu, untuk menjawab tantangan strategis terkait rendahnya kualitas SDM, akses pendidikan dan kesehatan yang masih terbatas, serta ketimpangan pelayanan antar wilayah, maka pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama. Upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar, menengah, dan vokasional harus terus diperkuat terutama di wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan. Hal ini meliputi perluasan jangkauan layanan, penyediaan tenaga pendidik yang berkualitas, serta penguatan sarana dan prasarana pendidikan.

Demikian pula dalam sektor kesehatan, perlu dilakukan percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya pelayanan ibu dan anak, imunisasi, gizi, dan penanganan penyakit menular. Penguatan sistem layanan kesehatan dasar, penyediaan tenaga medis yang merata, serta fasilitas kesehatan yang memadai di seluruh wilayah akan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan pendidikan yang lebih merata dan layanan kesehatan yang lebih inklusif, Kalimantan Utara dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Salah satu intervensi isu ini akan

dilakukan melalui pendekatan kerangka ekosistem risen dan inovasi sehingga dapat menyelesaikan masyarakat tersebut ke titip paling optimal.

4. Konektivitas Wilayah dan Aksesibilitas Layanan Dasar yang Merata dan Berkeadilan

Upaya mewujudkan konektivitas wilayah dan aksesibilitas layanan dasar yang merata dan berkeadilan menjadi isu strategis bagi Provinsi Kalimantan Utara yang perlu untuk segera direspon. Beberapa wilayah di Kalimantan Utara terutama pedalaman dan perbatasan seperti Krayan, belum terhubung dengan jaringan jalan nasional dan provinsi secara memadai. Ruas jalan antar kabupaten dan penghubung ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sering kali dalam kondisi rusak atau belum terbangun. Proporsi jalan kewenangan provinsi dengan permukaan tanah mencapai lebih dari 70 persen selama 2020-2024. Di sisi lain, penambahan jalan dengan permukaan aspal dan beton juga berjalan sangat lambat.

Minimnya jalan dan jembatan penghubung di atas sungai besar mengakibatkan transportasi air menjadi alternatif bagi masyarakat. Akses ke daerah-daerah seperti Krayan, Lumbis, dan sebagian wilayah Malinau hanya dapat ditempuh melalui jalur udara atau sungai. Terbatasnya prasarana transportasi yang memadai dan integrasi antar sarana transportasi darat, laut, dan udara masih belum berjalan optimal menjadikan biaya logistik menjadi mahal. Di masa mendatang pengembangan transportasi juga perlu untuk memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, ketahanan terhadap bencana, dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi berbasis digital. Lebih dari itu, akses internet dan jaringan seluler masih terbatas memperparah keterisolasian dan menghambat pendidikan, ekonomi digital, dan pelayanan publik.

Peningkatan konektivitas wilayah dan aksesibilitas layanan dasar dan merata menjadi agenda penting dalam pembangunan selama lima tahun ke depan. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, memperkuat integrasi wilayah, serta memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan agar dapat mengakses pelayanan publik secara setara.

Pemerataan pembangunan infrastruktur akan tetap diarahkan secara kontekstual dan adaptif, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat berjalan secara berkeadilan dan berdampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan ketersediaan aset (stok infrastruktur) yang terbangun untuk meningkatkan akses; menurunkan biaya produksi, biaya transportasi dan biaya logistik; menguatkan konektivitas dan rantai nilai komoditas; serta mengembangkan pariwisata. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memberikan dampak yang baik ke berbagai sektor pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.

5. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari dan Berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan menjadi salah satu isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 mengingat besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki sekaligus meningkatnya tekanan terhadap kualitas lingkungan akibat aktivitas pembangunan. Kalimantan Utara memiliki kekayaan ekosistem hutan tropis, mangrove, gambut, sungai, kawasan pesisir, serta potensi energi baru terbarukan yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologis dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, kondisi yang ada menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih belum optimal, implementasi kebijakan berbasis ekologis belum berjalan secara maksimal, serta masih terjadi konversi kawasan hutan menjadi lahan yang kurang produktif. Kondisi tersebut diperkuat oleh tantangan global berupa perubahan iklim, persaingan pemanfaatan sumber daya alam, dan meningkatnya risiko krisis lingkungan, sehingga menuntut pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.

Dalam konteks Kalimantan Utara sebagai provinsi perbatasan yang sedang berkembang, pengelolaan lingkungan hidup perlu diintegrasikan dengan transformasi ekonomi hijau dan ekonomi biru agar pemanfaatan

sumber daya alam mampu memberikan nilai tambah tanpa mengurangi fungsi ekologisnya. Pengembangan sektor kehutanan, perikanan, kelautan, pertanian, pariwisata alam, dan energi baru terbarukan perlu dilaksanakan melalui prinsip pembangunan rendah karbon, konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan kawasan mangrove dan gambut, rehabilitasi lahan kritis, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pendekatan tersebut tidak hanya memperkuat daya saing ekonomi daerah, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi yang semakin meningkat.

Oleh karena itu, pembangunan Kalimantan Utara Tahun 2027 perlu diarahkan pada penguatan tata kelola lingkungan hidup yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan melalui penguatan implementasi kebijakan berbasis ekologis, peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam, rehabilitasi ekosistem yang terdegradasi, pengembangan energi baru terbarukan, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga fungsi lingkungan sebagai penopang pembangunan jangka panjang sekaligus mendukung terwujudnya transformasi ekonomi hijau dan ekonomi biru.

6. Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Perbatasan yang Berkualitas

Kalimantan Utara sebagai salah satu provinsi baru di Indonesia yang dimekarkan pada tahun 2013 ini memiliki tantangan sekaligus peluang besar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Kualitas birokrasi yang adaptif, akuntabel, dan transparan serta inovatif menjadi fondasi utama untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, reformasi birokrasi perlu terus didorong melalui peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi layanan publik, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan terjangkau.

Kalimantan Utara secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia. Tata kelola perbatasan menjadi isu strategis yang harus dikelola secara serius, karena menyangkut aspek kedaulatan, keamanan, serta potensi ekonomi lintas negara. Penguatan infrastruktur perbatasan, peningkatan koordinasi antar-instansi, dan pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru menjadi prioritas penting. Dengan pengelolaan yang tepat, wilayah perbatasan dapat menjadi gerbang kemajuan, bukan zona terluar yang terabaikan.

Kualitas tata kelola pemerintahan dan perbatasan yang baik juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berbasis data, serta penguatan peran desa dalam pembangunan wilayah perbatasan, akan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi daerah. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, Kalimantan Utara dapat memanfaatkan posisinya secara strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

2.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 pada uumnya didominasi oleh kebutuhan pembangunan yang bersifat pelayanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten/kota. Sebagian besar usulan diarahkan kepada perangkat daerah yang menangani keuangan, infrastruktur, pertanian, kelautan dan perikanan, dan pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspirasi DPRD difokuskan pada upaya mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, serta memperkuat pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

Apabila dikaitkan dengan delapan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027, sebagian besar Pokir DPRD memiliki keterkaitan yang kuat dengan Prioritas 3: Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan, Prioritas 4: Pengembangan Sektor Unggulan

Pangan dan Agribisnis yang Berkelanjutan, Prioritas 7: Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara, serta Prioritas 2: Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera. Hal ini tercermin dari banyaknya usulan pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan perlengkapan jalan, bantuan alsintan, pupuk, bibit, pengembangan pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, koperasi, serta berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan produktivitas masyarakat. Di sisi lain, terdapat juga usulan pada bidang pendidikan, olahraga, lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemerintahan, dan pelayanan publik yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan.

Secara keseluruhan, pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2027 telah mencerminkan aspirasi pembangunan yang cukup komprehensif dan selaras dengan arah pembangunan daerah. Adapun rangkuman dari pokok-pokok pikiran DPRD yang dikaitkan dengan prioritas daerah tahun 2027 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.117
Keterkaitan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan Prioritas Daerah Tahun 2027

Prioritas Daerah	Uraian Terkait Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Perangkat Daerah yang dominan
1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sarana pendidikan, bantuan fasilitas pendidikan, sarana olahraga, dan peningkatan pelayanan sosial. Tidak ditemukan usulan yang secara eksplisit memuat program kesetaraan gender.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Kesejahteraan Rakyat-Setda, Dinas Pemuda dan Olahraga
2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Banyak usulan berasal dari wilayah perbatasan dan pedalaman berupa pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, serta peningkatan aksesibilitas masyarakat.	DPUPRPKP, BKAD, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Bantuan kelompok tani, nelayan, UMKM, koperasi, sarana usaha, alat produksi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan kelompok usulan yang sangat dominan.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Disperindagkop UKM
4. Pengembangan Sektor Unggulan Pangan dan Agribisnis yang Berkelanjutan	Pengadaan pupuk, alsintan, bibit, irigasi, bantuan pertanian, peternakan, serta peningkatan produksi pangan.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Prioritas Daerah	Uraian Terkait Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Perangkat Daerah yang dominan
5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang Berkelanjutan	Usulan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan sektor kelautan dan perikanan, serta beberapa kegiatan pada wilayah pesisir. Jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan sektor infrastruktur dan pertanian.	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup
6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Ditemukan usulan pengembangan sarana wisata, kegiatan budaya, dan fasilitas pendukung pariwisata, namun porsinya masih terbatas.	Perangkat daerah terkait pariwisata dan kebudayaan
7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Salah satu kelompok usulan terbesar berupa pembangunan dan peningkatan jalan provinsi, jembatan, drainase, serta perlengkapan jalan.	DPUPRPKP
8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Terdapat usulan penguatan pelayanan pemerintahan, sarana perangkat daerah, serta dukungan administrasi pemerintahan, meskipun jumlahnya tidak sebesar sektor infrastruktur dan ekonomi.	BKAD, perangkat daerah pendukung tata kelola pemerintahan

Sumber: SIPD, diolah

2.6 Penerapan Inovasi Daerah

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan Pelayanan Publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing daerah.

Penerapan inovasi daerah memberikan manfaat yang luas dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pengembangan berbagai inovasi pada aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi, serta kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha, pemerintah daerah dapat mempercepat penyelesaian permasalahan pembangunan, meningkatkan kualitas layanan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang lebih kondusif. Selain itu, inovasi daerah juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan daya saing daerah melalui pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal, sehingga mampu mendorong percepatan pencapaian sasaran

pembangunan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Setiap tahun, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara mengusulkan dan menetapkan inisiatif inovasi daerah. Penerapan inovasi daerah tahun 2025 dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.118
Inovasi Daerah Tahun 2025

No	Judul Inovasi	Admin OPD	Bentuk Inovasi	Kemat angan	Tahapan Inovasi
1	Sistem Informasi Bullying Terintegrasi Dan Interaktif (Sibatik)	SMAN 1 Nunukan Selatan	Inovasi Pelayanan Publik	105	Penerapan
2	Sijosku (Sistem Informasi Kesejateraan Sosial)	Dinas Sosial	Inovasi Pelayanan Publik	105	Penerapan
3	Sipelandukilat Smart (Sistem Pelayanan Adminstrasi Kependudukan Di Wilayah Pedalaman Dan Perbatasan Dengan Pendekatan Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Based)	Disdukcapil	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah	103	Penerapan
4	Giat Kuat Benuanta Baru - Strategi Peningkatan Kualitas Belanja BLUD Sebagai Implementasi Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan	RSUD Jusuf Sk	Inovasi Pelayanan Publik	103	Penerapan
5	Terpadu Kaltara (Satu Data Untuk Perencanaan Terpadu Kalimantan Utara)	Bappeda & Litbang	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	103	Penerapan
6	Sirindaku (Sistem Informasi Riset Dan Inovasi Kalimantan Utara)	Bappeda & Litbang	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	100	Penerapan
7	E- Monev Kaltara (Monitoring Dan Evaluasi Rkpd Dan Dak)	Bappeda & Litbang	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	100	Penerapan
8	Siplapm (Sistem Informasi Pengolahan Data Penanaman Modal)	DPMPTSP	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah	99	Penerapan
9	Sistem Kehadiran Asn Kaltara (Sikara)	BKD	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	99	Penerapan
10	Transformasi Layanan Kesehatan Inovasi Pendaftaran Online	RSUD Jusuf Sk	Inovasi Pelayanan Publik	98	Penerapan

No	Judul Inovasi	Admin OPD	Bentuk Inovasi	Kematangan	Tahapan Inovasi
	Terintegrasi Simrs, Di RSUD Dr H Jusuf Sk				
11	Internalisasi Berakhlak (Instrumen Pelaksanaan Evaluasi Berakhlak)	Biro Organisasi	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	97	Penerapan
12	Anjungan Pasien Mandiri (Apm) : Inovasi Modern Dalam Layanan Kesehatan Di RSUD Dr.H Jusuf Sk	RSUD Jusuf Sk	Inovasi Pelayanan Publik	97	Penerapan
13	Siap Sigapku (Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Dan Harga Terpadu Kalimantan Utara)	Disperindagkop	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	96	Penerapan
14	Rujak KTMDU (Berburu Pajak KTMDU)	UPTD Bapenda Tarakan	Inovasi Pelayanan Publik	96	Penerapan
15	Tape (Perencanaan Dan Implementasi Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologis Di Kalimantan Utara)	Bappeda & Litbang	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	96	Penerapan
16	Siragamudaku (Sistem Informasi Olahraga Dan Pemuda Terintegrasi Provinsi Kalimantan Utara)	Dispora	Inovasi Pelayanan Publik	95	Penerapan
17	Si Pelayan Pintar Si Kaltara Bisa (Fasilitasi Pelayanan Pindah Datang Luar Domisili Kaltara Berbasis Implementasi Stelsel Aktif)	Disdukcapil	Inovasi Pelayanan Publik	95	Penerapan
18	Simponi Desaku (Sistem Informasi Manajemen Pengolahan Data Dan Pelatihan Terintegrasi Desa Kalimantan Utara)	DPMD	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	94	Penerapan
19	Layanan Supertanding (Layanan Supervisor On Duty Pelayanan Jalur Cepat Tanpa Dinding) RSUD Dr H Jusuf Sk	RSUD Jusuf Sk	Inovasi Pelayanan Publik	94	Penerapan
20	Adindaku (Alat Angkut Pengendali Inflasi Kalimantan Utara)	Disperindagkop	Inovasi Pelayanan Publik	93	Penerapan
21	Sip Koperku (Sistem Informasi Dan Pelayanan Koperasi Dan Umkm Kalimantan Utara)	Disperindagkop	Inovasi Pelayanan Publik	93	Penerapan
22	Rumah Singgah Gratis RSUD Dr H Jusuf Sk	RSUD Jusuf Sk	Inovasi Pelayanan Publik	93	Penerapan
23	Sifokal (Sistem Informasi Kawasan Hutan Lindung)	UPTD Kph Tarakan	Inovasi Pelayanan Publik	93	Penerapan
24	Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Bahan Bakar Minyak Bagi Nelayan Dan Layanan Pengaduan Masyarakat (Pena Emas) Pelabuhan Perikanan Tengkayu Ii	UPTD Pelabuhan Tengkayu Ii	Inovasi Pelayanan Publik	93	Penerapan
25	Pada Bekesah (Pelayanan Data Dan Kependudukan Bersama Di Teras Rumah)	Disdukcapil	Inovasi Pelayanan Publik	92	Penerapan

No	Judul Inovasi	Admin OPD	Bentuk Inovasi	Kematangan	Tahapan Inovasi
26	D'bestlah (Dukcapil Berjalan Kesekolah)	Disdukcapil	Inovasi Pelayanan Publik	92	Penerapan
27	Apresiasi Seniman	Uptd Taman Budaya	Inovasi Pelayanan Publik	92	Penerapan
28	SDGs Ku (*Sustainable Development Goals* Kalimantan Utara)	Bappeda & Litbang	Inovasi Pelayanan Publik	92	Penerapan
29	Admin Smart (Aplikasi Manajemen Administrasi Perkantoran Elektronik)	Bappeda & Litbang	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	91	Penerapan
30	Hunting Kendaraan	UPTD Bapenda Tarakan	Inovasi Pelayanan Publik	89	Penerapan
31	Pengelolaan Tambak Tradisional Ramah Lingkungan Dan Berkelanjutan (Peta Tambak)	DKP	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	87	Penerapan
32	Optimalisasi Penataan Organisasi Melalui Integrasi Data Asn Dan Evaluasi Kelembagaan (Operasi Lalulintas Data Seluas Lembaga)	Biro Organisasi (Iga2020.Organisasi)	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	87	Penerapan
33	Prolanteraku (Program Layanan Dokter Terbang Kalimantan Utara)	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	86	Penerapan
34	Klinik Kinerja Terpadu (Klik Aja Tu)	Biro Pem Otda	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	86	Penerapan
35	Sigap Pelaut (Sinergitas Penerapan Strategi Preventif, Persuasif, Dan Represif Dalam Pencegahan Destructive Fishing)	DKP	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	85	Penerapan
36	Sate Padat (Samsat Goes To RT, PAD Meningkat)	UPT Bapenda Malinau	Inovasi Pelayanan Publik	84	Penerapan
37	P2kb (Pemeriksaan Pajak Kendaraan Bermotor)	Uptd Bapenda Tarakan	Inovasi Pelayanan Publik	84	Penerapan
38	Waru Mahoni (Wilayah Ruang Perhutanan Sosial Dengan Manajemen Ho(U)Tan Bernilai Konservasi)	KPH Bulungan	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	84	Penerapan
39	Abang Tarbat (Antar Obat Tarakan Hebat)	RSUD Jusuf Sk	Inovasi Pelayanan Publik	84	Penerapan
40	Inovasi Layanan Bersol (Berbagi Dan Sosialiasi)	UPTD Bapeda	Inovasi Pelayanan Publik	83	Penerapan
41	SOA (Subsidi Ongkos Angkut)	Disperindagkop	Inovasi Pelayanan Publik	83	Penerapan

No	Judul Inovasi	Admin OPD	Bentuk Inovasi	Kematangan	Tahapan Inovasi
42	Kaltara Di Hati, Kaltara Rumah Kita, Masyarakat Menyapa	Biro Umum	Inovasi Pelayanan Publik	83	Penerapan
43	Simpelkajila (Sistem Informasi Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala)	Dinas Pendidikan	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	83	Penerapan
44	Tengkayu I Ziap (Zona Integrasi Area Perparkir)	UPTS Tengkayu I	Inovasi Pelayanan Publik	83	Penerapan
45	Samsat Delivery Order Online	UPTD Bapenda Malinau	Inovasi Pelayanan Publik	83	Penerapan
46	Aku Kejar (ASN Kalimantan Utara Belajar)	BPSDM	Inovasi Pelayanan Publik	83	Penerapan
47	Gowes (Going Zero Waste)	UPTD KPH Tarakan	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	82	Penerapan
48	Sappa-Peradi	BKAD	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	81	Penerapan
49	Bapak Bersatu (Bayar Pajak Kendaraan Bermotor ASN Tepat Waktu)	UPTD Bapenda Tarakan	Inovasi Pelayanan Publik	81	Penerapan
50	Si Bekantan	KPH KTT	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	81	Penerapan
51	E-Dataku Sidara Cantik 2.0	DKISP	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	80	Penerapan
52	Bersiwak (Berkunjung Dan Silaturahmi Ke Wajib Pajak)	Bapenda KTT	Inovasi Pelayanan Publik	80	Penerapan
53	Samsat Prioritas (Sari)	Bapenda KTT	Inovasi Pelayanan Publik	79	Penerapan
54	Sobat-Ps - Sistem Informasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Perhutanan Sosial	Dishut	Inovasi Pelayanan Publik	79	Penerapan
55	Kolaborasi Penanganan Konflik Tenurial Di Wilayah Uptd Kph Nunukan	KPH Nunukan	Inovasi Pelayanan Publik	78	Penerapan
56	Aplikasi Ciker (Capaian Kinerja) Bappeda Dan Litbang	Bappeda & Litbang	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	73	Penerapan
57	Gita Peradi (Digitalisasi Data Disperindagkop Dan Ukm Berbasis Web)	Disperindagkop	Inovasi Pelayanan Publik	55	Uji Coba
58	Tengkayu I Siap (Sistem Integrasi Area Perparkiran)	UPTD Tengkayu I	Inovasi Pelayanan Publik	49	Uji Coba

No	Judul Inovasi	Admin OPD	Bentuk Inovasi	Kematangan	Tahapan Inovasi
59	Layanan Informasi Geografis Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Berbasis Webgis	Dishut	Inovasi Pelayanan Publik	49	Penerapan
60	Si Watas Ku (Sistem Informasi Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara)	Biro Perbatasan	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	48	Penerapan
61	Singal-Ku (Seputar Isu Dan Galeri Klarifikasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara)	Biro Adpim	Inovasi Pelayanan Publik	44	Penerapan
62	Pengelolaan Strategi Daerah Rawan Kecelakaan	Dishub	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	38	Penerapan
63	E-Bang (Elektronik Administrasi Pembangunan)	Biro Adm Pembangunan	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	37	Penerapan
64	Akselerasi Program Pendampingan Kinerja Di Provinsi Kalimantan Utara (Sip Dampink Ku)	Biro Organisasi	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	35	Penerapan
65	Peningkatan Peluang Investasi Bidang Kayu Di Luar Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Produk Energi Terbarukan	Dishut	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	34	Penerapan
66	Pendampingan Penerapan Fitur E-Kontrak Spse Bagi Pejabat Pembuat Komitmen	Biro Barjas	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	34	Penerapan
67	Siap (Sistem Informasi Dan Aplikasi Pengendalian)	Banhub	Inovasi Pelayanan Publik	33	Uji Coba
68	Cuti Aparatur Sipil Negara Di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara (Cuan Dinsosku	Dinas Sosial	Inovasi Pelayanan Publik	32	Uji Coba
69	Optimalisasi Peningkatan Kompetensi Asn Melaui Digitalisasi Dan Pengarsipan Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan	P3APPPKB	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	30	Penerapan
70	Kegubkaltaradihati	Biro Hukum	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	27	Inisiatif
71	Pamanben Di SLTA Pro Kaltara (Pembelajaran Aman Bencana Di SLTA Provinsi Kalimantan Utara)	BPBD	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	26	Penerapan

No	Judul Inovasi	Admin OPD	Bentuk Inovasi	Kematangan	Tahapan Inovasi
72	Benuanta Fest	Dinas Pariwisata	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	23	Penerapan
73	Strategi Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Lahan Baku Sawah	Dinas ESDM (Iga2020.ESDM)	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	0	Inisiatif
74	Siap Lari Beb	DKISP	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	Uji Coba
75	Pena Kayan (Peningkatan Kualitas Pelayanan Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan)	UPTS Pelabuhan Lie Hie Djung	Inovasi Pelayanan Publik	0	Penerapan
76	Tata Kelola Lingkungan Hidup Kaltara Melalui Regulasi	DLH	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	0	Uji Coba
77	Sibaper (Sistem Informasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Utara)	Setwan	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	Penerapan
78	Digital Ecosystems Beasiswa Kaltara Unggul (Daebak)	Biro Kesra	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	Penerapan
79	Digitara (Digitalisasi Informasi Layanan Transportasi Angkutan Perairan Speedboat Reguler Sekalimantan Utara)	Dishub	Inovasi Pelayanan Publik	0	Penerapan
80	Adminku (Administrasi Umum Dan Kepegawaian Kalimantan Utara)	BPSDM	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	Inisiatif
81	Samudra DKP (Sistem Manajemen Komunikasi Data Dan Informasi Dinas Kelautan Dan Perikanan)	DKP	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	Penerapan
82	Layanan Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan Untuk Mendukung Konektivitas Transportasi Di Provinsi Kalimantan Utara	Dishub	Inovasi Pelayanan Publik	0	Uji Coba
83	Si Ivan Pelari UPTD PPA (Sistem Inventarisasi Digital Pelaporan Internal) UPTD PPA	P3APPPKB	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	0	Inisiatif

No	Judul Inovasi	Admin OPD	Bentuk Inovasi	Kemat angan	Tahapan Inovasi
84	Pusat Informasi Terpadu Dinas Esdm Provinsi Kalimantan Utara	Dinas ESDM	Inovasi Pelayanan Publik	0	Inisiatif
85	Sistem Informasi Pemantauan Harga Batuan	Dinas ESDM	Inovasi Pelayanan Publik	0	Inisiatif
86	Digitalisasi Pendaftaran Dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan Di Kalimantan Utara	Kesbangpol	Inovasi Pelayanan Publik	0	Penerapan
87	Sadar Kaltara	Satpol PP	Inovasi Pelayanan Publik	0	Inisiatif
88	Registrasi SPM Online (Respon)	BKAD	Inovasi Pelayanan Publik	0	Inisiatif
89	Sikat Jalan Pake Odol (Sosialisasi Dan Inspeksi Angkutan Jalan Penegakan Hukum Kendaraan Over Dimension & Over Load)	Dishub	Inovasi Pelayanan Publik	0	Penerapan
90	Jaringan Data Dan Informasi Perekonomian (Jdi-P)	Biro Perekonomian	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	0	Inisiatif
91	Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan Melalui Media Digital (Sinfoloker)	Disnakertrans	Inovasi Pelayanan Publik	0	Inisiatif
92	Digitalisasi Arsip Dinamis Untuk Peningkatan Pelayanan Informasi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	Disnakertrans	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	Inisiatif
93	Sadar Laut - Sistem Asisten Data Dan Referensi Perikanan Laut	DKP	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	Penerapan
94	English Funday	Dinas Peprustakaan Kearsiapn	Inovasi Pelayanan Publik	0	Penerapan

Sumber: Bapperida Provinsi Kalimantan Utara, 2026

BAB 3
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional dan Prospek Ekonomi Tahun 2027

a. Kondisi Ekonomi Makro

Sasaran pembangunan nasional ditargetkan terus membaik dan menjadi prioritas pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan akan dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,00-4,71 persen di 2029. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus meningkat, tingkat kemiskinan juga ditargetkan akan turun ke level 4,5-5,0 persen di 2029. Penurunan tingkat kemiskinan juga dibarengi dengan upaya memperbaiki Rasio Gini ke tren yang lebih merata, yaitu mencapai 0,372-0,375 di 2029. Kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat diperkuat melalui integrasi data dengan adanya data tunggal kemiskinan untuk peningkatan ketepatan sasaran, serta digitalisasi bantuan dan program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Pembangunan kualitas SDM diarahkan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan transformasi jangka panjang. Upaya peningkatan kualitas dan produktivitas SDM dilakukan secara bertahap melalui perluasan program peningkatan kualitas SDM serta peningkatan standar hidup layak penduduk. Fokus kebijakan ditujukan pada peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan serta kesehatan. IMM ditargetkan sebesar 0,59 di 2029 lebih meningkatkan daya saing SDM Indonesia dalam menjawab tantangan industri dan global untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam jangka menengah, akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui penguatan investasi, terutama investasi asing langsung (FDI), peningkatan kualitas tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas.

Strategi ini bertujuan untuk memperkuat daya saing nasional, menghadapi tantangan global, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong inovasi. Untuk mengoptimalkan investasi, Pemerintah telah mendirikan BPI Danantara, yang berfungsi sebagai pengelola aset negara, khususnya yang berasal dari BUMN. BPI Danantara diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Danantara berperan sebagai pengelola investasi aset dan dana Pemerintah guna mendorong percepatan investasi produktif yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional, termasuk berperan dalam mengoptimalkan daya ungkit dalam menarik peran serta investasi swasta, baik domestik maupun asing.

Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi prioritas utama. Konektivitas antarwilayah yang lebih baik akan meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas regional. Sementara itu, transformasi menuju ekonomi hijau dengan pemanfaatan energi terbarukan dan transportasi berkelanjutan akan memperkuat pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Peningkatan produktivitas menjadi kunci utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Reformasi regulasi, efisiensi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan strategi yang tepat, Indonesia siap menghadapi tantangan global dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan.

Pemerintah juga akan terus menjaga laju inflasi yang rendah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sasaran inflasi diarahkan dalam rentang 2,5±1 persen untuk menciptakan level harga yang terjangkau bagi masyarakat, namun tetap memberikan kondisi yang kondusif bagi aktivitas perekonomian. Pemerintah fokus untuk

menjaga daya beli masyarakat, salah satunya dengan memberikan bantalan bagi kelompok rentan.

Tabel 3.1.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
	APBN	KEM-PPKF	Proyeksi	Proyeksi	Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,2-5,8	5,3-6,1	5,6-7,0	5,8-8,0
Inflasi (%)	2,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	16.000	16.500-16.900	15.700-16.900	15.700-16.900	15.700-16.900
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,0	6,6-7,2	6,3-7,3	6,0-7,0	6,0-7,0
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	82	60-80	60-80	60-80	60-80
Lifting Minyak Mentah (rbph)	605	605-620	568-696	567-792	578-901
Lifting Gas Bumi (rbsmph)	1.005	953-1.017	904-1.118	1.023-1.345	1.110-1.539

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026

Berdasarkan gambaran asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah di atas, Pemerintah akan menyusun kerangka anggaran jangka menengah. Untuk itu, disusun postur makro fiskal jangka menengah sebagai dasar yang akan mengarahkan penyusunan kerangka anggaran jangka menengah tersebut. Postur Makro Fiskal tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Postur Makro Fiskal Jangka Menengah (% PDB)

URAIAN	APBN 2025	KEM-PPKF 2026		2027		2028		2029	
		BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	**12,36**	**11,71**	**12,31**	**11,70**	**13,21**	**12,12**	**14,94**	**12,86**	**16,76**
1. Penerimaan Perpajakan	10,24	10,08	10,54	10,29	11,39	10,75	13,13	11,52	15,01
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,11	1,63	1,76	1,40	1,81	1,36	1,81	1,33	1,76
3. Hibah	0,002	0,002	0,003	0,002	0,003	0,002	0,003	0,002	0,003
B. BELANJA NEGARA	**14,89**	**14,19**	**14,83**	**14,05**	**15,68**	**14,44**	**17,35**	**15,10**	**19,11**
1. Belanja Pemerintah Pusat	11,11	11,41	11,94	11,29	12,88	11,70	14,59	12,38	16,37
2. Transfer ke Daerah	3,78	2,78	2,89	2,76	2,80	2,74	2,76	2,72	2,74
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(0,26)**	**(0,18)**	**(0,22)**	**(0,09)**	**(0,18)**	**(0,09)**	**(0,15)**	**(0,05)**	**(0,13)**
D. DEFISIT ANGGARAN	**(2,53)**	**(2,48)**	**(2,53)**	**(2,35)**	**(2,47)**	**(2,32)**	**(2,41)**	**(2,24)**	**(2,35)**
E. PEMBIAYAAN	**2,53**	**2,48**	**2,53**	**2,35**	**2,47**	**2,32**	**2,41**	**2,24**	**2,35**
Debt Ratio	39,43	39,69	39,85	39,43	39,62	39,05	39,29	38,55	38,64

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026

b. Strategi Ekonomi Makro Tahun 2026

Untuk merespons gejolak perekonomian global, APBN dioptimalkan sebagai *shock absorber* untuk meredam gejolak melalui stabilisasi ekonomi, melindungi dunia usaha dan masyarakat, serta menjaga APBN tetap sehat dan kredibel. Upaya stabilisasi ekonomi ditempuh dengan melakukan negosiasi perdagangan dan investasi, deregulasi serta penguatan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan. Melalui upaya tersebut diharapkan akan mampu memelihara momentum, menjaga kepercayaan pasar serta stabilitas ekonomi. Hal terefleksi pada pertumbuhan ekonomi yang resilien, terjaganya nilai tukar dan suku bunga, serta terkendalinya inflasi di level rendah.

Beberapa strategi ekonomi makro tahun 2026, dijelaskan sebagai berikut:

1) Nilai Tukar Rupiah

Pada tahun 2026, pergerakan nilai tukar diperkirakan masih akan diwarnai volatilitas dari pergerakan faktor global. Ketidakpastian kebijakan moneter negara maju, masih tingginya tensi geopolitik, serta keberlanjutan dari perang dagang diperkirakan akan memberi tekanan terhadap pergerakan nilai tukar. Namun demikian, perbaikan kondisi perekonomian domestik diperkirakan dapat meredam tekanan pada nilai tukar. Di sisi lain, arus modal asing juga diproyeksikan meningkat, didorong upaya Pemerintah mendukung perbaikan kinerja sektor riil, pengembangan dan pendalaman sektor keuangan domestik, pengembangan sumber pertumbuhan ekspor baru, serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap Pemerintah di dalam pengelolaan kebijakan fiskal serta upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Optimalisasi kebijakan DHE juga berkontribusi memperkuat cadangan devisa sehingga mampu mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. Dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2026 berpotensi bergerak dalam kisaran Rp16.500-Rp16.900 per USD.

2) Inflasi

Tingkat inflasi terus diupayakan bergerak pada sasaran inflasi 1,5-3,5 persen di tahun 2026. Kisaran tersebut diharapkan mencerminkan stabilitas harga yang mampu menciptakan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Selain stabilitas harga yang dicapai, sasaran ini juga diharapkan tetap memberikan ruang insentif bagi dunia usaha. Oleh karena itu, Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas inflasi melalui strategi menjaga keterjangkauan harga, menjamin ketersediaan pasokan, dan menjaga kelancaran distribusi. Tercapainya inflasi pada target sasaran perlu didukung oleh terkendalinya inflasi di masa Hari Besar Keagamaan Nasional, yaitu pada masa permintaan yang meningkat di tengah tantangan suplai dan distribusi. Inflasi inti terus didorong tumbuh agar mencerminkan tetap kuatnya daya beli masyarakat secara umum. Selain itu, Pemerintah juga terus berkomitmen untuk menjaga keterjangkauan harga pangan di tengah tantangan cuaca dan perubahan iklim. Berbagai strategi yang dilakukan mencakup sisi hulu hingga hilir, antara lain operasi pasar, pasar murah, fasilitasi distribusi, intervensi pasokan dan harga, dan perbaikan infrastruktur.

3) Indonesian *Crude-oil Price*

Tantangan juga berasal dari sisi suplai dan demand yang turut mewarnai pergerakan harga minyak mentah Indonesia/ICP. Dari sisi suplai, kebijakan peningkatan produksi minyak mentah dari OPEC+ yang dimulai pada triwulan II 2025 diprediksi akan mendorong turunnya harga minyak mentah di 2026. Tekanan harga minyak mentah juga berasal dari pertumbuhan produksi negara-negara di luar OPEC+, seperti Rusia, dimana biasanya harganya masih lebih rendah dibanding negara OPEC+. Lebih lanjut, terdapat potensi meredanya ketegangan Rusia-Ukraina sehingga embargo ekonomi yang dilakukan oleh AS berakhir dan memungkinkan untuk mendorong peningkatan suplai minyak mentah dunia. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi dunia yang masih stabil juga belum mendorong permintaan minyak global secara signifikan.

Selain itu, inovasi dan pertumbuhan produksi moda transportasi berbasis non-fossil fuel juga cukup mereduksi permintaan minyak global.

Melihat ke depan, harga minyak mentah dunia pada tahun 2026 berada dalam kisaran USD60-USD80 per barel. Dalam skenario terburuk, jika perang dagang semakin intens dan ekonomi global mengalami resesi, maka harga minyak mentah dunia dapat lebih rendah dari angka tersebut.

4) Lifting Migas

Produksi migas Indonesia menghadapi tantangan besar. Capaian lifting migas tahun 2024 sebesar 579,7 rbph (93 persen dari target APBN) dan 978,8 rbsmph (95 persen dari target APBN). Beberapa kendala pelaksanaan lifting migas adalah gangguan operasional akibat cuaca ekstrem dan shutdown fasilitas, rendahnya permintaan pasar, tertundanya kegiatan eksplorasi karena bencana dan perizinan, serta keterlambatan proyek-proyek strategis di beberapa lapangan migas. Tantangan-tantangan tersebut masih akan berdampak pada capaian lifting migas tahun 2025.

Dalam jangka pendek, berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan lifting migas. Beberapa upaya tersebut diantaranya adalah pengeboran lebih dari seribu sumur pengembangan per tahun, reaktivasi ribuan sumur idle yang belum beroperasi, serta percepatan proyek EOR di beberapa wilayah potensial yang kedepannya memiliki prospek produksi minyak jutaan barel. Dengan pelaksanaan kebijakan peningkatan lifting tersebut, capaian lifting migas pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar 605-620 rbph untuk minyak dan 953-1.017 rbsmph untuk gas.

5) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkirakan tumbuh kuat pada kisaran 5,2 – 5,8 persen. Stabilisasi harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, konsumsi pemerintah akan difokuskan pada programprogram produktif yang mendorong kualitas SDM, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, termasuk melalui implementasi program

MBG. Kinerja ekspor juga didorong melalui berbagai kebijakan diantaranya, melalui strategi hilirisasi industri, diversifikasi produk, serta perluasan pasar ekspor ke berbagai negara (trade diversion dan trade creation). Sementara itu, akselerasi investasi akan terus diperkuat dengan pemerataan pembangunan infrastruktur, optimalisasi melalui BPI Danantara, serta penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif. Transformasi ekonomi menuju sektorsektor bernilai tambah tinggi, berorientasi pada keberlanjutan dan rendah emisi, akan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing nasional di tengah dinamika global. Meski demikian, risiko eksternal seperti ketegangan geopolitik dan melemahnya permintaan global tetap perlu diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif, responsif, serta berorientasi jangka panjang.

c. Fokus Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2026

Di tengah gejolak global yang dinamis dan tantangan struktural domestik, kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan "Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi" menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah berkomitmen memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan melalui 8 (delapan) strategi untuk mendukung agenda pembangunan: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global. Dalam rangka menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan secara optimal, kebijakan fiskal tahun 2026 dirancang tetap ekspansif, terarah, dan terukur dengan defisit di kisaran 2,48 persen hingga 2,53 persen PDB.

APBN terus dijaga tetap sehat dan kredibel, dengan terus melakukan reformasi fiskal dalam rangka mobilisasi pendapatan yang diselaraskan dengan kapasitas perekonomian, meningkatkan kualitas dan efisiensi belanja, serta inovasi pembiayaan untuk mendorong kinerja perekonomian dan kesejahteraan.

d. Pagu Indikatif Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026

Pemerintah berupaya terus melanjutkan penyempurnaan dalam pengalokasian, penyaluran dan penggunaan anggaran TKD, khususnya dalam mendukung programprogram prioritas nasional. Strategi pengelolaan TKD tersebut dilakukan melalui penguatan sinergi belanja pusat dan daerah, kebijakan penyaluran TKD berbasis kinerja untuk sebagian jenis TKD, penguatan APIP dalam melakukan pengawasan, dan perbaikan kualitas penyaluran TKD.

Anggaran TKD sebagai instrumen fiskal bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah serta menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Pengalokasian dan penggunaan TKD harus memberikan kontribusi optimal dalam program prioritas nasional dan meraih capaian rencana pembangunan nasional khususnya dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045.

Pagu Indikatif TKD pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp712,3 triliun-Rp745,3 triliun, dipengaruhi oleh penyelarasan terhadap kebijakan strategis Pemerintah, outlook pendapatan negara yang dibagihasilkan tahun sebelumnya, kebutuhan anggaran untuk pelayanan dasar publik di daerah, serta kemampuan keuangan negara (kapasitas fiskal APBN). Arah kebijakan umum TKD Tahun 2026 adalah sebagai berikut (i) meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan; (ii) mendukung daya saing daerah melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan local taxing power; (iii) meningkatkan efektivitas peran TKD agar sejalan dengan Prioritas Nasional utamanya pendidikan, kesehatan, Koperasi Merah Putih, dan ketahanan pangan; (iv) menyeimbangkan fiskal pusat dan daerah (vertical balance) serta antar daerah (horizontal balance); (v) memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah.

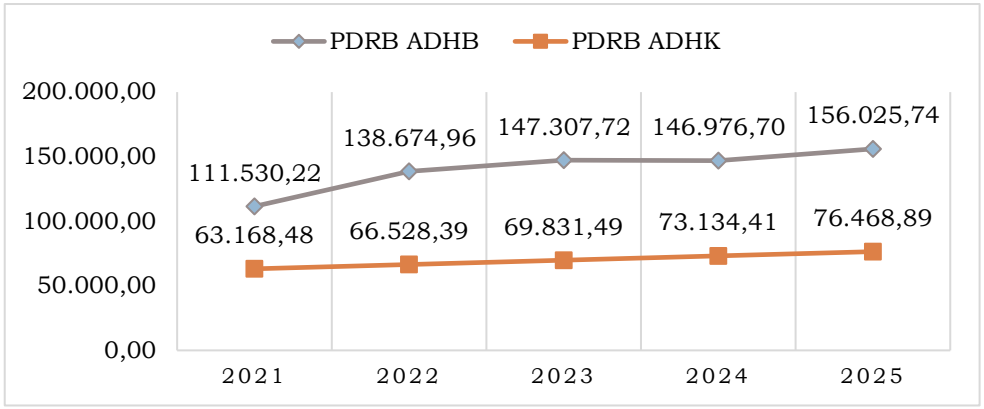
3.1.2 Kondisi dan Prospek Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara

3.1.2.1 Kondisi Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara

A) Pertumbuhan Ekonomi

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Utara atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2025 mencapai Rp 156.025,7 miliar. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp 146.976,70 miliar. Sementara berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB tahun 2025 mencapai Rp76.468,89 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya.

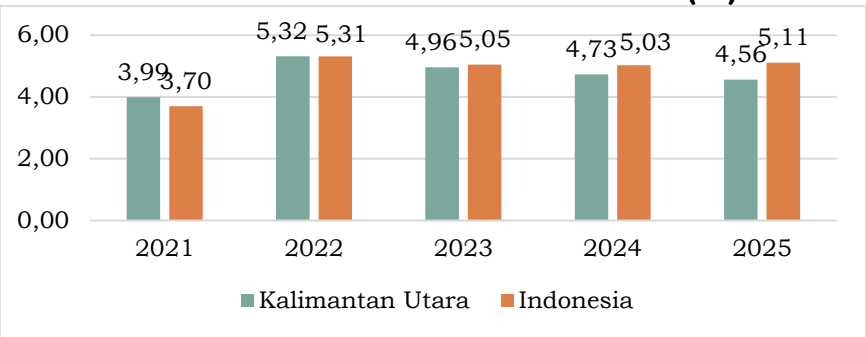
Gambar 3.1.
PDRB ADHB dan PDRB ADHK Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

Ekonomi Kalimantan Utara tahun 2025 tumbuh sebesar 4,56 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Konstruksi sebesar 11,17 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,99 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,84 persen. Sementara itu, Pertambangan dan Penggalian yang memiliki peran dominan terkontraksi 1,09 persen. Sedangkan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 2,60 persen.

Gambar 3.2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: BPS RI, 2026

Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh pertumbuhan semua kategori lapangan usaha kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,17 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,74 persen.

B) Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada Maret 2025 sebesar 42,57 ribu (5,54 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2024 sebesar 41,11 ribu (5,38 persen), jumlah penduduk miskin secara absolut bertambah 1,46 ribu jiwa dan secara persentase naik 0,16 persen poin. Jumlah penduduk miskin daerah perkotaan dan perdesaan mengalami kenaikan baik secara absolut maupun persentase. Selama periode September 2024-Maret 2025, penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami kenaikan sebanyak 0,5 ribu jiwa dari 25,06 ribu orang pada September 2024 menjadi 25,56 ribu orang pada Maret 2025 atau secara persentase naik sebesar 0,2 poin dari 5,07 persen menjadi 5,27 persen.

Penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami kenaikan sebanyak 0,97 ribu jiwa dari 16,05 ribu orang pada September 2024 menjadi 17,01 ribu orang pada Maret 2025 atau secara persentase naik

0,02 poin dari 5,96 persen menjadi 5,98 persen. Pada bulan Maret 2025 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan lebih banyak dibanding di daerah perdesaan. Namun secara persentase penduduk miskin yang berada di daerah perdesaan lebih besar dibanding di daerah perkotaan, dimana di daerah perdesaan sebesar 5,98 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 5,27 persen. Pola ini sama dengan kondisi September 2024 persentase penduduk miskin di perkotaan 5,07 persen sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu sebesar 5,96 persen.

Tabel 3.3.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Utara Menurut Daerah September 2024-Maret 2025

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin			Persentase Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Perdesaaan	Perkotaan +Perdesaan	Perkotaan	Perdesaaan	Perkotaan +Perdesaan
Sep-24	25,06	16,05	41,11	5,07	5,96	5,38
Maret 2025	25,56	17,01	42,57	5,27	5,98	5,54

Sumber: BPS Kalimantan Utara, 2025

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulandi bawah Garis Kemiskinan. Selama September 2024-Maret 2025, Garis Kemiskinan naik sebesar 0,98 persen, yaitu dari Rp. 876.375,- per kapita per bulan pada September 2024 menjadi Rp. 884.970,- per kapita per bulan pada Maret 2025. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan September 2024, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 73,58 persen. Sedangkan sumbangan GKNM terhadap GK adalah sebesar 26,42 persen.

C) Tingkat Pengangguran Terbuka

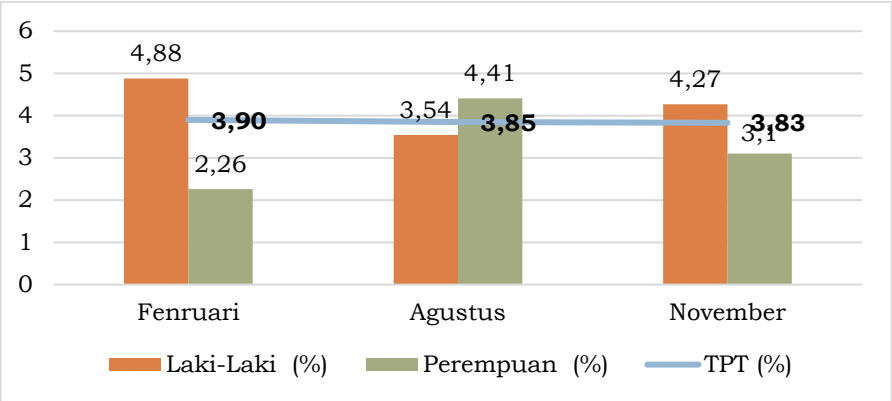
Penduduk usia kerja di Kalimantan Utara pada November 2025 sebanyak 571.283 orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 418.417 orang sekitar 73,24 persen, sisanya termasuk bukan angkatan kerja yaitu sebanyak 152.866 orang atau 26,76 persen. Komposisi angkatan kerja pada November 2025 terdiri dari 402.400 orang penduduk yang bekerja dan 16.017 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2025, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 22.614 orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 21.828 orang dan pengangguran bertambah sebanyak 786 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada November 2025 sebesar 73,24 persen, naik sebesar 3,70 persen poin dibanding Agustus 2025. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 86,70 persen lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 58,15 persen.

Berdasarkan hasil Sakernas November 2025, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 29,43 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 16,46 persen; dan Akomodasi dan makan minum sebesar 9,28 persen. Dominasi lapangan pekerjaan ini dalam menyerap tenaga kerja masih sama baik untuk Februari 2025 dan Agustus 2025.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Utara hasil Sakernas November 2025 sebesar 3,83 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga atau empat orang penganggur. Pada November 2025, TPT mengalami penurunan sebesar 0,02 persen poin dibandingkan Agustus 2025. TPT laki-laki sebesar 4,27 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,10 persen. TPT laki-laki November 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,73 persen poin sedangkan TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 1,31 persen poin apabila dibandingkan dengan Agustus 2025.

Gambar 3.3.
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025



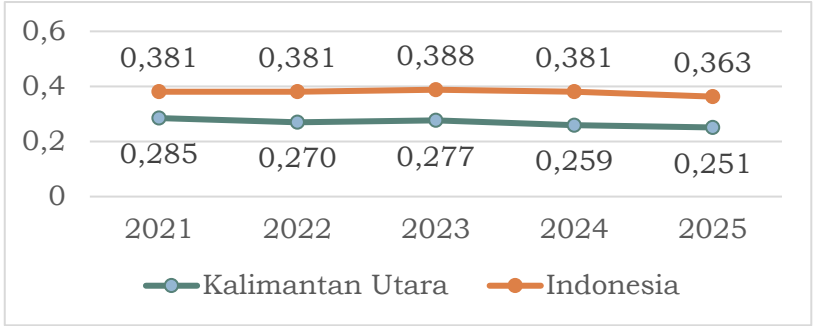
Sumber: BPS Kalimantan Utara, 2026

Selanjutnya, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 9,28 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu sebesar 1,55 persen.

D) Indeks Gini

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Angka Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Utara pada periode 2021-2025 berfluktuatif namun cenderung menurun. Dalam rentang waktu tersebut, capaian Indeks Gini di Kalimantan Utara menunjukkan kondisi yang lebih baik apabila dibandingkan dengan capaian nasional, di mana ketimpangan pendapatan di provinsi ini berada dalam kategori ketimpangan rendah atau di bawah 0,3.

Gambar 3.4.
Gini Ratio Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025



Sumber: BPS RI, 2026

Gini Ratio Kalimantan Utara pada September 2025 tercatat sebesar 0,251. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2025 yang sebesar 0,261. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,255 menurun dibanding Gini Rasio Maret 2025 yang sebesar 0,262, sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,242 turun dibandingkan Gini Rasio Maret 2025 yang sebesar 0,253.

3.1.2.2 Prospek Ekonomi Kalimantan Utara Tahun 2026 dan 2027

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara memberikan proyeksi terhadap perekonomian Kalimantan Utara Tahun 2026 dan 2027 untuk penyusunan RKPD Tahun 2027. PDRB Kalimantan Utara Tahun 2026 diperkirakan tetap bertumbuh positif pada kisaran 4,8-5,8% (yoy). Capaian ini terutama didorong oleh kinerja lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Konstruksi, dan lapangan usaha Perdagangan.

Beberapa faktor pendorong untuk pertumbuhan ekonomi tersebut, meliputi:

a. Mulai beroperasinya pabrik smelter aluminium.
b. Berlanjutnya pembangunan proyek strategis di Kalimantan Utara.
c. Tingginya realisasi PMTB seiring dengan pembangunan PSN yang akseleratif.
d. Peningkatan kapasitas industri pengolahan termasuk CPO dan Olahan Kayu.
e. Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah yang melanjutkan tren peningkatan seiring dengan optimisme terhadap perekonomian yang terus membaik.
f. Potensi peningkatan produksi pertanian khususnya beras didorong oleh OPLAH.

Sementara faktor penahannya antara lain:

a. Ketegangan geopolitik global yang terus berlanjut sehingga berdampak pada terhambatnya distribusi dan penurunan permintaan global.

b. Pembatasan produksi batu bara 2026 (penurunan RKAB).
c. Belanja Pemerintah yang semakin terbatas.
d. Berlanjutnya penurunan harga komoditas ekspor utama Kalimantan Utara seperti batu bara seiring melambatnya *demand* global dan semakin gencarnya pemanfaatan energi hijau.
e. Pertumbuhan ekonomi negara tujuan ekspor utama Kalimantan Utara seperti Tiongkok dan Jepang yang tumbuh tidak seakseleratif prakiraan.

Selanjutnya, PDRB Kalimantan Utara Tahun 2027 diperkirakan tetap bertumbuh positif pada kisaran 5,0-6,0% (yoy). Capaian ini terutama didorong oleh kinerja lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Konstruksi, dan lapangan usaha Perdagangan.

Beberapa faktor pendorong untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2027, meliputi:

a. Mulai beroperasinya pabrik smelter aluminium dengan kapasitas penuh.
b. Mulai masifnya pembangunan PLTA Sei Mentarang.
c. Berlanjutnya investasi PT Taikun Petrochemical di KIHI.
d. Tingginya realisasi PMTB lainnya seiring dengan semakin banyaknya *clean and clear project*.
e. Peningkatan kapasitas industri pengolahan termasuk CPO dan Olahan Kayu (Pembangunan Tahap II Pabrik Olahan Kertas).
f. Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah yang melanjutkan tren peningkatan seiring dengan optimisme terhadap perekonomian yang terus membaik.
g. Potensi peningkatan produksi pertanian khususnya beras didorong oleh OPLAH.

Faktor penahan pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebagai berikut:

h. Ketegangan geopolitik global yang terus berlanjut sehingga terhambatnya distribusi permintaan global. berdampak dan pada penurunan.
i. Pembatasan produksi batu bara 2027 (penurunan RKAB).

j. Belanja Pemerintah yang semakin terbatas.
k. Berlanjutnya penurunan harga komoditas ekspor utama Kalimantan Utara seperti batu bara seiring melambatnya *demand* global dan semakin gencarnya pemanfaatan energi hijau.
l. Pertumbuhan ekonomi negara tujuan ekspor utama Kalimantan Utara seperti Tiongkok dan Jepang yang tumbuh tidak seakseleratif prakiraan.

Selaras dengan kebijakan nasional, target indikator makro Provinsi Kalimantan Utara dalam RKPD Tahun 2027 menunjukkan arah pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pemerataan kesejahteraan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan meningkat dari 4,56 persen menjadi 5,6 persen, yang mencerminkan optimisme terhadap penguatan aktivitas ekonomi daerah melalui percepatan investasi, hilirisasi sumber daya alam, pengembangan sektor unggulan, peningkatan produktivitas, serta penguatan konektivitas wilayah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

Dari aspek kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan ditargetkan turun dari 5,54 persen pada tahun 2025 menjadi 4,2 persen pada tahun 2027, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan menurun dari 3,85 persen menjadi 3,72 persen. Selain itu, Rasio Gini ditargetkan membaik dari 0,251 menjadi 0,249, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Penurunan ketiga indikator tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan tidak hanya diarahkan pada peningkatan output ekonomi, tetapi juga pada pemerataan manfaat pembangunan melalui penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, serta pengembangan ekonomi kerakyatan.

Pada dimensi pembangunan manusia, Indeks Modal Manusia (IMM) ditargetkan meningkat dari 0,55 pada tahun 2025 menjadi 0,57 pada tahun 2027. Target tersebut mencerminkan upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan akses dan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta pengembangan kapasitas masyarakat.

Tabel 3.4.
Target Indikator Makro Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027

No.	Indikator	Realisasi 2025	Target 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,56	5,6
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,54	4,20
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,85	3,72
4	Indeks Gini	0,251	0,249
5	Indeks Modal Manusia	0,55	0,57

Sumber: hasil proyeksi, 2026

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

A) Pendapatan

Dalam periode 2021–2025, kinerja Pendapatan Daerah yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,48% per tahun. Peningkatan pendapatan terjadi secara konsisten hingga tahun 2024, namun pada tahun 2025 mengalami penurunan. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga kesinambungan sumber pendapatan daerah, terutama yang bersumber dari pendapatan transfer.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja yang relatif positif dengan rata-rata pertumbuhan 6,35% per tahun, meskipun realisasi tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pajak Daerah masih menjadi tulang punggung PAD dengan rata-rata pertumbuhan 13,98% per tahun. Retribusi Daerah mencatat pertumbuhan sebesar 33,43%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tumbuh relatif stabil, menunjukkan potensi BUMD sebagai sumber PAD

yang perlu terus diperkuat melalui peningkatan kinerja dan tata kelola. Lain-lain PAD yang Sah mengalami kontraksi, terutama pada tahun 2025 mengalami kontraksi dengan rata-rata pertumbuhan -4,84%, terutama akibat penurunan tajam pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan tingginya ketergantungan pada pendapatan yang bersifat tidak berulang, sehingga dalam perencanaan tahunan perlu dilakukan rasionalisasi target dan pengurangan ketergantungan pada sumber PAD yang bersifat tidak berulang.

Tabel 3.5.
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	
4	**PENDAPATAN**	**2.609.501.844.013,92**	**2.731.491.817.451,50**	**3.091.012.760.999,05**	**3.459.025.374.470,97**	**2.635.199.384.235,52**	**1,48**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**677.803.723.304,94**	**815.664.188.996,50**	**980.136.675.968,05**	**1.033.747.641.867,97**	**821.005.235.473,52**	**6,35**
4.1.1	Pajak Daerah	392.686.405.543,00	596.780.850.288,00	717.253.715.401,00	761.219.619.467,00	590.981.454.058,19	13,98
4.1.2	Retribusi Daerah	6.212.686.828,00	7.053.749.676,00	17.404.890.968,00	10.789.764.538,16	12.022.419.277,00	33,43
4.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	8.205.702.460,00	9.088.203.219,39	10.114.672.311,44	11.371.469.793,77	9.472.177.918,64	4,44
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	270.698.928.473,94	202.741.385.813,11	235.363.397.287,61	250.366.008.069,04	208.529.184.219,0	-4,84
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.890.949.863.341,00**	**1.908.970.208.199,00**	**2.104.954.266.065,00**	**2.417.275.881.907,00**	**1.782.452.657.471,00**	**-0,05**
4.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**	**1.818.653.490.341,00**	**1.875.149.171.199,00**	**2.080.287.939.065,00**	**2.404.627.387.907,00**	**1.782.452.657.471,00**	**0,94**
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	384.524.659.963,00	566.513.927.696,00	689.779.609.710,00	1.006.246.935.000,00	628.918.280.000,00	19,37
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.077.878.230.685,00	1.080.588.578.315,00	1.117.056.619.340,00	1.153.992.670.001,00	1.021.504.163.884,00	-1,14
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	356.250.599.693,00	228.046.665.188,00	273.451.710.015,00	244.387.782.906,00	132.030.213.587,00	-18,17
4.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya**	**72.296.373.000,00**	**33.821.037.000,00**	**24.666.327.000,00**	**12.648.494.000,00**	**-**	**-**
4.2.2.1	Dana penyesuaian	72.296.373.000,00	33.821.037.000,00	24.666.327.000,00	12.648.494.000,00	-	**-**
4.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**40.748.257.367,98**	**6.857.420.256,00**	**5.921.818.966,00**	**8.002.630.696,00**	**31.741.491.291,00**	**58,74**
4.3.1	Pendapatan hibah	315.000.000,00	5.776.633.300,00	5.546.233.000,00	6.609.420.000,00	379.704.000,00	413,69
4.3.2	Pendapatan Lainnya	40.433.257.367,98	1.080.786.956,00	375.585.966,00	1.393.210.696,00	31.361.787.291,00	564,85

Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 sampai 2025

B) Belanja Daerah

Selama periode 2021–2025, realisasi Belanja Daerah menunjukkan kecenderungan meningkat hingga tahun 2024, sebelum mengalami penurunan pada tahun 2025. Total belanja meningkat dari Rp2,37 triliun pada 2021 menjadi Rp3,57 triliun pada 2024, kemudian turun menjadi Rp2,62 triliun pada 2025. Secara rata-rata, belanja daerah tumbuh sebesar 4,50 persen per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan belanja daerah pada periode 2021–2024 bersifat relatif ekspansif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sedangkan pada tahun 2025 mulai dilakukan penyesuaian fiskal melalui pengendalian belanja.

Belanja Operasi merupakan komponen terbesar dalam struktur belanja daerah dengan rata-rata pertumbuhan 5,15 persen per tahun. Belanja ini berperan penting dalam mendukung kelancaran operasional pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja Pegawai menunjukkan tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 7,64 persen per tahun. Belanja Barang dan Jasa tumbuh rata-rata 7,08 persen per tahun, sejalan dengan meningkatnya aktivitas perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penurunan realisasi pada tahun 2025 mengindikasikan penerapan kebijakan efisiensi operasional.

Belanja Subsidi mengalami tren penurunan dengan rata-rata pertumbuhan -23,12 persen per tahun, yang menunjukkan berkurangnya kebijakan subsidi langsung dan kemungkinan pergeseran ke skema bantuan yang lebih tepat sasaran. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial bersifat fluktuatif. Hibah tumbuh rata-rata 16,27 persen, sedangkan bantuan sosial tumbuh cukup tinggi sebesar 68,21 persen, meskipun secara nominal relatif kecil. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap aspek perlindungan sosial dan penanganan kebutuhan masyarakat tertentu.

Belanja Modal mengalami peningkatan signifikan hingga tahun 2024, namun menurun tajam pada tahun 2025. Secara rata-rata, pertumbuhan belanja modal tercatat 0,09 persen per tahun, menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal belum berlangsung secara konsisten.

Belanja Peralatan dan Mesin tumbuh positif dengan rata-rata 6,45 persen, yang menunjukkan adanya investasi pada sarana dan prasarana pendukung layanan publik. Belanja Gedung dan Bangunan menunjukkan tren menurun dengan rata-rata -2,11 persen, mengindikasikan berkurangnya pembangunan fisik berskala besar. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan tumbuh cukup tinggi (29,48 persen), namun bersifat fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan proyek strategis tahunan. Belanja Aset Tetap Lainnya tumbuh tinggi (70,07 persen), meskipun realisasinya tidak merata antar tahun.

Tabel 3.6.
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	
2	**BELANJA**	**2.372.645.890.287,06**	**2.553.577.991.131,02**	**3.242.315.178.035,82**	**3.571.246.078.206,06**	**2.615.867.256.360,49**	**4,50**
2.1	**Belanja Operasi**	**1.647.219.558.627,47**	**1.629.460.884.903,74**	**2.042.445.525.498,82**	**2.333.169.870.777,97**	**1.915.454.152.887,49**	**5,15**
2.1.1	Pegawai	638.555.013.259,27	714.859.072.319,00	767.029.049.418,00	868.496.469.825,00	851.788.193.010,00	7,64
2.1.2	Barang dan Jasa	787.157.711.061,20	837.011.356.496,74	1.097.028.389.768,82	1.218.959.056.895,97	972.750.990.774,49	7,08
2.1.4	Subsidi	21.167.303.205,00	13.973.868.842,00	16.513.140.465,00	19.787.303.700,00	690.900.000,00	-23,12
2.1.5	Hibah	199.114.237.682,00	63.154.227.474,00	161.141.184.381,00	222.697.836.570,00	89.051.151.323,00	16,27
2.1.6	Bantuan Sosial	1.225.293.420,00	462.359.772,00	733.761.466,00	3.229.203.787,00	1.172.917.780,00	68,21
2.2	**Belanja Modal**	**390.900.388.868,39**	**496.619.274.367,07**	**651.639.401.736,00**	**706.181.651.526,09**	**238.122.476.024,00**	**0,09**
2.2.1	Tanah	23.338.573.244,00	51.978.879.050,00	30.379.184.731,00	36.362.332.622,00	0,00	0,21
2.2.2	Peralatan dan Mesin	95.562.120.412,00	134.331.790.579,07	118.377.089.281,00	163.713.917.310,00	96.245.169.477,00	6,45
2.2.3	Gedung dan Bangunan	173.436.399.485,39	239.046.835.735,00	345.002.801.783,00	208.505.767.057,00	102.127.124.150,00	-2,11
2.2.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	76.752.834.826,00	67.684.064.690,00	155.513.502.679,00	292.653.376.604,00	34.501.421.729,00	29,48
2.2.5	Aset Tetap Lainnya	21.810.460.901,00	3.577.704.313,00	1.904.007.132,00	743.850.360,00	4.251.803.518,00	70,07
2.2.6	Aset Lainnya	-	-	462.816.130,00	4.202.407.573,09	996.957.150,00	-
2.3	**Belanja Tak Terduga**	**11.924.306.413,00**	**923.172.706,00**	**9.451.453.256,00**	**7.566.963.773,00**	**26.359.806.199,00**	**264,99**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	11.924.306.413,00	923.172.706,00	9.451.453.256,00	7.566.963.773,00	26.359.806.199,00	264,99
2.4	**Belanja Transfer**	**322.601.636.378,20**	**426.574.659.154,21**	**538.778.797.545,00**	**524.327.592.129,00**	**435.930.821.250,00**	**9,75**
2.4.1	**Bagi Hasil Pendapatan**	**250.853.386.378,20**	**244.301.809.158,00**	**368.800.299.772,00**	**336.426.911.141,00**	**379.445.988.507,00**	**13,09**
2.4.1.1	Bagi hasil pajak daerah	250.853.386.378,20	244.301.809.158,00	368.800.299.772,00	336.426.911.141,00	379.445.988.507,00	13,09
2.4.2	**Bantuan Keuangan**	**71.748.250.000,00**	**182.272.849.996,21**	**169.978.497.773,00**	**187.900.680.988,00**	**56.484.832.743,00**	**21,98**

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	
2.4.2.1	Bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya	71.748.250.000,00	182.272.849.996,21	169.978.497.773,00	187.900.680.988,00	1.000.000.000,00	14,59
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-	55.484.832.743,00	-

Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 sampai 2025

C) Pembiayaan

Selama periode 2021–2025, Pembiayaan Daerah menunjukkan dinamika yang sangat fluktuatif. Realisasi pembiayaan meningkat signifikan dari Rp26,25 miliar pada 2021 menjadi Rp301,05 miliar pada 2023, kemudian menurun menjadi Rp129,77 miliar pada 2024, dan berbalik menjadi defisit pembiayaan sebesar Rp2,14 miliar pada 2025. Secara rata-rata, pembiayaan daerah mencatat pertumbuhan 163,07 persen per tahun, yang menunjukkan tingginya volatilitas kebijakan pembiayaan selama periode tersebut. Perubahan yang tajam ini mencerminkan pembiayaan daerah yang sangat bergantung pada penerimaan pembiayaan, khususnya dari pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Penerimaan Pembiayaan merupakan komponen utama pembiayaan daerah dengan rata-rata pertumbuhan 77,17 persen per tahun. Seluruh penerimaan pembiayaan pada periode ini bersumber dari penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Pemanfaatan SiLPA meningkat tajam dari Rp47,25 miliar pada 2021 menjadi Rp316,05 miliar pada 2023, yang mengindikasikan adanya akumulasi sisa anggaran pada tahun-tahun sebelumnya. Penurunan penerimaan pembiayaan pada 2024 dan 2025 menunjukkan menurunnya kapasitas SiLPA, yang dapat disebabkan oleh meningkatnya realisasi belanja atau perbaikan kualitas perencanaan anggaran.

Tabel 3.7.
Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (% per tahun)
		2021	2022	2023	2024	2025	
4	**PEMBIAYAAN**	**26.254.756.068,14**	**231.200.110.390,87**	**301.046.143.553,18**	**129.768.722.962,58**	**-2.140.258.279,51**	**163,07**
4.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**47.254.756.068,14**	**246.200.110.390,87**	**316.046.143.553,18**	**149.768.722.962,58**	**17.859.741.720,49**	**77,17**
4.1.1	Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	47.254.756.068,14	246.200.110.390,87	316.046.143.553,18	149.768.722.962,58	17.859.741.720,49	77,17
4.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**21.000.000.000,00**	**15.000.000.000,00**	**15.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**1,19**
4.2.2	Penyertaan modal/investasi pemerintah daerah	21.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	1,19

Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 sampai 2025

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2027

Arah kebijakan keuangan daerah difokuskan pada penguatan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara terintegrasi guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan alokasi anggaran pembangunan daerah lebih tepat sasaran, berkelanjutan, serta mampu mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Dalam aspek pendapatan daerah, kebijakan diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sistem pengelolaan pendapatan berbasis digital.

Pada sisi belanja daerah, kebijakan difokuskan pada pengendalian belanja operasional, peningkatan kualitas belanja modal yang berorientasi pada hasil (outcome), serta penguatan efisiensi dan efektivitas belanja guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada pengelolaan pembiayaan yang prudent dan berkelanjutan, dengan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan SiLPA, memperkuat perencanaan anggaran, serta memastikan pembiayaan daerah dimanfaatkan secara optimal untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.

A) Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah tahun 2027, yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan upaya pengelolaan BUMD secara efektif dan efisien.
2) Melakukan *Participating Interest* (PI) 10% melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
3) Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dantara lain dengan mengembangkan kerjasama operasi/investasi melalui pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari sisi

produksi dan pemasaran serta pengembangan secara maksimal PAD dari segala unsur.

4) Mendongkrak perolehan pajak kendaraan bermotor dengan memberikan program pembebasan denda, bea balik nama (BBN), dan pemberian keringan pokok pajak.
5) Optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta optimalisasi PAD pajak sarang burung walet.
6) Meningkatkan kembali efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur misalnya dengan penagihan dipermudah dengan cara jemput bola serta sistem pembayaran pajak secara online.
7) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah untuk meminimalisir kebocoran anggaran.
8) Mendorong iklim investasi dengan menyederhanakan proses perizinan, mendekatkan akses pelayanan perizinan dan intensifikasi potensial produk unggulan daerah menjadi layak jual.

Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah, maka dapat diproyeksikan pendapatan Daerah untuk tahun 2027 sebagaimana termuat pada tabel di bawah.

Tabel 3.8.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2028

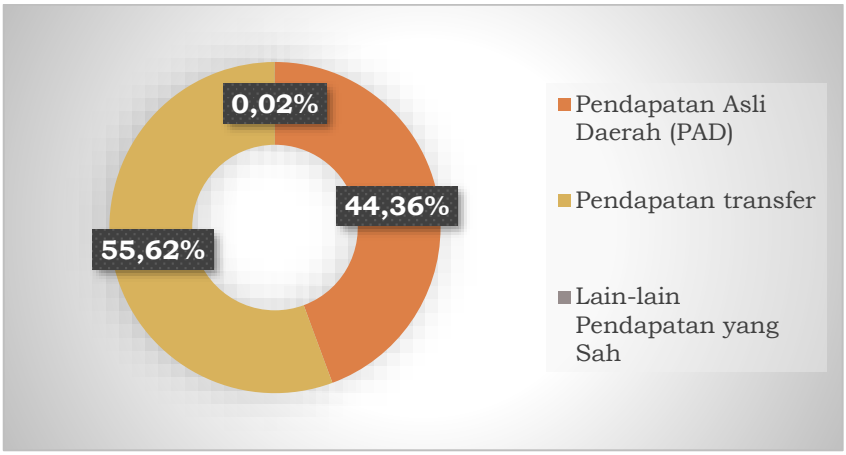
Kode Rek	Uraian	Realisasi			Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Aanggaran (%)	APBD	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana	Proyeksi/Target pada Tahun	Rata-Rata Pertumbuhan Proyeksi (%)
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	
4	**PENDAPATAN**	**3.091.012.760.999**	**3.459.025.374.471**	**2.635.199.374.235**	**-6,0**	**2.276.964.497.163**	**2.264.017.962.564**	**2.319.425.955.120**	**0,94**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**980.136.675.968**	**1.033.746.861.868**	**821.005.225.473**	**-7,6**	**1.028.413.378.163**	**1.015.466.843.564**	**1.039.669.808.145**	**0,56**
4.1.01	Pajak Daerah	717.253.715.401	761.219.619.467	590.981.444.058	-8,1	752.922.931.919	744.054.341.855	762.655.700.401	0,66
4.1.02	Retribusi Daerah	17.404.890.968	10.789.764.538	12.022.419.277	-13,3	221.957.122.927	212.915.939.509	218.238.837.997	-0,79
4.1.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	10.114.672.311	11.371.469.794	9.472.177.919	-2,1	11.106.555.082	11.148.301.890	11.427.009.437	1,44
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	235.363.397.288	250.366.008.069	208.529.184.219	-5,2	42.426.768.235	47.348.260.310	47.348.260.310	5,80
4.2	**Pendapatan transfer**	**2.104.954.266.065**	**2.417.275.881.907**	**1.782.452.657.471**	**-5,7**	**1.248.201.119.000**	**1.248.201.119.000**	**1.279.406.146.975**	**1,25**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.080.287.939.065	2.404.627.387.907	1.782.452.657.471	-5,1	1.248.201.119.000	1.248.201.119.000	1.279.406.146.975	1,25
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	24.666.327.000,00	12.648.494.000,00	-	-	-	-	-	-
4.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**5.921.818.966**	**8.002.630.696**	**31.741.491.291**	**165,9**	**350.000.000**	**350.000.000**	**350.000.000**	**0,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.546.233.000	6.609.420.000	379.704.000	-37,5	350.000.000	350.000.000	350.000.000	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya	375.585.966	1.393.210.696	31.361.787.291	1.211,0	-	-	-	-

Sumber: LRA 2023-2025 & APBD 2026, diproyeksikan

Berdasarkan tabel realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2028 sebagaimana ditampilkan pada gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa kinerja pendapatan daerah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan pada periode tersebut, dengan kecenderungan penurunan setelah tahun 2024 dan stabilisasi pada tahun-tahun proyeksi.

Perkembangan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Utara selama periode Tahun 2023–2028 menunjukkan adanya dinamika yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi fiskal nasional maupun daerah. Realisasi pendapatan daerah meningkat dari Rp3.091.012.760.999 pada Tahun 2023 menjadi Rp3.459.025.374.471 pada Tahun 2024, namun pada Tahun 2025 mengalami penurunan menjadi Rp2.635.199.374.235. Secara rata-rata, realisasi pendapatan mengalami pertumbuhan sebesar -6,0 persen. Pada APBD Tahun 2026, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.276.964.497.163, kemudian diproyeksikan sebesar Rp2.264.017.962.564 pada Tahun 2027 dan meningkat menjadi Rp2.319.425.955.120 pada Tahun 2028, dengan rata-rata pertumbuhan proyeksi sebesar 0,94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pendapatan daerah mulai menunjukkan tren yang lebih stabil meskipun peningkatannya masih relatif terbatas.

Gambar 3.5.
Proyeksi Proporsi Komponen Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027



Sumber: Hasil Proyeksi, 2026

Secara lebih rinci, Realisasi PAD meningkat dari Rp980.136.675.968 pada Tahun 2023 menjadi Rp1.033.746.861.868 pada Tahun 2024, kemudian menurun menjadi Rp821.005.225.473 pada Tahun 2025, dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar -7,6 persen. Pada Tahun 2027, PAD diproyeksikan mencapai Rp1.015.466.843.564 dan meningkat menjadi Rp1.039.669.808.145 pada Tahun 2028, dengan rata-rata pertumbuhan proyeksi sebesar 0,56 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menjaga stabilitas PAD sebagai sumber penerimaan yang paling mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah.

Komponen terbesar PAD masih berasal dari pajak daerah. Realisasi pajak daerah mencapai Rp717.253.715.401 pada Tahun 2023, meningkat menjadi Rp761.219.619.467 pada Tahun 2024, kemudian menurun menjadi Rp590.981.444.058 pada Tahun 2025. Pada Tahun 2027, penerimaan pajak daerah diproyeksikan sebesar Rp744.054.341.855, dengan rata-rata pertumbuhan proyeksi sebesar 0,66 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pajak daerah tetap menjadi sumber utama PAD sehingga optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah perlu terus dilakukan.

Retribusi daerah menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Setelah realisasi sebesar Rp12.022.419.277 pada Tahun 2025, target Tahun 2026 meningkat menjadi Rp221.957.122.927 dan diproyeksikan sebesar Rp212.915.939.509 pada Tahun 2027. Peningkatan target tersebut mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan pengelolaan retribusi daerah, baik melalui implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru maupun optimalisasi objek retribusi.

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan relatif stabil. Pada Tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp11.148.301.890, dengan rata-rata pertumbuhan proyeksi sebesar 1,44 persen, yang menunjukkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan daerah masih terjaga meskipun belum memberikan kontribusi yang signifikan.

Sementara itu, lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan yang cukup besar dibandingkan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Setelah mencapai Rp208.529.184.219 pada Tahun 2025, penerimaannya diproyeksikan sebesar Rp47.348.260.310 pada Tahun 2027.

Pendapatan transfer masih menjadi sumber penerimaan terbesar dalam struktur pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Utara. Realisasi pendapatan transfer meningkat dari Rp2.104.954.266.065 pada Tahun 2023 menjadi Rp2.417.275.881.907 pada Tahun 2024, namun kemudian menurun menjadi Rp1.782.452.657.471 pada Tahun 2025, dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar -5,7 persen. Penurunan tersebut mencerminkan dinamika kebijakan fiskal nasional, khususnya penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang dipengaruhi oleh kapasitas fiskal Pemerintah Pusat, perubahan formulasi pengalokasian dana transfer, serta arah kebijakan pengelolaan keuangan negara.

Pada APBD Tahun 2026 dan proyeksi Tahun 2027, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1.248.201.119.000 atau tidak mengalami perubahan. Kesamaan nilai tersebut menunjukkan bahwa penyusunan proyeksi pendapatan transfer menggunakan pendekatan yang kehati-hatian dengan mempertimbangkan belum ditetapkannya secara definitif besaran alokasi Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat pada saat penyusunan RKPD Tahun 2027. Oleh karena itu, pagu APBD Tahun 2026 dijadikan sebagai baseline dalam penyusunan proyeksi pendapatan transfer Tahun 2027 guna menjaga kredibilitas perencanaan dan menghindari penetapan target pendapatan yang terlalu optimistis.

Selanjutnya, pada Tahun 2028 pendapatan transfer diproyeksikan meningkat menjadi Rp1.279.406.146.975 atau tumbuh sebesar 1,25 persen dibandingkan Tahun 2027. Peningkatan tersebut didasarkan pada asumsi adanya pertumbuhan kapasitas fiskal nasional serta penyesuaian kebijakan Transfer ke Daerah .

Seluruh pendapatan transfer pada Tahun 2027 berasal dari Transfer Pemerintah Pusat, sedangkan komponen Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tidak lagi diproyeksikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan Provinsi Kalimantan Utara terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi, sehingga setiap perubahan kebijakan fiskal nasional akan berpengaruh langsung terhadap kapasitas fiskal daerah.

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Setelah meningkat menjadi Rp31.741.491.291 pada Tahun 2025, pada Tahun 2026 hingga Tahun 2028 hanya diproyeksikan sebesar Rp350.000.000 setiap tahun. Pendapatan ini seluruhnya berasal dari pendapatan hibah, sedangkan komponen lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya tidak lagi diproyeksikan.

B) Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diarahkan dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah secara terukur dan berkelanjutan. Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berupaya memastikan bahwa seluruh urusan pemerintahan dan prioritas pembangunan daerah yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dapat dibiayai secara memadai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta prinsip kehati-hatian fiskal.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah pada periode 2027 diarahkan pada:

1) Pemenuhan *mandatory spending* yang terdiri dari pemenuhan belanja fungsi pendidikan minimal 20% dari total belanja, pemenuhan belanja fungsi kesehatan, dan pemenuhan belanja fungsi infrastruktur minumal 40% dari belanja daerah diluar belanja transfer.

2) Pemenuhan belanja mengikat lainnya antara lain belanja pegawai yaitu paling tinggi 30% dari belanja APBD di luar gaji guru melalui TKD; APIP untuk pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat antara 0,30-0,90%; pengembangan kompetensi ASN sebesar 0,30% dan bagi hasil pajak daerah dengan memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah.
3) Memprioritaskan pada belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
4) Menitikberatkan pada urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar dan urusan pilihan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2027 (termasuk program prioritas Kepala Daerah).
5) Pemenuhan belanja yang mendukung kebijakan nasional, antara lain pencegahan stunting dan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, serta pelaksanaan program strategis nasional (ProSN).
6) Melakukan efisiensi belanja.
7) Memberikan bantuan-bantuan khususnya keuangan dalam bentuk subsidi, hibah dan bantuan sosial.

Dalam perhitungan kerangka pendanaan, pemerintah daerah melakukan perhitungan rencana belanja periodik yang wajib dan mengikat yang merupakan pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya. Komponen belanja wajib dan mengikat ini terdiri dari belanja operasi yang mencakup belanja pegawai dan lainnya serta pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran utang dengan uraian sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai diperuntukkan untuk belanja gaji dan tunjangan termasuk gaji dan tunjangan ketiga belas dan ke empat belas, belanja tambahan penghasilan PNS, insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, belanja operasional KDH/WKDH dan Pimpinan DPRD, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan keselamatan kerja, tunjangan DPRD, tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD non sertifikasi termasuk Belanja Pegawai lainnya yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang sebelumnya menjadi bagian dari Belanja Langsung. Disamping itu juga akan

dialokasikan pembayaran gaji ketiga belas dan keempat belas serta pengangkatan CPNSD.

2) Perhitungan belanja insentif pemungutan pajak daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Alokasi anggaran paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013.
4) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
5) Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, merupakan satu kesatuan jenis belanja, pengalokasiannya pada pos Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun dalam pos Sekretariat Daerah berpedoman pada PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6) Penganggaran tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD disesuaikan dengan alokasi penerimaan dari Pemerintah Pusat.

7) Pemberian honorarium bagi PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan, dan kewajaran penerimaan penghasilan.

Berdasarkan arah kebijakan yang diuraikan di atas, maka dilakukan proyeksi Belanja Daerah untuk tahun 2027 dengan memertimbangkan realiasi tahun-tahun sebelumnya. Adapun realisasi dan proyeksi belanja daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 sampai 2027 disajikan pada tabel di bawah.

Secara umum, realisasi belanja daerah Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan penurunan signifikan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024, terutama pada Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Hibah. Pada periode proyeksi 2026–2027, pemerintah daerah menerapkan kebijakan belanja yang lebih terkendali dengan kecenderungan penurunan bertahap, khususnya pada belanja operasi dan belanja transfer. Struktur belanja tetap didominasi oleh Belanja Operasi, yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah masih diarahkan untuk mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan publik.

Tabel 3.9.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2028

Kode Rek	Uraian	Realisasi			Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Aanggaran (%)	APBD	Proyeksi	Proyeksi/Target pada Tahun	Rata-Rata Pertumbuhan Proyeksi (%)
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	
5	**BELANJA**	**3.242.315.178.036**	**3.570.959.018.592**	**2.615.867.256.360**	**-8,31**	**2.476.964.497.163**	**2.294.017.962.564**	**2.348.675.955.120**	**-2,50**
5.1	**Belanja Operasi**	**2.042.445.525.499**	**2.332.882.811.164**	**1.915.454.152.887**	**-1,84**	**1.824.521.140.674**	**1.741.574.606.075**	**1.779.990.933.925**	**-1,17**
5.1.01	Belanja pegawai	767.029.049.418	868.496.469.825	851.788.193.010	5,65	996.963.942.279	997.064.873.959	1.021.991.495.808	1,26
5.1.02	Belanja barang dan jasa	1.097.028.389.769	1.218.671.997.282	972.750.990.774	-4,55	788.279.225.600	715.277.759.321	728.036.666.002	-3,74
5.1.04	Belanja subsidi	16.513.140.465	19.787.303.700	690.900.000	-38,34	46.000.000	-	-	-
5.1.05	Belanja hibah	161.141.184.381	222.697.836.570	89.051.151.323	-10,91	36.888.572.795	26.888.572.795	27.560.787.115	-12,30
5.1.06	Belanja bantuan sosial	733.761.466	3.229.203.787	1.172.917.780	138,21	2.343.400.000	2.343.400.000	2.401.985.000	1,25
5.2	**Belanja Modal**	**651.639.401.736**	**706.181.651.526**	**238.122.476.024**	**-28,96**	**171.241.421.168**	**171.241.421.168**	**184.916.121.875**	**3,99**
5.3	**Belanja Tak Terduga**	**9.451.453.256**	**7.566.963.773**	**26.359.806.199**	**114,21**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**7.566.964.000**	**25,67**
5.3.01	Belanja Tak Terduga	9.451.453.256	7.566.963.773	26.359.806.199	114,21	5.000.000.000	5.000.000.000	7.566.964.000	25,67
5.4	**Belanja Transfer**	**538.778.797.545**	**524.327.592.129**	**435.930.821.250**	**-9,77**	**476.201.935.321**	**376.201.935.321**	**376.201.935.321**	**-10,50**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	368.800.299.772	336.426.911.141	379.445.988.507	2,00	476.201.935.321	376.201.935.321	376.201.935.321	-10,50
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan	169.978.497.773	187.900.680.988	56.484.832.743	-29,96	-	-	-	-

Sumber: LRA 2023-2025 & APBD 2026, diproyeksikan

Berdasarkan tabel realisasi dan proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2028 sebagaimana ditampilkan pada gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa stuktur belanja daerah mengalami penurunan signifikan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024, kemudian disesuaikan kembali pada tahun 2026 dan diproyeksikan menurun secara moderat pada tahun 2027. Perkembangan belanja daerah Provinsi Kalimantan Utara selama periode Tahun 2023–2028 menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan fiskal seiring dengan menurunnya kapasitas keuangan daerah. Realisasi belanja daerah meningkat dari Rp3.242.315.178.036 pada Tahun 2023 menjadi Rp3.570.959.018.592 pada Tahun 2024, kemudian menurun menjadi Rp2.615.867.256.360 pada Tahun 2025. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tercatat sebesar -8,31 persen. Selanjutnya, pada APBD Tahun 2026 belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.476.964.497.163, kemudian diproyeksikan menurun menjadi Rp2.294.017.962.564 pada Tahun 2027 sebelum meningkat menjadi Rp2.348.675.955.120 pada Tahun 2028, dengan rata-rata pertumbuhan proyeksi sebesar -2,50 persen.

Belanja operasi masih menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja daerah. Realisasi belanja operasi mencapai Rp2.042.445.525.499 pada Tahun 2023, meningkat menjadi Rp2.332.882.811.164 pada Tahun 2024, kemudian turun menjadi Rp1.915.454.152.887 pada Tahun 2025. Pada Tahun 2027, belanja operasi diproyeksikan sebesar Rp1.741.574.606.075 atau sekitar 75,92 persen dari total belanja daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kapasitas fiskal masih diarahkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Di dalam belanja operasi, belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi sebesar Rp767.029.049.418 pada Tahun 2023, meningkat menjadi Rp868.496.469.825 pada Tahun 2024 dan Rp851.788.193.010 pada Tahun 2025. Belanja pegawai diproyeksikan mencapai Rp997.064.873.959 pada Tahun 2027 dengan rata-rata pertumbuhan proyeksi sebesar 1,26 persen. Sejalan dengan arah

kebijakan nasional mengenai penguatan kualitas belanja daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan pertumbuhan belanja pegawai secara bertahap tanpa mengurangi pemenuhan hak-hak aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pengendalian formasi aparatur berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, penataan kebutuhan pegawai yang lebih selektif sesuai prioritas pelayanan publik, optimalisasi redistribusi pegawai antar perangkat daerah, percepatan transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sebaliknya, belanja barang dan jasa menunjukkan tren penurunan. Setelah mencapai Rp1.218.671.997.282 pada Tahun 2024, realisasinya turun menjadi Rp972.750.990.774 pada Tahun 2025 dan diproyeksikan kembali menurun menjadi Rp715.277.759.321 pada Tahun 2027. Rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar -4,55 persen dan rata-rata pertumbuhan proyeksi sebesar -3,74 persen mencerminkan kebijakan efisiensi belanja operasional serta peningkatan efektivitas penggunaan anggaran.

Belanja hibah juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari Rp222.697.836.570 pada Tahun 2024 menjadi Rp89.051.151.323 pada Tahun 2025 dan diproyeksikan sebesar Rp26.888.572.795 pada Tahun 2027. Demikian pula belanja subsidi diproyeksikan tidak lagi dialokasikan mulai Tahun 2027. Sementara itu, belanja bantuan sosial tetap dialokasikan meskipun dalam nilai yang relatif kecil, yaitu sebesar Rp2.343.400.000 pada Tahun 2027, sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sisi belanja modal, realisasi menunjukkan penurunan yang cukup tajam. Setelah mencapai Rp706.181.651.526 pada Tahun 2024, realisasi belanja modal turun menjadi Rp238.122.476.024 pada Tahun 2025, dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar -28,96 persen. Pada Tahun 2027, belanja modal diproyeksikan sebesar Rp171.241.421.168 atau sekitar 7,46 persen dari total belanja daerah. Kondisi ini

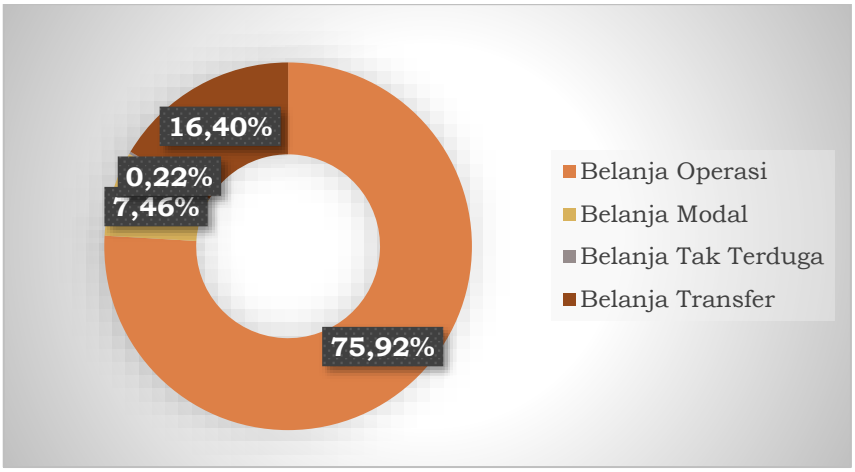
mengindikasikan bahwa ruang fiskal untuk pembiayaan investasi pembangunan masih relatif terbatas. Meskipun demikian, pada Tahun 2028 belanja modal diproyeksikan meningkat menjadi Rp184.916.121.875 dengan rata-rata pertumbuhan proyeksi sebesar 3,99 persen, yang menunjukkan adanya upaya peningkatan investasi pemerintah daerah secara bertahap.

Berdasarkan jenisnya, belanja modal masih didominasi oleh belanja gedung dan bangunan sebesar Rp97.794.918.810, belanja jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp48.292.644.259, serta belanja peralatan dan mesin sebesar Rp20.571.172.375 pada Tahun 2027.

Belanja Tidak Terduga (BTT) diproyeksikan sebesar Rp5.000.000.000 pada Tahun 2027. Meskipun nilainya relatif kecil dibandingkan total belanja daerah, alokasi tersebut tetap diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan pendanaan yang bersifat mendesak, darurat, maupun penanganan bencana yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pada kelompok belanja transfer, realisasi menurun dari Rp538.778.797.545 pada Tahun 2023 menjadi Rp435.930.821.250 pada Tahun 2025, dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar -9,77 persen. Tahun 2027 belanja transfer diproyeksikan sebesar Rp376.201.935.321, yang seluruhnya dialokasikan untuk belanja bagi hasil, sedangkan belanja bantuan keuangan tidak lagi dianggarkan.

Gambar 3.6.
Proyeksi Proporsi Komponen Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027



Sumber: Hasil Proyeksi, 2026

C) Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah menunjukkan adanya penyesuaian yang signifikan, khususnya pada komponen penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta kebijakan yang relatif stabil pada sisi pengeluaran pembiayaan.

Perkembangan pembiayaan daerah Provinsi Kalimantan Utara selama periode Tahun 2023–2027 menunjukkan adanya kecenderungan penurunan yang cukup signifikan. Realisasi pembiayaan daerah menurun dari Rp301.046.143.553 pada Tahun 2023 menjadi Rp129.768.722.963 pada Tahun 2024, kemudian mengalami kondisi pembiayaan netto negatif sebesar Rp2.140.258.280 pada Tahun 2025. Secara rata-rata, realisasi pembiayaan mengalami pertumbuhan negatif sebesar 87,0 persen, yang mengindikasikan semakin terbatasnya kapasitas pembiayaan daerah sebagai sumber pendanaan untuk menutup defisit anggaran maupun mendukung program pembangunan.

Komponen pembiayaan daerah seluruhnya didominasi oleh penerimaan pembiayaan, khususnya yang berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya. Realisasi penerimaan pembiayaan menurun cukup tajam dari Rp316.046.143.553 pada Tahun 2023 menjadi Rp149.768.722.963 pada Tahun 2024, kemudian kembali turun menjadi Rp17.859.741.720 pada Tahun 2025. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pembiayaan tercatat sebesar -70,3 persen, yang menunjukkan bahwa saldo SiLPA yang dapat dimanfaatkan setiap tahun semakin berkurang.

Pada APBD Tahun 2026, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp200.000.000.000, kemudian diproyeksikan menurun menjadi Rp30.000.000.000 pada Tahun 2027 dan Rp29.250.000.000 pada Tahun 2028, dengan rata-rata pertumbuhan proyeksi sebesar -43,75 persen.

Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan selama periode realisasi hanya terdiri atas penyertaan modal daerah. Realisasi pengeluaran pembiayaan meningkat dari Rp15.000.000.000 pada Tahun 2023 menjadi

Rp20.000.000.000 pada Tahun 2024 dan tetap sebesar Rp20.000.000.000 pada Tahun 2025, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,7 persen. Namun demikian, mulai Tahun 2026 hingga Tahun 2028 tidak lagi dialokasikan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah, sehingga seluruh nilai pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp0. Selain itu, pemerintah daerah juga tidak merencanakan pembentukan dana cadangan selama periode proyeksi.

Tabel 3.10.
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2028

Kode Rek	Uraian	Realisasi			Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Aanggaran (%)	APBD	Proyeksi	Proyeksi/Target pada Tahun	Rata-Rata Pertumbuhan Proyeksi (%)
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	
6	**Pembiayaan**	**301.046.143.553**	**129.768.722.963**	**-2.140.258.280**	**-87,0**	**200.000.000.000**	**30.000.000.000**	**29.250.000.000**	**-43,75**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**316.046.143.553**	**149.768.722.963**	**17.859.741.720**	**-70,3**	**200.000.000.000**	**30.000.000.000**	**29.250.000.000**	**-43,75**
6.1.01	Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	316.046.143.553	149.768.722.963	17.859.741.720	-70,3	200.000.000.000	30.000.000.000	29.250.000.000	-43,75
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**15.000.000.000**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**16,7**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	16,7	-	-	-	-

Sumber: LRA 2023-2025 & APBD 2026, diproyeksikan

3.2.3 Proyeksi Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027

a. Persandingan Proyeksi Keuangan pada RPJMD dan RKPD Tahun 2027

Berdasarkan proyeksi Penerimaan Daerah tahun rencana 2027, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan target penerimaan daerah sebesar Rp2.264.017.962.564. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi dalam RPJMD tahun rencana yang sebesar Rp4.109.498.909.659,62, sehingga terdapat selisih penurunan sebesar Rp1.845.480.947.095. Penurunan ini mencerminkan adanya penyesuaian asumsi fiskal, kapasitas riil penerimaan, serta dinamika kebijakan transfer dan pendapatan daerah pada tahun 2027.

Tabel 3.11.
Proyeksi Penerimaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2027

No	Uraian	Proyeksi RPJMD tahun rencana (2027)	Proyeksi RKPD pada Tahun Rencana (2027)	Selisih (Rp)
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**1.531.397.304.659**	**1.015.466.843.564,00**	**-515.930.461.095**
	Pendapatan Pajak Daerah	1.240.910.038.659	744.054.341.855	-496.855.696.804
	Pendapatan Retribusi Daerah	15.232.674.000	212.915.939.509	197.683.265.509
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.226.582.000	11.148.301.890	-2.078.280.110
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	262.028.010.000	47.348.260.310	-214.679.749.690
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.577.101.605.000**	**1.248.201.119.000,00**	**-1.328.900.486.000**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.564.453.111.000	1.248.201.119.000	-1.316.251.992.000
	Transfer Antar Daerah	12.648.494.000	-	-12.648.494.000
	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**1.000.000.000**	**350.000.000**	**-650.000.000**
	Pendapatan hibah	-	350.000.000	**350.000.000**
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
	Total Pendapatan (a)	**4.109.498.909.659**	**2.264.017.962.564**	**-1.845.480.947.095**
2	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	-	-	-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
	Jumlah (b)	-	-	-

No	Uraian	Proyeksi RPJMD tahun rencana (2027)	Proyeksi RKPD pada Tahun Rencana (2027)	Selisih (Rp)
3	**Proyeksi Silpa Ril**			
	Saldo Kas Neraca daerah	72.718.585.160	30.000.000.000	-42.718.585.160
	Dikurangi			
	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan	-	-	-
	Kegiatan Lanjutan	-	-	-
	Jumlah (c)	**72.718.585.160**	**30.000.000.000**	**-42.718.585.160**
	Jumlah Kapasitas Keuangan Daerah (a) + (b) + (c)	**4.182.217.494.819**	**2.294.017.962.564**	**-1.888.199.532.255**

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, diolah

Dari sisi struktur pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2027 ditargetkan sebesar Rp1.015.466.843.564,00, lebih rendah dibandingkan proyeksi RPJMD sebesar Rp1.531.397.304.659,62, dengan selisih Rp515.930.461.095. Komponen terbesar PAD berasal dari Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp744.054.341.855,00, namun mengalami penurunan dibandingkan proyeksi awal sebesar Rp1.240.910.038.659,62 atau berkurang Rp496.855.696.805,00. Sebaliknya, Pendapatan Retribusi Daerah menunjukkan peningkatan signifikan, dengan target sebesar Rp212.915.939.509, lebih tinggi Rp197.683.265.509dari proyeksi sebelumnya sebesar Rp15.232.674.000,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp11.148.301.890,00, mengalami penurunan Rp2.078.280.110,00 dari proyeksi Rp13.226.582.000,00. Sementara itu, Lain-lain PAD yang Sah ditargetkan sebesar Rp47.348.260.310,00, turun Rp214.679.749.690,00 dibandingkan proyeksi awal sebesar Rp262.028.010.000,00.

Pada kelompok Pendapatan Transfer, target tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp1.248.201.119.000,00, lebih rendah Rp1.328.900.486.000,00 dari proyeksi RPJMD sebesar Rp2.577.101.605.000,00. Penurunan terbesar berasal dari Transfer Pemerintah Pusat yang ditargetkan Rp1.248.201.119.000,00, atau berkurang Rp1.316.251.992.000,00 dari proyeksi awal sebesar Rp2.564.453.111.000,00. Transfer Antar Daerah

tidak ditargetkan pada tahun 2027, sehingga terdapat selisih penurunan Rp12.648.494.000,00 dari proyeksi sebelumnya.

Selanjutnya, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp350.000.000,00, turun Rp650.000.000,00 dari proyeksi Rp1.000.000.000,00. Komponen ini sepenuhnya berasal dari pendapatan hibah sebesar Rp350.000.000,00.

Secara total, realisasi target pendapatan daerah (a) pada tahun 2027 tercatat sebesar Rp2.264.017.962.564, dengan selisih sebesar Rp1.845.480.947.095d ibandingkan perhitungan kumulatif awal. Selain itu, pada komponen Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Riil, saldo kas neraca daerah ditargetkan sebesar Rp30.000.000.000 lebih rendah Rp42.718.585.160 dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar Rp72.718.585.160,00. Dengan demikian, jumlah kapasitas keuangan daerah yang merupakan akumulasi pendapatan daerah dan SiLPA (a + c) pada tahun 2027 ditargetkan sebesar Rp2.294.017.962.564 atau mengalami penurunan Rp1.888.199.532.255 dibandingkan proyeksi RPJMD sebesar Rp4.182.217.494.819,62.

Selanjutnya, berdasarkan Proyeksi Pengeluaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027, total Belanja Daerah pada tahun rencana 2027 ditargetkan sebesar Rp2.294.017.962.564,00. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi dalam RPJMD tahun rencana sebesar Rp4.132.217.494.820,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.838.199.532.256. Penurunan ini menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan belanja daerah yang cukup signifikan dibandingkan dengan rencana awal dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

Tabel 3.12.
Persandingan Proyeksi Pengeluaran Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027

No	Uraian	Proyeksi RPJMD tahun rencana (Rp)	Proyeksi RKPD pada Tahun Rencana (2027)	Selisih (Rp)
5	**BELANJA DAERAH**	**4.132.217.494.820**	**2.294.017.962.564**	**(1.838.199.532.256)**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.546.390.939.660**	**1.741.574.606.075**	**(804.816.333.585)**
5.1.1	Belanja Pegawai	949.029.542.000	997.064.873.959	48.035.331.959
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.332.199.473.000	715.277.759.321	(616.921.713.679)
	Belanja Subsidi	20.998.445.000	-	(20.998.445.000)
5.1.5	Belanja Hibah	239.865.408.660	26.888.572.795	(212.976.835.865)
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.298.071.000	2.343.400.000	(1.954.671.000)

No	Uraian	Proyeksi RPJMD tahun rencana (Rp)	Proyeksi RKPD pada Tahun Rencana (2027)	Selisih (Rp)
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.053.931.999.160**	**171.241.421.168**	**(882.690.577.992)**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**7.566.964.000**	**5.000.000.000**	**(2.566.964.000)**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**524.327.592.000**	**376.201.935.321**	**(148.125.656.679)**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	336.426.911.000	376.201.935.321	39.775.024.321
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	187.900.681.000	-	(187.900.681.000)
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**20.000.000.000**	**-**	**20.000.000.000**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000	-	(20.000.000.000)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-
	Total Pengeluaran	**4.132.217.494.820**	**2.294.017.962.564**	**(1.838.199.532.256)**

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, diolah

Belanja Operasi pada tahun 2027 ditargetkan sebesar Rp1.741.574.606.075,00, lebih rendah dari proyeksi RPJMD sebesar Rp2.546.390.939.660,00, dengan selisih Rp804.816.333.585,00. Komponen Belanja Pegawai justru mengalami peningkatan dari proyeksi Rp949.029.542.000,00 menjadi Rp997.064.873.959,00, sehingga terdapat selisih positif sebesar Rp48.035.331.959,00. Peningkatan ini disebabkan antara lain adanya pemenuhan regulasi tentang tunjangan fungsional pegawai, pengangkatan PTT menjadi P3K pada tahun 2025 berdampak pada sturktur belanja dari belanja barang dan jasa menjadi belanja pegawai, adanya penyesuaian kelas jabatan pegawai yang berdampak pada penyesuaian TPP.

Sebaliknya, Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan signifikan dari Rp1.332.199.473.000,00 menjadi Rp715.277.759.321,00, dengan selisih Rp616.921.713.679,00. Belanja Subsidi yang dalam proyeksi RPJMD sebesar Rp20.998.445.000,00 tidak ditargetkan pada tahun 2027. Belanja Hibah juga mengalami penurunan dari Rp239.865.408.660,00 menjadi Rp26.888.572.795,00. Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial turun dari Rp4.298.071.000,00 menjadi Rp2.343.400.000,00, dengan selisih Rp22.590.501.795,00 sebagaimana tercantum dalam tabel.

Belanja Modal pada tahun 2027 ditargetkan sebesar Rp171.241.421.168,00, jauh lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi RPJMD sebesar Rp1.053.931.999.160,00, sehingga terdapat selisih

Rp1.051.588.599.160,00. Penurunan yang sangat signifikan ini menunjukkan adanya pengurangan alokasi belanja untuk pembentukan aset tetap atau investasi daerah pada tahun rencana 2027.

Belanja Tidak Terduga ditargetkan sebesar Rp5.000.000.000,00, lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi RPJMD sebesar Rp7.566.964.000,00. Selanjutnya, Belanja Transfer pada tahun 2027 ditargetkan sebesar Rp376.201.935.321,00, lebih rendah dari proyeksi Rp524.327.592.000,00, dengan selisih Rp519.327.592.000,00 sebagaimana tercantum dalam tabel. Pada rincian Belanja Transfer, Belanja Bagi Hasil meningkat dari Rp336.426.911.000,00 menjadi Rp376.201.935.321,00, dengan selisih positif Rp39.775.024.321,00. Sementara itu, Belanja Bantuan Keuangan yang dalam proyeksi RPJMD sebesar Rp187.900.681.000,00 tidak ditargetkan pada tahun 2027.

Pada komponen Pengeluaran Pembiayaan, tidak terdapat target alokasi pada tahun 2027, meskipun dalam proyeksi RPJMD terdapat rencana Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp20.000.000.000,00 yang tidak direalisasikan pada tahun rencana sehingga terdapat selisih sebesar Rp20.000.000.000,00. Demikian pula, tidak terdapat target pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

b. Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027

Berdasarkan perkembangan total penerimaan dan total pengeluaran keuangan daerah Provinsi Kalimantan Utara selama periode Tahun 2023–2027, kemampuan keuangan daerah menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Total penerimaan keuangan daerah meningkat dari Rp3.407.058.904.552 pada Tahun 2023 menjadi Rp3.608.794.097.434 pada Tahun 2024 atau tumbuh sekitar 5,92 persen. Namun demikian, pada Tahun 2025 total penerimaan mengalami penurunan menjadi Rp2.653.059.115.955 atau turun sekitar 26,49 persen dibandingkan Tahun 2024. Selanjutnya, pada APBD Tahun 2026 total penerimaan diproyeksikan sebesar Rp2.476.964.497.163, kemudian kembali menurun

menjadi Rp2.294.017.962.564 pada proyeksi Tahun 2027, sebelum meningkat menjadi Rp2.348.675.955.120 pada Tahun 2028.

Penurunan total penerimaan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan transfer yang pada Tahun 2024 mencapai Rp2.417.275.881.907, diproyeksikan menurun menjadi Rp1.248.201.119.000 pada Tahun 2026 dan tetap pada nilai yang sama pada Tahun 2027. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kondisi yang relatif stabil. PAD diproyeksikan meningkat dari Rp980.136.675.968 pada Tahun 2023 menjadi Rp1.033.746.861.868 pada Tahun 2024, kemudian turun menjadi Rp821.005.225.473 pada Tahun 2025, sebelum kembali meningkat menjadi Rp1.028.413.378.163 pada Tahun 2026 dan diproyeksikan sebesar Rp1.015.466.843.564 pada Tahun 2027. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PAD mulai menjadi salah satu penopang utama penerimaan daerah, meskipun peningkatannya belum mampu mengimbangi penurunan pendapatan transfer. Selain itu, penerimaan pembiayaan juga mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu dari Rp316.046.143.553 pada Tahun 2023 menjadi Rp30.000.000.000 pada Tahun 2027, sehingga ruang pembiayaan daerah menjadi semakin terbatas.

Dari sisi pengeluaran, total pengeluaran keuangan daerah memperlihatkan pola yang sejalan dengan perkembangan penerimaan. Total pengeluaran meningkat dari Rp3.257.315.178.036 pada Tahun 2023 menjadi Rp3.590.959.018.592 pada Tahun 2024 atau meningkat sekitar 10,24 persen. Selanjutnya, total pengeluaran menurun menjadi Rp2.635.867.256.360 pada Tahun 2025, kemudian diproyeksikan sebesar Rp2.476.964.497.163 pada Tahun 2026 dan kembali menurun menjadi Rp2.294.017.962.564 pada Tahun 2027. Penurunan tersebut merupakan konsekuensi dari menurunnya kapasitas penerimaan daerah sehingga pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap alokasi belanja, terutama pada belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer.

Komposisi belanja pada Tahun 2027 masih didominasi oleh belanja operasi yang diproyeksikan mencapai Rp1.741.574.606.075 atau sekitar

75,92 persen dari total belanja daerah. Sementara itu, belanja modal diproyeksikan sebesar Rp171.241.421.168 atau sekitar 7,46 persen, belanja transfer sebesar Rp376.201.935.321 atau sekitar 16,40 persen, dan belanja tidak terduga sebesar Rp5.000.000.000 atau sekitar 0,22 persen. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kapasitas fiskal masih digunakan untuk membiayai belanja rutin dan pelayanan pemerintahan, sehingga ruang fiskal untuk memperbesar investasi pembangunan melalui belanja modal masih relatif terbatas.

Selama periode proyeksi Tahun 2026 hingga Tahun 2028, total penerimaan dan total pengeluaran direncanakan dalam kondisi berimbang, dimana total penerimaan sama dengan total pengeluaran, yaitu sebesar Rp2.476.964.497.163 pada Tahun 2026, Rp2.294.017.962.564 pada Tahun 2027, dan Rp2.348.675.955.120 pada Tahun 2028. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan menyesuaikan kapasitas penerimaan terhadap kebutuhan belanja sehingga tidak menimbulkan defisit anggaran.

Tabel 3.13.
Realisasi dan Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2023-2028

Kode Rek	Uraian	Realisasi			Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Aanggaran (%)	APBD	Proyeksi	Proyeksi/Target pada Tahun	Rata-Rata Pertumbuhan Proyeksi (%)
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	
4	**PENDAPATAN**	**3.091.012.760.999**	**3.459.025.374.471**	**2.635.199.374.235**	**-6,0**	**2.276.964.497.163**	**2.264.017.962.564**	**2.319.425.955.120**	**0,94**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**980.136.675.968**	**1.033.746.861.868**	**821.005.225.473**	**-7,6**	**1.028.413.378.163**	**1.015.466.843.564**	**1.039.669.808.145**	**0,56**
4.1.01	Pajak Daerah	717.253.715.401	761.219.619.467	590.981.444.058	-8,1	752.922.931.919	744.054.341.855	762.655.700.401	0,66
4.1.02	Retribusi Daerah	17.404.890.968	10.789.764.538	12.022.419.277	-13,3	221.957.122.927	212.915.939.509	218.238.837.997	-0,79
4.1.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	10.114.672.311	11.371.469.794	9.472.177.919	-2,1	11.106.555.082	11.148.301.890	11.427.009.437	1,44
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	235.363.397.288	250.366.008.069	208.529.184.219	-5,2	42.426.768.235	47.348.260.310	47.348.260.310	5,80
4.2	**Pendapatan transfer**	**2.104.954.266.065**	**2.417.275.881.907**	**1.782.452.657.471**	**-5,7**	**1.248.201.119.000**	**1.248.201.119.000**	**1.279.406.146.975**	**1,25**
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	2.080.287.939.065	2.404.627.387.907	1.782.452.657.471	**-5,1**	1.248.201.119.000	1.248.201.119.000	1.279.406.146.975	1,25
4.2.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	24.666.327.000	12.648.494.000	-	-	-	-	-	-
4.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**5.921.818.966**	**8.002.630.696**	**31.741.491.291**	**165,9**	**350.000.000**	**350.000.000**	**350.000.000**	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.546.233.000	6.609.420.000	379.704.000	**-37,5**	350.000.000	350.000.000	350.000.000	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya	375.585.966	1.393.210.696	31.361.787.291	1.211,0	-	-	-	-
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**316.046.143.553**	**149.768.722.963**	**17.859.741.720**	**-70,3**	**200.000.000.000**	**30.000.000.000**	**29.250.000.000**	-43,75
6.1.01	Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	316.046.143.553	149.768.722.963	17.859.741.720	**-70,3**	200.000.000.000	30.000.000.000	29.250.000.000	-43,75
	TOTAL PENERIMAAN	**3.407.058.904.552**	**3.608.794.097.434**	**2.653.059.115.955**	**-10,3**	**2.476.964.497.163**	**2.294.017.962.564**	**2.348.675.955.120**	**-2,50**

Kode Rek	Uraian	Realisasi			Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Aanggaran (%)	APBD	Proyeksi	Proyeksi/Target pada Tahun	Rata-Rata Pertumbuhan Proyeksi (%)
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	
5	**BELANJA**	**3.242.315.178.036**	**3.570.959.018.592**	**2.615.867.256.360**	**-8,3**	**2.476.964.497.163**	**2.294.017.962.564**	**2.348.675.955.120**	-2,50
5.1	**Belanja Operasi**	**2.042.445.525.499**	**2.332.882.811.164**	**1.915.454.152.887**	**-1,8**	**1.824.521.140.674**	**1.741.574.606.075**	**1.779.990.933.925**	-1,17
5.1.01	Belanja pegawai	767.029.049.418	868.496.469.825	851.788.193.010	5,7	996.963.942.279	997.064.873.959	1.021.991.495.808	1,26
5.1.02	Belanja barang dan jasa	1.097.028.389.769	1.218.671.997.282	972.750.990.774	-4,5	788.279.225.600	715.277.759.321	728.036.666.002	-3,74
5.1.04	Belanja subsidi	16.513.140.465	19.787.303.700	690.900.000	-38,3	46.000.000	-	-	-
5.1.05	Belanja hibah	161.141.184.381	222.697.836.570	89.051.151.323	-10,9	36.888.572.795	26.888.572.795	27.560.787.115	-12,30
5.1.06	Belanja bantuan sosial	733.761.466	3.229.203.787	1.172.917.780	138,2	2.343.400.000	2.343.400.000	2.401.985.000	1,25
5.2	**Belanja Modal**	**651.639.401.736**	**706.181.651.526**	**238.122.476.024**	**-29,0**	**171.241.421.168**	**171.241.421.168**	**184.916.121.875**	3,99
5.3	**Belanja Tak Terduga**	**9.451.453.256**	**7.566.963.773**	**26.359.806.199**	**114,2**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**7.566.964.000**	25,67
5.3.01	Belanja Tak Terduga	9.451.453.256	7.566.963.773	26.359.806.199	114,2	5.000.000.000	5.000.000.000	7.566.964.000	25,67
5.4	**Belanja Transfer**	**538.778.797.545**	**524.327.592.129**	**435.930.821.250**	**-9,8**	**476.201.935.321**	**376.201.935.321**	**376.201.935.321**	-10,50
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	368.800.299.772	336.426.911.141	379.445.988.507	2,0	476.201.935.321	376.201.935.321	376.201.935.321	-10,50
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	169.978.497.773	187.900.680.988	56.484.832.743	-30,0	-	-	-	-
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**15.000.000.000**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**16,7**	**-**	-	**-**	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	16,7	-	-	-	-
	TOTAL PENGELUARAN	**3.257.315.178.036**	**3.590.959.018.592**	**2.635.867.256.360**	**-8,2**	**2.476.964.497.163**	**2.294.017.962.564**	**2.348.675.955.120**	**-2,50**

Sumber: LRA 2023-2025 & APBD 2026, diproyeksikan

3.3. Sumber Pendanaan Non APBD

Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara tidak hanya bergantung pada kemampuan pendanaan melalui APBD Provinsi, tetapi juga perlu didukung oleh berbagai sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diversifikasi sumber-sumber pendanaan menjadi penting mengingat kebutuhan pembangunan daerah yang terus meningkat, sementara kapasitas fiskal daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, optimalisasi pendanaan dari berbagai sumber diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Salah satu peluang pendanaan yang strategis berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui kementerian/lembaga, baik dalam bentuk dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun berbagai program prioritas nasional yang dilaksanakan di daerah. Selain itu, sinergi pendanaan dengan APBD kabupaten/kota juga perlu diperkuat, khususnya untuk mendukung program dan kegiatan yang menjadi kewenangan bersama atau memerlukan kolaborasi lintas wilayah sehingga tercipta pembangunan yang lebih terpadu dan saling mendukung.

Dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 telah diidentifikasi berbagai proyek pembangunan yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga di Provinsi Kalimantan Utara. Proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari prioritas pembangunan nasional yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun sumber pendanaan non-APBN, termasuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi swasta, badan usaha milik negara/daerah, hibah, serta sumber pendanaan sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kehadiran proyek-proyek nasional tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat pencapaian sasaran pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat

konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 3.14.
Proyek Provinsi Kalimantan Utara dalam RKP Tahun 2027

No	Nama Proyek	Penanggungjawab	Indikasi Pendanaan	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)/KP
Swasembada Energi				
1	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air Sungai Mentarang di Kalimantan Utara	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Non-APBN	Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan
Perencanaan Wilayah dan Pengembangan Kawasan				
1	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan Terpadu Long Midang, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan	Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan	APBN	Transformasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
2	Jalan dan Jembatan Koridor Perbatasan Malinau - Semamu - Long Midang, Provinsi Kalimantan Utara	Menteri Pekerjaan Umum	APBN	Transformasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
Industrialisasi				
1	Kawasan Industri Tanah Kuning	Menteri Perindustrian	Non-APBN	Pengembangan Hilirisasi Bauksit

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027, Bappenas

b. Masyarakat dan Dunia Usaha

Peluang pendanaan juga dapat berasal dari investasi dunia usaha, baik melalui penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA), khususnya pada sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, pertanian, perikanan, energi, pariwisata, dan kawasan perbatasan. Selain itu, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang membutuhkan investasi besar, sehingga dapat mempercepat penyediaan infrastruktur tanpa sepenuhnya membebani APBD.

Peran masyarakat dan dunia usaha juga dapat dioptimalkan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL/CSR), filantropi, partisipasi masyarakat, serta dukungan dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun sektor swasta lainnya. Pemanfaatan dana CSR dapat diarahkan untuk mendukung

pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, pengembangan UMKM, penyediaan sarana dan prasarana dasar, serta berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

c. Mitra Pembangunan

Selain sumber-sumber yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga dapat memanfaatkan peluang pendanaan melalui hibah pemerintah, hibah luar negeri sesuai ketentuan, dukungan mitra pembangunan, lembaga donor, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, serta berbagai bentuk kerja sama antardaerah dan kemitraan pembangunan lainnya. Optimalisasi berbagai sumber pendanaan tersebut perlu didukung oleh perencanaan yang terintegrasi, koordinasi yang kuat antar pemangku kepentingan, serta tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil agar mampu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

BAB 4
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Sasaran Pembangunan Nasional

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu "**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui 8 (Delapan) Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

Misi RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Mantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong mandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air; ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dokumen RPJMN Tahun 2025–2029 memuat sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

Tabel 4.1

Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN

No.	Sasaran & Indikator Pembangunan Nasional
1	**Meningkatkan Pendapatan per Kapita Menuju Setara Negara Maju**
	– Pertumbuhan ekonomi dari 5,05 (2024) menjadi 5,3 (2025) dan menuju 8% (2029)
	– GNI per kapita meningkat dari 4.870 USD (2023) menjadi 5.410 USD (2025) dan 8.000 USD (2029)
	– Kontribusi PDB Maritim meningkat dari 7,9% (2022) menjadi 8,1% (2025) dan 9,1% (2029)
	– Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari 18,67% (2023) menjadi 20,8% (2025) dan 21,9% (2029)
2	**Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat**
	– *Global Power Index* meningkat dari peringkat 34 (2023) menjadi peringkat 33 (2025) dan peringkat 29 (2029)
3	**Kemiskinan Menurun dan ketimpangan Berkurang**
	– Tingkat Kemiskinan turun dari 9,03% (Mar 2024) menjadi 7,0-8% (2025) dan 4,5-5,0% (2029) serta kemiskinan ekstrem (2,15 PPP) hingga <0,5% (2026)
	– Rasio gini turun dari 0,379 (Mar 2024) menjadi 0,378-0,382 (2025) dan 0,372-0,375 (2029)
	– Kontribusi PDRB KTI meningkat dari 20,9% (2023) menjadi 21,4% (2025) dan 22,4% (2029)
4	**Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat**
	– Indeks Modal Manusia meningkat dari 0,54 (2020) menjadi 0,56 (2025) dan 0,59 (2029)
5	**Intensitas emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission**
	– Penurunan intensitas emisi GRK dari 34,09% (2022) menjadi 35,53% (2025) dan 45,17% (2029)
	– Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari 72,54 (2023) menjadi 76,49 (2025) dan 77,20 (2029)

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029, diolah

Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat tahun 2025 sebesar 5,11%. Pertumbuhan tersebut diiringi perbaikan indikator sosial yang signifikan, yakni tingkat kemiskinan turun menjadi 8,25%, Gini Ratio membaik ke 0,363, dan Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,74%. Dengan pijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2026 ditargetkan sebesar 5,4% dan tahun 2027 berkisar 5,8–6,5%. Target sasaran dan indikator pembangunan dalam RKP Tahun 2027 secara lengkap dimuat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2027

No.	Sasaran & Indikator	Realisasi 2025	Target 2027
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,11	5,8–6,5
2	GNI Per Capita (USD)	5,220	5.800–5.840
3	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	43,72 (2024)	39,57
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,53 (2024)	76,84
5	Tingkat Kemiskinan (%)	8,25	6,0-6,5
6	Kemiskinan Ekstrem (%)	0,85	0,0
7	Rasio Gini	0,363	0,362–0,367
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,74	4,30-4,87
9	Indeks Modal Manusia	0,54 (2023)	0,575
10	Indeks Kesejahteraan Petani	0,6930 (2023)	0,8038
11	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	24,50	40,81

Sumber: Rancangan Awal dan Rancangan RKP Tahun 2027, Kementerian PPN/Bappenas

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027

Pembangunan tahun 2027 merupakan bagian dari RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029. Pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara diarahkan untuk mewujudkan cita-cita berupa visi:

Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan

Visi RPJMD memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi RPJMN, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045". Penjelasan kata kunci/kondisi di dalam visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara yaitu:

- **Fondasi Transformasi yang Kokoh:** merupakan arah kebijakan periode pertama dalam rangkaian periode pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045. Perwujudan fondasi transformasi dicapai melalui pelayanan dasar yang merata dan berkualitas, pengembangan ekonomi yang bernilai tambah dan berkelanjutan, serta ditopang tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan stabilitas wilayah yang terjaga.
- **Beranda Depan NKRI:** merupakan letak geografis Provinsi Kalimantan Utara yang berada di wilayah terdepan NKRI dan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia maupun kawasan Asia Tenggara pada umumnya. Letak geografis ini sekaligus menjadi potensi dan tantangan geopolitik dan geoekonomi yang perlu dikelola dengan baik melalui tata kelola perbatasan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- **Maju:** kondisi pembangunan yang diharapkan tercapai yaitu kemajuan di segala bidang. Kemajuan memiliki arti bahwa kinerja pembangunan semakin baik atau progresif dari tahun ke tahun, sehingga masyarakat semakin menikmati manfaat nyata dari pembangunan. Maju juga diarahkan untuk tercapainya daerah yang berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil.
- **Makmur:** kondisi yang tercipta melalui kinerja pembangunan yang semakin baik sehingga mencapai kondisi masyarakat yang tercukupi kebutuhan ekonomi dan sosial-budayanya. Makmur menandakan masyarakat yang semakin sejahtera atau lepas dari garis kemiskinan, serta tidak kalah penting masyarakat yang bahagia lahir dan batin. Kemakmuran merupakan hasil kolaborasi seluruh bidang pembangunan, yaitu ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat, pembangunan SDM dan sosial agar menghasilkan SDM yang unggul serta terpenuhi jaminan dan

perlindungan sosialnya, serta tata kelola yang baik untuk menopang efektivitas kinerja berbagai bidang pembangunan untuk menuju kemakmuran.

- **Berkelanjutan:** kondisi yang tercipta sebagai bentuk komitmen Provinsi Kalimantan Utara untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Berkelanjutan merupakan kondisi dari keselarasan pembangunan antara orientasi ekonomi, sosial dan lingkungan yang ditopang dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil pembangunan tidak hanya untuk generasi saat ini, sekaligus untuk generasi masa depan. Berbagai agenda pembangunan untuk mendukung pencapaian kondisi berkelanjutan, antara lain melalui pengembangan ekonomi hijau.

Perwujudan visi RPJMD dicapai melalui pelaksanaan misi pembangunan. Misi merupakan rumusan umum tentang upaya mencapai visi. Misi RPJMD juga transformasi dari misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang secara substansi selaras dengan misi pembangunan jangka panjang daerah. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. **Misi 1 Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan**

   Misi transformasi sosial yang inklusif dan berkeadilan bertujuan untuk membangun masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera dalam mencapai kemajuan dan kemakmuran yang berkelanjutan. Transformasi sosial merupakan bagian dari pembangunan beranda depan negara dengan pendekatan *human security* dan *soft border. Human security* berfokus pada upaya kesejahteraan dan keselamatan manusia sebagai individu, sedangkan *soft border* berfokus pada pengelolaan perbatasan secara flexible untuk mempermudah hubungan lintas batas tanpa mengorbankan keamanan.

   Prinsip inklusif dan berkeadilan menjadi dasar dalam penyelenggaraan transformasi sosial. Prinsip tersebut merujuk pada perlakuan yang adil dan setara pada semua kelompok masyarakat

termasuk perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal serta seluruh wilayah yang ada di Provinsi Kalimantan Utara untuk mendapatkan akses terhadap peluang, sumber daya, dan pengambilan keputusan. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan besar transformasi sosial yakni mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan dalam masyarakat.

Secara operasional, upaya transformasi sosial diwujudkan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial yang adaptif. Upaya peningkatan layanan pendidikan diantaranya peningkatan partisipasi pendidikan, peningkatan kualitas satuan pendidikan, peningkatan jumlah dan kompetensi pendidik, serta pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas. Upaya peningkatan layanan kesehatan diantaranya perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, pemenuhan tenaga kesehatan, serta peningkatan fasilitas kesehatan yang bermutu. Sedangkan upaya perlindungan sosial adaptif diantaranya pengentasan kemiskinan terutama pada daerah 3TP, perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, disabilitas, dan sebagainya, serta peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

2. Misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan

Misi transformasi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi besar untuk mengembangkan perekonomian daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah serta posisi geografis yang strategis. Dalam proses ini, indikator laju pertumbuhan ekonomi menjadi acuan utama dalam mengukur keberhasilan transformasi, dengan tetap menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan

pembangunan yang mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru perlu diutamakan demi menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi sumber daya alam.

Langkah nyata yang dapat dilakukan meliputi penguatan sektor-sektor unggulan seperti pertanian berkelanjutan, perikanan tangkap dan budidaya ramah lingkungan, serta pariwisata alam berbasis komunitas. Selain itu, pengembangan kawasan industri berbasis energi terbarukan seperti tenaga air dan surya harus didorong sebagai bagian dari implementasi ekonomi hijau. Di wilayah pesisir dan kepulauan, konsep ekonomi biru dapat diterapkan melalui pengelolaan laut secara berkelanjutan, peningkatan produktivitas sektor kelautan, dan pelestarian ekosistem laut. Transformasi ini harus diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga untuk menciptakan struktur ekonomi yang adil dan tidak eksploitatif.

Pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara harus menekankan pentingnya pemerataan pendapatan sebagai indikator keberhasilan sosial. Ketimpangan ekonomi antara daerah pedalaman dan perkotaan harus ditekan melalui pemerataan infrastruktur, akses pendidikan, serta pelibatan aktif masyarakat lokal dalam rantai nilai ekonomi. Pemerintah daerah perlu menggandeng sektor swasta yang berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, sekaligus menyediakan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Dengan cara ini, transformasi ekonomi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan angka, tetapi juga berdampak nyata pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Partisipasi masyarakat menjadi pilar penting dalam memastikan transformasi ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. Pelibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan ekonomi akan memperkuat akuntabilitas dan mendorong rasa kepemilikan terhadap proses pembangunan. Dengan kolaborasi antarsektor dan dukungan pada prinsip pembangunan hijau, biru, serta keadilan sosial, Provinsi Kalimantan Utara berpeluang besar

menjadi contoh sukses dalam mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan, tangguh, dan berkeadilan di Indonesia.

3. Misi 3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi tata kelola yang dimaksud mencakup perubahan mendasar dalam cara pemerintah daerah bekerja, mulai dari penguatan sistem birokrasi yang transparan hingga penerapan prinsip *good governance* dalam setiap lini pelayanan publik. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mampu menjadi fasilitator pembangunan yang profesional, bersih, dan akuntabel.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam menjalankan transformasi ini. Pemerintah daerah tidak lagi bekerja secara eksklusif, melainkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, maupun lembaga internasional. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan untuk membangun sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berdampak luas. Dalam konteks ini, partisipasi publik juga akan diperkuat agar pembangunan benar-benar menjawab aspirasi masyarakat.

Inovasi menjadi elemen strategis yang melengkapi transformasi tata kelola tersebut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong pemanfaatan teknologi digital dan sistem kerja baru untuk meningkatkan kualitas layanan publik mengingat kondisi geografi yang cukup sulit diakses. Inovasi ini juga mencakup cara-cara baru dalam menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks. Dengan mengedepankan kolaborasi dan inovasi, Kalimantan Utara dalam tata kelola pemerintahan diharapkan mampu mewujudkan visi jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur dan

berkelanjutan. Selain itu, juga sejalan dengan arah pembangunan nasional.

4. Misi 4 Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI

Misi memantapkan supremasi hukum dan stabilitas daerah sebagai beranda depan NKRI merupakan salah satu kunci dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi yang berada di kawasan perbatasan negara. Misi ini berfokus pada memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi di tingkat regional Asia Tenggara dan membangun kekuatan pertahanan di kawasan perbatasan. Misi ini menjadi landasan transformasi untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Landasan transformasi tersebut dibentuk melalui perwujudan supremasi hukum, stabilitas ekonomi daerah, kohesivitas sosial dan keamanan, serta demokrasi lokal yang semakin substantif untuk mengawal pembangunan agar berorientasi pada kemakmuran. Landasan tersebut sekaligus sebagai perwujudan beranda depan NKRI yang memiliki stabilitas wilayah terjaga untuk menopang ketahanan nasional.

Provinsi Kalimantan Utara sebagai beranda depan NKRI memberikan dukungan dan fasilitasi tata kelola perbatasan berbasis *soft border* yang kolaboratif. Hal tersebut mendorong perlunya peningkatan kemitraan strategis di dalam dan luar negeri, stabilitas ekonomi daerah, serta peningkatan stabilitas wilayah dan demokrasi lokal berbasis supremasi hukum. Kolaborasi antarpihak dan pemangku kepentingan pada tingkat nasional dan provinsi diperlukan untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sebagai beranda depan NKRI.

5. Misi 5 Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu provinsi di perbatasan utara Indonesia memiliki peran vital dalam menjaga integrasi nasional serta mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi menjadi pilar penting untuk memastikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berakar pada kearifan lokal.

Misi memantapkan ketahanan sosial budaya diarahkan pada penguatan identitas lokal dan harmoni sosial di tengah masyarakat yang multietnis dan multikultural. Pelestarian adat istiadat, bahasa daerah, dan nilai-nilai kearifan lokal menjadi fondasi dalam memperkuat karakter daerah dan memperkuat jati diri masyarakat Kalimantan Utara. Pemerintah daerah dapat mendorong revitalisasi budaya lokal melalui pendidikan, pengembangan komunitas budaya, serta dukungan terhadap lembaga adat dan kesenian tradisional. Pada sisi lain, pembangunan sosial juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kohesi sosial melalui pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk kelompok rentan. Hal ini dilandasi oleh prinsip partisipatif dan kolaboratif untuk mendorong pembangunan yang menyatu dengan kebutuhan dan potensi sosial masyarakat setempat.

Ketahanan ekologi menjadi elemen krusial mengingat Provinsi Kalimantan Utara merupakan wilayah dengan kekayaan biodiversitas tinggi serta hutan tropis yang luas. Oleh karena itu, pembangunan ke depan menekankan pada perlindungan kawasan hutan, konservasi lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari. Upaya penguatan ketahanan ekologi difokuskan pada pembangunan berbasis ekoregion, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengendalian kerusakan lingkungan, serta penguatan tata kelola sumber daya alam yang transparan dan akuntabel. Pemanfaatan potensi ekonomi berbasis ekowisata dan kehutanan sosial juga akan

ditingkatkan untuk memperkuat ekonomi lokal sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi di Kalimantan Utara harus diletakkan dalam kerangka pembangunan yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis wilayah. Sinergi antar sektor dan antar pelaku pembangunan menjadi kunci, di mana perencanaan pembangunan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekologis secara seimbang. Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan, informasi, dan teknologi yang relevan juga menjadi prasyarat agar transformasi pembangunan berjalan adil dan berkelanjutan.

6. Misi 6 Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan

Misi memantapkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan menjadi fondasi yang sangat penting dalam mendorong terwujudnya transformasi sosial, ekonomi maupun tata kelola. Dalam konteks ini, semangat pembangunan wilayah harus dilaksanakan secara inklusif dan berkualitas di seluruh penjuru Provinsi Kalimantan Utara, tanpa terkecuali meliputi wilayah daratan, daerah perbatasan antarnegara dan antardaerah, serta kawasan kepulauan dan ruang laut yang selama ini cenderung terpinggirkan.

Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah menjadi faktor pengungkit yang sangat krusial dalam mendukung pembangunan wilayah yang semakin merata dan berkeadilan. Konektivitas yang baik, baik dalam bentuk jaringan transportasi darat, laut, maupun udara, menjadi prasyarat penting untuk membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas barang dan jasa, serta mempercepat arus informasi dan inovasi. Aksesibilitas yang meningkat memungkinkan wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan, seperti daerah perbatasan, kawasan pedalaman, dan wilayah kepulauan, untuk terhubung secara lebih efektif dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan layanan publik.

Pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan juga diarahkan untuk memperkuat keterkaitan dan sinergi antara kawasan pedesaan dan perkotaan, sehingga tercipta integrasi wilayah yang saling mendukung dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berfokus pada pusat-pusat pertumbuhan saja, melainkan juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

7. Misi 7 Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Dalam implementasinya, pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan juga perlu disertai dengan pembangunan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi penopang keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Karena, ketersediaan sarana prasarana yang memadai menjadi prasyarat dasar, dapat dikatakan pembangunan benar-benar merata dan berkeadilan. Selain itu, misi ini juga menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan implementasi dari transformasi pembangunan.

Pembangunan sarana dan prasarana yang hanya berorientasi pada kuantitas tanpa memperhatikan kualitas akan rentan terhadap kerusakan, ketidakefisienan, bahkan membebani anggaran daerah untuk pemeliharaan di masa mendatang. Oleh karena itu, upaya memantapkan sarana dan prasarana harus diarahkan pada pencapaian standar mutu yang tinggi, maupun fungsionalitasnya bagi masyarakat luas. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan juga harus berorientasi pada kelestarian lingkungan, menjadi semakin relevan. Kondisi tersebut dengan mempertimbangkan tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang semakin mengancam. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, maka pembangunan yang dilakukan diharapkan akan mampu memberikan manfaat jangka panjang, memperkuat daya saing

daerah, serta mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik tanpa mengorbankan sumber daya generasi mendatang.

8. Misi 8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas

Misi ini memastikan bahwa pembangunan Kalimantan Utara berlangsung secara berkelanjutan, terpadu, dan selaras dengan visi misi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dengan menjamin adanya kesinambungan berbagai program pembangunan lintas sektor yang tidak hanya menekankan pencapaian internal semata, tetapi juga berdampak terhadap pembangunan nasional. Misi ini mendorong integrasi antara pembangunan provinsi dengan Pembangunan di tingkat kabupaten/kota dan nasional yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan hidup, agar Kalimantan Utara dapat menjadi provinsi yang kokoh sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur dan berkelanjutan.

Keterkaitan antara misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dengan Misi RPJMN (Asta Cita atau Prioritas Nasional) digambarkan pada tabel di bawah.

Tabel 4.3
Keterkaitan Asta Cita RPJMN dan Misi RPJMD

Asta Cita (Misi RPJMN Tahun 2025-2029)	Misi RPJMD Tahun 2025-2029
Asta Cita 1: Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	**Misi 4** Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI
Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.	**Misi 4** Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI **Misi 2** Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan
Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	**Misi 2** Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan **Misi 7** Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Asta Cita (Misi RPJMN Tahun 2025-2029)	Misi RPJMD Tahun 2025-2029
Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.	**Misi 1** Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan
Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	**Misi 2** Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan
Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	**Misi 2** Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan **Misi 6** Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan
Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.	**Misi 3** Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif **Misi 4** Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI **Misi 8** Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas
Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	**Misi 5** Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

Visi dan Misi RPJMD diturunkan ke Tujuan dan Sasaran. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi RPJMD selama lima tahun, sedangkan sasaran merupakan rangkaian kinerja dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang diturunkan dari tujuan. Pencapaian Tujuan dan Sasaran RKPD tahun 2027 akan diukur dengan indikator kinerja dan target. Upaya pencapaian tujuan dan sasaran melalui serangkaian strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027

Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027
Visi: Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh Sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan **Misi 1.** Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan **Misi 2.** Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan **Misi 3.** Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif **Misi 4**. Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI **Misi 5.** Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi **Misi 6.** Memantapkan Pembangunan Wilayah yang	Meningkatnya Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Beranda Depan NKRI		Indeks Daya Saing Daerah	3,29	3,42
			Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,56	5,6
		Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Indeks Ekonomi Hijau	75,05*	77,14
			Indeks Ekonomi Biru	33,47*	40,05
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Indeks Modal Manusia	0,55	0,57
		Dukungan infrastruktur yang merata berkeadilan dan berkualitas	Indeks Infrastruktur Daerah	45,58	45,86
		Terwujudnya masyarakat inklusif dan harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	87,23	88,98
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	51,81*	58,93
			Indeks Pembangunan Gender	89,38	89,72
	Tata Kelola Pemerintahan yang Semakin Berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi	80,3	83,80
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan inovatif melayani	Nilai SAKIP	71,42	72,77
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	74,997*	76,997
			Survei Penilaian Integritas KPK	73,14	75,00
			Indeks Pelayanan Publik	3,86	4,32
			Indeks Inovasi Daerah	50,84	61,00
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Indeks Kesejahteraan Sosial	49,83	53,25

Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027
Merata dan Berkeadilan **Misi 7.** Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan **Misi 8.** Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas		Meningkatnya kemandirian dan produktivitas masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,85	3,72
			Tingkat Kemiskinan (%)	5,54	4,20
			Indeks Gini	0,251	0,249
		Wilayah perbatasan yang maju dan sejahtera	Persentase Desa Wilayah Perbatasan yang Berstatus Maju dan Mandiri (%)	22,06	24,02
	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup		Penurunan Intensitas Emisi GRK	63,82*	66,66
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	85,99	86,39
		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	121,35	115

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, diolah

Keterangan: * data tahun 2024

Pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2027 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran RKPD serta melaksanakan kebijakan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Untuk mencapainya, telah ditetapkan beberapa program perangkat daerah yang menjadi prioritas. Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah program strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja dari tingkatan kinerja tertinggi ke terendah. Program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan di RPJMD, dimuat dalam RKPD Tahun 2027 sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 4.5

Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh Sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan Misi 1 Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan Misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan Misi 3 Mewujudkan Transformasi Tata	**Meningkatnya Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Beranda Depan NKRI**			– **Indeks Daya Saing Daerah**	
				– **Laju Pertumbuhan Ekonomi**	
		Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan		– **Indeks Ekonomi Hijau** – **Indeks Ekonomi Biru**	
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi
			Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Pertumbuhan Wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan UMKM
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan skor pph	Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase cadangan pangan	Program Pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
			Meningkatnya pengelolaan pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan dan sesuai dengan zonasi yang ditetapkan	Nilai Evaluasi, efektivitas, pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA)	Program Pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil
				Jumlah luasan wilayah laut yang dikelola	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan perikanan tangkap

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif Misi 4 Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI Misi 5 Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Misi 6 Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan Misi 7 Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan perikanan budidaya
			Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
			Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Program Perencanaan dan pembangunan industri
			Meningkatnya Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah produk hasil perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
			Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat sebagai sumber pangan bergizi, sehat dan berkelanjutan	Angka Konsumsi Ikan	
				Jumlah unit pengolahan ikan (UPI) aktif dan tersertifikasi	
			Meningkatnya iklim investasi	Persentase kebijakan daerah terkait penanaman modal yang ditetapkan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Meningkatnya daya tarik investasi	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal
			Menurunnya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Sumber Air Yang Memenuhi Baku Mutu	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
				Persentase Parameter Udara Yang Memenuhi Baku Mutu	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
Misi 8 Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas				Persentase kampung Di Lahan Kritis Yang Terbina	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Program Keanekaragaman hayati
			Meningkatnya pelaku Usaha dan/Kegiatan kewenangan provinsi yang dilakukan pengawasan	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/Kegiatan kewenangan provinsi yang dilakukan pengawasan	Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH
			Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang dikelola.	Program Pengelolaan persampahan
			Meningkatnya Penanganan Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
			Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai Kinerja Pengaturan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterjangkauan Terhadap Penggunaan Energi Listrik dan EBT	Jumlah pasokan energi yang bersumber dari EBT	Program Pengelolaan energi baru dan terbarukan
			Meningkatnya kelestarian dan fungsi DAS	Persentase tutupan lahan pada sempadan sungai	Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
			Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Produksi hasil hutan kayu	Program Pengelolaan Hutan
			Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang kehutanan
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Program Penanggulangan bencana

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	Persentase penanganan pasca bencana	
			Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	
			Meningkatnya Kualitas Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Program peningkatan daya tarik pariwisata
			Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Program pemasaran pariwisata
			Meningkatnya Kualitas Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tervalidasi	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase tradisi budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	Program pengembangan kebudayaan
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		**Indeks Modal Manusia**	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)	Program Perlindungan perempuan
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Nilai Kota Layak Anak (KLA)	Program Pemenuhan hak anak
			Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase tradisi budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	Program Pengembangan kebudayaan
			Meningkatnya kualitas Lulusan	Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi	Program Pengelolaan pendidikan
				Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI	
				Persentase lulusan SLB yang mandiri	
			Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase PTK Profesional	
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas	
			Meningkatnya Tata Kelola Satuan Pendidikan	Persentase sekolah terakreditasi minimal B	
			Meningkatnya kualitas PTK	Indeks Pemerataan Guru	Program Pendidikan dan tenaga pendidikan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
				Persentase Kab/Kota yang mencapai SPM Bidang Kesehatan Jenis Pelayanan Dasar Kesehatan Keluarga	
				Persentase Kab/Kota yang mencapai SPM Bidang Kesehatan Jenis Pelayanan Dasar Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	
				Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria. (Kab/Kota)	
				Persentase Laboratorium Kesmas Tingkat 2-3 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya	
				Proporsi fasilitas kesehatan dengan perbekalan Kesehatan sesuai standar	
				Proporsi kab/kota dengan fasilitas Kesehatan sesuai standar	
				Persentase Puskesmas dan RS Pemerintah yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar	
				Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja	
				Persentase Kab/Kota STBM	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDMK	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap populasi	Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
				Persentase Faskes (Puskesmas dan RS Pemerintah) Yang Memiliki Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Sesuai Standard	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai Standar Perpustakaan Nasional	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan
		Dukungan infrastruktur yang merata berkeadilan dan berkualitas		**Indeks Infrastruktur Daerah**	
			Meningkatnya kemantapan jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Program Penyelenggaraan jalan
			Meningkatnya Layanan Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
				Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	
			Meningkatnya Layanan Transportasi Perairan	Rasio Konektivitas Angkutan Perairan	Program Pengelolaan pelayaran
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterjangkauan Terhadap Penggunaan Energi Listrik dan EBT	Capaian rumah tangga berlistrik (Rumah Tangga)	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
			Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterjangkauan Terhadap Penggunaan Energi Listrik dan EBT	Jumlah pasokan energi yang bersumber dari EBT (TOE)	Program pengelolaan Energi baru Terbarukan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	1. Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi; 2. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir Kewenangan Provinsi; 3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi; 4.Persentase kapasitas layanan infrastruktur air baku wilayah sungai kewenangan provinsi.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase masyarakat yang mendapatkan air minum layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
			Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Infrastruktur persampahan regional terbangun	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
			Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Strategis terbangun (IID)	Program Penataan Bangunan Gedung
			Meningkatnya kualitas penanganan kawasan kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	Program Kawasan Permukiman
			Meningkatnya kualitas pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman	1. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) 2. Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
		Terwujudnya masyarakat inklusif dan harmonis		– **Indeks Kerukunan Umat Beragama** – **Indeks Pembangunan Kebudayaan** – **Indeks Pembangunan Gender**	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
			Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)	Program Perlindungan perempuan
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Nilai Kota Layak Anak (KLA)	Program Pemenuhan hak anak
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase tradisi budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	Program Pengembangan kebudayaan
			Meningkatnya Kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar kebijakan	Program Kesejahteraan rakyat
	Tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas			**Indeks Reformasi Birokrasi**	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan inovatif melayani		– **Nilai SAKIP** – **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah SPI KPK** – **Indeks Pelayanan Publik Indeks Inovasi Daerah**	
			Peningkatan Kepatuhan terhadap Peraturan	Persentase TLHP yang diselesaikan	Program Penyelenggaraan Pengawasan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standar Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel	Persentase PD yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pelaporan keuangan	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	Program Pengelolaan keuangan daerah
			Meningkatnya Capaian PAD Melalui Upaya Intensifikasi Dan Eksetensifikasi	Capaian Realisasi PAD Perangkat Daerah (Rp)	Program Pengelolaan pendapatan daerah
			Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat capaian program pembangunan daerah	Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
			Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan provinsi dengan nasional bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
				Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan provinsi dengan nasional bidang Perekonomian dan SDA	
				Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan provinsi dengan nasional bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	Program penataan organisasi
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun	Program penyelenggaraan statistik sektoral

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				perencanaan pembangunan daerah	
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	
			Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	Persentase SDM Aparatur yang meningkatkan kapasitasnya	Program kepegawaian daerah
			Meningkatnya kualitas manajemen talenta ASN	Persentase tingkat kesesuaian kompetensi PNS dengan kompetensi jabatan	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Program pengembangan sumber daya manusia
			Meningkatnya layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, managerial dan fungsional	
			Meningkatnya kualitas corpu	Nilai Strategi Penerapan Corpu	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase anak usia 0-6 tahun yang memiliki akta kelahiran	Program pencatatan sipil
				Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal	
				Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	
				Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP	Program pendaftaran penduduk
				Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Adminduk	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Meningkatnya Tata Kelola Inovasi di daerah	Tingkat kematangan Inovasi daerah	Program Riset dan Inovasi
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat			**Indeks Kesejahteraan Sosial**	
		Meningkatnya kemandirian dan produktivitas masyarakat		**Tingkat Pengangguran Terbuka** **Tingkat kemiskinan** **Indeks Gini**	
			Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Program Penempatan tenaga kerja
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi
			Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Pertumbuhan Wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan UMKM
			Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase fasilitasi kerjasama desa	Program peningkatan kerjasama desa

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
				Persentase fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Program perlindungan dan jaminan sosial
				Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	
		Wilayah perbatasan yang maju dan sejahtera		**Persentase desa wilayah perbatasan yang berstatus maju dan mandiri**	
			Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pengelolaan kawasan perbatasan dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Rencana Induk yang Diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah	Program Pengelolaan perbatasan negara
			Meningkatnya koordinasi pengelolaan kawasan perbatasan	Persentase Kegiatan Rencana Aksi Berdasarkan Rencana Induk yang Direalisasikan oleh Perangkat Daerah Pengampu	
			Meningkatnya kualitas monev terhadap pelaksanaan pengelolaan kawasan perbatasan	Persentase rekomendasi hasil monev yang dikeluarkan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan rencana aksi tahunan	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya kualitas Lulusan	Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi	Program Pengelolaan pendidikan
				Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI	
				Persentase lulusan SLB yang mandiri	
			Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase PTK Profesional	
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas	
			Meningkatnya Tata Kelola Satuan Pendidikan	Persentase sekolah terakreditasi minimal B	
			Meningkatnya kualitas PTK	Indeks Pemerataan Guru	Program Pendidikan dan tenaga pendidikan
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
				Persentase Kab/Kota yang mencapai SPM Bidang Kesehatan Jenis Pelayanan Dasar Kesehatan Keluarga	
				Persentase Kab/Kota yang mencapai SPM Bidang Kesehatan Jenis Pelayanan Dasar Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	
				Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria. (Kab/Kota)	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Persentase Laboratorium Kesmas Tingkat 2-3 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya	
				Proporsi fasilitas kesehatan dengan perbekalan Kesehatan sesuai standar	
				Proporsi kab/kota dengan fasilitas Kesehatan sesuai standar	
				Persentase Puskesmas dan RS Pemerintah yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar	
				Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja	
				Persentase Kab/Kota STBM	
			Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDMK	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap populasi	Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
				Persentase Faskes (Puskesmas dan RS Pemerintah) Yang Memiliki Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Sesuai Standard	
			Meningkatnya kemantapan jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Program Penyelenggaraan jalan
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	
			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	Program Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Program Perlindungan dan jaminan sosial
				Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan skor PPH	Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
			Meningkatnya Layanan Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
				Presentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	
			Meningkatnya Layanan Transportasi Perairan	Rasio Konektivitas Angkutan Perairan	Program Pengelolaan pelayaran
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Program Pengelolaan aplikasi informatika

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya pengelolaan pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan dan sesuai dengan zonasi yang ditetapkan	Nilai Evaluasi, efektivitas, pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA) Jumlah luasan wilayah laut yang dikelola	Program Pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil
			Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
			Meningkatnya penyediaan dan pegembangan prasrana pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Program Pemerintahan dan otonomi daerah
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1. Persentase aparatur desa dan anggota BPD yg ditingkatkan kapasitasnya 2. Persentase fasilitasi tata kelola desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyrakat hukum adat dalam pembangunan	1. Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa 2. Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup			**Penurunan Intensitas Emisi GRK**	
		Meningkatnya kualitas		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
		lingkungan hidup	Meningkatnya Status Mutu Air Sungai, Udara dan Air Laut	Persentase pemenuhan Status mutu Air Sungai dengan Kategori Baik	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
				Persentase Parameter Status Mutu Udara tidak melampaui Baku Mutu	
				Persentase Status mutu Air laut Kategori Baik berdasarkan Baku Mutu Air laut	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Program Keanekaragaman hayati
			Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi dampak resiko KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Yang Ditindaklanjuti	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya pelaku Usaha dan/Kegiatan kewenangan provinsi yang dilakukan pengawasan	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/Kegiatan kewenangan provinsi yang dilakukan pengawasan	Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH
			Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang dikelola.	Program Pengelolaan persampahan
			Meningkatnya Penanganan Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Nilai kinerja pengaturan penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterjangkauan Terhadap Penggunaan Energi Listrik dan EBT	Jumlah pasokan energi yang bersumber dari EBT (TOE)	Program Pengelolaan energi baru dan terbarukan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya pengelolaan air tanah yang sesuai dengan ketentuan	Persentase izin pemanfaatan air tanah sesuai dengan kaidah konservasi air tanah	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
			Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Provinsi yang dikelola	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
			Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase tutupan lahan pada sempadan sungai	Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Program Penanggulangan bencana
			Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	Persentase penanganan pasca bencana	
			Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	
		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim		**Indeks Risiko Bencana**	
			Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase tutupan lahan pada sempadan sungai	Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Program Penanggulangan bencana
			Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	Persentase penanganan pasca bencana	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Nilai kinerja pengaturan penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, diolah

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2027

4.2.1. Prioritas Nasional Tahun 2027

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029.

Gambar 4.1

Asta Cita Sebagai Prioritas Pembangunan



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Asta Cita memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut

diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Pada periode pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029, pemerintah pusat menetapkan 8 Program Hasil Terbaik Cepat. Program Hasil Terbaik Cepat terutama dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mendorong pemerataan pembangunan.

Gambar 4.2

Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat

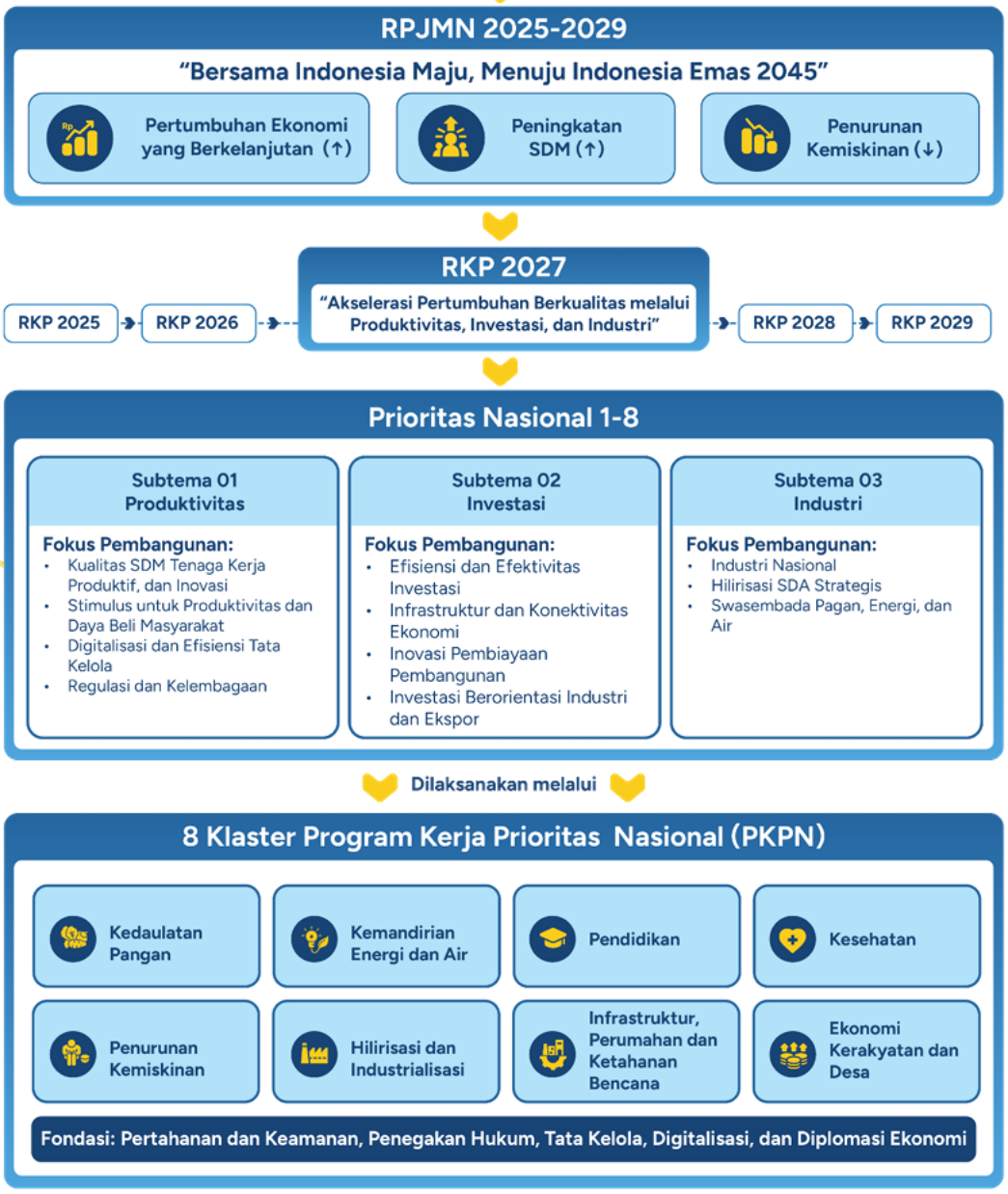
Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5 Pemberantasan Kemiskinan	5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	
10 Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	
11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	
12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	
13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	
14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya	
15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	
16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah	
17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Rencana pembangunan nasional tahun 2027 mengangkat tema **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi dan Industri".** Akselerasi pertumbuhan ekonomi berkualitas menuju 8% di 2029 difokuskan pada peningkatan produktivitas, investasi, dan industri pengolahan. Ketiga sub tema dan 8 prioritas Pembangunan nasional tahun 2027 dilaksanakan melalui Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

Gambar 4.3

Tema, Prioritas Nasional, dan PKPN pada RKP Tahun 2027

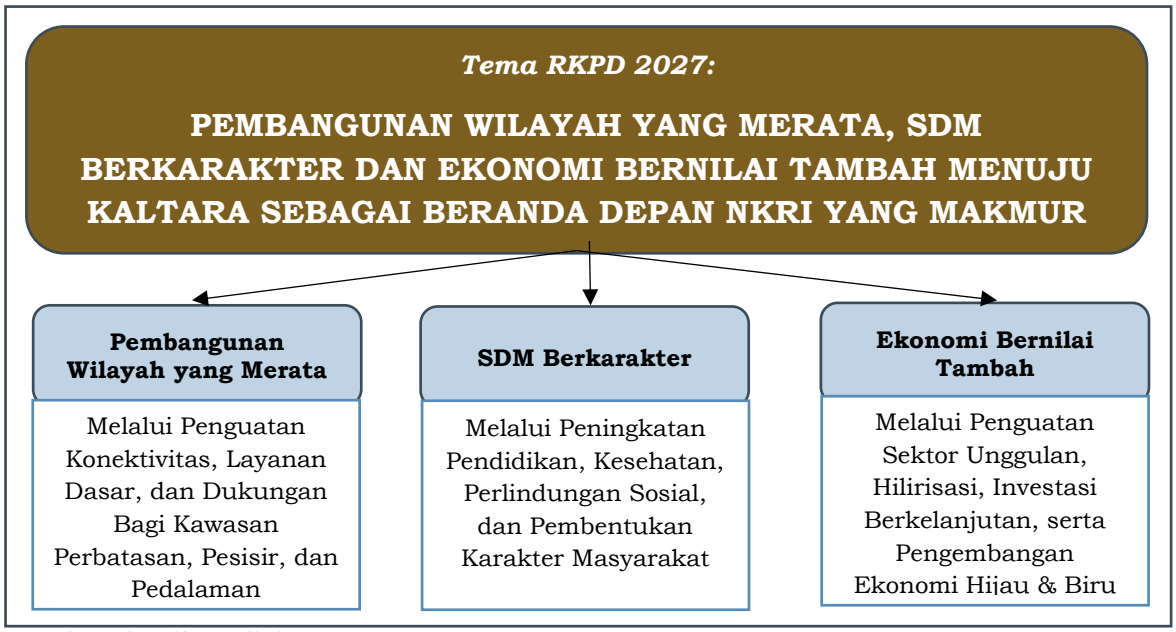


Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027, Kementerian PPN/Bappenas

4.2.2. Prioritas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027

Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara. Upaya mewujudkan visi RPJMD 2025-2029, yakni "**Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan"**, dilakukan secara bertahap dengan sasaran pembangunan yang jelas dan terukur. Sebagaimana dimuat dalam RPJMD, tema pembangunan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2027 adalah:

Gambar 4.4
Tema RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027



Sumber: hasil analisis, 2026

Tema ini memberi penekanan pada pembangunan wilayah yang merata. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian diharapkan semakin merata pada kawasan perbatasan, pedalaman, dan pesisir/kepulauan. Keberadaan PLBN di perbatasan mampu menggerakkan perekonomian kawasan. Selain itu, potensi ekonomi biru dan hijau dapat dioptimalkan dan bernilai tambah. Nilai tambah ekonomi selain digerakkan oleh keberdayaan masyarakat juga perlu didukung oleh peningkatan investasi. Penanaman modal yang masuk diarahkan dapat padat karya dan menerapkan standar berkelanjutan.

Aspek pembangunan SDM ditempuh melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial yang semakin adaptif terhadap kerentanan dan penyebab kemiskinan masyarakat. Tidak kalah penting, pembangunan SDM juga diarahkan untuk memperkuat SDM yang berkarakter, antara lain melalui penguatan kesetaraan gender, pemajuan kebudayaan dan pengamalan nilai-nilai agama. Pembangunan SDM yang berkarakter juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Lebih lanjut, pembangunan pada tahun 2027 juga diarahkan untuk kelestarian lingkungan, penurunan emisi GRK, dan peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana. Aspek lingkungan hidup harus tetap lestari di tengah laju pembangunan, serta kapasitas mitigasi bencana dan perubahan iklim semakin menguat. Pengelolaan kawasan pesisir dan ekosistem mangrove memiliki posisi yang sangat strategis karena mangrove berfungsi sebagai penyerap karbon alami, pelindung wilayah pesisir dari abrasi dan bencana iklim, serta penyangga keanekaragaman hayati. Dengan menjaga dan merehabilitasi mangrove secara terencana, pembangunan daerah dapat berkontribusi langsung pada pengurangan emisi GRK sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim. Lebih jauh, pengelolaan mangrove perlu diarahkan tidak hanya pada aspek konservasi, tetapi juga pada pemanfaatan ekonomi berkelanjutan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal.

Dalam implementasinya, pengelolaan mangrove yang berorientasi pada penurunan emisi GRK dan ekonomi hijau perlu diintegrasikan dengan pemberdayaan masyarakat yang inklusif berdasarkan prinsip GESI (*Gender Equality and Social Inclusion*). Perempuan, masyarakat adat, nelayan kecil, dan kelompok rentan lainnya harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan mangrove, serta memperoleh akses yang setara terhadap manfaat ekonomi yang dihasilkan.

Berbagai fokus pembangunan akan dapat dilaksanakan dengan baik bila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Aspek tata kelola pemerintahan diarahkan pada peningkatan sinergi lintas sektor untuk akselerasi akuntabilitas kinerja, peningkatan kapasitas fiskal

daerah melalui optimalisasi PAD dan sumber pembiayaan alternatif berupa KPBU dan CSR, peningkatan kualitas tata kelola perbatasan melalui pendekatan *soft border*, serta penguatan sistem integritas dan pengawasan agar pembangunan dan pelayanan publik berkualitas dan bersih dari praktik korupsi.

Prioritas pembangunan Kalimantan Utara dalam RKPD Tahun 2027 adalah program unggulan dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Program unggulan merupakan program strategis daerah yang berdampak langsung terhadap pencapaian kinerja pembangunan Provinsi Kalimantan Utara selama 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan program unggulan daerah berasal dari telaah terhadap program prioritas nasional, program politik gubernur dan wakil gubernur, serta permasalahan dan isu strategis daerah. Dengan kata lain, program unggulan daerah merupakan program terpilih yang diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan atau isu strategis secara cepat dan tepat sasaran.

Program unggulan sebagai prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2027, meliputi:

1. **SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender**
2. **Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera**
3. **Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan**
4. **Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan**
5. **Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan**
6. **Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara**
7. **Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara**
8. **Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif**

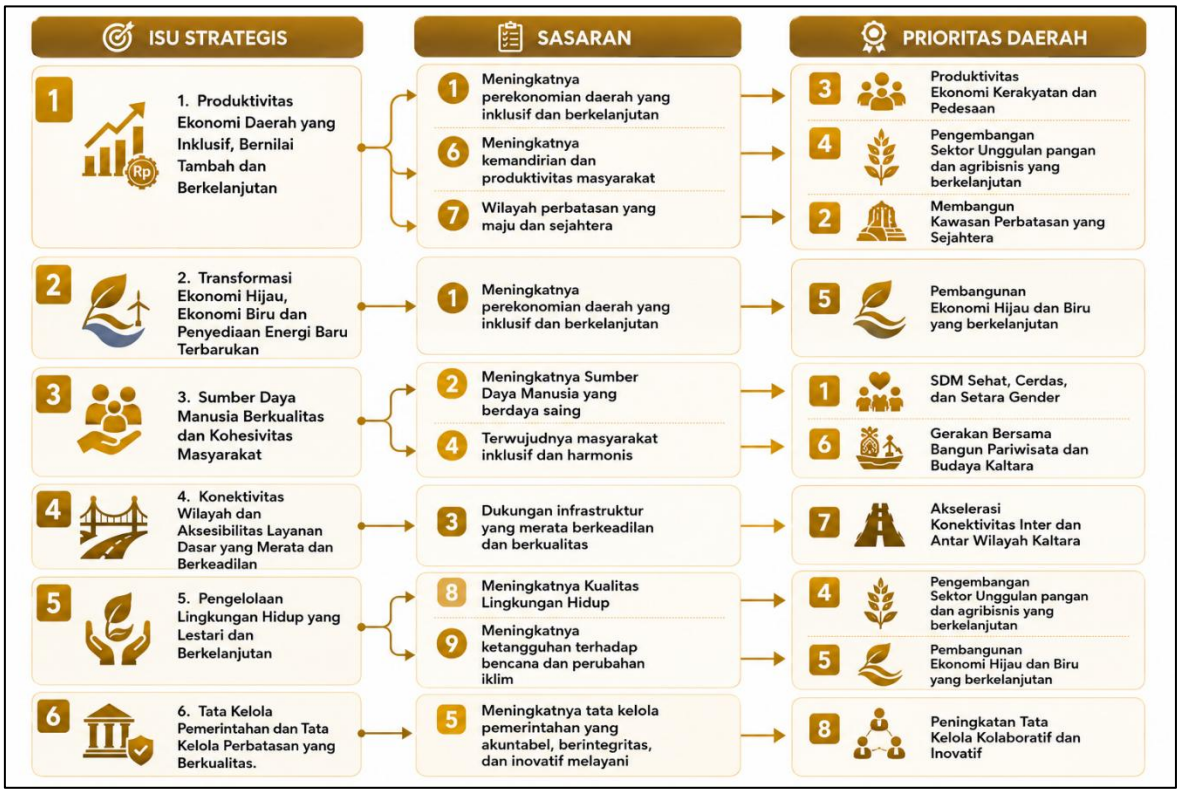
Perumusan prioritas daerah tidak lepas dari pertimbangan isu strategis yang dihadapi daerah dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai. Isu strategis, sasaran RKPD, dan prioritas daerah merupakan satu rangkaian perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027. Setiap isu strategis diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan yang spesifik, kemudian diimplementasikan melalui

prioritas daerah yang paling relevan. Misalnya, isu Produktivitas Ekonomi Daerah yang Inklusif, Bernilai Tambah dan Berkelanjutan dikaitkan dengan sasaran peningkatan perekonomian daerah, kemandirian masyarakat, dan kemajuan wilayah perbatasan, yang kemudian diterjemahkan ke dalam prioritas Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan, Pengembangan Sektor Unggulan Pangan dan Agribisnis, serta Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera. Sementara itu, isu Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru dan Penyediaan Energi Baru Terbarukan secara langsung mendukung peningkatan perekonomian yang berkelanjutan melalui prioritas Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru.

Gambar di bawah memperlihatkan bahwa pembangunan Kalimantan Utara tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup, ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Isu Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Kohesivitas Masyarakat mendukung prioritas pengembangan SDM dan pariwisata-budaya, isu Konektivitas Wilayah dan Aksesibilitas Layanan Dasar mendukung percepatan konektivitas antarwilayah, sedangkan isu Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari dan Berkelanjutan diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengembangan sektor unggulan pangan dan agribisnis serta ekonomi hijau dan biru. Adapun isu Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Perbatasan yang Berkualitas mendukung terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan inovatif melalui prioritas Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif, sehingga seluruh prioritas pembangunan saling melengkapi untuk mencapai sasaran RKPD Tahun 2027.

Gambar 4.5

Keterkaitan Isu Strategis, Sasaran, dan Prioritas Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027



Sumber: hasil analisis, 2026

Delapan program unggulan daerah di atas masing-masing memiliki fokus dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah. Fokus ini bertujuan untuk memperjelas arah dari program unggulan daerah. Adapun fokus masing-masing program unggulan daerah yang mendukung kinerja tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.6
Program Unggulan Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Unggulan Kepala Daerah	Program
Meningkatnya daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi sebagai Beranda Depan NKRI		Indeks Daya Saing Daerah		
		Laju Pertumbuhan Ekonomi		
	Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan	1. Indeks Ekonomi Hijau 2. Indeks Ekonomi Biru	**Program Unggulan 4. Pengembangan Sektor Unggulan Pangan dan agribisnis yang berkelanjutan**, meliputi: 1. Pembangunan Sentra Produksi Pertanian, Tanaman Pangan, Peternakan, Hortikultura dan Perkebunan 2. Pengembangan Budidaya Komoditi Unggulan Daerah 3. Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan Berkelanjutan 4. Pengembangan (Diversifikasi) Produk Pangan Lokal 5. Peningkatan Produksi Pangan Lokal 6. Penjaminan Mutu dan Kualitas Pangan Lokal. 7. Perluasan pemasaran produk unggulan daerah	1. Program Pengembangan UMKM 2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 3. Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 4. Program Pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan 5. Program Pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil 6. Program Pengelolaan perikanan tangkap 7. Program Pengelolaan perikanan budidaya 8. Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 9. Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Unggulan Kepala Daerah	Program
				10. Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 11. Program Perencanaan dan pembangunan industri
			Program Unggulan 5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan, meliputi 1. Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon 2. Akselerasi Hilirisasi Industri SDA Berkelanjutan. 3. Optimalisasi potensi kawasan pesisir dan kepulauan	1. Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Program Keanekaragaman hayati 3. Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH 4. Program Pengelolaan persampahan 5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Bercaun (Limbah B3) 6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 7. Program Pengelolaan energi baru dan terbarukan 8. Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 9. Program Penanggulangan bencana 10. Program pencegahan, penanggulanagan, penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran
			Program Unggulan 6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara, meliputi 1. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	1. Program peningkatan daya tarik pariwisata 2. Program pemasaran pariwisata

Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Unggulan Kepala Daerah	Program
			2. Penyelenggaraan Festival Budaya 3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif.	3. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual 4. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif 5. Program pengembangan kebudayaan
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Indeks Modal Manusia	**Program Unggulan 1. SDM sehat, cerdas, dan setara gender,** meliputi: 1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan Pelayanan dan Akses Kesehatan 3. Peningkatan Akses Pendidikan yang berkualitas dan inklusif 4. Ketersediaan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Berkualitas 5. Penguatan Literasi Digital. 6. Peningkatan kompetensi vokasional berbasis potensi daerah	1. Program Pengelolaan pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat 4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan 5. Program Kesejahteraan rakyat
	Dukungan infrastruktur yang merata berkeadilan dan berkualitas	Indeks Infrastruktur Daerah	**Program Unggulan 7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara,** meliputi: 1. Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Pembangunan Pelabuhan, Dermaga, Terminal dan	1. Program Penyelenggaraan jalan 2. Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan 3. Program Pengelolaan pelayaran

Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Unggulan Kepala Daerah	Program
			Bantuan Transportasi Udara (SOA Barang dan Penumpang) 3. Peningkatan kualitas layanan perhubungan yang inklusif 4. Pembangunan Jaringan Telekomunikasi (Keterjangkauan Telekomunikasi Digital).	4. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 5. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	Terwujudnya masyarakat inklusif dan harmonis	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama 2. Indeks Pembangunan Kebudayaan 3. Indeks Pembangunan Gender	**Program Unggulan 1. SDM sehat, cerdas, dan setara gender**, meliputi: 1. Peningkatan Peran Perempuan dan Akses Setara terhadap Pembangunan 2. Peningkatan Ketahanan Keluarga serta Perlindungan Perempuan dan Anak 3. Peningkatan Peran dan Kualitas Kelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) 4. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran 5. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal	1. Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 2. Program Perlindungan perempuan 3. Program Pemenuhan hak anak 4. Program Pemberdayaan dan peningkatan keuarga sejahtera 5. Program Pengembangan kebudayaan
Tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi		
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan inovatif melayani	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Survei Penilain Integritas (SPI) KPK 4. Indeks Pelayanan Publik	**Program Unggulan 8. Peningkatan tata kelola kolaboratif dan inovatif**, meliputi: 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Penyelenggaraan Inovasi Daerah	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan 3. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Unggulan Kepala Daerah	Program
		5. Indeks Inovasi Daerah	3. Peningkatan kualitas perencanan dan penganggaran berbasis kinerja 4. Digitalisasi pelayanan publik 5. Optimalisasi PAD 6. Peningkatan kualitas Penyelengaraan Pemerintahan Daerah dan penguatan *quality assurance.*	4. Program Pengelolaan keuangan daerah 5. Program Pengelolaan pendapatan daerah 6. Program Riset dan Inovasi 7. Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah 8. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 9. Program penataan organisasi 10. Program penyelenggaraan statistik sektoral 11. Program kepegawaian daerah 12. Program pengembangan sumber daya manusia 13. Program pencatatan sipil 14. Program pendaftaran penduduk
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		Indeks Kesejahteraan Sosial		
	Meningkatnya keberdayaan dan produktivitas masyarakat	1. Tingkat Pengangguran Terbuka 2. Tingkat Kemiskinan 3. Indeks Gini	**Program Unggulan 3. Produktivitas ekonomi kerakyatan dan pedesaan,** meliputi: 1. Pemberdayaan wirausaha muda 2. Peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja 3. Pembentukan dan pengembangan koperasi merah putih 4. Fasilitasi Permodalan UMKM	1. Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 2. Program Penempatan tenaga kerja 3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 4. Program peningkatan kerjasama desa 5. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Unggulan Kepala Daerah	Program
			5. Pelatihan dan Pembinaan Pelaku Usaha 6. Peningkatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan ekonomi pedesaan 7. Peningkatan perlindungan sosial adaptif	6. Program perlindungan dan jaminan sosial
	Wilayah perbatasan yang maju dan sejahtera	Persentase desa wilayah perbatasan yang berstatus maju dan mandiri	**Program Unggulan 2. Membangun kawasan perbatasan yang sejahtera**, meliputi: 1. Menyusun regulasi tingkat daerah khusus untuk pembangunan kawasan perbatasan dan kawasan Pesisir 2. Mengalokasikan pembiayaan pembangunan secara berimbang untuk pembangunan kawasan perbatasan dan kawasan Pesisir 3. Pengembangan potensi unggulan kawasan perbatasan dan kawasan Pesisir 4. Peningkatan akses dan kualitas layanan dasar 5. Fasilitasi Pembentukan DOB	1. Program Pengelolaan perbatasan negara 2. Program Administrasi pemerintahan desa 3. Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat 4. Program Pengelolaan pendidikan 5. Program Pendidik dan tenaga kependidikan 6. Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 7. Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 8. Program Penyelenggaraan jalan 9. Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum 10. Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum 11. Program Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Unggulan Kepala Daerah	Program
				12. Program Perlindungan dan jaminan sosial 13. Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 14. Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan 15. Program Pengelolaan pelayaran 16. Program Pengelolaan aplikasi informatika 17. Program Pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil 18. Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 19. Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian 20. Program Pemerintahan dan otonomi daerah
Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup		Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)		
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**Program Unggulan 5. Pembangunan ekonomi hijau dan biru yang berkelanjutan**, meliputi: 1. Pengendalian kualitas lingkungan hidup 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 3. Mitigasi Perubahan Iklim.	1. Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Program Keanekaragaman hayati 3. Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH 4. Program Pengelolaan persampahan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Unggulan Kepala Daerah	Program
	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	4. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca 5. Pengelolaan Mangrove Berbasis Konservasi dan Nilai Ekonomi 6. Pemberdayaan masyarakat pesisir yang inklusif, dengan menerapkan prinsip *Gender Equality and Social Inclusion* (GESI) 7. Pengembangan Energi Terbarukan.	5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Bercaun (Limbah B3) 6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 7. Program Pengelolaan energi baru dan terbarukan 8. Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 9. Program Penanggulangan bencana 10. Program pencegahan, penanggulanagan, penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran

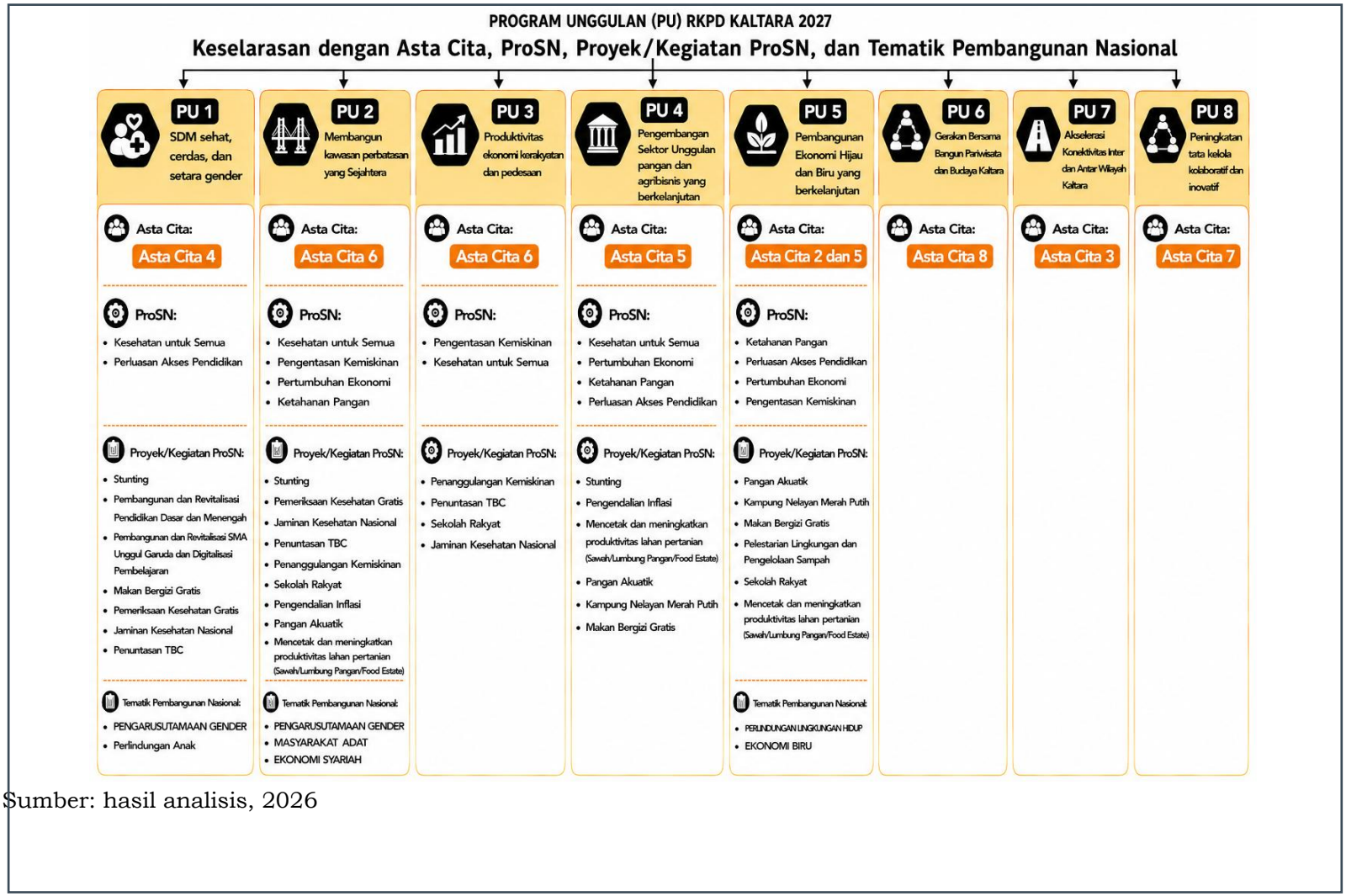
4.2.3. Keselarasan Program Unggulan Provinsi Kalimantan Utara dengan Kebijakan Nasional

Keselarasan antara Program Unggulan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 dengan Asta Cita, Program Strategis Nasional (ProSN), dan berbagai tematik pembangunan nasional merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional secara terintegrasi dan berkelanjutan. Penyusunan program unggulan daerah tidak hanya diarahkan untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan pembangunan di Kalimantan Utara, tetapi juga diselaraskan dengan prioritas nasional.

Gambar di bawah memberi informasi keselarasan Program Unggulan (PU) RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 dengan kebijakan pembangunan nasional, yang meliputi Asta Cita, Program Strategis Nasional (ProSN) beserta kegiatan/proyek, dan tematik pembangunan nasional lainnya. Diagram menunjukkan bahwa 6 (enam) dari 8 (delapan) Program Unggulan RKPD Kalimantan Utara tahun 2027 memiliki keselarasan dengan kebijakan nasional. Penentuan keselarasan dilakukan berdasarkan kesamaan sub kegiatan untuk melaksanakan masing-masing Program Unggulan dan Asta Cita/Program Strategis Nasional (ProSN)/tematik pembangunan.

Gambar 4.6

Keselarasan Program Unggulan Kalimantan Utara dengan Kebijakan Nasional Tahun 2027



Sumber: hasil analisis, 2026

4.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan strategi selain berupa penahapan pembangunan dari tahun 2026 hingga tahun 2030, juga dirumuskan dalam bentuk upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta merespon isu lingkungan dinamis. Strategi dalam bentuk ini akan semakin memperjelas keterkaitan antara rumusan kinerja dan kerja. Strategi pembangunan jangka menangah Provinsi Kalimantan Utara dalam mencapai sasaran pembangunan, sebagai berikut:

Tabel 4.7
Strategi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi sebagai beranda depan NKRI	Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan	• Pengembangan sektor unggulan pangan dan agribisnis berkelanjutan. • Pengembangan kelapa sawit berkelanjutan • Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan dan pedesaan. • Penguatan daya saing pariwisata berbasis potensi daerah secara kolaboratif. • Penguatan stabilitas ekonomi.
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	• Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan • Peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
	Dukungan infrastruktur yang merata berkeadilan dan berkualitas	• Pengembangan infrastrukur yang berkelanjutan. • Akselerasi konektivitas inter dan antar wilayah. • Program pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi dan konektivitas yang terintegrasi dan berkeselamatan.
	Terwujudnya masyarakat inklusif dan harmonis	• Penguatan stabilitas wilayah dan perlindungan hukum. • Pemajuan kebudayaan dan menjaga harmoni sosial. • Peningkatan kesetaraan gender, ketahanan keluarga dan pemenuhan hak anak.
Tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan inovatif melayani	• Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan. • Penguatan sistem pengendalian intern dan integritas. • Peningkatan kualitas kebijakan yang partisipatif dan transparan untuk akselerasi pembangunan daerah. • Penguatan kesinambungan pembangunan.
		• Peningkatan inovasi dan digitalisasi yang mendorong kualitas pelayanan publik.

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya keberdayaan dan produktivitas masyarakat	• Perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara kolaboratif dan terpadu. • Pengurangan beban pengeluaran masyarakat • Peningkatan pendapatan masyarakat • Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. • Peningkatan iklim investasi dan lapangan pekerjaan.
	Wilayah perbatasan yang maju dan sejahtera	• Membangun kawasan perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan yang sejahtera.
Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	• Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim	• Penguatan mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

Rumusan strategi sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran, kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan untuk memperoleh upaya atau cara yang lebih operasional. Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja sebagai penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, serta keselarasannya dengan misi dan strategi dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 4.8

Penyelarasan Misi, Strategi, dan Arah Kebijakan

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	• Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. • Kolaborasi peningkatan cakupan *Universal Health Coverage* (UHC). • Pengendalian penyakit serta intensifikasi penemuan kasus dan pengobatan penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, Malaria), antara lain melalui penyediaan layanan survei dan pengendalian faktor risiko. • Dukungan pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, termasuk tenaga kesehatan spesialis yang disertai peningkatan kesejahteraan.

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		• Dukungan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan primer, dan peningkatan kualitas pelayanan RSUD. • Pengembangan RS Provinsi Tipe A dan Rumah Sakit Jiwa. • Dukungan Percepatan penurunan *stunting* melalui penguatan intervensi sensitif dan sensitif. Penguatan intervensi sensitif *stunting*, dengan *output* pengembangan infrastruktur air minum berbasis masyarakat. • Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi peserta didik, dengan *output* penyediaan bantuan pengembangan peningkatan mutu UKS. • Penguatan intervensi gizi spesifik untuk percepatan penurunan stunting pada balita. • Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap melalui penguatan sistem rantai dingin (*cold chain*) • Perluasan jangkauan layanan kesehatan primer hingga ke wilayah perbatasan dan pedalaman • Penguatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. • Dukungan peningkatan sarana dan prasarana olahraga prestasi dan rekreasi/kebugaran. • Peningkatan pembinaan atlet dan cabang olahraga.
	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan	• Kolaborasi percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). • Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan. • Pembenahan data penduduk usia pendidikan yang menjadi tugas dan wewenang daerah provinsi dalam memberikan layanan pendidikan pada semua warga negara usia 16-18 tahun yang wajib dilayani pendidikan menengah dan penduduk usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang wajib dilayani pendidikan khusus • Peningkatan rata-rata lama sekolah dengan menerapkan wajib belajar 13 tahun, capaian rata-rata lama sekolah sebagai subindikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia, dan juga sebagai tolok ukur capaian wajib belajar • Penanganan Anak Tidak Sekolah, baik Anak Tidak Sekolah Belum Pernah Belajar, Anak Tidak Sekolah Drop Out, dan Anak Tidak Sekolah Lulusan Tidak Melanjutkan yang dapat mempengaruhi capaian rata-rata lama sekolah, dan capaian wajib belajar • Biaya personil untuk pelajar pendidikan menengah dan pendidikan khusus • Peningkatan kualitas guru dan revitalisasi pendidikan vokasi (SMK) berbasis pengelolaan sumber daya laut untuk mendukung Ekonomi Biru • Peningkatan kompetensi pendidik yang adaptif terhadap perkembangan kondisi aktual. • Dukungan peningkatan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan yang disertai peningkatan kesejahteraan.

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		• Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi daerah. • Pelatihan vokasi di sektor strategis, dengan *output*: pelatihan berbasis kompetensi di Provinsi Kalimantan Utara. • Dukungan peningkatan akses dan pengembangan Perguruan Tinggi. • Peningkatan kualitas infrastruktur sosial, dengan *output* pengembangan gedung perguruan tinggi vokasi yang direvitalisasi di Kabupaten Nunukan. • Penyediaan afirmasi akses pendidikan berupa bantuan/beasiswa pendidikan, serta bagi daerah yang masih belum terjangkau melalui pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka. • Dukungan peserta didik penerima bantuan operasional satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan *output* penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada siswa Raudlatul Athfal (RA). • Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan. • Dukungan peningkatan literasi masyarakat melalui pengembangan perpustakaan dan literasi digital.
	Perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara kolaboratif dan terpadu.	• Dukungan peningkatan kualitas data kemiskinan yang terpadu, akurat dan akuntabel. • Pengelolaan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin dan marginal/rentan yang tepat sasaran. • Perlindungan sosial yang adaptif terhadap kerentanan masyarakat, antara lain petani dan nelayan yang terdampak perubahan iklim. • Penyaluran bantuan sosial yang adaptif, dengan *output* siswa SMTK/SMAK penerima PIP, gerakan pangan murah yang dilaksanakan. • Peningkatan akses rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan. • Memadukan perlindungan sosial dengan pemberdayaan masyarakat, antara lain melalui penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif bagi masyarakat miskin dan rentan. • Peningkatan perlindungan sosial bagi pemerintah desa dan BPD di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan
Misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan	Pengembangan sektor unggulan pangan dan agribisnis berkelanjutan	• Peningkatan diversifikasi pangan lokal. • Peningkatan produksi pangan lokal. • Penjaminan mutu dan kualitas pangan lokal. • Pengembangan pertanian organik. • Pembangunan sentra produksi pertanian, tanaman pangan, peternakan, hortikultura dan perkebunan. • Pengembangan budidaya komoditas unggulan daerah. • Peningkatan produk unggulan daerah, antara lain sawit dan rumput laut.

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		• Integrasi produksi sektor agro dengan rantai pasok regional, nasional dan global. • Penguatan pasca panen pangan nabati, dengan *output* pengembangan sarana pascapanen tanaman pangan dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan. • Sertifikasi dan peredaran benih nabati, dengan *output* penyaluran benih padi. • Jaminan ketersediaan bahan baku bioindustri agro, dengan *output* penyediaan bahan tanam komoditi perkebunan. • Adopsi teknologi pertanian, dengan *output* penerapan teknologi pertanian. • Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, termasuk peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi). • Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan pengembangan budidaya perikanan unggulan berbasis praktik budidaya baik berkelanjutan • Mendorong pengembangan industri pengolahan hasil perikanan yang higienis dan memenuhi standar • Perluasan akses pembiayaan dan perlindungan usaha masyarakat pesisir
	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan dan pedesaan.	• Peningkatan akses permodalan, kualitas produk, pengembangan usaha dan pemasaran produk UMKM dan IKM. • Pengembangan riset dan inovasi pendukung pengembangan produk unggulan daerah dan diversifikasi produk. • Pengembangan ekonomi digital dan akses inklusi keuangan. • Dukungan pembentukan dan pengembangan koperasi desa/kelurahan Merah Putih. • Peningkatan kerjasama antara investor besar dengan IKM, UMKM, dan Koperasi. • Dukungan revitalisasi dan pengembangan usaha BUMDes dan BUMDesMa. • Pengembangan kawasan ekonomi pedesaan berbasis optimalisasi potensi dan aset desa, serta peningkatan kerjasama desa dengan *stakeholders*. • Dukungan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan logistik.
	Pengembangan ekonomi biru dan hijau.	• Dukungan pengembangan kawasan industri hijau. • Konservasi komoditas pertanian dan praktik pertanian berkelanjutan, melalui perlindungan lahan pertanian, untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. • Pengembangan *blue economy,* revitalisasi pelabuhan perikanan, dan pengembangan pelabuhan logistik. • Perlindungan, rehabilitasi, dan pemanfaatan lestari ekosistem pesisir dan mangrove. • Pengembangan kegiatan ekonomi pesisir yang produktif dan ramah lingkungan, seperti perikanan berbasis ekosistem, budidaya

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		berkelanjutan, ekowisata bahari, serta industri pengolahan hasil laut yang melibatkan masyarakat pesisir termasuk nelayan kecil, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok rentan. • Penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. • Pengembangan ekonomi sirkuler. • Akselerasi industri SDA berkelanjutan. • Optimalisasi kawasan pesisir dan kepulauan. • Pengembangan energi baru dan terbarukan berbasis bioenergi. • Swasembada energi serta penguatan konektivitas dan transisi energi berbasis energi baru terbarukan.
	Penguatan daya saing pariwisata berbasis potensi daerah.	• Pengembangan *ecotourism* destinasi wisata mangrove, wisata kawasan pesisir dan perairan, dan *Heart of Borneo*. • Pengembangan daerah tujuan wisata dan kawasan strategis pariwisata provinsi. • Integrasi kawasan strategis pariwisata provinsi ke dalam kawasan strategis pariwisata nasional. • Pengembangan destinasi, promosi dan pemasaran dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif.
	Peningkatan iklim investasi dan lapangan pekerjaan.	• Mendorong tata kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) secara kolaboratif dan berbasis manajemen risiko. • Peningkatan iklim investasi berbasis dukungan kebijakan, infrastruktur berkualitas dan stabilitas wilayah. • Peningkatan iklim investasi padat karya dan penerapan standar berkelanjutan. • Peningkatan kualitas pelayanan perizinan. • Dukungan peningkatan kompetensi angkatan kerja berbasis potensi daerah dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. • Advokasi dan peningkatan kompetensi kerja penyandang disabilitas. • Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan. • Peningkatan sistem pengawasan ketenagakerjaan dan pengembangan hubungan industrial yang berkualitas. • Dukungan peningkatan dan daya saing wirausaha muda melalui fasilitasi akses permodalan, pengembangan produk, dan pemasaran.
Misi 3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan	• Akselerasi reformasi birokrasi general dan tematik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. • Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja. • Peningkatan kualitas manajemen data pembangunan dan statistik sektoral. • Peningkatan penganggaran berbasis kinerja dan kualitas belanja daerah.

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		• Peningkatan kapasitas PAD berbasis optimalisasi pajak dan retribusi daerah. • Peningkatan kapasitas dan kontribusi BUMD dalam pelayanan publik dan peningkatan pendapatan daerah. • Pengembangan Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta *Public Private Partnership* sebagai bagian pembiayaan pembangunan inovatif. • Peningkatan kualitas manajemen aset dan optimalisasi aset daerah untuk peningkatan PAD. • Peningkatan profesionalitas ASN berbasis sistem merit. • Peningkatan kualitas tata kelola arsip secara baku.
	Peningkatan inovasi dan digitalisasi yang mendorong kualitas pelayanan publik	• Pengembangan sistem pemerintahan digital yang terintegrasi dan inklusif. • Peningkatan ketercukupan infrastruktur digital. • Penguatan layanan publik yang mudah dijangkau dan berbasis TIK. • Penerapan standar pelayanan, SOP dan proses bisnis pelayanan publik yang efektif dan efisien. • Pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah secara kolaboratif yang mendukung akselerasi pembangunan daerah.
	Penguatan sistem pengendalian intern dan integritas	• Transformasi APIP sebagai GRC (*Governance, Risk and Compliance*) dan *quality assurance* dalam mendukung pembangunan daerah. • Penguatan manajemen risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. • Pengembangan zona integritas. • Peningkatan ketangguhan sistem pencegahan korupsi.
	Peningkatan kualitas kebijakan yang partisipatif dan transparan untuk akselerasi pembangunan daerah.	• Perumusan kebijakan berbasis riset dan bukti. • Peningkatan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembangunan dan perumusan kebijakan. • Peningkatan transparansi pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan laporan kinerja pembangunan. • Peningkatan kualitas tata kelola perbatasan negara secara kolaboratif antara pemerintah kabupaten, provinsi dan nasional dengan mengedepankan pendekatan *soft border*. • Dukungan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) untuk akselerasi pembangunan daerah dan pelayanan publik. • Peningkatan kualitas kebijakan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam pembinaan pemerintah kabupaten/kota. • Peningkatan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta pemerintah provinsi dengan pusat dan berbagai pemangku kepentingan pembangunan.
Misi 4 Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas	Penguatan stabilitas wilayah dan perlindungan hukum	• Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas • Penyelesaian permasalahan *Outstanding Boundary Problems* (OBP) di kawasan perbatasan, antara lain perdagangan narkotika dan manusia.

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
Daerah sebagai Beranda Depan NKRI		• Penguatan ketangguhan diplomasi lintas batas yang kolaboratif. • Perlindungan dan bantuan hukum bagi Masyarakat.
	Penguatan stabilitas ekonomi	• Pengendalian inflasi secara kolaboratif. • Peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk mendukung stabilitas pembangunan. • Penguatan pembiayaan pembangunan yang kreatif dan inovatif, antara lain melalui KPBU, CSR, dan skema pembiayaan lainnya.
Misi 5 Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Pemajuan kebudayaan dan menjaga harmoni sosial	• Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat. • Penyelenggaraan festival budaya sebagai sarana pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah. • Pemajuan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah dan pelestarian cagar budaya. • Peningkatan forum harmoni dan kolaborasi antar suku dan agama. • Peningkatan forum harmoni dan kolaborasi antar organisasi masyarakat. • Peningkatan peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat. • Deteksi dini potensi konflik, serta pencegahan dan penanganan konflik secara kolaboratif. • Pengembangan karakter masyarakat berbasis nilai Pancasila, Agama dan Budaya, termasuk melalui dukungan pengembangan sarana dan prasarana, antara lain melalui pembangunan *Islamic Center*.
	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan dari kekerasan, ketahanan keluarga dan pemenuhan hak anak.	• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan • Dukungan peningkatan akses pelayanan perlindungan perempuan. • Peningkatan kebijakan pengarusutamaan gender di semua sektor dan peningkatan anggaran responsif gender. • Dukungan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan sosial bagi perempuan rentan/miskin ekstrem. • Pemenuhan hak anak, termasuk pembangunan fasilitas publik yang ramah anak. • Peningkatan ketahanan keluarga dan pencegahan pernikahan anak. • Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan • Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Penguatan tata kelola dan pelembagaan Pengarusutamaan Gender dalam proses pembangunan
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	• Peningkatan kualitas lingkungan hidup, melalui pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berimbang. • Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. • Dukungan dan fasilitasi rehabilitasi hutan (termasuk reboisasi hutan) dan pengendalian

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi. • Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan (termasuk lahan gambut) dan mangrove (termasuk bakau). • Mempertahankan luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (*home range*) dan konektivitas spesies yang dilindungi. • Penataan aset reforma agraria, melalui penguatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan. • Dukungan reformasi pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir. • Penguatan implementasi skema Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE)/Transfer Fiskal Ekologis (TFE) untuk mendukung pembangunan rendah karbon.
	Penguatan mitigasi bencana dan perubahan iklim	• Penguatan mitigasi bencana struktural dan non struktural. • Penguatan respon atas bencana lintas batas negara. • Penguatan adaptasi perubahan iklim bagi sektor dan masyarakat yang terdampak. • Pengembangan ekonomi rendah emisi dan berkelanjutan.
Misi 6 Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan	Membangun kawasan perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan yang sejahtera	• Penuntasan rencana umum dan rencana rinci tata ruang, termasuk kewenangan tata ruang laut serta penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang. • Kolaborasi pemenuhan layanan dasar pada kawasan pedalaman, perbatasan dan kepulauan. • Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung perekonomian yang berkualitas di kawasan perbatasan, pedalaman, serta pesisir dan kepulauan. • Pengembangan infrastruktur yang inklusif, terutama terhadap masyarakat rentan, termasuk penyandang disabilitas. • Peningkatan infrastruktur telekomunikasi dan digital. • Pengembangan desa dan kawasan pedesaan di wilayah pedalaman dan perbatasan negara. • Pemberdayaan masyarakat perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan yang inklusif • Memperkuat kerjasama antar daerah untuk peningkatan kelancaran rantai pasok. • Optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan pengembangan potensi ekonomi di sekitarnya. • Pengembangan PLBN sebagai kawasan pertumbuhan baru. • Fasilitasi pembentukan DOB untuk akselerasi pembangunan kawasan perbatasan. • Menyusun regulasi daerah khusus untuk pembangunan kawasan perbatasan dan pesisir. • Mengalokasikan pembiayaan pembangunan secara berimbang untuk pembangunan kawasan perbatasan dan pesisir. • Dukungan pembangunan jaringan distribusi dan listrik pedesaan, dengan *output* pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga yang

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T.
Misi 7 Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Pengembangan infrastrukur yang berkelanjutan	• Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman • Penanganan permukiman kumuh secara komprehensif dan inklusif. • Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif. • Pengembangan sistem persampahan berbasis masyarakat melalui fasilitasi pengelolaan sampah berbasis 3R dan Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). • Dukungan peningkatan kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan, dengan *output* pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Nunukan, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG). • Dukungan pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk.
	Akselerasi konektivitas inter dan antar wilayah	• Dorongan dan fasilitasi peningkatan konektivitas wilayah. • Pengembangan transportasi multi moda untuk mendukung pengembangan ekonomi superhub IKN. • Dukungan dan fasilitasi pembangunan dan pengembangan bandara yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah • Fasilitasi pengembangan jalan Trans Kalimantan • Pembangunan serta peningkatan kualitas jalan dan jembatan. • Peningkatan kualitas layanan perhubungan yang inklusif. • Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi. • Pengembangan transportasi perkotaan yang andal, sesuai, dan modern. • Dukungan penguatan infrastruktur konektivitas penunjang logistik, dengan *output*: pengembangan Jalan Koridor Logistik–Sekatak Buji–Malinau, Jalan Akses Simpul Transportasi Lingkar Pulau Sebatik, serta Pengembangan Bandar Udara Long Apung Tahap III. • Penanganan konektivitas jalan/jembatan non lintas utama, dengan *output*: pengembangan jalan koridor logistik serta pembangunan jembatan koridor logistik (*backbone*).
Misi 8 Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas	Penguatan kesinambungan pembangunan	• Memperkuat sinkronisasi dan integrasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan. • Memperkuat sistem pengawasan untuk menjaga kesinambungan pembangunan. • Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi sebagai bahan penyusunan perencanaan periode pembangunan jangka menengah berikutnya. • Memperkuat penerapan manajemen risiko pembangunan daerah melalui identifikasi dan pengelolaan risiko.

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		• Optimalisasi potensi pembiayaan pembangunan alternatif dan inovatif, antara lain KPBU, *Public Private Partnership* dan CSR. • Penguatan peran GWPP untuk kesinambungan pembangunan kabupaten/kota dan provinsi, serta keselarasannya dengan nasional.

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

Arah pembangunan wilayah memiliki peran penting untuk memandu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Strategi pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Utara dilihat dari arahan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang selanjutnya diselaraskan dalam arah pembangunan kewilayahan di kabupaten/kota. Arah kebijakan Provinsi Kalimantan Utara yang terdapat di dalam RPJMN dimuat pada gambar di bawah.

Gambar 4.7

Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029



Sumber: Lampiran IV RPJMN Tahun 2025-2029

Highlight indikasi intervensi pada lokasi prioritas untuk Provinsi Kalimantan Utara yang terdapat di Rancangan RKP Tahun 2027 dimuat pada tabel di bawah. Sementara arah kebijakan pengembangan wilayah berdasarkan kabupaten/kota, dimuat pada Bab 5 RKPD.

Tabel 4.9

Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan Rancangan RKP Tahun 2027

KODE	RKP 2027	
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI
A1	Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas • Kab. Nunukan • Kab. Malinau • Kab. Tana Tidung	• Pembangunan Pos Lintas Batas Negara dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan Terpadu Long Midang, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan
		• Jalan dan Jembatan Koridor Perbatasan Malinau - Semamu-Long Midang, Provinsi Kalimantan Utara*
B1	Kota Baru Tanjung Selor • Kab. Bulungan	Sekolah Garuda Baru, Sekolah Garuda Transformasi
Fokus Pembangunan Kewilayahan Prioritas Lainnya	Provinsi Kalimantan Utara	Program 3 Juta Rumah: 1 Juta Rumah Baru & 2 Juta Renovasi Rumah
	Provinsi Kalimantan Utara	Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional
	Provinsi Kalimantan Utara	• Elektrifikasi Desa
		• Eksplorasi Blok Migas Baru (Bengara II dan Maratua II)
		• Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air Sungai Mentarang di Kalimantan Utara
	Provinsi Kalimantan Utara	Kawasan Industri Tanah Kuning

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027, Kementerian PPN/Bappenas

BAB 5
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1. Sasaran Indikator Makro Kabupaten/Kota

Capaian kinerja kabupaten/kota memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pencapaian kinerja Provinsi Kalimantan Utara, karena indikator kinerja provinsi pada dasarnya merupakan agregasi dari kinerja pembangunan di seluruh kabupaten/kota. Kabupaten/kota dengan capaian indikator yang tingg, seperti peningkatan IPM, penurunan kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta ketimpangan pendapatan yang rendah, berperan sebagai penggerak utama peningkatan kinerja provinsi. Sebaliknya, kabupaten/kota yang masih tertinggal pada indikator-indikator strategis menjadi faktor penahan yang dapat memperlambat pencapaian target provinsi secara keseluruhan. Dengan demikian, kesenjangan kinerja antarwilayah secara langsung memengaruhi kecepatan dan kualitas pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah provinsi memiliki peran strategis dalam mendorong harmonisasi kebijakan, pemberian dukungan afirmatif bagi kabupaten/kota dengan capaian rendah, serta penguatan koordinasi lintas wilayah. Melalui peningkatan kinerja kabupaten/kota secara merata dan berkelanjutan, kinerja pembangunan Provinsi Kalimantan Utara akan terdorong secara signifikan, sehingga target pembangunan daerah dapat dicapai secara lebih efektif, inklusif, dan berkeadilan.

Sasaran indikator makro kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utatra Tahun 2027 ditetapkan dengan memertimbangkan capaian tahun-tahun sebelumnya, kondisi terkini, dan target di RPJMD masing-masing daerah. Target 6 (enam) indikator makro tahun 2027 masing-masing kabupaten/kota disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.1.
Sasaran Indikator Makro Kabupaten/Kota
pada RKPD Tahun 2027

No.	Uraian	Realisasi 2025	Target 2027
	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (%)		
1.1	Kabupaten Malinau	3,56	3,58
1.2	Kabupaten Bulungan	5,40	5,80
1.3	Kabupaten Tana Tidung	3,73	4,47
1.4	Kabupaten Nunukan	3,98	5,74
1.5	Kota Tarakan	5,02	6,29
	Kalimantan Utara	**4,56**	**5,6**
	PDRB PER KAPITA (Juta Rupiah)		
2.1	Kabupaten Malinau	215,362	236,57
2.2	Kabupaten Bulungan	169,985	181,54
2.3	Kabupaten Tana Tidung	338,606	342,81
2.4	Kabupaten Nunukan	199,721	224,6
2.5	Kota Tarakan	233,098	252,04
	Kalimantan Utara	**208,210**	**236,85**
	KONTRIBUSI PDRB KABUPATEN/KOTA (%)		
3.1	Kabupaten Malinau	11,87	11,87
3.2	Kabupaten Bulungan	17,39	17,39
3.3	Kabupaten Tana Tidung	6,15	6,15
3.4	Kabupaten Nunukan	26,92	26,92
3.5	Kota Tarakan	37,68	37,68
	Kalimantan Utara		
	TINGKAT KEMISKINAN (%)*		
4.1	Kabupaten Malinau	5,56	5,42
4.2	Kabupaten Bulungan	7,26	7,04
4.3	Kabupaten Tana Tidung	4,56	3,79
4.4	Kabupaten Nunukan	5,27	5,15
4.5	Kota Tarakan	5,03	4,79
	Kalimantan Utara	**5,54**	**4,20**
	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)		
5.1	Kabupaten Malinau	3,42	3,01
5.2	Kabupaten Bulungan	4,14	4,10
5.3	Kabupaten Tana Tidung	3,68	3,13
5.4	Kabupaten Nunukan	2,61	2,39
5.5	Kota Tarakan	5,06	4,47
	Kalimantan Utara	**3,85**	**3,72**
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)		
6.1	Kabupaten Malinau	75,21	75,64
6.2	Kabupaten Bulungan	74,53	75,60
6.3	Kabupaten Tana Tidung	71,86	71,96
6.4	Kabupaten Nunukan	69,87	71,35
6.5	Kota Tarakan	78,62	79,41
	Kalimantan Utara	**74,04**	**74,78**
	INDEKS GINI		
7.1	Kabupaten Malinau	0,249	0,242
7.2	Kabupaten Bulungan	0,275	0,260
7.3	Kabupaten Tana Tidung	0,275	0,273

No.	Uraian	Realisasi 2025	Target 2027
7.4	Kabupaten Nunukan	0,257	0,255
7.5	Kota Tarakan	0,238	0,233
	Kalimantan Utara	**0,251**	**0,249**
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)			
8.1	Kabupaten Malinau	87,24	87,76
8.2	Kabupaten Bulungan	86,23	86,43
8.3	Kabupaten Tana Tidung	78,14	78,89
8.4	Kabupaten Nunukan	86,52	86,69
8.5	Kota Tarakan	78,70	78,90
	Kalimantan Utara	**85,99**	**86,39**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara dan hasil proyeksi, 2026
Keterangan: * Tingkat Kemiskinan menggunakan data Maret

Penjelasan capaian dan target indikator makro kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara ditargetkan meningkat dari 4,56 persen pada tahun 2025 menjadi 5,6 persen pada tahun 2027, yang menunjukkan optimisme terhadap penguatan aktivitas ekonomi daerah dalam dua tahun mendatang. Peningkatan ini mencerminkan arah kebijakan pembangunan yang berfokus pada percepatan investasi, pengembangan kawasan industri dan kawasan strategis, hilirisasi komoditas unggulan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Di tingkat kabupaten/kota, Kota Tarakan diproyeksikan tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi dengan target 6,29 persen, diikuti Kabupaten Bulungan sebesar 5,80 persen dan Kabupaten Nunukan sebesar 5,74 persen. Ketiga wilayah tersebut diperkirakan memperoleh manfaat dari berkembangnya sektor perdagangan, jasa, industri, dan aktivitas ekonomi kawasan perbatasan. Sementara itu, Kabupaten Malinau memiliki target pertumbuhan paling rendah sebesar 3,58 persen, sedangkan Kabupaten Tana Tidung ditargetkan meningkat menjadi 4,47 persen, yang menunjukkan adanya peluang percepatan pertumbuhan meskipun masih menghadapi keterbatasan skala ekonomi.

Perbedaan target pertumbuhan antarwilayah menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kalimantan Utara masih berkembang secara tidak

merata. Oleh karena itu, penguatan investasi di wilayah yang pertumbuhannya relatif rendah, peningkatan nilai tambah komoditas lokal, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting untuk memperkecil kesenjangan pembangunan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2. PDRB Per Kapita

Nilai PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Utara ditargetkan meningkat dari Rp208,210 juta pada tahun 2025 menjadi Rp236,85 juta pada tahun 2027, yang menunjukkan adanya peningkatan produktivitas ekonomi dan kapasitas penciptaan nilai tambah di tingkat daerah. Target tersebut mengindikasikan optimisme terhadap berkembangnya sektor-sektor produktif yang mampu meningkatkan pendapatan regional secara keseluruhan.

Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Tana Tidung tetap memiliki PDRB per kapita tertinggi dengan target Rp342,81 juta, diikuti Kota Tarakan sebesar Rp252,04 juta dan Kabupaten Malinau sebesar Rp236,57 juta. Sebaliknya, Kabupaten Bulungan masih memiliki PDRB per kapita terendah sebesar Rp181,54 juta, sedangkan Kabupaten Nunukan ditargetkan mencapai Rp224,60 juta. Variasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan produktivitas ekonomi dan struktur lapangan usaha antarwilayah.

Meskipun PDRB per kapita di Kalimantan Utara relatif tinggi dibanding banyak daerah lain, indikator ini belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas ekonomi perlu diiringi dengan pemerataan kesempatan berusaha, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan akses masyarakat terhadap aktivitas ekonomi agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara lebih luas.

3. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota

Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Utara masih didominasi oleh Kota Tarakan yang memberikan kontribusi 37,68 persen terhadap total PDRB provinsi, diikuti Kabupaten Nunukan sebesar 26,92 persen dan Kabupaten Bulungan sebesar 17,39 persen. Sementara itu, kontribusi Kabupaten Malinau sebesar 11,87 persen dan Kabupaten Tana Tidung sebesar 6,15 persen menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu.

Target tahun 2027 menunjukkan bahwa komposisi kontribusi PDRB kabupaten/kota tidak mengalami perubahan dibandingkan realisasi tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek belum terjadi pergeseran struktur ekonomi antarwilayah yang signifikan, sehingga pusat pertumbuhan ekonomi masih berada pada wilayah yang memiliki basis perdagangan, jasa, dan aktivitas ekonomi yang lebih maju.

4. Tingkat Kemiskinan

Provinsi Kalimantan Utara menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dari 5,54 persen pada tahun 2025 menjadi 4,20 persen pada tahun 2027, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang lebih inklusif dan pemerataan hasil pembangunan. Penurunan tersebut diharapkan didukung oleh peningkatan kesempatan kerja, penguatan ekonomi masyarakat, dan optimalisasi program perlindungan sosial.

Pada tahun 2025, Kabupaten Bulungan memiliki tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 7,26 persen, diikuti Kabupaten Malinau sebesar 5,56 persen dan Kabupaten Nunukan sebesar 5,27 persen. Sebaliknya, Kabupaten Tana Tidung memiliki tingkat kemiskinan terendah sebesar 4,56 persen, disusul Kota Tarakan sebesar 5,03 persen. Seluruh kabupaten/kota menargetkan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2027, dengan penurunan paling besar terjadi di Kabupaten Tana Tidung menjadi 3,79 persen.

Perbedaan tingkat kemiskinan antarwilayah menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara

merata. Oleh karena itu, strategi pengurangan kemiskinan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas masyarakat, pengembangan UMKM, pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan perlindungan sosial agar penurunan kemiskinan berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Utara ditargetkan menurun dari 3,85 persen menjadi 3,72 persen pada tahun 2027. Target tersebut menunjukkan bahwa kondisi pasar kerja diperkirakan semakin membaik seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor produktif.

Pada tahun 2025, Kabupaten Nunukan memiliki TPT terendah sebesar 2,61 persen, sedangkan Kota Tarakan mencatat TPT tertinggi sebesar 5,06 persen. Seluruh kabupaten/kota menargetkan penurunan tingkat pengangguran pada tahun 2027, dengan Nunukan tetap menjadi daerah dengan tingkat pengangguran terendah (2,39 persen) dan Tarakan turun menjadi 4,47 persen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya variasi kemampuan daerah dalam menyerap angkatan kerja sesuai karakteristik ekonomi masing-masing wilayah.

Penurunan TPT memerlukan sinergi antara peningkatan investasi, pengembangan sektor unggulan daerah, penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja yang lebih merata di seluruh wilayah Kalimantan Utara.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai IPM Provinsi Kalimantan Utara ditargetkan meningkat dari 74,04 pada tahun 2025 menjadi 74,78 pada tahun 2027. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui perbaikan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli masyarakat.

Kota Tarakan tetap menjadi daerah dengan IPM tertinggi, yaitu meningkat dari 78,62 menjadi 79,41, diikuti Kabupaten Malinau sebesar 75,64 dan Kabupaten Bulungan sebesar 75,60. Di sisi lain, Kabupaten Nunukan masih memiliki IPM terendah meskipun ditargetkan meningkat cukup signifikan menjadi 71,35, sedangkan Kabupaten Tana Tidung mencapai 71,96. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia antarwilayah masih bervariasi.

Peningkatan IPM memerlukan intervensi yang terintegrasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah yang masih memiliki capaian relatif rendah. Upaya tersebut penting untuk mengurangi kesenjangan pembangunan manusia sekaligus meningkatkan daya saing sumber daya manusia Kalimantan Utara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

7. Indeks Gini

Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara ditargetkan menurun dari 0,251 menjadi 0,249, yang menunjukkan arah pembangunan daerah semakin menekankan pada pemerataan distribusi pendapatan dan pengurangan kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat.

Pada tahun 2025, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung memiliki tingkat ketimpangan tertinggi dengan nilai 0,275, sedangkan Kota Tarakan memiliki ketimpangan terendah sebesar 0,238. Seluruh kabupaten/kota menargetkan penurunan Indeks Gini pada tahun 2027, dengan penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Bulungan menjadi 0,260, sementara Kota Tarakan ditargetkan tetap menjadi daerah dengan ketimpangan terendah (0,233).

Meskipun tingkat ketimpangan di Kalimantan Utara masih tergolong rendah, upaya pemerataan perlu terus diperkuat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja, pendidikan, pelayanan dasar, dan peluang usaha produktif agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh wilayah.

8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara ditargetkan meningkat dari 85,99 pada tahun 2025 menjadi 86,39 pada tahun 2027, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan daerah. Nilai tersebut juga mencerminkan kualitas lingkungan yang relatif sangat baik.

Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Malinau memiliki IKLH tertinggi sebesar 87,24 dan ditargetkan meningkat menjadi 87,76, diikuti Kabupaten Nunukan sebesar 86,69 dan Kabupaten Bulungan sebesar 86,43. Sementara itu, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan memiliki nilai IKLH relatif lebih rendah, masing-masing ditargetkan menjadi 78,89 dan 78,90, meskipun keduanya tetap menunjukkan tren peningkatan.

Peningkatan IKLH menunjukkan bahwa pembangunan Kalimantan Utara diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pengendalian pencemaran, perlindungan kawasan hutan dan pesisir, rehabilitasi lahan, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan menjadi faktor penting agar kualitas lingkungan tetap terjaga sekaligus mendukung pembangunan ekonomi hijau di masa mendatang.

5.2. Strategi Pembangunan Kewilayahan

Strategi pembangunan kewilayahan di Provinsi Kalimantan Utara dirumuskan berbasis wilayah administrasi kabupaten/kota. Strategi pembangunan ini dirumuskan dalam rangka membangun kolaborasi dan sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota, serta untuk merespon isu strategis, permasalahan dan mengoptimalkan potensi setiap daerah. Strategi pembangunan kewilayahan setiap kabupaten/kota dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 5.2.

Strategi Pembangunan Kewilayahan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota	Strategi Pembangunan
Kabupaten Nunukan	1. Peningkatan konektivitas kawasan perbatasan 2. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur perhubungan bandara dan pelabuhan 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pemukiman. 4. Pembangunan fasilitas ketenagalistrikan. 5. Dukungan optimalisasi PLBN dan pengembangan pusat pertumbuhan di kawasan sekitarnya. 6. Akselerasi peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. 7. Fasilitasi pengembangan ruang pertahanan dan keamanan. 8. Penguatan dan konsistensi kerjasama pengelolaan kawasan perbatasan dengan pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri. 9. Pengembangan kawasan pariwisata berbasis ekowisata dan budaya. 10. Pengembangan kawasan pedesaan dan peningkatan kemandirian desa. 11. Pelestarian fungsi lingkungan kawasan mangrove. 12. Pengembangan kawasan kampung nelayan. 13. Pengembangan kawasan pengolahan hasil perikanan dan kelautan. 14. Optimalisasi potensi ekonomi perairan. 15. Optimalisasi pemanfaatan poros maritim ALKI II sebagai jalur perdagangan internasional. 16. Pengembangan Kawasan Sentra Rumput Laut dan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan PKSN Nunukan 17. Pengelolaan wilayah *Heart of Borneo* 18. Fasilitasi pembentukan DOB Kabupaten Krayan, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), Kota Sebatik 19. Perlindungan ekosistem Kawasan Hidrologi Gambut
Kabupaten Malinau	1. Peningkatan konektivitas di kawasan perbatasan. 2. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman. 3. Pembangunan fasilitas ketenagalistrikan. 4. Akselerasi peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan sesuai standar. 5. Optimalisasi kawasan PLBN dengan pengembangan fasilitas ekonomi. 6. Pembangunan permukiman terintegrasi yang adaptif terhadap budaya. 7. Pelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai 8. Fasilitasi pembentukan DOB Kabupaten Apau Kayan 9. Pengelolaan wilayah *Heart of Borneo* 10. Perlindungan sosial dampak PSN 11. Perlindungan ekosistem Kawasan Hidrologi Gambut
Kabupaten Tana Tidung	1. Akselerasi kualitas pelayanan dasar 2. Pengembangan pusat kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan tambak. 3. Pengembangan Pelabuhan logistik

Kabupaten/Kota	Strategi Pembangunan
	4. Pelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai. 5. Pengembangan kawasan kampung nelayan. 6. Penataan permukiman yang layak huni 7. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan afirmasi (Kecamatan Tana Lia) 8. Pengelolaan Kawasan HGU secara berkelanjutan 9. Perlindungan ekosistem Kawasan Hidrologi Gambut
Kabupaten Bulungan	1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar 2. Pembangunan pelabuhan internasional sebagai hub perekonomian 3. Pembangunan pelabuhan logistik dan infrastruktur pendukung 4. Pengembangan kawasan pengolahan hasil perikanan dan kelautan. 5. Pelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai 6. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa. 7. Pengembangan kawasan industri hijau Indonesia berbasis tata Kelola pemerintahan setempat 8. Pengembangan pusat kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan tambak. 9. Pengembangan kawasan perkotaan 10. Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman. 11. Penataan kawasan permukiman yang layak huni. 12. Pengembangan kawasan transmigrasi. 13. Peningkatan konektivitas wilayah. 14. Pengembangan kawasan *green economy* berbasis tata kelola pemerintahan setempat 15. Pengembangan kawasan perdesaan. 16. Fasilitasi pembentukan DOB Kota Tanjung Selor 17. Peningkatan tata kelola PSN secara kolaboratif berbasis manajemen risiko 18. Kebijakan perizinan usaha berbasis risiko 19. Perlindungan sosial dampak PSN
Kota Tarakan	1. Akselerasi kualitas pelayanan dasar 2. Dukungan dan fasilitasi pengembangan pelabuhan internasional sebagai hub perekonomian. 3. Pengembangan kawasan pengolahan hasil perikanan dan kelautan. 4. Pengembangan kawasan industri hilirisasi SDA 5. Pelestarian fungsi lingkungan kawasan mangrove 6. Pengembangan kawasan kampung nelayan 7. Penataan permukiman layak huni 8. Optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi perairan 9. Optimalisasi pemanfaatan poros maritim ALKI II sebagai jalur perdagangan internasional 10. Dukungan penanggulangan bencana banjir 11. Dukungan pengelolaan persampahan 12. Pelestarian cagar budaya 13. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan kabupaten/kota di Kalimantan Utara secara umum menunjukkan pendekatan yang terintegrasi antara penguatan konektivitas wilayah, peningkatan pelayanan dasar, dan

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di wilayah perbatasan dan pesisir. Kabupaten Nunukan dan Malinau diarahkan sebagai kawasan strategis perbatasan dengan fokus pada peningkatan konektivitas, optimalisasi peran PLBN, serta penguatan kerja sama lintas wilayah, baik nasional maupun internasional. Sementara itu, Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan diposisikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pelabuhan internasional, kawasan industri, serta perdagangan dan jasa, yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi regional.

Dalam konteks pengembangan ekonomi wilayah, kebijakan pembangunan juga diarahkan pada optimalisasi potensi sektor unggulan berbasis sumber daya lokal, seperti perikanan, kelautan, pertanian, dan perkebunan. Kabupaten Tana Tidung difokuskan pada pengembangan pusat kegiatan agribisnis dan logistik, sementara Nunukan dan Tarakan diarahkan pada pengembangan kawasan pengolahan hasil perikanan dan kelautan serta kampung nelayan. Selain itu, pemanfaatan posisi strategis jalur perdagangan internasional, seperti ALKI II, menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas ekonomi dan meningkatkan daya saing wilayah pesisir dan kepulauan.

Di sisi lain, arah kebijakan kewilayahan juga menunjukkan perhatian yang kuat terhadap pelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, termasuk perlindungan kawasan mangrove, daerah aliran sungai (DAS), serta ekosistem gambut. Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan secara eksplisit menempatkan pelestarian mangrove sebagai bagian dari strategi pembangunan wilayah pesisir, yang tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan ekologis tetapi juga sebagai penopang ekonomi berbasis pesisir. Selain itu, pengelolaan kawasan *Heart of Borneo* dan perlindungan kawasan hidrologi gambut di wilayah pedalaman menunjukkan komitmen menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.

Kebijakan pembangunan kewilayahan juga menekankan pentingnya pengembangan permukiman layak huni dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar, seperti air bersih, listrik, dan sanitasi, yang menjadi

prasyarat utama peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penataan kawasan perkotaan dan perdesaan dilakukan secara simultan untuk mengurangi kesenjangan wilayah, termasuk melalui pengembangan kawasan transmigrasi, kawasan afirmasi, dan pusat-pusat pertumbuhan baru. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan wilayah di Kalimantan Utara tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan pembangunan antarwilayah.

BAB 6
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menyajikan rencana kerja yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2027. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun sesuai kewenangan pemerintah daerah provinsi dengan memerhatikan sumber daya yang dimiliki serta permasalahan daerah dan isu strategis pembangunan.

6.1. Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2027 berpedoman pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan memerhatikan evaluasi hasil RKPD sampai tahun berjalan. Nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dimuat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah dilengkapi dengan indikator, target, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran, dukungan terhadap prioritas daerah dan prioritas nasional, dan prakiraan maju tahun 2028. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD tahun 2027 secara rinci dimuat pada Lampiran sebagaimana diinput dalam SIPD.

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai dengan pagu anggaran untuk mencapai target kinerja. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Alokasi pagu

anggaran yang bersifat indikatif tahun 2027 berdasarkan urusan pemerintahan daerah disajikan pada tabel di bawah. Sementara itu, tabel yang memuat seluruh rincian rencana kerja tahun 2027 dimuat pada Lampiran RKPD.

Tabel 6.1.

Rancangan Pagu Anggaran Berdasarkan Perangkat Daerah

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	PAGU (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	501.375.067.310,65
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas Tarakan	999.999.961,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas Nunukan	999.998.808,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas KTT-Malinau	999.999.736,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UPT Taman Budaya	999.999.066,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	1.000.000.000,00
7	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	142.020.314.445,50
8	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK	221.209.624.068,00
9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	137.989.869.381,16
10	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja	19.352.423.114,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.185.103.371,00
12	Dinas Sosial	Dinas Sosial	13.110.978.645,00
13	Dinas Sosial	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu	3.100.000.000,00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.396.917.835,00
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.273.519.070,00
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	1.000.000.000,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	7.714.610.710,00

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	PAGU (Rp)
18	Dinas Lingkungan Hidup	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	600.000.000,00
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.367.901.382,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.086.930.692,00
21	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	24.602.712.647,00
22	Dinas Perhubungan	UPTD Pelabuhan Tengkayu I	2.596.693.224,00
23	Dinas Perhubungan	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	2.582.330.868,00
24	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	21.652.583.554,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	9.763.338.739,00
26	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	10.378.808.060,00
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.055.626.835,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	20.118.897.635,00
29	Dinas Kelautan dan Perikanan	UPTD Pelabuhan Tengkayu II	1.700.000.000,00
30	Dinas Kelautan dan Perikanan	UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau	249.999.806,00
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	249.999.595,00
32	Dinas Kelautan dan Perikanan	UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	150.000.000,00
33	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	8.183.848.044,00
34	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	54.300.953.155,20
35	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet	299.274.000,00
36	Dinas Kehutanan	Dinas Kehutanan	66.315.506.918,00
37	Dinas Kehutanan	UPT KPH Kabupaten Bulungan	10.075.999.834,00
38	Dinas Kehutanan	UPT KPH Kota Tarakan	10.999.999.944,00
39	Dinas Kehutanan	UPT KPH Kabupaten Nunukan	10.787.894.250,60
40	Dinas Kehutanan	UPT KPH Kabupaten Malinau	9.000.000.000,00
41	Dinas Kehutanan	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung	11.400.000.000,00
42	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.568.945.859,00
43	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	12.175.655.597,00
44	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	
45	Sekretariat Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.499.999.696,00

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	PAGU (Rp)
46	Sekretariat Daerah	Biro Hukum	2.500.000.000,00
47	Sekretariat Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat	22.924.893.922,00
48	Sekretariat Daerah	Biro Organisasi	1.999.994.872,00
49	Sekretariat Daerah	Biro Administrasi Pembangunan	1.499.999.471,00
50	Sekretariat Daerah	Biro Umum	109.588.151.890,00
51	Sekretariat Daerah	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.499.991.500,00
52	Sekretariat Daerah	Biro Administrasi Pimpinan	4.999.999.420,00
53	Sekretariat Daerah	Biro Perekonomian	1.698.847.000,00
54	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	96.007.493.626,00
55	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	18.413.925.066,00
56	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	54.555.913.233,00
57	Badan Pendapatan Daerah	UPT Bapenda Bulungan	3.000.000.000,00
58	Badan Pendapatan Daerah	UPT Bapenda Tarakan	3.000.000.000,00
59	Badan Pendapatan Daerah	UPT Bapenda Nunukan	3.000.000.000,00
60	Badan Pendapatan Daerah	UPT Bapenda Malinau	2.100.000.000,00
61	Badan Pendapatan Daerah	UPT Bapenda Tana Tidung	2.000.000.000,00
62	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	481.629.968.302,26
63	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	7.725.878.930,00
64	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.541.409.022,00
65	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.665.395.003,00
66	Badan Penghubung	Badan Penghubung	15.891.611.157,00
67	Inspektorat	Inspektorat	19.646.161.663,08
68	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.636.002.630,00
		JUMLAH	**2.294.017.962.563,45**

Sumber: hasik proyeksi, SIPD, 2026

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2027 ditetapkan antara lain untuk:

a. Mencapai tujuan dan sasaran serta prioritas daerah tahun 2027
b. Melaksanakan program unggulan kepala daerah
c. Menyelesaikan permasalahan pembangunan dan merespon isu strategis daerah

d. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
e. Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan untuk alokasi belanja yang telah diatur besaran dan penggunaannya (*earmark*).
f. Melaksanakan Program Strategis Nasional (ProSN)
g. Mendukung Prioritas Nasional (PN)

Salah satu prioritas dalam rencana kerja tahun 2027 adalah penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. Penerapan SPM dalam rencana pembangunan di Kalimantan Utara diperkuat dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Arah kebijakan SPM yang sesuai dengan Misi RPJMD, yaitu:

a. Misi 1 (Transformasi Sosial Inklusif & Berkeadilan); perluasan promotif–preventif, pengendalian penyakit menular, dan pemenuhan tenaga kesehatan, yang diterjemahkan menjadi paket intervensi SPM Kesehatan (UKM/UKP esensial, jejaring rujukan, pemenuhan Nakes).
b. Misi lain yang relevan dengan layanan dasar, diturunkan menjadi arah kebijakan SPM Pendidikan (pemerataan akses & mutu), Pekerjaan umum (air minum & sanitasi layak minimal), SPM sosial (perlindungan dasar kelompok rentan), dan SPM trantiblinmas (ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat), sesuai standar SPM.

Adapun rencana sub kegiatan tahun 2027 yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu masing-masing SPM, disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 6.2.

Penandanaan Sub Kegiatan untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
I.	**SPM BIDANG PENDIDIKAN**								
1	Angka Partisipasi Sekolah	1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0045 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20700	7.240.700.000,00
					1.01.02.1.01.0060 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	100.000.000
				1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0037 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	11300	3.832.770.000
					1.01.02.1.02.0053 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	34 Dokumen	320.000.000
				1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0038 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
					1.01.02.1.03.0044 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	740 Peserta Didik	652.550.000
					1.01.02.1.03.0059 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7 Dokumen	50.000.000
2	Literasi dan Numerasi	1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0049 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	500.000.000
					1.01.02.1.01.0050 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	5412 Orang	13.071.271.536
					1.01.02.1.01.0051 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	120 Orang	500.000.000

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
					1.01.02.1.01.0052 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	74 Satuan Pendidikan	350.000.000
					1.01.02.1.01.0075 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Orang	50.000.000
					1.01.02.1.01.0078 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	75 Satuan Pendidikan	250.000.000
				1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0041 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	350 Peserta Didik	498.000.000
					1.01.02.1.02.0042 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	3240 Orang	8.278.697.952

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
					1.01.02.1.02.0043 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	100.000.000
					1.01.02.1.02.0045 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	34 Satuan Pendidikan	250.000.000,00
					1.01.02.1.02.0072 - Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	34 Satuan Pendidikan	100.000.000,00
				1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0048 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	90 Peserta Didik	750000000
					1.01.02.1.03.0049 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	1200 Orang	2.115.909.960,00

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
					1.01.02.1.03.0050 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	15 Orang	100.000.000
					1.01.02.1.03.0051 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	7 Satuan Pendidikan	100.000.000,00
					1.01.02.1.03.0071 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	7 Satuan Pendidikan	100.000.000,00
			1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.1.01 - Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1.01.04.1.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan	50.000.000

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
		1.01.2.22.0.00.02.0005 - UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0057 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	35 Orang	33.379.600
					1.01.02.1.01.0058 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital	92.369.500,00
					1.01.02.1.01.0059 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	35 Orang	33.379.600
				1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0051 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital	92.369.500,00
				1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0057 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital	92.894.500,00

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
			1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.1.01 - Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1.01.04.1.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Dokumen	50.000.000
3	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	1.01.2.22.0.00.02.0003 - Cabang Dinas KTT-Malinau	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0066 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	6.700.000
II.	**SPM BIDANG KESEHATAN**								
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1000 Orang	75.020.137

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	75.000.000
III.	**SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM**								
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.0014 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5 Kabupaten/Kota	222.706.135
					1.03.03.1.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	1 Unit	3.000.000.000
					1.03.03.1.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	2 Dokumen	2.000.000.000

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	100.000.000
					1.03.05.1.01.0022 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	5 Kabupaten /Kota	1.019.151.315
IV.	**SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT**								
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.	1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2 Dokumen	200.000.000

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	1 Dokumen	100.000.000
				1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	2 Unit Rumah	630.000.000
V.	**SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS**								
1	Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Provinsi	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Satuan Polisi Pamongpraja	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersedianya Pelayanan Dasar keapada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	5.000.000
					1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	30 Orang	30.000.000

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
					1.05.02.1.01.0029 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	15 Unit	130.000.000
					1.05.02.1.01.0030 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	30 Orang	75.000.000
				1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	20.683.400

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
VI.	**SPM BIDANG SOSIAL**								
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	20 Orang	20.000.000
					1.06.04.1.01.0021 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	5 Dokumen	25.000.000
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	300 Orang	44.204.360
					1.06.04.1.02.0015 - Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	45.000.000

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
					1.06.04.1.02.0017 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	5 Dokumen	82.966.959
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	1.06.0.00.0.00.01.0001 - UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0001 - Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	40 Orang	1.537.267.500
					1.06.04.1.03.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	40 Orang	152.348.600
					1.06.04.1.03.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	55 Orang	65.933.359
					1.06.04.1.03.0012 - Pemulasaraan	Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	7 Orang	12.040.110

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0002 - Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	2 Orang	8.000.000,00
					1.06.04.1.03.0017 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	15.000.000
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasa Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.06.04.1.04.0010 - Pemulangan ke Daerah Asal	Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	10 Orang	30.000.000
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	100 Orang	77.784.130

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
	korban bencana daerah provinsi				1.06.06.1.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	75 Orang	74.530.000

Sumber: SIPD, diolah, 2026

6.2. Dukungan Terhadap Perencanaan Pembangunan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun selain untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD serta menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, juga untuk mendukung target pembangunan nasional. Dalam rangka sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, maka penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung kebijakan nasional, antara lain Prioritas Nasional/PN (Asta Cita) dan Program Strategis Nasional.

Dukungan terhadap 8 PN telah dilakukan dengan penandaan (*tangging*) sub kegiatan RKPD tahun 2027 di SIPD. Tabel yang memuat hal tersebut dapat dilihat pada Lampiran. Selain itu, perangkat daerah terkait juga melakukan tagging terhadap Program Strategis Nasional. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Program Strategis Nasional menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan. Pelaksanaan Program Strategis Nasional diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah.

Program Strategis Nasional merupakan program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan program/proyek yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP yang mencakup Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Strategis Nasional yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 6.3.

Program Strategis Nasional (ProSN)

No.	Program Strategis Nasional	Proyek/Kegiatan
1	Pengentasan Kemiskinan	– Penanggulangan Kemiskinan
		– Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
		– Sekolah Rakyat
		– Pembangunan 3 Juta Rumah
2	Ketahanan Pangan	– Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)
		– Pendayagunaan Penyuluh Pertanian
		– Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
		– Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)
3	Kesehatan untuk semua	– Stunting
		– Pemeriksaan Kesehatan Gratis
		– Jaminan Kesehatan Nasional
		– Penuntasan TBC
4	Perluasan Akses Pendidikan	– Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Menengah
		– Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran
		– Makan Bergizi Gratis
5	Pertumbuhan Ekonomi	– Pengendalian Inflasi
		– Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		– Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
		– Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan)
		– Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025

Penyelarasan rencana pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat untuk tahun 2027 dibahas dalam forum rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang). Hasil pembahasan desk ProSN dan tematik pembangunan tahun 2027 antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara menyepakati beberapa sub kegiatan perangkat daerah yang akan mendukung kebijakan pemerintah pusat.

Dukungan terhadap ProSN dan tematik Pembangunan nasional dimuat pada Tabel 6.4 dan Tabel 6.5. Masing-masing tabel menyajikan penandanaan (*tagging*) sub kegiatan untuk ProSN dan tematik pembangunan lainnya. Namun terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak

dimuat dalam RKPD dan Renja PD tahun 2027 sebab tidak ada potensi SDA tersebut di Kalimantan Utara, atau tidak sesui dengan kondisi daerah. Alasan lain yang cukup mendasar dalam penyelarasan dengan kebijakan pemerintah pusat adalah adanya keterbatasan anggaran sebagaimana telah diproyeksikan di Bab III dokumen RKPD ini. Selain sub kegiatan yang menjadi arahan pemerintah pusat dalam Berita Acara Rakortekbang, terdapat sub kegiatan lain yang memiliki output sejenis, dimuat dalam RKPD dan Renja PD tahun 2027.

Selanjutnya, sebagai langkah konkret dalam mewujudkan 17 prioritas presiden dan 8 program hasil terbaik diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama (KPU). Kegiatan prioritas merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk pelaksanaan KPU, dimuat pada Tabel 6.6.

Tabel 6.4.

Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 tentang Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro-SN)

Provinsi Kalimantan Utara

No.	Kode	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
1	01	Pengentasan Kemiskinan	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	45 Orang	130.496.897,00	Dinas Sosial
					1.06.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	5 Kab/Kota	95.000.000,00	Dinas Sosial
					1.06.05.1.02.0012	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi	80 Orang	44.000.000,00	Dinas Sosial
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	200.000.000,00	Dinas Kehutanan
					3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	250.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
					3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	250.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
					3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	290.745.743,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
					3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	450.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG

No.	Kode	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
					3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit	450.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
			Sekolah Rakyat	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.052.020.008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	5 Kab/Kota	95.000.000,00	Dinas Sosial
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.062.010.001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	7 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Pembangunan 3 Juta Rumah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	2 Unit Rumah	630.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	02	Ketahanan Pangan	Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 KM	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
					1.03.02.1.02.0032	Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	9 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

No.	Kode	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
										dan Kawasan Permukiman
			Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Unit	105.219.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					3.27.07.1.01.0006	Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh pertanian swadaya dan/atau penyuluh pertanian swasta yang mendapatkan pembinaan	84 Orang	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					3.27.07.1.02.0004	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyuluh Pertanian (ASN, Swadaya dan Swasta) Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi pengawalan tugas, fungsi, dan peran penyuluh pertanian (ASN, Swadaya, dan Swasta) dalam pelaksanaan penyuluhan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi	1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/*Food Estate*)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	1 Unit	330.137.562,50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					2.09.02.1.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia	1 Unit	350.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	1.028.610.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Kode	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
			Pangan Akuatik	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	26639,62 Ha	125.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	17 Unit	125.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Kampung Nelayan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk Kapal Ukuran Diatas 5 GT - 30 GT dan Beroperasi sampai dengan 12 Mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
					3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	125.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
					3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	2 Unit	63.883.000,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu II
3	03	Kesehatan Untuk Semua	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	5 Dokumen	770.212.973,13	Dinas Kesehatan
					1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	69.300.000,00	Dinas Kesehatan

No.	Kode	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5 Kabupaten /Kota	222.706.135,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01.0028	Pembinaan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	1 Laporan	92.855.457,50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	6.434.500.000,00	Dinas Kesehatan
					1.02.02.1.02.0032	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan	134.020.133,67	Dinas Kesehatan
					1.02.02.1.02.0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1 Laporan	54.673.377,00	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	2 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Kependudukan dan

No.	Kode	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
				ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						Pencatatan Sipil
			Jaminan Kesehatan Nasional	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	6.434.500.000,00	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	5 Kab/Kota	95.000.000,00	Dinas Sosial
			Penuntasan Tuberkulosis (TBC)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0033	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tuberkulosis	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Kesehatan penyakit Tuberkulosis	5 Kabupaten /Kota	30.000.000,00	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	45 Orang	130.496.897,00	Dinas Sosial
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	2 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Kode	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
			Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit	6.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	47 Orang	9.840.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
			Makan Bergizi Gratis	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Orang	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	69.300.000,00	Dinas Kesehatan

No.	Kode	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.08.1.01.0056	Pemeliharaan berkala jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	1 KM	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.02.0008	Pelaksanaan Kebijakan dan Aksi Penyelamatan Pangan Provinsi	Jumlah Kebijakan dan aksi penyelamatan pangan Provinsi yang dilaksanakan	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	7 Kegiatan	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Kode	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
					3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	7 Kegiatan	42.000.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
4	04	Perluasan Akses Pendidikan	Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Sekolah Unggulan Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15 Dokumen	10.000.000,00	Cabang Dinas Tarakan
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7 Dokumen	20.000.000,00	Cabang Dinas KTT-Malinau
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan	34 Dokumen	320.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Kode	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
						di Bidang Pendidikan	Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	9 Dokumen	10.000.000,00	Cabang Dinas Tarakan
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	10.000.000,00	Cabang Dinas KTT-Malinau
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	10.000.000,00	Cabang Dinas KTT-Malinau
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Orang	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Kode	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
5	05	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					2.09.03.1.01.0015	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.1.01.003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	30 Unit Usaha	50.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
			Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
					2.11.03.1.01.0011	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokumen	70.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kode	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1 03 04 1.01 0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber: Berita Acara Rakortekbang Tahun 2026, SIPD, diolah

Tabel 6.5.

Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 tentang Dukungan terhadap Program Tematik Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara

No.	Tematik Pembangunan	Program	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
1	Pengarusutamaan Gender	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02.013	Advokasi dan Sosialisasi terkait Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	5 Lembaga	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20700 Peserta didik	7.240.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	5 Dokumen	770.212.973,13	Dinas Kesehatan
2	Perlindungan Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0016	Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	25 Orang	145.519.715,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0065	Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan,	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	32.000.000,00	Cabang Dinas KTT-Malinau

No.	Tematik Pembangunan	Program	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
				Kekerasan, dan Intoleransi				
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	5 Dokumen	770.212.973,13	Dinas Kesehatan
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	20 Orang	20.000.000,00	Dinas Sosial
			1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	300 Orang	44.204.360,00	Dinas Sosial
			1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	55 Orang	65.933.359,00	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	86.568.720,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
3	Masyarakat Adat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	213.052.010.001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			213.052.010.002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Dokumen	405.916.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Tematik Pembangunan	Program	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
				Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
4	Ekonomi Syariah	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	30 Orang	187.190.912,00	Dinas Sosial
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	225.380.000,00	Biro Perekonomian
5	Pembinaan Ideologi Pancasila	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	476.885.864,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Penanggulangan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Tematik Pembangunan	Program	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
			1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	1 Laporan	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	1 Orang	10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber: Berita Acara Rakortekbang Tahun 2026, SIPD, diolah

Tabel 6.6.
Dukungan Rencana Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027
Terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	URUSAN	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
Prioritas Nasional 1	1	Penguatan Pers dan Media Massa yang bertangung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0028	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	4 Dokumen	100.000.000,00
					2.16.02.1.01.0029	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	450000 Orang	3.575.329.154,00
Prioritas Nasional 2	2	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya	Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Dokumen	200.000.000,00
					2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	1 Laporan	150.000.000,00
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	1 Unit	330.137.562,50
					2.09.02.1.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia	1 Unit	350.000.000,00

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	URUSAN	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
	3	Pembangunan pangan akuatik (blue food)	Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	17 Unit	125.000.000,00
	4	Pembangunan pangan hewani	Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	20000 Ekor	2.679.340.000,00
	5	Pembangunan pangan lokal dan nabati	Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1.183.180.000,00
					3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	120 Ton	5.063.905.891,00
					3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	187.020.000,00
	6	Peningkatan penyediaan energi	Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (Kapasitas Terpasang, Investasi) di Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	165.086.500,00
					3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	40 unit	1.000.000.000,00

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	URUSAN	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
						Pemanfaatan Aneka EBT			
	7	Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energi	Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4 Laporan	121.890.800,00
					3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	100 Unit	260.800.000,00
	8	Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan	Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (Kapasitas Terpasang, Investasi) di Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	165.086.500,00
					3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	40 unit	1.000.000.000,00
	9	Konservasi sumberdaya air	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM SUMBER DAYA AIR	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0 KM	500.000.000,00
					1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	2 Lembaga	200.000.000,00

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	URUSAN	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
					1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	50.000.000,00
					1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	1 Dokumen	50.000.000,00
					1.03.02.1.01.0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	250.000.000,00
	10	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5 Kabupaten/Kota	222.706.135,00
					1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	1 Unit	3.000.000.000,00
					1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	2 Dokumen	2.000.000.000,17

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	URUSAN	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
	11	Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	100.000.000,00
					1.03.05.1.01.0022	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	5 Kabupaten/Kota	1.019.151.315,00
			Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit	6.000.000.000,00
	12	Pengelolaan susut dan sisa pangan	Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokumen	70.000.000,00
			Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.02.0008	Pelaksanaan kebijakan dan aksi penyelamatan pangan Provinsi	Jumlah Kebijakan dan aksi penyelamatan pangan Provinsi yang dilaksanakan	1 Dokumen	50.000.000,00

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	URUSAN	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
	13	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	3 Lokasi	105.000.000,00
	14	Peningkatan kualitas ekosistem gambut	Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	3 Lokasi	105.000.000,00
					2.11.03.1.01.0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	30.000.000,00
	15	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	600.000.000,00
					1.03.04.1.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan	5 Unit	3.863.130.477,00
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokumen	70.000.000,00

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	URUSAN	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
	16	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	600.000.000,00
					1.03.04.1.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan	5 Unit	3.863.130.477,00
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokumen	70.000.000,00
	17	Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut	Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	7 Kegiatan	200.000.000,00

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	URUSAN	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
Prioritas Nasional 3	18	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya	Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4 Laporan	121.890.800,00
					3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	100 Unit	260.800.000,00
	19	Pengembangan koperasi sektor produksi	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.1.01.003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	30 Unit Usaha	50.000.000,00
Prioritas Nasional 4	20	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	100.000.000,00
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15 Dokumen	10.000.000,00
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7 Dokumen	20.000.000,00
					1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	34 Dokumen	320.000.000,00

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	URUSAN	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
						di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	9 Dokumen	10.000.000,00
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	10.000.000,00
					1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7 Dokumen	50.000.000,00
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	10.000.000,00
					1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Orang	50.000.000,00
	21	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service	Pendidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan	50.000.000,00

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	URUSAN	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
		training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja							
	22	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	13.070.000,00
	23	Penurunan kematian ibu dan anak	Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	5 Dokumen	770.212.973,13
					1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	69.300.000,00
	24	Pencegahan dan penurunan stunting	Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	5 Dokumen	770.212.973,13
					1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	69.300.000,00
			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5 Kabupaten/Kota	222.706.135,00

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	URUSAN	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01.0028	Pembinaan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	1 Laporan	92.855.457,50
			Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Dokumen	200.000.000,00
	25	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	6.434.500.000,00
					1.02.02.1.02.0032	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan	134.020.133,67
					1.02.02.1.02.0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1 Laporan	54.673.377,00
	25	Penuntasan TBC	Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0033	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit Tuberkulosis	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Kesehatan penyakit Tuberkulosis	5 Kabupaten/Kota	30.000.000,00
	27	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	69.300.000,00

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	URUSAN	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
	28	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi	Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	69.300.000,00
	29	Eliminasi penyakit kusta & Schistosomiasis	Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0032	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan	134.020.133,67
	30	Investasi pelayanan kesehatan primer	Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit	6.000.000.000,00
	31	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit	6.000.000.000,00

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	URUSAN	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	47 Orang	9.840.000.000,00
	32	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	47 Orang	9.840.000.000,00
	33	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya	Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	20 Orang	97.000.000,00
					2.22.02.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi	3 Laporan	25.644.647,65
	3	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	13.070.000,00
	35	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga	Pemuda dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03.0012	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	65 Orang	750.000.000,00
Prioritas Nasional 5	36	Pengembangan hilirisasi Rumput Laut	Kelautan dan perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	2 Unit	150.000.000,00

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	URUSAN	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	50.000.000,00
					3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	7 Kegiatan	200.000.000,00
Prioritas Nasional 6	37	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subdisi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan	Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	45 Orang	130.496.897,00
					1.06.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	5 Kab/Kota	95.000.000,00

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	URUSAN	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
					1.06.05.1.02.0012	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi	80 Orang	44.000.000,00
	38	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.1.01.0008	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	10 Lokasi	2.560.670.000,00
					1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	10 Lokasi	2.165.000.000,00
	39	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa	Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	40 Unit Rumah	960.000.000,00
					1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2 Unit Rumah	450.000.000,00
Prioritas Nasional 7	40	Pencegahan tindak pidana korupsi	Pengawasan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	30 Laporan	666.000.000,00

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	URUSAN	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp)
	41	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	Kepegawaian	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4547 Dokumen	35.886.513,00
	42	Transformasi digital layanan publik prioritas	Sekretariat Daerah	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokumen	220.000.000,00
	43	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan	Keuangan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	1.300.000.000,00
	44	Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak	Keuangan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	1.600.000.000,00
Prioritas Nasional 8	45	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	476.885.864,00
	46	Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	Kebudayaan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	5 Objek	180.600.000,00

Sumber: hasil analisis, 2026

BAB 7
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak). Dalam mengukur pencapaian kinerja, maka diperlukan indikator kinerja yang terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.

Kinerja pembangunan secara umum dapat dilihat dari beberapa indikator makro. Sesuai kebijakan nasional yang dimuat dalam RKP, pembangunan tahun 2027 difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM melalui penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan serta peningkatan Indeks Modal Manusia. Untuk itu dilakukan keselarasan sasaran indikator makro nasional dan Provinsi Kalimantan Utara 2027 sebagaimana dimuat pada tabel berikut:

Tabel 7.1.

Keselarasan Sasaran Indikator Makro Nasional dengan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027

No.	Indikator	Target Nasional RKP 2027	Target Provinsi Sesuai RKP 2027*	Target RKPD Provinsi 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8–6,5	5,40-6,90	5,6
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0–6,5	3,70-4,70	4,20
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,30–4,87	3,72	3,72
4	Rasio Gini	0,362–0,367	0,244-0,250	0,249
5	Indeks Modal Manusia	0,575	0,566-0,580	0,57

Sumber: Rancangan RKP 2027 dan hasil proyeksi tim penyusun RKPD
Keterangan: * Rancangan Awal RKP Tahun 2027

Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. IKU pemerintah daerah menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD, sehingga perlu dicapai targetnya secara bertahap setiap tahun. Penentuan target indikator tahun 2027 mempertimbangkan capaian pembangunan tahun sebelumnya dan keselarasan dengan target nasional.

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET 2027
INDIKATOR TUJUAN				
1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,29	3,42
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,56	5,6
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	80,3	83,80
4	Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	49,83	53,25
5	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	63,82*	66,66
INDIKATOR SASARAN				
1	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	75,05*	77,14
2	Indeks Ekonomi Biru	Angka	33,47*	40,05
3	Indeks Modal Manusia	Angka	0,55	0,57
4	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	45,58	45,86
5	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	87,23	88,98
6	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	51,81*	58,93
7	Indeks Pembangunan Gender	Angka	89,38	89,72
8	Nilai SAKIP	Angka	71,42	72,77
9	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	74,997*	76,997
10	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,86	4,32
11	Indeks Inovasi Daerah	Angka	50,84	61,00
12	Survei Penilaian Integritas KPK	Angka	73,14	75,00
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,85	3,72
14	Tingkat Kemiskinan	%	5,54	4,20
15	Indeks Gini	Angka	0,251	0,249
16	Persentase desa wilayah perbatasan yang berstatus maju dan mandiri	%	22,06	24,02
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	85,99	86,39
18	Indeks Risiko Bencana	Angka	121,35	115

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, diolah
Keterangan: * data tahun 2024
Tingkat kemiskinan menggunakan data Maret 2025

Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Pada tabel di bawah, dimuat IKD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri atas indikator-indikator pada Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Pelayanan Umum, dan Indikator Kinerja Kunci. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Target tahun 2027 untuk masing-masing indikator dimuat pada Tabel 7.3.

Tabel 7.3.
Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**			
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	72,56	79,51
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	14,48	12,08
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/ kapita	1.006*	2.398,90
4	Intensitas Energi Primer	SBM/ Rp Miliar	37,0098*	121
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	85,99	86,39
6	a. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	0	54,78
	b. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Layak	%	59,27	65,97
7	a. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	4,34	8
	b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	86	87,82
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	48,04	48,50
9	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	N/A	95,50
10	Persentase Penurunan Emisi GRK			
	a. Kumulatif	%	13,91*	35,83
	b. Tahunan	%	Belum dirillis oleh Kementerian PPN/Bappenas	51,34

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
11	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	63,82*	66,66
12	Indeks Risiko Bencana	Indeks	121,35	115
13	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,55*	0,6
14	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,39	1,39
15	Kepadatan Penduduk	Orang/ km2	10,21	10,45
16	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	Belum dirilis oleh Kementerian LH	0,44
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**			
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,56	5,6
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,54	4,20
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	208,21	236,85
4	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0,65	0,7
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,85	3,72
6	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	51,56	52,5
7	Indeks Gini	Angka	0,251	0,249
8a	Indeks Modal Manusia	Angka	0,55	0,57
8b	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,04	74,78
9	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,68	74,37
10	Angka Kematian Ibu (AK)	Angka	77,77	76,99
11	Angka Kematian Balita (AKB)	Angka	10,73	10,62
12	Cakupan Imunisasi Bayi	%	56*	90
13	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	%		45
14	Prevalensi Stunting	%	9,5	9,41
15	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):			
	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	66,84	90
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	68,66	90
16	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	74,32	98,8
17	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
	i) Literasi Membaca	%	20	40
	ii) Numerasi	%	0	30
18	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
	i) Literasi Membaca	%	35,72	47,52
	ii) Numerasi	%	21,72	34,18
19	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,44	9,95

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
20	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,31	13,45
21	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	35,87	69,5
22	Indeks Literasi Digital	Angka	48,91**	68,52
23	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	64,8	65,45
24	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	87,23	88,98
25	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	51,81*	58,93
26	Indeks Perlindungan Anak	Angka	71,26*	75,62
27	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	sudah tidak dirilis oleh Kemenko SDM	78,8
28	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,34	0,33
29	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	63,56	64,2
30	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	14,5	15,45
31	Persentase desa wilayah perbatasan yang berstatus maju dan mandiri	%	22,06	24,02
32	Indeks Pencapaian SPM	Angka	100	100
33	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional	%	74,32	82
34	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	47	55
35	Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	%	N/A	45
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**			
1	Angka Ketergantungan	%	41,79	42,95
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,75	9,83
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,77	2,02
4	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	20.224	20.320
5	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap Nasional	%	0,06*	0,06
6	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	%	1,07*	1,99
7	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	%	99,04*	99,07
8	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,86	4,18
9	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,11*	0,47
10	Return on Aset (RoA) BUMD	%	N/A	1,29
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,55	73,42
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	52,26	56,4
13	Indeks Inovasi Daerah	Angka	50,84	61
14	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	75,05*	77,14

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
15	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Angka	33,47*	40,05
16	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	30,8*	33,9
17	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	6,40*	6,75
18	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Angka	8,61*	8,15
19	Kontribusi PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	28,38	28,59
20	Kontribusi PDRB Ekspor Barang dan Jasa	%	16,8	21,6
21	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	45,58	45,86
22	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	74,86	78
23	Persentase Desa Mandiri	%	17,23	19,02
24	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,38	0,74
25	Tingkat Inflasi	%	2,57	2,5
26	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	52,63*	78,77
27	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	12,16*	45
28	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	11,20	26,64
29	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	N/A	0,74
30	Nilai Transaksi Saham per Kapita Per Provinsi	Rupiah	5.967.126,65	7.020.851,11
31	Total Kredit/PDRB	%	12,00	19,15
32	Inklusi Keuangan	%	80,51	98,01
33	Jumlah Kerjasama Provinsi	Angka	28	28
34	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,53	0,57
35	Aset Perbankan Syariah/PDRB	%	0,31	1,76
36	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	4.978	5.078
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,7*	97,8
2	Indeks Pemdi (Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Angka	4,45	4,49
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,86	4,32
4	Indeks Integritas Nasional	Angka	73,14	76,76
5	Persentase Penegakan Perda	%	65	97
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	91,9*	93,5
7	Indeks Demokrasi Indonesia	%	81,07	81,55
8	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,29	3,42
9	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	N/A	70
10	Indeks Ketahanan Nasional	Angka	Belum Rilis	2,75
11	Nilai LPPD	Angka		3,1

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**			
A	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**			
1	**Bidang Pendidikan**			
1	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	%	100	100
2	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%	100	100
3	Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	72,81	74,61
4	Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	60,32	65,12
5	Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	69,54	73,44
6	Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	58,61	65,21
7	Rata-rata kompetensi literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	80,39	85,19
8	Rata-rata kompetensi numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	74,17	75,97
9	Rata-rata kompetensi literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	80,98	82,48
10	Rata-rata kompetensi numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	78,95	79,7
11	Rata-rata kompetensi literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	79,5	81,4
12	Rata-rata kompetensi numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	71,07	72,57
13	Tingkat penyerapan lulusan SMK	%	86,66	88,28
14	Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	70,35	80,62
15	Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMA	Nilai	71,71	84,37
16	Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMK	Nilai	70,38	73,98
17	Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SDLB	Nilai	71,67	73,17
18	Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMPLB	Nilai	82	85,6
19	Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMALB	Nilai	78,5	82,4
20	Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMA	Nilai	72,65	75,65
21	Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMK	Nilai	72,15	76,05
22	Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SDLB	Nilai	73,67	76,67

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
23	Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMPLB	Nilai	81	86,4
24	Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMALB	Nilai	77,5	83,5
25	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMA	Nilai	59,09	63,59
26	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMK	Nilai	57,18	64,08
27	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SDLB	Nilai	67,33	71,23
28	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMPLB	Nilai	82,5	86,7
29	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMALB	Nilai	80,5	85,3
2	**Bidang Kesehatan**			
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	77,77	76,99
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	9,5	9,41
3	Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	%	100	100
4	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100
5	Persentase pelayanan kesehatan pengurangan risiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB	%	100	100
6	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	%	100	100
3	**Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Provinsi	%	33,57	39
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob di wilayah kewenangan Provinsi	%	0	0
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan Provinsi	%	59	61
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan Provinsi	%	42,07	42,48

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
5	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	0	0
6	Persentase kabupaten/kota yang dibina penyelenggaraan SPAM	%	100	100
7	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	86,00	88,17
8	Persentase kabupaten/kota yang dibina dalam sistem pengelolaan air limbah domestik	%	100	100
9	Persentase kabupaten/kota yang dibina sistem pengelolaan persampahan	%	100	100
10	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	%	47,67	48,15
11	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi	%	59,23	90
12	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	0	80
4	**Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**			
1	Persentase warga negara korban bencana provinsi yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	tidak dapat dilaksanakan	0
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	16,96	17,13
4	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	20	20
5	**Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**			
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	64,71	97
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	orang	3*	5
4	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas	%	90*	100

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan masyarakat	%	80*	88
6	Presentase Pegawai anggota Satpol PP yang ditingkatkan menjadi pejabat fungsional	%	N/A	28
7	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	N/A	15
8	Persentase Dokumen Layanan Pencegahan Kebakaran	%	N/A	40
9	Persentase Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang sah dan legal	%	N/A	0
10	Persentase Aparatur pemadam kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	%	N/A	40
11	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang ditingkatkan untuk mengisi jabatan fungsional	%	0	0
12	Persentase Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang telah dilakukan pembinaan	%	N/A	0
13	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang sesuai dengan standar	%	N/A	0
14	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	N/A	100
15	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100
16	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100
17	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100
18	Persentase Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	N/A	20
6	**Bidang Sosial**			
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	85,71	100
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	42,3	100
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	95,35	100

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan /atau gelandangan dan pengemis di dalam panti yang layak dan sesuai standar	%	100*	100
6	Persentase Pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan /atau gelandangan dan pengemis sesuai standar kompetensi dan/atau layanan	%	100*	100
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	100	100
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana yang disediakan sesuai standar	%	100*	100
9	Persentase pekerja sosial /tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100*	100
10	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100*	100
11	Persentase sarana prasarana bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang disediakan secara layak dan sesuai standar	%	100*	100
12	Persentase Pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	%	100*	100
13	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100
14	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	100*	100

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
B.	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**			
1	**Bidang Tenaga Kerja**			
1	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	%	80,56	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	3,26*	4,24
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Org	192.958.577*	199.128.372
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	4,75	5,5
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	%	51,2*	57,2
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	1,11	3,36
2	**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,38	89,72
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,34	0,33
3	Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD	%	3,4	3,77
4	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100
3	**Bidang Pangan**			
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	%	248,48	100
2	Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Skor 0-100	86,2	86,9
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	10,91	7,5
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	82,67*	89
4	**Bidang Pertanahan**			
1	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	20,03	60,1

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
2	Persentase Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	Tahun 2025 tidak ada kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan mediasi	66,67
3	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu kota atau kabupaten lengkap secara berkualitas	%	40,00	60
4	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	57,24	98,25
5	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diselesaikan tepat waktu	%	50,00	50
6	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Provinsi	%	57,24	72,36
7	Persentase jumlah kab/kota yang telah memanfaatkan Peta Nilai Tanah dalam pelayanan BPHTB	%	100,00	100
8	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	%	99,86	99,86
5	**Bidang Lingkungan Hidup**			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Indeks	85,99	86,39
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	44,44	60
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi	Indeks	49,92*	53,42
6	**Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100*	100
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	70,67*	100
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	72*	100
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	98,82*	100
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	68,05	70

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
6	Jumlah Data Profile Kependudukan yang disusun	%	100	100
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	5*	30
7	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**			
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	17,23	17,23
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	1,57	8,05
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	20	40
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	3,01	9,02
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	1,41	4,23
8	**Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	%	2,25	2,22
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	65,37	70
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	5,65	5,20
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	27,6	24,85
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks (skala 0-100)	69,8	69,95
9	**Bidang Perhubungan**			
1	Konektivitas Provinsi	Rasio	0,76	0,85
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan daerah	%	43,72*	68,52
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	0	100
4	Persentase Jumlah Kendaraan Bermotor yang laik jalan	%	73,18*	77,5
10	**Bidang Komunikasi dan Informatika**			
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	100	100

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
11	**Uusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**			
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	13,73	20,54
2	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	25,53	25,79
3	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	0,32*	0,92
4	Pertumbuhan Wirausaha	%	1,12*	3,52
12	**Bidang Penanaman Modal**			
1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	%	-14,66	9
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	77,63	100
13	**Bidang Kepemudaan dan Olahraga**			
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi	Indeks	63,56	64,2
2	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	%	40	40,4
14	**Bidang Statistik**			
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,76*	2,77
15	**Bidang Persandian**			
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintahan daerah	%	43,9	57,09
16	**Bidang Kebudayaan**			
1	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	90,9	91,35
2	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	%	0,26*	0,41
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi di bidang kebudayaan	%	0,43*	0,58
17	**Bidang Perpustakaan**			
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	58,89	78,5
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	35,87	69,5
18	**Bidang Kearsipan**			
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	49,33	63
C	**Urusan Pemerintahan Pilihan**			
1	**Bidang Kelautan dan Perikanan**			
1	Persentase Kawasan konservasi daerah yang operasional	%	77,58	77,97
2	Produksi Perikanan Tangkap	%	4,19	89
3	Produksi Perikanan Budi Daya	%	95,85	96,33
4	Produksi Garam	%	tidak ada potensi	0

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
5	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	%	60,45	73
2	**Pilihan Bidang Pariwisata**			
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	1,77	2,02
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang)	%	-93,75	10
3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,06*	0,06
4	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	5,37	5,37
3	**Bidang Pertanian**			
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	16,64	16,81
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	7,56	7,64
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	-0,11	2
4	**Bidang Kehutanan**			
1	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	100	100
2	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB daerah	%	3,19	3,36
3	Persentase Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarkatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan	%	60,5	100
5	**Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**			
1	Persentase cekungan air tanah dalam provinsi yang telah ditetapkan	%	0*	100
2	Penerimaan Nilai perolehan air tanah telah ditetapkan melalui perda/pergub	ada/tidak ada	Ada*	ada
3	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan	%	43,9	65
6	**Bidang Perdagangan**			
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah per provinsi	%	2,8*	4,2
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen per Provinsi	%	100	100
3	Nilai Ekspor Barang Per Provinsi	%	55,26	93,75
7	**Bidang Perindustrian**			
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi:			
	1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	%	3,37*	3,65
	2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi	%	8,75	9,83

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
	3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	Ribu	27.192*	36.500
	4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	USD Milyar	0,48*	0,8
	5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	Rp Triliun	14,7*	16,25
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	18,74*	20
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan	%	19,44*	30
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	%	100*	100
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	100*	100
8	**Bidang Transmigrasi**			
1	Nilai Rata-rata Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans)	Nilai	59,12*	68,68
2	Pendapatan Perkapita di Wilayah Transmigrasi	Rp	2.858.461*	3.268.538,43
D	**Urusan Penunjang Pemerintahan**			
1	**Perencanaan**			
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100*	100
2	**Keuangan**			
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	20,26	29,35
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	31,14	32
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	80	92,42
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	5,95*	6,15
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	37,65	40,25
6	Persentase Penurunan SILPA	%	-88,28*	-88,95

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
3	**Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**			
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	N/A	78
4	**Penelitian dan Pengembangan**			
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	13*	63
2	Persentase jumlah inovasi daerah yang dilaporkan dalam *Innovative government award*	%	43,62	70
5	**Pengawasan**			
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori/Opini	WTP*	WTP
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai (1-5)	3,11	3,3
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai (2-5)	3,04	3,3
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai (1-5)	3,07	3,2
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	74,29	80
6	**Fungsi Pengadaan**			
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	poin	22	22,22
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	poin	30	30
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	poin	40	40
7	**Hubungan dengan Perwakilan Daerah**			
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	Tepat	100
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	37,5	82
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	68,18*	82
8	**Pelayanan Publik**			
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	76,1	92,95

Sumber: LPPD Tahun 2025 dan diolah dari RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

Keterangan:

* data tahun 2024

** Indeks Literasi Digital menggunakan data Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI tahun 2025

Tingkat kemiskinan menggunakan data Maret 2025

BAB 8
PENUTUP

Dokumen RKPD Tahun 2027 disusun sebagai instrumen perencanaan tahunan yang menjembatani arah kebijakan jangka menengah dengan implementasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan daerah, serta memastikan keselarasan dengan RKP Tahun 2027 dan prioritas pembangunan nasional. Melalui tema "**Pembangunan Wilayah yang Merata, SDM Berkarakter dan Ekonomi Bernilai Tambah Menuju Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI yang Makmur**", RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 menegaskan komitmen pemerintah daerah bersama seluruh masyarakat dalam mendorong pemerataan pembangunan wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan struktur ekonomi daerah yang bernilai tambah.

Lebih lanjut, dokumen ini juga disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2025 sebagai dasar perumusan kebijakan dan mengakomodasi prioritas pembangunan daerah tahun 2027yang selaras dengan visi dan misi RPJMD Tahun 2025–2029. Penyusunannya juga tetap mengedepankan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif guna memastikan bahwa hasil pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta memperluas kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan.

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Untuk memastikan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 diimplementasikan sesuai dengan perencanaan, maka perlu diperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Setiap kepala perangkat daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027 dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027.
b. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD kabupaten/kota Tahun 2027 dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 untuk penyelarasan prioritas pembangunan serta mendukung prioritas nasional tahun 2027.
c. Gubernur menyusun Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2027 berpedoman RKPD Tahun 2027 dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama.
d. Pemerintah daerah melakukan manajemen risiko untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran pembangunan.
e. Pemerintah daerah mengupayakan sumber-sumber pembiayaan potensial selain APBD provinsi.
f. Pemerintah daerah mendukung dan melaksanakan Program Strategis Nasional sesuai dengan kewenangan dan arahan Pemerintah Pusat.

8.2. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam menjaga pelaksanaan RKPD sesuai dengan rencana dan untuk mengukur pencapaian target, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dilakukan simultan terhadap Renja Perangkat Daerah, dengan pengaturan sebagai berikut:

a. Setiap kepala perangkat daerah melakukan evaluasi hasil Renja-PD tahun 2027setiap triwulan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja perangkat daerah. Hasil evaluasi dilaporkan ke Bappedarida untuk menjadi input pelaksanaan Evaluasi RKPD tahun 2027.
b. Bapperida melakukan evaluasi hasil RKPD Tahun 2027 setiap triwulan berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah. Hal ini

dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja daerah, yang selanjutnya menjadi input untuk pelaksanaan pembangunan pada triwulan berikutnya.

c. Evaluasi hasil RKPD triwulan IV sekaligus menjadi evaluasi tahunan yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah selama tahun 2027. Hasil evaluasi tahun 2027 menjadi input untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

8.3. Perubahan RKPD

Dokumen RKPD dapat dilakukan perubahan dengan tatacara sebagaimana berikut:

a. Perubahan RKPD Tahun 2027 dapat dilakukan dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan:
   1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan/atau
   2) keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2027.
b. Perumusan perubahan RKPD Tahun 2027 memperhatikan visi, misi, dan program kepala daerah, serta hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.
c. Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2027 ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.
d. Dalam hal RKP Tahun 2027 dan/atau pemutakhiran RKP Tahun 2027 telah ditetapkan serta terdapat pemutakhiran Program Strategis Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara melakukan penambahan program/kegiatan/sub kegiatan baru yang dituangkan

dalam Peraturan Gubernur mengenai Perubahan RKPD provinsi Tahun 2027.

e. Perubahan RKPD Tahun 2027 ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027.

Keberhasilan implementasi RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 sangat ditentukan oleh konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam menerjemahkan sasaran dan prioritas pembangunan ke dalam rencana kerja perangkat daerah, penganggaran yang efektif, serta pelaksanaan program yang berorientasi pada hasil. Penerapan prinsip pembangunan inklusif, berkeadilan, responsif gender, dan berkelanjutan menjadi poin penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, DPRD, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan, RKPD Tahun 2027 diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan fondasi transformasi Kalimantan Utara yang kokoh sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur dan berkelanjutan.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						**501.375.067.310,65**							**686.035.704.353,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**500.769.822.663,00**							**683.690.962.624,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**500.769.822.663,00**							**683.690.962.624,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**404.511.283.215,00**							**536.875.619.586,00**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah						***404.331.283.215,00***							***536.875.619.586,00***	
			1.Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %		100 %	100 %	404.331.283.215,00						100 %	536.875.619.586,00	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						248.603.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		3.053.114.891,00	
		Meningkatnya penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah						248.603.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		3.053.114.891,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		0 Data	2 Data	10.000.000,00						2 Data	0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	228 Dokumen		226 Dokumen	226 Dokumen	150.000.000,00						228 Dokumen	2.072.384.005,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	38.603.000,00						4 Dokumen	980.730.886,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						38.603.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			980.730.886,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	38.603.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	980.730.886,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						150.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			2.072.384.005,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	228 Dokumen		226 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				228 Dokumen	2.072.384.005,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			0,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		0 Data	2 Data	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Data	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			0,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						395.200.293.448,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		510.414.701.944,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya penyediaan layanan administrasi keuangan perangkat daerah						395.200.293.448,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		510.414.701.944,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.349.351.000,00						12 Dokumen	4.181.944.885,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39676 Orang/ Bulan		28294 Orang/ Bulan	36582 Orang/ Bulan	1.918.611.538,00						37520 Orang/ Bulan	506.232.757.059,00	
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.918.611.538,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			506.232.757.059,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39676 Orang/ Bulan		28294 Orang/ Bulan	168 Orang/ Bulan	1.918.611.538,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				37520 Orang/ Bulan	506.232.757.059,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						1.349.351.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			4.181.944.885,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.349.351.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	4.181.944.885,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		384.509.525,00	
		Meningkatnya penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						100.000.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		384.509.525,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	100.000.000,00						20 Orang	384.509.525,00	
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			384.509.525,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		20 Orang	10 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Orang	384.509.525,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						997.024.559,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		6.280.400.271,00	
		Meningkatnya penyediaan layanan administrasi umum perangkat daerah						997.024.559,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		6.280.400.271,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331 Laporan		331 Laporan	331 Laporan	500.000.000,00						331 Laporan	3.384.076.428,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	300.039.375,00						12 Paket	1.192.354.534,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		5 Paket	12 Paket	80.000.000,00						12 Paket	292.485.725,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	75.489.183,00						12 Paket	285.472.033,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		60 Paket	12 Paket	41.496.001,00						12 Paket	1.126.011.551,00	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						75.489.183,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			285.472.033,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	75.489.183,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	285.472.033,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						41.496.001,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			1.126.011.551,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		60 Paket	3 Paket	41.496.001,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	1.126.011.551,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						300.039.375,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			1.192.354.534,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	300.039.375,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	1.192.354.534,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						80.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			292.485.725,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		5 Paket	12 Paket	80.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	292.485.725,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						500.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			3.384.076.428,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331 Laporan		331 Laporan	100 Laporan	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				331 Laporan	3.384.076.428,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.082.817.224,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		8.325.704.912,00	
		Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah						3.082.817.224,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		8.325.704.912,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.313.993.200,00						12 Laporan	4.248.129.366,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	724.724.024,00						12 Laporan	3.909.510.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	44.100.000,00						12 Laporan	168.065.546,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						44.100.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			168.065.546,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	44.100.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	168.065.546,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.313.993.200,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			4.248.129.366,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.313.993.200,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	4.248.129.366,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						724.724.024,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			3.909.510.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	724.724.024,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	3.909.510.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.880.000.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		6.012.459.726,00	
		Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						3.880.000.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		6.012.459.726,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit		26 Unit	26 Unit	180.000.000,00						26 Unit	252.260.800,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	180.000.000,00						9 Unit	300.806.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit		70 Unit	70 Unit	820.000.000,00						70 Unit	1.752.176.800,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2.700.000.000,00						2 Unit	3.707.216.126,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						180.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			300.806.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	180.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9 Unit	300.806.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						180.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			252.260.800,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit		26 Unit	26 Unit	180.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				26 Unit	252.260.800,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						820.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			1.752.176.800,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit		70 Unit	70 Unit	820.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70 Unit	1.752.176.800,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.700.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			3.707.216.126,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2.700.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	3.707.216.126,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.002.544.984,00					SMK BLUD		2.404.728.317,00	
		Meningkatnya pembinaan terhadap BLUD						1.002.544.984,00					SMK BLUD		2.404.728.317,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	13 Unit Kerja		13 Unit Kerja	13 Unit Kerja	1.002.544.984,00						13 Unit Kerja	2.404.728.317,00	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.002.544.984,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			2.404.728.317,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	13 Unit Kerja		13 Unit Kerja	13 Unit Kerja	1.002.544.984,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13 Unit Kerja	2.404.728.317,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya penyediaan layanan administrasi keuangan perangkat daerah						395.200.293.448,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		510.414.701.944,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan	-		-	-	391.932.330.910,00						-	0,00	
	1.01.01.1.02.0009	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan						391.932.330.910,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan	-		-	39508 Orang/bulan	391.932.330.910,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**96.158.539.448,00**							**146.735.343.038,00**	
		Meningkatnya kualitas Lulusan						***94.758.539.448,00***							***145.835.343.038,00***	
			1.Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi	86,81 %		78,31 %	80,81 %	2.098.000.000,00						83,01 %	9.762.748.881,00	
			2.Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI	89.89 %		87.74 %	88.28 %	2.098.000.000,00						88.82 %	9.762.748.881,00	
			3.Persentase lulusan SLB yang mandiri	44.75 %		22.22 %	27.47 %	2.098.000.000,00						32.97 %	9.762.748.881,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
		Meningkatnya kemitraan dengan DUDI dan PT						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	74 Satuan Pendidikan		74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	250.000.000,00						74 Satuan Pendidikan	2.000.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik		500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	500.000.000,00						500 Peserta Didik	2.500.000.000,00	
		Meningkatnya keterjangkauan biaya Pendidikan						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	74 Satuan Pendidikan		74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	250.000.000,00						74 Satuan Pendidikan	2.000.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik		500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	500.000.000,00						500 Peserta Didik	2.500.000.000,00	
		Meningkatnya kompetensi Peserta Didik						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	74 Satuan Pendidikan		74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	250.000.000,00						74 Satuan Pendidikan	2.000.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik		500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	500.000.000,00						500 Peserta Didik	2.500.000.000,00	
		Meningkatnya kompetensi PTK						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	74 Satuan Pendidikan		74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	250.000.000,00						74 Satuan Pendidikan	2.000.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik		500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	500.000.000,00						500 Peserta Didik	2.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur pendidikan yang komprehensif						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	74 Satuan Pendidikan		74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	250.000.000,00						74 Satuan Pendidikan	2.000.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik		500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	500.000.000,00						500 Peserta Didik	2.500.000.000,00	
		Meningkatnya penataan PTK						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	74 Satuan Pendidikan		74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	250.000.000,00						74 Satuan Pendidikan	2.000.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik		500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	500.000.000,00						500 Peserta Didik	2.500.000.000,00	
		Meningkatnya sistem evaluasi dan penilaian kinerja						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	74 Satuan Pendidikan		74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	250.000.000,00						74 Satuan Pendidikan	2.000.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik		500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	500.000.000,00						500 Peserta Didik	2.500.000.000,00	
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						500.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			2.500.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik		500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500 Peserta Didik	2.500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						250.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			2.000.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	74 Satuan Pendidikan		74 Satuan Pendidikan	75 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				74 Satuan Pendidikan	2.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya kemitraan dengan DUDI dan PT						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	34 Satuan Pendidikan		34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						34 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	420 Peserta Didik		350 Peserta Didik	365 Peserta Didik	498.000.000,00						370 Peserta Didik	2.750.000.000,00	
		Meningkatnya keterjangkauan biaya Pendidikan						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	34 Satuan Pendidikan		34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						34 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	420 Peserta Didik		350 Peserta Didik	365 Peserta Didik	498.000.000,00						370 Peserta Didik	2.750.000.000,00	
		Meningkatnya kompetensi Peserta Didik						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	34 Satuan Pendidikan		34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						34 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	420 Peserta Didik		350 Peserta Didik	365 Peserta Didik	498.000.000,00						370 Peserta Didik	2.750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kompetensi PTK						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	34 Satuan Pendidikan		34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						34 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	420 Peserta Didik		350 Peserta Didik	365 Peserta Didik	498.000.000,00						370 Peserta Didik	2.750.000.000,00	
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur pendidikan yang komprehensif						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	34 Satuan Pendidikan		34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						34 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	420 Peserta Didik		350 Peserta Didik	365 Peserta Didik	498.000.000,00						370 Peserta Didik	2.750.000.000,00	
		Meningkatnya penataan PTK						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	34 Satuan Pendidikan		34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						34 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	420 Peserta Didik		350 Peserta Didik	365 Peserta Didik	498.000.000,00						370 Peserta Didik	2.750.000.000,00	
		Meningkatnya sistem evaluasi dan penilaian kinerja						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	34 Satuan Pendidikan		34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						34 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	420 Peserta Didik		350 Peserta Didik	365 Peserta Didik	498.000.000,00						370 Peserta Didik	2.750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						498.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			2.750.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	420 Peserta Didik		350 Peserta Didik	350 Peserta Didik	498.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				370 Peserta Didik	2.750.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik						100.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			0,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	34 Satuan Pendidikan		34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				34 Satuan Pendidikan	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya kemitraan dengan DUDI dan PT						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	8 Satuan Pendidikan		7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						8 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	130 Peserta Didik		130 Peserta Didik	130 Peserta Didik	750.000.000,00						130 Peserta Didik	2.212.748.881,00	
		Meningkatnya keterjangkauan biaya Pendidikan						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	8 Satuan Pendidikan		7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						8 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	130 Peserta Didik		130 Peserta Didik	130 Peserta Didik	750.000.000,00						130 Peserta Didik	2.212.748.881,00	
		Meningkatnya kompetensi Peserta Didik						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	8 Satuan Pendidikan		7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						8 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	130 Peserta Didik		130 Peserta Didik	130 Peserta Didik	750.000.000,00						130 Peserta Didik	2.212.748.881,00	
		Meningkatnya kompetensi PTK						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	8 Satuan Pendidikan		7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						8 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	130 Peserta Didik		130 Peserta Didik	130 Peserta Didik	750.000.000,00						130 Peserta Didik	2.212.748.881,00	
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur pendidikan yang komprehensif						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	8 Satuan Pendidikan		7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						8 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	130 Peserta Didik		130 Peserta Didik	130 Peserta Didik	750.000.000,00						130 Peserta Didik	2.212.748.881,00	
		Meningkatnya penataan PTK						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	8 Satuan Pendidikan		7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						8 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	130 Peserta Didik		130 Peserta Didik	130 Peserta Didik	750.000.000,00						130 Peserta Didik	2.212.748.881,00	
		Meningkatnya sistem evaluasi dan penilaian kinerja						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	8 Satuan Pendidikan		7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						8 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	130 Peserta Didik		130 Peserta Didik	130 Peserta Didik	750.000.000,00						130 Peserta Didik	2.212.748.881,00	
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						750.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			2.212.748.881,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	130 Peserta Didik		130 Peserta Didik	90 Peserta Didik	750.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				130 Peserta Didik	2.212.748.881,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						100.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			300.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	8 Satuan Pendidikan		7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan						***94.758.539.448,00***							***145.835.343.038,00***	
			1.Persentase PTK Profesional	68.28 %		60.28 %	62.28 %	24.115.879.448,00						64.28 %	43.167.478.957,00	
		Meningkatnya kemitraan dengan DUDI dan PT						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	70 Orang		66 Orang	49 Orang	500.000.000,00						49 Orang	10.700.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	6108 Orang		6108 Orang	5412 Orang	13.071.271.536,00						5412 Orang	19.598.233.407,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang		20 Orang	21 Orang	50.000.000,00						25 Orang	300.000.000,00	
		Meningkatnya keterjangkauan biaya Pendidikan						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	70 Orang		66 Orang	49 Orang	500.000.000,00						49 Orang	10.700.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	6108 Orang		6108 Orang	5412 Orang	13.071.271.536,00						5412 Orang	19.598.233.407,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang		20 Orang	21 Orang	50.000.000,00						25 Orang	300.000.000,00	
		Meningkatnya kompetensi Peserta Didik						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	70 Orang		66 Orang	49 Orang	500.000.000,00						49 Orang	10.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	6108 Orang		6108 Orang	5412 Orang	13.071.271.536,00						5412 Orang	19.598.233.407,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang		20 Orang	21 Orang	50.000.000,00						25 Orang	300.000.000,00	
		Meningkatnya kompetensi PTK						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	70 Orang		66 Orang	49 Orang	500.000.000,00						49 Orang	10.700.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	6108 Orang		6108 Orang	5412 Orang	13.071.271.536,00						5412 Orang	19.598.233.407,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang		20 Orang	21 Orang	50.000.000,00						25 Orang	300.000.000,00	
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur pendidikan yang komprehensif						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	70 Orang		66 Orang	49 Orang	500.000.000,00						49 Orang	10.700.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	6108 Orang		6108 Orang	5412 Orang	13.071.271.536,00						5412 Orang	19.598.233.407,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang		20 Orang	21 Orang	50.000.000,00						25 Orang	300.000.000,00	
		Meningkatnya penataan PTK						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	70 Orang		66 Orang	49 Orang	500.000.000,00						49 Orang	10.700.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	6108 Orang		6108 Orang	5412 Orang	13.071.271.536,00						5412 Orang	19.598.233.407,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang		20 Orang	21 Orang	50.000.000,00						25 Orang	300.000.000,00	
		Meningkatnya sistem evaluasi dan penilaian kinerja						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	70 Orang		66 Orang	49 Orang	500.000.000,00						49 Orang	10.700.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	6108 Orang		6108 Orang	5412 Orang	13.071.271.536,00						5412 Orang	19.598.233.407,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang		20 Orang	21 Orang	50.000.000,00						25 Orang	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						13.071.271.536,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			19.598.233.407,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	6108 Orang		6108 Orang	5412 Orang	13.071.271.536,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5412 Orang	19.598.233.407,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						500.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			10.700.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	70 Orang		66 Orang	120 Orang	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				49 Orang	10.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						50.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			300.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang		20 Orang	5 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Orang	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	
		Meningkatnya kemitraan dengan DUDI dan PT						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang		36 Orang	37 Orang	100.000.000,00						38 Orang	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	4176 Orang		4176 Orang	3240 Orang	8.278.697.952,00						3240 Orang	18.681.498.350,00	
		Meningkatnya keterjangkauan biaya Pendidikan						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang		36 Orang	37 Orang	100.000.000,00						38 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	4176 Orang		4176 Orang	3240 Orang	8.278.697.952,00						3240 Orang	18.681.498.350,00	
		Meningkatnya kompetensi Peserta Didik						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang		36 Orang	37 Orang	100.000.000,00						38 Orang	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	4176 Orang		4176 Orang	3240 Orang	8.278.697.952,00						3240 Orang	18.681.498.350,00	
		Meningkatnya kompetensi PTK						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang		36 Orang	37 Orang	100.000.000,00						38 Orang	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	4176 Orang		4176 Orang	3240 Orang	8.278.697.952,00						3240 Orang	18.681.498.350,00	
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur pendidikan yang komprehensif						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang		36 Orang	37 Orang	100.000.000,00						38 Orang	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	4176 Orang		4176 Orang	3240 Orang	8.278.697.952,00						3240 Orang	18.681.498.350,00	
		Meningkatnya penataan PTK						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang		36 Orang	37 Orang	100.000.000,00						38 Orang	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	4176 Orang		4176 Orang	3240 Orang	8.278.697.952,00						3240 Orang	18.681.498.350,00	
		Meningkatnya sistem evaluasi dan penilaian kinerja						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang		36 Orang	37 Orang	100.000.000,00						38 Orang	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	4176 Orang		4176 Orang	3240 Orang	8.278.697.952,00						3240 Orang	18.681.498.350,00	
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						8.278.697.952,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			18.681.498.350,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	4176 Orang		4176 Orang	3240 Orang	8.278.697.952,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3240 Orang	18.681.498.350,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						100.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang		36 Orang	30 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				38 Orang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya kemitraan dengan DUDI dan PT						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	11 Orang		7 Orang	8 Orang	100.000.000,00						9 Orang	675.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	876 Orang		876 Orang	1200 Orang	2.115.909.960,00						1200 Orang	3.902.047.200,00	
		Meningkatnya keterjangkauan biaya Pendidikan						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	11 Orang		7 Orang	8 Orang	100.000.000,00						9 Orang	675.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	876 Orang		876 Orang	1200 Orang	2.115.909.960,00						1200 Orang	3.902.047.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kompetensi Peserta Didik						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	11 Orang		7 Orang	8 Orang	100.000.000,00						9 Orang	675.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	876 Orang		876 Orang	1200 Orang	2.115.909.960,00						1200 Orang	3.902.047.200,00	
		Meningkatnya kompetensi PTK						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	11 Orang		7 Orang	8 Orang	100.000.000,00						9 Orang	675.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	876 Orang		876 Orang	1200 Orang	2.115.909.960,00						1200 Orang	3.902.047.200,00	
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur pendidikan yang komprehensif						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	11 Orang		7 Orang	8 Orang	100.000.000,00						9 Orang	675.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	876 Orang		876 Orang	1200 Orang	2.115.909.960,00						1200 Orang	3.902.047.200,00	
		Meningkatnya penataan PTK						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	11 Orang		7 Orang	8 Orang	100.000.000,00						9 Orang	675.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	876 Orang		876 Orang	1200 Orang	2.115.909.960,00						1200 Orang	3.902.047.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya sistem evaluasi dan penilaian kinerja						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	11 Orang		7 Orang	8 Orang	100.000.000,00						9 Orang	675.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	876 Orang		876 Orang	1200 Orang	2.115.909.960,00						1200 Orang	3.902.047.200,00	
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus						2.115.909.960,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			3.902.047.200,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	876 Orang		876 Orang	1200 Orang	2.115.909.960,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1200 Orang	3.902.047.200,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus						100.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			675.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	11 Orang		7 Orang	15 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9 Orang	675.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						***94.758.539.448,00***							***145.835.343.038,00***	
			1.Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18	82.74 %		80.17 %	80.81 %	68.574.660.000,00						81.46 %	90.079.900.200,00	
			2.Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas	80.47 %		76.11 %	77.20 %	68.574.660.000,00						78.29 %	90.079.900.200,00	
		Meningkatnya kemitraan dengan DUDI dan PT						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	21000 Peserta didik		20500 Peserta didik	20700 Peserta didik	7.240.700.000,00						20750 Peserta didik	13.300.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	74 Satuan Pendidikan		73 Satuan Pendidikan	73 Satuan Pendidikan	36.297.410.000,00						74 Satuan Pendidikan	43.870.785.000,00	
		Meningkatnya keterjangkauan biaya Pendidikan						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	21000 Peserta didik		20500 Peserta didik	20700 Peserta didik	7.240.700.000,00						20750 Peserta didik	13.300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	74 Satuan Pendidikan		73 Satuan Pendidikan	73 Satuan Pendidikan	36.297.410.000,00						74 Satuan Pendidikan	43.870.785.000,00	
		Meningkatnya kompetensi Peserta Didik						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	21000 Peserta didik		20500 Peserta didik	20700 Peserta didik	7.240.700.000,00						20750 Peserta didik	13.300.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	74 Satuan Pendidikan		73 Satuan Pendidikan	73 Satuan Pendidikan	36.297.410.000,00						74 Satuan Pendidikan	43.870.785.000,00	
		Meningkatnya kompetensi PTK						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	21000 Peserta didik		20500 Peserta didik	20700 Peserta didik	7.240.700.000,00						20750 Peserta didik	13.300.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	74 Satuan Pendidikan		73 Satuan Pendidikan	73 Satuan Pendidikan	36.297.410.000,00						74 Satuan Pendidikan	43.870.785.000,00	
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur pendidikan yang komprehensif						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	21000 Peserta didik		20500 Peserta didik	20700 Peserta didik	7.240.700.000,00						20750 Peserta didik	13.300.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	74 Satuan Pendidikan		73 Satuan Pendidikan	73 Satuan Pendidikan	36.297.410.000,00						74 Satuan Pendidikan	43.870.785.000,00	
		Meningkatnya penataan PTK						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	21000 Peserta didik		20500 Peserta didik	20700 Peserta didik	7.240.700.000,00						20750 Peserta didik	13.300.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	74 Satuan Pendidikan		73 Satuan Pendidikan	73 Satuan Pendidikan	36.297.410.000,00						74 Satuan Pendidikan	43.870.785.000,00	
		Meningkatnya sistem evaluasi dan penilaian kinerja						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	21000 Peserta didik		20500 Peserta didik	20700 Peserta didik	7.240.700.000,00						20750 Peserta didik	13.300.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	74 Satuan Pendidikan		73 Satuan Pendidikan	73 Satuan Pendidikan	36.297.410.000,00						74 Satuan Pendidikan	43.870.785.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas						7.240.700.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			13.300.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	21000 Peserta didik		20500 Peserta didik	20700 Peserta didik	7.240.700.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20750 Peserta didik	13.300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas						36.297.410.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			43.870.785.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	74 Satuan Pendidikan		73 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	36.297.410.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				74 Satuan Pendidikan	43.870.785.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya kemitraan dengan DUDI dan PT						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	11350 Peserta didik		11250 Peserta didik	11300 Peserta didik	3.832.770.000,00						11315 Peserta didik	6.460.110.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	33 Satuan Pendidikan		33 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan	17.112.010.000,00						33 Satuan Pendidikan	20.590.000.000,00	
		Meningkatnya keterjangkauan biaya Pendidikan						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	11350 Peserta didik		11250 Peserta didik	11300 Peserta didik	3.832.770.000,00						11315 Peserta didik	6.460.110.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	33 Satuan Pendidikan		33 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan	17.112.010.000,00						33 Satuan Pendidikan	20.590.000.000,00	
		Meningkatnya kompetensi Peserta Didik						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	11350 Peserta didik		11250 Peserta didik	11300 Peserta didik	3.832.770.000,00						11315 Peserta didik	6.460.110.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	33 Satuan Pendidikan		33 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan	17.112.010.000,00						33 Satuan Pendidikan	20.590.000.000,00	
		Meningkatnya kompetensi PTK						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	11350 Peserta didik		11250 Peserta didik	11300 Peserta didik	3.832.770.000,00						11315 Peserta didik	6.460.110.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	33 Satuan Pendidikan		33 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan	17.112.010.000,00						33 Satuan Pendidikan	20.590.000.000,00	
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur pendidikan yang komprehensif						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	11350 Peserta didik		11250 Peserta didik	11300 Peserta didik	3.832.770.000,00						11315 Peserta didik	6.460.110.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	33 Satuan Pendidikan		33 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan	17.112.010.000,00						33 Satuan Pendidikan	20.590.000.000,00	
		Meningkatnya penataan PTK						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	11350 Peserta didik		11250 Peserta didik	11300 Peserta didik	3.832.770.000,00						11315 Peserta didik	6.460.110.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	33 Satuan Pendidikan		33 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan	17.112.010.000,00						33 Satuan Pendidikan	20.590.000.000,00	
		Meningkatnya sistem evaluasi dan penilaian kinerja						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	11350 Peserta didik		11250 Peserta didik	11300 Peserta didik	3.832.770.000,00						11315 Peserta didik	6.460.110.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	33 Satuan Pendidikan		33 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan	17.112.010.000,00						33 Satuan Pendidikan	20.590.000.000,00	
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan						3.832.770.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			6.460.110.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	11350 Peserta didik		11250 Peserta didik	11300 Peserta didik	3.832.770.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11315 Peserta didik	6.460.110.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan						17.112.010.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			20.590.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	33 Satuan Pendidikan		33 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan	17.112.010.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				33 Satuan Pendidikan	20.590.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
		Meningkatnya kemitraan dengan DUDI dan PT						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	350 Paket		350 Paket	350 Paket	100.000.000,00						400 Paket	600.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	950 Peserta Didik		690 Peserta Didik	740 Peserta Didik	652.550.000,00						820 Peserta Didik	1.546.321.200,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	8 Satuan Pendidikan		7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	3.339.220.000,00						8 Satuan Pendidikan	3.712.684.000,00	
		Meningkatnya keterjangkauan biaya Pendidikan						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	350 Paket		350 Paket	350 Paket	100.000.000,00						400 Paket	600.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	950 Peserta Didik		690 Peserta Didik	740 Peserta Didik	652.550.000,00						820 Peserta Didik	1.546.321.200,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	8 Satuan Pendidikan		7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	3.339.220.000,00						8 Satuan Pendidikan	3.712.684.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kompetensi Peserta Didik						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	350 Paket		350 Paket	350 Paket	100.000.000,00						400 Paket	600.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	950 Peserta Didik		690 Peserta Didik	740 Peserta Didik	652.550.000,00						820 Peserta Didik	1.546.321.200,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	8 Satuan Pendidikan		7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	3.339.220.000,00						8 Satuan Pendidikan	3.712.684.000,00	
		Meningkatnya kompetensi PTK						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	350 Paket		350 Paket	350 Paket	100.000.000,00						400 Paket	600.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	950 Peserta Didik		690 Peserta Didik	740 Peserta Didik	652.550.000,00						820 Peserta Didik	1.546.321.200,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	8 Satuan Pendidikan		7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	3.339.220.000,00						8 Satuan Pendidikan	3.712.684.000,00	
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur pendidikan yang komprehensif						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	350 Paket		350 Paket	350 Paket	100.000.000,00						400 Paket	600.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	950 Peserta Didik		690 Peserta Didik	740 Peserta Didik	652.550.000,00						820 Peserta Didik	1.546.321.200,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	8 Satuan Pendidikan		7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	3.339.220.000,00						8 Satuan Pendidikan	3.712.684.000,00	
		Meningkatnya penataan PTK						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	350 Paket		350 Paket	350 Paket	100.000.000,00						400 Paket	600.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	950 Peserta Didik		690 Peserta Didik	740 Peserta Didik	652.550.000,00						820 Peserta Didik	1.546.321.200,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	8 Satuan Pendidikan		7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	3.339.220.000,00						8 Satuan Pendidikan	3.712.684.000,00	
		Meningkatnya sistem evaluasi dan penilaian kinerja						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	350 Paket		350 Paket	350 Paket	100.000.000,00						400 Paket	600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	950 Peserta Didik		690 Peserta Didik	740 Peserta Didik	652.550.000,00						820 Peserta Didik	1.546.321.200,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	8 Satuan Pendidikan		7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	3.339.220.000,00						8 Satuan Pendidikan	3.712.684.000,00	
	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						100.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			600.000.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	350 Paket		350 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				400 Paket	600.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus						652.550.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			1.546.321.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	950 Peserta Didik		690 Peserta Didik	740 Peserta Didik	652.550.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				820 Peserta Didik	1.546.321.200,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus						3.339.220.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			3.712.684.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	8 Satuan Pendidikan		7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	3.339.220.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Satuan Pendidikan	3.712.684.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya Tata Kelola Satuan Pendidikan						***94.758.539.448,00***							***145.835.343.038,00***	
			1.Persentase Sekolah berkinerja Baik	100.00 %		93.00 %	95.00 %	1.070.000.000,00						97.00 %	3.725.215.000,00	
		Meningkatnya kemitraan dengan DUDI dan PT						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00						3 Dokumen	1.500.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	74 Satuan Pendidikan		74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	350.000.000,00						74 Satuan Pendidikan	0,00	
		Meningkatnya keterjangkauan biaya Pendidikan						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00						3 Dokumen	1.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	74 Satuan Pendidikan		74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	350.000.000,00						74 Satuan Pendidikan	0,00	
		Meningkatnya kompetensi Peserta Didik						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00						3 Dokumen	1.500.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	74 Satuan Pendidikan		74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	350.000.000,00						74 Satuan Pendidikan	0,00	
		Meningkatnya kompetensi PTK						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00						3 Dokumen	1.500.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	74 Satuan Pendidikan		74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	350.000.000,00						74 Satuan Pendidikan	0,00	
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur pendidikan yang komprehensif						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00						3 Dokumen	1.500.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	74 Satuan Pendidikan		74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	350.000.000,00						74 Satuan Pendidikan	0,00	
		Meningkatnya penataan PTK						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00						3 Dokumen	1.500.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	74 Satuan Pendidikan		74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	350.000.000,00						74 Satuan Pendidikan	0,00	
		Meningkatnya sistem evaluasi dan penilaian kinerja						58.359.381.536,00					Satuan Pendidikan Menengah Atas		83.079.718.407,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00						3 Dokumen	1.500.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	74 Satuan Pendidikan		74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	350.000.000,00						74 Satuan Pendidikan	0,00	
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas						350.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	74 Satuan Pendidikan		74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				74 Satuan Pendidikan	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						100.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			1.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya kemitraan dengan DUDI dan PT						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	320.000.000,00						34 Dokumen	425.215.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	34 Satuan Pendidikan		34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	250.000.000,00						34 Satuan Pendidikan	0,00	
		Meningkatnya keterjangkauan biaya Pendidikan						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	320.000.000,00						34 Dokumen	425.215.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	34 Satuan Pendidikan		34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	250.000.000,00						34 Satuan Pendidikan	0,00	
		Meningkatnya kompetensi Peserta Didik						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	320.000.000,00						34 Dokumen	425.215.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	34 Satuan Pendidikan		34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	250.000.000,00						34 Satuan Pendidikan	0,00	
		Meningkatnya kompetensi PTK						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	320.000.000,00						34 Dokumen	425.215.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	34 Satuan Pendidikan		34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	250.000.000,00						34 Satuan Pendidikan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur pendidikan yang komprehensif						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	320.000.000,00						34 Dokumen	425.215.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	34 Satuan Pendidikan		34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	250.000.000,00						34 Satuan Pendidikan	0,00	
		Meningkatnya penataan PTK						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	320.000.000,00						34 Dokumen	425.215.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	34 Satuan Pendidikan		34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	250.000.000,00						34 Satuan Pendidikan	0,00	
		Meningkatnya sistem evaluasi dan penilaian kinerja						30.491.477.952,00					Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		48.906.823.350,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	320.000.000,00						34 Dokumen	425.215.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	34 Satuan Pendidikan		34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	250.000.000,00						34 Satuan Pendidikan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan						250.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	34 Satuan Pendidikan		34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				34 Satuan Pendidikan	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						320.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			425.215.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	320.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				34 Dokumen	425.215.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya kemitraan dengan DUDI dan PT						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	50.000.000,00						8 Dokumen	600.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	8 Satuan Pendidikan		7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						8 Satuan Pendidikan	1.200.000.000,00	
		Meningkatnya keterjangkauan biaya Pendidikan						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	50.000.000,00						8 Dokumen	600.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	8 Satuan Pendidikan		7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						8 Satuan Pendidikan	1.200.000.000,00	
		Meningkatnya kompetensi Peserta Didik						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	50.000.000,00						8 Dokumen	600.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	8 Satuan Pendidikan		7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						8 Satuan Pendidikan	1.200.000.000,00	
		Meningkatnya kompetensi PTK						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	50.000.000,00						8 Dokumen	600.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	8 Satuan Pendidikan		7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						8 Satuan Pendidikan	1.200.000.000,00	
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur pendidikan yang komprehensif						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	50.000.000,00						8 Dokumen	600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	8 Satuan Pendidikan		7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						8 Satuan Pendidikan	1.200.000.000,00	
		Meningkatnya penataan PTK						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	50.000.000,00						8 Dokumen	600.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	8 Satuan Pendidikan		7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						8 Satuan Pendidikan	1.200.000.000,00	
		Meningkatnya sistem evaluasi dan penilaian kinerja						7.307.679.960,00					Satuan Pendidikan Khusus		14.748.801.281,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	50.000.000,00						8 Dokumen	600.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	8 Satuan Pendidikan		7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						8 Satuan Pendidikan	1.200.000.000,00	
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus						100.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			1.200.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	8 Satuan Pendidikan		7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Satuan Pendidikan	1.200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						50.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			600.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Dokumen	600.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**100.000.000,00**							**80.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan						***50.000.000,00***							***80.000.000,00***	
			1.Indeks Pemerataan Guru	0.05 Rasio		0.13 Rasio	0.11 Rasio	50.000.000,00						0.09 Rasio	80.000.000,00	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi						100.000.000,00					Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada SMA/SMK/SLB		80.000.000,00	
		Meningkatnya penataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan						100.000.000,00					Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada SMA/SMK/SLB		80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus						50.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			0,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus						50.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			80.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	80.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**605.244.647,65**							**2.344.741.729,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**605.244.647,65**							**2.344.741.729,00**	
4.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**247.644.647,65**							**1.520.888.993,00**	
		Meningkatnya tradisi budaya daerah yang dikembangkan						***247.644.647,65***							***1.520.888.993,00***	
			1.Persentase tradisi budaya yang dikembangkan	100.00 %		20.00 %	40.00 %	247.644.647,65						60.00 %	1.520.888.993,00	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						247.644.647,65					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara; Pelaku seni dan budaya; Komunitas budaya; Masyarakat umum		1.520.888.993,00	
		meningkatnya tradisi budaya yang dimanfaatkan						247.644.647,65					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara; Pelaku seni dan budaya; Komunitas budaya; Masyarakat umum		1.520.888.993,00	
			Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	25.644.647,65						5 Laporan	0,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	10 Objek		10 Objek	3 Objek	125.000.000,00						25 Objek	1.106.101.086,00	
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	25 Orang		40 Orang	40 Orang	97.000.000,00						40 Orang	414.787.907,00	
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						97.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			414.787.907,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	25 Orang		40 Orang	20 Orang	97.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Orang	414.787.907,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.02.1.01.0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan						125.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			1.106.101.086,00	
		Terlaksananya Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	10 Objek		10 Objek	10 Objek	125.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Objek	1.106.101.086,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.02.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota						25.644.647,65			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			0,00	
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan PPKD Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi	5 Laporan		5 Laporan	3 Laporan	25.644.647,65	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Laporan	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**						**30.000.000,00**							**484.619.469,00**	
		Meningkatnya kesenian tradisional yang dikembangkan						***30.000.000,00***							***484.619.469,00***	
			1.Persentase kesenian tradisional yang dibina	19.05 %		15.05 %	16.13 %	30.000.000,00						16.93 %	484.619.469,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara; Pelaku seni dan budaya; Komunitas budaya; Masyarakat umum		484.619.469,00	
		Meningkatnya Pelaku Seni dan Tenaga Kebudayaan yang tersertifikasi						30.000.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara; Pelaku seni dan budaya; Komunitas budaya; Masyarakat umum		484.619.469,00	
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Lembaga		25 Lembaga	25 Lembaga	30.000.000,00						25 Lembaga	484.619.469,00	
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional						30.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			484.619.469,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Lembaga		25 Lembaga	3 Lembaga	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Lembaga	484.619.469,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**						**22.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya sejarah lokal yang dikembangkan						***22.000.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase sejarah lokal yang dikembangkan	100.00 %		20.00 %	40.00 %	22.000.000,00						60.00 %	0,00	
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi						22.000.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara; Pelaku seni dan budaya; Komunitas budaya; Masyarakat umum		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya sejarah lokal yang diaktualisasi						22.000.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara; Pelaku seni dan budaya; Komunitas budaya; Masyarakat umum		0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	22.000.000,00						50 Orang	0,00	
	2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi						22.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50 Orang		50 Orang	5 Orang	22.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**255.600.000,00**							**339.233.267,00**	
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan						***255.600.000,00***							***339.233.267,00***	
			1.Persentase cagar budaya yang dilestarikan	0.56 %		0.36 %	0.41 %	255.600.000,00						0.46 %	339.233.267,00	
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi						50.000.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara; Pelaku seni dan budaya; Komunitas budaya; Masyarakat umum		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya cagar budaya yang ditetapkan provinsi						50.000.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara; Pelaku seni dan budaya; Komunitas budaya; Masyarakat umum		0,00	
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	20 Objek		15 Objek	0 Objek	50.000.000,00						30 Objek	0,00	
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya						50.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			0,00	
		Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	20 Objek		15 Objek	5 Objek	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Objek	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi						205.600.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara; Pelaku seni dan budaya; Komunitas budaya; Masyarakat umum		339.233.267,00	
		Meningkatnya cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan						205.600.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara; Pelaku seni dan budaya; Komunitas budaya; Masyarakat umum		339.233.267,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	15 Objek		15 Objek	15 Objek	180.600.000,00						15 Objek	339.233.267,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0 Objek		0 Objek	5 Objek	25.000.000,00						0 Objek	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya						180.600.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			339.233.267,00	
		Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	15 Objek		15 Objek	5 Objek	180.600.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Objek	339.233.267,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya						25.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			0,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0 Objek		0 Objek	1 Objek	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Objek	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**						**50.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya tata kelola museum provinsi						***50.000.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase peningkatan tata kelola museum daerah	100.00 %		42.86 %	57.14 %	50.000.000,00						71.43 %	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi						50.000.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara; Pelaku seni dan budaya; Komunitas budaya; Masyarakat umum		0,00	
		Meningkatnya pengembangan sarana, prasarana, kelembagaan, dan koleksi museum provinsi						50.000.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara; Pelaku seni dan budaya; Komunitas budaya; Masyarakat umum		0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	50 Orang		50 Orang	50 Orang	50.000.000,00						50 Orang	0,00	
	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman						50.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	50 Orang		50 Orang	5 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cabang Dinas Tarakan						**999.999.961,00**							**1.367.694.820,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**999.999.961,00**							**1.367.694.820,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**999.999.961,00**							**1.367.694.820,00**	
9.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**695.101.361,00**							**843.770.820,00**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah						***695.101.361,00***							***843.770.820,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	695.101.361,00						100 %	843.770.820,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						101.400.000,00					-		126.000.000,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang yang Sesuai Regulasi						101.400.000,00					-		126.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	101.400.000,00						12 Dokumen	126.000.000,00	
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						101.400.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			126.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	101.400.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				12 Dokumen	126.000.000,00	Cabang Dinas Tarakan
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						377.521.946,00					-		494.604.620,00	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						377.521.946,00					-		494.604.620,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	194.000.000,00						12 Laporan	264.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	90.086.100,00						12 Paket	92.062.620,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	9.481.446,00						3 Paket	14.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		7 Paket	5 Paket	83.954.400,00						4 Paket	124.042.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						83.954.400,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			124.042.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		7 Paket	4 Paket	83.954.400,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				4 Paket	124.042.000,00	Cabang Dinas Tarakan
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						90.086.100,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			92.062.620,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	90.086.100,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				12 Paket	92.062.620,00	Cabang Dinas Tarakan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9.481.446,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			14.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	9.481.446,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				3 Paket	14.500.000,00	Cabang Dinas Tarakan
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						194.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			264.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	194.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				12 Laporan	264.000.000,00	Cabang Dinas Tarakan
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						145.928.015,00					-		126.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang						145.928.015,00					-		126.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	41.724.599,00						12 Laporan	47.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	102.853.416,00						12 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.350.000,00						12 Laporan	4.300.000,00	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.350.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			4.300.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.350.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				12 Laporan	4.300.000,00	Cabang Dinas Tarakan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						41.724.599,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			47.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	41.724.599,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				12 Laporan	47.500.000,00	Cabang Dinas Tarakan
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						102.853.416,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			75.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	102.853.416,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				12 Laporan	75.000.000,00	Cabang Dinas Tarakan
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						70.251.400,00					-		96.366.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Barang Milik Daerah yang Terpelihara						70.251.400,00					-		96.366.200,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	23.493.200,00						2 Unit	43.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		0 Unit	4 Unit	25.366.200,00						4 Unit	25.366.200,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit		14 Unit	19 Unit	21.392.000,00						19 Unit	28.000.000,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.366.200,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			25.366.200,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		0 Unit	4 Unit	25.366.200,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				4 Unit	25.366.200,00	Cabang Dinas Tarakan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						23.493.200,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			43.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	23.493.200,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				2 Unit	43.000.000,00	Cabang Dinas Tarakan
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						21.392.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			28.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit		14 Unit	19 Unit	21.392.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				19 Unit	28.000.000,00	Cabang Dinas Tarakan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				0 Unit	0,00	Cabang Dinas Tarakan
10.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**304.898.600,00**							**523.924.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Satuan Pendidikan dan Kualitas Lulusan						***294.898.600,00***							***523.924.000,00***	
			1.Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18	87.14 %		83.74 %	84.44 %	294.898.600,00						85.24 %	523.924.000,00	
			2.Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi	63.50 %		56.42 %	58.11 %	294.898.600,00						59.85 %	523.924.000,00	
			3.Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI	86 %		78 %	80 %	294.898.600,00						82 %	523.924.000,00	
			4.Persentase Sekolah berkinerja Baik	100 %		100 %	100 %	294.898.600,00						100 %	523.924.000,00	
			5.Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas	80 %		76 %	77 %	294.898.600,00						78 %	523.924.000,00	
			6.Persentase lulusan SLB yang mandiri	45 %		32 %	35 %	294.898.600,00						37 %	523.924.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						152.134.000,00					-		293.924.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Layanan Pendidikan dan Kompetensi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas						152.134.000,00					-		293.924.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	10.000.000,00						15 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	15 Satuan Pendidikan		15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	33.924.000,00						15 Satuan Pendidikan	33.924.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	625 Peserta Didik		625 Peserta Didik	625 Peserta Didik	108.210.000,00						625 Peserta Didik	210.000.000,00	
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						108.210.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			210.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	625 Peserta Didik		625 Peserta Didik	625 Peserta Didik	108.210.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				625 Peserta Didik	210.000.000,00	Cabang Dinas Tarakan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas						33.924.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			33.924.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	15 Satuan Pendidikan		15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	33.924.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				15 Satuan Pendidikan	33.924.000,00	Cabang Dinas Tarakan
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				15 Dokumen	50.000.000,00	Cabang Dinas Tarakan
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						152.764.600,00					-		230.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Layanan Pendidikan dan Kompetensi Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan						152.764.600,00					-		230.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	10.000.000,00						9 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	9 Satuan Pendidikan		9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	26.460.000,00						9 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	210 Peserta Didik		210 Peserta Didik	210 Peserta Didik	116.304.600,00						210 Peserta Didik	200.000.000,00	
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						116.304.600,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			200.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	210 Peserta Didik		210 Peserta Didik	210 Peserta Didik	116.304.600,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				210 Peserta Didik	200.000.000,00	Cabang Dinas Tarakan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan						26.460.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	9 Satuan Pendidikan		9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	26.460.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				9 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Tarakan
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			30.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				9 Dokumen	30.000.000,00	Cabang Dinas Tarakan
		Cabang Dinas Nunukan						**999.998.808,00**							**1.530.041.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**999.998.808,00**							**1.530.041.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**999.998.808,00**							**1.530.041.000,00**	
11.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**571.132.808,00**							**811.500.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah						***571.132.808,00***							***714.500.000,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	571.132.808,00						100 %	714.500.000,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						73.920.000,00					-		90.000.000,00	
		Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						73.920.000,00					-		90.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	73.920.000,00						12 Dokumen	90.000.000,00	
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						73.920.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			90.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	73.920.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Nunukan Selatan || Kelurahan Selisun || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				12 Dokumen	90.000.000,00	Cabang Dinas Nunukan
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						6.000.000,00					-		35.000.000,00	
		Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						6.000.000,00					-		35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	5 Orang	6.000.000,00						5 Orang	35.000.000,00	
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						6.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			35.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	6.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	-				5 Orang	35.000.000,00	Cabang Dinas Nunukan
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						307.643.336,00					-		456.500.000,00	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						307.643.336,00					-		456.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.880.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan		66 Laporan	66 Laporan	250.000.000,00						66 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	46.168.000,00						4 Paket	94.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	8.595.336,00						2 Paket	9.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						46.168.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			94.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	46.168.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				4 Paket	94.000.000,00	Cabang Dinas Nunukan
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.595.336,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			9.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	8.595.336,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				2 Paket	9.500.000,00	Cabang Dinas Nunukan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						2.880.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			3.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.880.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				12 Dokumen	3.000.000,00	Cabang Dinas Nunukan
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						250.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			350.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan		66 Laporan	90 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				66 Laporan	350.000.000,00	Cabang Dinas Nunukan
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						107.460.472,00					-		135.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						107.460.472,00					-		135.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	38.000.000,00						12 Laporan	38.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	66.620.472,00						12 Laporan	94.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.840.000,00						12 Laporan	3.000.000,00	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.840.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				12 Laporan	3.000.000,00	Cabang Dinas Nunukan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						38.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			38.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	38.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				12 Laporan	38.000.000,00	Cabang Dinas Nunukan
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						66.620.472,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			94.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	66.620.472,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				12 Laporan	94.000.000,00	Cabang Dinas Nunukan
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						76.109.000,00					-		95.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		BMD yang terpelihara						76.109.000,00					-		95.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	23.059.000,00						6 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	3.050.000,00						12 Unit	15.000.000,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						23.059.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	4 Unit	23.059.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				6 Unit	30.000.000,00	Cabang Dinas Nunukan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.050.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	3.050.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				12 Unit	15.000.000,00	Cabang Dinas Nunukan
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Nunukan Selatan || Kelurahan Selisun || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				1 Unit	50.000.000,00	Cabang Dinas Nunukan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
12.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**428.866.000,00**							**718.541.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Lulusan Satuan Pendidikan						***403.866.000,00***							***598.541.000,00***	
			1.Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18	77,58 %		75,9 %	76,32 %	403.866.000,00						76,74 %	598.541.000,00	
			2.Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi	43,09 %		40.69 %	41,29 %	403.866.000,00						41,89 %	598.541.000,00	
			3.Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI	73 %		65 %	67 %	403.866.000,00						68 %	598.541.000,00	
			5.Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas	92 %		89 %	89 %	403.866.000,00						90 %	598.541.000,00	
			6.Persentase lulusan SLB yang mandiri	30 %		23 %	25 %	403.866.000,00						27 %	598.541.000,00	
			6.Persentase Sekolah berkinerja Baik	100 %		100 %	100 %	403.866.000,00						100 %	598.541.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						175.000.000,00					-		298.541.000,00	
		Rata-rata Nilai Tes Kompetensi Akademik						175.000.000,00					-		298.541.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	18 Satuan Pendidikan		18 Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	25.000.000,00						18 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	400 Peserta Didik		400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	150.000.000,00						400 Peserta Didik	238.541.000,00	
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						150.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			238.541.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	400 Peserta Didik		400 Peserta Didik	200 Peserta Didik	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				400 Peserta Didik	238.541.000,00	Cabang Dinas Nunukan
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas						25.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			60.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	18 Satuan Pendidikan		18 Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				18 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	Cabang Dinas Nunukan
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						193.866.000,00					-		360.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Layanan Pendidikan dan Kompetensi Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan						193.866.000,00					-		360.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	11 Satuan Pendidikan		11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	25.000.000,00						11 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik		250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	168.866.000,00						250 Peserta Didik	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						168.866.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			300.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik		250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	168.866.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				250 Peserta Didik	300.000.000,00	Cabang Dinas Nunukan
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan						25.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			60.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	11 Satuan Pendidikan		11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				11 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	Cabang Dinas Nunukan
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						60.000.000,00					-		60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Layanan Pendidikan dan Kompetensi Peserta Didik Sekolah Luar Biasa						60.000.000,00					-		60.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20 Peserta Didik		20 Peserta Didik	20 Peserta Didik	60.000.000,00						20 Peserta Didik	60.000.000,00	
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						60.000.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			60.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20 Peserta Didik		20 Peserta Didik	20 Peserta Didik	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				20 Peserta Didik	60.000.000,00	Cabang Dinas Nunukan
		Cabang Dinas KTT-Malinau						**999.999.736,00**							**1.426.316.106,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**999.999.736,00**							**1.426.316.106,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**999.999.736,00**							**1.426.316.106,00**	
13.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**737.299.736,00**							**956.316.106,00**	
		Terwujudnya Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang optimal						***737.299.736,00***							***836.316.106,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	737.299.736,00						100 %	836.316.106,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						89.000.000,00					-		100.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						89.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	89.000.000,00						12 Dokumen	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						89.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			100.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	89.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				12 Dokumen	100.000.000,00	Cabang Dinas KTT-Malinau
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						15.000.000,00					-		45.000.000,00	
		Persentase Penyediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						15.000.000,00					-		45.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		4 Orang	4 Orang	15.000.000,00						4 Orang	45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						15.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			45.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		4 Orang	3 Orang	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				4 Orang	45.000.000,00	Cabang Dinas KTT-Malinau
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						379.529.736,00					-		526.316.106,00	
		Persentase Penyedia Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						379.529.736,00					-		526.316.106,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	275.000.000,00						60 Laporan	362.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	60.529.736,00						5 Paket	79.316.106,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	4.000.000,00						3 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00						4 Paket	65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						40.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			65.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	3 Paket	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				4 Paket	65.000.000,00	Cabang Dinas KTT-Malinau
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						60.529.736,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			79.316.106,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	7 Paket	60.529.736,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				5 Paket	79.316.106,00	Cabang Dinas KTT-Malinau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			20.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	4.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				3 Paket	20.000.000,00	Cabang Dinas KTT-Malinau
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						275.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			362.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		60 Laporan	0 Laporan	275.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				60 Laporan	362.000.000,00	Cabang Dinas KTT-Malinau
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						126.770.000,00					-		141.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						126.770.000,00					-		141.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.100.000,00						12 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.600.000,00						12 Laporan	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.070.000,00						12 Laporan	6.000.000,00	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.070.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			6.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.070.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				12 Laporan	6.000.000,00	Cabang Dinas KTT-Malinau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						21.100.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.100.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				12 Laporan	25.000.000,00	Cabang Dinas KTT-Malinau
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						100.600.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			110.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.600.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				12 Laporan	110.000.000,00	Cabang Dinas KTT-Malinau
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						127.000.000,00					-		144.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						127.000.000,00					-		144.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	95.000.000,00						0 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00						1 Unit	24.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	12.000.000,00						4 Unit	20.000.000,00	
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						20.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			24.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				1 Unit	24.000.000,00	Cabang Dinas KTT-Malinau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	12.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				4 Unit	20.000.000,00	Cabang Dinas KTT-Malinau
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						95.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	95.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				0 Unit	100.000.000,00	Cabang Dinas KTT-Malinau
14.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**262.700.000,00**							**470.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Lulusan Satuan Pendidikan						***252.700.000,00***							***470.000.000,00***	
			1.Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18	87 %		83 %	84 %	252.700.000,00						85 %	470.000.000,00	
			2.Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi	62 %		55 %	57 %	252.700.000,00						58 %	470.000.000,00	
			3.Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI	82 %		76 %	77 %	252.700.000,00						79 %	470.000.000,00	
			4.Persentase lulusan SLB yang mandiri	40 %		33 %	35 %	252.700.000,00						37 %	470.000.000,00	
			5.Persentase sekolah terakreditasi minimal B	90 %		84 %	85 %	252.700.000,00						87 %	470.000.000,00	
			6.Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas	80 %		75 %	76 %	252.700.000,00						77 %	470.000.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						147.000.000,00					-		260.000.000,00	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademi						147.000.000,00					-		260.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00						10 Dokumen	45.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	32.000.000,00						1 Kegiatan	35.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	40 Peserta Didik		40 Peserta Didik	40 Peserta Didik	95.000.000,00						40 Peserta Didik	180.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						95.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			180.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	40 Peserta Didik		40 Peserta Didik	40 Peserta Didik	95.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				40 Peserta Didik	180.000.000,00	Cabang Dinas KTT-Malinau
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						20.000.000,00			-	-			45.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen		10 Dokumen	7 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				10 Dokumen	45.000.000,00	Cabang Dinas KTT-Malinau
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						32.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan		1 Kegiatan	2 Kegiatan	32.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				1 Kegiatan	35.000.000,00	Cabang Dinas KTT-Malinau
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						54.000.000,00					-		122.000.000,00	
		Tingkat implementasi hasil pembinaan manajemen dan kelembagaan di sekolah						54.000.000,00					-		122.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00						6 Dokumen	17.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	8.000.000,00						2 Kegiatan	30.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25 Peserta Didik		25 Peserta Didik	25 Peserta Didik	36.000.000,00						25 Peserta Didik	75.000.000,00	
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						36.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			75.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25 Peserta Didik		25 Peserta Didik	25 Peserta Didik	36.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				25 Peserta Didik	75.000.000,00	Cabang Dinas KTT-Malinau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			17.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6 Dokumen		6 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				6 Dokumen	17.000.000,00	Cabang Dinas KTT-Malinau
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						8.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			30.000.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	8.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				2 Kegiatan	30.000.000,00	Cabang Dinas KTT-Malinau
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						61.700.000,00					-		88.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tingkat implementasi hasil pembinaan manajemen dan kelembagaan di sekolah						61.700.000,00					-		88.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00						4 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	6.700.000,00						2 Kegiatan	18.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	16 Peserta Didik		16 Peserta Didik	16 Peserta Didik	45.000.000,00						16 Peserta Didik	60.000.000,00	
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						45.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			60.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	16 Peserta Didik		16 Peserta Didik	16 Peserta Didik	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				16 Peserta Didik	60.000.000,00	Cabang Dinas KTT-Malinau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				4 Dokumen	10.000.000,00	Cabang Dinas KTT-Malinau
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						6.700.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			18.000.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	6.700.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				2 Kegiatan	18.000.000,00	Cabang Dinas KTT-Malinau
		UPT Taman Budaya						**999.999.066,00**							**3.366.166.832,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**486.279.066,00**							**1.330.765.062,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**486.279.066,00**							**1.330.765.062,00**	
15.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**486.279.066,00**							**1.330.765.062,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang UPT Taman Budaya						***486.279.066,00***							***1.330.765.062,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	486.279.066,00						100 %	1.330.765.062,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						66.000.000,00					-		120.000.000,00	
		Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						66.000.000,00					-		120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	66.000.000,00						12 Dokumen	120.000.000,00	
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						66.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			120.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	66.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				12 Dokumen	120.000.000,00	UPT Taman Budaya
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						7.000.000,00					-		50.000.000,00	
		Terpenuhinya kelengkapan dokumen administrasi kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						7.000.000,00					-		50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		1 Orang	3 Orang	7.000.000,00						3 Orang	50.000.000,00	
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						7.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		1 Orang	1 Orang	7.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				3 Orang	50.000.000,00	UPT Taman Budaya
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						155.711.700,00					-		732.765.062,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						155.711.700,00					-		732.765.062,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00						12 Laporan	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	23.416.700,00						5 Paket	200.765.062,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.295.000,00						1 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	0,00						6 Paket	117.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			117.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				6 Paket	117.000.000,00	UPT Taman Budaya
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						23.416.700,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			200.765.062,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	23.416.700,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				5 Paket	200.765.062,00	UPT Taman Budaya
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.295.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.295.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				1 Paket	15.000.000,00	UPT Taman Budaya

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						130.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			400.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				12 Laporan	400.000.000,00	UPT Taman Budaya
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						139.516.416,00					-		191.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						139.516.416,00					-		191.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.560.000,00						12 Laporan	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	118.321.416,00						12 Laporan	145.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	635.000,00						2 Laporan	6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						635.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			6.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	635.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				2 Laporan	6.000.000,00	UPT Taman Budaya
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20.560.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.560.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				12 Laporan	40.000.000,00	UPT Taman Budaya
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						118.321.416,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			145.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	118.321.416,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				12 Laporan	145.000.000,00	UPT Taman Budaya
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						118.050.950,00					-		237.000.000,00	
		BMD yang terpelihara						118.050.950,00					-		237.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	77.000.000,00						1 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.460.950,00						1 Unit	2.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	38.590.000,00						12 Unit	85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						2.460.950,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			2.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	2 Unit	2.460.950,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				1 Unit	2.000.000,00	UPT Taman Budaya
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						38.590.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	10 Unit	38.590.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				12 Unit	85.000.000,00	UPT Taman Budaya
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						77.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	77.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					1 Unit	150.000.000,00	UPT Taman Budaya
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**513.720.000,00**							**2.035.401.770,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**513.720.000,00**							**2.035.401.770,00**	
16.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**513.720.000,00**							**2.035.401.770,00**	
		Meningkatnya Tradisi Budaya Daerah yang dikembangkan						***513.720.000,00***							***2.035.401.770,00***	
			1.Persentase pelaku seni budaya yang terfasilitasi	90 %		55 %	60 %	513.720.000,00						70 %	2.035.401.770,00	
		Persentase kegiatan budaya daerah yang diselenggarakan						513.720.000,00					-		2.035.401.770,00	
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	80 Orang		60 Orang	60 Orang	71.450.000,00						60 Orang	350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						71.450.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			350.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	80 Orang		60 Orang	25 Orang	71.450.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				60 Orang	350.000.000,00	UPT Taman Budaya
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						513.720.000,00					-		2.035.401.770,00	
		Persentase kegiatan budaya daerah yang diselenggarakan						513.720.000,00					-		2.035.401.770,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	-		-	-	442.270.000,00						-	1.685.401.770,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.02.1.01.0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan						442.270.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			1.685.401.770,00	
		Terlaksananya Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	-		-	3 Objek	442.270.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				-	1.685.401.770,00	UPT Taman Budaya
		UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan						**1.000.000.000,00**							**3.394.314.990,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.000.000.000,00**							**3.394.314.990,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.000.000.000,00**							**3.394.314.990,00**	
17.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**655.607.300,00**							**2.044.314.990,00**	
		Meningkatnya pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi						***655.607.300,00***							***1.479.314.990,00***	
			1.Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %		100 %	100 %	655.607.300,00						100 %	1.479.314.990,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						85.560.000,00					-		85.560.000,00	
		Persentase penyediaan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						85.560.000,00					-		85.560.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	85.560.000,00						12 Dokumen	85.560.000,00	
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						85.560.000,00			-	-			85.560.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	85.560.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	85.560.000,00	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						29.743.994,00					-		100.000.000,00	
		Persentase penyediaan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						29.743.994,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang		5 Orang	6 Orang	29.743.994,00						6 Orang	100.000.000,00	
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						29.743.994,00			-	-			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang		5 Orang	5 Orang	29.743.994,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Orang	100.000.000,00	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						160.256.900,00					-		1.065.000.000,00	
		Persentase penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						160.256.900,00					-		1.065.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan		30 Laporan	70 Laporan	117.000.000,00						70 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	10.221.700,00						6 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		3 Paket	2 Paket	2.935.200,00						2 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		2 Paket	5 Paket	30.100.000,00						5 Paket	500.000.000,00	
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.100.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		2 Paket	3 Paket	30.100.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Paket	500.000.000,00	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.221.700,00			-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	10.221.700,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Paket	50.000.000,00	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.935.200,00			-	-			15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		3 Paket	2 Paket	2.935.200,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	15.000.000,00	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						117.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan		30 Laporan	25 Laporan	117.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70 Laporan	500.000.000,00	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						24.800.000,00					-		50.000.000,00	
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						24.800.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	24.800.000,00						2 Paket	50.000.000,00	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						24.800.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	24.800.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	50.000.000,00	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						150.328.406,00					-		496.954.990,00	
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						150.328.406,00					-		496.954.990,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	42.454.990,00						12 Laporan	42.454.990,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	103.873.416,00						12 Laporan	450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00						1 Laporan	4.500.000,00	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.000.000,00			-	-			4.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	4.500.000,00	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						42.454.990,00			-	-			42.454.990,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	42.454.990,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	42.454.990,00	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						103.873.416,00			-	-			450.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	103.873.416,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	450.000.000,00	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						204.918.000,00					-		246.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di pelihara						204.918.000,00					-		246.800.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	179.800.000,00						1 Unit	191.800.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		4 Unit	10 Unit	4.150.000,00						10 Unit	15.000.000,00	
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.150.000,00			-	-			15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		4 Unit	11 Unit	4.150.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	15.000.000,00	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						179.800.000,00			-	-			191.800.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	179.800.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	191.800.000,00	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di pelihara						204.918.000,00					-		246.800.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	20.968.000,00						-	40.000.000,00	
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						20.968.000,00			-	-			40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	3 Unit	20.968.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	40.000.000,00	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
18.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**344.392.700,00**							**1.350.000.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Satuan Pendidikan						***218.643.600,00***							***570.000.000,00***	
			1.Persentase sekolah terakreditasi minimal B	100 %		93 %	95 %	218.643.600,00						97 %	570.000.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						159.128.700,00					-		930.000.000,00	
		Meningkatnya Manajemen Digital Berbasis Data						159.128.700,00					-		930.000.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		5 Konten Digital	5 Konten Digital	92.369.500,00						5 Konten Digital	210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	300 Orang		250 Orang	300 Orang	33.379.600,00						300 Orang	360.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang		50 Orang	300 Orang	33.379.600,00						300 Orang	360.000.000,00	
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						33.379.600,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			360.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	300 Orang		250 Orang	35 Orang	33.379.600,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300 Orang	360.000.000,00	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						92.369.500,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			210.000.000,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		5 Konten Digital	5 Konten Digital	92.369.500,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Konten Digital	210.000.000,00	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						33.379.600,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			360.000.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang		50 Orang	35 Orang	33.379.600,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300 Orang	360.000.000,00	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						92.369.500,00					-		210.000.000,00	
		Meningkatnya Manajemen Digital Berbasis Data						92.369.500,00					-		210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		5 Konten Digital	5 Konten Digital	92.369.500,00						5 Konten Digital	210.000.000,00	
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						92.369.500,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			210.000.000,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		5 Konten Digital	5 Konten Digital	92.369.500,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Konten Digital	210.000.000,00	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						92.894.500,00					-		210.000.000,00	
		Meningkatnya Manajemen Digital Berbasis Data						92.894.500,00					-		210.000.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		5 Konten Digital	5 Konten Digital	92.894.500,00						5 Konten Digital	210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						92.894.500,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			210.000.000,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		5 Konten Digital	5 Konten Digital	92.894.500,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				5 Konten Digital	210.000.000,00	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
		Dinas Kesehatan						**142.020.314.445,50**							**203.466.632.777,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**142.020.314.445,50**							**203.466.632.777,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**142.020.314.445,50**							**203.466.632.777,00**	
19.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**130.469.952.076,00**							**144.864.928.023,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah						***130.349.952.076,00***							***144.214.928.023,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	130.349.952.076,00						100 %	144.214.928.023,00	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					-		380.000.000,00	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi						50.000.000,00					-		380.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	380.000.000,00	
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00			-	-			380.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	380.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						128.221.141.220,00					-		135.534.928.023,00	
		Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						128.221.141.220,00					-		135.534.928.023,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	850 Dokumen		750 Dokumen	775 Dokumen	650.000.000,00						800 Dokumen	2.250.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan		80 Orang/ Bulan	85 Orang/ Bulan	127.571.141.220,00						90 Orang/ Bulan	133.284.928.023,00	
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						127.571.141.220,00			-	-			133.284.928.023,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan		80 Orang/ Bulan	940 Orang/ Bulan	127.571.141.220,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				90 Orang/ Bulan	133.284.928.023,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						650.000.000,00			-	-			2.250.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	850 Dokumen		750 Dokumen	700 Dokumen	650.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				800 Dokumen	2.250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						345.000.000,00					-		700.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						345.000.000,00					-		700.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket		15 Paket	20 Paket	300.000.000,00						25 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket		15 Paket	20 Paket	5.000.000,00						25 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	55 Paket		35 Paket	40 Paket	10.000.000,00						45 Paket	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket		1 Paket	15 Paket	30.000.000,00						20 Paket	100.000.000,00	
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00			-	-			400.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	55 Paket		35 Paket	10 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				45 Paket	400.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.000.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Paket	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						300.000.000,00			-	-			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket		15 Paket	10 Paket	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Paket	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket		15 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Paket	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.633.810.856,00					-		6.000.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						1.633.810.856,00					-		6.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	620.000.000,00						1 Laporan	2.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.013.810.856,00						12 Laporan	3.500.000.000,00	
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						620.000.000,00			-	-			2.500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	620.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	2.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.013.810.856,00			-	-			3.500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.013.810.856,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	3.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						220.000.000,00					-		2.250.000.000,00	
		BMD yang terpelihara						220.000.000,00					-		2.250.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	10.000.000,00						4 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit		32 Unit	35 Unit	100.000.000,00						37 Unit	450.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	45 Unit		32 Unit	35 Unit	100.000.000,00						37 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit		50 Unit	50 Unit	10.000.000,00						50 Unit	450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100.000.000,00			-	-			350.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	45 Unit		32 Unit	35 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				37 Unit	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						100.000.000,00			-	-			450.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit		32 Unit	35 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				37 Unit	450.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00			-	-			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	2 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.000.000,00			-	-			450.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit		50 Unit	5 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Unit	450.000.000,00	Dinas Kesehatan
20.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**10.785.650.527,50**							**48.520.757.850,00**	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatanyang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***10.676.303.773,50***							***46.720.757.850,00***	
			10.Penemuan Kasus TBC	90 %		90 %	90 %	10.676.303.773,50						90 %	46.720.757.850,00	
			11.Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	3 Kab/Kota		1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	10.676.303.773,50						2 Kab/Kota	46.720.757.850,00	
			12.Persentase kab/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	80 %		30 %	40 %	10.676.303.773,50						60 %	46.720.757.850,00	
			13.Presentase Kab/Kota yang mencapai SPM Bidang Kesehatan Jenis Pelayanan Dasar Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 %		100 %	100 %	10.676.303.773,50						100 %	46.720.757.850,00	
			14.Presentase Kab/Kota yang mencapai SPM Bidang Kesehatan Jenis Pelayanan Dasar Kesehatan Keluarga	100 %		100 %	100 %	10.676.303.773,50						100 %	46.720.757.850,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			15.Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja	65 %		35 %	45 %	10.676.303.773,50						55 %	46.720.757.850,00	
			16.Persentase Puskesmas dan RS Pemerintah yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar	90 %		80 %	85 %	10.676.303.773,50						87 %	46.720.757.850,00	
			17.Persentase Laboratorium Kesmas Tingkat 2-3 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya	100 %		70 %	90 %	10.676.303.773,50						95 %	46.720.757.850,00	
			18.Persentase kab/kota yang mencapai target kekebalan kelompok	80 %		40 %	40 %	10.676.303.773,50						60 %	46.720.757.850,00	
			19.Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	80 Persentase		46 Persentase	55 Persentase	10.676.303.773,50						61 Persentase	46.720.757.850,00	
			1.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %		1.4 %	1.4 %	10.676.303.773,50						1.4 %	46.720.757.850,00	
			2.Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	4 Kabupaten/ Kota		2 Kabupaten/ Kota	3 Kabupaten/ Kota	10.676.303.773,50						3 Kabupaten/ Kota	46.720.757.850,00	
			3.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %		23.4 %	23.4 %	10.676.303.773,50						23.4 %	46.720.757.850,00	
			4.Proporsi kab/kot dengan fasilitas Kesehatan sesuai standar	95 %		87 %	89 %	10.676.303.773,50						91 %	46.720.757.850,00	
			5.Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	100 Kabupaten/Kota		80 Kabupaten/Kota	80 Kabupaten/Kota	10.676.303.773,50						80 Kabupaten/Kota	46.720.757.850,00	
			6.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	75 %		55 %	60 %	10.676.303.773,50						65 %	46.720.757.850,00	
			7.Proporsi fasilitas kesehatan dengan perbekalan Kesehatan sesuai standar	95 %		86 %	89 %	10.676.303.773,50						92 %	46.720.757.850,00	
			8.Persentase lansia mandiri	85 %		77 %	79 %	10.676.303.773,50						81 %	46.720.757.850,00	
			9.Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	7.4 Persentase		11.4 Persentase	10.4 Persentase	10.676.303.773,50						9.4 Persentase	46.720.757.850,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						2.403.113.682,61					-		8.675.757.850,00	
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Sesuai Standard						2.403.113.682,61					-		8.675.757.850,00	
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	542.817.310,75						5 Dokumen	930.775.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	70 Unit		4 Unit	70 Unit	150.000.000,00						70 Unit	1.825.101.100,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	1.448.882.065,00						3 Paket	2.919.881.250,00	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	25 Layanan		25 Layanan	25 Layanan	261.414.306,86						25 Layanan	3.000.000.000,00	
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)						261.414.306,86			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			3.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	25 Layanan		25 Layanan	4 Layanan	261.414.306,86	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				25 Layanan	3.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						150.000.000,00			-	-			1.825.101.100,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	70 Unit		4 Unit	65 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				70 Unit	1.825.101.100,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						542.817.310,75			-	-			930.775.500,00	
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	542.817.310,75	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				5 Dokumen	930.775.500,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						1.448.882.065,00			-	-			2.919.881.250,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	1.448.882.065,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				3 Paket	2.919.881.250,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Yang Sesuai Standard						8.218.373.844,89					-		38.845.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.434.500.000,00						1 Dokumen	25.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	69.300.000,00						4 Dokumen	700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	414 Dokumen		414 Dokumen	414 Dokumen	17.000.000,00						414 Dokumen	240.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	770.212.973,13						5 Dokumen	900.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00						1 Dokumen	750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	29.709.000,00						4 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	39.600.000,00						5 Dokumen	450.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	64.932.470,00						5 Dokumen	1.200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	77.368.000,00						1 Dokumen	600.000.000,00	
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	47.000.000,00						5 Paket	500.000.000,00	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	75.000.000,00						1000 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	75.020.137,09						1000 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	0 Orang		0 Orang	0 Orang	54.673.377,00						0 Orang	1.370.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						75.020.137,09			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	75.020.137,09	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				1000 Orang	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						75.000.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				1000 Orang	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak						770.212.973,13			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			900.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	770.212.973,13	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				5 Dokumen	900.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif						39.600.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			450.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	39.600.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				5 Dokumen	450.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut						29.709.000,00			-	-			350.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	4 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	29.709.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				4 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						69.300.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	69.300.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				4 Dokumen	700.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						80.000.000,00			-	-			750.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				1 Dokumen	750.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						64.932.470,00			-	-			1.200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen		5 Dokumen	2 Dokumen	64.932.470,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				5 Dokumen	1.200.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						17.000.000,00			-	-			240.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	414 Dokumen		414 Dokumen	414 Dokumen	17.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				414 Dokumen	240.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA						54.673.377,00			-	-			1.370.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	0 Orang		0 Orang	100 Orang	54.673.377,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				0 Orang	1.370.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						6.434.500.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			25.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.434.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				1 Dokumen	25.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						77.368.000,00			-	-			600.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	77.368.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				1 Dokumen	600.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota						50.000.000,00			-	-			350.000.000,00	
		Terlaksananya Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				1 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional						47.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	47.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				5 Paket	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						164.163.000,00					-		1.000.000.000,00	
		Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Meliliki Layanan Sesuai INM						164.163.000,00					-		1.000.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	45 Unit		40 Unit	40 Unit	164.163.000,00						45 Unit	1.000.000.000,00	
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						164.163.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	45 Unit		40 Unit	40 Unit	164.163.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				45 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						8.218.373.844,89					-		38.845.000.000,00	
		Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Yang Sesuai Standard						8.218.373.844,89					-		38.845.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	-		-	-	54.673.377,00						-	480.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	134.020.133,67						-	2.322.750.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	54.673.377,00						-	1.982.250.000,00	
			Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Kesehatan penyakit Tuberkulosis	-		-	-	30.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	60.691.000,00						-	450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.1.02.0032	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						134.020.133,67			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			2.322.750.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	134.020.133,67	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				-	2.322.750.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0033	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit Tuberkulosis						30.000.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit Tuberkulosis	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Kesehatan penyakit Tuberkulosis	-		-	5 Kabupaten/ Kota	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				-	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						54.673.377,00			-	-			480.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	-		-	1 Dokumen	54.673.377,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				-	480.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0036	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						60.691.000,00			-	-			450.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	60.691.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				-	450.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						54.673.377,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			1.982.250.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	54.673.377,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				-	1.982.250.000,00	Dinas Kesehatan
21.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**508.204.312,00**							**7.415.539.825,00**	
		Terpenuhinya SDM Kesehatan yang merata dan berkualitas						***508.204.312,00***							***7.415.539.825,00***	
			1.Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap populasi	5.05 %		5.03 %	5.04 %	508.204.312,00						5.04 %	7.415.539.825,00	
			2.Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	48 %		15 %	20 %	508.204.312,00						28 %	7.415.539.825,00	
			3.Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	50 Persentase		42 Persentase	44 Persentase	508.204.312,00						46 Persentase	7.415.539.825,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						508.204.312,00					-		7.415.539.825,00	
		Persentase named nakes yang ditingkatkan mutunya						508.204.312,00					-		7.415.539.825,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	90.000.000,00						2 Dokumen	415.539.825,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	150 Orang		150 Orang	150 Orang	418.204.312,00						150 Orang	7.000.000.000,00	
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						418.204.312,00			-	-			7.000.000.000,00	
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	150 Orang		150 Orang	40 Orang	418.204.312,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				150 Orang	7.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						90.000.000,00			-	-			415.539.825,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen		2 Dokumen	20 Dokumen	90.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				2 Dokumen	415.539.825,00	Dinas Kesehatan
22.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**40.000.000,00**							**290.771.681,00**	
		Meningkatnya efektifitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di pemerintah daerah						***40.000.000,00***							***290.771.681,00***	
			3.Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	100 %		100 %	100 %	40.000.000,00						100 %	290.771.681,00	
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)						40.000.000,00					-		290.771.681,00	
		Persentase permohonan PBF yang diproses sesuai standar waktu layanan						40.000.000,00					-		290.771.681,00	
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	3 Sarana		3 Sarana	3 Sarana	40.000.000,00						3 Sarana	290.771.681,00	
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK						40.000.000,00			-	-			290.771.681,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	3 Sarana		3 Sarana	3 Sarana	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				3 Sarana	290.771.681,00	Dinas Kesehatan
23.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**216.507.530,00**							**2.374.635.398,00**	
		Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat						***216.507.530,00***							***2.374.635.398,00***	
			1.Persentase kabupaten/kota yang membudayakan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)	100 %		100 %	100 %	216.507.530,00						100 %	2.374.635.398,00	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						35.522.370,00					-		800.000.000,00	
		Kab/kota minimal 3 perjanjian kerjasama (PKS) dengan mitra sekolah yang memenuhi stratifikasi standar sekolah Kampus Sehat						35.522.370,00					-		800.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	35.522.370,00						5 Dokumen	800.000.000,00	
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						35.522.370,00			-	-			800.000.000,00	
		Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	35.522.370,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				5 Dokumen	800.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi						127.595.160,00					-		750.000.000,00	
		Kabupaten/kota yang melakukan kampanye kesehatan (Pembudayaan Germas); Kab/kota minimal 50 % memiliki pangkalan SBH Di Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat						127.595.160,00					-		750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	127.595.160,00						5 Dokumen	750.000.000,00	
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						127.595.160,00			-	-			750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	5 Dokumen		5 Dokumen	2 Dokumen	127.595.160,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				5 Dokumen	750.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi						53.390.000,00					-		824.635.398,00	
		Kabupaten/kota dengan minimal 75% posyandu aktif kader posyandu strata madya.						53.390.000,00					-		824.635.398,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	53.390.000,00						5 Dokumen	824.635.398,00	
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM						53.390.000,00			-	-			824.635.398,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	53.390.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				5 Dokumen	824.635.398,00	Dinas Kesehatan
		Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK						**221.209.624.068,00**							**392.393.290.946,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**221.209.624.068,00**							**392.393.290.946,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**221.209.624.068,00**							**392.393.290.946,00**	
24.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**196.296.060.000,00**							**334.119.260.852,00**	
		Terwujudnya program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang Eketif dan Efisien						***196.296.060.000,00***							***324.629.260.852,00***	
			-1.CAPAIAN NILAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL	98 %		87 %	89 %	196.296.060.000,00						92 %	324.629.260.852,00	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00					-		200.000.000,00	
		Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja						0,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	0,00						1 Data	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	0,00						8 Dokumen	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	0,00						6 Laporan	80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			80.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Dokumen	80.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			80.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Laporan	80.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	0 Data	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Data	20.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			20.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	20.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						519.220.000,00					-		117.232.260.852,00	
		Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah						519.220.000,00					-		117.232.260.852,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	519.220.000,00						1 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	900 Orang/ Bulan		870 Orang/ Bulan	875 Orang/ Bulan	0,00						880 Orang/ Bulan	116.522.260.852,00	
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			116.522.260.852,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	900 Orang/ Bulan		870 Orang/ Bulan	0 Orang/ Bulan	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				880 Orang/ Bulan	116.522.260.852,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						519.220.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			500.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	519.220.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	500.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	50.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	50.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			50.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	50.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			60.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	60.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						0,00					-		40.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0,00					-		40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
	1.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	20.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			20.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	20.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						0,00					-		75.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Administrasi Pendapatan Perangkat Daerah						0,00					-		75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	25.000.000,00	
	1.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			25.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	25.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	25.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	25.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		4.050.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		4.050.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang		50 Orang	50 Orang	0,00						200 Orang	1.000.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						200 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	350.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	250 Orang		250 Orang	250 Orang	0,00						250 Orang	2.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00						5 Unit	100.000.000,00	
	1.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit		5 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	100.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			350.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	350.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	50.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	25.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			25.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	25.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	250 Orang		250 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250 Orang	2.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			500.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang		100 Orang	200 Orang	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200 Orang	500.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang		50 Orang	200 Orang	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200 Orang	1.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						0,00					-		1.100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						0,00					-		1.100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	100.000.000,00	
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			50.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	50.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	100.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	100.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	100.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	50.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	50.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	100.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	500.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	50.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					-		2.500.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang sesuai kebutuhan						0,00					-		2.500.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	500.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						4 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						2 Unit	1.000.000.000,00	
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			1.000.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	1.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			500.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	500.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	1.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						9.026.840.000,00					-		18.922.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						9.026.840.000,00					-		18.922.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.026.840.000,00						1 Laporan	11.922.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	7.000.000.000,00	
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.026.840.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			11.922.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	9.026.840.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	11.922.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00			-	-			7.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	7.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.500.000.000,00					-		10.000.000.000,00	
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						6.500.000.000,00					-		10.000.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.000.000.000,00						2 Unit	5.000.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	5.500.000.000,00						5 Unit	5.000.000.000,00	
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.500.000.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			5.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	4 Unit	5.500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	5.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.000.000.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			5.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	5.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						180.250.000.000,00					-		180.000.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Peningkatan Pelayanan Kinerja BLUD						180.250.000.000,00					-		180.000.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	180.250.000.000,00						1 Unit Kerja	180.000.000.000,00	
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						180.250.000.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			180.000.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	180.250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit Kerja	180.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
25.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**13.073.564.068,00**							**40.074.030.094,00**	
		Terwujudnya Pemenuhan Upaya Kesehatan UKM dan UKP yang Efektif dan Efisien						***13.073.564.068,00***							***39.074.030.094,00***	
			-1.CAPAIAN NILAI AKREDITASI	90 Angka		86 Angka	87 Angka	13.073.564.068,00						88 Angka	39.074.030.094,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						13.073.564.068,00					-		37.524.030.094,00	
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar						13.073.564.068,00					-		37.524.030.094,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	45 Unit		10 Unit	30 Unit	1.573.564.068,00						30 Unit	28.724.030.094,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	15 Unit		2 Unit	3 Unit	5.500.000.000,00						8 Unit	6.800.000.000,00	
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3 Unit		3 Unit	3 Unit	6.000.000.000,00						3 Unit	2.000.000.000,00	
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						1.573.564.068,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			28.724.030.094,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	45 Unit		10 Unit	3 Unit	1.573.564.068,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Unit	28.724.030.094,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						5.500.000.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			6.800.000.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	15 Unit		2 Unit	5 Unit	5.500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Unit	6.800.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit						6.000.000.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3 Unit		3 Unit	2 Unit	6.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	2.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						0,00					-		1.050.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Kesehatan Sesuai Standar						0,00					-		1.050.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	500.000.000,00	
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	500.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	50.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			500.000.000,00	
		Tersedianya dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	500.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						0,00					-		1.500.000.000,00	
		Tersedianya Izin RS Kelas B yang tepat waktu						0,00					-		1.500.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	500.000.000,00	
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			500.000.000,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	500.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	1.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
26.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**11.840.000.000,00**							**18.200.000.000,00**	
		Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan yang sesuai Standar						***11.840.000.000,00***							***18.200.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			-1.CAPAIAN NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	87.12 Angka		84.44 Angka	85.20 Angka	11.840.000.000,00						85.96 Angka	18.200.000.000,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						9.840.000.000,00					-		11.000.000.000,00	
		Tersedianya Kebutuhan SDM Kesehatan yang sesuai standar						9.840.000.000,00					-		11.000.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	55 Orang		45 Orang	47 Orang	9.840.000.000,00						50 Orang	11.000.000.000,00	
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan						9.840.000.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			11.000.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	55 Orang		45 Orang	47 Orang	9.840.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	11.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						2.000.000.000,00					-		7.200.000.000,00	
		Terselenggaranya kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan sesuai standar						2.000.000.000,00					-		7.200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	500 Orang		170 Orang	390 Orang	2.000.000.000,00						420 Orang	7.000.000.000,00	
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						2.000.000.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			7.000.000.000,00	
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	500 Orang		170 Orang	390 Orang	2.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				420 Orang	7.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						0,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	200.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman						**137.989.869.381,16**							**551.866.135.445,15**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**135.989.869.381,16**							**551.189.206.242,15**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**125.989.869.381,16**							**522.907.988.076,15**	
27.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**29.000.000.000,00**							**35.152.000.000,00**	
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM						***26.920.000.000,00***							***34.652.000.000,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	26.920.000.000,00						100 %	34.652.000.000,00	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						95.000.000,00					Dinas PUPRPERKIM		265.000.000,00	
		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun						95.000.000,00					Dinas PUPRPERKIM		265.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	50.000.000,00						1 Data	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00						2 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15.000.000,00			-	-			15.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.000.000,00			-	-			200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Data	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						24.000.000.000,00					Dinas PUPRPERKIM		25.700.000.000,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						24.000.000.000,00					Dinas PUPRPERKIM		25.700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen		40 Dokumen	40 Dokumen	2.000.000.000,00						40 Dokumen	3.700.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/ Bulan		197 Orang/ Bulan	197 Orang/ Bulan	22.000.000.000,00						197 Orang/ Bulan	22.000.000.000,00	
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						22.000.000.000,00			-	-			22.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/ Bulan		197 Orang/ Bulan	197 Orang/ Bulan	22.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				197 Orang/ Bulan	22.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						2.000.000.000,00			-	-			3.700.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen		40 Dokumen	20 Dokumen	2.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Dokumen	3.700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.000.000,00					Dinas PUPRPERKIM		150.000.000,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						50.000.000,00					Dinas PUPRPERKIM		150.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang		35 Orang	40 Orang	50.000.000,00						40 Orang	150.000.000,00	
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00			-	-			150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang		35 Orang	15 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Orang	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.265.000.000,00					Dinas PUPRPERKIM		2.560.000.000,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.265.000.000,00					Dinas PUPRPERKIM		2.560.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00						12 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	685.000.000,00						4 Laporan	1.200.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	200.000.000,00						4 Paket	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	200.000.000,00						6 Paket	380.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		4 Paket	4 Paket	50.000.000,00						4 Paket	250.000.000,00	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						30.000.000,00			-	-			30.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	30.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00			-	-			250.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		4 Paket	2 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						200.000.000,00			-	-			400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						200.000.000,00			-	-			380.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Paket	380.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						50.000.000,00			-	-			150.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						50.000.000,00			-	-			150.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						685.000.000,00			-	-			1.200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	685.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	1.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.440.000.000,00					Dinas PUPRPERKIM		1.777.000.000,00	
		Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan						1.440.000.000,00					Dinas PUPRPERKIM		1.777.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	1.400.000.000,00						36 Laporan	1.735.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00						4 Laporan	42.000.000,00	
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						40.000.000,00			-	-			42.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	42.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.400.000.000,00			-	-			1.735.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	1.400.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				36 Laporan	1.735.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.150.000.000,00					Dinas PUPRPERKIM		4.700.000.000,00	
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya						2.150.000.000,00					Dinas PUPRPERKIM		4.700.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	1.400.000.000,00						4 Unit	2.200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	40 Unit	500.000.000,00						40 Unit	2.000.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	200.000.000,00						8 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit		47 Unit	47 Unit	50.000.000,00						47 Unit	200.000.000,00	
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						200.000.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Unit	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						500.000.000,00			-	-			2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	40 Unit	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Unit	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit		47 Unit	4 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				47 Unit	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.400.000.000,00			-	-			2.200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	2 Unit	1.400.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	2.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
28.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**9.730.000.000,00**							**115.435.588.691,85**	
		Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air						***6.230.000.000,00***							***113.285.588.691,85***	
			1.Persentase kapasitas layanan infrastruktur air baku wilayah sungai kewenangan provinsi	93.44 %		91.07 %	91.72 %	6.230.000.000,00						92.33 %	113.285.588.691,85	
			1.Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir Kewenangan Provinsi	45 %		37 %	39 %	6.230.000.000,00						41 %	113.285.588.691,85	
			3.Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi	64 %		60 %	61 %	6.230.000.000,00						62 %	113.285.588.691,85	
			4. Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	51.59 %		33.37 %	37.92 %	6.230.000.000,00						42.48 %	113.285.588.691,85	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						7.980.000.000,00					Masyarakat		111.535.588.691,85	
		Meningkatnya upaya pengendalian daya rusak air di wilayah sungai provinsi						7.980.000.000,00					Masyarakat		111.535.588.691,85	
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	280.000.000,00						5 Dokumen	280.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	0 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00						1 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	2 Unit		1 Unit	2 Unit	150.000.000,00						2 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	200.000.000,00						1 Lembaga	200.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Lembaga		0 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00						1 Lembaga	100.000.000,00	
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	500.000.000,00	
			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	2.04 KM		0.5 KM	2.04 KM	500.000.000,00						2.04 KM	17.200.000.000,00	
			Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.05 KM		1.5 KM	1.05 KM	200.000.000,00						1.05 KM	200.000.000,00	
			Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan	0.29 KM		KM	0.58 KM	500.000.000,00						0.58 KM	9.200.000.000,00	
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.25 KM		1.25 KM	1.65 KM	500.000.000,00						1.25 KM	1.500.000.000,00	
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	8.8 KM		KM	4.71 KM	4.700.000.000,00						4.42 KM	81.255.588.691,85	
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai						4.700.000.000,00			-	-			81.255.588.691,85	
		Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	8.8 KM		KM	0 KM	4.700.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4.42 KM	81.255.588.691,85	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.1.01.0019	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)						150.000.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Terbangunnya Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	2 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi						100.000.000,00			-	-			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Lembaga		0 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Lembaga	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai						500.000.000,00			-	-			1.500.000.000,00	
		Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.25 KM		1.25 KM	0 KM	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1.25 KM	1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.1.01.0081	Peningkatan Kanal Banjir						500.000.000,00			-	-			9.200.000.000,00	
		Meningkatnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan	0.29 KM		KM	0 KM	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0.58 KM	9.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi						280.000.000,00			-	-			280.000.000,00	
		Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	280.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Dokumen	280.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi						200.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga		1 Lembaga	2 Lembaga	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Lembaga	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.1.01.0097	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir						200.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.05 KM		1.5 KM	1 KM	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1.05 KM	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.1.01.0098	Pembangunan Kanal Banjir						500.000.000,00			-	-			17.200.000.000,00	
		Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	2.04 KM		0.5 KM	0 KM	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2.04 KM	17.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.1.01.0104	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)						50.000.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Meningkatnya Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi						50.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku						500.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	0 Dokumen		3 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.1.01.0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi						250.000.000,00			-	-			250.000.000,00	
		Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.750.000.000,00					Masyarakat		3.900.000.000,00	
		Meningkatnya Kinerja Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi						1.750.000.000,00					Masyarakat		3.900.000.000,00	
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	0 Bendung		0 Bendung	1 Bendung	200.000.000,00						1 Bendung	750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	0 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	1 Lembaga		0 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00						1 Lembaga	500.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	1 Lembaga		0 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00						1 Lembaga	200.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0 KM		0 KM	3 KM	200.000.000,00						2 KM	700.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	0 KM		0.8 KM	0 KM	500.000.000,00						0 KM	750.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 KM		5 KM	5 KM	200.000.000,00						5 KM	1.000.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan Irigasi pada Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi						1.750.000.000,00					Masyarakat		3.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	0 Bendung		0 Bendung	1 Bendung	200.000.000,00						1 Bendung	750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	0 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	1 Lembaga		0 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00						1 Lembaga	500.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	1 Lembaga		0 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00						1 Lembaga	200.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0 KM		0 KM	3 KM	200.000.000,00						2 KM	700.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	0 KM		0.8 KM	0 KM	500.000.000,00						0 KM	750.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 KM		5 KM	5 KM	200.000.000,00						5 KM	1.000.000.000,00	
	1.03.02.1.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa						500.000.000,00			-	-			750.000.000,00	
		Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	0 KM		0.8 KM	1 KM	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 KM	750.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						200.000.000,00			-	-			700.000.000,00	
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0 KM		0 KM	1 KM	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 KM	700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi						200.000.000,00			-	-			750.000.000,00	
		Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	0 Bendung		0 Bendung	0 Bendung	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Bendung	750.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa						200.000.000,00			-	-			1.000.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 KM		5 KM	2 KM	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 KM	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.1.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi						100.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	1 Lembaga		0 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Lembaga	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa						500.000.000,00			-	-			0,00	
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	0 Dokumen		1 Dokumen	9 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.1.02.0045	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi						50.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	1 Lembaga		0 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Lembaga	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
29.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**5.222.706.135,17**							**3.569.345.134,70**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum layak dan aman						***5.222.706.135,17***							***2.569.345.134,70***	
			2.Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses Air Minum Aman	43.16 %		43.12 %	43.13 %	5.222.706.135,17						43.14 %	2.569.345.134,70	
			3.Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	100 %		92.94 %	94.70 %	5.222.706.135,17						96.46 %	2.569.345.134,70	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota						5.222.706.135,17					Masyarakat		3.569.345.134,70	
		Persentase SPAM regional terbangun						5.222.706.135,17					Masyarakat		3.569.345.134,70	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,17						1 Dokumen	1.569.345.134,70	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5 Kabupaten/ Kota		5 Kabupaten/ Kota	5 Kabupaten/ Kota	222.706.135,00						5 Kabupaten/ Kota	1.000.000.000,00	
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.000.000.000,00						1 Unit	1.000.000.000,00	
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota						222.706.135,00			-	-			1.000.000.000,00	
		Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5 Kabupaten/ Kota		5 Kabupaten/ Kota	5 Kabupaten/ Kota	222.706.135,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Kabupaten/ Kota	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						3.000.000.000,00			-	-			1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota						2.000.000.000,17			-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera			1.569.345.134,70	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000.000,17	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	1.569.345.134,70	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
30.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**						**4.663.130.477,00**							**11.500.265.491,27**	
		Meningkatnya layanan persampahan regional						***4.663.130.477,00***							***11.500.265.491,27***	
			2.Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengumpulan sampah	70 %		50 %	55 %	4.663.130.477,00						60 %	11.500.265.491,27	
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional						4.663.130.477,00					Masyarakat		11.500.265.491,27	
		Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional						4.663.130.477,00					Masyarakat		11.500.265.491,27	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00						1 Dokumen	2.000.000.000,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/ Kota		5 Kabupaten/ Kota	5 Kabupaten/ Kota	200.000.000,00						5 Kabupaten/ Kota	500.000.000,00	
			Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan	10 Unit		5 Unit	5 Unit	3.863.130.477,00						5 Unit	9.000.265.491,27	
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan						600.000.000,00			-	-			2.000.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.04.1.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA						3.863.130.477,00			-	-			9.000.265.491,27	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya sarana pendukung TPA/TPST/SPA	Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan	10 Unit		5 Unit	5 Unit	3.863.130.477,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	9.000.265.491,27	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.04.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota						200.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Terbinanya dan Terawasinya Kabupaten/Kota dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/ Kota		5 Kabupaten/ Kota	5 Kabupaten/ Kota	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Kabupaten/ Kota	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
31.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**1.119.151.315,00**							**2.907.716.814,58**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah						***1.119.151.315,00***							***2.907.716.814,58***	
			1.Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	91.17 %		87.17 %	88.17 %	1.119.151.315,00						89.17 %	2.907.716.814,58	
			2.Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman	11 %		7 %	8 %	1.119.151.315,00						9 %	2.907.716.814,58	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional						1.119.151.315,00					Masyarakat		2.907.716.814,58	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional						1.119.151.315,00					Masyarakat		2.907.716.814,58	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	1.907.716.814,58	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	5 Kabupaten/ Kota		5 Kabupaten/ Kota	5 Kabupaten/ Kota	1.019.151.315,00						5 Kabupaten/ Kota	1.000.000.000,00	
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						100.000.000,00			-	-			1.907.716.814,58	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	1.907.716.814,58	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.05.1.01.0022	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota						1.019.151.315,00			-	-			1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	5 Kabupaten/ Kota		5 Kabupaten/ Kota	5 Kabupaten/ Kota	1.019.151.315,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Kabupaten/ Kota	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
32.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**270.000.000,00**							**3.692.389.381,93**	
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase						***270.000.000,00***							***3.692.389.381,93***	
			2.Persentase Drainase Fungsional	100 %		80 %	85 %	270.000.000,00						90 %	3.692.389.381,93	
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi						270.000.000,00					Masyarakat		3.692.389.381,93	
		Persentase Cakupan Drainase Fungsional						270.000.000,00					Masyarakat		3.692.389.381,93	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	1.000.000.000,00	
			Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	4 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00						4 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan		0 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	100.000.000,00						1 Sistem Drainase Perkotaan	2.192.389.381,93	
	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan						100.000.000,00			-	-			2.192.389.381,93	
		Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan		0 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Sistem Drainase Perkotaan	2.192.389.381,93	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.06.1.01.0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan						150.000.000,00			-	-			1.000.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.06.1.01.0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan						20.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
33.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**						**5.199.240.764,70**							**12.807.450.954,35**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya infrastruktur permukiman strategis daerah provinsi						***5.199.240.764,70***							***12.807.450.954,35***	
			1.Persentase Infrastruktur Dasar yang terbangun pada kawasan permukiman strategis daerah Provinsi	66.4 %		24 %	29.9 %	5.199.240.764,70						42 %	12.807.450.954,35	
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi						5.199.240.764,70					Masyarakat		12.807.450.954,35	
		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun						5.199.240.764,70					Masyarakat		12.807.450.954,35	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	10 Liter/Detik		10 Liter/Detik	10 Liter/Detik	3.968.094.164,87						10 Liter/Detik	8.530.050.954,35	
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	25 Ton/hari		25 Ton/hari	25 Ton/hari	1.231.146.599,83						25 Ton/hari	4.277.400.000,00	
		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun						5.199.240.764,70					Masyarakat		12.807.450.954,35	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	10 Liter/Detik		10 Liter/Detik	10 Liter/Detik	3.968.094.164,87						10 Liter/Detik	8.530.050.954,35	
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	25 Ton/hari		25 Ton/hari	25 Ton/hari	1.231.146.599,83						25 Ton/hari	4.277.400.000,00	
	1.03.07.1.01.0026	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi						3.968.094.164,87			-	-			8.530.050.954,35	
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	10 Liter/Detik		10 Liter/Detik	10 Liter/Detik	3.968.094.164,87	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Liter/Detik	8.530.050.954,35	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.07.1.01.0040	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi						1.231.146.599,83			-	-			4.277.400.000,00	
		Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	25 Ton/hari		25 Ton/hari	25 Ton/hari	1.231.146.599,83	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Ton/hari	4.277.400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
34.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**30.285.640.689,29**							**5.200.000.000,00**	
		Meningkatnya penyediaan bangunan gedung						***30.285.640.689,29***							***5.200.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Bangunan Gedung Strategis terbangun	44 %		32 %	37 %	30.285.640.689,29						39 %	5.200.000.000,00	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						30.285.640.689,29					Msayarakat, Instansi Perangkat Daerah		5.200.000.000,00	
		Persentase bangunan gedung terbangun						30.285.640.689,29					Msayarakat, Instansi Perangkat Daerah		5.200.000.000,00	
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	1 Bangunan Gedung		1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	1.698.239.879,62						1 Bangunan Gedung	5.200.000.000,00	
	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						1.698.239.879,62			-	-			5.200.000.000,00	
		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	1 Bangunan Gedung		1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	1.698.239.879,62	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Bangunan Gedung	5.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase bangunan gedung terbangun						30.285.640.689,29					Msayarakat, Instansi Perangkat Daerah		5.200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-		-	-	28.587.400.809,67						-	0,00	
	1.03.08.1.01.0027	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						28.587.400.809,67			-	-			0,00	
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-		-	2 Dokumen	28.587.400.809,67	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
35.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**34.500.000.000,00**							**320.994.699.874,47**	
		Meningkatnya penanganan jalan provinsi dan jembatan pada jalan provinsi						***34.000.000.000,00***							***315.994.699.874,47***	
			2.Persentase penanganan jalan provinsi	11.146 %		5.406 %	10.864 %	34.000.000.000,00						11.034 %	315.994.699.874,47	
			3.Persentase penanganan jembatan pada jalan provinsi	4.92 %		5.26 %	5.17 %	34.000.000.000,00						5.08 %	315.994.699.874,47	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi						34.500.000.000,00					Masyarakat		320.994.699.874,47	
		Panjang jalan dalam kondisi mantap						34.500.000.000,00					Masyarakat		320.994.699.874,47	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	5 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	500.000.000,00						5 Dokumen	5.000.000.000,00	
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	94.95 KM		29.89 KM	92.55 KM	1.000.000.000,00						94 KM	1.880.000.000,00	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	820 KM		820 KM	820 KM	500.000.000,00						820 KM	820.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dibangun	19.95 KM		3.89 KM	17.55 KM	22.400.000.000,00						19 KM	228.294.699.874,47	
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	10 KM		5 KM	10 KM	3.000.000.000,00						10 KM	30.000.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	50 KM		10 KM	50 KM	2.600.000.000,00						50 KM	50.000.000.000,00	
			Panjang jembatan yang dibangun	140 Meter		15 Meter	15 Meter	4.500.000.000,00						15 Meter	5.000.000.000,00	
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						500.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			5.000.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Dokumen	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						500.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			820.000.000,00	
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	820 KM		820 KM	266.013 KM	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				820 KM	820.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan						2.600.000.000,00			-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera			50.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	50 KM		10 KM	2.6 KM	2.600.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 KM	50.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.10.1.01.0053	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi						1.000.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			1.880.000.000,00	
		Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	94.95 KM		29.89 KM	5.445 KM	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				94 KM	1.880.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan						4.500.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			5.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	140 Meter		15 Meter	18 Meter	4.500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Meter	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						3.000.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			30.000.000.000,00	
		&Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	10 KM		5 KM	1 KM	3.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 KM	30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan						22.400.000.000,00			-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera			228.294.699.874,47	
		&Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	19.95 KM		3.89 KM	1.79 KM	22.400.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				19 KM	228.294.699.874,47	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
36.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**3.000.000.000,00**							**5.813.885.715,00**	
		Meningkatnya kualitas dan pengelolaan jasa konstruksi						***2.450.000.000,00***							***5.450.885.715,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi	90 %		90 %	90 %	2.450.000.000,00						90 %	5.450.885.715,00	
			2.Persentase pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80 %		80 %	80 %	2.450.000.000,00						80 %	5.450.885.715,00	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi						2.150.000.000,00					Masyarakat, Tenaga Kerja Konstruksi Ahli, Lembaga Jasa Konstruksi		4.114.522.043,00	
		Meningkatnya Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi						2.150.000.000,00					Masyarakat, Tenaga Kerja Konstruksi Ahli, Lembaga Jasa Konstruksi		4.114.522.043,00	
			Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	350.837.812,00	
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	24 Orang		24 Orang	24 Orang	350.000.000,00						24 Orang	680.190.409,00	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga		5 Lembaga	5 Lembaga	320.000.000,00						5 Lembaga	750.451.395,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	140 Orang		140 Orang	100 Orang	700.000.000,00						100 Orang	931.064.809,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	150 Orang		150 Orang	150 Orang	630.000.000,00						150 Orang	1.200.118.289,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	50 Orang		50 Orang	50 Orang	50.000.000,00						50 Orang	201.859.329,00	
	1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi						350.000.000,00			-	-			680.190.409,00	
		Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	24 Orang		24 Orang	24 Orang	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24 Orang	680.190.409,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli						100.000.000,00			-	-			350.837.812,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	350.837.812,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli						630.000.000,00			-	-			1.200.118.289,00	
		Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	150 Orang		150 Orang	100 Orang	630.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150 Orang	1.200.118.289,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi						320.000.000,00			-	-			750.451.395,00	
		Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga		5 Lembaga	5 Lembaga	320.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Lembaga	750.451.395,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli						700.000.000,00			-	-			931.064.809,00	
		Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	140 Orang		140 Orang	130 Orang	700.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Orang	931.064.809,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli						50.000.000,00			-	-			201.859.329,00	
		Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	50 Orang		50 Orang	30 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	201.859.329,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi						450.000.000,00					Pengelola SIPJAKI, Sistem Informasi		1.033.863.672,00	
		Jumlah Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir						450.000.000,00					Pengelola SIPJAKI, Sistem Informasi		1.033.863.672,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00						1 Dokumen	520.099.456,00	
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	12 Layanan Informasi		12 Layanan Informasi	12 Layanan Informasi	100.000.000,00						12 Layanan Informasi	327.818.040,00	
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 Orang		16 Orang	16 Orang	50.000.000,00						16 Orang	185.946.176,00	
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi						100.000.000,00			-	-			327.818.040,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	12 Layanan Informasi		12 Layanan Informasi	12 Layanan Informasi	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Layanan Informasi	327.818.040,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi						300.000.000,00			-	-			520.099.456,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	520.099.456,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI						50.000.000,00			-	-			185.946.176,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 Orang		16 Orang	16 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16 Orang	185.946.176,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi						400.000.000,00					Unit/Lembaga/Aktivitas Penyelenggaraan Jasa Konsruksi		665.500.000,00	
		Jumlah laporan data dan informasi hasil pengawasan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan						400.000.000,00					Unit/Lembaga/Aktivitas Penyelenggaraan Jasa Konsruksi		665.500.000,00	
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	20 Badan Usaha		20 Badan Usaha	20 Badan Usaha	100.000.000,00						20 Badan Usaha	121.000.000,00	
			Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	20 Bangunan Konstruksi		20 Bangunan Konstruksi	20 Bangunan Konstruksi	100.000.000,00						20 Bangunan Konstruksi	181.500.000,00	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	5 Lembaga		5 Lembaga	5 Lembaga	100.000.000,00						5 Lembaga	181.500.000,00	
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	20 Paket Pekerjaan		20 Paket Pekerjaan	20 Paket Pekerjaan	100.000.000,00						20 Paket Pekerjaan	181.500.000,00	
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						100.000.000,00			-	-			181.500.000,00	
		Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	20 Paket Pekerjaan		20 Paket Pekerjaan	20 Paket Pekerjaan	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Paket Pekerjaan	181.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						100.000.000,00			-	-			181.500.000,00	
		Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	20 Bangunan Konstruksi		20 Bangunan Konstruksi	20 Bangunan Konstruksi	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Bangunan Konstruksi	181.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi						100.000.000,00			-	-			181.500.000,00	
		Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	5 Lembaga		5 Lembaga	5 Lembaga	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Lembaga	181.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						100.000.000,00			-	-			121.000.000,00	
		Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	20 Badan Usaha		20 Badan Usaha	20 Badan Usaha	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Badan Usaha	121.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
37.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**3.000.000.000,00**							**5.834.646.018,00**	
		Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Bernilai Baik						***2.200.000.000,00***							***4.134.646.018,00***	
			2.Nilai Kinerja Peyelenggaraan Penataan Ruang	82.00 Nilai		75.72 Nilai	75.72 Nilai	2.200.000.000,00						77.82 Nilai	4.134.646.018,00	
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi						400.000.000,00					Masyarakat		700.000.000,00	
		Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi yang dihasilkan						400.000.000,00					Masyarakat		700.000.000,00	
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	200 Orang		125 Orang	125 Orang	400.000.000,00						150 Orang	700.000.000,00	
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang						400.000.000,00			-	-			700.000.000,00	
		Tersampaikannya substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	200 Orang		125 Orang	125 Orang	400.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150 Orang	700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang						1.100.000.000,00					Masyarakat		1.934.646.018,00	
		Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilaksanakan						1.100.000.000,00					Masyarakat		1.934.646.018,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000.000,00						5 Dokumen	1.284.646.018,00	
			Jumlah Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	650.000.000,00	
	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota						1.000.000.000,00			-	-			1.284.646.018,00	
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota dengan adanya laporan progres dan tindak lanjut dari provinsi	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Dokumen	1.284.646.018,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.12.1.02.0012	Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota						100.000.000,00			-	-			650.000.000,00	
		Terlaksana Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan surat hasil fasilitasi	Jumlah Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	650.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi						450.000.000,00					Masyarakat		900.000.000,00	
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang daerah provinsi dilaksanakan						450.000.000,00					Masyarakat		900.000.000,00	
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	3 Layanan		1 Layanan	3 Layanan	50.000.000,00						3 Layanan	300.000.000,00	
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
	1.03.12.1.03.0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha						50.000.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	3 Layanan		1 Layanan	1 Layanan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Layanan	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang						200.000.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang						200.000.000,00			-	-			300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi						1.050.000.000,00					Msayarakat		2.300.000.000,00	
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang daerah provinsi dilaksanakan						1.050.000.000,00					Msayarakat		2.300.000.000,00	
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	10 Dokumen		5 Dokumen	15 Dokumen	300.000.000,00						15 Dokumen	1.000.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	2 Berita Acara		1 Berita Acara	2 Berita Acara	200.000.000,00						2 Berita Acara	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00						3 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1 Kasus		1 Kasus	1 Kasus	200.000.000,00						1 Kasus	200.000.000,00	
			Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	3 Kasus		1 Kasus	2 Kasus	100.000.000,00						3 Kasus	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00						2 Laporan	200.000.000,00	
	1.03.12.1.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang						100.000.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	3 Kasus		1 Kasus	1 Kasus	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Kasus	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						150.000.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.12.1.04.0008	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR						200.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1 Kasus		1 Kasus	1 Kasus	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Kasus	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.12.1.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang						100.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK						300.000.000,00			-	-			1.000.000.000,00	
		Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	10 Dokumen		5 Dokumen	15 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.12.1.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal						200.000.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Berita Acara	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**10.000.000.000,00**							**28.281.218.166,00**	
38.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**930.000.000,00**							**721.750.905,00**	
		Tersedianya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah						***930.000.000,00***							***721.750.905,00***	
			2.Persentase Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100 %		100 %	100 %	930.000.000,00						100 %	721.750.905,00	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						300.000.000,00					Warga Negara Korban Bencana		300.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						300.000.000,00					Warga Negara Korban Bencana		300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	0 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
	1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan						200.000.000,00			-	-			200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	0 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi						100.000.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						630.000.000,00					Warga Negara Korban Bencana		421.750.905,00	
		Jumlah unit rumah korban bencana dan relokasi program Provinsi yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi						630.000.000,00					Warga Negara Korban Bencana		421.750.905,00	
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	2 Unit Rumah		2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	630.000.000,00						2 Unit Rumah	421.750.905,00	
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						630.000.000,00			-	-			421.750.905,00	
		Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	2 Unit Rumah		2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	630.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit Rumah	421.750.905,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
39.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**4.144.330.000,00**							**7.980.840.709,00**	
		Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh						***4.144.330.000,00***							***7.980.840.709,00***	
			2.Persentase kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi	50.71 %		93.82 %	83.69 %	4.144.330.000,00						72.98 %	7.980.840.709,00	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						271.290.000,00					Masyarakat		300.000.000,00	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastrukur kawasan kumuh						271.290.000,00					Masyarakat		300.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	50 Orang		40 Orang	50 Orang	271.290.000,00						50 Orang	300.000.000,00	
	1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh						271.290.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	50 Orang		40 Orang	50 Orang	271.290.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						3.873.040.000,00					Masyarakat		7.680.840.709,00	
		Jumlah luasan kawasan pemukiman kumuh "e 10-15 Ha						3.873.040.000,00					Masyarakat		7.680.840.709,00	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	3 Unit Rumah		2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	450.000.000,00						2 Unit Rumah	400.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	40 Unit Rumah		40 Unit Rumah	40 Unit Rumah	960.000.000,00						40 Unit Rumah	800.000.000,00	
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	10 Ha		5 Ha	9.01 Ha	2.463.040.000,00						9.59 Ha	6.480.840.709,00	
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						960.000.000,00			-	-			800.000.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	40 Unit Rumah		40 Unit Rumah	40 Unit Rumah	960.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Unit Rumah	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						450.000.000,00			-	-			400.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	3 Unit Rumah		2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	450.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit Rumah	400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						2.463.040.000,00			-	-			6.480.840.709,00	
		Terlaksananya Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	10 Ha		5 Ha	2 Ha	2.463.040.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9.59 Ha	6.480.840.709,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
40.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**4.925.670.000,00**							**19.578.626.552,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman						***4.925.670.000,00***							***19.578.626.552,00***	
			1.Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	4.925.670.000,00						100 Persentase	19.578.626.552,00	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman						4.925.670.000,00					Masyarakat		19.578.626.552,00	
		Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU						4.925.670.000,00					Masyarakat		19.578.626.552,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	25 Lokasi		8 Lokasi	21.05 Lokasi	2.165.000.000,00						23.45 Lokasi	9.378.626.552,00	
			Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	25 Lokasi		8 Lokasi	25 Lokasi	2.560.670.000,00						25 Lokasi	10.000.000.000,00	
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman						200.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.05.1.01.0008	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman						2.560.670.000,00			-	-			10.000.000.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	25 Lokasi		8 Lokasi	10 Lokasi	2.560.670.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Lokasi	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman						2.165.000.000,00			-	-			9.378.626.552,00	
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	25 Lokasi		8 Lokasi	10 Lokasi	2.165.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				23.45 Lokasi	9.378.626.552,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.000.000.000,00**							**676.929.203,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**2.000.000.000,00**							**676.929.203,00**	
41.	**2.10.03**	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**						**500.000.000,00**							**90.771.681,00**	
		Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum						***500.000.000,00***							***90.771.681,00***	
			1.Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %		50 %	50 %	500.000.000,00						100 %	90.771.681,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi						500.000.000,00					Masyarakat		90.771.681,00	
		Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi						500.000.000,00					Masyarakat		90.771.681,00	
			Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	10 Dokumen		5 Dokumen	10 Dokumen	500.000.000,00						10 Dokumen	90.771.681,00	
	2.10.03.1.01.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum						500.000.000,00			-	-			90.771.681,00	
		Terlaksananya koordinasi kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	10 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Dokumen	90.771.681,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
42.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**						**1.500.000.000,00**							**586.157.522,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah objek reforma agraria (TORA)						***1.500.000.000,00***							***586.157.522,00***	
			1.Persentase fasilitasi pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agraria	20 %		20 %	20 %	1.500.000.000,00						20 %	586.157.522,00	
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						1.000.000.000,00					Masyarakat		286.157.522,00	
		Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dan Penataan Aset dalam rangka Reforma Agraria						1.000.000.000,00					Masyarakat		286.157.522,00	
			Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.000.000.000,00						1 Berita Acara	286.157.522,00	
	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.000.000.000,00			-	-			286.157.522,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam 1 (satu) Provinsi.	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Berita Acara	286.157.522,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2.10.06.1.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						500.000.000,00					Masyarakat		300.000.000,00	
		Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota						500.000.000,00					Masyarakat		300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
	2.10.06.1.02.0001	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota						500.000.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Tersedianya data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Kantor Satuan Polisi Pamongpraja						**19.352.423.114,00**							**24.303.285.599,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**19.352.423.114,00**							**24.303.285.599,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**19.352.423.114,00**							**24.303.285.599,00**	
43.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**18.835.229.764,00**							**22.239.860.857,00**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah						***18.835.229.764,00***							***22.239.860.857,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	18.835.229.764,00						100 %	22.239.860.857,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					ASN Satpol PP		46.341.050,00	
		Persentase cakupan layanan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					ASN Satpol PP		46.341.050,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00						2 Dokumen	46.341.050,00	
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00			-	-			46.341.050,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	46.341.050,00	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						16.320.059.850,00					ASN Satpol PP		19.359.851.641,00	
		Persentase cakupan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						16.320.059.850,00					ASN Satpol PP		19.359.851.641,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	208.440.000,00						1 Dokumen	285.060.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192 Orang/ Bulan		192 Orang/ Bulan	192 Orang/ Bulan	16.111.619.850,00						192 Orang/ Bulan	19.074.791.641,00	
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						16.111.619.850,00			-	-			19.074.791.641,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192 Orang/ Bulan		192 Orang/ Bulan	169 Orang/ Bulan	16.111.619.850,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				192 Orang/ Bulan	19.074.791.641,00	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						208.440.000,00			-	-			285.060.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	208.440.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	285.060.000,00	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						203.390.000,00					ASN Satpol PP		250.000.000,00	
		Persentase cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						203.390.000,00					ASN Satpol PP		250.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang		41 Orang	41 Orang	203.390.000,00						41 Orang	250.000.000,00	
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						203.390.000,00			-	-			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang		41 Orang	35 Orang	203.390.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				41 Orang	250.000.000,00	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						455.622.370,00					ASN Satpol PP		1.347.999.914,00	
		Persentase cakupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						455.622.370,00					ASN Satpol PP		1.347.999.914,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	274.501.470,00						12 Laporan	706.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	93.291.400,00						12 Paket	207.433.110,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	35.000.000,00						12 Paket	89.261.073,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	81 Paket		81 Paket	81 Paket	6.129.500,00						81 Paket	7.063.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	34.000.000,00						20 Paket	311.400.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	44 Paket		44 Paket	44 Paket	12.700.000,00						44 Paket	26.642.731,00	
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.129.500,00			-	-			7.063.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	81 Paket		81 Paket	8 Paket	6.129.500,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				81 Paket	7.063.000,00	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						34.000.000,00			-	-			311.400.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	5 Paket	34.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Paket	311.400.000,00	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						12.700.000,00			-	-			26.642.731,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	44 Paket		44 Paket	44 Paket	12.700.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				44 Paket	26.642.731,00	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						93.291.400,00			-	-			207.433.110,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	93.291.400,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	207.433.110,00	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.000.000,00			-	-			89.261.073,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	35.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	89.261.073,00	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						274.501.470,00			-	-			706.200.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	274.501.470,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	706.200.000,00	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						6.000.000,00					ASN Satpol PP		0,00	
		Persentase cakupan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						6.000.000,00					ASN Satpol PP		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket		63 Paket	63 Paket	6.000.000,00						0 Paket	0,00	
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						6.000.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket		63 Paket	1 Paket	6.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket	0,00	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.193.111.244,00					ASN Satpol PP		385.460.761,00	
		Persentase cakupan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.193.111.244,00					ASN Satpol PP		385.460.761,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	227.330.500,00						12 Laporan	197.960.761,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	960.780.744,00						12 Laporan	180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00						12 Laporan	7.500.000,00	
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00			-	-			7.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	7.500.000,00	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						227.330.500,00			-	-			197.960.761,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	227.330.500,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	197.960.761,00	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						960.780.744,00			-	-			180.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	960.780.744,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	180.000.000,00	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						617.046.300,00					ASN Satpol PP		850.207.491,00	
		Persentase cakupan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						617.046.300,00					ASN Satpol PP		850.207.491,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	68 Unit		68 Unit	68 Unit	12.040.000,00						68 Unit	29.390.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	363.010.400,00						1 Unit	442.555.491,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit		32 Unit	32 Unit	241.995.900,00						32 Unit	378.262.000,00	
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						241.995.900,00			-	-			378.262.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit		32 Unit	32 Unit	241.995.900,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				32 Unit	378.262.000,00	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
	1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						12.040.000,00			-	-			29.390.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	68 Unit		68 Unit	35 Unit	12.040.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				68 Unit	29.390.000,00	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						363.010.400,00			-	-			442.555.491,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	363.010.400,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	442.555.491,00	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
44.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**447.212.400,00**							**2.013.424.742,00**	
		Meningkatnya kapasitas SDM PPNS						***53.183.400,00***							***156.325.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	90 Persentase		50 Persentase	60 Persentase	53.183.400,00						70 Persentase	156.325.000,00	
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi						53.183.400,00					Masyarakat Kalimantan Utara		156.325.000,00	
		Jumlah PPNS Provinsi yang mendapatkan pembinaan						53.183.400,00					Masyarakat Kalimantan Utara		156.325.000,00	
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	32.500.000,00						1 Laporan	41.375.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.683.400,00						1 Laporan	114.950.000,00	
	1.05.02.1.03.0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum						20.683.400,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			114.950.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.683.400,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	114.950.000,00	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
	1.05.02.1.03.0008	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum						32.500.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			41.375.000,00	
		Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	32.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	41.375.000,00	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada						***75.024.000,00***							***370.854.307,00***	
			1.Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %		96 %	97 %	75.024.000,00						98 %	370.854.307,00	
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur						75.024.000,00					Masyarakat Kalimantan Utara		370.854.307,00	
		Jumlah kegiatan penegakan yang dilaksanakan						75.024.000,00					Masyarakat Kalimantan Utara		370.854.307,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	12 Laporan		8 Laporan	9 Laporan	75.024.000,00						10 Laporan	370.854.307,00	
	1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						75.024.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera			370.854.307,00	
		Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	12 Laporan		8 Laporan	9 Laporan	75.024.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Laporan	370.854.307,00	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum						***319.005.000,00***							***1.486.245.435,00***	
			1.Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	244.005.000,00						100 Persentase	1.132.270.278,00	
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						319.005.000,00					Masyarakat Kalimantan Utara		1.486.245.435,00	
		Jumlah operasi penanganan gangguan Trantibum lintas daerah yang dilaksanakan						319.005.000,00					Masyarakat Kalimantan Utara		1.486.245.435,00	
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	60 Orang		60 Orang	60 Orang	30.000.000,00						60 Orang	47.740.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	4 laporan		4 laporan	4 laporan	79.005.000,00						4 laporan	742.134.320,00	
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	14.405.958,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	15 Unit		15 Unit	15 Unit	130.000.000,00						15 Unit	327.990.000,00	
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						5.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera			14.405.958,00	
		Tersedianya Pelayanan Dasar keapada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	14.405.958,00	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
	1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						79.005.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera			742.134.320,00	
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	4 laporan		4 laporan	4 laporan	79.005.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 laporan	742.134.320,00	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
	1.05.02.1.01.0024	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja						30.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			47.740.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	60 Orang		60 Orang	30 Orang	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60 Orang	47.740.000,00	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
	1.05.02.1.01.0029	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum						130.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			327.990.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	15 Unit		15 Unit	15 Unit	130.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Unit	327.990.000,00	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat						***319.005.000,00***							***1.486.245.435,00***	
			1.Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	90 Persentase		60 Persentase	65 Persentase	75.000.000,00						75 Persentase	353.975.157,00	
		Jumlah operasi penanganan gangguan Trantibum lintas daerah yang dilaksanakan						319.005.000,00					Masyarakat Kalimantan Utara		1.486.245.435,00	
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	120 Orang		120 Orang	70 Orang	75.000.000,00						120 Orang	353.975.157,00	
	1.05.02.1.01.0030	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat						75.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera			353.975.157,00	
		Terlaksananya Peningkatan Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	120 Orang		120 Orang	30 Orang	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				120 Orang	353.975.157,00	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
45.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**69.980.950,00**							**50.000.000,00**	
		Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran						***69.980.950,00***							***50.000.000,00***	
			1.Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	69.980.950,00						100 Persentase	50.000.000,00	
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						69.980.950,00					Masyarakat Kalimantan Utara		50.000.000,00	
		Jumlah Pembinaan Dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran yang Dilaksanakan						69.980.950,00					Masyarakat Kalimantan Utara		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	69.980.950,00						1 Laporan	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.04.1.02.0007	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota						69.980.950,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			50.000.000,00	
		Terselenggaranya pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	69.980.950,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	50.000.000,00	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah						**10.185.103.371,00**							**17.326.869.558,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.185.103.371,00**							**17.326.869.558,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**10.185.103.371,00**							**17.326.869.558,00**	
46.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**9.855.103.371,00**							**13.650.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah						***9.805.103.371,00***							***12.300.000.000,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	99 %		99 %	99 %	9.805.103.371,00						99 %	12.300.000.000,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		100.000.000,00	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Sesuai Standar Regulasi						50.000.000,00					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00			-	-			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.226.200.000,00					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		9.400.000.000,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai Regulasi						8.226.200.000,00					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		9.400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	226.200.000,00						12 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/ Bulan		62 Orang/ Bulan	70 Orang/ Bulan	8.000.000.000,00						70 Orang/ Bulan	9.000.000.000,00	
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.000.000.000,00			-	-			9.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/ Bulan		62 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan	8.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70 Orang/ Bulan	9.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						226.200.000,00			-	-			400.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	226.200.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	400.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.000.000,00					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		400.000.000,00	
		Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai Standar Peraturan yang berlaku						50.000.000,00					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		400.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		4 Orang	20 Orang	50.000.000,00						20 Orang	400.000.000,00	
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00			-	-			400.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		4 Orang	3 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Orang	400.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						466.884.000,00					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1.670.000.000,00	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						466.884.000,00					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1.670.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen		365 Dokumen	365 Dokumen	6.000.000,00						365 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	330.000.000,00						1 Laporan	950.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	85.000.000,00						12 Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	13.469.000,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.415.000,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	300.000.000,00	
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.415.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.415.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.000.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						85.000.000,00			-	-			300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	85.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13.469.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	13.469.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						6.000.000,00			-	-			20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen		365 Dokumen	365 Dokumen	6.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				365 Dokumen	20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						330.000.000,00			-	-			950.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	330.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	950.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						460.452.261,00					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		680.000.000,00	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang						460.452.261,00					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		680.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	316.451.761,00						12 Laporan	175.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	140.000.000,00						12 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.000.500,00						1 Laporan	5.000.000,00	
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.000.500,00			-	-			5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.000.500,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	5.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						316.451.761,00			-	-			175.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	316.451.761,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	175.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						140.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	140.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	500.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						601.567.110,00					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1.400.000.000,00	
		BMD yang terpelihara						601.567.110,00					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1.400.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		2 Unit	3 Unit	309.940.310,00						3 Unit	600.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		13 Unit	15 Unit	176.626.800,00						15 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	100.000.000,00						14 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		16 Unit	15 Unit	15.000.000,00						15 Unit	200.000.000,00	
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100.000.000,00			-	-			300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit		14 Unit	7 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14 Unit	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						176.626.800,00			-	-			300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		13 Unit	10 Unit	176.626.800,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Unit	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		16 Unit	15 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Unit	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						309.940.310,00			-	-			600.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		2 Unit	2 Unit	309.940.310,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	600.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
47.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**330.000.000,00**							**3.676.869.558,00**	
		Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pra bencana						***190.000.000,00***							***1.526.869.558,00***	
			1.Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	20 %		20 %	20 %	110.000.000,00						20 %	1.176.869.558,00	
			2.Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %		100 %	100 %	110.000.000,00						100 %	1.176.869.558,00	
			3.Persentase penanganan pra bencana	60 %		60 %	60 %	110.000.000,00						60 %	1.176.869.558,00	
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi						110.000.000,00					OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		300.000.000,00	
		Persentase Kecamatan Yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana						110.000.000,00					OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00						0 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	150 Orang		0 Orang	150 Orang	10.000.000,00						150 Orang	300.000.000,00	
	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi						100.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			0,00	
		Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)						10.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			300.000.000,00	
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	150 Orang		0 Orang	10 Orang	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150 Orang	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						40.000.000,00					OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		876.869.558,00	
		Jumlah Kab/kota yang terfasilitasi dalam Penanganan Pra Bencana						40.000.000,00					OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		876.869.558,00	
			Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000,00						1 Kegiatan	250.000.000,00	
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	15 Keluarga		10 Keluarga	15 Keluarga	10.000.000,00						15 Keluarga	15.000.000,00	
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan		0 Kawasan	2 Kawasan	10.000.000,00						2 Kawasan	411.869.558,00	
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	200 Orang		0 Orang	200 Orang	10.000.000,00						200 Orang	200.000.000,00	
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana						10.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			411.869.558,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan		0 Kawasan	1 Kawasan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Kawasan	411.869.558,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						10.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			200.000.000,00	
		Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	200 Orang		0 Orang	10 Orang	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200 Orang	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana						10.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Kegiatan	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana						10.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			15.000.000,00	
		Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	15 Keluarga		10 Keluarga	5 Keluarga	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Keluarga	15.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya pemulihan pasca bencana						***90.000.000,00***							***900.000.000,00***	
			1.Persentase penanganan pasca bencana	100 %		100 %	100 %	90.000.000,00						100 %	900.000.000,00	
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						90.000.000,00					OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		900.000.000,00	
		Jumlah Kab/kota yang terfasilitasi dalam Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						90.000.000,00					OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		900.000.000,00	
			Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	10 Orang		10 Orang	Orang	10.000.000,00						10 Orang	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	300.000.000,00	
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi						30.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			350.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	350.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.03.1.04.0011	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi						50.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			300.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi						10.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			250.000.000,00	
		Tersedianya Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	10 Orang		10 Orang	1 Orang	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Orang	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya penanganan darurat bencana						***90.000.000,00***							***1.600.000.000,00***	
			1.Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %		100 %	100 %	90.000.000,00						100 %	1.600.000.000,00	
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						90.000.000,00					OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		1.600.000.000,00	
		Jumlah Kabupaten/Kota Yang Terfasilitasi Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana						90.000.000,00					OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		1.600.000.000,00	
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	10 Orang		8 Orang	30 Orang	10.000.000,00						10 Orang	300.000.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang		100 Orang	100 Orang	30.000.000,00						100 Orang	700.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	600.000.000,00	
	1.05.03.1.03.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi						10.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			300.000.000,00	
		Tersedianya SDM Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	10 Orang		8 Orang	1 Orang	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Orang	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						30.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			700.000.000,00	
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang		100 Orang	30 Orang	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Orang	700.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana						50.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			600.000.000,00	
		Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	600.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Dinas Sosial						**13.110.978.645,00**							**21.671.258.726,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.110.978.645,00**							**21.671.258.726,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**13.110.978.645,00**							**21.671.258.726,00**	
48.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**11.721.479.682,00**							**12.824.103.431,00**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah						***11.701.479.682,00***							***12.824.103.431,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	11.701.479.682,00						100 %	12.824.103.431,00	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100.000.000,00					Sekretariat dan Bidang		160.000.000,00	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi						100.000.000,00					Sekretariat dan Bidang		160.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	60 Data		60 Data	60 Data	60.000.000,00						60 Data	110.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20.000.000,00			-	-			30.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00			-	-			20.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	20.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						60.000.000,00			-	-			110.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	60 Data		60 Data	60 Data	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60 Data	110.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.841.636.854,00					Bidang dan Sekretariat		11.614.404.094,00	
		Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						10.841.636.854,00					Bidang dan Sekretariat		11.614.404.094,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	374.642.178,00						12 Dokumen	966.122.110,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan		75 Orang/ Bulan	75 Orang/ Bulan	10.466.994.676,00						75 Orang/ Bulan	10.648.281.984,00	
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.466.994.676,00			-	-			10.648.281.984,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan		75 Orang/ Bulan	74 Orang/ Bulan	10.466.994.676,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)				75 Orang/ Bulan	10.648.281.984,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						374.642.178,00			-	-			966.122.110,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	374.642.178,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	966.122.110,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						79.500.000,00					Bidang dan Sekretariat		0,00	
		Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						79.500.000,00					Bidang dan Sekretariat		0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		0 Paket	3 Paket	79.500.000,00						0 Paket	0,00	
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						79.500.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		0 Paket	2 Paket	79.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket	0,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						187.436.458,00					Bidang dan Sekretariat		512.628.569,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						187.436.458,00					Bidang dan Sekretariat		512.628.569,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	22.160.000,00						12 Dokumen	7.400.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	76.165.776,00						12 Paket	249.929.727,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	23.135.382,00						4 Paket	40.021.842,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.722.200,00						2 Paket	6.002.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	50.000.000,00						4 Paket	179.300.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	14.253.100,00						4 Paket	29.975.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.722.200,00			-	-			6.002.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	1.722.200,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	6.002.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00			-	-			179.300.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	179.300.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						14.253.100,00			-	-			29.975.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	14.253.100,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	29.975.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						76.165.776,00			-	-			249.929.727,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	76.165.776,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	249.929.727,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						23.135.382,00			-	-			40.021.842,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	23.135.382,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	40.021.842,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						22.160.000,00			-	-			7.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	22.160.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	7.400.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						343.401.370,00					Bidang dan Sekretariat		348.363.268,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						343.401.370,00					Bidang dan Sekretariat		348.363.268,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.947.594,00						12 Laporan	18.799.492,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	313.043.776,00						12 Laporan	312.163.776,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.410.000,00						12 Laporan	17.400.000,00	
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						8.410.000,00			-	-			17.400.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.410.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	17.400.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						21.947.594,00			-	-			18.799.492,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.947.594,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	18.799.492,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						313.043.776,00			-	-			312.163.776,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	313.043.776,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	312.163.776,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						169.505.000,00					Bidang dan Sekretariat		188.707.500,00	
		BMD yang terpelihara						169.505.000,00					Bidang dan Sekretariat		188.707.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	106.675.000,00						7 Unit	115.997.500,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	42.950.000,00						1 Unit	42.950.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	19.880.000,00						15 Unit	29.760.000,00	
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						42.950.000,00			-	-			42.950.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	42.950.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	42.950.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						106.675.000,00			-	-			115.997.500,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	27 Unit	106.675.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7 Unit	115.997.500,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						19.880.000,00			-	-			29.760.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	20 Unit	19.880.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Unit	29.760.000,00	Dinas Sosial
49.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**236.144.905,00**							**1.709.883.065,00**	
		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial						***236.144.905,00***							***1.709.883.065,00***	
			1.Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	236.144.905,00						100 Persentase	1.709.883.065,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	236.144.905,00						100 Persentase	1.709.883.065,00	
			3.Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	236.144.905,00						100 Persentase	1.709.883.065,00	
			4.Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	100 %		100 %	100 %	236.144.905,00						100 %	1.709.883.065,00	
			5.Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	100 %		100 %	100 %	236.144.905,00						100 %	1.709.883.065,00	
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						35.500.000,00					Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, Ormas/ Komunitas		139.288.212,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						35.500.000,00					Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, Ormas/ Komunitas		139.288.212,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	35.500.000,00						5 Dokumen	139.288.212,00	
	1.06.02.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						35.500.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			139.288.212,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	35.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Dokumen	139.288.212,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi						200.644.905,00					PSKS, LKS, Badan Usaha, SDM KESOS, Calon Pahlawan Nasional, KelompoK Masyarakat Umum		1.570.594.853,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi						200.644.905,00					PSKS, LKS, Badan Usaha, SDM KESOS, Calon Pahlawan Nasional, KelompoK Masyarakat Umum		1.570.594.853,00	
			Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	20 Badan Usaha		20 Badan Usaha	20 Badan Usaha	17.800.000,00						20 Badan Usaha	168.817.202,00	
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	30 Keluarga		15 Keluarga	30 Keluarga	17.375.000,00						30 Keluarga	104.302.180,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan	20 Lembaga		20 Lembaga	20 Lembaga	10.250.000,00						20 Lembaga	167.222.180,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	25 Lembaga		25 Lembaga	25 Lembaga	23.225.000,00						25 Lembaga	252.104.360,00	
			Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional	3 Orang		2 Orang	3 Orang	30.979.905,00						3 Orang	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	100 Orang		100 Orang	100 Orang	47.615.000,00						100 Orang	178.222.391,00	
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	70 Orang		50 Orang	70 Orang	30.600.000,00						70 Orang	538.704.360,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi	20 Orang		20 Orang	20 Orang	12.800.000,00						20 Orang	121.222.180,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi						17.375.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			104.302.180,00	
		Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	30 Keluarga		15 Keluarga	25 Keluarga	17.375.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Keluarga	104.302.180,00	Dinas Sosial
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi						23.225.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			252.104.360,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	25 Lembaga		25 Lembaga	25 Lembaga	23.225.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Lembaga	252.104.360,00	Dinas Sosial
	1.06.02.1.02.0006	Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi						10.250.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			167.222.180,00	
		Tersedianya Usulan Akreditasi Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan	20 Lembaga		20 Lembaga	15 Lembaga	10.250.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Lembaga	167.222.180,00	Dinas Sosial
	1.06.02.1.02.0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi						30.600.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			538.704.360,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	70 Orang		50 Orang	55 Orang	30.600.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70 Orang	538.704.360,00	Dinas Sosial
	1.06.02.1.02.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial						47.615.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			178.222.391,00	
		Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	100 Orang		100 Orang	100 Orang	47.615.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Orang	178.222.391,00	Dinas Sosial
	1.06.02.1.02.0013	Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi						12.800.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			121.222.180,00	
		Tersedianya Usulan Sertifikasi bagi Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi	20 Orang		20 Orang	20 Orang	12.800.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Orang	121.222.180,00	Dinas Sosial
	1.06.02.1.02.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan						17.800.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			168.817.202,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	20 Badan Usaha		20 Badan Usaha	20 Badan Usaha	17.800.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Badan Usaha	168.817.202,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.02.1.02.0017	Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional						30.979.905,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			30.000.000,00	
		Terlaksananya Proses Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional	3 Orang		2 Orang	2 Orang	30.979.905,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Orang	30.000.000,00	Dinas Sosial
		Terlaksananya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi						200.644.905,00					PSKS, LKS, Badan Usaha, SDM KESOS, Calon Pahlawan Nasional, KelompoK Masyarakat Umum		1.570.594.853,00	
			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	1.06.02.1.02.0014	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi						10.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-		-	5 Orang	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	10.000.000,00	Dinas Sosial
50.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**						**3.000.000,00**							**9.692.389,00**	
		Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan						***3.000.000,00***							***9.692.389,00***	
			1.Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	3.000.000,00						100 Persentase	9.692.389,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal						3.000.000,00					Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		9.692.389,00	
		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota						3.000.000,00					Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		9.692.389,00	
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang		1 Orang	1 Orang	3.000.000,00						1 Orang	9.692.389,00	
	1.06.03.1.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal						3.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera			9.692.389,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang		1 Orang	1 Orang	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Nunukan || Kelurahan Nunukan Timur || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Orang	9.692.389,00	Dinas Sosial
51.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**270.171.319,00**							**1.672.043.275,00**	
		Meningkatnya Rehabilitasi Sosial						***270.171.319,00***							***1.422.043.275,00***	
			1.Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %		100 %	100 %	270.171.319,00						100 %	1.422.043.275,00	
			2.Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %		100 %	100 %	270.171.319,00						100 %	1.422.043.275,00	
			3.Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %		100 %	100 %	270.171.319,00						100 %	1.422.043.275,00	
			4.Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	270.171.319,00						100 Persentase	1.422.043.275,00	
			5.Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	270.171.319,00						100 Persentase	1.422.043.275,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti						45.000.000,00					Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti/LKS		230.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti						45.000.000,00					Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti/LKS		230.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	5 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000,00						5 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	30 Orang		20 Orang	20 Orang	20.000.000,00						25 Orang	80.000.000,00	
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial						20.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			80.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	30 Orang		20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Orang	80.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar						25.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	5 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti						172.171.319,00					Anak Terlantar di Dalam Panti/LKS		1.175.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti						172.171.319,00					Anak Terlantar di Dalam Panti/LKS		1.175.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	9 Dokumen		1 Dokumen	9 Dokumen	82.966.959,00						9 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	900 Orang		140 Orang	787 Orang	45.000.000,00						900 Orang	675.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	200 Orang		30 Orang	160 Orang	44.204.360,00						200 Orang	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial						44.204.360,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	200 Orang		30 Orang	300 Orang	44.204.360,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Kota || Desa Malinau Kota || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Nunukan || Kelurahan Nunukan Timur || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200 Orang	250.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan						45.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			675.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	900 Orang		140 Orang	60 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				900 Orang	675.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti						82.966.959,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			250.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	9 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	82.966.959,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti						23.000.000,00					Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti/LKS		130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti						23.000.000,00					Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti/LKS		130.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	5 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00						5 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	15 Orang		5 Orang	10 Orang	8.000.000,00						10 Orang	30.000.000,00	
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang						8.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			30.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	15 Orang		5 Orang	2 Orang	8.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Kota || Desa Malinau Kota || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Timur || Kelurahan Lingkas Ujung || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Orang	30.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.03.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti						15.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	5 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti						30.000.000,00					PPKS Gelandangan dan Pengemis		137.043.275,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti						30.000.000,00					PPKS Gelandangan dan Pengemis		137.043.275,00	
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	30.000.000,00						10 Orang	137.043.275,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal						30.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			137.043.275,00	
		Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Orang	137.043.275,00	Dinas Sosial
52.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**531.187.809,00**							**3.930.263.558,00**	
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial						***531.187.809,00***							***3.930.263.558,00***	
			1.Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	531.187.809,00						100 Persentase	3.930.263.558,00	
			2.Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	531.187.809,00						100 Persentase	3.930.263.558,00	
			3. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	100 %		100 %	100 %	531.187.809,00						100 %	3.930.263.558,00	
			4.Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	100 %		100 %	100 %	531.187.809,00						100 %	3.930.263.558,00	
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal						30.000.000,00					Calon Orang Tua Angkat dan Anak yang Diangkat		58.154.000,00	
		Terlaksananya Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal						30.000.000,00					Calon Orang Tua Angkat dan Anak yang Diangkat		58.154.000,00	
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	3 Orang		2 Orang	3 Orang	30.000.000,00						3 Orang	58.154.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI						30.000.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			58.154.000,00	
		Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Oang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	3 Orang		2 Orang	2 Orang	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Orang	58.154.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi						501.187.809,00					Masyarakat Rentan, Pekerja Rentan, Pendamping Sosial dan ASN		3.872.109.558,00	
		Terlaksana Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi						501.187.809,00					Masyarakat Rentan, Pekerja Rentan, Pendamping Sosial dan ASN		3.872.109.558,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	8.500.000,00						5 Dokumen	126.327.256,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	5 Kab/Kota		5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	95.000.000,00						5 Kab/Kota	200.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	300 Orang		30 Orang	250 Orang	187.190.912,00						270 Orang	1.825.000.000,00	
			Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi	70 Orang		20 Orang	40 Orang	44.000.000,00						40 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	38 Orang		0 Orang	35 Orang	36.000.000,00						35 Orang	170.000.000,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang		30 Orang	50 Orang	130.496.897,00						60 Orang	1.300.782.302,00	
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						187.190.912,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan			1.825.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	300 Orang		30 Orang	30 Orang	187.190.912,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				270 Orang	1.825.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						130.496.897,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan			1.300.782.302,00	
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang		30 Orang	45 Orang	130.496.897,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60 Orang	1.300.782.302,00	Dinas Sosial
	1.06.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi						95.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	5 Kab/Kota		5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	95.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Kab/Kota	200.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.1.02.0009	Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial						36.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			170.000.000,00	
		Terlaksananya pengembangan potensi bagi pendamping program bantuan sosial	Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	38 Orang		0 Orang	35 Orang	36.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35 Orang	170.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.05.1.02.0010	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai						8.500.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			126.327.256,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	8.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Dokumen	126.327.256,00	Dinas Sosial
	1.06.05.1.02.0012	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin						44.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			250.000.000,00	
		Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi	70 Orang		20 Orang	80 Orang	44.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Orang	250.000.000,00	Dinas Sosial
53.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**348.994.930,00**							**1.525.273.008,00**	
		Meningkatnya perlindungan sosial koorban bencana						***348.994.930,00***							***1.525.273.008,00***	
			1.Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	348.994.930,00						100 Persentase	1.525.273.008,00	
			2.Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	100 %		100 %	100 %	348.994.930,00						100 %	1.525.273.008,00	
			3.Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	100 %		100 %	100 %	348.994.930,00						100 %	1.525.273.008,00	
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi						348.994.930,00					Korban Bencana Alam dan Non Alam, Pengungsi Konflik/Kerusuhan sosial		1.525.273.008,00	
		Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi						348.994.930,00					Korban Bencana Alam dan Non Alam, Pengungsi Konflik/Kerusuhan sosial		1.525.273.008,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	200 Orang		60 Orang	200 Orang	57.650.000,00						200 Orang	80.800.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	200 Orang		100 Orang	150 Orang	77.784.130,00						200 Orang	1.374.473.008,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	100 Orang		0 Orang	100 Orang	74.530.000,00						100 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	34.150.000,00						50 Orang	70.000.000,00	
			Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	0 Orang		0 Orang	50 Orang	104.880.800,00						0 Orang	0,00	
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						74.530.000,00			-	-			0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	100 Orang		0 Orang	75 Orang	74.530.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Orang	0,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial						77.784.130,00			-	-			1.374.473.008,00	
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	200 Orang		100 Orang	100 Orang	77.784.130,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200 Orang	1.374.473.008,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0015	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda						104.880.800,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	0 Orang		0 Orang	25 Orang	104.880.800,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Orang	0,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0018	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah						57.650.000,00			-	-			80.800.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	200 Orang		60 Orang	100 Orang	57.650.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200 Orang	80.800.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0019	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana						34.150.000,00			-	-			70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	34.150.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	70.000.000,00	Dinas Sosial
		UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu						**3.100.000.000,00**							**6.872.099.945,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.100.000.000,00**							**6.872.099.945,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**3.100.000.000,00**							**6.872.099.945,00**	
54.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.287.157.961,00**							**4.439.697.906,00**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah						***1.287.157.961,00***							***4.239.697.906,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	1.287.157.961,00						100 %	4.239.697.906,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						278.168.136,00					-		450.235.277,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						278.168.136,00					-		450.235.277,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	278.168.136,00						12 Dokumen	450.235.277,00	
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						278.168.136,00			-	-			450.235.277,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	278.168.136,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Dokumen	450.235.277,00	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						35.984.000,00					-		0,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						35.984.000,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		0 Paket	1 Paket	35.984.000,00						0 Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00						0 Orang	0,00	
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						35.984.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		0 Paket	2 Paket	35.984.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Paket	0,00	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Orang	0,00	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						138.403.372,00					-		248.697.961,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						138.403.372,00					-		248.697.961,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	57.591.600,00						3 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.499.672,00						1 Paket	6.197.961,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.996.800,00						1 Paket	2.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		10 Paket	9 Paket	18.460.000,00						2 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	58.855.300,00						1 Paket	100.000.000,00	
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.996.800,00			-	-			2.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.996.800,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	2.500.000,00	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18.460.000,00			-	-			40.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		10 Paket	5 Paket	18.460.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Paket	40.000.000,00	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						58.855.300,00			-	-			100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	58.855.300,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	100.000.000,00	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						57.591.600,00			-	-			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	57.591.600,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Paket	100.000.000,00	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.499.672,00			-	-			6.197.961,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.499.672,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	6.197.961,00	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					-		700.000.000,00	
		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		700.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket		0 Paket	15 Paket	0,00						108 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						1 Unit	600.000.000,00	
	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00			-	-			600.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	600.000.000,00	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00			-	-			100.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				108 Paket	100.000.000,00	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						645.545.053,00					-		1.520.764.668,00	
		Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan						645.545.053,00					-		1.520.764.668,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	194.270.833,00						12 Laporan	168.764.668,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	436.824.720,00						12 Laporan	1.300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.370.000,00						12 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.079.500,00						12 Laporan	2.000.000,00	
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.079.500,00			-	-			2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.079.500,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	2.000.000,00	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						194.270.833,00			-	-			168.764.668,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	194.270.833,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	168.764.668,00	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.370.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.370.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	50.000.000,00	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						436.824.720,00			-	-			1.300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	436.824.720,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	1.300.000.000,00	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						189.057.400,00					-		1.520.000.000,00	
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya						189.057.400,00					-		1.520.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	109.936.400,00						1 Unit	1.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	79.121.000,00						9 Unit	105.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		0 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	5.000.000,00	
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						79.121.000,00			-	-			105.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	6 Unit	79.121.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				9 Unit	105.000.000,00	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
	1.06.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00			-	-			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	10.000.000,00	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00			-	-			5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Unit	5.000.000,00	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						109.936.400,00			-	-			1.400.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	109.936.400,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	1.400.000.000,00	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
55.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**1.812.842.039,00**							**2.432.402.039,00**	
		Meningkatnya Rehabilitasi Sosial						***1.812.842.039,00***							***2.432.402.039,00***	
			1.Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %		100 %	100 %	1.812.842.039,00						100 %	2.432.402.039,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti						1.812.842.039,00					-		2.432.402.039,00	
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya						1.812.842.039,00					-		2.432.402.039,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	6 Orang		0 Orang	8 Orang	0,00						10 Orang	23.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	3 Orang		0 Orang	3 Orang	0,00						3 Orang	53.802.039,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	152.348.600,00						40 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	1.537.267.500,00						40 Orang	1.600.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	45.252.470,00						40 Orang	195.000.000,00	
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	12.040.110,00						10 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang		60 Orang	60 Orang	65.933.359,00						60 Orang	300.000.000,00	
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan						1.537.267.500,00			-	-			1.600.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	1.537.267.500,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				40 Orang	1.600.000.000,00	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang						45.252.470,00			-	-			195.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	45.252.470,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				40 Orang	195.000.000,00	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu						0,00			-	-			23.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	6 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Orang	23.600.000,00	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial						152.348.600,00			-	-			250.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	152.348.600,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				40 Orang	250.000.000,00	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						65.933.359,00			-	-			300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang		60 Orang	55 Orang	65.933.359,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				60 Orang	300.000.000,00	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						0,00			-	-			53.802.039,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	3 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Orang	53.802.039,00	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan						12.040.110,00			-	-			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	7 Orang	12.040.110,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Orang	10.000.000,00	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						**10.396.917.835,00**							**80.922.894.805,44**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.046.817.335,00**							**80.726.353.783,68**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**10.046.817.335,00**							**80.726.353.783,68**	
56.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**7.355.077.335,00**							**65.282.485.685,69**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah						***7.350.077.335,00***							***65.042.485.685,69***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	7.350.077.335,00						100 %	65.042.485.685,69	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00					ASN Disnakertrans		100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi						5.000.000,00					ASN Disnakertrans		100.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	5.000.000,00						1 Data	100.000.000,00	
	2.07.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						5.000.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Data	100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.899.705.289,00					ASN Disnakertrans		13.131.385.685,69	
		Tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						6.899.705.289,00					ASN Disnakertrans		13.131.385.685,69	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	283.560.000,00						12 Dokumen	320.892.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/ Bulan		45 Orang/ Bulan	80 Orang/ Bulan	6.616.145.289,00						85 Orang/ Bulan	12.810.493.685,69	
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.616.145.289,00			-	-			12.810.493.685,69	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/ Bulan		45 Orang/ Bulan	43 Orang/ Bulan	6.616.145.289,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				85 Orang/ Bulan	12.810.493.685,69	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						283.560.000,00			-	-			320.892.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	283.560.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Dokumen	320.892.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.750.000,00					ASN Disnakertrans		122.100.000,00	
		Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						30.750.000,00					ASN Disnakertrans		122.100.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	44 Paket		0 Paket	44 Paket	15.750.000,00						44 Paket	22.100.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	15.000.000,00						10 Orang	100.000.000,00	
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						15.750.000,00			-	-			22.100.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	44 Paket		0 Paket	45 Paket	15.750.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Paket	22.100.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						15.000.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	2 Orang	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Orang	100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						263.720.174,00					ASN Disnakertrans		51.660.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						263.720.174,00					ASN Disnakertrans		51.660.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen		360 Dokumen	360 Dokumen	3.500.000,00						360 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	160.471.374,00						12 Laporan	1.500.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	68.994.800,00						12 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	5.566.000,00						12 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	900.000,00						4 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	10 Paket	5.000.000,00						5 Paket	50.000.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	19.288.000,00						12 Paket	30.000.000,00	
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						900.000,00			-	-			5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	900.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Paket	5.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00			-	-			50.000.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Paket	50.000.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						19.288.000,00			-	-			30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	19.288.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Paket	30.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						68.994.800,00			-	-			100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	68.994.800,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Paket	100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.566.000,00			-	-			20.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	5.566.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Paket	20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						3.500.000,00			-	-			5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen		360 Dokumen	12 Dokumen	3.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				360 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						160.471.374,00			-	-			1.500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	160.471.374,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	1.500.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						78.087.592,00					ASN Disnakertrans		89.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						78.087.592,00					ASN Disnakertrans		89.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	76.361.592,00						12 Laporan	84.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.726.000,00						12 Laporan	5.000.000,00	
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.726.000,00			-	-			5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.726.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	5.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						76.361.592,00			-	-			84.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	76.361.592,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	84.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						77.814.280,00					ASN Disnakertrans		180.000.000,00	
		Terkelolanya BMD yang pada perangkat daerah						77.814.280,00					ASN Disnakertrans		180.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit		26 Unit	26 Unit	75.814.280,00						26 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	2.000.000,00						15 Unit	30.000.000,00	
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						75.814.280,00			-	-			150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit		26 Unit	26 Unit	75.814.280,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				26 Unit	150.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.000.000,00			-	-			30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	2 Unit	2.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				15 Unit	30.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
57.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**						**5.000.000,00**							**0,00**	
		Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja						***5.000.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja sesuai standar	100 %		100 %	100 %	5.000.000,00						100 %	0,00	
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						5.000.000,00					-		0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota						5.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	0 Orang		1 Orang	0 Orang	5.000.000,00						0 Orang	0,00	
	2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro						5.000.000,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	0 Orang		1 Orang	50 Orang	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Orang	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
58.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**215.000.000,00**							**2.970.352.806,99**	
		Meningkatnya keterampilan tenaga kerja						***215.000.000,00***							***2.970.352.806,99***	
			1.Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	5.23 %		3.92 %	4.24 %	215.000.000,00						4.57 %	2.970.352.806,99	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi						215.000.000,00					Pencari Kerja		2.970.352.806,99	
		Terlaksananya pelatihan ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan						215.000.000,00					Pencari Kerja		2.970.352.806,99	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	36 Orang		16 Orang	36 Orang	215.000.000,00						36 Orang	2.970.352.806,99	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi						215.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan			2.970.352.806,99	
		Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	36 Orang		16 Orang	16 Orang	215.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				36 Orang	2.970.352.806,99	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
59.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**135.000.000,00**							**584.451.973,00**	
		Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan lowongan pekerjaan suatu wilayah						***5.000.000,00***							***287.087.604,00***	
		Meningkatnya akses dan informasi penempatan tenaga kerja dalam negeri maupun luar negeri						***130.000.000,00***							***584.451.973,00***	
			1.Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten / Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	63.20 %		55.20 %	57.20 %	130.000.000,00						59.20 %	584.451.973,00	
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000,00					Pencari Kerja		287.087.604,00	
		Terlaksananya pelatihan ketenagakerjaan berbasis kewirausahaan						5.000.000,00					Pencari Kerja		287.087.604,00	
			Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	5 Orang		5 Orang	5 Orang	5.000.000,00						5 Orang	287.087.604,00	
		Terlaksananya pelayanan antar kerja						5.000.000,00					Pencari Kerja		287.087.604,00	
			Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	5 Orang		5 Orang	5 Orang	5.000.000,00						5 Orang	287.087.604,00	
	2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan						5.000.000,00			-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan			287.087.604,00	
		Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	5 Orang		5 Orang	1 Orang	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Orang	287.087.604,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						90.000.000,00					Perusahaan dan Pekerja		192.010.827,00	
		Terlaksananya pelayanan informasi pasar kerja						90.000.000,00					Perusahaan dan Pekerja		192.010.827,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	5 Orang		5 Orang	5 Orang	90.000.000,00						5 Orang	192.010.827,00	
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja						90.000.000,00			-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan			192.010.827,00	
		Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	5 Orang		5 Orang	5 Orang	90.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Orang	192.010.827,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi						5.000.000,00					Perusahaan dan Pekerja		61.253.542,00	
		Terlaksananya pelayanan penempatan tenaga kerja luar negeri dan TKA						5.000.000,00					Perusahaan dan Pekerja		61.253.542,00	
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	1 Orang		1 Orang	1 Orang	5.000.000,00						1 Orang	61.253.542,00	
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)						5.000.000,00			-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan			61.253.542,00	
		Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	1 Orang		1 Orang	1 Orang	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Orang	61.253.542,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						35.000.000,00					Perusahaan dan Pekerja		44.100.000,00	
		Terlaksananya pelayanan penempatan tenaga kerja luar negeri dan TKA						35.000.000,00					Perusahaan dan Pekerja		44.100.000,00	
			Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	10 Orang		10 Orang	10 Orang	35.000.000,00						10 Orang	44.100.000,00	
	2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						35.000.000,00			-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan			44.100.000,00	
		Terlaksananya Pendataan TKA	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	10 Orang		10 Orang	21 Orang	35.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Orang	44.100.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
60.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**2.206.740.000,00**							**11.582.463.318,00**	
		Meningkatkan peran LKS tripartit dalam pemecahan masalah ketenagakerjaan						***2.161.740.000,00***							***11.582.463.318,00***	
			1.Presentase kebijakan hasil rapat tripartit yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	2.051.740.000,00						100 %	11.512.463.318,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi						110.000.000,00					-		671.970.000,00	
		Terlaksananya mediasi perselisihan hubungan industrial						110.000.000,00					-		671.970.000,00	
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	8 Lembaga		5 Lembaga	8 Lembaga	45.000.000,00						8 Lembaga	334.850.000,00	
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	12 Perkara		10 Perkara	12 Perkara	45.000.000,00						12 Perkara	217.120.000,00	
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara		5 Perkara	5 Perkara	20.000.000,00						8 Perkara	120.000.000,00	
		Terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial						110.000.000,00					-		671.970.000,00	
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	8 Lembaga		5 Lembaga	8 Lembaga	45.000.000,00						8 Lembaga	334.850.000,00	
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	12 Perkara		10 Perkara	12 Perkara	45.000.000,00						12 Perkara	217.120.000,00	
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara		5 Perkara	5 Perkara	20.000.000,00						8 Perkara	120.000.000,00	
		Terlaksananya pendataan pengusaha dan serikat pekerja						110.000.000,00					-		671.970.000,00	
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	8 Lembaga		5 Lembaga	8 Lembaga	45.000.000,00						8 Lembaga	334.850.000,00	
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	12 Perkara		10 Perkara	12 Perkara	45.000.000,00						12 Perkara	217.120.000,00	
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara		5 Perkara	5 Perkara	20.000.000,00						8 Perkara	120.000.000,00	
		Terlaksanya pembinaan LKS Tripartit						110.000.000,00					-		671.970.000,00	
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	8 Lembaga		5 Lembaga	8 Lembaga	45.000.000,00						8 Lembaga	334.850.000,00	
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	12 Perkara		10 Perkara	12 Perkara	45.000.000,00						12 Perkara	217.120.000,00	
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara		5 Perkara	5 Perkara	20.000.000,00						8 Perkara	120.000.000,00	
		Tersusunnya struktur skala upah di perusahaan						110.000.000,00					-		671.970.000,00	
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	8 Lembaga		5 Lembaga	8 Lembaga	45.000.000,00						8 Lembaga	334.850.000,00	
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	12 Perkara		10 Perkara	12 Perkara	45.000.000,00						12 Perkara	217.120.000,00	
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara		5 Perkara	5 Perkara	20.000.000,00						8 Perkara	120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi						20.000.000,00			-	-			120.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara		5 Perkara	5 Perkara	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				8 Perkara	120.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi						45.000.000,00			-	-			217.120.000,00	
		Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	12 Perkara		10 Perkara	5 Perkara	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Perkara	217.120.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi						45.000.000,00			-	-			334.850.000,00	
		Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	8 Lembaga		5 Lembaga	1 Lembaga	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				8 Lembaga	334.850.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)						2.096.740.000,00					Perusahaan dan Pekerja		10.910.493.318,00	
		Meningkatnya perlindungan pekerja rentan melalui bpjs ketenagakerjaan						2.096.740.000,00					Perusahaan dan Pekerja		10.910.493.318,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	54452 Orang		347 Orang	54452 Orang	1.986.740.000,00						54452 Orang	10.840.493.318,00	
		Terlaksanya penetapan UMP tepat waktu						2.096.740.000,00					Perusahaan dan Pekerja		10.910.493.318,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	54452 Orang		347 Orang	54452 Orang	1.986.740.000,00						54452 Orang	10.840.493.318,00	
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						1.986.740.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			10.840.493.318,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	54452 Orang		347 Orang	9425 Orang	1.986.740.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				54452 Orang	10.840.493.318,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam menerapkan tata kelola kerja yang layak						***2.161.740.000,00***							***11.582.463.318,00***	
			1.Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	7.06 %		4.98 %	5.50 %	110.000.000,00						6.02 %	70.000.000,00	
		Meningkatnya perlindungan pekerja rentan melalui bpjs ketenagakerjaan						2.096.740.000,00					Perusahaan dan Pekerja		10.910.493.318,00	
			Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan		1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	110.000.000,00						1 Surat Keputusan	70.000.000,00	
		Terlaksanya penetapan UMP tepat waktu						2.096.740.000,00					Perusahaan dan Pekerja		10.910.493.318,00	
			Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan		1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	110.000.000,00						1 Surat Keputusan	70.000.000,00	
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)						110.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			70.000.000,00	
		Ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan		1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	110.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Surat Keputusan	70.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
61.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**						**130.000.000,00**							**306.600.000,00**	
		Meningkatnyakepatuhan perusahaan dalam menerapkan peraturan ketenagakerjaan						***130.000.000,00***							***306.600.000,00***	
			1.Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan	4.40 %		3.01 %	3.36 %	130.000.000,00						3.71 %	306.600.000,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						130.000.000,00					Perusahaan dan Pekerja		306.600.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi penyelesaian pelanggaran norma kerja dan k3 di perusahaan						130.000.000,00					Perusahaan dan Pekerja		306.600.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	1625 Perusahaan		100 Perusahaan	1200 Perusahaan	130.000.000,00						1526 Perusahaan	306.600.000,00	
		Terlaksananya pemeriksaan dan pembinaan norma kerja dan k3 di perusahaan						130.000.000,00					Perusahaan dan Pekerja		306.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	1625 Perusahaan		100 Perusahaan	1200 Perusahaan	130.000.000,00						1526 Perusahaan	306.600.000,00	
		Terlaksananya pengujian objek k3						130.000.000,00					Perusahaan dan Pekerja		306.600.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	1625 Perusahaan		100 Perusahaan	1200 Perusahaan	130.000.000,00						1526 Perusahaan	306.600.000,00	
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan						130.000.000,00			-	-			306.600.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	1625 Perusahaan		100 Perusahaan	200 Perusahaan	130.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1526 Perusahaan	306.600.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**350.100.500,00**							**196.541.021,76**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**350.100.500,00**							**196.541.021,76**	
62.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**50.653.500,00**							**60.992.000,00**	
		Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana umum di wilayah transmigrasi						***50.653.500,00***							***60.992.000,00***	
			1.Persentase Satuan Permukiman Yang Dibangun Sarana dan Prasarana Dasar	40 %		20 %	25 %	50.653.500,00						30 %	60.992.000,00	
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						50.653.500,00					Warga Transmigrasi		60.992.000,00	
		Terlaksananya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana dasar di kawasan transmigrasi						50.653.500,00					Warga Transmigrasi		60.992.000,00	
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi		2 Lokasi	2 Lokasi	50.653.500,00						2 Lokasi	60.992.000,00	
		Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi tim KIPT Provinsi						50.653.500,00					Warga Transmigrasi		60.992.000,00	
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi		2 Lokasi	2 Lokasi	50.653.500,00						2 Lokasi	60.992.000,00	
	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi						50.653.500,00			-	-			60.992.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi		2 Lokasi	2 Lokasi	50.653.500,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Lokasi	60.992.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya peran lintas sektor dalam penyelenggaraan transmigrasi						***50.653.500,00***							***60.992.000,00***	
63.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**299.447.000,00**							**135.549.021,76**	
		Meningkatnya legalitas lahan transmigrasi						***299.447.000,00***							***135.549.021,76***	
			1.Persentase SHM Transmigrasi yang telah diterbitkan	71.44 %		69.89 %	70.28 %	227.423.500,00						70.66 %	27.902.021,76	
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan						299.447.000,00					Warga Transmigrasi		135.549.021,76	
		Terlaksananya fasilitasi sertifikasi lahan transmigrasi						299.447.000,00					Warga Transmigrasi		135.549.021,76	
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	71.44 Satuan Permukiman		69.89 Satuan Permukiman	70.28 Satuan Permukiman	227.423.500,00						70.66 Satuan Permukiman	27.902.021,76	
		Terlaksananya pembinaan dan peningkatan keterampilan transmigrasi						299.447.000,00					Warga Transmigrasi		135.549.021,76	
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	71.44 Satuan Permukiman		69.89 Satuan Permukiman	70.28 Satuan Permukiman	227.423.500,00						70.66 Satuan Permukiman	27.902.021,76	
	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman						227.423.500,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			27.902.021,76	
		Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	71.44 Satuan Permukiman		69.89 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman	227.423.500,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				70.66 Satuan Permukiman	27.902.021,76	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya pemberdayaan wirausaha transmigrasi						***299.447.000,00***							***135.549.021,76***	
			1.Persentase kelompok wirausaha transmigrasi aktif	100 %		100 %	100 %	72.023.500,00						100 %	107.647.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi sertifikasi lahan transmigrasi						299.447.000,00					Warga Transmigrasi		135.549.021,76	
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	100 Kepala Keluarga		100 Kepala Keluarga	100 Kepala Keluarga	72.023.500,00						100 Kepala Keluarga	107.647.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan peningkatan keterampilan transmigrasi						299.447.000,00					Warga Transmigrasi		135.549.021,76	
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	100 Kepala Keluarga		100 Kepala Keluarga	100 Kepala Keluarga	72.023.500,00						100 Kepala Keluarga	107.647.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman						72.023.500,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			107.647.000,00	
		Terwujudnya Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	100 Kepala Keluarga		100 Kepala Keluarga	50 Kepala Keluarga	72.023.500,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				100 Kepala Keluarga	107.647.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						**10.273.519.070,00**							**15.904.711.816,24**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.273.519.070,00**							**15.904.711.816,24**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**10.032.790.155,00**							**15.319.411.816,24**	
64.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**9.208.465.425,00**							**13.437.736.816,24**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah						***9.178.465.425,00***							***13.267.736.816,24***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	9.178.465.425,00						100 %	13.267.736.816,24	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.000.000,00					Seluruh ASN dan PPPK di Lingkungan DP3AP2KB		100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00					Seluruh ASN dan PPPK di Lingkungan DP3AP2KB		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00						4 Laporan	100.000.000,00	
	2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.000.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.491.605.825,00					Seluruh ASN dan PPPK di Lingkungan DP3AP2KB		11.230.000.000,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai regulasi						8.491.605.825,00					Seluruh ASN dan PPPK di Lingkungan DP3AP2KB		11.230.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	193.000.000,00						1 Dokumen	415.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ Bulan		14 Orang/ Bulan	14 Orang/ Bulan	8.298.605.825,00						14 Orang/ Bulan	10.815.000.000,00	
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.298.605.825,00			-	-			10.815.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ Bulan		14 Orang/ Bulan	14 Orang/ Bulan	8.298.605.825,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Orang/ Bulan	10.815.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						193.000.000,00			-	-			415.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	193.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	415.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.000.000,00					Seluruh ASN dan PPPK di Lingkungan DP3AP2KB		150.000.000,00	
		terpenuhinya kelengkapan dokumen administrasi kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						30.000.000,00					Seluruh ASN dan PPPK di Lingkungan DP3AP2KB		150.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	30.000.000,00						5 Orang	150.000.000,00	
	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						30.000.000,00			-	-			150.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	4 Orang	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Orang	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						298.000.000,00					Seluruh ASN dan PPPK di Lingkungan DP3AP2KB		1.087.736.816,24	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						298.000.000,00					Seluruh ASN dan PPPK di Lingkungan DP3AP2KB		1.087.736.816,24	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00						12 Laporan	851.736.816,24	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	120.000.000,00						2 Paket	230.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	3.000.000,00						5 Paket	6.000.000,00	
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00			-	-			6.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	1 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Paket	6.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						120.000.000,00			-	-			230.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	120.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Paket	230.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						175.000.000,00			-	-			851.736.816,24	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	851.736.816,24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						15.000.000,00					Seluruh ASN dan PPPK di Lingkungan DP3AP2KB		250.000.000,00	
		Pengadaan barang yang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi						15.000.000,00					Seluruh ASN dan PPPK di Lingkungan DP3AP2KB		250.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		3 Unit	5 Unit	15.000.000,00						5 Unit	250.000.000,00	
	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00			-	-			250.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		3 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Unit	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						162.000.000,00					Seluruh ASN dan PPPK di Lingkungan DP3AP2KB		260.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						162.000.000,00					Seluruh ASN dan PPPK di Lingkungan DP3AP2KB		260.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	48.000.000,00						12 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	108.000.000,00						12 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.000.000,00			-	-			10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						48.000.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	48.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						108.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	108.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						181.859.600,00					Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB		360.000.000,00	
		BMD yang terpelihara						181.859.600,00					Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB		360.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	67.799.600,00						4 Unit	170.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit		5 Unit	5 Unit	110.000.000,00						6 Unit	170.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		4 Unit	10 Unit	4.060.000,00						14 Unit	20.000.000,00	
	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						110.000.000,00			-	-			170.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit		5 Unit	5 Unit	110.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Unit	170.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						67.799.600,00			-	-			170.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	67.799.600,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Unit	170.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.060.000,00			-	-			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		4 Unit	3 Unit	4.060.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Unit	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
65.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**125.764.000,00**							**240.000.000,00**	
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender bagi Perangkat Daerah						***125.764.000,00***							***240.000.000,00***	
			1.Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	4.50 Persentase		3.50 Persentase	3.77 Persentase	125.764.000,00						3.90 Persentase	240.000.000,00	
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi						115.764.000,00					Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		210.000.000,00	
		Jumlah dokumen penunjang pelembagaan PUG termasuk PPRG						115.764.000,00					Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		210.000.000,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	-		-	-	20.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah SDM Perangkat Daerah Provinsi dan kab/kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	95.764.000,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.02.1.01.0013	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi						20.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			60.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	-		-	5 Lembaga	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	60.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.02.1.01.0014	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG bagi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi dan Perangkat Daerah Penggerak PUG Tingkat Kab/Kota						95.764.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			150.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG bagi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi dan Perangkat Daerah Penggerak PUG Tingkat Kab/Kota	Jumlah SDM Perangkat Daerah Provinsi dan kab/kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	35 Orang	95.764.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi						10.000.000,00					-		30.000.000,00	
		Jumlah kader parpol/organisasi perempuan yang dibina						10.000.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	10.000.000,00						-	30.000.000,00	
	2.08.02.1.02.0010	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Provinsi						10.000.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			30.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	1 Lembaga	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
66.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**103.364.000,00**							**245.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan terhadap Perempuan Korban Kekerasan						***103.364.000,00***							***245.000.000,00***	
			1.Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %		100 %	100 %	103.364.000,00						100 %	245.000.000,00	
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi						103.364.000,00					Masyarakat, Organisasi Perempuan, Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO		245.000.000,00	
		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang diberikan penguatan dan pendampingan						103.364.000,00					Masyarakat, Organisasi Perempuan, Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO		245.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	20.000.000,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	83.364.000,00						-	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.03.1.03.0011	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi						20.000.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			45.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	13 Lembaga	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	45.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.03.1.03.0013	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi						83.364.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			200.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	30 Orang	83.364.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
67.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**122.156.900,00**							**250.000.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan						***122.156.900,00***							***250.000.000,00***	
			1.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	57.00 %		54.20 %	55.00 %	122.156.900,00						55.75 %	250.000.000,00	
	2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota						122.156.900,00					Masayarakat, Organisasi Perempuan, Perempuan Kepala Keluarga		250.000.000,00	
		Jumlah keluarga yang mendapatakan pelayanan dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah						122.156.900,00					Masayarakat, Organisasi Perempuan, Perempuan Kepala Keluarga		250.000.000,00	
			Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	35 Orang		20 Orang	25 Orang	122.156.900,00						30 Orang	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.04.1.03.0005	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						122.156.900,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			250.000.000,00	
		Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	35 Orang		20 Orang	30 Orang	122.156.900,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				30 Orang	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
68.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**						**105.000.000,00**							**541.375.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Data Gender dan Anak						***105.000.000,00***							***541.375.000,00***	
			1.Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	105.000.000,00						100 Persentase	541.375.000,00	
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi						105.000.000,00					Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Vertikal		541.375.000,00	
		Jumlah dokumen yang berisi data gender dan anak						105.000.000,00					Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Vertikal		541.375.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat provinsi yang Tersedia	-		-	-	75.000.000,00						-	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA, mencakup beberapa hal, seperti: pelaksanan Bimtek di tingkat daerah, komposisi penyelenggara, pengelolaan data, Kebijakan & SOP pendukung, mekanisme validasi, pemanfaatan data, rencana tindak lanjut, dan lain sebagainya	-		-	-	30.000.000,00						-	291.375.000,00	
		Jumlah dokumen yang berisi data Simfoni PPPA						105.000.000,00					Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Vertikal		541.375.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat provinsi yang Tersedia	-		-	-	75.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA, mencakup beberapa hal, seperti: pelaksanan Bimtek di tingkat daerah, komposisi penyelenggara, pengelolaan data, Kebijakan & SOP pendukung, mekanisme validasi, pemanfaatan data, rencana tindak lanjut, dan lain sebagainya	-		-	-	30.000.000,00						-	291.375.000,00	
	2.08.05.1.01.0006	Penguatan Penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA untuk Penyediaan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berkualitas						30.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			291.375.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui optimalisasi penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA di daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA, mencakup beberapa hal, seperti: pelaksanan Bimtek di tingkat daerah, komposisi penyelenggara, pengelolaan data, Kebijakan & SOP pendukung, mekanisme validasi, pemanfaatan data, rencana tindak lanjut, dan lain sebagainya	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	291.375.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.05.1.01.0007	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak tingkat provinsi						75.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			250.000.000,00	
		Tersedianya Data Gender dan Anak tingkat provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat provinsi yang Tersedia	-		-	1 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
69.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**245.710.915,00**							**400.300.000,00**	
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak						***245.710.915,00***							***400.300.000,00***	
			1.Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	100 Persentase		60 Persentase	60 Persentase	245.710.915,00						80 Persentase	400.300.000,00	
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi						60.191.200,00					Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, dan Anak		150.000.000,00	
		Jumlah lembaga PHA						60.191.200,00					Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, dan Anak		150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi	-		-	-	60.191.200,00						-	150.000.000,00	
	2.08.06.1.01.0011	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi						60.191.200,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			150.000.000,00	
		Tersusunnya kebijakan terkait penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi	-		-	1 Kebijakan	60.191.200,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						185.519.715,00					Masyarakat, Organisasi Anak, Forum Anak Daerah, OPD Terkait		250.300.000,00	
		Jumlah lembaga penyedia layanan						185.519.715,00					Masyarakat, Organisasi Anak, Forum Anak Daerah, OPD Terkait		250.300.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	-		-	-	40.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	-	145.519.715,00						-	175.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.06.1.02.0014	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						40.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			75.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	-		-	1 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.06.1.02.0016	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						145.519.715,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			175.300.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	25 Orang	145.519.715,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	175.300.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
70.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**122.328.915,00**							**205.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Terhadap Anak Korban Kekerasan						***122.328.915,00***							***205.000.000,00***	
			1.Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %		100 %	100 %	122.328.915,00						100 %	205.000.000,00	
			1.Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	52:52 %		56:56 %	55:55 %	122.328.915,00						54:54 %	205.000.000,00	
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						102.328.915,00					Tokoh Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, PATBM dan Organisasi Masyarakat		160.000.000,00	
		Rasio dan persentase kekerasan terhadap anak						102.328.915,00					Tokoh Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, PATBM dan Organisasi Masyarakat		160.000.000,00	
			Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi	-		-	-	102.328.915,00						-	160.000.000,00	
	2.08.07.1.01.0015	Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi						102.328.915,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			160.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA)	Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi	-		-	30 Orang	102.328.915,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	160.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00					-		45.000.000,00	
		Jumlah lembaga layanan bagi anak yang diberikan penguatan dan pengembangan						20.000.000,00					-		45.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	20.000.000,00						-	45.000.000,00	
	2.08.07.1.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi						20.000.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			45.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	13 Lembaga	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	45.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**240.728.915,00**							**585.300.000,00**	
71.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**40.000.000,00**							**250.000.000,00**	
		Meningkatnya Pengendalian Angka Kelahiran Total						***40.000.000,00***							***250.000.000,00***	
			1.TFR (Angka Kelahiran Total)	2.18 Jiwa		2.24 Jiwa	2.22 Jiwa	40.000.000,00						2.21 Jiwa	250.000.000,00	
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						40.000.000,00					Kampung KB, Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat		250.000.000,00	
		Jumlah pertemuan untuk Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						40.000.000,00					Kampung KB, Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat		250.000.000,00	
			Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	4 Daerah		0 Daerah	2 Daerah	40.000.000,00						3 Daerah	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.02.1.01.0024	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain						40.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			250.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	4 Daerah		0 Daerah	1 Daerah	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Daerah	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
72.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**40.000.000,00**							**75.000.000,00**	
		Meningkatnya Penggunaan Alat Kontrasepsi Modern						***40.000.000,00***							***75.000.000,00***	
			1.Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	72.00 %		69.20 %	70.00 %	40.000.000,00						71.00 %	75.000.000,00	
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal						40.000.000,00					Calon Pengantin, Generasi Berencana, UPPKS dan Kader dan Penyuluh KB		75.000.000,00	
		Jumlah Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal						40.000.000,00					Calon Pengantin, Generasi Berencana, UPPKS dan Kader dan Penyuluh KB		75.000.000,00	
			Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan	2 Daerah		0 Daerah	1 Daerah	40.000.000,00						2 Daerah	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.03.1.01.0009	Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan						40.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			75.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan	2 Daerah		0 Daerah	1 Daerah	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Daerah	75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
73.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**160.728.915,00**							**260.300.000,00**	
		Menurunnya Angka Kelahiran Remaja						***160.728.915,00***							***260.300.000,00***	
			1.Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	23.40-23.40 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun		25.25-25.25 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	24.85-24.85 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	160.728.915,00						24.46-24.46 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	260.300.000,00	
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						92.855.457,50					Masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah		85.000.000,00	
		Jumlah Pembangunan Ketahan Keluarga yang dibina						92.855.457,50					Masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah		85.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	92.855.457,50						1 Laporan	85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.04.1.01.0028	Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)						92.855.457,50			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			85.000.000,00	
		Terlaksananya Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	92.855.457,50	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	85.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						67.873.457,50					Masyarakat, Keluarga Rentan		175.300.000,00	
		Jumlah Kualitas Keluarga Sejahtera						67.873.457,50					Masyarakat, Keluarga Rentan		175.300.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	67.873.457,50						1 Laporan	175.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.04.1.02.0011	Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga						67.873.457,50			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			175.300.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	67.873.457,50	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	175.300.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak						**1.000.000.000,00**							**2.820.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.000.000.000,00**							**2.820.000.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**1.000.000.000,00**							**2.820.000.000,00**	
74.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**704.150.188,00**							**1.690.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah						***704.150.188,00***							***1.490.000.000,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	704.150.188,00						100 %	1.490.000.000,00	
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						112.800.000,00					-		200.000.000,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						112.800.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	112.800.000,00						12 Dokumen	200.000.000,00	
	2.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						112.800.000,00			-	-			200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	8 Dokumen	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	-				12 Dokumen	200.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						129.958.028,00					-		650.000.000,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						129.958.028,00					-		650.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	85.815.528,00						12 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	33.075.200,00						5 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.922.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.145.300,00						1 Paket	50.000.000,00	
	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						9.145.300,00			-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.145.300,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	50.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						33.075.200,00			-	-			200.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	33.075.200,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Paket	200.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.922.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.922.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	100.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						85.815.528,00			-	-			300.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	85.815.528,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	300.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						247.065.160,00					-		480.000.000,00	
		Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan						247.065.160,00					-		480.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.240.800,00						12 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	205.674.360,00						12 Laporan	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.150.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.150.000,00			-	-			10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	1.150.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	10.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						40.240.800,00			-	-			70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.240.800,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	70.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						205.674.360,00			-	-			400.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	205.674.360,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	400.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						214.327.000,00					-		360.000.000,00	
		Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya						214.327.000,00					-		360.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		6 Unit	8 Unit	75.267.000,00						8 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	4.060.000,00						15 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	135.000.000,00						1 Unit	180.000.000,00	
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						75.267.000,00			-	-			150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		6 Unit	6 Unit	75.267.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				8 Unit	150.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.060.000,00			-	-			30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	4.060.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				15 Unit	30.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						135.000.000,00			-	-			180.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	135.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	180.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
75.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**144.649.812,00**							**530.000.000,00**	
		Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan						***144.649.812,00***							***280.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)	52:52 %		56:56 %	55:55 %	144.649.812,00						54:54 %	280.000.000,00	
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						144.649.812,00					-		530.000.000,00	
		Presentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan						144.649.812,00					-		530.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	10.800.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	8.480.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	56.305.312,00						-	130.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	38.720.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	3.594.500,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	6.750.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	20.000.000,00						-	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.03.1.02.0011	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						6.750.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	15 Orang	6.750.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	50.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.1.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						8.480.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	15 Orang	8.480.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	100.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.1.02.0014	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						10.800.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	15 Orang	10.800.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	-				-	50.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.1.02.0015	Layanan spesifik bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3.594.500,00			-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Layanan spesifik bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	15 Orang	3.594.500,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	50.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.1.02.0016	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						56.305.312,00			-	-			130.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	15 Orang	56.305.312,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	130.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.03.1.02.0017	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	15 Orang	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	100.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.1.02.0018	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						38.720.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	15 Orang	38.720.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	50.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
76.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**151.200.000,00**							**600.000.000,00**	
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak						***151.200.000,00***							***350.000.000,00***	
			1.Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	7:7 %		9.5:9.5 %	8.5:8.5 %	151.200.000,00						8:8 %	350.000.000,00	
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi						151.200.000,00					-		600.000.000,00	
		Persentase jumlah anak yang mendapatkan perlindungan khusus						151.200.000,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	10.500.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	18.300.000,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	11.400.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	63.004.400,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	2.666.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	5.329.600,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	40.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.08.07.1.02.0016	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						10.500.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	10.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	-				-	50.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.07.1.02.0017	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						11.400.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	25 Orang	11.400.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	100.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.07.1.02.0018	Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						18.300.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	25 Orang	18.300.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	50.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.07.1.02.0019	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						40.000.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	-				-	100.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.07.1.02.0020	Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						5.329.600,00			-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	20 Orang	5.329.600,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	50.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.07.1.02.0022	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						2.666.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	25 Orang	2.666.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	50.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.07.1.02.0023	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						63.004.400,00			-	-			200.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	25 Orang	63.004.400,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	200.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Dinas Lingkungan Hidup						**7.714.610.710,00**							**12.663.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.714.610.710,00**							**12.663.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**7.714.610.710,00**							**12.663.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
77.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**7.094.610.710,00**							**9.083.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah						***7.084.610.710,00***							***9.083.000.000,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100.00 %		100.00 %	100.00 %	7.084.610.710,00						100.00 %	9.083.000.000,00	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00					ASN dan PTT DLH Kaltara		60.000.000,00	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi						20.000.000,00					ASN dan PTT DLH Kaltara		60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00						4 Laporan	60.000.000,00	
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			60.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.589.610.710,00					ASN dan PTT DLH Kaltara		7.000.000.000,00	
		Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						6.589.610.710,00					ASN dan PTT DLH Kaltara		7.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	389.610.710,00						4 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/ Bulan		45 Orang/ Bulan	46 Orang/ Bulan	6.200.000.000,00						47 Orang/ Bulan	6.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.200.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			6.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/ Bulan		45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	6.200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				47 Orang/ Bulan	6.500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						389.610.710,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			500.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	389.610.710,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						12.000.000,00					ASN DLH Kaltara		200.000.000,00	
		Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						12.000.000,00					ASN DLH Kaltara		200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang		15 Orang	15 Orang	12.000.000,00						15 Orang	200.000.000,00	
	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						12.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			200.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang		15 Orang	5 Orang	12.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Orang	200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						321.000.000,00					DLH Kaltara		1.368.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						321.000.000,00					DLH Kaltara		1.368.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00						2 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	300.000.000,00						4 Laporan	870.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		5 Paket	6 Paket	10.000.000,00						7 Paket	210.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.000.000,00						2 Paket	28.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	5.000.000,00						3 Paket	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			250.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Paket	250.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			210.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		5 Paket	4 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7 Paket	210.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			28.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	28.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						1.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						300.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			870.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	870.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						52.000.000,00					DLH Kaltara		155.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						52.000.000,00					DLH Kaltara		155.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	43.000.000,00						4 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00						4 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00						4 Laporan	30.000.000,00	
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						43.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	43.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			45.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	45.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100.000.000,00					DLH Kaltara		300.000.000,00	
		Barang Milik Daerah (BMD) yang terpelihara						100.000.000,00					DLH Kaltara		300.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		5 Unit	6 Unit	40.000.000,00						6 Unit	190.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit		17 Unit	17 Unit	60.000.000,00						17 Unit	110.000.000,00	
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						60.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			110.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit		17 Unit	20 Unit	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				17 Unit	110.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						40.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			190.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		5 Unit	5 Unit	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Unit	190.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
78.	**2.11.02**	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**						**70.000.000,00**							**250.000.000,00**	
		Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Kebijakan Rencana dan/atau Program						***70.000.000,00***							***250.000.000,00***	
			1.Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Yang Ditindaklanjuti	45.00 %		25.00 %	30.00 %	70.000.000,00						35.00 %	250.000.000,00	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi						40.000.000,00					5 Kabupaten dan Kota		0,00	
		Tersusunnya Dokumen Pendukung RPPLH						40.000.000,00					5 Kabupaten dan Kota		0,00	
			Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						Dokumen	0,00	
	2.11.02.1.01.0006	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi						40.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			0,00	
		RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi						30.000.000,00					5 Kabupaten dan Kota		250.000.000,00	
		Dokumen KLHS yang disusun/Divalidasi/Dibina						30.000.000,00					5 Kabupaten dan Kota		250.000.000,00	
			Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00						5 Dokumen	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.02.1.02.0009	Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota						30.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			250.000.000,00	
		Tersedianya dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
79.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**195.000.000,00**							**850.000.000,00**	
		Meningkatnya Status Mutu Air Sungai, Udara dan Air Laut						***135.000.000,00***							***650.000.000,00***	
			1.Persentase pemenuhan Status mutu Air Sungai dengan Kategori Baik	29.00 %		25.00 %	26.00 %	135.000.000,00						27.00 %	650.000.000,00	
			2.Persentase Parameter Status Mutu Udara yang Memenuhi Baku Mutu	85.00 %		70.00 %	73.00 %	135.000.000,00						76.00 %	650.000.000,00	
			3.Persentase Status mutu Air laut Kategori Baik berdasarkan Baku Mutu Air laut	100.00 %		100.00 %	100.00 %	135.000.000,00						100.00 %	650.000.000,00	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup						195.000.000,00					5 Kabupaten dan Kota, Pelaku Usaha, Desa/Kelurahan		850.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pencegahan pencemaran dan/Kerusakan Lingkungan Hidup						195.000.000,00					5 Kabupaten dan Kota, Pelaku Usaha, Desa/Kelurahan		850.000.000,00	
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	3 Lokasi		3 Lokasi	3 Lokasi	105.000.000,00						3 Lokasi	350.000.000,00	
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	1 laporan		1 laporan	1 laporan	30.000.000,00						1 laporan	200.000.000,00	
			Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
	2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi						30.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			200.000.000,00	
		Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.1.01.0008	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut						30.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			200.000.000,00	
		Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	1 laporan		1 laporan	1 laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 laporan	200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						105.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	3 Lokasi		3 Lokasi	3 Lokasi	105.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Lokasi	350.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.1.01.0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK						30.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			100.000.000,00	
		Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
80.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**40.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman hayati pada Ruang Terbuka Hijau						***40.000.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase RTH	0.06972 Persentase		0.06968 Persentase	0.06969 Persentase	40.000.000,00						0.06970 Persentase	0,00	
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi						40.000.000,00					5 Kabupaten dan Kota		0,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Kenakekaragaman Hayati						40.000.000,00					5 Kabupaten dan Kota		0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						40.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			0,00	
		Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
81.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**						**30.000.000,00**							**300.000.000,00**	
		Meningkatnya Penanganan Limbah B3 oleh Pengumpul dan Penghasil Limbah B3						***30.000.000,00***							***300.000.000,00***	
			1.Persentase Limbah B3 yang ditangani oleh Pengumpul Limbah B3	97.50 %		95.50 %	96.00 %	30.000.000,00						96.50 %	300.000.000,00	
			2.Persentase Limbah B3 yang ditangani oleh Penghasil Limbah B3	97.50 %		95.50 %	96.00 %	30.000.000,00						96.50 %	300.000.000,00	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						30.000.000,00					Pengumpul dan Penghasil Limbah B3		300.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Limbah B3						30.000.000,00					Pengumpul dan Penghasil Limbah B3		300.000.000,00	
			Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan	30 Usaha		Usaha	18 Usaha	30.000.000,00						20 Usaha	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.05.1.01.0004	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi						30.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			300.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan	30 Usaha		Usaha	3 Usaha	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Usaha	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
82.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**120.000.000,00**							**750.000.000,00**	
		Meningkatnya pelaku Usaha dan/Kegiatan kewenangan provinsi yang dilakukan Pembinaan dan pengawasan						***120.000.000,00***							***750.000.000,00***	
			1.Persentase pelaku usaha dan/atau Kegiatan Kewenangan Provinsi yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	60.00 %		56.00 %	57.00 %	120.000.000,00						58.00 %	750.000.000,00	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						120.000.000,00					Pelaku Usaha dan/Atau Kegiatan		750.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dan/kegiatan Kewenangan Provinsi						120.000.000,00					Pelaku Usaha dan/Atau Kegiatan		750.000.000,00	
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	55 Usaha/Kegiatan		20 Usaha/Kegiatan	45 Usaha/Kegiatan	80.000.000,00						47 Usaha/Kegiatan	550.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	10 Dokumen		5 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000,00						8 Dokumen	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						40.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			200.000.000,00	
		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan 0perasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	10 Dokumen		5 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.06.1.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						80.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			550.000.000,00	
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	55 Usaha/Kegiatan		20 Usaha/Kegiatan	20 Usaha/Kegiatan	80.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				47 Usaha/Kegiatan	550.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
83.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**40.000.000,00**							**130.000.000,00**	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup						***40.000.000,00***							***130.000.000,00***	
			1.Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya.	100.00 %		100.00 %	100.00 %	40.000.000,00						100.00 %	130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi						40.000.000,00					Penyuluh Lingkungan Hidup Provinsi dan Kab/Kota serta Masyarakat, Pelaku Usaha dan Dunia Pendidikan		130.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pendampingan dan pelatihan masyarakat/Lembaga/Masyarakat/Dunia Pendidikan dalam pengelolaan lingkungan Hidup						40.000.000,00					Penyuluh Lingkungan Hidup Provinsi dan Kab/Kota serta Masyarakat, Pelaku Usaha dan Dunia Pendidikan		130.000.000,00	
			Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	4 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00						3 Dokumen	130.000.000,00	
	2.11.08.1.01.0007	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						40.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			130.000.000,00	
		Terlaksananya pengembangan generasi lingkungan melalui pembinaan, pendampingan, pembentukan dan pemberdayaan kader lingkungan, penyuluhan, dan pemberian penghargaan	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	4 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	130.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
84.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**25.000.000,00**							**300.000.000,00**	
		Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						***25.000.000,00***							***300.000.000,00***	
			1.Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	30.00 %		17.00 %	20.00 %	25.000.000,00						23.00 %	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi						25.000.000,00					Kab/Kota serta Masyarakat, Pelaku Usaha dan Dunia Pendidikan		300.000.000,00	
		Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Dunia Pendidikan/Filantropi yang terlibat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup						25.000.000,00					Kab/Kota serta Masyarakat, Pelaku Usaha dan Dunia Pendidikan		300.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	9 Entitas		7 Entitas	7 Entitas	25.000.000,00						8 Entitas	300.000.000,00	
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						25.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			300.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	9 Entitas		7 Entitas	2 Entitas	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Entitas	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
85.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**						**30.000.000,00**							**200.000.000,00**	
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup						***30.000.000,00***							***200.000.000,00***	
			1.Persentase Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Lingkungan Hidup	100.00 %		100.00 %	100.00 %	30.000.000,00						100.00 %	200.000.000,00	
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi						30.000.000,00					Masyarakat dan Pelaku Usaha		200.000.000,00	
		Tertanganinya Laporan Pengadaan serta penerapan Sanksi terhadap pelanggaran perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						30.000.000,00					Masyarakat dan Pelaku Usaha		200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani	12 Pengaduan		6 Pengaduan	10 Pengaduan	30.000.000,00						11 Pengaduan	200.000.000,00	
	2.11.10.1.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi						30.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			200.000.000,00	
		Penanganan Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani	12 Pengaduan		6 Pengaduan	3 Pengaduan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11 Pengaduan	200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
86.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**70.000.000,00**							**800.000.000,00**	
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan						***70.000.000,00***							***800.000.000,00***	
			1.Persentase Sampah yang dikelola.	97.00 %		95.00 %	95.50 %	70.000.000,00						96.00 %	800.000.000,00	
			2.Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	90.24 %		86.75 %	87.70 %	70.000.000,00						88.54 %	800.000.000,00	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional						70.000.000,00					5 Kabupaten dan Kota		800.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Strategi dan kebijakan Pengelolaan sampah Provinsi serta Laporan Hasil Koordinasi Pengelolaan Sampah dengan Kabupaten/Kota dan Pananganan sampah Khusus kewenangan Provinsi						70.000.000,00					5 Kabupaten dan Kota		800.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00						1 Dokumen	800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota						70.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			800.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	800.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup						**600.000.000,00**							**2.735.337.480,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**600.000.000,00**							**2.735.337.480,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**600.000.000,00**							**2.735.337.480,00**	
87.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**427.880.000,00**							**2.098.741.346,00**	
		Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						***427.880.000,00***							***1.897.241.346,00***	
			1.Persentase Pemenuhan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %		100.00 %	100.00 %	427.880.000,00						100.00 %	1.897.241.346,00	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.160.000,00					-		161.550.000,00	
		Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						5.160.000,00					-		161.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.160.000,00						4 Dokumen	161.550.000,00	
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						5.160.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			161.550.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.160.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Dokumen	161.550.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5.000.000,00					-		200.000.000,00	
		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						5.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	5.000.000,00						5 Orang	200.000.000,00	
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						5.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	0 Orang	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Orang	200.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						6.863.220,00					-		436.500.000,00	
		Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						6.863.220,00					-		436.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.100.000,00						1 Paket	224.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	763.220,00						1 Paket	11.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.000.000,00						1 Paket	200.000.000,00	
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	200.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.100.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			224.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.100.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	224.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						763.220,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			11.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	763.220,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	11.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			1.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	1.500.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					-		550.000.000,00	
		Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan						0,00					-		550.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	3 Paket	0,00						3 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	500.000.000,00	
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			50.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	3 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Paket	50.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			500.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	500.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						344.753.980,00					-		564.921.346,00	
		Jumlah kebutuhan jasa penunjang yang dipenuhi						344.753.980,00					-		564.921.346,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	106.100.000,00						4 Laporan	124.275.597,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	188.653.980,00						1 Laporan	210.645.749,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00						2 Laporan	230.000.000,00	
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						106.100.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			124.275.597,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	106.100.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Laporan	124.275.597,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			230.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Laporan	230.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						188.653.980,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			210.645.749,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	188.653.980,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	210.645.749,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						66.102.800,00					-		185.770.000,00	
		Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara						66.102.800,00					-		185.770.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	61.820.800,00						5 Unit	84.270.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	4.282.000,00						2 Unit	1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						4.282.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			1.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	4.282.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Unit	1.500.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						61.820.800,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			84.270.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	61.820.800,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Unit	84.270.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	100.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
88.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**172.120.000,00**							**636.596.134,00**	
		Meningkatnya Status Mutu Air Sungai, Udara dan Air Laut						***172.120.000,00***							***636.596.134,00***	
			1.Persentase pemenuhan Status mutu Air Sungai dengan Kategori Baik	29.00 %		25.0 %	26.00 %	172.120.000,00						27.00 %	636.596.134,00	
			2.Persentase Parameter Status Mutu Udara yang Memenuhi Baku Mutu	85.00 %		70.00 %	73.00 %	172.120.000,00						75.00 %	636.596.134,00	
			3.Persentase Status mutu Air laut Kategori Baik berdasarkan Baku Mutu Air laut	100.00 %		100.00 %	100.00 %	172.120.000,00						100.00 %	636.596.134,00	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup						172.120.000,00					-		636.596.134,00	
		Jumlah Laporan Pencegahan Pencemaran dan/Kerusakan Lingkungan Hidup						172.120.000,00					-		636.596.134,00	
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	50.000.000,00						10 Paket	152.596.134,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	3 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	122.120.000,00						3 Dokumen	484.000.000,00	
	2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan						50.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			152.596.134,00	
		Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Paket	152.596.134,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi						122.120.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			484.000.000,00	
		Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	3 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	122.120.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Dokumen	484.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						**7.367.901.382,00**							**9.781.121.149,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.367.901.382,00**							**9.781.121.149,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**7.367.901.382,00**							**9.781.121.149,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
89.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**6.489.391.936,00**							**7.298.379.035,00**	
		Terpenuhinya layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah lingkup Dinas Dukcapil						***6.459.391.936,00***							***7.298.379.035,00***	
			1.Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %		100 %	100 %	6.459.391.936,00						100 %	7.298.379.035,00	
	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00					-		30.000.000,00	
		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun						10.000.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000,00			-	-			30.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.045.821.292,00					-		6.570.273.705,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.045.821.292,00					-		6.570.273.705,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	452.040.000,00						12 Dokumen	626.170.938,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ Bulan		32 Orang/ Bulan	32 Orang/ Bulan	5.593.781.292,00						32 Orang/ Bulan	5.944.102.767,00	
	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.593.781.292,00			-	-			5.944.102.767,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ Bulan		32 Orang/ Bulan	35 Orang/ Bulan	5.593.781.292,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				32 Orang/ Bulan	5.944.102.767,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						452.040.000,00			-	-			626.170.938,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	452.040.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				12 Dokumen	626.170.938,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00					-		70.000.000,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00					-		70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		8 Orang	10 Orang	10.000.000,00						10 Orang	70.000.000,00	
	2.12.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						10.000.000,00			-	-			70.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		8 Orang	2 Orang	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				10 Orang	70.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						78.695.700,00					-		249.223.700,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						78.695.700,00					-		249.223.700,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	36.161.900,00						12 Paket	155.405.250,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	17.533.800,00						12 Paket	14.025.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	15.000.000,00						12 Paket	55.593.450,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	24.200.000,00	
	2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.000.000,00			-	-			55.593.450,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				12 Paket	55.593.450,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000,00			-	-			24.200.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				1 Paket	24.200.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						36.161.900,00			-	-			155.405.250,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	36.161.900,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				12 Paket	155.405.250,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						17.533.800,00			-	-			14.025.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	17.533.800,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				12 Paket	14.025.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						10.000.000,00					-		0,00	
		Jumlah BMD yang diadakan						10.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	10.000.000,00						1 Unit	0,00	
	2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00			-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	4 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				1 Unit	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						137.144.944,00					-		144.227.224,00	
		Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan						137.144.944,00					-		144.227.224,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	44.720.000,00						12 Laporan	46.866.280,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	82.360.944,00						12 Laporan	82.360.944,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.064.000,00						12 Laporan	15.000.000,00	
	2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.064.000,00			-	-			15.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.064.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				12 Laporan	15.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						44.720.000,00			-	-			46.866.280,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	44.720.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				12 Laporan	46.866.280,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						82.360.944,00			-	-			82.360.944,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	82.360.944,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				12 Laporan	82.360.944,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						197.730.000,00					-		234.654.406,00	
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya						197.730.000,00					-		234.654.406,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	96.865.000,00						10 Unit	53.241.472,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	90.925.000,00						5 Unit	49.106.212,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	9.940.000,00						20 Unit	132.306.722,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						90.925.000,00			-	-			49.106.212,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	90.925.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				5 Unit	49.106.212,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						96.865.000,00			-	-			53.241.472,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	11 Unit	96.865.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				10 Unit	53.241.472,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.940.000,00			-	-			132.306.722,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	10 Unit	9.940.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				20 Unit	132.306.722,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
90.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**386.500.000,00**							**1.614.272.204,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk						***326.500.000,00***							***1.614.272.204,00***	
			1.Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP	60 Persentase		20 Persentase	30 Persentase	326.500.000,00						40 Persentase	1.614.272.204,00	
			2.Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Adminduk	75 Persentase		55 Persentase	60 Persentase	326.500.000,00						65 Persentase	1.614.272.204,00	
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan						50.000.000,00					-		302.000.000,00	
		Tersusunnya dokumen hasil pelayanan pendaftaran penduduk di tingkat provinsi						50.000.000,00					-		302.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	182.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
	2.12.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional						10.000.000,00			-	-			60.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Dokumen	60.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi						20.000.000,00			-	-			182.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Dokumen	182.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan						10.000.000,00			-	-			40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk						10.000.000,00			-	-			20.000.000,00	
		Tersusunnya Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan						290.000.000,00					-		995.772.204,00	
		Jumlah kabupaten/kota penyelenggara pendaftaran penduduk						290.000.000,00					-		995.772.204,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00						1 Laporan	795.772.204,00	
			Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	120.000.000,00	
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk						250.000.000,00			-	-			795.772.204,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Laporan	795.772.204,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk						20.000.000,00			-	-			120.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Laporan	120.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk						10.000.000,00			-	-			55.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Laporan	55.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						10.000.000,00			-	-			25.000.000,00	
		Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Laporan	25.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan						46.500.000,00					-		316.500.000,00	
		Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan						46.500.000,00					-		316.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00						1 Laporan	76.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00						1 Laporan	240.000.000,00	
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk						40.000.000,00			-	-			240.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Laporan	240.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk						6.500.000,00			-	-			76.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Laporan	76.500.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
91.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**412.009.446,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil						***212.009.446,00***							***0,00***	
			1.Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	99.9 Persentase		97 Persentase	98 Persentase	212.009.446,00						99 Persentase	0,00	
			2.Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal	67.5 Persentase		65.5 Persentase	66 Persentase	212.009.446,00						66.5 Persentase	0,00	
			3.Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	67 Persentase		63 Persentase	64 Persentase	212.009.446,00						65 Persentase	0,00	
			4.Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai	67 Persentase		63 Persentase	64 Persentase	212.009.446,00						65 Persentase	0,00	
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil						137.009.446,00					-		0,00	
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi dalam pelayanan pencatatan sipil						137.009.446,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.009.446,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00						1 Laporan	0,00	
	2.12.03.1.01.0003	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting						12.009.446,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.009.446,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota						125.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			0,00	
		Terfasilitasinya Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi						75.000.000,00					-		0,00	
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pencatatan sipil						75.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00						1 Laporan	0,00	
	2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil						75.000.000,00			-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						200.000.000,00					-		0,00	
		Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pencatatan sipil sesuai SOP						200.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00						1 Laporan	0,00	
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil						125.000.000,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil						75.000.000,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
92.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**60.000.000,00**							**723.084.070,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan						***30.000.000,00***							***723.084.070,00***	
			1.Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	30.000.000,00						100 Persentase	723.084.070,00	
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi						50.000.000,00					-		523.000.000,00	
		Jumlah peraturan terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan						50.000.000,00					-		523.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	323.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	0,00	
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						20.000.000,00			-	-			323.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Sisa Belanja Lainnya				1 Laporan	323.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						10.000.000,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Sisa Belanja Lainnya				1 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan						20.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Terselenggarakannya Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Sisa Belanja Lainnya				1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi						10.000.000,00					-		200.084.070,00	
		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi						10.000.000,00					-		200.084.070,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	200.084.070,00	
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						10.000.000,00			-	-			200.084.070,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Sisa Belanja Lainnya				1 Laporan	200.084.070,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
93.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						**20.000.000,00**							**145.385.840,00**	
		Meningkatnya kualitas profil kependudukan						***20.000.000,00***							***145.385.840,00***	
			1.Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	20.000.000,00						100 Persentase	145.385.840,00	
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan						20.000.000,00					-		145.385.840,00	
		Jumlah Profil Kependudukan						20.000.000,00					-		145.385.840,00	
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	145.385.840,00	
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain						20.000.000,00			-	-			145.385.840,00	
		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Sisa Belanja Lainnya				1 Dokumen	145.385.840,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						**10.086.930.692,00**							**16.320.315.666,27**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.086.930.692,00**							**16.320.315.666,27**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**10.086.930.692,00**							**16.320.315.666,27**	
94.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**7.892.432.272,00**							**10.831.927.701,61**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah						***7.892.432.272,00***							***10.831.927.701,61***	
			1.Persentase Pemenuhan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	7.892.432.272,00						100 %	10.831.927.701,61	
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.633.541.500,00					-		8.789.377.626,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Regulasi						6.633.541.500,00					-		8.789.377.626,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	331.960.000,00						12 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan		45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	6.301.581.500,00						45 Orang/ Bulan	8.489.377.626,00	
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.301.581.500,00			-	-			8.489.377.626,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan		45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	6.301.581.500,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				45 Orang/ Bulan	8.489.377.626,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						331.960.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	331.960.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.016.424.526,00					-		1.692.550.075,61	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.016.424.526,00					-		1.692.550.075,61	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	650.000.000,00						1 Laporan	1.193.857.401,61	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	314.901.598,00						2 Paket	398.692.674,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	51.522.928,00						3 Paket	100.000.000,00	
	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						314.901.598,00			-	-			398.692.674,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	314.901.598,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	398.692.674,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						51.522.928,00			-	-			100.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	51.522.928,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Paket	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						650.000.000,00			-	-			1.193.857.401,61	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	80 Laporan	650.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	1.193.857.401,61	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						42.466.246,00					-		100.000.000,00	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang						42.466.246,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	27.466.246,00						2 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	
	2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						15.000.000,00			-	-			30.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						27.466.246,00			-	-			70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	27.466.246,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						200.000.000,00					-		250.000.000,00	
		Barang Milik Daerah yang Terpelihara						200.000.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		20 Unit	24 Unit	200.000.000,00						24 Unit	250.000.000,00	
	2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						200.000.000,00			-	-			250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		20 Unit	24 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24 Unit	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
95.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**						**52.500.000,00**							**87.387.964,66**	
		Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa						***52.500.000,00***							***87.387.964,66***	
			1.Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	70 Persentase		30 Persentase	40 Persentase	52.500.000,00						50 Persentase	87.387.964,66	
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi						52.500.000,00					-		87.387.964,66	
		Meningkatnya Kualitas Kerjasama Desa						52.500.000,00					-		87.387.964,66	
			jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	52.500.000,00						2 Dokumen	87.387.964,66	
	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan						52.500.000,00			-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan			87.387.964,66	
		Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	52.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	87.387.964,66	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
96.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**344.552.304,00**							**1.000.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						***344.552.304,00***							***1.000.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30.20 Persentase		3.36 Persentase	10.07 Persentase	344.552.304,00						16.78 Persentase	1.000.000.000,00	
			2.Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	25.73 Persentase		13.42 Persentase	17.90 Persentase	344.552.304,00						19.24 Persentase	1.000.000.000,00	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						344.552.304,00					-		1.000.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa						344.552.304,00					-		1.000.000.000,00	
			jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	120 Orang		30 Orang	120 Orang	197.993.400,00						120 Orang	150.000.000,00	
			jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	41.559.072,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	104.999.832,00						3 Dokumen	650.000.000,00	
	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa						104.999.832,00			-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera			650.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	3 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	104.999.832,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	650.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa						41.559.072,00			-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera			200.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	41.559.072,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa						197.993.400,00			-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera			150.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	120 Orang		30 Orang	30 Orang	197.993.400,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				120 Orang	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
97.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**1.797.446.116,00**							**4.401.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan						***1.797.446.116,00***							***4.401.000.000,00***	
			1.Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	18.04 Persentase		6.01 Persentase	9.02 Persentase	1.797.446.116,00						12.03 Persentase	4.401.000.000,00	
			2.Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	8.47 Persentase		2.82 Persentase	4.23 Persentase	1.797.446.116,00						5.65 Persentase	4.401.000.000,00	
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.797.446.116,00					-		4.401.000.000,00	
		Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat						1.797.446.116,00					-		4.401.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	63.440.800,00						1 Laporan	340.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	52.500.000,00						1 Dokumen	225.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	110.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	405.916.400,00						5 Dokumen	203.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.169.741.204,00						1 Laporan	3.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	211 Lembaga		30 Lembaga	75 Lembaga	54.847.712,00						100 Lembaga	223.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	50 Unit		0 Unit	30 Unit	1.000.000,00						40 Unit	300.000.000,00	
	2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat						50.000.000,00			-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan			110.000.000,00	
		Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	110.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						405.916.400,00			-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan			203.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	405.916.400,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Dokumen	203.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						54.847.712,00			-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera			223.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	211 Lembaga		30 Lembaga	30 Lembaga	54.847.712,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Lembaga	223.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						1.000.000,00			-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan			300.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	50 Unit		0 Unit	1 Unit	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Unit	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						52.500.000,00			-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan			225.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	52.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	225.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						63.440.800,00			-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan			340.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	63.440.800,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	340.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						1.169.741.204,00			-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan			3.000.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.169.741.204,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	3.000.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Dinas Perhubungan						**24.602.712.647,00**							**32.910.458.352,20**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**24.602.712.647,00**							**32.910.458.352,20**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**24.602.712.647,00**							**32.910.458.352,20**	
98.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**24.220.502.727,00**							**2.994.788.966,80**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah						***24.220.502.727,00***							***2.709.788.966,80***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	24.220.502.727,00						100 %	2.709.788.966,80	
			2.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88.15 Nilai		86.50 Nilai	87.00 Nilai	24.220.502.727,00						87.50 Nilai	2.709.788.966,80	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						289.926.808,00					-		700.000.000,00	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi						289.926.808,00					-		700.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	76.000.000,00						1 Berita Acara	250.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		12 Data	12 Data	5.000.000,00						12 Data	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.200,00						2 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.479.608,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	175.447.000,00						4 Laporan	200.000.000,00	
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.479.608,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.479.608,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						175.447.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			200.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	175.447.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						5.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			75.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		12 Data	6 Data	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Data	75.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						3.000.200,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			75.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	3.000.200,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan						76.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			250.000.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	76.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Berita Acara	250.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						23.129.268.567,00					-		514.000.000,00	
		Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						23.129.268.567,00					-		514.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.345.493.344,00						12 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	207 Orang/ Bulan		207 Orang/ Bulan	207 Orang/ Bulan	19.783.775.223,00						207 Orang/ Bulan	14.000.000,00	
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						19.783.775.223,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			14.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	207 Orang/ Bulan		207 Orang/ Bulan	207 Orang/ Bulan	19.783.775.223,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				207 Orang/ Bulan	14.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						3.345.493.344,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			500.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.345.493.344,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						49.999.480,00					-		80.000.000,00	
		Meningkatnya administrasi pelayanan pendapatan retribusi perangkat daerah						49.999.480,00					-		80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	49.999.480,00						12 Laporan	80.000.000,00	
	2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						49.999.480,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			80.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	49.999.480,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	80.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.000.000,00					-		100.000.000,00	
		Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						30.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		5 Orang	4 Orang	30.000.000,00						4 Orang	100.000.000,00	
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						30.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		5 Orang	3 Orang	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Orang	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						485.685.172,00					-		1.293.873.970,80	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						485.685.172,00					-		1.293.873.970,80	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	6.041.200,00						4 Dokumen	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	348.543.080,00						12 Laporan	936.464.582,80	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	116.098.136,00						12 Paket	170.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	6.209.356,00						12 Paket	101.209.388,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	3.257.400,00						3 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	3.536.000,00						12 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.000.000,00						1 Paket	16.200.000,00	
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.257.400,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	3.257.400,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Paket	10.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.536.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	3 Paket	3.536.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	10.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			16.200.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	16.200.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						116.098.136,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			170.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	116.098.136,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	170.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.209.356,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			101.209.388,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	2 Paket	6.209.356,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	101.209.388,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						348.543.080,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			936.464.582,80	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	348.543.080,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	936.464.582,80	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						6.041.200,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	6.041.200,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						64.625.300,00					-		58.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						64.625.300,00					-		58.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	56.653.300,00						12 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.972.000,00						12 Laporan	13.000.000,00	
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.972.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			13.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.972.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	13.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						56.653.300,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			45.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	56.653.300,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	45.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						170.997.400,00					-		248.914.996,00	
		BMD yang terpelihara						170.997.400,00					-		248.914.996,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	45.777.200,00						1 Unit	31.069.996,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	67.201.000,00						6 Unit	89.845.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit		24 Unit	24 Unit	50.409.200,00						24 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit		17 Unit	17 Unit	7.610.000,00						17 Unit	28.000.000,00	
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.409.200,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit		24 Unit	24 Unit	50.409.200,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24 Unit	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						67.201.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			89.845.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	5 Unit	67.201.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Unit	89.845.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.610.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			28.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit		17 Unit	7 Unit	7.610.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				17 Unit	28.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						45.777.200,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			31.069.996,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	45.777.200,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	31.069.996,00	Dinas Perhubungan
99.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**131.200.000,00**							**11.987.725.665,40**	
		Meningkatnya Layanan Transportasi Darat						***111.200.000,00***							***11.987.725.665,40***	
			1.Rasio Konektivitas Transportasi Darat	1 Rasio		0 Rasio	0 Rasio	111.200.000,00						0 Rasio	11.987.725.665,40	
			2.Persentase Keselamatan AKDP	100 %		100 %	100 %	111.200.000,00						100 %	11.987.725.665,40	
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi						21.200.000,00					Pengguna Jasa Transportasi		9.913.725.665,40	
		Jumlah Perlengkapan Jalan Di jalan Provinsi						21.200.000,00					Pengguna Jasa Transportasi		9.913.725.665,40	
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	10240 Unit		5002 Unit	20999 Unit	10.000.000,00						25646 Unit	9.613.725.665,40	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	5 Unit		4 Unit	5 Unit	11.200.000,00						5 Unit	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			9.613.725.665,40	
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	10240 Unit		5002 Unit	2 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25646 Unit	9.613.725.665,40	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						11.200.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			300.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	5 Unit		4 Unit	2 Unit	11.200.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	300.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi						45.000.000,00					Pengguna Jasa Transportasi		1.090.000.000,00	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi						45.000.000,00					Pengguna Jasa Transportasi		1.090.000.000,00	
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00						1 Laporan	540.000.000,00	
	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi						40.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			540.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	540.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi						5.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			550.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	550.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi						10.000.000,00					-		260.000.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi						10.000.000,00					-		260.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	260.000.000,00	
	2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin						10.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			260.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	260.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						35.000.000,00					-		549.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						35.000.000,00					-		549.000.000,00	
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	10.000.000,00						8 Unit	349.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi						25.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			200.000.000,00	
		Terkendalinya dan Terawasinya KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						10.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			349.000.000,00	
		Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	8 Unit		8 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Unit	349.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						20.000.000,00					-		175.000.000,00	
		Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						20.000.000,00					-		175.000.000,00	
			Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	3 Unit		0 Unit	3 Unit	20.000.000,00						3 Unit	175.000.000,00	
	2.15.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						20.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			175.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	3 Unit		0 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	175.000.000,00	Dinas Perhubungan
100.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**251.009.920,00**							**17.927.943.720,00**	
		Meningkatnya Layanan Transportasi Perairan						***176.009.920,00***							***17.427.943.720,00***	
			1.Rasio Konektivitas Transportasi Perairan	1 Rasio		0.53 Rasio	0.8 Rasio	176.009.920,00						0.93 Rasio	17.427.943.720,00	
			2.Presentase Keselamatan ASDP	100 %		100 %	100 %	176.009.920,00						100 %	17.427.943.720,00	
	2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi						25.000.000,00					-		250.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi						25.000.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00						12 Laporan	250.000.000,00	
	2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi						25.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			250.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	12 Laporan		12 Laporan	3 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	250.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						50.000.000,00					-		500.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						50.000.000,00					-		500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	19 Dokumen		16 Dokumen	18 Dokumen	25.000.000,00						19 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	19 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	25.000.000,00						19 Laporan	250.000.000,00	
	2.15.03.1.05.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi						25.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			250.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	19 Dokumen		16 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				19 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi						25.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			250.000.000,00	
		Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalinya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	19 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				19 Laporan	250.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas						36.009.920,00					-		135.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas					36.009.920,00					-		135.000.000,00	
			Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15 Dokumen		10 Dokumen	15 Dokumen	25.000.000,00						15 Dokumen	85.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	4 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	11.009.920,00						4 Laporan	50.000.000,00	
	2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						25.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15 Dokumen		10 Dokumen	15 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Dokumen	85.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas						11.009.920,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	4 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	11.009.920,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional						130.000.000,00					-		15.542.943.720,00	
		Jumlah Dokumen Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional						130.000.000,00					-		15.542.943.720,00	
			Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	12 Laporan		6 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00						12 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	50.000.000,00						2 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	2 Unit		1 Unit	2 Unit	75.000.000,00						2 Unit	14.392.943.720,00	
	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional						75.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			14.392.943.720,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	2 Unit		1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	14.392.943.720,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional						50.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional						5.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			150.000.000,00	
		Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	12 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.12	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional						10.000.000,00					-		1.500.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional						10.000.000,00					-		1.500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00						3 Dokumen	1.500.000.000,00	
	2.15.03.1.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						10.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			1.500.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	1.500.000.000,00	Dinas Perhubungan
		UPTD Pelabuhan Tengkayu I						**2.596.693.224,00**							**5.288.423.460,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.596.693.224,00**							**5.288.423.460,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**2.596.693.224,00**							**5.288.423.460,00**	
101.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**2.596.693.224,00**							**5.288.423.460,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkup UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan						***2.576.693.224,00***							***5.283.423.460,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	2.576.693.224,00						100 %	5.283.423.460,00	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00					-		25.000.000,00	
		Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi						20.000.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	25.000.000,00	
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20.000.000,00			-	-			25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	25.000.000,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu I
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						709.693.224,00					-		2.184.835.060,00	
		Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						709.693.224,00					-		2.184.835.060,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	709.693.224,00						12 Dokumen	2.184.835.060,00	
	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						709.693.224,00			-	-			2.184.835.060,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	709.693.224,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	2.184.835.060,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu I
	2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						20.000.000,00					-		30.000.000,00	
		Meningkatnya administrasi pelayanan pendapatan retribusi perangkat daerah						20.000.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00						12 Laporan	30.000.000,00	
	2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						20.000.000,00			-	-			30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	30.000.000,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu I
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						80.000.000,00					-		105.000.000,00	
		Terpenuhinya kelengkapan dokumen administrasi kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						80.000.000,00					-		105.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang		4 Orang	6 Orang	80.000.000,00						7 Orang	105.000.000,00	
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						80.000.000,00			-	-			105.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang		4 Orang	9 Orang	80.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7 Orang	105.000.000,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu I
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						627.300.000,00					-		1.116.650.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						627.300.000,00					-		1.116.650.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00						12 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00						12 Laporan	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		12 Paket	10 Paket	70.000.000,00						10 Paket	110.555.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	160.000.000,00						12 Paket	220.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		4 Paket	10 Paket	17.000.000,00						10 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	60.000.000,00						12 Paket	175.550.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		5 Paket	10 Paket	65.300.000,00						10 Paket	105.545.000,00	
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						17.000.000,00			-	-			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		4 Paket	3 Paket	17.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Paket	100.000.000,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu I
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						60.000.000,00			-	-			175.550.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	4 Paket	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	175.550.000,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu I
	2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						65.300.000,00			-	-			105.545.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		5 Paket	5 Paket	65.300.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Paket	105.545.000,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu I
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						70.000.000,00			-	-			110.555.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		12 Paket	4 Paket	70.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Paket	110.555.000,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu I
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						160.000.000,00			-	-			220.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	4 Paket	160.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	220.000.000,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu I
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						5.000.000,00			-	-			5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	5.000.000,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu I
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						250.000.000,00			-	-			400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	400.000.000,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu I
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						207.000.000,00					-		310.552.350,00	
		Pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi						207.000.000,00					-		310.552.350,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket		7 Paket	10 Paket	100.000.000,00						10 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		10 Unit	10 Unit	107.000.000,00						11 Unit	110.552.350,00	
	2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00			-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	50.000.000,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu I
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						100.000.000,00			-	-			150.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket		7 Paket	10 Paket	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Paket	150.000.000,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu I
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						107.000.000,00			-	-			110.552.350,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		10 Unit	11 Unit	107.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11 Unit	110.552.350,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu I
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						292.700.000,00					-		350.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						292.700.000,00					-		350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	290.000.000,00						12 Laporan	345.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.700.000,00						12 Laporan	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.700.000,00			-	-			5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	2 Laporan	2.700.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	5.000.000,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu I
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						290.000.000,00			-	-			345.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	290.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	345.000.000,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu I
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						640.000.000,00					-		1.166.386.050,00	
		BMD yang terpelihara						640.000.000,00					-		1.166.386.050,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	407.000.000,00						11 Unit	635.575.250,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	93.000.000,00						15 Unit	105.555.500,00	
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						407.000.000,00			-	-			635.575.250,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	407.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11 Unit	635.575.250,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu I
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						93.000.000,00			-	-			105.555.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	93.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Unit	105.555.500,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu I
		BMD yang terpelihara						640.000.000,00					-		1.166.386.050,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	140.000.000,00						-	425.255.300,00	
	2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						140.000.000,00			-	-			425.255.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	140.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	425.255.300,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu I
		UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan						**2.582.330.868,00**							**4.045.905.133,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.582.330.868,00**							**4.045.905.133,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**2.582.330.868,00**							**4.045.905.133,00**	
102.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**2.582.330.868,00**							**4.045.905.133,00**	
		Meningkatkan Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup UPTD Liem Hie Djung Nunukan						***2.482.330.868,00***							***4.045.905.133,00***	
			1. Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup UPTD Pelabuha Liem Hie Djung Nunukan	100 %		100 %	100 %	2.482.330.868,00						100 %	4.045.905.133,00	
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						706.841.940,00					-		2.255.787.242,00	
		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun						706.841.940,00					-		2.255.787.242,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	706.841.940,00						12 Dokumen	2.255.787.242,00	
	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						706.841.940,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			2.255.787.242,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	706.841.940,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	2.255.787.242,00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						110.516.000,00					-		60.000.000,00	
		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Dengan Standar Layanan						110.516.000,00					-		60.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		76 Paket	76 Paket	50.516.000,00						0 Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	4 Orang	60.000.000,00						4 Orang	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						50.516.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		76 Paket	76 Paket	50.516.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket	0,00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						60.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			60.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	4 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Orang	60.000.000,00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						729.313.140,00					-		687.080.618,00	
		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Sesuai Standar Layanan						729.313.140,00					-		687.080.618,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00						12 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	115.632.000,00						12 Paket	89.560.778,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	79.206.340,00						12 Paket	79.206.340,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	34.474.800,00						3 Paket	18.313.500,00	
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						34.474.800,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			18.313.500,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	34.474.800,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Paket	18.313.500,00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						115.632.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			89.560.778,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	115.632.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	89.560.778,00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						79.206.340,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			79.206.340,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	79.206.340,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	79.206.340,00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						500.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	500.000.000,00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						190.000.000,00					-		626.000.000,00	
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan						190.000.000,00					-		626.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket		10 Paket	5 Paket	50.000.000,00						5 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	40.000.000,00						1 Unit	550.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		31 Unit	2 Unit	100.000.000,00						3 Unit	26.000.000,00	
	2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						40.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			550.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	550.000.000,00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						50.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket		10 Paket	5 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Paket	50.000.000,00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			26.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		31 Unit	2 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	26.000.000,00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						295.659.788,00					-		291.056.629,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						295.659.788,00					-		291.056.629,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	293.859.788,00						12 Laporan	289.356.629,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00						12 Laporan	1.700.000,00	
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.800.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			1.700.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	1.700.000,00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						293.859.788,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			289.356.629,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	293.859.788,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	289.356.629,00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						550.000.000,00					-		125.980.644,00	
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara						550.000.000,00					-		125.980.644,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	50.000.000,00						3 Unit	16.320.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	16 Unit	50.000.000,00						16 Unit	16.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			16.320.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	16.320.000,00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			16.800.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	16 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16 Unit	16.800.000,00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara						550.000.000,00					-		125.980.644,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	450.000.000,00						-	92.860.644,00	
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						450.000.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			92.860.644,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	450.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	92.860.644,00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan
		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian						**21.652.583.554,00**							**32.822.443.951,92**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**21.652.583.554,00**							**32.822.443.951,92**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**20.741.295.554,00**							**29.930.102.359,92**	
103.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**10.420.387.752,00**							**14.555.854.039,92**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah						***10.420.387.752,00***							***14.405.854.039,92***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	10.420.387.752,00						100 %	14.405.854.039,92	
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.684.714.868,00					ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		12.060.854.039,92	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai Regulasi						8.684.714.868,00					ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		12.060.854.039,92	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	793.908.000,00						12 Dokumen	1.780.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan		75 Orang/ Bulan	75 Orang/ Bulan	7.890.806.868,00						75 Orang/ Bulan	10.280.854.039,92	
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.890.806.868,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			10.280.854.039,92	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan		75 Orang/ Bulan	56 Orang/ Bulan	7.890.806.868,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				75 Orang/ Bulan	10.280.854.039,92	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						793.908.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			1.780.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	793.908.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				12 Dokumen	1.780.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						2.000.000,00					ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		20.000.000,00	
		BMD Perangkat Daerah yang Terkelola sesuai Regulasi						2.000.000,00					ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						2.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			20.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Laporan	20.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						41.136.000,00					ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		305.000.000,00	
		Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai Standar Peraturan yang Berlaku						41.136.000,00					ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		305.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket		0 Paket	80 Paket	40.136.000,00						80 Paket	80.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		0 Orang	15 Orang	1.000.000,00						15 Orang	225.000.000,00	
	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						40.136.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			80.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket		0 Paket	56 Paket	40.136.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				80 Paket	80.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						1.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			225.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		0 Orang	1 Orang	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				15 Orang	225.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						385.058.100,00					ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		1.080.000.000,00	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						385.058.100,00					ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		1.080.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.400.000,00						12 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.500.000,00						2 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		5 Paket	6 Paket	146.773.500,00						6 Paket	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	118.689.600,00						2 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		0 Paket	6 Paket	69.374.000,00						5 Paket	120.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	25.321.000,00						2 Paket	50.000.000,00	
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						69.374.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		0 Paket	3 Paket	69.374.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				5 Paket	120.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						25.321.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	25.321.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				2 Paket	50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						146.773.500,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			250.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		5 Paket	6 Paket	146.773.500,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				6 Paket	250.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						118.689.600,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			150.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	118.689.600,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				2 Paket	150.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						4.400.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.400.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				12 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						20.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				2 Laporan	500.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						969.532.384,00					ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		795.000.000,00	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang						969.532.384,00					ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		795.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	940.782.384,00						12 Laporan	750.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	28.750.000,00						12 Laporan	45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						28.750.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			45.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	28.750.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				12 Laporan	45.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						940.782.384,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			750.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	940.782.384,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				12 Laporan	750.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						337.946.400,00					ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		295.000.000,00	
		BMD yang terpelihara						337.946.400,00					ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		295.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		19 Unit	20 Unit	190.575.400,00						20 Unit	130.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit		12 Unit	13 Unit	138.363.000,00						13 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		5 Unit	10 Unit	9.008.000,00						10 Unit	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						138.363.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit		12 Unit	17 Unit	138.363.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				13 Unit	150.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						190.575.400,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		19 Unit	14 Unit	190.575.400,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				20 Unit	130.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.008.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		5 Unit	2 Unit	9.008.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				10 Unit	15.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
104.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**6.625.329.154,00**							**6.750.000.000,00**	
		Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah						***6.425.329.154,00***							***6.050.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	77 %		75 %	75.5 %	6.425.329.154,00						76 %	6.050.000.000,00	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi						6.625.329.154,00					ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		6.750.000.000,00	
		Meningkatnya efektivitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik						6.625.329.154,00					ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		6.750.000.000,00	
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	150.000.000,00	
	2.16.02.1.01.0014	Relasi Media						200.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			150.000.000,00	
		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Meningkatnya efektivitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik						6.625.329.154,00					ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		6.750.000.000,00	
			Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	-	3.575.329.154,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat di Kab/Kota yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	-	100.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	-	1.200.000.000,00						-	2.600.000.000,00	
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	-	50.000.000,00						-	700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	-	100.000.000,00						-	700.000.000,00	
			Persentase Pengelolaan dan Publikasi Pengaduan Pelayanan Publik	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	-	1.300.000.000,00						-	1.900.000.000,00	
	2.16.02.1.01.0026	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik						1.300.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			1.900.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	100 %	1.300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				-	1.900.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.02.1.01.0028	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik						100.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			700.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	4 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				-	700.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.02.1.01.0029	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik						3.575.329.154,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			300.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	450000 Orang	3.575.329.154,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				-	300.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.02.1.01.0030	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik						50.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			700.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	2 Rekomendasi	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				-	700.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.02.1.01.0031	Penyusunan Konten						1.200.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			2.600.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	40 Konten	1.200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				-	2.600.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.02.1.01.0032	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat						100.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Persentase Pengelolaan dan Publikasi Pengaduan Pelayanan Publik	-		-	100 %	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				-	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.02.1.01.0033	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat						100.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			400.000.000,00	
		Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat di Kab/Kota yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	3 Komunitas	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				-	400.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
105.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**3.695.578.648,00**							**8.624.248.320,00**	
		Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)						***3.695.578.648,00***							***8.624.248.320,00***	
			1.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 Indeks		3.8 Indeks	3.84 Indeks	3.695.578.648,00						3.9 Indeks	8.624.248.320,00	
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi						88.250.000,00					ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		300.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi						88.250.000,00					ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	88.250.000,00						12 Dokumen	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah						88.250.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	88.250.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				12 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi						3.607.328.648,00					ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		8.324.248.320,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah						3.607.328.648,00					ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		8.324.248.320,00	
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	12 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	176.563.878,00						12 Laporan	400.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas	5 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	128.429.570,00						5 Dokumen	100.000.000,00	
	2.16.03.1.02.0031	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas						128.429.570,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	128.429.570,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				5 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.03.1.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE						176.563.878,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			400.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	12 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	176.563.878,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				12 Laporan	400.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah						3.607.328.648,00					ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		8.324.248.320,00	
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	-	26.100.000,00						-	475.000.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	-	146.190.000,00						-	330.000.000,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	275.750.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	-		-	-	17.390.000,00						-	600.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	-	2.836.905.200,00						-	6.299.248.320,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.03.1.02.0038	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi						275.750.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			120.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	7 Layanan	275.750.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				-	120.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.03.1.02.0039	Penyediaan Akses Internet						2.836.905.200,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			6.299.248.320,00	
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	139 Titik	2.836.905.200,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				-	6.299.248.320,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.03.1.02.0040	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah						26.100.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			475.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	2 Aplikasi	26.100.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				-	475.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.03.1.02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK						146.190.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			330.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	3 Dokumen	146.190.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				-	330.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.03.1.02.0042	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi dan Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi						17.390.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara			600.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	-		-	1 Titik	17.390.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				-	600.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**164.718.000,00**							**400.005.309,00**	
106.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**164.718.000,00**							**400.005.309,00**	
		Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)						***164.718.000,00***							***400.005.309,00***	
			1.Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %		100 %	100 %	164.718.000,00						100 %	400.005.309,00	
			2.Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %		100 %	100 %	164.718.000,00						100 %	400.005.309,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi						164.718.000,00					ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		400.005.309,00	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi						164.718.000,00					ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		400.005.309,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %		100 %	100 %	27.855.000,00						100 %	200.000.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	40 %		10 %	10 %	70.359.000,00						20 %	100.005.309,00	
	2.20.02.1.01.0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia						70.359.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			100.005.309,00	
		Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	40 %		10 %	10 %	70.359.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				20 %	100.005.309,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.20.02.1.01.0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral						27.855.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			200.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %		100 %	100 %	27.855.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				100 %	200.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi						164.718.000,00					ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		400.005.309,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	-	66.504.000,00						-	100.000.000,00	
	2.20.02.1.01.0022	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional						66.504.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			100.000.000,00	
		Meningkatnya pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	100 %	66.504.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				-	100.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**746.570.000,00**							**2.492.336.283,00**	
107.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**746.570.000,00**							**2.492.336.283,00**	
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah						***746.570.000,00***							***2.492.336.283,00***	
			1.Nilai Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	597 Nilai		312 Nilai	378 Nilai	746.570.000,00						446 Nilai	2.492.336.283,00	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi						746.570.000,00					ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		2.492.336.283,00	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Provinsi						746.570.000,00					ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		2.492.336.283,00	
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	4 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00						3 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	5 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	698.290.000,00						5 Laporan	1.392.336.283,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	4 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	38.280.000,00						3 Laporan	800.000.000,00	
	2.21.02.1.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						698.290.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			1.392.336.283,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	5 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	698.290.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				5 Laporan	1.392.336.283,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.21.02.1.01.0007	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan						38.280.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			800.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	4 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	38.280.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				3 Laporan	800.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.21.02.1.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah						10.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	4 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				3 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP						**9.763.338.739,00**							**20.527.282.903,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.763.338.739,00**							**20.527.282.903,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**9.763.338.739,00**							**20.527.282.903,00**	
108.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**9.243.792.262,00**							**10.247.232.642,00**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah						***9.243.792.262,00***							***10.247.232.642,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	9.243.792.262,00						100 %	10.247.232.642,00	
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.475.457.836,00					ASN DPMPTSP Prov Kaltara		8.998.746.740,00	
		Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						8.475.457.836,00					ASN DPMPTSP Prov Kaltara		8.998.746.740,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	171.480.000,00						12 Dokumen	117.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan		60 Orang/ Bulan	60 Orang/ Bulan	8.303.977.836,00						60 Orang/ Bulan	8.881.746.740,00	
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.303.977.836,00			-	-			8.881.746.740,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan		60 Orang/ Bulan	55 Orang/ Bulan	8.303.977.836,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				60 Orang/ Bulan	8.881.746.740,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						171.480.000,00			-	-			117.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	171.480.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	117.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						34.000.000,00					ASN DPMPTSP Prov Kaltara		115.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya kelengkapan dokumen administrasi kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						34.000.000,00					ASN DPMPTSP Prov Kaltara		115.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	34.000.000,00						60 Orang	115.000.000,00	
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						34.000.000,00			-	-			115.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang		60 Orang	55 Orang	34.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60 Orang	115.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						377.239.433,00					ASN dan Non ASN DPMPTSP Prov Kaltara		708.943.376,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						377.239.433,00					ASN dan Non ASN DPMPTSP Prov Kaltara		708.943.376,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	625 Dokumen		625 Dokumen	625 Dokumen	1.624.000,00						625 Dokumen	5.160.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.410.000,00						12 Laporan	11.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	255.238.533,00						12 Laporan	508.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	98.109.900,00						12 Paket	140.072.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12.857.000,00						12 Paket	43.911.376,00	
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						98.109.900,00			-	-			140.072.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	24 Paket	98.109.900,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	140.072.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.857.000,00			-	-			43.911.376,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12.857.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	43.911.376,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						1.624.000,00			-	-			5.160.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	625 Dokumen		625 Dokumen	264 Dokumen	1.624.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				625 Dokumen	5.160.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						9.410.000,00			-	-			11.800.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.410.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	11.800.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						255.238.533,00			-	-			508.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	255.238.533,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	508.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						44.479.143,00					ASN DPMPTSP Prov Kaltara		89.000.000,00	
		Pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi						44.479.143,00					ASN DPMPTSP Prov Kaltara		89.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit		22 Unit	12 Unit	44.479.143,00						14 Unit	89.000.000,00	
	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						44.479.143,00			-	-			89.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit		22 Unit	8 Unit	44.479.143,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14 Unit	89.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						201.048.850,00					ASN dan Non ASN DPMPTSP Prov Kaltara		202.397.526,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						201.048.850,00					ASN dan Non ASN DPMPTSP Prov Kaltara		202.397.526,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	32.134.990,00						12 Laporan	32.134.990,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	163.052.860,00						12 Laporan	162.262.536,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.861.000,00						12 Laporan	8.000.000,00	
	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.861.000,00			-	-			8.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.861.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	8.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						32.134.990,00			-	-			32.134.990,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	32.134.990,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	32.134.990,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						163.052.860,00			-	-			162.262.536,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	163.052.860,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	162.262.536,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						111.567.000,00					ASN DPMPTSP Prov Kaltara		133.145.000,00	
		Barang milik daerah (BMD) yang terpelihara						111.567.000,00					ASN DPMPTSP Prov Kaltara		133.145.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	94.407.000,00						29 Unit	113.345.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit		21 Unit	21 Unit	17.160.000,00						21 Unit	19.800.000,00	
	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						94.407.000,00			-	-			113.345.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	94.407.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				29 Unit	113.345.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						17.160.000,00			-	-			19.800.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit		21 Unit	21 Unit	17.160.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				21 Unit	19.800.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
109.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**57.000.000,00**							**1.550.782.301,00**	
		Meningkatnya daya tarik investasi						***57.000.000,00***							***1.550.782.301,00***	
			1.Persentase kebijakan daerah terkait penanaman modal yang ditetapkan	100 %		100 %	100 %	57.000.000,00						100 %	1.550.782.301,00	
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						40.000.000,00					Pelaku Usaha		450.782.301,00	
		Meningkatnya penerapan regulasi/kebijakan yang mendukung investasi						40.000.000,00					Pelaku Usaha		450.782.301,00	
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00						2 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	250.782.301,00	
	2.18.02.1.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi						25.000.000,00			-	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara			200.000.000,00	
		Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.02.1.01.0004	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko						15.000.000,00			-	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara			250.782.301,00	
		Ditetapkannya Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	250.782.301,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi						17.000.000,00					Pelaku Usaha		1.100.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal						17.000.000,00					Pelaku Usaha		1.100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi	-		-	-	17.000.000,00						-	1.100.000.000,00	
	2.18.02.1.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi						17.000.000,00			-	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara			1.100.000.000,00	
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi	-		-	1 Dokumen	17.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	1.100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
110.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**138.434.122,00**							**3.304.646.018,00**	
		Meningkatnya daya tarik investasi						***138.434.122,00***							***3.304.646.018,00***	
			1.Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	5 Persentase		5 Persentase	5 Persentase	138.434.122,00						5 Persentase	3.304.646.018,00	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						138.434.122,00					Pelaku Usaha		3.304.646.018,00	
		Meningkatnya promosi investasi di dalam dan luar daerah						138.434.122,00					Pelaku Usaha		3.304.646.018,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	138.434.122,00						4 Dokumen	3.304.646.018,00	
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi						138.434.122,00			-	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara			3.304.646.018,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	138.434.122,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Balik || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	3.304.646.018,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
111.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**171.013.200,00**							**3.610.293.063,00**	
		Meningkatnya pelaku usaha yang memiliki izin usaha						***171.013.200,00***							***3.610.293.063,00***	
			1.Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	95 Persentase		87 Persentase	90 Persentase	171.013.200,00						92 Persentase	3.610.293.063,00	
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						171.013.200,00					Pelaku Usaha, Masyarakat, DPMPTSP Kab/Kota dan Instansi Terkait		3.610.293.063,00	
		Meningkatnya efektivitas layanan informasi dan pengaduan						171.013.200,00					Pelaku Usaha, Masyarakat, DPMPTSP Kab/Kota dan Instansi Terkait		3.610.293.063,00	
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	175 Kegiatan Usaha		75 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	46.650.000,00						125 Kegiatan Usaha	664.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	39.701.000,00						5 Dokumen	1.505.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	600 Pelaku Usaha		545 Pelaku Usaha	570 Pelaku Usaha	50.339.000,00						580 Pelaku Usaha	581.293.063,00	
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	680 Pelaku Usaha		500 Pelaku Usaha	550 Pelaku Usaha	34.323.200,00						600 Pelaku Usaha	860.000.000,00	
		Meningkatnya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non-perizinan						171.013.200,00					Pelaku Usaha, Masyarakat, DPMPTSP Kab/Kota dan Instansi Terkait		3.610.293.063,00	
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	175 Kegiatan Usaha		75 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	46.650.000,00						125 Kegiatan Usaha	664.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	39.701.000,00						5 Dokumen	1.505.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	600 Pelaku Usaha		545 Pelaku Usaha	570 Pelaku Usaha	50.339.000,00						580 Pelaku Usaha	581.293.063,00	
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	680 Pelaku Usaha		500 Pelaku Usaha	550 Pelaku Usaha	34.323.200,00						600 Pelaku Usaha	860.000.000,00	
		Meningkatnya regulasi/kebijakan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non-perizinan						171.013.200,00					Pelaku Usaha, Masyarakat, DPMPTSP Kab/Kota dan Instansi Terkait		3.610.293.063,00	
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	175 Kegiatan Usaha		75 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	46.650.000,00						125 Kegiatan Usaha	664.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	39.701.000,00						5 Dokumen	1.505.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	600 Pelaku Usaha		545 Pelaku Usaha	570 Pelaku Usaha	50.339.000,00						580 Pelaku Usaha	581.293.063,00	
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	680 Pelaku Usaha		500 Pelaku Usaha	550 Pelaku Usaha	34.323.200,00						600 Pelaku Usaha	860.000.000,00	
		Meningkatnya sarana layanan perizinan						171.013.200,00					Pelaku Usaha, Masyarakat, DPMPTSP Kab/Kota dan Instansi Terkait		3.610.293.063,00	
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	175 Kegiatan Usaha		75 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	46.650.000,00						125 Kegiatan Usaha	664.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	39.701.000,00						5 Dokumen	1.505.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	600 Pelaku Usaha		545 Pelaku Usaha	570 Pelaku Usaha	50.339.000,00						580 Pelaku Usaha	581.293.063,00	
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	680 Pelaku Usaha		500 Pelaku Usaha	550 Pelaku Usaha	34.323.200,00						600 Pelaku Usaha	860.000.000,00	
	2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah						39.701.000,00			-	-			1.505.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	5 Dokumen		5 Dokumen	2 Dokumen	39.701.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Dokumen	1.505.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						50.339.000,00			-	-			581.293.063,00	
		Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	600 Pelaku Usaha		545 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	50.339.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				580 Pelaku Usaha	581.293.063,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						34.323.200,00			-	-			860.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	680 Pelaku Usaha		500 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	34.323.200,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				600 Pelaku Usaha	860.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						46.650.000,00			-	-			664.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	175 Kegiatan Usaha		75 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	46.650.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				125 Kegiatan Usaha	664.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
112.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**123.099.155,00**							**1.160.010.620,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan kegiatan penanaman modal						***123.099.155,00***							***1.160.010.620,00***	
			2.Persentase proyek pelaku usaha lapor LKPM tepat waktu	35 %		25 %	28 %	123.099.155,00						31 %	1.160.010.620,00	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						123.099.155,00					Pelaku Usaha (PMDN)		1.160.010.620,00	
		Meningkatnya fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha						123.099.155,00					Pelaku Usaha (PMDN)		1.160.010.620,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Kegiatan usaha		38 Kegiatan usaha	40 Kegiatan usaha	53.099.155,00						45 Kegiatan usaha	446.170.620,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	350 Pelaku Usaha		246 Pelaku Usaha	255 Pelaku Usaha	30.000.000,00						312 Pelaku Usaha	446.150.000,00	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	15 Kegiatan usaha		10 Kegiatan usaha	11 Kegiatan usaha	40.000.000,00						13 Kegiatan usaha	267.690.000,00	
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha sesuai standar pelaksanaan kegiatan usaha						123.099.155,00					Pelaku Usaha (PMDN)		1.160.010.620,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Kegiatan usaha		38 Kegiatan usaha	40 Kegiatan usaha	53.099.155,00						45 Kegiatan usaha	446.170.620,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	350 Pelaku Usaha		246 Pelaku Usaha	255 Pelaku Usaha	30.000.000,00						312 Pelaku Usaha	446.150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	15 Kegiatan usaha		10 Kegiatan usaha	11 Kegiatan usaha	40.000.000,00						13 Kegiatan usaha	267.690.000,00	
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal						53.099.155,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			446.170.620,00	
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Kegiatan usaha		38 Kegiatan usaha	11 Kegiatan usaha	53.099.155,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				45 Kegiatan usaha	446.170.620,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya						40.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			267.690.000,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	15 Kegiatan usaha		10 Kegiatan usaha	7 Kegiatan usaha	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13 Kegiatan usaha	267.690.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						30.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			446.150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	350 Pelaku Usaha		246 Pelaku Usaha	130 Pelaku Usaha	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				312 Pelaku Usaha	446.150.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
113.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**30.000.000,00**							**654.318.259,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal						***30.000.000,00***							***654.318.259,00***	
			1.Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	30.000.000,00						100 Persentase	654.318.259,00	
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi						30.000.000,00					Pelaku Usaha, Masyarakat, DPMPTSP Kab/Kota dan Instansi Terkait		654.318.259,00	
		Meningkatnya kualitas sistem aplikasi pelayanan penanaman modal						30.000.000,00					Pelaku Usaha, Masyarakat, DPMPTSP Kab/Kota dan Instansi Terkait		654.318.259,00	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00						3 Dokumen	654.318.259,00	
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						30.000.000,00			-	-			654.318.259,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	654.318.259,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Dinas Pemuda dan Olahraga						**10.378.808.060,00**							**37.663.168.780,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.378.808.060,00**							**37.663.168.780,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**10.378.808.060,00**							**37.663.168.780,00**	
114.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**7.488.720.000,00**							**11.186.339.207,00**	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, efesien, dan efektif						***7.338.720.000,00***							***10.871.339.207,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.00 Nilai		68.90 Nilai	74.55 Nilai	7.338.720.000,00						75.00 Nilai	10.871.339.207,00	
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00					-		125.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun						20.000.000,00					-		125.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	125.000.000,00	
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20.000.000,00			-	-			125.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	125.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.628.720.000,00					-		8.051.339.207,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.628.720.000,00					-		8.051.339.207,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	628.720.000,00						12 Dokumen	1.396.339.207,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ Bulan		43 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	6.000.000.000,00						45 Orang/ Bulan	6.655.000.000,00	
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.000.000.000,00			-	-			6.655.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ Bulan		43 Orang/ Bulan	43 Orang/ Bulan	6.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				45 Orang/ Bulan	6.655.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						628.720.000,00			-	-			1.396.339.207,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	628.720.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	1.396.339.207,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00					-		135.000.000,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00					-		135.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	50.000.000,00						20 Orang	65.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	50.000.000,00						10 Orang	70.000.000,00	
	2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00			-	-			70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	5 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Orang	70.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						50.000.000,00			-	-			65.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		20 Orang	5 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Orang	65.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						155.000.000,00					-		705.000.000,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						155.000.000,00					-		705.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						1 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	120.000.000,00						12 Paket	185.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	10.000.000,00						5 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	25.000.000,00						5 Paket	250.000.000,00	
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.000.000,00			-	-			250.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Paket	250.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						120.000.000,00			-	-			185.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	4 Paket	120.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	185.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00			-	-			20.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	10 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Paket	20.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00			-	-			250.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	250.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						405.000.000,00					-		770.000.000,00	
		Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan						405.000.000,00					-		770.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00						12 Laporan	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	310.000.000,00						12 Laporan	650.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Laporan	Laporan	45.000.000,00						1 Laporan	65.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	15.000.000,00	
	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000,00			-	-			15.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	15.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						40.000.000,00			-	-			40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	40.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						45.000.000,00			-	-			65.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	65.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						310.000.000,00			-	-			650.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	310.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	650.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						180.000.000,00					-		1.400.000.000,00	
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya						180.000.000,00					-		1.400.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	90.000.000,00						2 Unit	1.200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	90.000.000,00						15 Unit	200.000.000,00	
	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						90.000.000,00			-	-			200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	90.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Unit	200.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						90.000.000,00			-	-			1.200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	90.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	1.200.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
115.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**900.000.000,00**							**3.600.000.000,00**	
		Meningkatnya daya Saing Kepemudaan						***900.000.000,00***							***2.350.000.000,00***	
			1.Rasio Wirausaha Pemuda	4.31 Persentase		3.56 Persentase	3.75 Persentase	900.000.000,00						3.93 Persentase	2.350.000.000,00	
			2.Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	85 %		65 %	70 %	900.000.000,00						75 %	2.350.000.000,00	
			3.Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	0.08% Persentase		0.06% Persentase	0.06% Persentase	900.000.000,00						0.06% Persentase	2.350.000.000,00	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi						900.000.000,00					-		2.600.000.000,00	
		Jumlah Pemuda yang mengikuti Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan						900.000.000,00					-		2.600.000.000,00	
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	250 Orang		50 Orang	250 Orang	200.000.000,00						250 Orang	600.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	250 Orang		250 Orang	250 Orang	300.000.000,00						250 Orang	350.000.000,00	
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi						200.000.000,00			-	-			600.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	250 Orang		50 Orang	100 Orang	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250 Orang	600.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi						300.000.000,00			-	-			350.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	250 Orang		250 Orang	250 Orang	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250 Orang	350.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi						0,00					-		1.000.000.000,00	
		Jumlah Organisasi yang dibina						0,00					-		1.000.000.000,00	
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	5 Organisasi		5 Organisasi	5 Organisasi	0,00						5 Organisasi	1.000.000.000,00	
	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi						0,00			-	-			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	5 Organisasi		5 Organisasi	0 Organisasi	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Organisasi	1.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah Pemuda yang mengikuti Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan						900.000.000,00					-		2.600.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	-		-	-	0,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-		-	-	100.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	-		-	-	50.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	-		-	-	250.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
	2.19.02.1.01.0016	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi						250.000.000,00			-	-			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	-		-	25 Persentase	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	1.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.02.1.01.0018	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda						50.000.000,00			-	-			150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	-		-	0 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	150.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.02.1.01.0019	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi						100.000.000,00			-	-			250.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-		-	50 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	250.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.02.1.01.0020	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi						0,00			-	-			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	250.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
116.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**1.990.088.060,00**							**21.876.829.573,00**	
		Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga						***1.990.088.060,00***							***21.876.829.573,00***	
			1.Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	25.0% Persentase		17.5% Persentase	19.0% Persentase	1.990.088.060,00						21.0% Persentase	21.876.829.573,00	
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga						1.240.088.060,00					-		10.731.929.573,00	
		Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga						1.240.088.060,00					-		10.731.929.573,00	
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan		1 Kegiatan	Kegiatan	0,00						1 Kegiatan	612.251.500,00	
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi						0,00			-	-			612.251.500,00	
		Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan		1 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Kegiatan	612.251.500,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga						1.240.088.060,00					-		10.731.929.573,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	-		-	-	440.088.060,00						-	3.059.650.000,00	
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	-		-	-	800.000.000,00						-	7.060.028.073,00	
	2.19.03.1.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga						440.088.060,00			-	-			3.059.650.000,00	
		Terlaksananya keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	-		-	150 Orang	440.088.060,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	3.059.650.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.1.02.0008	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi						800.000.000,00			-	-			7.060.028.073,00	
		Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	-		-	10 Kegiatan	800.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	7.060.028.073,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional						750.000.000,00					-		1.144.900.000,00	
		Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga						750.000.000,00					-		1.144.900.000,00	
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	-		-	-	750.000.000,00						-	1.144.900.000,00	
	2.19.03.1.03.0012	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi						750.000.000,00			-	-			1.144.900.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	-		-	65 Orang	750.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	1.144.900.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						0,00					-		10.000.000.000,00	
		Jumlah Organisasi Olahraga/ Cabang Olahraga yang dibina						0,00					-		10.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	-		-	-	0,00						-	10.000.000.000,00	
	2.19.03.1.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait						0,00			-	-			10.000.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	10.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
117.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						**0,00**							**1.000.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kepramukaan						***0,00***							***1.000.000.000,00***	
			1.Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	0.08% Persentase		0.06% Persentase	0.06% Persentase	0,00						0.06% Persentase	1.000.000.000,00	
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						0,00					-		1.000.000.000,00	
		Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						0,00					-		1.000.000.000,00	
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	1.000.000.000,00	
	2.19.04.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi						0,00			-	-			1.000.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	0 Organisasi	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	1.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						**8.055.626.835,00**							**17.136.197.115,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.055.626.835,00**							**17.136.197.115,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**7.940.627.131,00**							**16.841.497.115,00**	
118.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**7.312.621.731,00**							**15.203.324.996,00**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah						***7.312.621.731,00***							***15.203.324.996,00***	
			2.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	7.312.621.731,00						100 %	15.203.324.996,00	
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.827.773.693,00					DPK Prov. Kaltara		11.417.522.834,00	
		Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						5.827.773.693,00					DPK Prov. Kaltara		11.417.522.834,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	187.470.000,00						12 Dokumen	309.630.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/ Bulan		45 Orang/ Bulan	56 Orang/ Bulan	5.640.303.693,00						68 Orang/ Bulan	11.107.892.834,00	
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.640.303.693,00			-	-			11.107.892.834,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/ Bulan		45 Orang/ Bulan	40 Orang/ Bulan	5.640.303.693,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				68 Orang/ Bulan	11.107.892.834,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						187.470.000,00			-	-			309.630.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	187.470.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	309.630.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						35.000.000,00					DPK Prov. Kaltara		452.000.000,00	
		Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						35.000.000,00					DPK Prov. Kaltara		452.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang		Orang	32 Orang	35.000.000,00						32 Orang	452.000.000,00	
	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						35.000.000,00			-	-			452.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang		Orang	2 Orang	35.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				32 Orang	452.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						493.406.800,00					DPK Prov. Kaltara		921.156.302,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						493.406.800,00					DPK Prov. Kaltara		921.156.302,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	127.203.000,00						1 Laporan	134.514.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	299.975.000,00						12 Laporan	570.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.806.600,00						1 Paket	17.514.360,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	27.266.000,00						1 Paket	50.396.750,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.302.000,00						1 Paket	5.158.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	14.512.500,00						1 Paket	83.908.763,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.341.700,00						1 Paket	59.663.929,00	
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.302.000,00			-	-			5.158.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.302.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	5.158.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						14.512.500,00			-	-			83.908.763,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	14.512.500,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	83.908.763,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						15.341.700,00			-	-			59.663.929,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.341.700,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	59.663.929,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.806.600,00			-	-			17.514.360,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.806.600,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	17.514.360,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						27.266.000,00			-	-			50.396.750,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	27.266.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	50.396.750,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						127.203.000,00			-	-			134.514.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	127.203.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	134.514.500,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						299.975.000,00			-	-			570.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	299.975.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	570.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						654.042.238,00					DPK Prov. Kaltara		1.023.369.860,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						654.042.238,00					DPK Prov. Kaltara		1.023.369.860,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	244.029.990,00						12 Laporan	501.607.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	405.948.248,00						12 Laporan	516.402.360,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.064.000,00						1 Laporan	5.360.000,00	
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.064.000,00			-	-			5.360.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.064.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	5.360.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						244.029.990,00			-	-			501.607.500,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	244.029.990,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	501.607.500,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						405.948.248,00			-	-			516.402.360,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	405.948.248,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	516.402.360,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						302.399.000,00					DPK Prov. Kaltara		1.389.276.000,00	
		BMD yang terpelihara						302.399.000,00					DPK Prov. Kaltara		1.389.276.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.260.000,00						1 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	164.330.000,00						6 Unit	173.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	66.279.000,00						1 Unit	66.520.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit		30 Unit	80 Unit	28.530.000,00						80 Unit	149.256.000,00	
	2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						66.279.000,00			-	-			66.520.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	66.279.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	66.520.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						164.330.000,00			-	-			173.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	164.330.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Unit	173.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						28.530.000,00			-	-			149.256.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit		30 Unit	80 Unit	28.530.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				80 Unit	149.256.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						43.260.000,00			-	-			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.260.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
119.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**571.205.400,00**							**1.467.442.119,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai Standar Perpustakaan Nasional						***571.205.400,00***							***1.467.442.119,00***	
			1.Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	40 Nilai		28 Nilai	31 Nilai	571.205.400,00						34 Nilai	1.467.442.119,00	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi						198.529.800,00					Perpustakaan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara		1.231.522.119,00	
		Meningkatnya perpustakaan kewenangan Provinsi yang memperoleh status terakreditasi						198.529.800,00					Perpustakaan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara		1.231.522.119,00	
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	91349 Eksemplar		28349 Eksemplar	28349 Eksemplar	69.384.000,00						49349 Eksemplar	263.377.399,00	
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	53.887.000,00						1 Dokumen	430.040.000,00	
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	5.600.000,00						1 Perpustakaan	104.574.720,00	
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	34 Perpustakaan		2 Perpustakaan	34 Perpustakaan	44.456.000,00						34 Perpustakaan	188.210.000,00	
			Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	7 Perpustakaan		2 Perpustakaan	7 Perpustakaan	25.202.800,00						7 Perpustakaan	245.320.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						44.456.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			188.210.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	34 Perpustakaan		2 Perpustakaan	34 Perpustakaan	44.456.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				34 Perpustakaan	188.210.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka						69.384.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			263.377.399,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Provinsi untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	91349 Eksemplar		28349 Eksemplar	25.226 Eksemplar	69.384.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				49349 Eksemplar	263.377.399,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat						53.887.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			430.040.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	53.887.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	430.040.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						5.600.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			104.574.720,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	5.600.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Perpustakaan	104.574.720,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi						25.202.800,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			245.320.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan umum dan khusus sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	7 Perpustakaan		2 Perpustakaan	7 Perpustakaan	25.202.800,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7 Perpustakaan	245.320.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi						372.675.600,00					Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		235.920.000,00	
		Meningkatnya Jumlah Kunjungan Pemustaka						372.675.600,00					Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		235.920.000,00	
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	2 Orang		1 Orang	2 Orang	18.730.000,00						2 Orang	70.800.000,00	
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	6 Perpustakaan		1 Perpustakaan	6 Perpustakaan	353.945.600,00						6 Perpustakaan	165.120.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						353.945.600,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			165.120.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	6 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	353.945.600,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Perpustakaan	165.120.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi						18.730.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			70.800.000,00	
		Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	2 Orang		1 Orang	1 Orang	18.730.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Orang	70.800.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
120.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**						**56.800.000,00**							**170.730.000,00**	
		Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno						***56.800.000,00***							***170.730.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Pelaksanaan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	100 %		100 %	100 %	56.800.000,00						100 %	170.730.000,00	
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi						56.800.000,00					Masyarakat Umum, Pemuka Agama, Sejarawan, Tokoh Adat, Dosen dan Tenaga Professional, serta Tokoh Budaya		170.730.000,00	
		Meningkatnya jumlah naskah kuno yang berhasil didata sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya daerah						56.800.000,00					Masyarakat Umum, Pemuka Agama, Sejarawan, Tokoh Adat, Dosen dan Tenaga Professional, serta Tokoh Budaya		170.730.000,00	
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	50 Orang		50 Orang	50 Orang	35.300.000,00						50 Orang	131.640.000,00	
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1 Eksemplar		1 Eksemplar	1 Eksemplar	21.500.000,00						1 Eksemplar	39.090.000,00	
	2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						21.500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender		39.090.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1 Eksemplar		1 Eksemplar	5 Eksemplar	21.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Eksemplar	39.090.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno						35.300.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			131.640.000,00	
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	50 Orang		50 Orang	50 Orang	35.300.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	131.640.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**114.999.704,00**							**294.700.000,00**	
121.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**114.999.704,00**							**294.700.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis						***114.999.704,00***							***294.700.000,00***	
			1.Tingkat ketersediaan arsip	85 %		81 %	82 %	114.999.704,00						83 %	294.700.000,00	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi						69.759.704,00					Lembaga Kearsipan Daerah, Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Instansi Vertikal di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara		138.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya daftar arsip untuk arsip aktif dan inaktif yang dikelola oleh perangkat daerah						69.759.704,00					Lembaga Kearsipan Daerah, Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Instansi Vertikal di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara		138.600.000,00	
			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	100 Arsip		Arsip	100 Arsip	30.000.000,00						100 Arsip	56.430.000,00	
			Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	17 Lembaga		11 Lembaga	11 Lembaga	39.759.704,00						11 Lembaga	82.170.000,00	
	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis						30.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			56.430.000,00	
		Terlaksananya Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	100 Arsip		Arsip	100 Arsip	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Arsip	56.430.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi						39.759.704,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			82.170.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD provinsi dan BUMD provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	17 Lembaga		11 Lembaga	11 Lembaga	39.759.704,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11 Lembaga	82.170.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi						45.240.000,00					Masyarakat Umum, Organisasi Perangkat Daerah, Pelajar/ Mahasiswa		156.100.000,00	
		Tercatatnya arsip statis milik daerah ke dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)						45.240.000,00					Masyarakat Umum, Organisasi Perangkat Daerah, Pelajar/ Mahasiswa		156.100.000,00	
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	320 Pengguna		100 Pengguna	320 Pengguna	45.240.000,00						320 Pengguna	156.100.000,00	
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN						45.240.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender			156.100.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	320 Pengguna		100 Pengguna	50 Pengguna	45.240.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				320 Pengguna	156.100.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Dinas Kelautan dan Perikanan						**20.118.897.635,00**							**38.128.579.442,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**20.118.897.635,00**							**38.128.579.442,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**20.118.897.635,00**							**38.128.579.442,00**	
122.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**17.443.897.635,00**							**21.133.831.701,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah						***17.368.897.635,00***							***21.063.831.701,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	17.368.897.635,00						100 %	21.063.831.701,00	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						99.071.000,00					-		150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi						99.071.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	49.380.000,00						1 Data	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	49.691.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						49.691.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	49.691.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						49.380.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	49.380.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Data	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						16.260.045.835,00					-		19.116.267.218,00	
		Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						16.260.045.835,00					-		19.116.267.218,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	253.240.000,00						12 Dokumen	354.160.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	151 Orang/ Bulan		138 Orang/ Bulan	146 Orang/ Bulan	16.006.805.835,00						146 Orang/ Bulan	18.762.107.218,00	
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						16.006.805.835,00			-	-			18.762.107.218,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	151 Orang/ Bulan		138 Orang/ Bulan	146 Orang/ Bulan	16.006.805.835,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				146 Orang/ Bulan	18.762.107.218,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						243.240.000,00			-	-			284.160.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	243.240.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	284.160.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						396.662.800,00					-		795.772.587,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						396.662.800,00					-		795.772.587,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	275.000.000,00						12 Laporan	625.772.587,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		5 Paket	12 Paket	95.331.800,00						12 Paket	110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		3 Paket	12 Paket	21.331.000,00						12 Paket	60.000.000,00	
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						90.331.800,00			-	-			110.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		5 Paket	5 Paket	90.331.800,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	110.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						18.331.000,00			-	-			60.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		3 Paket	5 Paket	18.331.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	60.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						250.000.000,00			-	-			625.772.587,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	625.772.587,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						392.239.600,00					-		547.791.896,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						392.239.600,00					-		547.791.896,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	92.866.500,00						12 Laporan	93.849.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	292.623.100,00						12 Laporan	438.342.896,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.750.000,00						12 Laporan	15.600.000,00	
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.750.000,00			-	-			15.600.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.750.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	15.600.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						79.866.500,00			-	-			93.849.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	79.866.500,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	93.849.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						282.623.100,00			-	-			438.342.896,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	282.623.100,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	438.342.896,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						295.878.400,00					-		524.000.000,00	
		Barang Milik Daerah yang terpelihara						295.878.400,00					-		524.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		10 Unit	10 Unit	247.646.400,00						10 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit		17 Unit	20 Unit	23.582.000,00						20 Unit	24.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	24.650.000,00						10 Unit	0,00	
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.582.000,00			-	-			24.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit		17 Unit	18 Unit	20.582.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Unit	24.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						247.646.400,00			-	-			500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		10 Unit	13 Unit	247.646.400,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						24.650.000,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	33 Unit	24.650.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
123.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**415.000.000,00**							**2.196.923.893,00**	
		Meningkatnya pengelolaan pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan dan sesuai dengan zonasi yang ditetapkan						***300.000.000,00***							***1.800.000.000,00***	
			1.Nilai Evaluasi, efektivitas, pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA)	50 Nilai		35 Nilai	37 Nilai	300.000.000,00						40 Nilai	1.800.000.000,00	
			2.Jumlah luasan wilayah laut yang dikelola	356121.58 Ha		310797.02 Ha	329574.34 Ha	300.000.000,00						336696.77 Ha	1.800.000.000,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						315.000.000,00					-		1.996.923.893,00	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam program pemberdayaan						315.000.000,00					-		1.996.923.893,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	80 Orang		0 Orang	50 Orang	75.000.000,00						60 Orang	300.000.000,00	
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	32844.23 Ha		26639.62 Ha	31305.55 Ha	140.000.000,00						31305.55 Ha	1.396.923.893,00	
		Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi daerah yang efektif						315.000.000,00					-		1.996.923.893,00	
			Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	80 Orang		0 Orang	50 Orang	75.000.000,00						60 Orang	300.000.000,00	
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	32844.23 Ha		26639.62 Ha	31305.55 Ha	140.000.000,00						31305.55 Ha	1.396.923.893,00	
		Terlaksananya penyusunan rekomendasi kebijakan hasil monitoring dan evaluasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)						315.000.000,00					-		1.996.923.893,00	
			Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	80 Orang		0 Orang	50 Orang	75.000.000,00						60 Orang	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	32844.23 Ha		26639.62 Ha	31305.55 Ha	140.000.000,00						31305.55 Ha	1.396.923.893,00	
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						125.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			1.300.000.000,00	
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	32844.23 Ha		26639.62 Ha	26639,62 Ha	125.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				31305.55 Ha	1.300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						75.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			300.000.000,00	
		Terlaksananya Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	80 Orang		0 Orang	50 Orang	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60 Orang	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir						100.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			300.000.000,00	
		Tersusunnya dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						100.000.000,00					-		200.000.000,00	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam program pemberdayaan						100.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5 Kelompok		0 Kelompok	5 Kelompok	100.000.000,00						5 Kelompok	200.000.000,00	
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						100.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			200.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5 Kelompok		0 Kelompok	5 Kelompok	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Kelompok	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
124.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**625.000.000,00**							**3.480.000.000,00**	
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap						***375.000.000,00***							***3.480.000.000,00***	
			1.Produksi Perikanan Tangkap	40704 Ton		37604 Ton	38356 Ton	375.000.000,00						39123 Ton	3.480.000.000,00	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						125.000.000,00					-		800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya armada perikanan yang beroperasi secara efektif dan Penggunaan alat tangkap ramah lingkungan						125.000.000,00					-		800.000.000,00	
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	14 Unit		0 Unit	85 Unit	125.000.000,00						16 Unit	800.000.000,00	
		Tersedianya data sumber daya ikan yang mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berbasis konservasi						125.000.000,00					-		800.000.000,00	
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	14 Unit		0 Unit	85 Unit	125.000.000,00						16 Unit	800.000.000,00	
	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						125.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			800.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	14 Unit		0 Unit	17 Unit	125.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16 Unit	800.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						150.000.000,00					-		430.000.000,00	
		Meningkatnya armada perikanan yang beroperasi secara efektif dan Penggunaan alat tangkap ramah lingkungan						150.000.000,00					-		430.000.000,00	
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	177 Unit		0 Unit	308 Unit	150.000.000,00						456 Unit	430.000.000,00	
		Tersedianya data sumber daya ikan yang mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berbasis konservasi						150.000.000,00					-		430.000.000,00	
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	177 Unit		0 Unit	308 Unit	150.000.000,00						456 Unit	430.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						150.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			430.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Darat	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	177 Unit		0 Unit	2 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				456 Unit	430.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						100.000.000,00					-		150.000.000,00	
		Meningkatnya usaha perikanan tangkap yang memiliki izin usaha perikanan (IUP) tangkap						100.000.000,00					-		150.000.000,00	
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	95 Persentase		0 Persentase	93 Persentase	100.000.000,00						93 Persentase	150.000.000,00	
	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil						100.000.000,00			-	-			150.000.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	95 Persentase		0 Persentase	100 Persentase	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				93 Persentase	150.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						250.000.000,00					-		2.100.000.000,00	
		Meningkatnya sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan						250.000.000,00					-		2.100.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	2 Pelabuhan Perikanan		1 Pelabuhan Perikanan	2 Pelabuhan Perikanan	125.000.000,00						2 Pelabuhan Perikanan	1.250.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	3 Unit		0 Unit	3 Unit	125.000.000,00						3 Unit	850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.03.1.06.0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan						125.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			1.250.000.000,00	
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	2 Pelabuhan Perikanan		1 Pelabuhan Perikanan	1 Pelabuhan Perikanan	125.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Pelabuhan Perikanan	1.250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan						125.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			850.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	3 Unit		0 Unit	1 Unit	125.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	850.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
125.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**775.000.000,00**							**6.306.000.000,00**	
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya						***475.000.000,00***							***4.706.000.000,00***	
			1.Produksi Perikanan Budidaya	926944.24 Ton		890775.20 Ton	899682.95 Ton	475.000.000,00						908679.78 Ton	4.706.000.000,00	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						475.000.000,00					Pembudidaya Ikan		4.706.000.000,00	
		Meningkatnya ketersediaan data dan informasi perikanan budidaya yang valid dan dimanfaatkan						475.000.000,00					Pembudidaya Ikan		4.706.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Pembudidaya	90 Orang		50 Orang	60 Orang	100.000.000,00						70 Orang	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit		0 Unit	3 Unit	175.000.000,00						3 Unit	3.506.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	4 Unit		0 Unit	2 Unit	150.000.000,00						4 Unit	800.000.000,00	
		Meningkatnya kompetensi teknis masyarakat pembudidaya ikan						475.000.000,00					Pembudidaya Ikan		4.706.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Pembudidaya	90 Orang		50 Orang	60 Orang	100.000.000,00						70 Orang	300.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit		0 Unit	3 Unit	175.000.000,00						3 Unit	3.506.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	4 Unit		0 Unit	2 Unit	150.000.000,00						4 Unit	800.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas kesehatan ikan dan lingkungan budidaya yang dipantau secara berkala						475.000.000,00					Pembudidaya Ikan		4.706.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Pembudidaya	90 Orang		50 Orang	60 Orang	100.000.000,00						70 Orang	300.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit		0 Unit	3 Unit	175.000.000,00						3 Unit	3.506.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	4 Unit		0 Unit	2 Unit	150.000.000,00						4 Unit	800.000.000,00	
		Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan di wilayah laut						475.000.000,00					Pembudidaya Ikan		4.706.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Pembudidaya	90 Orang		50 Orang	60 Orang	100.000.000,00						70 Orang	300.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit		0 Unit	3 Unit	175.000.000,00						3 Unit	3.506.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	4 Unit		0 Unit	2 Unit	150.000.000,00						4 Unit	800.000.000,00	
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			100.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut						175.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			3.506.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit		0 Unit	1 Unit	175.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	3.506.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut						150.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			800.000.000,00	
		Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	4 Unit		0 Unit	2 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	800.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi						100.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			300.000.000,00	
		Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	90 Orang		50 Orang	60 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70 Orang	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat						300.000.000,00					Pembudidaya Ikan		1.600.000.000,00	
		Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan diwilayah perairan darat						300.000.000,00					Pembudidaya Ikan		1.600.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit		1 Unit	2 Unit	150.000.000,00						4 Unit	800.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit		1 Unit	2 Unit	150.000.000,00						4 Unit	800.000.000,00	
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit		1 Unit	2 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	800.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			800.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	800.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
126.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**757.000.000,00**							**2.153.747.741,00**	
		Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran diwilayah pesisir dan laut						***550.000.000,00***							***1.553.747.741,00***	
			2.Persentase tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelanggaran di wilayah pesisir dan laut	96.00 %		89.00 %	90.80 %	550.000.000,00						92.50 %	1.553.747.741,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						640.000.000,00					Nelayan, Pembudidaya ikan, Pengolah dan pemasaran Hasil perikanan, Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut		1.803.747.741,00	
		Meningkatnya intensitas pelaksanaan operasi pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan						640.000.000,00					Nelayan, Pembudidaya ikan, Pengolah dan pemasaran Hasil perikanan, Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut		1.803.747.741,00	
			Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	1 Forum		0 Forum	1 Forum	50.000.000,00						1 Forum	110.000.000,00	
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	20 Hari Operasi		22 Hari Operasi	20 Hari Operasi	144.260.000,00						20 Hari Operasi	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	2 Unit		0 Unit	2 Unit	100.000.000,00						2 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		7 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	72.375.000,00						15 Pelaku Usaha	200.000.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	16 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	14 Pelaku Usaha	72.370.000,00						14 Pelaku Usaha	303.747.741,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	72.000.000,00						13 Pelaku Usaha	300.000.000,00	
			Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	1 Perkara		0 Perkara	1 Perkara	28.995.000,00						1 Perkara	90.000.000,00	
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	4 Kelompok Masyarakat		5 Kelompok Masyarakat	4 Kelompok Masyarakat	100.000.000,00						4 Kelompok Masyarakat	400.000.000,00	
		Meningkatnya peran dan kapasitas Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan						640.000.000,00					Nelayan, Pembudidaya ikan, Pengolah dan pemasaran Hasil perikanan, Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut		1.803.747.741,00	
			Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	1 Forum		0 Forum	1 Forum	50.000.000,00						1 Forum	110.000.000,00	
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	20 Hari Operasi		22 Hari Operasi	20 Hari Operasi	144.260.000,00						20 Hari Operasi	200.000.000,00	
			Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	2 Unit		0 Unit	2 Unit	100.000.000,00						2 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		7 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	72.375.000,00						15 Pelaku Usaha	200.000.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	16 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	14 Pelaku Usaha	72.370.000,00						14 Pelaku Usaha	303.747.741,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	72.000.000,00						13 Pelaku Usaha	300.000.000,00	
			Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	1 Perkara		0 Perkara	1 Perkara	28.995.000,00						1 Perkara	90.000.000,00	
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	4 Kelompok Masyarakat		5 Kelompok Masyarakat	4 Kelompok Masyarakat	100.000.000,00						4 Kelompok Masyarakat	400.000.000,00	
		Meningkatnya sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan						640.000.000,00					Nelayan, Pembudidaya ikan, Pengolah dan pemasaran Hasil perikanan, Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut		1.803.747.741,00	
			Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	1 Forum		0 Forum	1 Forum	50.000.000,00						1 Forum	110.000.000,00	
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	20 Hari Operasi		22 Hari Operasi	20 Hari Operasi	144.260.000,00						20 Hari Operasi	200.000.000,00	
			Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	2 Unit		0 Unit	2 Unit	100.000.000,00						2 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		7 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	72.375.000,00						15 Pelaku Usaha	200.000.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	16 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	14 Pelaku Usaha	72.370.000,00						14 Pelaku Usaha	303.747.741,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	72.000.000,00						13 Pelaku Usaha	300.000.000,00	
			Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	1 Perkara		0 Perkara	1 Perkara	28.995.000,00						1 Perkara	90.000.000,00	
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	4 Kelompok Masyarakat		5 Kelompok Masyarakat	4 Kelompok Masyarakat	100.000.000,00						4 Kelompok Masyarakat	400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.05.1.01.0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi						28.995.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			90.000.000,00	
		Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	1 Perkara		0 Perkara	1 Perkara	28.995.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Perkara	90.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan						117.260.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			200.000.000,00	
		Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	20 Hari Operasi		22 Hari Operasi	20 Hari Operasi	117.260.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Hari Operasi	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan						100.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	2 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						62.370.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			303.747.741,00	
		Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	16 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	14 Pelaku Usaha	62.370.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14 Pelaku Usaha	303.747.741,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						62.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			300.000.000,00	
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	62.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13 Pelaku Usaha	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi						62.375.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			200.000.000,00	
		Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		7 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	62.375.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Pelaku Usaha	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)						100.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			400.000.000,00	
		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	4 Kelompok Masyarakat		5 Kelompok Masyarakat	4 Kelompok Masyarakat	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Kelompok Masyarakat	400.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.01.0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah						50.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	1 Forum		0 Forum	1 Forum	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Forum	110.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						117.000.000,00					-		350.000.000,00	
		Meningkatnya intensitas pelaksanaan operasi pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan						117.000.000,00					-		350.000.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	17 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	50.000.000,00						15 Pelaku Usaha	150.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	67.000.000,00						15 Pelaku Usaha	200.000.000,00	
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi						50.000.000,00			-	-			150.000.000,00	
		Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	17 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Pelaku Usaha	150.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi						67.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	67.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Pelaku Usaha	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
127.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**250.000.000,00**							**3.025.000.000,00**	
		Meningkatnya akses dan jangkauan pasar hasil perikanan						***50.000.000,00***							***100.000.000,00***	
			2.Jumlah kemitraan atau jejaring pemasaran hasil perikanan	29 Angka		21 Angka	23 Angka	50.000.000,00						25 Angka	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						50.000.000,00					-		100.000.000,00	
		Meningkatnya ketersediaan data dan informasi Pengolahan pemasaran ikan berdasarkan skala usaha dan risiko						50.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00						3 Dokumen	100.000.000,00	
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						50.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			100.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	3 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat						***200.000.000,00***							***2.925.000.000,00***	
			3.Angka Konsumsi Ikan	46.20 Kg/KAP/TH		42.97 Kg/KAP/TH	43.97 Kg/KAP/TH	200.000.000,00						44.63 Kg/KAP/TH	2.925.000.000,00	
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						200.000.000,00					-		2.925.000.000,00	
		Meningkatnya pemantauan mutu dan keamanan hasil pengolahan perikanan pada Unit Pengolah Ikan (UPI)						200.000.000,00					-		2.925.000.000,00	
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	3 Kegiatan		0 Kegiatan	3 Kegiatan	200.000.000,00						3 Kegiatan	2.925.000.000,00	
		Terlaksananya kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)						200.000.000,00					-		2.925.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	3 Kegiatan		0 Kegiatan	3 Kegiatan	200.000.000,00						3 Kegiatan	2.925.000.000,00	
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing						200.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			2.925.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	3 Kegiatan		3 Kegiatan	7 Kegiatan	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Kegiatan	2.925.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	3 Kegiatan		0 Kegiatan	7 Kegiatan	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Kegiatan	2.925.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Meningkatnya mutu dan keamanan produk hasil perikanan						***200.000.000,00***							***2.925.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase produk perikanan yang bersertifikasi mutu, keamanan pangan dan traceability	100 %		100 %	100 %	200.000.000,00						100 %	2.925.000.000,00	
		Meningkatnya pemantauan mutu dan keamanan hasil pengolahan perikanan pada Unit Pengolah Ikan (UPI)						200.000.000,00					-		2.925.000.000,00	
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	3 Kegiatan		0 Kegiatan	3 Kegiatan	200.000.000,00						3 Kegiatan	2.925.000.000,00	
		Terlaksananya kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)						200.000.000,00					-		2.925.000.000,00	
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	3 Kegiatan		0 Kegiatan	3 Kegiatan	200.000.000,00						3 Kegiatan	2.925.000.000,00	
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing						200.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			2.925.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	3 Kegiatan		0 Kegiatan	7 Kegiatan	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Kegiatan	2.925.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	3 Kegiatan		3 Kegiatan	7 Kegiatan	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Kegiatan	2.925.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		UPTD Pelabuhan Tengkayu II						**1.700.000.000,00**							**3.690.599.178,96**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.700.000.000,00**							**3.690.599.178,96**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1.700.000.000,00**							**3.690.599.178,96**	
128.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.615.317.000,00**							**2.821.128.578,96**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah						***1.615.317.000,00***							***2.821.128.578,96***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	1.615.317.000,00						100 %	2.821.128.578,96	
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						173.760.000,00					-		317.891.200,00	
		Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						173.760.000,00					-		317.891.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	173.760.000,00						12 Dokumen	317.891.200,00	
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						173.760.000,00			-	-			317.891.200,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	173.760.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	317.891.200,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu II
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						15.000.000,00					-		36.300.000,00	
		Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						15.000.000,00					-		36.300.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		60 Paket	0 Paket	0,00						0 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	15.000.000,00						2 Orang	36.300.000,00	
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		60 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket	0,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu II
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						15.000.000,00			-	-			36.300.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	1 Orang	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Orang	36.300.000,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu II
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						451.846.700,00					-		831.539.552,89	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						451.846.700,00					-		831.539.552,89	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105 Laporan		85 Laporan	90 Laporan	226.000.000,00						95 Laporan	328.350.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	24.714.200,00						12 Paket	28.228.816,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	23.584.000,00						12 Paket	51.848.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	18.021.800,00						1 Paket	30.582.750,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		5 Paket	5 Paket	151.570.700,00						6 Paket	287.846.986,89	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		4 Paket	3 Paket	7.956.000,00						3 Paket	104.682.500,00	
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						18.021.800,00			-	-			30.582.750,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	18.021.800,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	30.582.750,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu II
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						151.570.700,00			-	-			287.846.986,89	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		5 Paket	8 Paket	151.570.700,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Paket	287.846.986,89	UPTD Pelabuhan Tengkayu II
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.956.000,00			-	-			104.682.500,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		4 Paket	2 Paket	7.956.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Paket	104.682.500,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu II
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						24.714.200,00			-	-			28.228.816,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	24.714.200,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	28.228.816,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu II
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						23.584.000,00			-	-			51.848.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	23.584.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	51.848.500,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu II
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						226.000.000,00			-	-			328.350.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105 Laporan		85 Laporan	90 Laporan	226.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				95 Laporan	328.350.000,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu II
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					-		184.000.000,00	
		Pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi						0,00					-		184.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	0 Unit	0,00						4 Unit	184.000.000,00	
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00			-	-			184.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	184.000.000,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu II
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						805.058.300,00					-		1.198.873.606,07	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						805.058.300,00					-		1.198.873.606,07	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	244.703.308,00						12 Laporan	296.022.156,24	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	554.604.992,00						12 Laporan	896.196.449,83	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.750.000,00						2 Laporan	6.655.000,00	
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.750.000,00			-	-			6.655.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	5.750.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	6.655.000,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu II
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						244.703.308,00			-	-			296.022.156,24	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	244.703.308,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	296.022.156,24	UPTD Pelabuhan Tengkayu II
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						554.604.992,00			-	-			896.196.449,83	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	554.604.992,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	896.196.449,83	UPTD Pelabuhan Tengkayu II
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						169.652.000,00					-		252.524.220,00	
		BMD yang terpelihara						169.652.000,00					-		252.524.220,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	23.330.000,00						1 Unit	110.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	41.134.000,00						2 Unit	10.527.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	7.098.000,00						18 Unit	18.150.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	48.090.000,00						12 Unit	64.947.220,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	50.000.000,00						3 Unit	48.400.000,00	
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						7.098.000,00			-	-			18.150.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	7.098.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18 Unit	18.150.000,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu II
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						41.134.000,00			-	-			10.527.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	41.134.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Unit	10.527.000,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu II
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						48.090.000,00			-	-			64.947.220,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	48.090.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Unit	64.947.220,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu II
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						23.330.000,00			-	-			110.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	23.330.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	110.500.000,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu II
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00			-	-			48.400.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Unit	48.400.000,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu II
129.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**84.683.000,00**							**869.470.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pendapatan retribusi atas pelayanan pelabuhan perikanan						***84.683.000,00***							***869.470.600,00***	
			1.Jumlah pendapatan retribusi atas pelayanan pelabuhan perikanan	2280691809 Rp		2191700000 Rp	2213617000 Rp	84.683.000,00						2235753170 Rp	869.470.600,00	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						84.683.000,00					-		869.470.600,00	
		Meningkatnya sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan						84.683.000,00					-		869.470.600,00	
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	20.800.000,00						2 Layanan	77.270.600,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	2 Unit		2 Unit	2 Unit	63.883.000,00						2 Unit	792.200.000,00	
		Terlaksananya layanan pengusahaan pelabuhan perikanan						84.683.000,00					-		869.470.600,00	
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	20.800.000,00						2 Layanan	77.270.600,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	2 Unit		2 Unit	2 Unit	63.883.000,00						2 Unit	792.200.000,00	
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan						63.883.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			792.200.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	2 Unit		2 Unit	2 Unit	63.883.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	792.200.000,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan						20.800.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			77.270.600,00	
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	2 Layanan		2 Layanan	3 Layanan	20.800.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Layanan	77.270.600,00	UPTD Pelabuhan Tengkayu II
		UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau						**249.999.806,00**							**764.473.740,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**249.999.806,00**							**764.473.740,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**249.999.806,00**							**764.473.740,00**	
130.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**239.039.006,00**							**494.473.740,00**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah						***239.039.006,00***							***494.473.740,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	239.039.006,00						100 %	494.473.740,00	
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						102.900.000,00					-		134.455.200,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Regulasi						102.900.000,00					-		134.455.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	102.900.000,00						12 Dokumen	134.455.200,00	
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						102.900.000,00			-	-			134.455.200,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	102.900.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Anyar Pantai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	134.455.200,00	UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						46.114.814,00					-		214.963.895,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						46.114.814,00					-		214.963.895,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		10 Laporan	40 Laporan	35.000.000,00						45 Laporan	188.150.302,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		3 Paket	2 Paket	7.065.800,00						2 Paket	12.293.835,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		3 Paket	2 Paket	1.580.214,00						2 Paket	8.654.888,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.468.800,00						4 Paket	5.864.870,00	
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.468.800,00			-	-			5.864.870,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.468.800,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Anyar Pantai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	5.864.870,00	UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.065.800,00			-	-			12.293.835,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		3 Paket	2 Paket	7.065.800,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Anyar Pantai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	12.293.835,00	UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.580.214,00			-	-			8.654.888,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		3 Paket	2 Paket	1.580.214,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Anyar Pantai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	8.654.888,00	UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						35.000.000,00			-	-			188.150.302,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		10 Laporan	7 Laporan	35.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Anyar Pantai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				45 Laporan	188.150.302,00	UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						87.180.192,00					-		125.694.645,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						87.180.192,00					-		125.694.645,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		6 Laporan	12 Laporan	9.669.200,00						12 Laporan	23.154.560,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	75.701.592,00						12 Laporan	97.700.085,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.809.400,00						2 Laporan	4.840.000,00	
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.809.400,00			-	-			4.840.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.809.400,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Anyar Pantai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	4.840.000,00	UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.669.200,00			-	-			23.154.560,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	9.669.200,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Anyar Pantai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	23.154.560,00	UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						75.701.592,00			-	-			97.700.085,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	75.701.592,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Anyar Pantai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	97.700.085,00	UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.844.000,00					-		19.360.000,00	
		BMD yang terpelihara						2.844.000,00					-		19.360.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		2 Unit	3 Unit	2.844.000,00						3 Unit	19.360.000,00	
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.844.000,00			-	-			19.360.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		2 Unit	3 Unit	2.844.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Anyar Pantai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	19.360.000,00	UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau
131.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**10.960.800,00**							**270.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya pendapatan retribusi atas penyediaan Benih/Bibit Ikan Bermutu						***10.960.800,00***							***270.000.000,00***	
			1.Jumlah pendapatan retribusi atas pelayanan bibit/benih ikan	20000000 Rp		16000000 Rp	17000000 Rp	10.960.800,00						18000000 Rp	270.000.000,00	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						10.026.800,00					-		230.000.000,00	
		Meningkatnya kompetensi teknis masyarakat pembudidaya ikan						10.026.800,00					-		230.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2 Unit		2 Unit	2 Unit	10.026.800,00						2 Unit	230.000.000,00	
		Tersedianya sarana pembibitan/pembenihan ikan diwilayah laut						10.026.800,00					-		230.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2 Unit		2 Unit	2 Unit	10.026.800,00						2 Unit	230.000.000,00	
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut						10.026.800,00			-	-			230.000.000,00	
		Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2 Unit		2 Unit	1 Unit	10.026.800,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	230.000.000,00	UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat						934.000,00					-		40.000.000,00	
		Tersedianya sarana pembibitan/pembenihan ikan diwilayah perairan darat						934.000,00					-		40.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit		2 Unit	2 Unit	934.000,00						2 Unit	40.000.000,00	
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota						934.000,00			-	-			40.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit		2 Unit	1 Unit	934.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	40.000.000,00	UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau
		UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan						**249.999.595,00**							**2.741.845.744,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**249.999.595,00**							**2.741.845.744,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**249.999.595,00**							**2.741.845.744,00**	
132.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**207.999.595,00**							**2.434.206.874,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah						***207.999.595,00***							***2.434.206.874,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	207.999.595,00						100 %	2.434.206.874,00	
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						75.160.000,00					-		94.643.010,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Yang Tertib dan Akuntabel						75.160.000,00					-		94.643.010,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	75.160.000,00						12 Dokumen	94.643.010,00	
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						75.160.000,00			-	-			94.643.010,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	75.160.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	94.643.010,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						23.000.000,00					-		84.500.000,00	
		Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian						23.000.000,00					-		84.500.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		2 Orang	4 Orang	23.000.000,00						4 Orang	84.500.000,00	
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						23.000.000,00			-	-			84.500.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		2 Orang	2 Orang	23.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Orang	84.500.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						92.241.195,00					-		227.019.029,00	
		Meningkatnya Layanan Administrasi Umum						92.241.195,00					-		227.019.029,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	68.000.000,00						40 Laporan	144.317.250,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	9.084.500,00						12 Paket	14.189.987,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	1.935.495,00						12 Paket	4.265.970,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	7.803.000,00						12 Paket	58.794.120,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	5.418.200,00						12 Paket	5.451.702,00	
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.803.000,00			-	-			58.794.120,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	7.803.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	58.794.120,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.418.200,00			-	-			5.451.702,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	5.418.200,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	5.451.702,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.084.500,00			-	-			14.189.987,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	9.084.500,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	14.189.987,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.935.495,00			-	-			4.265.970,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	1.935.495,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	4.265.970,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						68.000.000,00			-	-			144.317.250,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	30 Laporan	68.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Laporan	144.317.250,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					-		1.897.981.120,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah						0,00					-		1.897.981.120,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Paket		0 Paket	12 Paket	0,00						12 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	35.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		0 Unit	10 Unit	0,00						8 Unit	912.981.120,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	3 Unit	0,00						2 Unit	500.000.000,00	
	3.25.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00			-	-			350.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	350.000.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00			-	-			35.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	35.000.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00			-	-			100.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	100.000.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00			-	-			912.981.120,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Unit	912.981.120,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00			-	-			500.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	500.000.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						13.080.400,00					-		55.563.715,00	
		Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						13.080.400,00					-		55.563.715,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		6 Laporan	12 Laporan	11.430.400,00						12 Laporan	15.990.716,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	37.753.874,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.650.000,00						12 Laporan	1.819.125,00	
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.650.000,00			-	-			1.819.125,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.650.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	1.819.125,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.430.400,00			-	-			15.990.716,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	11.430.400,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	15.990.716,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00			-	-			37.753.874,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	37.753.874,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.518.000,00					-		74.500.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai						4.518.000,00					-		74.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						1 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		0 Unit	2 Unit	0,00						3 Unit	4.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						2 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit		7 Unit	9 Unit	4.518.000,00						9 Unit	25.000.000,00	
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00			-	-			15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	15.000.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00			-	-			4.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	4.500.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.518.000,00			-	-			25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit		7 Unit	12 Unit	4.518.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9 Unit	25.000.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00			-	-			30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Barat || Kelurahan Karang Rejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	30.000.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
133.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**42.000.000,00**							**307.638.870,00**	
		Meningkatnya mutu dan keamanan produk hasil perikanan						***42.000.000,00***							***307.638.870,00***	
			1.Jumlah produk hasil perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	10 Produk		10 Produk	10 Produk	42.000.000,00						10 Produk	307.638.870,00	
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						42.000.000,00					-		307.638.870,00	
		Meningkatnya pemantauan mutu dan keamanan hasil pengolahan perikanan pada Unit Pengolah Ikan (UPI)						42.000.000,00					-		307.638.870,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	10 Kegiatan		10 Kegiatan	10 Kegiatan	42.000.000,00						10 Kegiatan	126.138.870,00	
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	10 Kegiatan		0 Kegiatan	10 Kegiatan	0,00						10 Kegiatan	181.500.000,00	
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing						42.000.000,00			-	-			126.138.870,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	10 Kegiatan		10 Kegiatan	7 Kegiatan	42.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Kegiatan	126.138.870,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						0,00			-	-			181.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	10 Kegiatan		0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Kegiatan	181.500.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan						**150.000.000,00**							**166.923.893,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**147.000.000,00**							**166.923.893,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**147.000.000,00**							**166.923.893,00**	
134.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**17.443.897.635,00**							**21.133.831.701,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah						***57.000.000,00***							***70.000.000,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	57.000.000,00						100 %	70.000.000,00	
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						16.260.045.835,00					-		19.116.267.218,00	
		Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						16.260.045.835,00					-		19.116.267.218,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	253.240.000,00						12 Dokumen	354.160.000,00	
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						10.000.000,00			-	-			70.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	70.000.000,00	UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						396.662.800,00					-		795.772.587,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						396.662.800,00					-		795.772.587,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	275.000.000,00						12 Laporan	625.772.587,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		5 Paket	12 Paket	95.331.800,00						12 Paket	110.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		3 Paket	12 Paket	21.331.000,00						12 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		1 Paket	20 Paket	5.000.000,00						25 Paket	0,00	
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Paket	0,00	UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.000.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		5 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	0,00	UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		3 Paket	1 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	0,00	UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						25.000.000,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	0,00	UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						392.239.600,00					-		547.791.896,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						392.239.600,00					-		547.791.896,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	92.866.500,00						12 Laporan	93.849.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	292.623.100,00						12 Laporan	438.342.896,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.750.000,00						12 Laporan	15.600.000,00	
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	0,00	UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						13.000.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	0,00	UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						10.000.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	0,00	UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						295.878.400,00					-		524.000.000,00	
		Barang Milik Daerah yang terpelihara						295.878.400,00					-		524.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		10 Unit	10 Unit	247.646.400,00						10 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit		17 Unit	20 Unit	23.582.000,00						20 Unit	24.000.000,00	
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						3.000.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit		17 Unit	1 Unit	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Unit	0,00	UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		10 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	0,00	UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
135.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**415.000.000,00**							**2.196.923.893,00**	
		Meningkatnya pengelolaan pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan dan sesuai dengan zonasi yang ditetapkan						***15.000.000,00***							***96.923.893,00***	
			1.Nilai Evaluasi, efektivitas, pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA)	50 Nilai		35 Nilai	37 Nilai	15.000.000,00						40 Nilai	96.923.893,00	
			2.Jumlah luasan wilayah laut yang dikelola	356121.58 Ha		310797.02 Ha	329574.34 Ha	15.000.000,00						336696.77 Ha	96.923.893,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						315.000.000,00					-		1.996.923.893,00	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam program pemberdayaan						315.000.000,00					-		1.996.923.893,00	
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	32844.23 Ha		26639.62 Ha	31305.55 Ha	140.000.000,00						31305.55 Ha	1.396.923.893,00	
		Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi daerah yang efektif						315.000.000,00					-		1.996.923.893,00	
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	32844.23 Ha		26639.62 Ha	31305.55 Ha	140.000.000,00						31305.55 Ha	1.396.923.893,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya penyusunan rekomendasi kebijakan hasil monitoring dan evaluasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)						315.000.000,00					-		1.996.923.893,00	
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	32844.23 Ha		26639.62 Ha	31305.55 Ha	140.000.000,00						31305.55 Ha	1.396.923.893,00	
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						15.000.000,00			-	-			96.923.893,00	
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	32844.23 Ha		26639.62 Ha	275,73 Ha	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				31305.55 Ha	96.923.893,00	UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
136.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**757.000.000,00**							**2.153.747.741,00**	
		Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran diwilayah pesisir dan laut						***37.000.000,00***							***0,00***	
			2.Persentase tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelanggaran di wilayah pesisir dan laut	96.00 %		89.00 %	90.80 %	37.000.000,00						92.50 %	0,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						640.000.000,00					-		1.803.747.741,00	
		Meningkatnya intensitas pelaksanaan operasi pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan						640.000.000,00					-		1.803.747.741,00	
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	20 Hari Operasi		22 Hari Operasi	20 Hari Operasi	144.260.000,00						20 Hari Operasi	200.000.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		7 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	72.375.000,00						15 Pelaku Usaha	200.000.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	16 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	14 Pelaku Usaha	72.370.000,00						14 Pelaku Usaha	303.747.741,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	72.000.000,00						13 Pelaku Usaha	300.000.000,00	
		Meningkatnya peran dan kapasitas Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan						640.000.000,00					-		1.803.747.741,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	20 Hari Operasi		22 Hari Operasi	20 Hari Operasi	144.260.000,00						20 Hari Operasi	200.000.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		7 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	72.375.000,00						15 Pelaku Usaha	200.000.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	16 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	14 Pelaku Usaha	72.370.000,00						14 Pelaku Usaha	303.747.741,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	72.000.000,00						13 Pelaku Usaha	300.000.000,00	
		Meningkatnya sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan						640.000.000,00					-		1.803.747.741,00	
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	20 Hari Operasi		22 Hari Operasi	20 Hari Operasi	144.260.000,00						20 Hari Operasi	200.000.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		7 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	72.375.000,00						15 Pelaku Usaha	200.000.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	16 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	14 Pelaku Usaha	72.370.000,00						14 Pelaku Usaha	303.747.741,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	72.000.000,00						13 Pelaku Usaha	300.000.000,00	
	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan						27.000.000,00			-	-			0,00	
		Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	20 Hari Operasi		22 Hari Operasi	12 Hari Operasi	27.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Hari Operasi	0,00	UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						10.000.000,00			-	-			0,00	
		Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	16 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	32 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14 Pelaku Usaha	0,00	UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						10.000.000,00			-	-			0,00	
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	11 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13 Pelaku Usaha	0,00	UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi						10.000.000,00			-	-			0,00	
		Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha		7 Pelaku Usaha	9 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Pelaku Usaha	0,00	UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	X							**3.000.000,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**3.000.000,00**							**0,00**	
137.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**3.000.000,00**							**0,00**	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	-		-	100 %	3.000.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						3.000.000,00					-		0,00	
		Pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi						3.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket		20 Paket	10 Paket	3.000.000,00						15 Paket	0,00	
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						3.000.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket		20 Paket	1 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Paket	0,00	UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
		Dinas Pariwisata						**8.183.848.044,00**							**32.273.112.867,38**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**8.183.848.044,00**							**32.273.112.867,38**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**8.183.848.044,00**							**32.273.112.867,38**	
138.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**6.453.848.044,00**							**10.378.431.449,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah						***6.444.848.044,00***							***10.028.431.449,00***	
			2.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	6.444.848.044,00						100 %	10.028.431.449,00	
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						37.432.991,00					Pegawai Dinas Pariwisata Kaltara		200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai Standar Regulasi						37.432.991,00					Pegawai Dinas Pariwisata Kaltara		200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	37.432.991,00						4 Laporan	200.000.000,00	
	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						37.432.991,00			-	-			200.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	37.432.991,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.562.133.535,00					ASN Dinas Pariwisata Prov.Kaltara		7.251.431.449,00	
		Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						5.562.133.535,00					ASN Dinas Pariwisata Prov.Kaltara		7.251.431.449,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	196.860.000,00						4 Dokumen	450.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/ Bulan		39 Orang/ Bulan	39 Orang/ Bulan	5.365.273.535,00						39 Orang/ Bulan	6.801.431.449,00	
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.365.273.535,00			-	-			6.801.431.449,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/ Bulan		39 Orang/ Bulan	38 Orang/ Bulan	5.365.273.535,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				39 Orang/ Bulan	6.801.431.449,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						196.860.000,00			-	-			450.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	196.860.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	450.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.000.000,00					ASN Dinas Pariwisata Prov.Kaltara		600.000.000,00	
		Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						30.000.000,00					ASN Dinas Pariwisata Prov.Kaltara		600.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	30.000.000,00						20 Orang	600.000.000,00	
	3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						30.000.000,00			-	-			600.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		20 Orang	5 Orang	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Orang	600.000.000,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						366.600.000,00					Dinas Pariwisata Prov.Kaltara		1.575.000.000,00	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						366.600.000,00					Dinas Pariwisata Prov.Kaltara		1.575.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	9.000.000,00						4 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00						4 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket		60 Paket	60 Paket	133.000.000,00						60 Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	16.000.000,00						12 Paket	65.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket		1 Paket	7 Paket	8.600.000,00						17 Paket	160.000.000,00	
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.600.000,00			-	-			160.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket		1 Paket	2 Paket	8.600.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				17 Paket	160.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						133.000.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket		60 Paket	4 Paket	133.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60 Paket	300.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						16.000.000,00			-	-			65.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	4 Paket	16.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	65.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						9.000.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						200.000.000,00			-	-			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	17 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	1.000.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						289.333.012,00					Dinas Pariwisata Prov.Kaltara		365.000.000,00	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang						289.333.012,00					Dinas Pariwisata Prov.Kaltara		365.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	283.284.012,00						12 Laporan	350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.049.000,00						4 Laporan	15.000.000,00	
	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.049.000,00			-	-			15.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.049.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	15.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						283.284.012,00			-	-			350.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	283.284.012,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	350.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						168.348.506,00					Dinas Pariwisata Prov. Kalimantan Utara		387.000.000,00	
		BMD yang Terpelihara						168.348.506,00					Dinas Pariwisata Prov. Kalimantan Utara		387.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		19 Unit	19 Unit	159.348.506,00						19 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		10 Unit	20 Unit	9.000.000,00						20 Unit	37.000.000,00	
	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						159.348.506,00			-	-			350.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		19 Unit	19 Unit	159.348.506,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				19 Unit	350.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.000.000,00			-	-			37.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		10 Unit	5 Unit	9.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Unit	37.000.000,00	Dinas Pariwisata
139.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**800.000.000,00**							**3.383.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Daya Tarik Destinasi Pariwisata						***800.000.000,00***							***3.383.000.000,00***	
			1.Persentase Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan	13.64 %		18.18 %	27.27 %	800.000.000,00						18.18 %	3.383.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi						170.000.000,00					Pokdarwis, Masyarakat, Pemerintah Kab/Kota		1.283.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi						170.000.000,00					Pokdarwis, Masyarakat, Pemerintah Kab/Kota		1.283.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	1 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	170.000.000,00						1 Lokasi	1.283.000.000,00	
	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi						170.000.000,00			-	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara			1.283.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	1 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	170.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Lokasi	1.283.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi						430.000.000,00					Pokdarwis, Masyarakat, Pemerintah Kab/Kota		1.350.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi						430.000.000,00					Pokdarwis, Masyarakat, Pemerintah Kab/Kota		1.350.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	1 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	165.000.000,00						1 Kegiatan	850.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	190.000.000,00						100 Orang	300.000.000,00	
	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi						190.000.000,00			-	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara			300.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	100 Orang		100 Orang	50 Orang	190.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Orang	300.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.1.03.0011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi						165.000.000,00			-	-			850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Tingkat Provinsi	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	1 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	165.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Kegiatan	850.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi						75.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						200.000.000,00					Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekraf, Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		750.000.000,00	
		Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan						200.000.000,00					Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekraf, Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		750.000.000,00	
			Jumlah Industri/ Usaha Pariwisata yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	-		-	-	50.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yang telah menerima pembinaan dan pengawasan	-		-	-	150.000.000,00						-	350.000.000,00	
	3.26.02.1.04.0017	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko						150.000.000,00			-	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara			350.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Melaksanakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Standar Usaha Pariwisata	Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yang telah menerima pembinaan dan pengawasan	-		-	150 Pelaku Usaha	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	350.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.1.04.0019	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)						50.000.000,00			-	-			400.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/ Usaha Pariwisata yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	-		-	50 Unit Usaha	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	400.000.000,00	Dinas Pariwisata
140.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**530.000.000,00**							**16.961.681.418,38**	
		Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata						***530.000.000,00***							***16.961.681.418,38***	
			1.Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	20 Persentase		20 Persentase	20 Persentase	530.000.000,00						20 Persentase	16.961.681.418,38	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						530.000.000,00					Masyarakat, Pemerintah Kab/Kota, SDM Pariwisata & Ekraf		16.961.681.418,38	
		Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						530.000.000,00					Masyarakat, Pemerintah Kab/Kota, SDM Pariwisata & Ekraf		16.961.681.418,38	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00						1 Dokumen	1.500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00						4 Dokumen	1.000.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	51 Kegiatan		10 Kegiatan	45 Kegiatan	350.000.000,00						50 Kegiatan	14.461.681.418,38	
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						100.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata						80.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.500.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri						350.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara			14.461.681.418,38	
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	51 Kegiatan		10 Kegiatan	2 Kegiatan	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Kegiatan	14.461.681.418,38	Dinas Pariwisata
141.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**						**300.000.000,00**							**950.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Ekosistem Ekonomi Kreatif						***250.000.000,00***							***950.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	4 Persentase		4 Persentase	4 Persentase	250.000.000,00						4 Persentase	950.000.000,00	
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif						50.000.000,00					Masyarakat, SDM dan Pelaku Usaha Ekraf		250.000.000,00	
		Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia						50.000.000,00					Masyarakat, SDM dan Pelaku Usaha Ekraf		250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	250.000.000,00	
	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula						50.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara			250.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	250.000.000,00	Dinas Pariwisata
		Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						250.000.000,00					Masyarakat dan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif		700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						50.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			150.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						250.000.000,00					Masyarakat dan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif		700.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						250.000.000,00					Masyarakat dan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif		700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	-		-	-	80.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Konsultasi, Advokasi, dan Penguatan Kekayaan Intelektual	-		-	-	120.000.000,00						-	550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.04.1.02.0023	Pengembangan Sistem Pemasaran						80.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	
		Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	-		-	1 Dokumen	80.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.04.1.02.0024	Fasilitasi Kekayaan Intelektual						120.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara			550.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Konsultasi, Advokasi, dan Penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah Orang yang Mendapatkan Konsultasi, Advokasi, dan Penguatan Kekayaan Intelektual	-		-	50 Orang	120.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	550.000.000,00	Dinas Pariwisata
142.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**100.000.000,00**							**600.000.000,00**	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						***50.000.000,00***							***600.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	20 Persentase		10 Persentase	20 Persentase	50.000.000,00						20 Persentase	600.000.000,00	
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						100.000.000,00					Pemerintah Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha Parekraf, SDM Pariwisata dan Ekraf		600.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						100.000.000,00					Pemerintah Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha Parekraf, SDM Pariwisata dan Ekraf		600.000.000,00	
			Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	100 Orang		Orang	80 Orang	50.000.000,00						100 Orang	350.000.000,00	
	3.26.05.1.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif						50.000.000,00			-	-			350.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	100 Orang		Orang	20 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Orang	350.000.000,00	Dinas Pariwisata
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						100.000.000,00					Pemerintah Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha Parekraf, SDM Pariwisata dan Ekraf		600.000.000,00	
			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-		-	-	50.000.000,00						-	250.000.000,00	
	3.26.05.1.02.0008	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif						50.000.000,00			-	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-		-	50 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	250.000.000,00	Dinas Pariwisata
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						**54.300.953.155,20**							**39.483.801.774,75**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.231.226.250,00**							**1.876.939.822,92**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**3.231.226.250,00**							**1.876.939.822,92**	
143.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**						**680.137.562,00**							**339.233.628,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan						***680.137.562,00***							***339.233.628,00***	
			1.Persentase cadangan pangan	100 %		100 %	100 %	680.137.562,00						100 %	339.233.628,00	
	2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi						680.137.562,00					Kelompok Tani		339.233.628,00	
		Jumlah Kelompok Tani Penerima Manfaat Sarana dan Prasarana Pendukung Pangan						680.137.562,00					Kelompok Tani		339.233.628,00	
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia	0 Unit		2 Unit	1 Unit	350.000.000,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	330.137.562,00						1 Unit	239.233.628,00	
	2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya						330.137.562,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera			239.233.628,00	
		Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	330.137.562,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	239.233.628,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.09.02.1.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi						350.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia	0 Unit		2 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
144.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**999.616.000,00**							**471.543.362,92**	
		Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat						***699.616.000,00***							***391.543.362,92***	
			1.Angka Kecukupan Energi (AKE)	2100.0 Kkal/ Kapita/Hari		1946.4 Kkal/ Kapita/Hari	1984.8 Kkal/ Kapita/Hari	699.616.000,00						2023.2 Kkal/ Kapita/Hari	391.543.362,92	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						550.000.000,00					Masyarakat		391.543.362,92	
		Jumlah komoditas pangan yang distabilkan						550.000.000,00					Masyarakat		391.543.362,92	
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	120.000.000,00	
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	101.543.362,92	
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						100.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			100.000.000,00	
		Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						200.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			120.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	120.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi						150.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			101.543.362,92	
		Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	101.543.362,92	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi						50.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			20.000.000,00	
		Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	20.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi						199.616.000,00					Masyarakat		20.000.000,00	
		Jumlah cadangan pangan provinsi yang tersedia dan siap disalurkan						199.616.000,00					Masyarakat		20.000.000,00	
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	10 Ton		20 Ton	20 Ton	199.616.000,00						20 Ton	20.000.000,00	
	2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi						199.616.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			20.000.000,00	
		Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	10 Ton		20 Ton	20 Ton	199.616.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				20 Ton	20.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi						250.000.000,00					Masyarakat		60.000.000,00	
		Jumlah kegiatan promosi konsumsi pangan bergizi seimbang yang dilaksanakan						250.000.000,00					Masyarakat		60.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						100.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			20.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)						100.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	20.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi						50.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	20.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah komoditas pangan yang distabilkan						550.000.000,00					Masyarakat		391.543.362,92	
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.09.03.1.01.0015	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi						50.000.000,00			-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			50.000.000,00	
		Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Provinsi	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	50.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
145.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**1.034.315.125,00**							**728.467.257,00**	
		Meningkatnya Penanganan Kerawanan pangan						***660.275.125,00***							***478.467.257,00***	
			1.Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	7.5 %		17 %	15 %	660.275.125,00						12.5 %	478.467.257,00	
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi						1.034.315.125,00					Masyarakat		728.467.257,00	
		Jumlah wilayah Rentan Pangan yang mendapatkan penanganan						1.034.315.125,00					Masyarakat		728.467.257,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	374.040.000,00						1 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	374.040.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	236.235.125,00						1 Dokumen	178.467.257,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						374.040.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	374.040.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi						374.040.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			250.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	374.040.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi						236.235.125,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			178.467.257,00	
		Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	236.235.125,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	178.467.257,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah wilayah Rentan Pangan yang mendapatkan penanganan						1.034.315.125,00					Masyarakat		728.467.257,00	
			Jumlah Kebijakan dan aksi penyelamatan pangan Provinsi yang dilaksanakan	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.09.04.1.02.0008	Pelaksanaan kebijakan dan aksi penyelamatan pangan Provinsi						50.000.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Terlaksananya kebijakan dan aksi penyelamatan pangan Provinsi	Jumlah Kebijakan dan aksi penyelamatan pangan Provinsi yang dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	50.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
146.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**517.157.563,00**							**337.695.575,00**	
		Meningkatnya Pengawasan Keamanan pangan						***517.157.563,00***							***337.695.575,00***	
			1.Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan kemanan pangan	100 %		100 %	100 %	517.157.563,00						100 %	337.695.575,00	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						517.157.563,00					Masyarakat		337.695.575,00	
		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan						517.157.563,00					Masyarakat		337.695.575,00	
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	374.040.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	3 Sertifikat		3 Sertifikat	3 Sertifikat	143.117.563,00						3 Sertifikat	137.695.575,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan						143.117.563,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			137.695.575,00	
		Tersertifikasinya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	3 Sertifikat		3 Sertifikat	3 Sertifikat	143.117.563,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Sertifikat	137.695.575,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						374.040.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			200.000.000,00	
		Tersedianya sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	374.040.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**51.069.726.905,20**							**37.606.861.951,83**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**51.069.726.905,20**							**37.606.861.951,83**	
147.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**16.856.507.571,20**							**16.691.681.418,00**	
		Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah						***15.362.997.571,20***							***16.266.681.418,00***	
			-1.Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %		100 %	100 %	15.362.997.571,20						100 %	16.266.681.418,00	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						861.060.000,00					ASN		450.000.000,00	
		Jumlah Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah						861.060.000,00					ASN		450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	150.000.000,00						1 Data	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	561.060.000,00						4 Dokumen	300.000.000,00	
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						561.060.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	561.060.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						150.000.000,00			-	-			75.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Data	75.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						150.000.000,00			-	-			75.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.075.729.373,20					ASN dan Non ASN		15.059.359.409,00	
		Jumlah bulan layanan administrasi Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah						13.075.729.373,20					ASN dan Non ASN		15.059.359.409,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000.000,00						12 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan		110 Orang/ Bulan	110 Orang/ Bulan	12.075.729.373,20						110 Orang/ Bulan	14.559.359.409,00	
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.075.729.373,20			-	-			14.559.359.409,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan		110 Orang/ Bulan	110 Orang/ Bulan	12.075.729.373,20	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				110 Orang/ Bulan	14.559.359.409,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						1.000.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						277.020.000,00					ASN dan Non ASN		150.000.000,00	
		Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah						277.020.000,00					ASN dan Non ASN		150.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket		110 Paket	110 Paket	90.000.000,00						110 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang		5 Orang	6 Orang	187.020.000,00						7 Orang	100.000.000,00	
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						90.000.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket		110 Paket	110 Paket	90.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				110 Paket	50.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						187.020.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang		5 Orang	4 Orang	187.020.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				7 Orang	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.281.212.000,00					ASN dan Non ASN		611.322.009,00	
		Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah						1.281.212.000,00					ASN dan Non ASN		611.322.009,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	13 Dokumen	10.000.000,00						12 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00						12 Laporan	94.640.591,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00						12 Laporan	441.681.418,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	120 Paket		120 Paket	120 Paket	18.702.000,00						120 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		4 Paket	4 Paket	9.000.000,00						5 Paket	9.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	216 Paket		212 Paket	213 Paket	93.510.000,00						214 Paket	50.000.000,00	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						9.000.000,00			-	-			9.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		4 Paket	4 Paket	9.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Paket	9.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						93.510.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	216 Paket		212 Paket	213 Paket	93.510.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				214 Paket	50.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						18.702.000,00			-	-			10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	120 Paket		120 Paket	120 Paket	18.702.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				120 Paket	10.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						10.000.000,00			-	-			6.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Dokumen	6.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						150.000.000,00			-	-			94.640.591,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	94.640.591,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						1.000.000.000,00			-	-			441.681.418,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	441.681.418,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						700.000.000,00					ASN dan Non ASN		140.000.000,00	
		Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah						700.000.000,00					ASN dan Non ASN		140.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.000.000,00						3 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	60.000.000,00	
	3.27.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			60.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	60.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						500.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	50.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						100.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			30.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Paket	30.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						114.082.200,00					ASN dan Non ASN		61.000.000,00	
		Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah						114.082.200,00					ASN dan Non ASN		61.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	93.510.000,00						12 Laporan	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.572.200,00						12 Laporan	11.000.000,00	
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						20.572.200,00			-	-			11.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.572.200,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	11.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						93.510.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	93.510.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						547.403.998,00					ASN dan Non ASN		220.000.000,00	
		Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah						547.403.998,00					ASN dan Non ASN		220.000.000,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	309.999.998,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit		22 Unit	22 Unit	200.000.000,00						22 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	37.404.000,00						1 Unit	20.000.000,00	
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						200.000.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit		22 Unit	22 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Unit	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						309.999.998,00			-	-			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	309.999.998,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						37.404.000,00			-	-			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	37.404.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	20.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
148.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**22.114.243.308,00**							**14.053.964.604,00**	
		Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian						***20.898.613.308,00***							***10.703.964.604,00***	
			1.Persentase sarana pertanian dalam kondisi baik	100 %		100 %	100 %	20.898.613.308,00						100 %	10.703.964.604,00	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian						1.557.220.000,00					Kelompok Tani		1.100.000.000,00	
		Jumlah Sarana Pertanian yang diawasi Peredarannya						1.557.220.000,00					Kelompok Tani		1.100.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	374.040.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.183.180.000,00						1 Laporan	900.000.000,00	
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian						1.183.180.000,00			2.Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.183.180.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	900.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian						374.040.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	374.040.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						16.568.543.308,00					Kelompok Tani		10.453.964.604,00	
		Volume Benih yang bersertifikat yang disediakan dan di edarkan melalui Fasilitasi Provinsi						16.568.543.308,00					Kelompok Tani		10.453.964.604,00	
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	5700 Batang		5700 Batang	5700 Batang	3.301.460.000,00						5700 Batang	2.700.000.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	6.4 Ton		6.4 Ton	6.4 Ton	561.060.000,00						6.4 Ton	300.000.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	150000 Batang		75000 Batang	100000 Batang	3.523.837.417,00						125000 Batang	2.700.000.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	25 Ton		5.6 Ton	10 Ton	5.063.905.891,00						15 Ton	3.253.964.604,00	
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	187.020.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	187.020.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	187.020.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Sertifikat Benih	25 Sertifikat		4 Sertifikat	10 Sertifikat	3.057.220.000,00						15 Sertifikat	1.200.000.000,00	
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih						3.057.220.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			1.200.000.000,00	
		Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	25 Sertifikat		4 Sertifikat	10 Sertifikat	3.057.220.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				15 Sertifikat	1.200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang						3.301.460.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			2.700.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	5700 Batang		5700 Batang	5700 Batang	3.301.460.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				5700 Batang	2.700.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.02.1.02.0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang						3.523.837.417,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			2.700.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	150000 Batang		75000 Batang	100000 Batang	3.523.837.417,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				125000 Batang	2.700.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih						5.063.905.891,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			3.253.964.604,00	
		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	25 Ton		5.6 Ton	120 Ton	5.063.905.891,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				15 Ton	3.253.964.604,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.02.1.02.0014	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi						561.060.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			300.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertikat hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	6.4 Ton		6.4 Ton	6.4 Ton	561.060.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				6.4 Ton	300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan						187.020.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			100.000.000,00	
		Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	187.020.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura						187.020.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			100.000.000,00	
		Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	187.020.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan						187.020.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			100.000.000,00	
		Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	187.020.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi						374.040.000,00					Kelompok Tani		200.000.000,00	
		Jumlah Pelaku Usaha Pembibitan dan Pakan Ternak yang dibina/diawasi						374.040.000,00					Kelompok Tani		200.000.000,00	
			Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	30 Orang		24 Orang	24 Orang	374.040.000,00						26 Orang	200.000.000,00	
	3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner						374.040.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	30 Orang		24 Orang	10 Orang	374.040.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				26 Orang	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain						3.614.440.000,00					-		2.300.000.000,00	
		Jumlah Kelompok Tani/Peternak Penerima Bantuan Bibit dan Pakan dari Provinsi Lain						3.614.440.000,00					-		2.300.000.000,00	
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	1000 Dosis		1000 Dosis	1000 Dosis	467.550.000,00						1000 Dosis	250.000.000,00	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	18710 Ekor		12490 Ekor	13070 Ekor	2.679.340.000,00						15570 Ekor	1.800.000.000,00	
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	350 Ton		250 Ton	275 Ton	467.550.000,00						300 Ton	250.000.000,00	
	3.27.02.1.07.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain						467.550.000,00			-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			250.000.000,00	
		Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	350 Ton		250 Ton	100 Ton	467.550.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				300 Ton	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.02.1.07.0003	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain						467.550.000,00			-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			250.000.000,00	
		Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	1000 Dosis		1000 Dosis	1000 Dosis	467.550.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1000 Dosis	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain						2.679.340.000,00			-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			1.800.000.000,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	18710 Ekor		12490 Ekor	20000 Ekor	2.679.340.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				15570 Ekor	1.800.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Volume Benih yang bersertifikat yang disediakan dan di edarkan melalui Fasilitasi Provinsi						16.568.543.308,00					Kelompok Tani		10.453.964.604,00	
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	-		-	-	500.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.02.1.02.0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji						500.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	
		Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	-		-	10000 Gram	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
149.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**8.459.897.650,00**							**4.730.814.160,00**	
		Meningkatnya kualitas prasarana pertanian						***8.459.897.650,00***							***4.330.814.160,00***	
			1.Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	100 %		100 %	100 %	8.459.897.650,00						100 %	4.330.814.160,00	
		Jumlah Unit Prasarana Pertanian yang ditata atau di rehabilitasi						8.459.897.650,00					Kelompok Tani		4.730.814.160,00	
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.045.206.524,00						1 Unit	1.400.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.816.428.417,00						1 Dokumen	800.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.215.630.000,00						1 Dokumen	730.814.160,00	
			Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	483.922.709,00						1 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.028.610.000,00						1 Dokumen	600.000.000,00	
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	100 Ha		100 Ha	100 Ha	748.080.000,00						100 Ha	400.000.000,00	
			Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	722.020.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian						1.028.610.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			600.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.028.610.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	600.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani						1.816.428.417,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			800.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.816.428.417,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	800.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani						1.215.630.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			730.814.160,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.215.630.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	730.814.160,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya						2.045.206.524,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			1.400.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.045.206.524,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	1.400.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian						748.080.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	100 Ha		100 Ha	100 Ha	748.080.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				100 Ha	400.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.03.1.01.0015	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi						722.020.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			300.000.000,00	
		Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	722.020.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.03.1.01.0018	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi						300.000.000,00			-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			100.000.000,00	
		Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.03.1.01.0024	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan						483.922.709,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan terselenggaranya Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	483.922.709,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Desa Jelarai Selor || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian						8.459.897.650,00					Kelompok Tani		4.730.814.160,00	
		Jumlah Unit Prasarana Pertanian yang ditata atau di rehabilitasi						8.459.897.650,00					Kelompok Tani		4.730.814.160,00	
			Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	3.27.03.1.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi						100.000.000,00			-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			100.000.000,00	
		Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
150.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**1.209.397.417,00**							**289.619.469,00**	
		MENINGKATNYA PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						***1.209.397.417,00***							***289.619.469,00***	
			1.Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	62.5 Persentase		53 Persentase	56.25 Persentase	1.209.397.417,00						58 Persentase	289.619.469,00	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						415.887.417,00					Masyarakat		174.619.469,00	
		persentase populasi ternak yang terjamin kesehatannya						415.887.417,00					Masyarakat		174.619.469,00	
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	165.887.417,00						1 Laporan	74.619.469,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular						250.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			100.000.000,00	
		Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						165.887.417,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			74.619.469,00	
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	165.887.417,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	74.619.469,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi						350.000.000,00					Masyarakat		5.000.000,00	
		Jumlah wilayah yang diawasi						350.000.000,00					Masyarakat		5.000.000,00	
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM						350.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			5.000.000,00	
		Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	5.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan						100.000.000,00					Pelaku Usaha Produk Hewan		20.000.000,00	
		Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang memenuhi persyaratan teknis sertifikasi veteriner						100.000.000,00					Pelaku Usaha Produk Hewan		20.000.000,00	
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						100.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan						343.510.000,00					Pelaku Usaha Produk Hewan		90.000.000,00	
		Jumlah Unit Usaha Peternakan yang menerapkan standar kesejahteraan hewan						343.510.000,00					Pelaku Usaha Produk Hewan		90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	10 Sertifikat		10 Sertifikat	10 Sertifikat	343.510.000,00						10 Sertifikat	90.000.000,00	
	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)						343.510.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			90.000.000,00	
		Terkelolanya penerbitan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	10 Sertifikat		10 Sertifikat	10 Sertifikat	343.510.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Sertifikat	90.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
151.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**561.060.000,00**							**350.000.000,00**	
		MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						***561.060.000,00***							***350.000.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Bencana Pertanian	80 Persentase		60 Persentase	65 Persentase	561.060.000,00						70 Persentase	350.000.000,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi						561.060.000,00					Kelompok Tani		350.000.000,00	
		Jumlah lokasi terdampak bencana pertanian yang ditangani						561.060.000,00					Kelompok Tani		350.000.000,00	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	80 Ha		65 Ha	70 Ha	561.060.000,00						75 Ha	350.000.000,00	
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						561.060.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	80 Ha		65 Ha	70 Ha	561.060.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				75 Ha	350.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
152.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**						**317.157.563,00**							**237.695.575,00**	
		MENINGKATNYA PERIZINAN USAHA PERTANIAN						***317.157.563,00***							***237.695.575,00***	
			1.Persentase jumlah usulan usaha pertanian	100 %		85 %	90 %	317.157.563,00						95 %	237.695.575,00	
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						317.157.563,00					Pelaku Usaha Produk Hewan		237.695.575,00	
		Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian						317.157.563,00					Pelaku Usaha Produk Hewan		237.695.575,00	
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	317.157.563,00						1 Dokumen	237.695.575,00	
	3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota						317.157.563,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			237.695.575,00	
		Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	317.157.563,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	237.695.575,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
153.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**1.551.463.396,00**							**1.253.086.725,83**	
		Meningkatnya Kapasitas Kelompok Tani						***1.451.463.396,00***							***1.053.086.725,83***	
			1.Persentase kelompok tani yang aktif	97 %		93 %	94 %	1.451.463.396,00						95 %	1.053.086.725,83	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian						1.346.244.396,00					Kelompok Tani		1.053.086.725,83	
		Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi						1.346.244.396,00					Kelompok Tani		1.053.086.725,83	
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	98 Kelompok		49 Kelompok	61 Kelompok	1.246.244.396,00						74 Kelompok	953.086.725,83	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani						1.246.244.396,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			953.086.725,83	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	98 Kelompok		49 Kelompok	61 Kelompok	1.246.244.396,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				74 Kelompok	953.086.725,83	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian						205.219.000,00					-		200.000.000,00	
		Jumlah Tenaga Penyuluh pertanian yang mengikuti peningkatan kapasitas						205.219.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	105.219.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Penyuluh pertanian swadaya dan/atau penyuluh pertanian swasta yang mendapatkan pembinaan	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian						105.219.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	2 Unit	105.219.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.07.1.01.0006	Pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan swasta lintas kabupaten/kota						100.000.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan swasta lintas kabupaten/kota	Jumlah Penyuluh pertanian swadaya dan/atau penyuluh pertanian swasta yang mendapatkan pembinaan	-		-	84 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi						1.346.244.396,00					Kelompok Tani		1.053.086.725,83	
			Jumlah pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi pengawalan tugas, fungsi, dan peran penyuluh pertanian (ASN, Swadaya, dan Swasta) dalam pelaksanaan penyuluhan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	3.27.07.1.02.0004	Sinkronisasi dan Koordinasi penyuluh pertanian (ASN, Swadaya dan Swasta) lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi						100.000.000,00			-	-			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi pengawalan tugas, fungsi, dan peran penyuluh pertanian (ASN, Swadaya, dan Swasta) dalam pelaksanaan penyuluhan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi	Jumlah pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi pengawalan tugas, fungsi, dan peran penyuluh pertanian (ASN, Swadaya, dan Swasta) dalam pelaksanaan penyuluhan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi	-		-	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet						**299.274.000,00**							**1.238.434.513,48**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**299.274.000,00**							**1.238.434.513,48**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**299.274.000,00**							**1.238.434.513,48**	
154.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**210.225.000,00**							**269.195.575,28**	
		Meningkatnya pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah						***210.225.000,00***							***269.195.575,28***	
			100.Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %		100 %	100 %	210.225.000,00						100 %	269.195.575,28	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						115.200.000,00					-		76.500.000,00	
		Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah						115.200.000,00					-		76.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	115.200.000,00						1 Dokumen	76.500.000,00	
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						115.200.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			76.500.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	115.200.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	76.500.000,00	UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00					-		20.000.000,00	
		Jumlah bulan layanan administrasi kepagawaian daerah perangkat daerah						10.000.000,00					-		20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		4 Orang	4 Orang	10.000.000,00						0 Orang	20.000.000,00	
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						10.000.000,00			-	-			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		4 Orang	2 Orang	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Orang	20.000.000,00	UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						51.000.000,00					-		127.695.575,28	
		Jumlah Bulan layanan administrasi umum perangkat daerah						51.000.000,00					-		127.695.575,28	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	26.000.000,00						12 Laporan	57.695.575,28	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	25.000.000,00						5 Paket	70.000.000,00	
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.000.000,00			-	-			70.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	10 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Paket	70.000.000,00	UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						26.000.000,00			-	-			57.695.575,28	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	26.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	57.695.575,28	UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						34.025.000,00					-		45.000.000,00	
		Jumlah pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah						34.025.000,00					-		45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	34.025.000,00						12 Laporan	45.000.000,00	
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						34.025.000,00			-	-			45.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	34.025.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	45.000.000,00	UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet
155.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**6.100.000,00**							**484.619.469,10**	
		MENINGKATNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						***6.100.000,00***							***484.619.469,10***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian	100 %		100 %	100 %	6.100.000,00						100 %	484.619.469,10	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian						6.100.000,00					-		484.619.469,10	
		Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi						6.100.000,00					-		484.619.469,10	
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	6.100.000,00						1 Unit	484.619.469,10	
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya						6.100.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			484.619.469,10	
		Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	6.100.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	484.619.469,10	UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet
156.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**82.949.000,00**							**484.619.469,10**	
		MENINGKATNYA PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						***82.949.000,00***							***484.619.469,10***	
			1.Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan	4.5 %		2.5 %	3 %	82.949.000,00						3.5 %	484.619.469,10	
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan						82.949.000,00					-		484.619.469,10	
		Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						82.949.000,00					-		484.619.469,10	
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	82.949.000,00						1 Dokumen	484.619.469,10	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						82.949.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			484.619.469,10	
		Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	82.949.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	484.619.469,10	UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet
		Dinas Kehutanan						**66.315.506.918,00**							**86.116.379.251,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**66.315.506.918,00**							**86.116.379.251,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**66.315.506.918,00**							**86.116.379.251,00**	
157.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**46.786.893.855,00**							**50.510.147.392,00**	
		Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						***46.786.893.855,00***							***50.510.147.392,00***	
			1.Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	58696226233 %		49827700000 %	51769416625 %	46.786.893.855,00						53901012456 %	50.510.147.392,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.476.431.230,00					-		1.577.927.188,00	
		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun						1.476.431.230,00					-		1.577.927.188,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	50.000.000,00						1 Data	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	698.643.750,00						2 Dokumen	733.575.938,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	727.787.480,00						2 Laporan	794.351.250,00	
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						698.643.750,00			-	-			733.575.938,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	698.643.750,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				2 Dokumen	733.575.938,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						727.787.480,00			-	-			794.351.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	727.787.480,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				2 Laporan	794.351.250,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Data	50.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						40.022.040.000,00					-		42.674.750.000,00	
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						40.022.040.000,00					-		42.674.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	227.040.000,00						12 Dokumen	890.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	291 Orang/ Bulan		291 Orang/ Bulan	291 Orang/ Bulan	39.795.000.000,00						291 Orang/ Bulan	41.784.750.000,00	
	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						39.795.000.000,00			-	-			41.784.750.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	291 Orang/ Bulan		291 Orang/ Bulan	291 Orang/ Bulan	39.795.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				291 Orang/ Bulan	41.784.750.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						227.040.000,00			-	-			890.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	227.040.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	890.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						465.931.000,00					-		600.000.000,00	
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						465.931.000,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	64 Orang		64 Orang	64 Orang	465.931.000,00						64 Orang	600.000.000,00	
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						465.931.000,00			-	-			600.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	64 Orang		64 Orang	10 Orang	465.931.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				64 Orang	600.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.445.375.000,00					-		1.537.200.374,00	
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.445.375.000,00					-		1.537.200.374,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00						12 Laporan	31.255.875,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.200.000.000,00						12 Laporan	1.013.953.874,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	165.375.000,00						9 Paket	173.643.750,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00						2 Paket	63.669.375,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	30.000.000,00						4 Paket	254.677.500,00	
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.000.000,00			-	-			254.677.500,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	254.677.500,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						165.375.000,00			-	-			173.643.750,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	165.375.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9 Paket	173.643.750,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00			-	-			63.669.375,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	63.669.375,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						40.000.000,00			-	-			31.255.875,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	31.255.875,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						1.200.000.000,00			-	-			1.013.953.874,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	1.013.953.874,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.177.116.625,00					-		1.620.269.830,00	
		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan						1.177.116.625,00					-		1.620.269.830,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	101.871.000,00						12 Laporan	106.964.550,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00						12 Laporan	1.434.297.375,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	57.881.250,00						6 Laporan	60.775.312,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	17.364.375,00						12 Laporan	18.232.593,00	
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						17.364.375,00			-	-			18.232.593,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	17.364.375,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	18.232.593,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						101.871.000,00			-	-			106.964.550,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	101.871.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	106.964.550,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						57.881.250,00			-	-			60.775.312,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	57.881.250,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Laporan	60.775.312,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.000.000.000,00			-	-			1.434.297.375,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	1.434.297.375,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.200.000.000,00					-		2.500.000.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara						2.200.000.000,00					-		2.500.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit		70 Unit	70 Unit	1.700.000.000,00						70 Unit	2.000.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	500.000.000,00						10 Unit	500.000.000,00	
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						500.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	70 Unit	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				10 Unit	500.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.700.000.000,00			-	-			2.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit		70 Unit	70 Unit	1.700.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				70 Unit	2.000.000.000,00	Dinas Kehutanan
158.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**10.211.049.063,00**							**23.850.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya produktivitas hasil hutan						***5.361.049.063,00***							***16.750.000.000,00***	
			1.Persentase peningkatan produtivitas hasil hutan	3 %		3 %	3 %	5.361.049.063,00						3 %	16.750.000.000,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						900.000.000,00					-		1.500.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang tersusun						900.000.000,00					-		1.500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	900.000.000,00						3 Dokumen	1.500.000.000,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						900.000.000,00			-	-			1.500.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3 Dokumen		3 Dokumen	14 Dokumen	900.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				3 Dokumen	1.500.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						700.000.000,00					-		1.000.000.000,00	
		Persentase Unit Manajemen yang dibina						700.000.000,00					-		1.000.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00						1 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	350.000.000,00						11 Dokumen	500.000.000,00	
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi						350.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi						350.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				11 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						1.900.000.000,00					Masyarakat		5.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase penambahan Luas tutupan lahan						1.900.000.000,00					Masyarakat		5.000.000.000,00	
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun	5 Unit		4 Unit	5 Unit	100.000.000,00						5 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun	15 Unit		15 Unit	15 Unit	100.000.000,00						15 Unit	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	300.000.000,00						5 Laporan	300.000.000,00	
			Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara	60 Ha		60 Ha	60 Ha	100.000.000,00						60 Ha	300.000.000,00	
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	100 Ha		100 Ha	100 Ha	300.000.000,00						100 Ha	1.000.000.000,00	
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	150 Ha		150 Ha	150 Ha	400.000.000,00						150 Ha	1.000.000.000,00	
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha		50 Ha	50 Ha	400.000.000,00						50 Ha	1.000.000.000,00	
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)						200.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			500.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara						400.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			1.000.000.000,00	
		Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	150 Ha		150 Ha	20 Ha	400.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				150 Ha	1.000.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara						400.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha		50 Ha	20 Ha	400.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				50 Ha	1.000.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan						300.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			300.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				5 Laporan	300.000.000,00	Dinas Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan						300.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	100 Ha		100 Ha	15 Ha	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				100 Ha	1.000.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.04.0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2						100.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman RHL pasca P2	Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara	60 Ha		60 Ha	2 Ha	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				60 Ha	300.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug						100.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			400.000.000,00	
		Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	15 Unit		15 Unit	3 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				15 Unit	400.000.000,00	Dinas Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan						100.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			500.000.000,00	
		Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	5 Unit		4 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				5 Unit	500.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						3.817.582.400,00					-		9.600.000.000,00	
		Luas hutan yang dilindungi						3.817.582.400,00					-		9.600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	1.450.000.000,00						8 Laporan	4.182.417.600,00	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.450.000.000,00						2 Dokumen	4.100.000.000,00	
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	3 Operasi		3 Operasi	3 Operasi	317.582.400,00						3 Operasi	317.582.400,00	
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	3 Operasi		3 Operasi	3 Operasi	300.000.000,00						3 Operasi	500.000.000,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	700 Ha		700 Ha	700 Ha	300.000.000,00						700 Ha	500.000.000,00	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						1.450.000.000,00			-	-			4.100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.450.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				2 Dokumen	4.100.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						1.450.000.000,00			-	-			4.182.417.600,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	8 Laporan		8 Laporan	4 Laporan	1.450.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				8 Laporan	4.182.417.600,00	Dinas Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						317.582.400,00			-	-			317.582.400,00	
		Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	3 Operasi		3 Operasi	3 Operasi	317.582.400,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				3 Operasi	317.582.400,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						300.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	700 Ha		700 Ha	400 Ha	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				700 Ha	500.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal						300.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	3 Operasi		3 Operasi	2 Operasi	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				3 Operasi	500.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)						250.000.000,00					-		250.000.000,00	
		Persentase Unit Managemen yang dibina						250.000.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Unit managemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah beroperasi	2 Unit Managemen		2 Unit Managemen	2 Unit Managemen	250.000.000,00						2 Unit Managemen	250.000.000,00	
	3.28.03.1.06.0006	Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar						250.000.000,00			-	-			250.000.000,00	
		Terpenuhinya kebutuhan bahan baku dan akses Pasar bagi PBPHH Skala kecil dan menengah	Jumlah Unit managemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah beroperasi	2 Unit Managemen		2 Unit Managemen	2 Unit Managemen	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				2 Unit Managemen	250.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun						600.000.000,00					-		1.300.000.000,00	
		Persentase Jumlah izin Usaha yang terbina						600.000.000,00					-		1.300.000.000,00	
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	250.000.000,00						5 Laporan	500.000.000,00	
			Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	5 Unit Managemen		5 Unit Managemen	5 Unit Managemen	150.000.000,00						5 Unit Managemen	300.000.000,00	
			Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	5 Unit Managemen		5 Unit Managemen	5 Unit Managemen	200.000.000,00						5 Unit Managemen	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi						250.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	5 Laporan		5 Laporan	3 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				5 Laporan	500.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi						150.000.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	5 Unit Managemen		5 Unit Managemen	5 Unit Managemen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				5 Unit Managemen	300.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi						200.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan/Monitoring pelaporan RKOPHH untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	5 Unit Managemen		5 Unit Managemen	5 Unit Managemen	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				5 Unit Managemen	500.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan						2.043.466.663,00					-		5.200.000.000,00	
		Jumlah ketersediaan bibit/benih tanaman kehutanan bersertifikat dan sesuai standar						2.043.466.663,00					-		5.200.000.000,00	
			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	60000 Batang		60000 Batang	60000 Batang	943.466.663,00						60000 Batang	4.000.000.000,00	
			Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	200.000.000,00						5 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan dalam setahun	10 Kali		10 Kali	10 Kali	200.000.000,00						10 Kali	200.000.000,00	
			Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	1 Unit Usaha		1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	200.000.000,00						1 Unit Usaha	200.000.000,00	
			Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	1 Sertifikat		1 Sertifikat	1 Sertifikat	300.000.000,00						1 Sertifikat	300.000.000,00	
			Luas Sumber Benih yang Dibangun	50 Ha		50 Ha	50 Ha	200.000.000,00						50 Ha	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih						300.000.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Terlaksananya Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	1 Sertifikat		1 Sertifikat	1 Sertifikat	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Sertifikat	300.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit						200.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih dan/Atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	5 Laporan		5 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				5 Laporan	200.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.09.0006	Pembangunan Sumber Benih						200.000.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	50 Ha		50 Ha	25 Ha	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				50 Ha	300.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan						943.466.663,00			-	-			4.000.000.000,00	
		Tersedianya bibit berkualitas untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	60000 Batang		60000 Batang	3000 Batang	943.466.663,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				60000 Batang	4.000.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.09.0008	Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan						200.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan dalam setahun	10 Kali		10 Kali	7 Kali	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				10 Kali	200.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.09.0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan						200.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Terlaksananya pelayanan periijinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran bibit serta kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit bagi pelaku usaha perorangan dan badan usaha non Perhutani	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	1 Unit Usaha		1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Unit Usaha	200.000.000,00	Dinas Kehutanan
159.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**						**1.200.000.000,00**							**1.200.000.000,00**	
		Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya						***1.200.000.000,00***							***1.200.000.000,00***	
			1.Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0.459 Poin		0.437 Poin	0.440 Poin	1.200.000.000,00						0.447 Poin	1.200.000.000,00	
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam						1.200.000.000,00					-		1.200.000.000,00	
		Jumlah Kawasan ekosistem penting yang dikelola / yang dijaga						1.200.000.000,00					-		1.200.000.000,00	
			dokumen Peta koridor hidupan liar satwa yang disepakati mulitipihak	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00						0 Dokumen	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	300.000.000,00						50 Orang	300.000.000,00	
			Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	20 Ha		20 Ha	20 Ha	400.000.000,00						20 Ha	400.000.000,00	
	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi						300.000.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				50 Orang	300.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi						400.000.000,00			-	-			400.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	20 Ha		20 Ha	20 Ha	400.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				20 Ha	400.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.04.1.03.0008	Penetapan koridor hidupan liar						500.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Terlaksananya penetapan koridor hidupan liar satwa	dokumen Peta koridor hidupan liar satwa yang disepakati mulitipihak	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				0 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Kehutanan
160.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**7.817.564.000,00**							**9.256.231.859,00**	
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan						***6.617.564.000,00***							***9.256.231.859,00***	
			1.Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	3 Persentase		3 Persentase	100 Persentase	6.617.564.000,00						3 Persentase	9.256.231.859,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						7.817.564.000,00					Masyarakat sekitar hutan		9.256.231.859,00	
		Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat						7.817.564.000,00					Masyarakat sekitar hutan		9.256.231.859,00	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	200.000.000,00						5 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	71 Orang		72 Orang	71 Orang	800.000.000,00						71 Orang	800.000.000,00	
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya	30 Orang		30 Orang	30 Orang	500.000.000,00						30 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	80 Orang		30 Orang	40 Orang	3.917.564.000,00						40 Orang	2.706.231.859,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	25000 Hektar		25000 Hektar	25000 Hektar	1.200.000.000,00						25000 Hektar	1.500.000.000,00	
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan						800.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			800.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	71 Orang		72 Orang	71 Orang	800.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				71 Orang	800.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.05.1.01.0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan						500.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			500.000.000,00	
		Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya	30 Orang		30 Orang	30 Orang	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				30 Orang	500.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan						3.917.564.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			2.706.231.859,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	80 Orang		30 Orang	101 Orang	3.917.564.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				40 Orang	2.706.231.859,00	Dinas Kehutanan
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial						1.200.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			1.500.000.000,00	
		Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	25000 Hektar		25000 Hektar	25000 Hektar	1.200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				25000 Hektar	1.500.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial						200.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit		5 Unit	1 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				5 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat						7.817.564.000,00					Masyarakat sekitar hutan		9.256.231.859,00	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	-	1.200.000.000,00						-	2.750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan						1.200.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			2.750.000.000,00	
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	6 Kelompok	1.200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				-	2.750.000.000,00	Dinas Kehutanan
161.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**						**300.000.000,00**							**1.300.000.000,00**	
		Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)						***300.000.000,00***							***1.300.000.000,00***	
			1.Persentase Tutupan Lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS)	10 %		10 %	10 %	300.000.000,00						10 %	1.300.000.000,00	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						300.000.000,00					-		1.300.000.000,00	
		Jumlah DAS yang dikelola						300.000.000,00					-		1.300.000.000,00	
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	800.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	75 Orang		75 Orang	75 Orang	200.000.000,00						75 Orang	500.000.000,00	
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS						200.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	75 Orang		75 Orang	50 Orang	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				75 Orang	500.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS						100.000.000,00			-	-			800.000.000,00	
		Meningkatnya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Dokumen	800.000.000,00	Dinas Kehutanan
		UPT KPH Kabupaten Bulungan						**10.075.999.834,00**							**222.209.388.334,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**10.075.999.834,00**							**222.209.388.334,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**10.075.999.834,00**							**222.209.388.334,00**	
162.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.602.560.000,00**							**203.712.778.597,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah						***1.567.560.000,00***							***203.662.778.597,00***	
			1.Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %		100 %	100 %	1.567.560.000,00						100 %	203.662.778.597,00	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						202.560.000,00					-		202.560.000.000,00	
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						202.560.000,00					-		202.560.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	202.560.000,00						12 Dokumen	202.560.000.000,00	
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						202.560.000,00			-	-			202.560.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	202.560.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas || Kelurahan Tanjung Palas Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	202.560.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00					-		110.000.000,00	
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00					-		110.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	5 Orang	100.000.000,00						7 Orang	110.000.000,00	
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100.000.000,00			-	-			110.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7 Orang	110.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						400.000.000,00					-		450.000.000,00	
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						400.000.000,00					-		450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00						12 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00						12 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00						1 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		3 Paket	1 Paket	25.000.000,00						2 Paket	50.000.000,00	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00			-	-			5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	5.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.000.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		3 Paket	2 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas || Kelurahan Tanjung Palas Hilir || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)				2 Paket	50.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.000.000,00			-	-			45.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas || Kelurahan Tanjung Palas Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	45.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00			-	-			5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	5.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						30.000.000,00			-	-			45.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	45.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						300.000.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	300.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						350.000.000,00					-		315.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan						350.000.000,00					-		315.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00						12 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00						12 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00						12 Laporan	15.000.000,00	
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						15.000.000,00			-	-			15.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas || Kelurahan Tanjung Palas Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	15.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						180.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	200.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	0,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						150.000.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	100.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						550.000.000,00					-		277.778.597,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara						550.000.000,00					-		277.778.597,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	40 Unit	550.000.000,00						40 Unit	277.778.597,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						550.000.000,00			-	-			277.778.597,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	40 Unit	550.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				40 Unit	277.778.597,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
163.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**7.123.439.834,00**							**12.719.965.665,00**	
		Meningkatnya produktivitas hasil hutan						***6.023.439.834,00***							***10.069.965.665,00***	
			1.Persentase peningkatan produtivitas hasil hutan	3 %		3 %	3 %	6.023.439.834,00						3 %	10.069.965.665,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						2.723.439.834,00					-		2.749.965.665,00	
		Jumlah Dokumen yang di Hasilkan						2.723.439.834,00					-		2.749.965.665,00	
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.373.439.834,00						1 Unit	1.649.965.665,00	
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100.000.000,00						2 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit		1 Unit	1 Unit	250.000.000,00						1 Unit	600.000.000,00	
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan						250.000.000,00			-	-			600.000.000,00	
		Terlaksananya Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L)	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit		1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Timur || Desa Sajau || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Unit	600.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH						100.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas || Kelurahan Tanjung Palas Hilir || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)				2 Unit	500.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor						2.373.439.834,00			-	-			1.649.965.665,00	
		Tersedianya Kantor resor KPH dan Sarana Prasarana Operasionalisasi resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.373.439.834,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Unit	1.649.965.665,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						700.000.000,00					-		1.300.000.000,00	
		Jumlah unit KPH yang telah memiliki RPHJP yang disahkan						700.000.000,00					-		1.300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00						3 Dokumen	1.000.000.000,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						500.000.000,00			-	-			1.000.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				3 Dokumen	1.000.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P						200.000.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Timur || Desa Binai || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Barat || Desa Long Beluah || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Peso || Desa Long Peso || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Peso || Desa Long Lejuh || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Barat || Desa Mara I || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Dokumen	300.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						300.000.000,00					-		700.000.000,00	
		Persentase Unit Manajemen yang dibina						300.000.000,00					-		700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	350.000.000,00	
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi						150.000.000,00			-	-			350.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Peso || Desa Long Pelaah || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Peso || Desa Long Lejuh || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Peso || Desa Long Peso || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Dokumen	350.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung						150.000.000,00			-	-			350.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Luas Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Timur || Desa Sajau || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Peso Hilir || Desa Long Bang Hulu || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Barat || Desa Long Sam || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Dokumen	350.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						2.100.000.000,00					-		4.470.000.000,00	
		Persentase Penambahan Luas Tutupan Lahan						2.100.000.000,00					-		4.470.000.000,00	
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	30 Ha		20 Ha	25 Ha	1.800.000.000,00						25 Ha	2.600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	30 Ha		15 Ha	25 Ha	300.000.000,00						25 Ha	1.870.000.000,00	
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara						1.800.000.000,00			-	-			2.600.000.000,00	
		Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	30 Ha		20 Ha	20 Ha	1.800.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas || Desa Antutan || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Timur || Desa Sajau || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)				25 Ha	2.600.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara						300.000.000,00			-	-			1.870.000.000,00	
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	30 Ha		15 Ha	5 Ha	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				25 Ha	1.870.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						1.200.000.000,00					-		3.000.000.000,00	
		Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan						1.200.000.000,00					-		3.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan		10 Laporan	5 Laporan	350.000.000,00						5 Laporan	1.200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen		5 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00						2 Dokumen	600.000.000,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	300 Ha		300 Ha	300 Ha	500.000.000,00						300 Ha	1.200.000.000,00	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						350.000.000,00			-	-			600.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen		5 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				2 Dokumen	600.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						350.000.000,00			-	-			1.200.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan		10 Laporan	5 Laporan	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				5 Laporan	1.200.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						500.000.000,00			-	-			1.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	300 Ha		300 Ha	300 Ha	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				300 Ha	1.200.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan						100.000.000,00					-		500.000.000,00	
		Jumlah ketersediaan bibit/benih tanaman kehutanan bersertifikat dan sesuai standar						100.000.000,00					-		500.000.000,00	
			Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	2 Sertifikat		0 Sertifikat	2 Sertifikat	100.000.000,00						2 Sertifikat	500.000.000,00	
	3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih						100.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Terlaksananya Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	2 Sertifikat		0 Sertifikat	2 Sertifikat	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				2 Sertifikat	500.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
164.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**1.350.000.000,00**							**5.776.644.072,00**	
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan						***850.000.000,00***							***3.776.644.072,00***	
			1.Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	3 Persentase		3 Persentase	3 Persentase	850.000.000,00						3 Persentase	3.776.644.072,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						1.350.000.000,00					-		5.776.644.072,00	
		Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat						1.350.000.000,00					-		5.776.644.072,00	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit		2 Unit	5 Unit	250.000.000,00						5 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	13 Orang		13 Orang	13 Orang	250.000.000,00						13 Orang	2.000.000.000,00	
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	75 Orang		20 Orang	50 Orang	200.000.000,00						65 Orang	916.644.072,00	
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Hektar		500 Hektar	1000 Hektar	250.000.000,00						1000 Hektar	360.000.000,00	
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan						250.000.000,00			-	-			2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	13 Orang		13 Orang	13 Orang	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				13 Orang	2.000.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan						200.000.000,00			-	-			916.644.072,00	
		Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	75 Orang		20 Orang	14 Orang	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				65 Orang	916.644.072,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial						250.000.000,00			-	-			360.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Hektar		500 Hektar	250 Hektar	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Peso || Desa Long Buang || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Peso || Desa Long Pelaah || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)				1000 Hektar	360.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial						250.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit		2 Unit	5 Unit	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas || Desa Antutan || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Barat || Desa Long Sam || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Timur || Desa Binai || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Barat || Desa Long Beluah || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)				5 Unit	500.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
		Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat						1.350.000.000,00					-		5.776.644.072,00	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	-	400.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan						400.000.000,00			-	-			2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	5 Kelompok	400.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Barat || Desa Long Sam || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Peso || Desa Long Bia || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas || Desa Antutan || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Timur || Desa Binai || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Barat || Desa Long Beluah || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)				-	2.000.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Bulungan
		UPT KPH Kota Tarakan						**10.999.999.944,00**							**11.832.389.548,63**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**10.999.999.944,00**							**11.832.389.548,63**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**10.999.999.944,00**							**11.832.389.548,63**	
165.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.167.600.000,00**							**1.284.073.203,74**	
		Terlaksananya Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi						***877.600.000,00***							***1.124.073.203,74***	
			-1.Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %		100 %	100 %	877.600.000,00						100 %	1.124.073.203,74	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						204.600.000,00					-		300.000.000,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						204.600.000,00					-		300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	204.600.000,00						12 Dokumen	300.000.000,00	
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						204.600.000,00			-	-			300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	204.600.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	300.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00					-		100.000.000,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	100.000.000,00						50 Orang	100.000.000,00	
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100.000.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	100.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						368.000.000,00					-		334.073.203,74	
		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						368.000.000,00					-		334.073.203,74	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00						12 Laporan	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00						12 Laporan	206.073.203,74	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	8.000.000,00						12 Paket	8.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	30.000.000,00						0 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		0 Paket	12 Paket	10.000.000,00						0 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		0 Paket	2 Paket	60.000.000,00						2 Paket	60.000.000,00	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00			-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		0 Paket	12 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket	0,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						60.000.000,00			-	-			60.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		0 Paket	2 Paket	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	60.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						8.000.000,00			-	-			8.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	8.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	8.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.000.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket	0,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						60.000.000,00			-	-			60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	60.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						200.000.000,00			-	-			206.073.203,74	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	206.073.203,74	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						400.000.000,00					-		450.000.000,00	
		Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan						400.000.000,00					-		450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	135.000.000,00						12 Laporan	135.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00						12 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00						12 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00						12 Laporan	35.000.000,00	
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						35.000.000,00			-	-			35.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	35.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						135.000.000,00			-	-			135.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	135.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	135.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.000.000,00			-	-			30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	30.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						200.000.000,00			-	-			250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	250.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						95.000.000,00					-		100.000.000,00	
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya						95.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit		75 Unit	75 Unit	95.000.000,00						80 Unit	100.000.000,00	
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						95.000.000,00			-	-			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit		75 Unit	75 Unit	95.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				80 Unit	100.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
166.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**8.495.861.133,00**							**9.142.919.884,51**	
		Meningkatnya Produktivitas Hasil Hutan						***7.345.861.133,00***							***7.992.919.884,51***	
			-1.Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	10 Persentase		10 Persentase	10 Persentase	7.345.861.133,00						10 Persentase	7.992.919.884,51	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						4.974.410.133,00					-		5.540.273.834,51	
		Jumlah Unit KPH yang telah memiliki RPHJP yang disahkan						4.974.410.133,00					-		5.540.273.834,51	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	500.000.000,00						5 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	35 Unit		30 Unit	35 Unit	2.735.392.798,00						35 Unit	3.190.273.834,51	
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	35 Unit		30 Unit	30 Unit	1.589.017.335,00						35 Unit	1.700.000.000,00	
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100.000.000,00						2 Unit	100.000.000,00	
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan						100.000.000,00			-	-			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L)	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				2 Unit	100.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan						50.000.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Dokumen	50.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH						1.589.017.335,00			-	-			1.700.000.000,00	
		Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	35 Unit		30 Unit	30 Unit	1.589.017.335,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				35 Unit	1.700.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH						500.000.000,00			-	-			500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Telaksananya kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH	Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				5 Dokumen	500.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor						2.735.392.798,00			-	-			3.190.273.834,51	
		Tersedianya Kantor resor KPH dan Sarana Prasarana Operasionalisasi resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	35 Unit		30 Unit	35 Unit	2.735.392.798,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				35 Unit	3.190.273.834,51	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						900.000.000,00					-		900.000.000,00	
		Jumlah Unit KPH yang telah memiliki RPHJPd yang disahkan						900.000.000,00					-		900.000.000,00	
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00						2 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Peta	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Peta Perubahan Tata Hutan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						500.000.000,00			-	-			500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				2 Dokumen	500.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P						200.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				2 Dokumen	200.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.03.1.02.0003	Penyusunan Perubahan Peta Tata Hutan						100.000.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Tersusunnya Peta Perubahan Tata Hutan	Jumlah Peta Perubahan Tata Hutan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Dokumen	100.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.03.1.02.0004	Penyusunan Peta Tata Hutan Rencana Pengelolaan						100.000.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Tersusunnya Peta Tata Hutan Rencana Pengelolaan	Jumlah Peta	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				2 Dokumen	100.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						300.000.000,00					-		300.000.000,00	
		Jumlah unit manajemen yang dibina						300.000.000,00					-		300.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi						50.000.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Dokumen	50.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung						50.000.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Luas Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Dokumen	50.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi						100.000.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Dokumen	100.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung						100.000.000,00			-	-			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Dokumen	100.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						375.000.000,00					-		375.000.000,00	
		Persentase penambahan Luas tutupan lahan						375.000.000,00					-		375.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	1 Ha		1 Ha	1 Ha	75.000.000,00						1 Ha	75.000.000,00	
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1 Ha		1 Ha	1 Ha	100.000.000,00						1 Ha	100.000.000,00	
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	1 Ha		1 Ha	1 Ha	150.000.000,00						1 Ha	150.000.000,00	
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara						150.000.000,00			-	-			150.000.000,00	
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	1 Ha		1 Ha	1 Ha	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Ha	150.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan						100.000.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Diterapkannya Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1 Ha		1 Ha	1 Ha	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Ha	100.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan						50.000.000,00			-	-			50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Laporan	50.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan						75.000.000,00			-	-			75.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	1 Ha		1 Ha	1 Ha	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Ha	75.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						1.946.451.000,00					-		2.027.646.050,00	
		Luas lahan yang dilakukan perlindungan dan pengamanan hutan						1.946.451.000,00					-		2.027.646.050,00	
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	675.971.000,00						60 Laporan	709.769.550,00	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	322.550.000,00						15 Dokumen	322.550.000,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	3000 Ha		3000 Ha	3000 Ha	947.930.000,00						3000 Ha	995.326.500,00	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						322.550.000,00			-	-			322.550.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	322.550.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				15 Dokumen	322.550.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						675.971.000,00			-	-			709.769.550,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	675.971.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				60 Laporan	709.769.550,00	UPT KPH Kota Tarakan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Utara || Kelurahan Juata Laut || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Sekatak || Desa Liagu || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Tengah || Desa Salimbatu || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Utara || Kelurahan Juata Kerikil || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Bunyu || Desa Bunyu Timur || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Timur || Kelurahan Pantai Amal || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1						
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						947.930.000,00			-	-			995.326.500,00	
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	3000 Ha		3000 Ha	3000 Ha	947.930.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Sekatak || Desa Keriting || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Utara || Kelurahan Juata Kerikil || 0 || Provinsi	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				3000 Ha	995.326.500,00	UPT KPH Kota Tarakan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Utara || Kelurahan Juata Laut || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Timur || Kelurahan Pantai Amal || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Tengah || Desa Salimbatu || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Sekatak || Desa Sekatak Buji || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Bunyu || Desa Bunyu Timur || 1						
167.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**1.336.538.811,00**							**1.405.396.460,38**	
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kehutanan						***636.538.811,00***							***905.396.460,38***	
			-1.Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	1 Persentase		1 Persentase	1 Persentase	636.538.811,00						1 Persentase	905.396.460,38	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						1.336.538.811,00					-		1.405.396.460,38	
		Jumlah KUPS yang Meningkat Kelasnya						1.336.538.811,00					-		1.405.396.460,38	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	250.000.000,00						2 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 Orang		15 Orang	15 Orang	200.000.000,00						15 Orang	200.000.000,00	
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya	20 Orang		20 Orang	20 Orang	186.538.811,00						20 Orang	155.396.460,38	
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	20 Orang		20 Orang	20 Orang	200.000.000,00						20 Orang	200.000.000,00	
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	250 Hektar		250 Hektar	250 Hektar	250.000.000,00						250 Hektar	250.000.000,00	
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan						200.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 Orang		15 Orang	15 Orang	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Tengah || Desa Salimbatu || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Sekatak || Desa Liagu || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				15 Orang	200.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.05.1.01.0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan						186.538.811,00			-	-			155.396.460,38	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya	20 Orang		20 Orang	20 Orang	186.538.811,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Sebengkok || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				20 Orang	155.396.460,38	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan						200.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	20 Orang		20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Sekatak || Desa Sekatak Buji || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Tengah || Desa Salimbatu || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Sekatak || Desa Liagu || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Peso Hilir || Desa Long Lembu || 1	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				20 Orang	200.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial						250.000.000,00			-	-			250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	250 Hektar		250 Hektar	1000 Hektar	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Sekatak || Desa Liagu || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Peso Hilir || Desa Long Tungu || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Sekatak || Desa Sekatak Buji || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Tengah || Desa Salimbatu || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				250 Hektar	250.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial						250.000.000,00			-	-			300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Sekatak || Desa Liagu || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Peso Hilir || Desa Long Tungu || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Sekatak || Desa Sekatak Buji || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Tengah || Desa Salimbatu || 1	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				2 Unit	300.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
		Jumlah KUPS yang Meningkat Kelasnya						1.336.538.811,00					-		1.405.396.460,38	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	-	250.000.000,00						-	300.000.000,00	
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan						250.000.000,00			-	-			300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	2 Kelompok	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Sekatak || Desa Liagu || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Tengah || Desa Salimbatu || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kota Tarakan || Kecamatan Tarakan Tengah || Kelurahan Kampung I Skip || 0 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Sekatak || Desa Sekatak Buji || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Palas Utara || Desa Pimping || 1	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				-	300.000.000,00	UPT KPH Kota Tarakan
		UPT KPH Kabupaten Nunukan						**10.787.894.250,60**							**11.374.988.179,60**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**10.787.894.250,60**							**11.374.988.179,60**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**10.787.894.250,60**							**11.374.988.179,60**	
168.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.646.247.116,55**							**1.731.060.744,58**	
		Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						***1.616.247.116,55***							***1.501.060.744,58***	
			1.Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %		100 %	100 %	1.616.247.116,55						100 %	1.501.060.744,58	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						195.000.000,00					-		195.000.000,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						195.000.000,00					-		195.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	195.000.000,00						1 Dokumen	195.000.000,00	
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						195.000.000,00			-	-			195.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	195.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	195.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						175.000.000,00					-		200.000.000,00	
		Jumlah bulan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						175.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	175.000.000,00						10 Orang	200.000.000,00	
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						175.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	175.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Orang	200.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						487.000.000,00					-		487.000.000,00	
		Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						487.000.000,00					-		487.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00						12 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00						12 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.000.000,00						1 Paket	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	10.000.000,00	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00			-	-			2.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	2.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00			-	-			10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	10.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.000.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	100.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00			-	-			10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	10.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						15.000.000,00			-	-			15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	15.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						350.000.000,00			-	-			350.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	350.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						714.247.116,55					-		774.060.744,58	
		Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan						714.247.116,55					-		774.060.744,58	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00						12 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	467.447.116,55						12 Laporan	527.260.744,58	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	33.800.000,00						12 Laporan	33.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.000.000,00						12 Laporan	13.000.000,00	
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						13.000.000,00			-	-			13.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	13.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						200.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	200.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						33.800.000,00			-	-			33.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	33.800.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	33.800.000,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						467.447.116,55			-	-			527.260.744,58	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	467.447.116,55	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	527.260.744,58	UPT KPH Kabupaten Nunukan
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						75.000.000,00					-		75.000.000,00	
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya						75.000.000,00					-		75.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00						1 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit		51 Unit	51 Unit	50.000.000,00						51 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00						1 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00						1 Unit	5.000.000,00	
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit		51 Unit	51 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				51 Unit	50.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00			-	-			15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	15.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan
	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00			-	-			5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	5.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00			-	-			5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	5.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan
169.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**7.436.407.960,53**							**7.850.835.399,36**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya produktivitas hasil hutan						***7.436.407.960,53***							***7.850.835.399,36***	
			1.Persentase peningkatan produtivitas hasil hutan	3 %		3 %	3 %	7.436.407.960,53						3 %	7.850.835.399,36	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						3.285.301.960,53					-		3.325.417.699,36	
		Jumlah Unit KPH yang diadakan sarana dan prasarananya						3.285.301.960,53					-		3.325.417.699,36	
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00						1 Unit	1.500.000.000,00	
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	450.000.000,00						1 Unit	450.000.000,00	
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit		0 Unit	1 Unit	1.335.301.960,53						1 Unit	1.375.417.699,36	
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan						1.335.301.960,53			-	-			1.375.417.699,36	
		Terlaksananya Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L)	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit		0 Unit	1 Unit	1.335.301.960,53	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Unit	1.375.417.699,36	UPT KPH Kabupaten Nunukan
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH						450.000.000,00			-	-			450.000.000,00	
		Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	450.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Unit	450.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan
	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor						1.500.000.000,00			-	-			1.500.000.000,00	
		Tersedianya Kantor resor KPH dan Sarana Prasarana Operasionalisasi resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Unit	1.500.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						1.410.302.000,00					-		1.550.000.000,00	
		Jumlah unit KPH yang telah memiliki RPHJP yang disahkan						1.410.302.000,00					-		1.550.000.000,00	
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	1.335.302.000,00						4 Dokumen	800.000.000,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						1.335.302.000,00			-	-			800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	1.335.302.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				4 Dokumen	800.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P						75.000.000,00			-	-			750.000.000,00	
		Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Dokumen	750.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						200.000.000,00					-		200.000.000,00	
		Persentase penambahan Luas tutupan lahan						200.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha		10 Ha	10 Ha	200.000.000,00						10 Ha	200.000.000,00	
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara						200.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha		10 Ha	10 Ha	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				10 Ha	200.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						2.540.804.000,00					-		2.775.417.700,00	
		Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara						2.540.804.000,00					-		2.775.417.700,00	
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00						1 Laporan	1.200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	470.200.000,00						1 Dokumen	500.000.000,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	30000 Ha		30000 Ha	30000 Ha	1.070.604.000,00						30000 Ha	1.075.417.700,00	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						470.200.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	470.200.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Dokumen	500.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						1.000.000.000,00			-	-			1.200.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Laporan	1.200.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						1.070.604.000,00			-	-			1.075.417.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	30000 Ha		30000 Ha	30000 Ha	1.070.604.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				30000 Ha	1.075.417.700,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan
170.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**1.705.239.173,52**							**1.793.092.035,66**	
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kehutanan						***1.705.239.173,52***							***1.793.092.035,66***	
			1.Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	15 Persentase		15 Persentase	15 Persentase	1.705.239.173,52						15 Persentase	1.793.092.035,66	
		Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan Usaha						1.705.239.173,52					-		1.793.092.035,66	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	290.745.743,00						1 Unit	345.745.743,00	
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	13 Orang		13 Orang	13 Orang	150.000.000,00						13 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	6 Orang		6 Orang	6 Orang	100.000.000,00						6 Orang	100.000.000,00	
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar		100 Hektar	100 Hektar	499.792.008,52						100 Hektar	499.791.460,00	
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan						150.000.000,00			-	-			150.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	13 Orang		13 Orang	13 Orang	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				13 Orang	150.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan						100.000.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	6 Orang		6 Orang	6 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				6 Orang	100.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial						499.792.008,52			-	-			499.791.460,00	
		Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar		100 Hektar	100 Hektar	499.792.008,52	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				100 Hektar	499.791.460,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial						290.745.743,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			345.745.743,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	290.745.743,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Unit	345.745.743,00	UPT KPH Kabupaten Nunukan
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						1.705.239.173,52					-		1.793.092.035,66	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan Usaha						1.705.239.173,52					-		1.793.092.035,66	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	-	664.701.422,00						-	697.554.832,66	
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan						664.701.422,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			697.554.832,66	
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	15 Kelompok	664.701.422,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				-	697.554.832,66	UPT KPH Kabupaten Nunukan
		UPT KPH Kabupaten Malinau						**9.000.000.000,00**							**13.355.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**9.000.000.000,00**							**13.355.000.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**9.000.000.000,00**							**13.355.000.000,00**	
171.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**605.000.000,00**							**1.205.000.000,00**	
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi						***492.500.000,00***							***770.000.000,00***	
			1.Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %		100 %	100 %	492.500.000,00						100 %	770.000.000,00	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						100.000.000,00					-		200.000.000,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						100.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00						12 Dokumen	200.000.000,00	
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						100.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	200.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						95.000.000,00					-		250.000.000,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						95.000.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket		45 Paket	65 Paket	60.000.000,00						65 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang		4 Orang	8 Orang	35.000.000,00						8 Orang	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						60.000.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket		45 Paket	60 Paket	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Barat || Desa Sesua || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65 Paket	100.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						35.000.000,00			-	-			150.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang		4 Orang	5 Orang	35.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Orang	150.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						138.000.000,00					-		225.000.000,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						138.000.000,00					-		225.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	180.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.500.000,00						1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.500.000,00						1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00						1 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.000.000,00						1 Paket	10.000.000,00	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00			-	-			5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Barat || Desa Sesua || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	5.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.000.000,00			-	-			10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Barat || Desa Sesua || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	10.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.500.000,00			-	-			10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Barat || Desa Sesua || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	10.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.500.000,00			-	-			10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Barat || Desa Sesua || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	10.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.000.000,00			-	-			10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	10.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						100.000.000,00			-	-			180.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	180.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						194.000.000,00					-		265.000.000,00	
		Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan						194.000.000,00					-		265.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	32.000.000,00						12 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00						12 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00						1 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00			-	-			5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	5.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						32.000.000,00			-	-			45.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	32.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Barat || Desa Sesua || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	45.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.000.000,00			-	-			15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Barat || Desa Sesua || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	15.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						150.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Barat || Desa Sesua || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	200.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						78.000.000,00					-		265.000.000,00	
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya						78.000.000,00					-		265.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	26.500.000,00						1 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit		5 Unit	44 Unit	51.500.000,00						44 Unit	65.000.000,00	
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						51.500.000,00			-	-			65.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit		5 Unit	55 Unit	51.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				44 Unit	65.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						26.500.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	26.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Barat || Desa Sesua || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	200.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau
172.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**6.395.000.000,00**							**9.150.000.000,00**	
		Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan						***5.395.000.000,00***							***7.850.000.000,00***	
			1.Persentase peningkatan produtivitas hasil hutan	3 %		3 %	3 %	5.395.000.000,00						3 %	7.850.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						2.805.000.000,00					-		3.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Unit KPH yang diadakan sarana dan prasarananya						2.805.000.000,00					-		3.400.000.000,00	
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.600.000.000,00						1 Unit	2.000.000.000,00	
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	60 Unit		54 Unit	60 Unit	705.000.000,00						60 Unit	750.000.000,00	
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit		2 Unit	2 Unit	500.000.000,00						2 Unit	650.000.000,00	
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan						500.000.000,00			-	-			650.000.000,00	
		Terlaksananya Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L)	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit		2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Selatan Hulu || Desa Nahakramo || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Selatan Hilir || Desa Setulang || 1	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				2 Unit	650.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH						705.000.000,00			-	-			750.000.000,00	
		Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	60 Unit		54 Unit	54 Unit	705.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				60 Unit	750.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau
	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor						1.600.000.000,00			-	-			2.000.000.000,00	
		Tersedianya Kantor resor KPH dan Sarana Prasarana Operasionalisasi resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.600.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Unit	2.000.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						650.000.000,00					-		650.000.000,00	
		Jumlah unit KPH yang telah memiliki RPHJP yang disahkan						650.000.000,00					-		650.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	650.000.000,00						2 Dokumen	650.000.000,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						650.000.000,00			-	-			650.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				2 Dokumen	650.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						760.000.000,00					-		850.000.000,00	
		Persentase penambahan Luas tutupan lahan						760.000.000,00					-		850.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00						1 Dokumen	350.000.000,00	
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	7 Ha		7 Ha	7 Ha	460.000.000,00						7 Ha	500.000.000,00	
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)						300.000.000,00			-	-			350.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Kayan Selatan || Desa Long Ampung || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Kayan Selatan || Desa Metulang || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Sungai Boh || Desa Mahak Baru || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Sungai Boh || Desa Dumu Mahak || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Kayan Hulu || Desa Nawang Baru || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Kayan Hulu || Desa Long Nawang || 1	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Dokumen	350.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara						460.000.000,00			-	-			500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	7 Ha		7 Ha	5 Ha	460.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Kayan Hulu || Desa Long Nawang || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Kayan Hulu || Desa Nawang Baru || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Sungai Boh || Desa Dumu Mahak || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Kayan Selatan || Desa Long Ampung || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Kayan Selatan || Desa Metulang || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Sungai Boh || Desa Mahak Baru || 1	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				7 Ha	500.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						2.180.000.000,00					-		4.250.000.000,00	
		Persentase peningkatan produksi hasil hutan						2.180.000.000,00					-		4.250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.180.000.000,00						4 Laporan	3.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00						2 Dokumen	600.000.000,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	15000 Ha		15000 Ha	15000 Ha	500.000.000,00						15000 Ha	650.000.000,00	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						500.000.000,00			-	-			600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen		2 Dokumen	12 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				2 Dokumen	600.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						1.180.000.000,00			-	-			3.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.180.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Lumbis || Desa Libang || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Tana Tidung || Kecamatan Muruk Rian || Desa Seputuk || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Tana Tidung || Kecamatan Muruk Rian || Desa Balayan Ari || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Kota || Desa Batu Lidung || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Kota || Desa Tanjung Keranjang || 1	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				4 Laporan	3.000.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						500.000.000,00			-	-			650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	15000 Ha		15000 Ha	15000 Ha	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Tana Tidung || Kecamatan Muruk Rian || Desa Balayan Ari || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Lumbis || Desa Libang || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Tana Tidung || Kecamatan Muruk Rian || Desa Seputuk || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Kota || Desa Tanjung Keranjang || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Kota || Desa Batu Lidung || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Peso || Desa Long Lejuh || 1	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				15000 Ha	650.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau
173.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**2.000.000.000,00**							**3.000.000.000,00**	
		Jumlah ijin PS yang diterbitkan						***1.550.000.000,00***							***2.500.000.000,00***	
			1.Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	20 Persentase		20 Persentase	20 Persentase	1.550.000.000,00						20 Persentase	2.500.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						2.000.000.000,00					-		3.000.000.000,00	
		Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya						2.000.000.000,00					-		3.000.000.000,00	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit		2 Unit	4 Unit	450.000.000,00						4 Unit	600.000.000,00	
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	16 Orang		16 Orang	16 Orang	200.000.000,00						16 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	16 Orang		0 Orang	16 Orang	150.000.000,00						16 Orang	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar		Hektar	5000 Hektar	450.000.000,00						5000 Hektar	650.000.000,00	
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan						200.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	16 Orang		16 Orang	11 Orang	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				16 Orang	500.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan						150.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	16 Orang		0 Orang	10 Orang	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				16 Orang	500.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial						450.000.000,00			-	-			650.000.000,00	
		Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar		Hektar	15000 Hektar	450.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Utara || Desa Belayan || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Sungai Boh || Desa Dumu Mahak || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Kayan Hilir || Desa Long Sule || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Kayan Hilir || Desa Long Pipa || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Kayan Hilir || Desa Data Dian || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Utara || Desa Sembuak Warod || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Mentarang Hulu || Desa Lung Barang || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				5000 Hektar	650.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Kayan Selatan || Desa Sungai Barang || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Sungai Boh || Desa Long Lebusan || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Mentarang || Desa Paking || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Sungai Boh || Desa Long Top || 1						
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial						450.000.000,00			-	-			600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit		2 Unit	4 Unit	450.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Selatan Hulu || Desa Long Lake || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Sungai Tubu || Desa Long Pada || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Sungai Tubu || Desa Long Nyau || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Selatan Hulu || Desa Long Jalan || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Selatan Hulu || Desa Punan Mirau || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Selatan Hilir || Desa Setulang || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Selatan || Desa Laban Nyarit || 1	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			4 Unit	600.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau
		Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya						2.000.000.000,00					-		3.000.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	-	750.000.000,00						-	750.000.000,00	
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan						750.000.000,00			-	-			750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	4 Kelompok	750.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Selatan || Desa Laban Nyarit || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Sungai Tubu || Desa Long Pada || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Sungai Tubu || Desa Long Nyau || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Selatan Hulu || Desa Nahakramo || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Selatan Hulu || Desa Long Jalan || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Selatan Hulu || Desa Punan Mirau || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Selatan Hulu || Desa Long Lake || 1 || Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Malinau || Kecamatan Malinau Selatan Hilir || Desa Setulang || 1	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				-	750.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Malinau
		UPT KPH Kabupaten Tana Tidung						**11.400.000.000,00**							**15.202.267.966,55**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**11.400.000.000,00**							**15.202.267.966,55**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**11.400.000.000,00**							**15.202.267.966,55**	
174.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.369.684.141,43**							**1.662.000.000,00**	
		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Administrasi Perangkat Daerah						***1.139.684.141,43***							***1.437.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %		100 %	100 %	1.139.684.141,43						100 %	1.437.000.000,00	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						157.200.000,00					-		170.000.000,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai Regulasi						157.200.000,00					-		170.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	157.200.000,00						12 Dokumen	170.000.000,00	
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						157.200.000,00			-	-			170.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	157.200.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Tana Tidung || Kecamatan Sesayap || Desa Tideng Pale || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	170.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						215.000.000,00					-		210.000.000,00	
		Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						215.000.000,00					-		210.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	57 Paket		57 Paket	57 Paket	65.000.000,00						57 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang		6 Orang	6 Orang	150.000.000,00						6 Orang	150.000.000,00	
	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						65.000.000,00			-	-			60.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	57 Paket		57 Paket	65 Paket	65.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				57 Paket	60.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						150.000.000,00			-	-			150.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang		6 Orang	6 Orang	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Orang	150.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						490.484.141,43					-		475.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						490.484.141,43					-		475.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	310.000.000,00						12 Laporan	280.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	80.000.000,00						12 Paket	80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	30.200.000,00						12 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	5.000.000,00						1 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	50.284.141,43						6 Paket	65.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	5.000.000,00	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00			-	-			5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Tana Tidung || Kecamatan Sesayap || Desa Tideng Pale || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	5.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.284.141,43			-	-			65.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	50.284.141,43	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Tana Tidung || Kecamatan Sesayap || Desa Tideng Pale || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Paket	65.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000,00			-	-			5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	5.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						80.000.000,00			-	-			80.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	80.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Tana Tidung || Kecamatan Sesayap || Desa Tideng Pale || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	80.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.200.000,00			-	-			35.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	30.200.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Tana Tidung || Kecamatan Sesayap || Desa Tideng Pale || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	35.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.000.000,00			-	-			5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Tana Tidung || Kecamatan Sesayap || Desa Tideng Pale || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	5.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						310.000.000,00			-	-			280.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	310.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	280.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						290.000.000,00					-		405.000.000,00	
		Pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi						290.000.000,00					-		405.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket		0 Paket	5 Paket	30.000.000,00						5 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	12 Unit		10 Unit	12 Unit	110.000.000,00						12 Unit	180.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	150.000.000,00						10 Unit	200.000.000,00	
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						30.000.000,00			-	-			25.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket		0 Paket	5 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Paket	25.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						150.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				10 Unit	200.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						110.000.000,00			-	-			180.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	12 Unit		10 Unit	12 Unit	110.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				12 Unit	180.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						152.000.000,00					-		187.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						152.000.000,00					-		187.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00						12 Laporan	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00						12 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00						3 Laporan	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00						2 Laporan	12.000.000,00	
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12.000.000,00			-	-			12.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Tana Tidung || Kecamatan Sesayap || Desa Tideng Pale || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	12.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						90.000.000,00			-	-			90.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Tana Tidung || Kecamatan Sesayap || Desa Tideng Pale || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	90.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00			-	-			10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan	10.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						40.000.000,00			-	-			75.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Tana Tidung || Kecamatan Sesayap || Desa Tideng Pale || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	75.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						65.000.000,00					-		215.000.000,00	
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya						65.000.000,00					-		215.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit		53 Unit	53 Unit	65.000.000,00						53 Unit	65.000.000,00	
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						65.000.000,00			-	-			65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit		53 Unit	53 Unit	65.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Tana Tidung || Kecamatan Sesayap || Desa Tideng Pale || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				53 Unit	65.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00			-	-			150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Tana Tidung || Kecamatan Sesayap || Desa Tideng Pale || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	150.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
175.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**7.880.315.858,57**							**10.923.322.833,43**	
		Persentase produktivitas hasil hutan						***7.530.315.858,57***							***9.973.322.833,43***	
			1.Persentase peningkatan produtivitas hasil hutan	2 %		2 %	2 %	7.530.315.858,57						2 %	9.973.322.833,43	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						3.370.000.000,00					-		4.250.000.000,00	
		Jumlah Dokumen yang di Hasilkan						3.370.000.000,00					-		4.250.000.000,00	
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	2 Unit		5 Unit	2 Unit	2.450.000.000,00						2 Unit	3.000.000.000,00	
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	520.000.000,00						50 Unit	600.000.000,00	
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit		2 Unit	2 Unit	400.000.000,00						2 Unit	350.000.000,00	
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00			-	-			300.000.000,00	
		Tersusunnya Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Dokumen	300.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan						400.000.000,00			-	-			350.000.000,00	
		Terlaksananya Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L)	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit		2 Unit	2 Unit	400.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				2 Unit	350.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH						520.000.000,00			-	-			600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	520.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				50 Unit	600.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor						2.450.000.000,00			-	-			3.000.000.000,00	
		Tersedianya Kantor resor KPH dan Sarana Prasarana Operasionalisasi resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	2 Unit		5 Unit	2 Unit	2.450.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				2 Unit	3.000.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						620.000.000,00					-		880.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang tersusun						620.000.000,00					-		880.000.000,00	
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00						2 Dokumen	380.000.000,00	
			Jumlah Peta Perubahan Tata Hutan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						300.000.000,00			-	-			380.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				2 Dokumen	380.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P						220.000.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Dokumen	300.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.03.1.02.0003	Penyusunan Perubahan Peta Tata Hutan						100.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Tersusunnya Peta Perubahan Tata Hutan	Jumlah Peta Perubahan Tata Hutan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Dokumen	200.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						500.000.000,00					-		1.613.322.833,43	
		Persentase penambahan Luas tutupan lahan						500.000.000,00					-		1.613.322.833,43	
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	350.000.000,00	
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha		0 Ha	5 Ha	0,00						5 Ha	443.322.833,43	
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha		50 Ha	50 Ha	500.000.000,00						50 Ha	820.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)						0,00			-	-			350.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Dokumen	350.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara						0,00			-	-			443.322.833,43	
		Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha		0 Ha	0 Ha	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				5 Ha	443.322.833,43	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara						500.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			820.000.000,00	
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha		50 Ha	10 Ha	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				50 Ha	820.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						2.630.315.858,57					-		2.980.000.000,00	
		Luas Hutan yang dilakukan pengamanan dan perlindungan						2.630.315.858,57					-		2.980.000.000,00	
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	760.315.858,57						12 Laporan	950.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	720.000.000,00						1 Dokumen	800.000.000,00	
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	35 Operasi		30 Operasi	35 Operasi	350.000.000,00						35 Operasi	450.000.000,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	178.853 Ha		178.853 Ha	178.853 Ha	800.000.000,00						178.853 Ha	780.000.000,00	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						720.000.000,00			-	-			800.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	720.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Dokumen	800.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						760.315.858,57			-	-			950.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	760.315.858,57	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				12 Laporan	950.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						350.000.000,00			-	-			450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	35 Operasi		30 Operasi	35 Operasi	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				35 Operasi	450.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						800.000.000,00			-	-			780.000.000,00	
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	178.853 Ha		178.853 Ha	178,853 Ha	800.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				178.853 Ha	780.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan						760.000.000,00					-		1.200.000.000,00	
		Jumlah ketersediaan bibit/benih tanaman kehutanan bersertifikat dan sesuai standar						760.000.000,00					-		1.200.000.000,00	
			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	30000 Batang		15000 Batang	17000 Batang	350.000.000,00						20000 Batang	400.000.000,00	
			Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	1 Sertifikat		1 Sertifikat	1 Sertifikat	150.000.000,00						1 Sertifikat	300.000.000,00	
			Luas Sumber Benih yang Dibangun	1 Ha		0 Ha	1 Ha	260.000.000,00						1 Ha	500.000.000,00	
	3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih						150.000.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Terlaksananya Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	1 Sertifikat		1 Sertifikat	1 Sertifikat	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Sertifikat	300.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.03.1.09.0006	Pembangunan Sumber Benih						260.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	1 Ha		0 Ha	1 Ha	260.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Ha	500.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan						350.000.000,00			-	-			400.000.000,00	
		Tersedianya bibit berkualitas untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	30000 Batang		15000 Batang	17,000 Batang	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				20000 Batang	400.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
176.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**2.150.000.000,00**							**2.616.945.133,12**	
		Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)						***1.700.000.000,00***							***2.616.945.133,12***	
			1.Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10 Persentase		10 Persentase	10 Persentase	1.700.000.000,00						10 Persentase	2.616.945.133,12	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						2.150.000.000,00					-		2.616.945.133,12	
		Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat						2.150.000.000,00					-		2.616.945.133,12	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	450.000.000,00						2 Unit	730.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang		10 Orang	10 Orang	200.000.000,00						10 Orang	200.000.000,00	
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	12 Orang		10 Orang	12 Orang	300.000.000,00						12 Orang	320.000.000,00	
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Hektar		50 Hektar	50 Hektar	450.000.000,00						50 Hektar	450.000.000,00	
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan						200.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			200.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang		10 Orang	10 Orang	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				10 Orang	200.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan						300.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			320.000.000,00	
		Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	12 Orang		10 Orang	12 Orang	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				12 Orang	320.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial						450.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			450.000.000,00	
		Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Hektar		50 Hektar	50 Hektar	450.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				50 Hektar	450.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial						450.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			730.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit		2 Unit	1 Unit	450.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				2 Unit	730.000.000,00	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
		Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat						2.150.000.000,00					-		2.616.945.133,12	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	-	750.000.000,00						-	916.945.133,12	
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan						750.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			916.945.133,12	
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	14 Kelompok	750.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				-	916.945.133,12	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral						**12.568.945.859,00**							**38.510.048.453,57**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**12.568.945.859,00**							**38.510.048.453,57**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**12.568.945.859,00**							**38.510.048.453,57**	
177.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**10.203.340.759,00**							**15.144.021.630,53**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah						***10.203.340.759,00***							***14.144.021.630,53***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	10.203.340.759,00						100 %	14.144.021.630,53	
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						130.546.500,00					Internal PD		200.000.000,00	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi						130.546.500,00					Internal PD		200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	30.086.500,00						1 Data	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	100.460.000,00						20 Dokumen	150.000.000,00	
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						100.460.000,00			-	-			150.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	100.460.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						30.086.500,00			-	-			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	30.086.500,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Data	50.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.446.551.127,00					Internal PD		11.048.021.630,53	
		Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						8.446.551.127,00					Internal PD		11.048.021.630,53	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	260.640.000,00						4 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/ Bulan		55 Orang/ Bulan	55 Orang/ Bulan	8.185.911.127,00						55 Orang/ Bulan	10.698.021.630,53	
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.185.911.127,00			-	-			10.698.021.630,53	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/ Bulan		55 Orang/ Bulan	55 Orang/ Bulan	8.185.911.127,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				55 Orang/ Bulan	10.698.021.630,53	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						260.640.000,00			-	-			350.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	12 Dokumen	260.640.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						28.173.000,00					Internal PD		150.000.000,00	
		BMD perangkat daerah yang terkelola sesuai regulasi						28.173.000,00					Internal PD		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	28.173.000,00						4 Dokumen	150.000.000,00	
	3.29.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						28.173.000,00			-	-			150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	28.173.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						160.000.000,00					Internal PD		530.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						160.000.000,00					Internal PD		530.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	65.000.000,00						3 Paket	180.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang		35 Orang	35 Orang	95.000.000,00						35 Orang	350.000.000,00	
	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						65.000.000,00			-	-			180.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	65.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Paket	180.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						95.000.000,00			-	-			350.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang		35 Orang	10 Orang	95.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35 Orang	350.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.031.340.132,00					Internal PD		2.633.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						1.031.340.132,00					Internal PD		2.633.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen		365 Dokumen	365 Dokumen	2.000.000,00						365 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	807.959.532,00						4 Laporan	1.850.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	49.363.300,00						4 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	16.065.000,00						4 Paket	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	105.952.300,00						4 Paket	350.000.000,00	
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						105.952.300,00			-	-			350.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	105.952.300,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	350.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						49.363.300,00			-	-			200.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	49.363.300,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	200.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						16.065.000,00			-	-			75.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	16.065.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	75.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						2.000.000,00			-	-			8.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen		365 Dokumen	365 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				365 Dokumen	8.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						50.000.000,00			-	-			150.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	150.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						807.959.532,00			-	-			1.850.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	807.959.532,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	1.850.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						176.730.000,00					Internal PD		303.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						176.730.000,00					Internal PD		303.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	56.160.000,00						4 Laporan	65.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	85.000.000,00						4 Laporan	145.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	30.300.000,00						4 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.270.000,00						4 Laporan	13.000.000,00	
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.270.000,00			-	-			13.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.270.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	13.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						56.160.000,00			-	-			65.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	56.160.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	65.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.300.000,00			-	-			80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	30.300.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	80.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						85.000.000,00			-	-			145.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	85.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	145.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						230.000.000,00					Internal PD		280.000.000,00	
		BMD yang terpelihara						230.000.000,00					Internal PD		280.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit		25 Unit	26 Unit	230.000.000,00						26 Unit	280.000.000,00	
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						230.000.000,00			-	-			280.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit		25 Unit	22 Unit	230.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				26 Unit	280.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
178.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**						**150.076.800,00**							**678.467.256,74**	
		Meningkatnya pengelolaan air tanah yang sesuai dengan ketentuan						***150.076.800,00***							***678.467.256,74***	
			1.Persentase izin pemanfaatan air tanah sesuai dengan kaidah konservasi air tanah	87 %		60 %	67 %	150.076.800,00						73 %	678.467.256,74	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						100.000.000,00					Pelaku Usaha		178.467.256,74	
		Tersedianya data zona konservasi air tanah di Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai Kayan						100.000.000,00					Pelaku Usaha		178.467.256,74	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	178.467.256,74	
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah						100.000.000,00			-	-			178.467.256,74	
		Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	178.467.256,74	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						50.076.800,00					Pelaku Usaha		500.000.000,00	
		Tersedianya Peraturan Gubernur tentang Penetapan Pedoman Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						50.076.800,00					Pelaku Usaha		500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.076.800,00						1 Laporan	500.000.000,00	
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah						50.076.800,00			-	-			500.000.000,00	
		Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.076.800,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	500.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
179.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**						**269.882.500,00**							**1.667.883.401,89**	
		Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam melaksanakan kaidah lingkungan dan teknik pertambangan yang baik						***179.882.500,00***							***1.345.897.401,89***	
			1.Persentase IUP dan SIPB MBLB yang memenuhi penyusunan dokumen teknis studi kelayakan dan rencana penambangan	80 %		78 %	78 %	179.882.500,00						79 %	1.345.897.401,89	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						119.946.000,00					Pelaku Usaha		454.549.000,89	
		Meningkatnya Usaha Pertambangan MBLB yang berijin						119.946.000,00					Pelaku Usaha		454.549.000,89	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	23 Dokumen		16 Dokumen	18 Dokumen	39.986.500,00						20 Dokumen	111.011.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	79.959.500,00						2 Laporan	343.537.200,89	
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						39.986.500,00			-	-			111.011.800,00	
		Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	23 Dokumen		16 Dokumen	6 Dokumen	39.986.500,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Dokumen	111.011.800,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						79.959.500,00			-	-			343.537.200,89	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	79.959.500,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	343.537.200,89	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan						40.000.000,00					Pelaku Usaha		463.362.401,00	
		Tersedianya Data terkait Harga Patokan MBLB di dalam wilayah Provinsi						40.000.000,00					Pelaku Usaha		463.362.401,00	
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	240.523.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	2 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00						2 Laporan	222.839.401,00	
	3.29.03.1.07.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan						20.000.000,00			-	-			240.523.000,00	
		Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	240.523.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan						20.000.000,00			-	-			222.839.401,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	2 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	222.839.401,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.03.1.14	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)						59.936.500,00					Pelaku Usaha		427.986.000,00	
		MeningkatnyaPelaku usaha yang memiliki Surat Ijin Pertambangan Batuan (SIPB)						59.936.500,00					Pelaku Usaha		427.986.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	39.936.500,00						1 Laporan	258.993.000,00	
	3.29.03.1.14.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)						39.936.500,00			-	-			258.993.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	39.936.500,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	258.993.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Persentase IUP dan SIPB MBLB yang memenuhi kewajiban penyusunan dokumen teknis studi kelayakan dan rencana penambangan	-		-	78 Persen	25.000.000,00						-	321.986.000,00	
		MeningkatnyaPelaku usaha yang memiliki Surat Ijin Pertambangan Batuan (SIPB)						59.936.500,00					Pelaku Usaha		427.986.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	-		-	-	20.000.000,00						-	168.993.000,00	
	3.29.03.1.14.0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)						20.000.000,00			-	-			168.993.000,00	
		Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	-		-	3 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	168.993.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.29.03.1.20	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi						50.000.000,00					Pelaku Usaha		321.986.000,00	
		-						50.000.000,00					Pelaku Usaha		321.986.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	-	25.000.000,00						-	116.993.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	-	25.000.000,00						-	204.993.000,00	
	3.29.03.1.20.0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi						25.000.000,00			-	-			116.993.000,00	
		Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	6 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	116.993.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.03.1.20.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi						25.000.000,00			-	-			204.993.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	2 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	204.993.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
180.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**						**1.380.332.500,00**							**13.862.151.561,56**	
		Meningkatnya Pemanfaatan Energi yang Bersumber dari Pembangkit EBT						***1.380.332.500,00***							***13.862.151.561,56***	
			1.Jumlah pasokan energi yang bersumber dari EBT	1882939.13 TOE		2645.66 TOE	2854.53 TOE	1.380.332.500,00						3063.40 TOE	13.862.151.561,56	
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi						1.315.086.500,00					Desa yang belum berlistrik		12.910.651.561,56	
		Peningkatan kapasitas pembangkit EBT yang beroperasi						1.315.086.500,00					Desa yang belum berlistrik		12.910.651.561,56	
			Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1 unit		0 unit	1 unit	1.000.000.000,00						1 unit	12.110.651.561,56	
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	165.086.500,00						1 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara	3 unit		0 unit	3 unit	150.000.000,00						3 unit	600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah						165.086.500,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			200.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	165.086.500,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT						1.000.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			12.110.651.561,56	
		Terlaksananya kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1 unit		0 unit	40 unit	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 unit	12.110.651.561,56	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.07.0009	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT						150.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara	3 unit		0 unit	1 unit	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 unit	600.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral						25.000.000,00					OPD Pemprov Kaltara		650.000.000,00	
		Meningkatnya efisiensi energi pada bangunan gedung pemerintahan						25.000.000,00					OPD Pemprov Kaltara		650.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	650.000.000,00	
	3.29.05.1.09.0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi						25.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			650.000.000,00	
		Terlaksananya evaluasi kegiatan konservasi energi	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	650.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi						20.115.000,00					Masyarakat Kaltara, OPD Pemprov Kaltara		181.500.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi						20.115.000,00					Masyarakat Kaltara, OPD Pemprov Kaltara		181.500.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	1 laporan		1 laporan	1 laporan	20.115.000,00						1 laporan	181.500.000,00	
	3.29.05.1.10.0004	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota						20.115.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan			181.500.000,00	
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Konservasi Energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	1 laporan		1 laporan	1 laporan	20.115.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 laporan	181.500.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi						20.131.000,00					Pabrik Kelapa Sawit		120.000.000,00	
		Meningkatnya pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas dalam wilayah provinsi						20.131.000,00					Pabrik Kelapa Sawit		120.000.000,00	
			jumlah dokumen data potensi biomassa dan/atau biogas	-		-	-	20.131.000,00						-	120.000.000,00	
	3.29.05.1.05.0012	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa dan/atau biogas						20.131.000,00			-	-			120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		terkumpulnya data potensi biomassa dan/atau biogas	jumlah dokumen data potensi biomassa dan/atau biogas	-		-	1 Dokumen	20.131.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	120.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
181.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**						**565.313.300,00**							**7.157.524.602,85**	
		Meningkatnya Pemanfaatan Energi yang Bersumber dari Listrik PLN						***565.313.300,00***							***7.157.524.602,85***	
			1.Capaian rumah tangga berlistrik	325.149 Rumah Tangga		267007 Rumah Tangga	281265 Rumah Tangga	565.313.300,00						295708 Rumah Tangga	7.157.524.602,85	
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						522.863.800,00					Rumah tangga tidak mampu calon penerima bantuan listrik		6.962.524.602,85	
		Terlaksananya pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan						522.863.800,00					Rumah tangga tidak mampu calon penerima bantuan listrik		6.962.524.602,85	
			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.173.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	121.890.800,00						4 Laporan	212.524.602,85	
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1002 Unit		320 Unit	1002 Unit	260.800.000,00						1002 Unit	6.400.000.000,00	
	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu						120.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						20.173.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			150.000.000,00	
		Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.173.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						121.890.800,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			212.524.602,85	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	121.890.800,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	212.524.602,85	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						260.800.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			6.400.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1002 Unit		320 Unit	100 Unit	260.800.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1002 Unit	6.400.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi						15.000.000,00					Pelaku usaha penyedia tenaga listrik (non-PLN)		0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi						15.000.000,00					Pelaku usaha penyedia tenaga listrik (non-PLN)		0,00	
			Jumlah pelaksanaan perizinan usaha yang dibina dan diawasi	-		-	-	15.000.000,00						-	0,00	
	3.29.06.1.01.0005	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik						15.000.000,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik	Jumlah pelaksanaan perizinan usaha yang dibina dan diawasi	-		-	5 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	0,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi						11.411.500,00					Badan usaha pemegang IUPTLS		95.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi						11.411.500,00					Badan usaha pemegang IUPTLS		95.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan	-		-	-	11.411.500,00						-	95.000.000,00	
	3.29.06.1.02.0006	Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi						11.411.500,00			-	-			95.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Prosedur dan Persyaratan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan	-		-	5 Dokumen	11.411.500,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	95.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri						16.038.000,00					Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik		100.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri						16.038.000,00					Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik		100.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	-		-	-	16.038.000,00						-	100.000.000,00	
	3.29.06.1.05.0005	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri						16.038.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	-		-	1 Laporan	16.038.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM						**12.175.655.597,00**							**118.187.583.123,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.889.655.597,00**							**17.350.641.504,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**10.889.655.597,00**							**17.350.641.504,00**	
182.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**10.609.655.597,00**							**17.048.141.504,00**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah						***10.609.655.597,00***							***15.248.141.504,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	10.609.655.597,00						100 %	15.248.141.504,00	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.004.584,00					ASN Disperindagkop		445.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi						40.004.584,00					ASN Disperindagkop		445.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	20.004.584,00						4 Dokumen	370.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00						2 Laporan	75.000.000,00	
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20.004.584,00			-	-			370.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	20.004.584,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	370.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00			-	-			75.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	17 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	75.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.555.801.692,00					ASN Disperindagkop		11.663.141.504,00	
		Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						9.555.801.692,00					ASN Disperindagkop		11.663.141.504,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	701.329.078,00						12 Dokumen	1.300.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/ Bulan		75 Orang/ Bulan	80 Orang/ Bulan	8.854.472.614,00						85 Orang/ Bulan	10.363.141.504,00	
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.854.472.614,00			-	-			10.363.141.504,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/ Bulan		75 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan	8.854.472.614,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				85 Orang/ Bulan	10.363.141.504,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						701.329.078,00			-	-			1.300.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	701.329.078,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	1.300.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						80.000.000,00					-		300.000.000,00	
		Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						80.000.000,00					-		300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang		20 Orang	20 Orang	80.000.000,00						25 Orang	300.000.000,00	
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						80.000.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang		20 Orang	30 Orang	80.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Orang	300.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						608.894.421,00					ASN Disperindagkop		2.195.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						608.894.421,00					ASN Disperindagkop		2.195.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan		500 Laporan	600 Laporan	383.787.093,00						600 Laporan	1.800.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	120.563.216,00						6 Paket	190.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	14.544.112,00						11 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	90.000.000,00						6 Paket	150.000.000,00	
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						90.000.000,00			-	-			150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	3 Paket	90.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Paket	150.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						120.563.216,00			-	-			190.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	120.563.216,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Paket	190.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						14.544.112,00			-	-			55.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	14.544.112,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11 Paket	55.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						383.787.093,00			-	-			1.800.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan		500 Laporan	150 Laporan	383.787.093,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				600 Laporan	1.800.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						33.529.300,00					ASN Disperindagkop		1.985.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						33.529.300,00					ASN Disperindagkop		1.985.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	5.694.300,00						7 Laporan	170.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00						3 Laporan	1.800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	12.835.000,00						5 Laporan	15.000.000,00	
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12.835.000,00			-	-			15.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	12.835.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Laporan	15.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						5.694.300,00			-	-			170.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	5.694.300,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7 Laporan	170.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.000.000,00			-	-			1.800.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	600 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan	1.800.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						291.425.600,00					ASN Disperindagkop		460.000.000,00	
		BMD yang terpelihara						291.425.600,00					ASN Disperindagkop		460.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		0 Unit	5 Unit	70.000.000,00						5 Unit	280.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	221.425.600,00						20 Unit	180.000.000,00	
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						221.425.600,00			-	-			180.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	221.425.600,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Unit	180.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						70.000.000,00			-	-			280.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		0 Unit	1 Unit	70.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	280.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
183.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**85.000.000,00**							**302.500.000,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam						***85.000.000,00***							***302.500.000,00***	
			1.Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	66.07 Persentase		44.68 Persentase	51.02 Persentase	85.000.000,00						56.86 Persentase	302.500.000,00	
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						85.000.000,00					Anggota dan Pengurus Koperasi		302.500.000,00	
		Meningkatkan tertib administrasi pasca penguatan tata kelola pada koperasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi						85.000.000,00					Anggota dan Pengurus Koperasi		302.500.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	20 Unit Usaha		10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	50.000.000,00						10 Unit Usaha	181.500.000,00	
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi						50.000.000,00			-	-			181.500.000,00	
		Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	20 Unit Usaha		10 Unit Usaha	30 Unit Usaha	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit Usaha	181.500.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		Meningkatkan tertib administrasi pasca penguatan tata kelola pada koperasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi						85.000.000,00					Anggota dan Pengurus Koperasi		302.500.000,00	
			Jumlah Koperasi yang diperiksa	-		-	-	35.000.000,00						-	121.000.000,00	
	2.17.03.1.01.0005	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						35.000.000,00			-	-			121.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diperiksa	-		-	15 Unit Usaha	35.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	121.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
184.	**2.17.07**	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**120.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tanggu dan mandiri						***120.000.000,00***							***0,00***	
			1.Pertumbuhan Wirausaha	5.62 Persentase		2.72 Persentase	3.52 Persentase	120.000.000,00						4.32 Persentase	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan						120.000.000,00					Pelaku usaha		0,00	
		Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan						120.000.000,00					Pelaku usaha		0,00	
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
	2.17.07.1.01.0015	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha						100.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan			0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	20 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.07.1.01.0018	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM						20.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	1 Kegiatan	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
185.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						**75.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya UMKM yang lebih kompetitif, produktif, dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas, akses pasar, legalitas, pembiayaan, kelembagaan, serta sinergi lintas sektor.						***75.000.000,00***							***0,00***	
			1.Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	1.52 Persentase		0.72 Persentase	0.92 Persentase	75.000.000,00						1.12 Persentase	0,00	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah						75.000.000,00					Pelaku usaha		0,00	
		Meningkatkan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah						75.000.000,00					Pelaku usaha		0,00	
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-		-	-	75.000.000,00						-	0,00	
	2.17.08.1.01.0015	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM						75.000.000,00			-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada unit usaha UMKM	Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-		-	30 Unit Usaha	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.286.000.000,00**							**100.836.941.619,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**426.000.000,00**							**98.197.681.442,00**	
186.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**5.000.000,00**							**94.309.203.566,00**	
		Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi yang Efesiensi Merata Terintegrasi						***5.000.000,00***							***94.309.203.566,00***	
			1.Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100 Persentase		25 Persentase	25 Persentase	5.000.000,00						0 Persentase	94.309.203.566,00	
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas						5.000.000,00					-		94.309.203.566,00	
		Meningkatkan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas						5.000.000,00					-		94.309.203.566,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00						1 Unit	94.309.203.566,00	
	3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi						5.000.000,00			-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera			94.309.203.566,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	94.309.203.566,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
187.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**						**200.000.000,00**							**2.250.000.000,00**	
		Meningkatnya Kelancaran dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting						***200.000.000,00***							***2.250.000.000,00***	
			1.Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3.28 Persentase		3.43 Persentase	3.37 Persentase	200.000.000,00						3.34 Persentase	2.250.000.000,00	
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						200.000.000,00					Masyarakat		2.250.000.000,00	
		Meningkatkan Pengawasan Komoditi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting						200.000.000,00					Masyarakat		2.250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00						2 Laporan	2.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00						12 Laporan	250.000.000,00	
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota						50.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			250.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	250.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						150.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			2.000.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	2.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
188.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**						**221.000.000,00**							**1.638.477.876,00**	
		Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Berorientasi Ekspor						***221.000.000,00***							***1.638.477.876,00***	
			1.Nilai Ekspor Barang	94.12 Nilai		93.62 Nilai	93.75 Nilai	221.000.000,00						93.88 Nilai	1.638.477.876,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi						221.000.000,00					Pelaku usaha		1.638.477.876,00	
		Meningkatkan Produk Ekspor Unggulan melalui promosi Pameran Dagang dan Misi Dagang						221.000.000,00					Pelaku usaha		1.638.477.876,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	25 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	50.000.000,00						20 Pelaku Usaha	138.477.876,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	30 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha	22 Pelaku Usaha	156.000.000,00						24 Pelaku Usaha	1.200.000.000,00	
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	20 Produk		8 Produk	15 Produk	15.000.000,00						15 Produk	300.000.000,00	
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional						156.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			1.200.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	30 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha	22 Pelaku Usaha	156.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24 Pelaku Usaha	1.200.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal						50.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			138.477.876,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	25 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Pelaku Usaha	138.477.876,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor						15.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			300.000.000,00	
		Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	20 Produk		8 Produk	1 Produk	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Produk	300.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**860.000.000,00**							**2.639.260.177,00**	
189.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**781.000.000,00**							**2.251.564.602,00**	
		Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri						***781.000.000,00***							***2.251.564.602,00***	
			1.Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	21.18 Persentase		19.50 Persentase	20 Persentase	781.000.000,00						20.32 Persentase	2.251.564.602,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						781.000.000,00					Pelaku Industri		2.251.564.602,00	
		Meningkatkan realisasi program dan kegiatan sektor industri provinsi yang selaras dengan arah kebijakan RPIP						781.000.000,00					Pelaku Industri		2.251.564.602,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	751.000.000,00						2 Dokumen	2.201.564.602,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi						30.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			50.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						751.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			2.201.564.602,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	751.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	2.201.564.602,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
190.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**						**79.000.000,00**							**387.695.575,00**	
		Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian						***79.000.000,00***							***387.695.575,00***	
			1.Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	85 Persentase		77 Persentase	79 Persentase	79.000.000,00						81 Persentase	387.695.575,00	
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi						79.000.000,00					Pelaku Industri		387.695.575,00	
		Meningkatkan Perusahaan yang patuh terhadap peraturan dan ketentuan teknis perizinan berusaha sektor industri						79.000.000,00					Pelaku Industri		387.695.575,00	
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	10 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000,00						8 Dokumen	187.695.575,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	3 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	29.000.000,00						4 Dokumen	200.000.000,00	
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi						50.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			187.695.575,00	
		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	10 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Dokumen	187.695.575,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)						29.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan			200.000.000,00	
		Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	3 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	29.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah						**2.499.999.696,00**							**4.861.587.066,93**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.499.999.696,00**							**4.861.587.066,93**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.499.999.696,00**							**4.861.587.066,93**	
191.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**949.999.696,00**							**1.391.711.668,20**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah						***949.999.696,00***							***1.374.211.668,20***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	949.999.696,00						100 %	1.374.211.668,20	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						220.000.000,00					-		248.760.000,00	
		Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						220.000.000,00					-		248.760.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	220.000.000,00						12 Dokumen	248.760.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						220.000.000,00			-	-			248.760.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	220.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	248.760.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						15.000.000,00					-		135.000.000,00	
		Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						15.000.000,00					-		135.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang		5 Orang	7 Orang	15.000.000,00						9 Orang	135.000.000,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						15.000.000,00			-	-			135.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang		5 Orang	7 Orang	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9 Orang	135.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						509.809.444,00					-		627.451.668,20	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						509.809.444,00					-		627.451.668,20	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00						12 Laporan	548.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	47.335.220,00						12 Paket	51.951.668,20	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12.474.224,00						12 Paket	7.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	50.000.000,00						5 Paket	20.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00			-	-			20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Paket	20.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						47.335.220,00			-	-			51.951.668,20	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	47.335.220,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	51.951.668,20	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.474.224,00			-	-			7.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12.474.224,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	7.500.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						400.000.000,00			-	-			548.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	548.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						88.739.592,00					-		282.500.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						88.739.592,00					-		282.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00						12 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	82.469.592,00						12 Laporan	270.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.270.000,00						2 Laporan	7.500.000,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.270.000,00			-	-			7.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.270.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	7.500.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						5.000.000,00			-	-			5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	5.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						82.469.592,00			-	-			270.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	82.469.592,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	270.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						116.450.660,00					-		98.000.000,00	
		BMD yang terpelihara						116.450.660,00					-		98.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit		16 Unit	16 Unit	80.151.660,00						16 Unit	78.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	14.574.000,00						4 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	10 Unit	21.725.000,00						5 Unit	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						14.574.000,00			-	-			10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	14.574.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	10.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						80.151.660,00			-	-			78.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit		16 Unit	16 Unit	80.151.660,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16 Unit	78.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						21.725.000,00			-	-			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	10 Unit	21.725.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	10.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
192.	**4.01.03**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**						**1.550.000.000,00**							**3.469.875.398,73**	
		Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah						***450.000.000,00***							***2.094.875.398,73***	
			1.Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Keterisian IKK 100%	100 %		89 %	92 %	450.000.000,00						95 %	2.094.875.398,73	
			2.Indeks Pencapaian SPM	100 %		99.30 %	99.50 %	450.000.000,00						99.80 %	2.094.875.398,73	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan						550.000.000,00					-		715.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Tugas Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan						550.000.000,00					-		715.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	275.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	275.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	165.000.000,00	
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan						150.000.000,00			-	-			165.000.000,00	
		Terkelolanya Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	165.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum						200.000.000,00			-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera			275.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	275.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah						200.000.000,00			-	-			275.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	275.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah						550.000.000,00					-		825.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah						550.000.000,00					-		825.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	15 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	150.000.000,00						10 Dokumen	275.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	275.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00						2 Laporan	275.000.000,00	
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD						150.000.000,00			-	-			275.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	15 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Dokumen	275.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan						200.000.000,00			-	-			275.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	275.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan						200.000.000,00			-	-			275.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	275.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						450.000.000,00					-		1.929.875.398,73	
		Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Daerah						450.000.000,00					-		1.929.875.398,73	
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	7 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000,00						7 Dokumen	1.254.875.398,73	
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	14 Dokumen		12 Dokumen	13 Dokumen	150.000.000,00						12 Dokumen	400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	275.000.000,00	
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah						200.000.000,00			-	-			1.254.875.398,73	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	7 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7 Dokumen	1.254.875.398,73	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta						150.000.000,00			-	-			400.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	14 Dokumen		12 Dokumen	13 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	400.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						100.000.000,00			-	-			275.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	275.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Biro Hukum						**2.500.000.000,00**							**4.528.595.065,50**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.500.000.000,00**							**4.528.595.065,50**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.500.000.000,00**							**4.528.595.065,50**	
193.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.650.476.800,00**							**2.163.444.365,50**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah						***1.650.476.800,00***							***2.163.444.365,50***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	1.650.476.800,00						100 %	2.163.444.365,50	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						121.560.000,00					-		160.000.000,00	
		Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Sesuai Regulasi						121.560.000,00					-		160.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	121.560.000,00						12 Dokumen	160.000.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						121.560.000,00			-	-			160.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	121.560.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	160.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						481.400.000,00					-		422.944.365,50	
		Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Sesuai Standar Peraturan Yang Berlaku						481.400.000,00					-		422.944.365,50	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang		150 Orang	55 Orang	101.400.000,00						60 Orang	95.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 Orang		10 Orang	47 Orang	380.000.000,00						50 Orang	327.944.365,50	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						380.000.000,00			-	-			327.944.365,50	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 Orang		10 Orang	40 Orang	380.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	327.944.365,50	Biro Hukum
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						101.400.000,00			-	-			95.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang		150 Orang	100 Orang	101.400.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60 Orang	95.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						542.370.630,00					-		716.500.000,00	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						542.370.630,00					-		716.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	267.699.954,00						12 Laporan	420.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	269.558.100,00						12 Paket	290.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.112.576,00						1 Paket	6.500.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						269.558.100,00			-	-			290.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	269.558.100,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	290.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.112.576,00			-	-			6.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	5.112.576,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	6.500.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						267.699.954,00			-	-			420.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	267.699.954,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	420.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						20.736.000,00					-		75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pengadaaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai regulasi						20.736.000,00					-		75.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		3 Unit	4 Unit	20.736.000,00						5 Unit	75.000.000,00	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.736.000,00			-	-			75.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		3 Unit	4 Unit	20.736.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	75.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						292.325.170,00					-		609.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						292.325.170,00					-		609.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.707.990,00						12 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	279.853.980,00						12 Laporan	590.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.763.200,00						12 Laporan	9.000.000,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.763.200,00			-	-			9.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.763.200,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	9.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						6.707.990,00			-	-			10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.707.990,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	10.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						279.853.980,00			-	-			590.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	279.853.980,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	590.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						192.085.000,00					-		180.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		BMD yang terpelihara						192.085.000,00					-		180.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	129.195.000,00						1 Unit	60.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	42.320.000,00						14 Unit	70.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit		12 Unit	20 Unit	20.570.000,00						20 Unit	50.000.000,00	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						42.320.000,00			-	-			70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit		14 Unit	1 Unit	42.320.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14 Unit	70.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						129.195.000,00			-	-			60.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	8 Unit	129.195.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	60.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.570.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit		12 Unit	29 Unit	20.570.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Unit	50.000.000,00	Biro Hukum
194.	**4.01.05**	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**						**849.523.200,00**							**2.365.150.700,00**	
		Meningkatnya kualitas Produk Hukum yang dihasilkan						***849.523.200,00***							***2.007.150.700,00***	
			1.Persentase Produk Hukum Yang Dihasilkan Sesuai Standar	90 %		90 %	90 %	849.523.200,00						90 %	2.007.150.700,00	
			2.Persentase Capaian Aksi HAM	96 %		93 %	93.5 %	849.523.200,00						94 %	2.007.150.700,00	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan						697.383.200,00					-		1.662.000.000,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Dokumen perundang-undangan						697.383.200,00					-		1.662.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	190 Dokumen		150 Dokumen	160 Dokumen	139.900.000,00						170 Dokumen	358.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	540 Dokumen		500 Dokumen	510 Dokumen	162.563.200,00						520 Dokumen	338.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	40 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	275.000.000,00						32 Dokumen	608.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	590 Dokumen		550 Dokumen	560 Dokumen	119.920.000,00						570 Dokumen	358.000.000,00	
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk HukumPengaturan						275.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			608.000.000,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	40 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	275.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				32 Dokumen	608.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk HukumPenetapan						162.563.200,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			338.000.000,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	540 Dokumen		500 Dokumen	510 Dokumen	162.563.200,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				520 Dokumen	338.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya						119.920.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			358.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	590 Dokumen		550 Dokumen	650 Dokumen	119.920.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				570 Dokumen	358.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk HukumKabupaten/Kota						139.900.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			358.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	190 Dokumen		150 Dokumen	150 Dokumen	139.900.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				170 Dokumen	358.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum						152.140.000,00					-		703.150.700,00	
		Terfasilitasinya Bantuan Hukum yang diselesaikan						152.140.000,00					-		703.150.700,00	
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	5 Kasus		2 Kasus	3 Kasus	89.140.000,00						4 Kasus	356.525.390,90	
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	6 Kasus		4 Kasus	4 Kasus	63.000.000,00						5 Kasus	346.625.309,10	
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum						89.140.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			356.525.390,90	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	5 Kasus		2 Kasus	2 Kasus	89.140.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Kasus	356.525.390,90	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM						63.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			346.625.309,10	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	6 Kasus		4 Kasus	3 Kasus	63.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Kasus	346.625.309,10	Biro Hukum
		Biro Kesejahteraan Rakyat						**22.924.893.922,00**							**71.426.576.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**22.924.893.922,00**							**71.426.576.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**22.924.893.922,00**							**71.426.576.000,00**	
195.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.442.824.232,00**							**2.126.576.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah						***1.442.824.232,00***							***2.091.576.000,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	1.442.824.232,00						100 %	2.091.576.000,00	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						312.600.000,00					-		365.000.000,00	
		Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Sesuai Regulasi						312.600.000,00					-		365.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	312.600.000,00						12 Dokumen	365.000.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						312.600.000,00			-	-			365.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	312.600.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	365.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						98.684.000,00					-		142.000.000,00	
		Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Sesuai Standar Peraturan Yang Berlaku						98.684.000,00					-		142.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	18.684.000,00						3 Paket	45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 Orang		6 Orang	21 Orang	80.000.000,00						21 Orang	97.000.000,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						18.684.000,00			-	-			45.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	18.684.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Paket	45.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						80.000.000,00			-	-			97.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 Orang		6 Orang	4 Orang	80.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				21 Orang	97.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						514.476.400,00					-		582.000.000,00	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						514.476.400,00					-		582.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	384.000.000,00						12 Laporan	375.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	56.186.800,00						8 Paket	160.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	44.289.600,00						1 Paket	47.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket		0 Paket	0 Paket	30.000.000,00						0 Paket	0,00	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.000.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket		0 Paket	2 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket	0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						56.186.800,00			-	-			160.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	56.186.800,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Paket	160.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						44.289.600,00			-	-			47.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	44.289.600,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	47.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						384.000.000,00			-	-			375.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	384.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	375.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						30.705.000,00					-		87.000.000,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Dilaksankan Sesuai Standar Regulasi						30.705.000,00					-		87.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		11 Unit	12 Unit	30.705.000,00						12 Unit	87.000.000,00	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.705.000,00			-	-			87.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		11 Unit	12 Unit	30.705.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Unit	87.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						232.774.832,00					-		688.576.000,00	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang						232.774.832,00					-		688.576.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.896.000,00						12 Laporan	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	221.126.832,00						12 Laporan	618.576.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.752.000,00						12 Laporan	35.000.000,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						9.752.000,00			-	-			35.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.752.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	35.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.896.000,00			-	-			35.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.896.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	35.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						221.126.832,00			-	-			618.576.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	221.126.832,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	618.576.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						253.584.000,00					-		262.000.000,00	
		Barang Milik Daerah Yang Terpelihara						253.584.000,00					-		262.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	69.360.000,00						1 Unit	85.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	178.504.000,00						11 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		10 Unit	10 Unit	5.720.000,00						10 Unit	27.000.000,00	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						178.504.000,00			-	-			150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	178.504.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11 Unit	150.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						69.360.000,00			-	-			85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	69.360.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	85.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.720.000,00			-	-			27.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		10 Unit	10 Unit	5.720.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	27.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
196.	**4.01.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**21.482.069.690,00**							**69.300.000.000,00**	
		Meningkatnya Kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat						***21.482.069.690,00***							***67.300.000.000,00***	
			1.Persentase rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yg menjadi dasar kebijakan	100 %		100 %	100 %	21.482.069.690,00						100 %	67.300.000.000,00	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual						14.131.700.000,00					-		41.900.000.000,00	
		Persentase Layanan Pembinaan Mental Spiritual yang difasilitasi						14.131.700.000,00					-		41.900.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	35 Lembaga		30 Lembaga	30 Lembaga	13.781.700.000,00						30 Lembaga	24.000.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	80 Unit		50 Unit	55 Unit	350.000.000,00						60 Unit	17.900.000.000,00	
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual						350.000.000,00			-	-			17.900.000.000,00	
		Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	80 Unit		50 Unit	20 Unit	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60 Unit	17.900.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual						13.781.700.000,00			-	-			24.000.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	35 Lembaga		30 Lembaga	25 Lembaga	13.781.700.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Lembaga	24.000.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar						6.425.369.690,00					-		24.900.000.000,00	
		Persentase Layanan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang difasilitasi						6.425.369.690,00					-		24.900.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	329.741.090,00						6 Dokumen	2.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.795.628.600,00						4 Dokumen	21.500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00						4 Dokumen	1.000.000.000,00	
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan						5.795.628.600,00			-	-			21.500.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	5.795.628.600,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	21.500.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan						329.741.090,00			-	-			2.400.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	6 Dokumen		6 Dokumen	3 Dokumen	329.741.090,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Dokumen	2.400.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial						300.000.000,00			-	-			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	4 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	1.000.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar						925.000.000,00					-		2.500.000.000,00	
		Persentase Layanan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang difasilitasi						925.000.000,00					-		2.500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	470.000.000,00						4 Dokumen	1.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	145.000.000,00						4 Dokumen	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	310.000.000,00						6 Dokumen	1.000.000.000,00	
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata						470.000.000,00			-	-			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	470.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	1.000.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja						310.000.000,00			-	-			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6 Dokumen		6 Dokumen	3 Dokumen	310.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Dokumen	1.000.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan						145.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	145.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	500.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Biro Organisasi						**1.999.994.872,00**							**4.957.288.567,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.999.994.872,00**							**4.957.288.567,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.999.994.872,00**							**4.957.288.567,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
197.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**539.994.872,00**							**1.265.942.070,00**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah						***539.994.872,00***							***1.265.942.070,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	539.994.872,00						100 %	1.265.942.070,00	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						125.000.000,00					-		125.000.000,00	
		Administrasi keuangan pernagkat daerah yang sesuai regulasi						125.000.000,00					-		125.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	125.000.000,00						12 Dokumen	125.000.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						125.000.000,00			-	-			125.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	125.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	125.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						15.000.000,00					-		100.000.000,00	
		Terpenuhinya kelengkapan dokumen administrasi kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						15.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang		25 Orang	25 Orang	15.000.000,00						25 Orang	100.000.000,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						15.000.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang		25 Orang	3 Orang	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Orang	100.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						256.694.872,00					-		847.942.070,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						256.694.872,00					-		847.942.070,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00						12 Laporan	660.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	63.694.872,00						6 Paket	167.442.070,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	18.000.000,00						5 Paket	20.500.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						63.694.872,00			-	-			167.442.070,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	63.694.872,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Paket	167.442.070,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						18.000.000,00			-	-			20.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	18.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Paket	20.500.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						175.000.000,00			-	-			660.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	17 Laporan	175.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	660.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						20.500.000,00					-		50.000.000,00	
		Pengadaan Barang Milik Darah pada pernagkat daerah yang diadakan sesuai standar regulasi						20.500.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		1 Unit	5 Unit	20.500.000,00						3 Unit	50.000.000,00	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.500.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		1 Unit	1 Unit	20.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	50.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						47.500.000,00					-		65.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjag						47.500.000,00					-		65.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00						12 Laporan	62.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00						1 Laporan	3.000.000,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000,00			-	-			3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	3.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						45.000.000,00			-	-			62.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	62.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						75.300.000,00					-		78.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		BMD yang terpelihara						75.300.000,00					-		78.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	22.000.000,00						1 Unit	22.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	33.300.000,00						12 Unit	33.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		15 Unit	20 Unit	20.000.000,00						20 Unit	22.000.000,00	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						33.300.000,00			-	-			33.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	33.300.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Unit	33.500.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						22.000.000,00			-	-			22.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	22.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	22.500.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00			-	-			22.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		15 Unit	20 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Unit	22.000.000,00	Biro Organisasi
198.	**4.01.02**	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**						**1.460.000.000,00**							**3.691.346.497,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah						***940.000.000,00***							***3.691.346.497,00***	
			1.Indeks Kematangan Organisasi	46.10 Indeks		38.90 Indeks	39.01 Indeks	940.000.000,00						41.25 Indeks	3.691.346.497,00	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan						450.000.000,00					-		1.405.000.000,00	
		Indeks Kematangan Organisasi						450.000.000,00					-		1.405.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	5 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00						3 Dokumen	275.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	68 Dokumen		39 Dokumen	45 Dokumen	250.000.000,00						50 Dokumen	650.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	34 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	100.000.000,00						15 Dokumen	480.000.000,00	
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi						100.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			480.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	34 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Dokumen	480.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota						100.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			275.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	5 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	275.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan						250.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	68 Dokumen		39 Dokumen	45 Dokumen	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Dokumen	650.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja						1.010.000.000,00					-		2.286.346.497,00	
		Persentase Implementasi Rencana Aksi RB						1.010.000.000,00					-		2.286.346.497,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	250.000.000,00						34 Dokumen	732.846.497,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	200.000.000,00						34 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	20 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	170.000.000,00						15 Dokumen	292.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	170.000.000,00						1 Laporan	461.000.000,00	
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi						200.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			500.000.000,00	
		Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				34 Dokumen	500.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja						250.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			732.846.497,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				34 Dokumen	732.846.497,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja						170.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			461.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	170.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	461.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan						170.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			292.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	20 Dokumen		10 Dokumen	15 Dokumen	170.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Dokumen	292.500.000,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik						220.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			300.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	220.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	300.000.000,00	Biro Organisasi
		Biro Administrasi Pembangunan						**1.499.999.471,00**							**4.868.295.594,63**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.499.999.471,00**							**4.868.295.594,63**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.499.999.471,00**							**4.868.295.594,63**	
199.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**900.402.971,00**							**2.338.295.594,63**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah						***900.402.971,00***							***2.338.295.594,63***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	900.402.971,00						100 %	2.338.295.594,63	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19.311.000,00					-		25.000.000,00	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi						19.311.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	13 Data		0 Data	13 Data	6.666.400,00						13 Data	7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	12.644.600,00						2 Dokumen	18.000.000,00	
	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						6.666.400,00			-	-			7.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	13 Data		0 Data	13 Data	6.666.400,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13 Data	7.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						12.644.600,00			-	-			18.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	12.644.600,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	18.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						140.280.000,00					-		220.000.000,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Regulasi						140.280.000,00					-		220.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	140.280.000,00						12 Dokumen	220.000.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						140.280.000,00			-	-			220.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	140.280.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	220.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						55.000.000,00					-		234.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						55.000.000,00					-		234.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		0 Paket	3 Paket	0,00						0 Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		10 Orang	10 Orang	55.000.000,00						12 Orang	234.000.000,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket	0,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						55.000.000,00			-	-			234.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		10 Orang	3 Orang	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Orang	234.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						449.781.501,00					-		1.172.795.594,63	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						449.781.501,00					-		1.172.795.594,63	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	230.000.000,00						12 Laporan	720.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	193.683.400,00						9 Paket	402.795.594,63	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	26.098.101,00						1 Paket	50.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						193.683.400,00			-	-			402.795.594,63	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	193.683.400,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9 Paket	402.795.594,63	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						26.098.101,00			-	-			50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	26.098.101,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						230.000.000,00			-	-			720.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	230.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	720.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						30.000.000,00					-		160.000.000,00	
		Pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi						30.000.000,00					-		160.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		2 Unit	7 Unit	30.000.000,00						10 Unit	160.000.000,00	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00			-	-			160.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		2 Unit	7 Unit	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	160.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						47.552.470,00					-		27.500.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						47.552.470,00					-		27.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	31.552.470,00						2 Laporan	7.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	16.000.000,00						2 Laporan	20.000.000,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						16.000.000,00			-	-			20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	16.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	20.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						31.552.470,00			-	-			7.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	31.552.470,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	7.500.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						158.478.000,00					-		499.000.000,00	
		BMD yang terpelihara						158.478.000,00					-		499.000.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	97.747.000,00						5 Unit	270.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	46.531.000,00						13 Unit	101.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		20 Unit	25 Unit	14.200.000,00						25 Unit	28.000.000,00	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						46.531.000,00			-	-			101.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit		13 Unit	1 Unit	46.531.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13 Unit	101.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						97.747.000,00			-	-			270.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	18 Unit	97.747.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Unit	270.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						14.200.000,00			-	-			28.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		20 Unit	20 Unit	14.200.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Unit	28.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						0,00			-	-			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	100.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
200.	**4.01.08**	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**						**599.596.500,00**							**2.530.000.000,00**	
		Meningkatnya Kebijakan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Daerah						***599.596.500,00***							***2.100.000.000,00***	
			1.Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Menjadi Dasar Kebijakan	100 %		100 %	100 %	599.596.500,00						100 %	2.100.000.000,00	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah						394.581.300,00					-		1.390.000.000,00	
		Tersedianya Rumusan Kebijakan dibidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah						394.581.300,00					-		1.390.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	124.138.800,00						1 Laporan	430.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	36.172.500,00						1 Laporan	430.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	234.270.000,00						2 Laporan	530.000.000,00	
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD						124.138.800,00			-	-			430.000.000,00	
		Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	124.138.800,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	430.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN						36.172.500,00			-	-			430.000.000,00	
		Terkendalianya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	36.172.500,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	430.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah						234.270.000,00			-	-			530.000.000,00	
		Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	234.270.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	530.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						205.015.200,00					-		1.140.000.000,00	
		Tersedianya Rumusan Kebijakan dibidang Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						205.015.200,00					-		1.140.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	46.603.600,00						1 Dokumen	320.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	51.645.200,00						1 Dokumen	360.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	106.766.400,00						1 Laporan	460.000.000,00	
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah						46.603.600,00			-	-			320.000.000,00	
		Tersedianya Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	46.603.600,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	320.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						106.766.400,00			-	-			460.000.000,00	
		Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	106.766.400,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah						51.645.200,00			-	-			360.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	51.645.200,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	360.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Biro Umum						**109.588.151.890,00**							**125.391.526.278,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**109.588.151.890,00**							**125.391.526.278,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**109.588.151.890,00**							**125.391.526.278,00**	
201.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**109.588.151.890,00**							**125.391.526.278,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Internal						***109.238.151.890,00***							***125.341.526.278,00***	
			1.Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Umum	87.20 Nilai		86.80 Nilai	86.90 Nilai	109.238.151.890,00						87 Nilai	125.341.526.278,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00					-		50.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai Standar Regulasi						5.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data		0 Data	0 Data	5.000.000,00						3 Data	50.000.000,00	
	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						5.000.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data		0 Data	1 Data	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Data	50.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						60.747.727.088,00					-		56.985.379.924,00	
		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Regulasi						60.747.727.088,00					-		56.985.379.924,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	647.280.000,00						12 Dokumen	1.284.296.700,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/ Bulan		462 Orang/ Bulan	462 Orang/ Bulan	60.100.447.088,00						462 Orang/ Bulan	55.701.083.224,00	
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						60.100.447.088,00			-	-			55.701.083.224,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/ Bulan		462 Orang/ Bulan	421 Orang/ Bulan	60.100.447.088,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				462 Orang/ Bulan	55.701.083.224,00	Biro Umum
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						647.280.000,00			-	-			1.284.296.700,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	647.280.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	1.284.296.700,00	Biro Umum
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						30.000.000,00					-		50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Terkelola sesuai Regulasi						30.000.000,00					-		50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00						12 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00						0 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00						0 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						5.000.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	0,00	Biro Umum
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						5.000.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	50.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						5.000.000,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	0,00	Biro Umum
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						5.000.000,00			-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	0,00	Biro Umum
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						5.000.000,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	0,00	Biro Umum
	4.01.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						5.000.000,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	0,00	Biro Umum
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						380.579.000,00					-		837.894.720,00	
		Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai Standar Peraturan yang Berlaku						380.579.000,00					-		837.894.720,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	200.000.000,00						100 Orang	231.140.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	80.579.000,00						4 Paket	142.914.720,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang		26 Orang	26 Orang	100.000.000,00						26 Orang	463.840.000,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						80.579.000,00			-	-			142.914.720,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	80.579.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	142.914.720,00	Biro Umum
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100.000.000,00			-	-			463.840.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang		26 Orang	26 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				26 Orang	463.840.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						200.000.000,00			-	-			231.140.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	150 Orang	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Orang	231.140.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						11.121.905.322,00					-		18.687.847.655,00	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						11.121.905.322,00					-		18.687.847.655,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	12.768.227,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 Laporan		200 Laporan	200 Laporan	1.600.007.500,00						200 Laporan	1.785.007.875,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.020.595.852,00						12 Laporan	15.307.053.350,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00						4 Paket	742.128.031,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	103.000.000,00						10 Paket	212.053.292,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	173.900.000,00						10 Paket	195.204.880,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	964.401.970,00						6 Paket	171.132.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	250.000.000,00						8 Paket	262.500.000,00	
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						173.900.000,00			-	-			195.204.880,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	173.900.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Paket	195.204.880,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						964.401.970,00			-	-			171.132.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	10 Paket	964.401.970,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Paket	171.132.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						250.000.000,00			-	-			262.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	6 Paket	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Paket	262.500.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.000.000,00			-	-			742.128.031,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	742.128.031,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						103.000.000,00			-	-			212.053.292,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	103.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Paket	212.053.292,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.600.007.500,00			-	-			1.785.007.875,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 Laporan		200 Laporan	200 Laporan	1.600.007.500,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200 Laporan	1.785.007.875,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						8.020.595.852,00			-	-			15.307.053.350,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.020.595.852,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	15.307.053.350,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.000.000,00			-	-			12.768.227,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	12.768.227,00	Biro Umum
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						2.373.424.400,00					-		3.441.906.644,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai Standar Regulasi						2.373.424.400,00					-		3.441.906.644,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00						1 Paket	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		4 Unit	4 Unit	846.668.400,00						3 Unit	461.666.644,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	50.000.000,00						2 Unit	588.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.466.756.000,00						1 Unit	559.440.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	3 Unit	5.000.000,00						4 Unit	1.822.800.000,00	
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.466.756.000,00			-	-			559.440.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	6 Unit	1.466.756.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	559.440.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00			-	-			588.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	588.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						5.000.000,00			-	-			10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	10.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00			-	-			1.822.800.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	1.822.800.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						846.668.400,00			-	-			461.666.644,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		4 Unit	4 Unit	846.668.400,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	461.666.644,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						5.661.117.772,00					-		6.638.378.353,00	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang						5.661.117.772,00					-		6.638.378.353,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.400.000.123,00						12 Laporan	2.625.000.129,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.219.518.679,00						12 Laporan	2.598.664.266,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	841.038.970,00						12 Laporan	1.206.193.958,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	200.560.000,00						2 Laporan	208.520.000,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						200.560.000,00			-	-			208.520.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	200.560.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	208.520.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.400.000.123,00			-	-			2.625.000.129,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.400.000.123,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	2.625.000.129,00	Biro Umum
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						841.038.970,00			-	-			1.206.193.958,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	841.038.970,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	1.206.193.958,00	Biro Umum
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.219.518.679,00			-	-			2.598.664.266,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.219.518.679,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	2.598.664.266,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						11.646.422.590,00					-		15.401.922.915,00	
		Terpenuhinya Barang Milik Daerah yang Terpelihara						11.646.422.590,00					-		15.401.922.915,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	3.061.706.350,00						2 Unit	3.109.791.668,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit		39 Unit	39 Unit	6.671.855.540,00						39 Unit	9.122.729.762,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	842.225.000,00						12 Unit	1.679.834.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	264 Unit		264 Unit	264 Unit	1.070.635.700,00						264 Unit	1.489.567.485,00	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						842.225.000,00			-	-			1.679.834.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	842.225.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Unit	1.679.834.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						6.671.855.540,00			-	-			9.122.729.762,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit		39 Unit	39 Unit	6.671.855.540,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				39 Unit	9.122.729.762,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.070.635.700,00			-	-			1.489.567.485,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	264 Unit		264 Unit	264 Unit	1.070.635.700,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				264 Unit	1.489.567.485,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						3.061.706.350,00			-	-			3.109.791.668,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	3.061.706.350,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	3.109.791.668,00	Biro Umum
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						2.451.676.908,00					-		2.953.234.183,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Regulasi						2.451.676.908,00					-		2.953.234.183,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan		2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	1.599.797.196,00						2 Orang/ Bulan	1.663.789.084,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	251.879.712,00						2 Orang/Bulan	259.436.103,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang		2 Orang	2 Orang	300.000.000,00						2 Orang	515.002.725,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	300.000.000,00						2 Paket	515.006.271,00	
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						251.879.712,00			-	-			259.436.103,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	251.879.712,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Orang/Bulan	259.436.103,00	Biro Umum
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						300.000.000,00			-	-			515.006.271,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	515.006.271,00	Biro Umum
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						300.000.000,00			-	-			515.002.725,00	
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang		2 Orang	2 Orang	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Orang	515.002.725,00	Biro Umum
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.599.797.196,00			-	-			1.663.789.084,00	
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan		2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	1.599.797.196,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Orang/ Bulan	1.663.789.084,00	Biro Umum
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						15.170.298.810,00					-		20.344.961.884,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						15.170.298.810,00					-		20.344.961.884,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	250 Paket		250 Paket	250 Paket	5.209.298.270,00						250 Paket	6.760.049.306,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	250 Paket		250 Paket	250 Paket	4.855.000.440,00						250 Paket	6.912.272.427,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	200 Paket		200 Paket	200 Paket	5.106.000.100,00						200 Paket	6.672.640.151,00	
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						5.209.298.270,00			-	-			6.760.049.306,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	250 Paket		250 Paket	250 Paket	5.209.298.270,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250 Paket	6.760.049.306,00	Biro Umum
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						5.106.000.100,00			-	-			6.672.640.151,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	200 Paket		200 Paket	200 Paket	5.106.000.100,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200 Paket	6.672.640.151,00	Biro Umum
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah TanggaSekretariat Daerah						4.855.000.440,00			-	-			6.912.272.427,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	250 Paket		250 Paket	250 Paket	4.855.000.440,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250 Paket	6.912.272.427,00	Biro Umum
		Biro Pengadaan Barang dan Jasa						**1.499.991.500,00**							**4.438.216.834,27**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.499.991.500,00**							**4.438.216.834,27**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.499.991.500,00**							**4.438.216.834,27**	
202.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**600.052.700,00**							**1.673.898.920,60**	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah						***600.052.700,00***							***1.673.898.920,60***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	600.052.700,00						100 %	1.673.898.920,60	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						140.760.000,00					-		256.419.525,00	
		Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						140.760.000,00					-		256.419.525,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	140.760.000,00						12 Dokumen	256.419.525,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						140.760.000,00			-	-			256.419.525,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	140.760.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	256.419.525,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						66.984.000,00					-		260.225.000,00	
		Terpenuhinya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						66.984.000,00					-		260.225.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	51.984.000,00						2 Paket	94.350.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	15.000.000,00						30 Orang	165.875.000,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						51.984.000,00			-	-			94.350.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	51.984.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	94.350.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						15.000.000,00			-	-			165.875.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Orang	165.875.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						192.886.700,00					-		810.551.895,60	
		Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						192.886.700,00					-		810.551.895,60	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00						12 Laporan	666.310.306,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	17.886.700,00						10 Paket	144.241.589,60	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						17.886.700,00			-	-			144.241.589,60	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	17.886.700,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Paket	144.241.589,60	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						175.000.000,00			-	-			666.310.306,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	666.310.306,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						60.000.000,00					-		193.375.000,00	
		Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						60.000.000,00					-		193.375.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		5 Unit	6 Unit	60.000.000,00						8 Unit	193.375.000,00	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						60.000.000,00			-	-			193.375.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		5 Unit	6 Unit	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Unit	193.375.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						139.422.000,00					-		153.327.500,00	
		Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						139.422.000,00					-		153.327.500,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	44.536.000,00						1 Unit	46.287.500,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit		18 Unit	18 Unit	67.466.000,00						18 Unit	84.350.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	25 Unit	27.420.000,00						25 Unit	22.690.000,00	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						67.466.000,00			-	-			84.350.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit		18 Unit	18 Unit	67.466.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18 Unit	84.350.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						44.536.000,00			-	-			46.287.500,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	44.536.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	46.287.500,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						27.420.000,00			-	-			22.690.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	25 Unit	27.420.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Unit	22.690.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
203.	**4.01.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**						**899.938.800,00**							**2.764.317.913,67**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa						***699.940.400,00***							***2.361.317.913,67***	
			1.Tingkat Pemanfaatan Sistem Pengadaan	19.50 %		19.30 %	15,50 %	699.940.400,00						19.35 %	2.361.317.913,67	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.Tingkat Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	30.00 %		30.00 %	25,00 %	699.940.400,00						30.00 %	2.361.317.913,67	
			3.Tingkat Kematangan UKPBJ	40.00 %		40.00 %	21,00 %	699.940.400,00						40.00 %	2.361.317.913,67	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						299.997.600,00					-		1.231.000.000,00	
		Meningkatkan pemanfaatan sistem pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa						299.997.600,00					-		1.231.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	99.999.200,00						12 Laporan	403.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	99.999.200,00						4 Laporan	403.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	8 Laporan		4 Laporan	6 Laporan	99.999.200,00						6 Laporan	425.000.000,00	
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa						99.999.200,00			-	-			425.000.000,00	
		Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	8 Laporan		4 Laporan	6 Laporan	99.999.200,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Laporan	425.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa						99.999.200,00			-	-			403.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	99.999.200,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	403.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa						99.999.200,00			-	-			403.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	99.999.200,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	403.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						289.964.400,00					-		491.050.000,67	
		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa						289.964.400,00					-		491.050.000,67	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	170.000.000,00						5 Laporan	253.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	119.964.400,00						4 Laporan	238.050.000,67	
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik						170.000.000,00			-	-			253.000.000,00	
		Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	170.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Laporan	253.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa						119.964.400,00			-	-			238.050.000,67	
		Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	119.964.400,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	238.050.000,67	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						309.976.800,00					-		1.042.267.913,00	
		Meningkatnya pembinaan penyelenggara dan pelaku pengadaan barang dan jasa serta kematangan UKPBJ						309.976.800,00					-		1.042.267.913,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	99.791.800,00						4 Dokumen	290.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	103.570.000,00						3 Dokumen	240.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang		300 Orang	300 Orang	106.615.000,00						300 Orang	512.267.913,00	
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa						106.615.000,00			-	-			512.267.913,00	
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang		300 Orang	300 Orang	106.615.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300 Orang	512.267.913,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa						103.570.000,00			-	-			240.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	103.570.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	240.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa						99.791.800,00			-	-			290.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	99.791.800,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	290.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Biro Administrasi Pimpinan						**4.999.999.420,00**							**9.170.043.551,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.999.999.420,00**							**9.170.043.551,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**4.999.999.420,00**							**9.170.043.551,00**	
204.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**4.999.999.420,00**							**9.170.043.551,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Internal						***4.999.999.420,00***							***9.035.043.551,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pimpinan	87.25 %		86.75 %	86.88 %	4.999.999.420,00						87.00 %	9.035.043.551,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						245.389.800,00					-		286.487.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						245.389.800,00					-		286.487.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	245.389.800,00						6 Dokumen	286.487.000,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						245.389.800,00			-	-			286.487.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	245.389.800,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Dokumen	286.487.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						266.640.000,00					-		356.840.003,00	
		Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						266.640.000,00					-		356.840.003,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	266.640.000,00						12 Dokumen	356.840.003,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						266.640.000,00			-	-			356.840.003,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	266.640.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	356.840.003,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						150.000.000,00					-		250.500.000,00	
		Terpenuhinya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						150.000.000,00					-		250.500.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang		20 Orang	20 Orang	150.000.000,00						25 Orang	250.500.000,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						150.000.000,00			-	-			250.500.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang		20 Orang	10 Orang	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Orang	250.500.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.019.235.100,00					-		2.226.241.090,00	
		Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.019.235.100,00					-		2.226.241.090,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	401.000.000,00						12 Laporan	1.129.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	184.484.700,00						7 Paket	324.120.409,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	112.275.000,00						9 Paket	183.100.125,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	8.900.000,00						4 Paket	9.900.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	305.380.000,00						6 Paket	553.000.147,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.195.400,00						4 Paket	27.120.409,00	
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.900.000,00			-	-			9.900.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	8.900.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	9.900.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						305.380.000,00			-	-			553.000.147,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	305.380.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Paket	553.000.147,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.195.400,00			-	-			27.120.409,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.195.400,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	27.120.409,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						184.484.700,00			-	-			324.120.409,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	184.484.700,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7 Paket	324.120.409,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						112.275.000,00			-	-			183.100.125,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	112.275.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9 Paket	183.100.125,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						401.000.000,00			-	-			1.129.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	401.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	1.129.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						69.865.000,00					-		135.000.000,00	
		Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah						69.865.000,00					-		135.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit		9 Unit	9 Unit	69.865.000,00						9 Unit	135.000.000,00	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						69.865.000,00			-	-			135.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit		9 Unit	9 Unit	69.865.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9 Unit	135.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						426.926.720,00					-		1.072.500.408,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						426.926.720,00					-		1.072.500.408,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.200.000,00						12 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	380.196.720,00						12 Laporan	985.000.408,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	29.530.000,00						12 Laporan	52.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00						12 Laporan	20.000.000,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000,00			-	-			20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	20.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.200.000,00			-	-			15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.200.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	15.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						29.530.000,00			-	-			52.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	29.530.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	52.500.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						380.196.720,00			-	-			985.000.408,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	380.196.720,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	985.000.408,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						209.005.600,00					-		202.025.050,00	
		Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						209.005.600,00					-		202.025.050,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	11 Unit	167.825.600,00						10 Unit	135.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	12.380.000,00						2 Unit	18.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	25 Unit	28.800.000,00						25 Unit	49.025.050,00	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						12.380.000,00			-	-			18.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	12.380.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	18.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						167.825.600,00			-	-			135.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	11 Unit	167.825.600,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	135.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						28.800.000,00			-	-			49.025.050,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	25 Unit	28.800.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Unit	49.025.050,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan						801.675.200,00					-		1.720.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan						801.675.200,00					-		1.720.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	165.275.200,00						12 Dokumen	380.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	294.060.000,00						12 Laporan	590.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	342.340.000,00						12 Laporan	750.000.000,00	
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan						165.275.200,00			-	-			380.000.000,00	
		Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	165.275.200,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	380.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						294.060.000,00			-	-			590.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	294.060.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	590.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan						342.340.000,00			-	-			750.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	342.340.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	750.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan						1.811.262.000,00					-		2.920.450.000,00	
		Tersusunnya Laporan Fasilitasi Keprotokolan						1.811.262.000,00					-		2.920.450.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	399.500.000,00						12 Laporan	913.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	238.000.000,00						12 Laporan	720.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.173.762.000,00						12 Laporan	1.286.950.000,00	
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara						399.500.000,00			-	-			913.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	399.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	913.500.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						238.000.000,00			-	-			720.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	238.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	720.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan						1.173.762.000,00			-	-			1.286.950.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.173.762.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	1.286.950.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
		Biro Perekonomian						**1.698.847.000,00**							**4.567.105.683,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.698.847.000,00**							**4.567.105.683,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.698.847.000,00**							**4.567.105.683,00**	
205.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**677.520.000,00**							**1.340.358.621,00**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah						***677.520.000,00***							***1.340.358.621,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	677.520.000,00						100 %	1.340.358.621,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00					-		21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi						10.000.000,00					-		21.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		Data	10 Data	7.000.000,00						10 Data	13.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00						1 Dokumen	8.000.000,00	
	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						7.000.000,00			-	-			13.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		Data	10 Data	7.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Data	13.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						3.000.000,00			-	-			8.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	8.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						118.560.000,00					-		142.560.000,00	
		Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						118.560.000,00					-		142.560.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	118.560.000,00						12 Dokumen	142.560.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						118.560.000,00			-	-			142.560.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	118.560.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Dokumen	142.560.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						75.000.000,00					-		300.000.000,00	
		Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						75.000.000,00					-		300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang		10 Orang	35 Orang	75.000.000,00						35 Orang	300.000.000,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						75.000.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang		10 Orang	8 Orang	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				35 Orang	300.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						223.102.656,00					-		558.236.254,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						223.102.656,00					-		558.236.254,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	188.000.000,00						12 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	20.102.656,00						7 Paket	187.026.254,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00						1 Paket	21.210.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.102.656,00			-	-			187.026.254,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	5 Paket	20.102.656,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				7 Paket	187.026.254,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00			-	-			21.210.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	21.210.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						188.000.000,00			-	-			350.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	188.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	350.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						30.681.000,00					-		102.000.000,00	
		Pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi						30.681.000,00					-		102.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit		2 Unit	13 Unit	30.681.000,00						10 Unit	102.000.000,00	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.681.000,00			-	-			102.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit		2 Unit	2 Unit	30.681.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Unit	102.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						69.856.944,00					-		89.870.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						69.856.944,00					-		89.870.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.776.000,00						1 Laporan	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	65.380.944,00						12 Laporan	76.620.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.700.000,00						2 Laporan	9.250.000,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.700.000,00			-	-			9.250.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.700.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Laporan	9.250.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.776.000,00			-	-			4.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.776.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	4.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						65.380.944,00			-	-			76.620.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	65.380.944,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	76.620.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						150.319.400,00					-		126.692.367,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		BMD yang terpelihara						150.319.400,00					-		126.692.367,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		Unit	2 Unit	65.642.800,00						2 Unit	74.510.367,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit		16 Unit	14 Unit	73.926.600,00						14 Unit	39.402.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		6 Unit	6 Unit	10.750.000,00						7 Unit	12.780.000,00	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						73.926.600,00			-	-			39.402.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit		16 Unit	14 Unit	73.926.600,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Unit	39.402.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						65.642.800,00			-	-			74.510.367,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		Unit	2 Unit	65.642.800,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Unit	74.510.367,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.750.000,00			-	-			12.780.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		6 Unit	10 Unit	10.750.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				7 Unit	12.780.000,00	Biro Perekonomian
206.	**4.01.06**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**1.021.327.000,00**							**3.226.747.062,00**	
		Meningkatnya kebijakan di bidang pengelolaan perekonomian						***965.127.000,00***							***3.226.747.062,00***	
			1.Persentase rumusan kebijakan perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan	100 %		100 %	100 %	965.127.000,00						100 %	3.226.747.062,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian						318.740.000,00					-		913.005.767,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian						318.740.000,00					-		913.005.767,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	225.380.000,00						1 Dokumen	636.267.873,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	93.360.000,00						2 Dokumen	276.737.894,00	
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro						225.380.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			636.267.873,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	225.380.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	636.267.873,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro						93.360.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			276.737.894,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	93.360.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	276.737.894,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam						229.939.000,00					-		791.628.014,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam						229.939.000,00					-		791.628.014,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	99.919.000,00						1 Dokumen	250.306.327,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	56.200.000,00						1 Dokumen	191.813.438,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	73.820.000,00						1 Dokumen	349.508.249,00	
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						73.820.000,00			-	-			349.508.249,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	73.820.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	349.508.249,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						56.200.000,00			-	-			191.813.438,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	56.200.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	191.813.438,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						99.919.000,00			-	-			250.306.327,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	99.919.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	250.306.327,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD						472.648.000,00					-		1.522.113.281,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD						472.648.000,00					-		1.522.113.281,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.448.000,00						1 Dokumen	157.160.349,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	235.000.000,00						1 Dokumen	159.069.047,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	56.200.000,00						1 Dokumen	268.986.340,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00						1 Dokumen	530.466.794,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	74.000.000,00						1 Dokumen	406.430.751,00	
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha						74.000.000,00			-	-			406.430.751,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	74.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	406.430.751,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi						90.000.000,00			-	-			530.466.794,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	530.466.794,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD						235.000.000,00			-	-			159.069.047,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	235.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	159.069.047,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah						56.200.000,00			-	-			268.986.340,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	56.200.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	268.986.340,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD						17.448.000,00			-	-			157.160.349,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.448.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	157.160.349,00	Biro Perekonomian
		Sekretariat DPRD						**96.007.493.626,00**							**143.062.328.237,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**96.007.493.626,00**							**143.062.328.237,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**96.007.493.626,00**							**143.062.328.237,00**	
207.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**52.384.686.626,00**							**72.564.942.322,00**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah						***50.934.686.626,00***							***64.814.942.322,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	90 %		82 %	84 %	50.934.686.626,00						86 %	64.814.942.322,00	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						123.000.000,00					Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara		550.000.000,00	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi						123.000.000,00					Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara		550.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		3 Dokumen	4 Dokumen	123.000.000,00						4 Dokumen	550.000.000,00	
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						123.000.000,00			-	-			550.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	123.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Dokumen	550.000.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.151.545.456,00					Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara		17.400.000.000,00	
		Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						12.151.545.456,00					Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara		17.400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	150 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	110.000.000,00						100 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	541.545.456,00						12 Dokumen	750.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	161 Orang/ Bulan		100 Orang/ Bulan	155 Orang/ Bulan	11.500.000.000,00						157 Orang/ Bulan	16.500.000.000,00	
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.500.000.000,00			-	-			16.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	161 Orang/ Bulan		100 Orang/ Bulan	100 Orang/ Bulan	11.500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				157 Orang/ Bulan	16.500.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						541.545.456,00			-	-			750.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	541.545.456,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Dokumen	750.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						110.000.000,00			-	-			150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	150 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	110.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Dokumen	150.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						150.000.000,00					Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara		500.000.000,00	
		Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						150.000.000,00					Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara		500.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang		50 Orang	145 Orang	150.000.000,00						147 Orang	500.000.000,00	
	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						150.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang		50 Orang	10 Orang	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				147 Orang	500.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.519.915.000,00					Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara		6.730.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						3.519.915.000,00					Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara		6.730.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	24.920.000,00						30 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan		95 Laporan	200 Laporan	300.000.000,00						200 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		10 Paket	12 Paket	1.300.000.000,00						12 Paket	2.500.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	150.000.000,00						12 Paket	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket		50 Paket	100 Paket	545.010.000,00						100 Paket	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket		30 Paket	50 Paket	1.000.000.000,00						50 Paket	2.500.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	199.985.000,00						20 Paket	200.000.000,00	
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						545.010.000,00			-	-			250.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket		50 Paket	10 Paket	545.010.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				100 Paket	250.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.000.000.000,00			-	-			2.500.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket		30 Paket	20 Paket	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				50 Paket	2.500.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						199.985.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	199.985.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				20 Paket	200.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.300.000.000,00			-	-			2.500.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		10 Paket	48 Paket	1.300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Paket	2.500.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						150.000.000,00			-	-			250.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Paket	250.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						24.920.000,00			-	-			30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	50 Dokumen	24.920.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				30 Dokumen	30.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						300.000.000,00			-	-			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan		95 Laporan	76 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				200 Laporan	1.000.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						6.835.972.000,00					Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara		9.520.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						6.835.972.000,00					Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara		9.520.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	3.000.000.000,00						36 Laporan	4.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.500.000.000,00						12 Laporan	4.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	300.000.000,00						4 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 Laporan		3000 Laporan	2000 Laporan	35.972.000,00						2000 Laporan	20.000.000,00	
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						35.972.000,00			-	-			20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 Laporan		3000 Laporan	3000 Laporan	35.972.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				2000 Laporan	20.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						3.000.000.000,00			-	-			4.500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	3.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				36 Laporan	4.500.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						300.000.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	6 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Laporan	500.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.500.000.000,00			-	-			4.500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	4.500.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.771.152.100,00					Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara		9.264.942.322,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		BMD yang terpelihara						2.771.152.100,00					Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara		9.264.942.322,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.071.152.100,00						1 Unit	7.000.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	45 Unit		44 Unit	45 Unit	700.000.000,00						45 Unit	2.264.942.322,00	
	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						700.000.000,00			-	-			2.264.942.322,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	45 Unit		44 Unit	44 Unit	700.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				45 Unit	2.264.942.322,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2.071.152.100,00			-	-			7.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.071.152.100,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	7.000.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						25.833.102.070,00					DPRD Provinsi Kalimantan Utara		27.400.000.000,00	
		Terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD						25.833.102.070,00					DPRD Provinsi Kalimantan Utara		27.400.000.000,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang/ Bulan		35 Orang/ Bulan	35 Orang/ Bulan	24.533.202.070,00						35 Orang/ Bulan	25.000.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang		35 Orang	35 Orang	800.000.000,00						35 Orang	1.500.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 Paket		150 Paket	150 Paket	499.900.000,00						150 Paket	900.000.000,00	
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						24.533.202.070,00			-	-			25.000.000.000,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang/ Bulan		35 Orang/ Bulan	35 Orang/ Bulan	24.533.202.070,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				35 Orang/ Bulan	25.000.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						499.900.000,00			-	-			900.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 Paket		150 Paket	140 Paket	499.900.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				150 Paket	900.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						800.000.000,00			-	-			1.500.000.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang		35 Orang	35 Orang	800.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				35 Orang	1.500.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD						1.000.000.000,00					DPRD Provinsi Kalimantan Utara		1.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya kualitas layanan administrasi DPRD						1.000.000.000,00					DPRD Provinsi Kalimantan Utara		1.200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00						12 Laporan	1.200.000.000,00	
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						1.000.000.000,00			-	-			1.200.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				12 Laporan	1.200.000.000,00	Sekretariat DPRD
208.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**43.622.807.000,00**							**70.497.385.915,00**	
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan fasilitasi DPRD dalam pembahasan anggaran daerah dan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah						***29.290.997.000,00***							***35.950.000.000,00***	
			1.Persentase Fasilitasi Kegiatan Pembahasan APBD	100 %		100 %	100 %	13.200.000.000,00						100 %	22.450.000.000,00	
			2.Persentase Fasilitasi Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pemerintah Daerah	100 %		100 %	100 %	13.200.000.000,00						100 %	22.450.000.000,00	
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						800.000.000,00					DPRD Provinsi Kalimantan Utara		2.700.000.000,00	
		Terlaksananya proses pembahasan kebijakan anggaran yang efektif dan berkualitas dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Utara						800.000.000,00					DPRD Provinsi Kalimantan Utara		2.700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	800.000.000,00						5 Dokumen	2.700.000.000,00	
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS						800.000.000,00			-	-			2.700.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	800.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Dokumen	2.700.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						900.000.000,00					DPRD Provinsi Kalimantan Utara		1.750.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dalam mendukung fungsi pengawasan DPRD Provinsi Kalimantan Utara						900.000.000,00					DPRD Provinsi Kalimantan Utara		1.750.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00						12 Laporan	750.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00						1 Dokumen	1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						500.000.000,00			-	-			750.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Pendapatan dari Pengembalian				12 Laporan	750.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah						400.000.000,00			-	-			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Pendapatan dari Pengembalian				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif						5.102.552.000,00					DPRD Provinsi Kalimantan Utara		8.050.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	1.200.000.000,00						6 Dokumen	3.500.000.000,00	
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						1.200.000.000,00			-	-			3.500.000.000,00	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen		6 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Dokumen	3.500.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						22.488.445.000,00					DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan Masyarakat		30.450.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat secara efektif sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Utara						22.488.445.000,00					DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan Masyarakat		30.450.000.000,00	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	105 Dokumen		105 Dokumen	105 Dokumen	10.300.000.000,00						105 Dokumen	14.500.000.000,00	
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses						10.300.000.000,00			-	-			14.500.000.000,00	
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	105 Dokumen		105 Dokumen	105 Dokumen	10.300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)				105 Dokumen	14.500.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan fasilitasi fungsi legislasi DPRD						***40.822.807.000,00***							***58.647.385.915,00***	
			1.Persentase Ranperda yang difasilitasi sesuai tahapan	100 %		100 %	100 %	29.322.807.000,00						100 %	44.147.385.915,00	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD						7.731.810.000,00					DPRD Provinsi Kalimantan Utara		12.350.849.750,00	
		Tersedianya dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang komprehensif						7.731.810.000,00					DPRD Provinsi Kalimantan Utara		12.350.849.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000.000,00						5 Dokumen	2.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	81.810.000,00						4 Dokumen	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000.000,00						5 Dokumen	1.650.849.750,00	
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	10500 Orang		10500 Orang	10500 Orang	5.600.000.000,00						10500 Orang	8.500.000.000,00	
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah						81.810.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	81.810.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	100.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda						1.000.000.000,00			-	-			2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	5 Dokumen		5 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Pendapatan dari Pengembalian				5 Dokumen	2.000.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik						1.000.000.000,00			-	-			1.650.849.750,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen		5 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Dokumen	1.650.849.750,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD						50.000.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	100.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah						5.600.000.000,00			-	-			8.500.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	10500 Orang		10500 Orang	15.750 Orang	5.600.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10500 Orang	8.500.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						5.102.552.000,00					DPRD Provinsi Kalimantan Utara		8.050.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif						5.102.552.000,00					DPRD Provinsi Kalimantan Utara		8.050.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	600 Dokumen		600 Dokumen	500 Dokumen	3.000.000.000,00						600 Dokumen	3.500.000.000,00	
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 Orang		12 Orang	12 Orang	502.400.000,00						12 Orang	550.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	12 Orang		7 Orang	12 Orang	400.152.000,00						12 Orang	500.000.000,00	
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						502.400.000,00			-	-			550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 Orang		12 Orang	13 Orang	502.400.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Orang	550.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						400.152.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	12 Orang		7 Orang	7 Orang	400.152.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Orang	500.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD						3.000.000.000,00			-	-			3.500.000.000,00	
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	600 Dokumen		600 Dokumen	500 Dokumen	3.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				600 Dokumen	3.500.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat secara efektif sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Utara						22.488.445.000,00					DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan Masyarakat		30.450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3112 Laporan		3000 Laporan	3112 Laporan	9.000.000.000,00						3112 Laporan	12.450.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	10500 Orang		8750 Orang	10500 Orang	3.188.445.000,00						10500 Orang	3.500.000.000,00	
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah						9.000.000.000,00			-	-			12.450.000.000,00	
		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3112 Laporan		3000 Laporan	3000 Laporan	9.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				3112 Laporan	12.450.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah						3.188.445.000,00			-	-			3.500.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	10500 Orang		8750 Orang	8750 Orang	3.188.445.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10500 Orang	3.500.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD						6.600.000.000,00					DPRD Provinsi Kalimantan Utara		15.196.536.165,00	
		Terlaksananya fasilitasi tugas-tugas DPRD Provinsi Kalimantan Utara secara efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan						6.600.000.000,00					DPRD Provinsi Kalimantan Utara		15.196.536.165,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00						12 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1278 Dokumen		628 Dokumen	1200 Dokumen	6.500.000.000,00						1250 Dokumen	14.596.536.165,00	
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	96 Laporan		96 Laporan	96 Laporan	50.000.000,00						96 Laporan	300.000.000,00	
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						6.500.000.000,00			-	-			14.596.536.165,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1278 Dokumen		628 Dokumen	628 Dokumen	6.500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1250 Dokumen	14.596.536.165,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						50.000.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	96 Laporan		96 Laporan	75 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				96 Laporan	300.000.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						50.000.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	300.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah						**18.413.925.066,00**							**29.037.071.012,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**18.413.925.066,00**							**29.037.071.012,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**17.463.939.466,00**							**27.527.071.012,00**	
209.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**15.046.594.807,00**							**18.204.700.712,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah						***15.016.594.807,00***							***18.204.700.712,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	15.016.594.807,00						100 %	18.204.700.712,00	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						27.961.800,00					ASN Lingkup Bapperida Prov. Kalimantan Utara, Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Utara dan Masyarakat		380.000.000,00	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi						27.961.800,00					ASN Lingkup Bapperida Prov. Kalimantan Utara, Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Utara dan Masyarakat		380.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	15.900.000,00						2 Dokumen	95.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	12.061.800,00						17 Laporan	285.000.000,00	
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15.900.000,00			-	-			95.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	15.900.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	95.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						12.061.800,00			-	-			285.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	12.061.800,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				17 Laporan	285.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.446.070.559,00					ASN Lingkup Bapperida Prov. Kalimantan Utara		13.454.076.712,00	
		Terpenuhinya layanan Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						12.446.070.559,00					ASN Lingkup Bapperida Prov. Kalimantan Utara		13.454.076.712,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	520.880.000,00						1 Dokumen	685.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/ Bulan		84 Orang/ Bulan	84 Orang/ Bulan	11.925.190.559,00						84 Orang/ Bulan	12.769.076.712,00	
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.925.190.559,00			-	-			12.769.076.712,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/ Bulan		84 Orang/ Bulan	84 Orang/ Bulan	11.925.190.559,00	Provinsi Kalimantan Utara	Pajak Daerah				84 Orang/ Bulan	12.769.076.712,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						520.880.000,00			-	-			685.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	520.880.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	685.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						192.400.000,00					ASN Lingkup Bapperida Prov. Kalimantan Utara dan Perangkat Daerah Lingkup Prov. Kalimantan Utara		680.000.000,00	
		Terpenuhinya layanan Administrasi Kepegawaian PD yang sesuai standar regulasi						192.400.000,00					ASN Lingkup Bapperida Prov. Kalimantan Utara dan Perangkat Daerah Lingkup Prov. Kalimantan Utara		680.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang		30 Orang	40 Orang	47.400.000,00						40 Orang	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket		70 Paket	70 Paket	30.000.000,00						70 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang		20 Orang	35 Orang	115.000.000,00						35 Orang	350.000.000,00	
	5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						30.000.000,00			-	-			30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket		70 Paket	74 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70 Paket	30.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						115.000.000,00			-	-			350.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang		20 Orang	10 Orang	115.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35 Orang	350.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						47.400.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang		30 Orang	10 Orang	47.400.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Orang	300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						833.731.270,00					ASN Lingkup Bapperida Prov. Kalimantan Utara dan Dunia Usaha		1.875.000.000,00	
		Terpenuhinya layanan administrasi umum perangkat daerah						833.731.270,00					ASN Lingkup Bapperida Prov. Kalimantan Utara dan Dunia Usaha		1.875.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	3.330.000,00						4 Dokumen	8.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	335.000.000,00						1 Laporan	850.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	303.600.000,00						6 Paket	281.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	102.964.000,00						2 Paket	421.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.264.000,00						1 Paket	12.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	30.000.000,00						5 Paket	237.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	55.573.270,00						6 Paket	65.000.000,00	
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.264.000,00			-	-			12.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.264.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	12.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.000.000,00			-	-			237.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Paket	237.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						55.573.270,00			-	-			65.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	55.573.270,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Paket	65.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						303.600.000,00			-	-			281.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	303.600.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Paket	281.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						102.964.000,00			-	-			421.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	102.964.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	421.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						3.330.000,00			-	-			8.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.330.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	8.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						335.000.000,00			-	-			850.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	335.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	850.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.091.888.268,00					ASN dan BMD Lingkup Bapperida Prov. Kalimantan Utara		1.193.700.000,00	
		Terpenuhinya layanan jasa penunjang perangkat daerah						1.091.888.268,00					ASN dan BMD Lingkup Bapperida Prov. Kalimantan Utara		1.193.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	152.248.300,00						1 Laporan	130.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	927.239.968,00						1 Laporan	1.050.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.400.000,00						1 Laporan	13.700.000,00	
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12.400.000,00			-	-			13.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.400.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	13.700.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						152.248.300,00			-	-			130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	152.248.300,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	130.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						927.239.968,00			-	-			1.050.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	927.239.968,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	1.050.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						454.542.910,00					BMD Bapperida Prov. Kalimantan Utara		621.924.000,00	
		Terlaksananya pemeliharaan BMD PD yang sesuai regulasi						454.542.910,00					BMD Bapperida Prov. Kalimantan Utara		621.924.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit		31 Unit	31 Unit	331.300.410,00						31 Unit	530.589.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.804.200,00						1 Unit	41.335.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		40 Unit	25 Unit	72.438.300,00						25 Unit	50.000.000,00	
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.804.200,00			-	-			41.335.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.804.200,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	41.335.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						331.300.410,00			-	-			530.589.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit		31 Unit	31 Unit	331.300.410,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				31 Unit	530.589.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						72.438.300,00			-	-			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		40 Unit	25 Unit	72.438.300,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Unit	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
210.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**949.105.002,00**							**4.247.196.000,00**	
		Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah						***205.126.940,00***							***1.958.806.000,00***	
			1.Tingkat capaian program pembangunan daerah	93 %		88 %	89 %	205.126.940,00						90 %	1.958.806.000,00	
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						205.126.940,00					Perangkat Daerah Se-Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		1.958.806.000,00	
		Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah						205.126.940,00					Perangkat Daerah Se-Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		1.958.806.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	15 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	45.058.400,00						10 Dokumen	275.800.000,00	
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	3 Kerja Sama		3 Kerja Sama	3 Kerja Sama	31.060.000,00						3 Kerja Sama	418.806.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	80.000.240,00						4 Laporan	993.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	49.008.300,00						4 Laporan	271.200.000,00	
		Terwujudnya keselarasan kinerja Kabupaten/ Kota dalam mendukung sasaran pembangunan Provinsi						205.126.940,00					Perangkat Daerah Se-Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		1.958.806.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	15 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	45.058.400,00						10 Dokumen	275.800.000,00	
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	3 Kerja Sama		3 Kerja Sama	3 Kerja Sama	31.060.000,00						3 Kerja Sama	418.806.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	80.000.240,00						4 Laporan	993.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	49.008.300,00						4 Laporan	271.200.000,00	
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi						49.008.300,00			-	-			271.200.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	49.008.300,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	271.200.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.1.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah						31.060.000,00			-	-			418.806.000,00	
		Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	3 Kerja Sama		3 Kerja Sama	3 Kerja Sama	31.060.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Kerja Sama	418.806.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						80.000.240,00			-	-			993.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	80.000.240,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	993.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						45.058.400,00			-	-			275.800.000,00	
		Terfasilitasi/Evaluasinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	15 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	45.058.400,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Dokumen	275.800.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah						***743.978.062,00***							***2.138.390.000,00***	
			1.Persentase keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	100 %		100 %	100 %	743.978.062,00						100 %	2.138.390.000,00	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						663.997.562,00					Perangkat Daerah Se-Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota, Organisasi Kemasyarakatan, Profesi, Akademisi, Dunia Usaha dan Masyarakat		1.360.000.000,00	
		Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai tahapan dan tepat waktu						663.997.562,00					Perangkat Daerah Se-Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota, Organisasi Kemasyarakatan, Profesi, Akademisi, Dunia Usaha dan Masyarakat		1.360.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	40.671.540,00						1 Berita Acara	150.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	77.635.502,00						1 Berita Acara	150.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	86.568.720,00						1 Berita Acara	160.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	459.121.800,00						2 Dokumen	900.000.000,00	
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik						77.635.502,00			-	-			150.000.000,00	
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	77.635.502,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Berita Acara	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						40.671.540,00			-	-			150.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	40.671.540,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Berita Acara	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi						86.568.720,00			-	-			160.000.000,00	
		Terlaksananya Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	86.568.720,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Berita Acara	160.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi						459.121.800,00			-	-			900.000.000,00	
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	459.121.800,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	900.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						79.980.500,00					Perangkat Daerah Se-Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota		928.390.000,00	
		Terwujudnya tata kelola data pembangunan daerah yang berkualitas, terpadu, dan mendukung perencanaan berbasis satu data						79.980.500,00					Perangkat Daerah Se-Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota		928.390.000,00	
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku		3 Buku	3 Buku	29.512.700,00						3 Buku	411.570.000,00	
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	94 Orang		94 Orang	94 Orang	50.467.800,00						94 Orang	516.820.000,00	
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah						50.467.800,00			-	-			516.820.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	94 Orang		94 Orang	94 Orang	50.467.800,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				94 Orang	516.820.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi						29.512.700,00			-	-			411.570.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku		3 Buku	1 Buku	29.512.700,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Buku	411.570.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
211.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**1.468.239.657,00**							**5.075.174.300,00**	
		Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah						***1.459.983.657,00***							***5.075.174.300,00***	
			0.Persentase keselarasan perencanaan PD dengan perencanaan pembangunan daerah	100 %		100 %	100 %	1.459.983.657,00						100 %	5.075.174.300,00	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						487.627.200,00					Perangkat Daerah Se-Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		2.297.736.791,00	
		Meningkatnya sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan PD dan antar PD						487.627.200,00					Perangkat Daerah Se-Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		2.297.736.791,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	33.060.000,00						2 Dokumen	111.024.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	34.139.600,00						2 Dokumen	65.642.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	27.182.000,00						2 Laporan	118.195.200,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	23.808.000,00						2 Laporan	92.016.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.436.600,00						4 Laporan	282.442.160,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	47.550.000,00						4 Laporan	239.846.400,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	166.695.000,00						2 Laporan	1.091.665.571,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	104.756.000,00						2 Laporan	296.904.960,00	
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						34.139.600,00			-	-			65.642.500,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	34.139.600,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	65.642.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						23.808.000,00			-	-			92.016.000,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	23.808.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	92.016.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						47.550.000,00			-	-			239.846.400,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	47.550.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	239.846.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						104.756.000,00			-	-			296.904.960,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	104.756.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	296.904.960,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						33.060.000,00			-	-			111.024.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	33.060.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	111.024.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						27.182.000,00			-	-			118.195.200,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	27.182.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	118.195.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						50.436.600,00			-	-			282.442.160,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.436.600,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	282.442.160,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						166.695.000,00			-	-			1.091.665.571,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	166.695.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	1.091.665.571,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						490.121.557,00					Perangkat Daerah Se-Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		1.382.599.362,00	
		Meningkatnya sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan PD dan antar PD						490.121.557,00					Perangkat Daerah Se-Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		1.382.599.362,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	47.950.258,00						2 Dokumen	26.355.607,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	33.397.261,00						2 Dokumen	119.103.623,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	14.941.710,00						2 Laporan	132.245.097,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	23.399.355,00						2 Laporan	132.433.365,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	41.263.735,00						4 Laporan	92.574.194,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	49.644.576,00						4 Laporan	119.131.792,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan		5 Laporan	2 Laporan	111.219.331,00						2 Laporan	277.063.750,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	168.305.331,00						2 Laporan	483.691.934,00	
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						47.950.258,00			-	-			26.355.607,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	47.950.258,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	26.355.607,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						14.941.710,00			-	-			132.245.097,00	
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	14.941.710,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	132.245.097,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						41.263.735,00			-	-			92.574.194,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	41.263.735,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	92.574.194,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						111.219.331,00			-	-			277.063.750,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan		5 Laporan	2 Laporan	111.219.331,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	277.063.750,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						33.397.261,00			-	-			119.103.623,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	33.397.261,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	119.103.623,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						23.399.355,00			-	-			132.433.365,00	
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	23.399.355,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	132.433.365,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						49.644.576,00			-	-			119.131.792,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	49.644.576,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	119.131.792,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						168.305.331,00			-	-			483.691.934,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	168.305.331,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	483.691.934,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						490.490.900,00					Perangkat Daerah Se-Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		1.394.838.147,00	
		Meningkatnya sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan PD dan antar PD						490.490.900,00					Perangkat Daerah Se-Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		1.394.838.147,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	8.256.000,00						2 Dokumen	23.825.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.160.000,00						2 Dokumen	12.420.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	18.060.000,00						2 Laporan	37.640.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.256.000,00						2 Laporan	13.125.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	138.256.000,00						4 Laporan	174.250.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	23.096.000,00						4 Laporan	16.900.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	142.182.900,00						2 Laporan	727.678.147,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	147.224.000,00						2 Laporan	389.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						8.256.000,00			-	-			23.825.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	8.256.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	23.825.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						18.060.000,00			-	-			37.640.000,00	
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	18.060.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	37.640.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						138.256.000,00			-	-			174.250.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	138.256.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	174.250.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						142.182.900,00			-	-			727.678.147,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	142.182.900,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	727.678.147,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						5.160.000,00			-	-			12.420.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.160.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	12.420.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						8.256.000,00			-	-			13.125.000,00	
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.256.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	13.125.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						23.096.000,00			-	-			16.900.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	23.096.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	16.900.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						147.224.000,00			-	-			389.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	147.224.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	389.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**949.985.600,00**							**1.510.000.000,00**	
212.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						**568.931.100,00**							**600.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Riset di Daerah						***518.931.100,00***							***600.000.000,00***	
			2.Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	88 Persentase		60 Persentase	75 Persentase	518.931.100,00						80 Persentase	600.000.000,00	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						355.865.100,00					Perangkat Daerah Se-Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara, Perguruan Tinggi, UMKM dan NGO		150.000.000,00	
		Tersedianya kajian berbasis bukti untuk mendukung pembangunan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						355.865.100,00					Perangkat Daerah Se-Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara, Perguruan Tinggi, UMKM dan NGO		150.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	3 Rekomendasi		3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	355.865.100,00						3 Rekomendasi	150.000.000,00	
	5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan						355.865.100,00			-	-			150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	3 Rekomendasi		3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	355.865.100,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Rekomendasi	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						100.000.000,00					Perangkat Daerah Se-Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara, dan Masyarakat		0,00	
		Tersedianya kajian berbasis bukti untuk mendukung pembangunan di bidang Sosial dan Kependudukan						100.000.000,00					Perangkat Daerah Se-Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara, dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						Dokumen	0,00	
	5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan						50.000.000,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Dokumen	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja						50.000.000,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Dokumen	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						113.066.000,00					Perangkat Daerah Se-Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara, dan Masyarakat		450.000.000,00	
		Terlaksananya Diseminasi hasil riset daerah						113.066.000,00					Perangkat Daerah Se-Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara, dan Masyarakat		450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.070.000,00						1 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	99.996.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif						13.070.000,00			-	-			250.000.000,00	
		Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.070.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan						99.996.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	99.996.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
213.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**						**381.054.500,00**							**910.000.000,00**	
		Meningkatnya Pertumbuhan Inovasi Daerah						***381.054.500,00***							***910.000.000,00***	
			2.Persentase jumlah inovasi daerah yang dilaporkan dalam Innovative government award	95 %		60 %	70 %	381.054.500,00						80 %	910.000.000,00	
	5.05.03.1.02	Invensi dan Inovasi						381.054.500,00					Perangkat Daerah Se-Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara, UMKM, Komunitas Inovator, dan Masyarakat		910.000.000,00	
		Menumbuhkan iklim inovasi di daerah						381.054.500,00					Perangkat Daerah Se-Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara, UMKM, Komunitas Inovator, dan Masyarakat		910.000.000,00	
			Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	1 Pelatihan		1 Pelatihan	1 Pelatihan	30.200.000,00						1 Pelatihan	160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	308.044.000,00						1 Laporan	540.000.000,00	
			Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	42.810.500,00						1 Laporan	210.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Inovasi di daerah						381.054.500,00					Perangkat Daerah Se-Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara, UMKM, Komunitas Inovator, dan Masyarakat		910.000.000,00	
			Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	1 Pelatihan		1 Pelatihan	1 Pelatihan	30.200.000,00						1 Pelatihan	160.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	308.044.000,00						1 Laporan	540.000.000,00	
			Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	42.810.500,00						1 Laporan	210.000.000,00	
	5.05.03.1.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi						308.044.000,00			-	-			540.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	308.044.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	540.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.02.0004	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi						30.200.000,00			-	-			160.000.000,00	
		Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	1 Pelatihan		1 Pelatihan	1 Pelatihan	30.200.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Pelatihan	160.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.02.0009	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi						42.810.500,00			-	-			210.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	42.810.500,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	210.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Badan Pendapatan Daerah						**54.555.913.233,00**							**73.956.737.081,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**54.555.913.233,00**							**73.956.737.081,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**54.555.913.233,00**							**73.956.737.081,00**	
214.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**50.405.913.233,00**							**69.156.737.081,00**	
		MENINGKATNYA KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM						***170.000.000,00***							***400.000.000,00***	
			1.Persentase Target Indikator Program yang Tercapai	100 %		100 %	100 %	170.000.000,00						100 %	400.000.000,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						220.000.000,00					ASN		450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi						220.000.000,00					ASN		450.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		Data	2 Data	50.000.000,00						2 Data	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00						2 Dokumen	350.000.000,00	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						120.000.000,00			-	-			350.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Pajak Daerah				2 Dokumen	350.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		Data	2 Data	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Pajak Daerah				2 Data	50.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	50.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH						***46.847.413.233,00***							***62.741.737.081,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	46.847.413.233,00						100 %	62.741.737.081,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						43.482.413.233,00					ASN		57.041.737.081,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Regulasi						43.482.413.233,00					ASN		57.041.737.081,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00						12 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	215 Orang/ Bulan		215 Orang/ Bulan	215 Orang/ Bulan	43.082.413.233,00						215 Orang/ Bulan	56.641.737.081,00	
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						43.082.413.233,00			-	-			56.641.737.081,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	215 Orang/ Bulan		215 Orang/ Bulan	217 Orang/ Bulan	43.082.413.233,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				215 Orang/ Bulan	56.641.737.081,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						400.000.000,00			-	-			400.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	400.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						100.000.000,00					ASN / Perangkat Daerah		150.000.000,00	
		Meningkatnya administrasi pelayanan pendapatan retribusi perangkat daerah						100.000.000,00					ASN / Perangkat Daerah		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
	5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah						100.000.000,00			-	-			150.000.000,00	
		Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	150.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.310.000.000,00					ASN / PERANGKAT DAERAH / WAJIB PAJAK		3.820.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						2.310.000.000,00					ASN / PERANGKAT DAERAH / WAJIB PAJAK		3.820.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	750 Dokumen		365 Dokumen	730 Dokumen	5.000.000,00						730 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430 Laporan		300 Laporan	400 Laporan	900.000.000,00						410 Laporan	1.400.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		8 Paket	8 Paket	700.000.000,00						8 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	600.000.000,00						7 Paket	900.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	5.000.000,00						20 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		6 Paket	8 Paket	100.000.000,00						6 Paket	1.485.000.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00			-	-			20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Paket	20.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00			-	-			1.485.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		6 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Paket	1.485.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						700.000.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		8 Paket	8 Paket	700.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Paket	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						600.000.000,00			-	-			900.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	600.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7 Paket	900.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						5.000.000,00			-	-			15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	750 Dokumen		365 Dokumen	375 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Pajak Daerah				730 Dokumen	15.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						900.000.000,00			-	-			1.400.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430 Laporan		300 Laporan	400 Laporan	900.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				410 Laporan	1.400.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.060.000.000,00					ASN / PERANGKAT DAERAH / WAJIB PAJAK		1.730.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						1.060.000.000,00					ASN / PERANGKAT DAERAH / WAJIB PAJAK		1.730.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	750.000.000,00						12 Laporan	850.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00						12 Laporan	750.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	50.000.000,00						12 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00						12 Laporan	10.000.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000,00			-	-			10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	10.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						750.000.000,00			-	-			850.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	750.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	850.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00			-	-			120.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	120.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						250.000.000,00			-	-			750.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	750.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		MENINGKATNYA KUALITAS PENYENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK UPTD. BAPENDA						***3.033.500.000,00***							***5.765.000.000,00***	
			1.Persentase UPTD Bapenda yang melaksanakan Survey Kepuasan masyarakat	100 %		100 %	100 %	3.033.500.000,00						100 %	5.765.000.000,00	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						400.000.000,00					ASN		0,00	
		Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						400.000.000,00					ASN		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		Orang	100 Orang	100.000.000,00						20 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang		Orang	500 Orang	200.000.000,00						500 Orang	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang		Orang	30 Orang	100.000.000,00						30 Orang	0,00	
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100.000.000,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang		Orang	20 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Orang	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						200.000.000,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang		Orang	500 Orang	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500 Orang	0,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						100.000.000,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		Orang	20 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Orang	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.450.000.000,00					ASN / PERANGKAT DAERAH / WAJIB PAJAK		5.040.000.000,00	
		Pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi						1.450.000.000,00					ASN / PERANGKAT DAERAH / WAJIB PAJAK		5.040.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		Unit	3 Unit	50.000.000,00						Unit	0,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	3 Unit	10.000.000,00						2 Unit	2.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		Unit	3 Unit	90.000.000,00						2 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	1.150.000.000,00						2 Unit	1.900.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	6 Unit	150.000.000,00						22 Unit	940.000.000,00	
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.150.000.000,00			-	-			1.900.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	4 Unit	1.150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	1.900.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						150.000.000,00			-	-			940.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	3 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				22 Unit	940.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						10.000.000,00			-	-			2.000.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	2.000.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						50.000.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		Unit	2 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Unit	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						90.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		Unit	2 Unit	90.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.383.500.000,00					ASN / PERANGKAT DAERAH / WAJIB PAJAK		925.000.000,00	
		BMD yang terpelihara						1.383.500.000,00					ASN / PERANGKAT DAERAH / WAJIB PAJAK		925.000.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	Unit	500.000.000,00						2 Unit	400.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit		26 Unit	17 Unit	350.000.000,00						17 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00						5 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		20 Unit	25 Unit	33.500.000,00						25 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		Unit	2 Unit	100.000.000,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		4 Unit	4 Unit	400.000.000,00						4 Unit	0,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00			-	-			300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						350.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit		26 Unit	21 Unit	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				17 Unit	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						33.500.000,00			-	-			25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		20 Unit	20 Unit	33.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Unit	25.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						500.000.000,00			-	-			400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	3 Unit	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	400.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						400.000.000,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		4 Unit	4 Unit	400.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	0,00	Badan Pendapatan Daerah
215.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**4.150.000.000,00**							**4.800.000.000,00**	
		MENINGKATNYA REALISASI PAD MELALUI UPAYA EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI						***4.150.000.000,00***							***4.800.000.000,00***	
			1.Realisasi PAD	60282902100 0 Nilai		55692083400 0 Nilai	56805925000 0 Nilai	4.150.000.000,00						57942043600 0 Nilai	4.800.000.000,00	
			2.Transaksi Non Tunai Terhadap Realisasi PAD	68 %		60 %	62 %	4.150.000.000,00						64 %	4.800.000.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						4.150.000.000,00					ASN & WAJIB PAJAK		4.800.000.000,00	
		Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah						4.150.000.000,00					ASN & WAJIB PAJAK		4.800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.600.000.000,00						12 Laporan	1.900.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00						12 Laporan	1.300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.300.000.000,00						12 Laporan	1.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	250.000.000,00						12 Laporan	100.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah						4.150.000.000,00					ASN & WAJIB PAJAK		4.800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.600.000.000,00						12 Laporan	1.900.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00						12 Laporan	1.300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.300.000.000,00						12 Laporan	1.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	250.000.000,00						12 Laporan	100.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daaerah						4.150.000.000,00					ASN & WAJIB PAJAK		4.800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.600.000.000,00						12 Laporan	1.900.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00						12 Laporan	1.300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.300.000.000,00						12 Laporan	1.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	250.000.000,00						12 Laporan	100.000.000,00	
		Meningkatnya Transaksi Non Tunai terhadap Realisasi PAD						4.150.000.000,00					ASN & WAJIB PAJAK		4.800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.600.000.000,00						12 Laporan	1.900.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00						12 Laporan	1.300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.300.000.000,00						12 Laporan	1.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	250.000.000,00						12 Laporan	100.000.000,00	
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						1.300.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			1.500.000.000,00	
		Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	1.500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						1.000.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			1.300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	1.300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						1.600.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			1.900.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.600.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	1.900.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						250.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			100.000.000,00	
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		UPT Bapenda Bulungan						**3.000.000.000,00**							**3.721.994.602,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.000.000.000,00**							**3.721.994.602,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**3.000.000.000,00**							**3.721.994.602,00**	
216.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**2.307.500.000,00**							**3.033.834.956,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah						***1.687.500.000,00***							***2.561.500.000,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	1.687.500.000,00						100 %	2.561.500.000,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						165.000.000,00					-		165.000.000,00	
		Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						165.000.000,00					-		165.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	165.000.000,00						12 Dokumen	165.000.000,00	
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						165.000.000,00			-	-			165.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	165.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	165.000.000,00	UPT Bapenda Bulungan
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						750.000.000,00					-		729.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						750.000.000,00					-		729.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	450.000.000,00						100 Laporan	450.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	150.000.000,00						10 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	60.000.000,00						5 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	9.000.000,00						5 Paket	9.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		10 Paket	3 Paket	66.000.000,00						2 Paket	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	15.000.000,00						5 Paket	15.000.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						9.000.000,00			-	-			9.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	9.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Paket	9.000.000,00	UPT Bapenda Bulungan
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						66.000.000,00			-	-			45.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		10 Paket	3 Paket	66.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	45.000.000,00	UPT Bapenda Bulungan
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						15.000.000,00			-	-			15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Paket	15.000.000,00	UPT Bapenda Bulungan
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						150.000.000,00			-	-			150.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Paket	150.000.000,00	UPT Bapenda Bulungan
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						60.000.000,00			-	-			60.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Paket	60.000.000,00	UPT Bapenda Bulungan
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						450.000.000,00			-	-			450.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	450.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Laporan	450.000.000,00	UPT Bapenda Bulungan
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						772.500.000,00					-		1.667.500.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						772.500.000,00					-		1.667.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	210.000.000,00						12 Laporan	210.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	555.000.000,00						12 Laporan	1.450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00						12 Laporan	7.500.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.500.000,00			-	-			7.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	7.500.000,00	UPT Bapenda Bulungan
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						210.000.000,00			-	-			210.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	210.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	210.000.000,00	UPT Bapenda Bulungan
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						555.000.000,00			-	-			1.450.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	555.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	1.450.000.000,00	UPT Bapenda Bulungan
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik UPTD Bapenda						***620.000.000,00***							***472.334.956,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase UPTD Bapenda yang melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan	100 %		100 %	100 %	620.000.000,00						100 %	472.334.956,00	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						60.000.000,00					-		60.000.000,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						60.000.000,00					-		60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	60.000.000,00						5 Orang	60.000.000,00	
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						60.000.000,00			-	-			60.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Orang	60.000.000,00	UPT Bapenda Bulungan
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						20.000.000,00					-		25.000.000,00	
		Jumlah BMD yang Disediakan						20.000.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00						1 Paket	25.000.000,00	
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						20.000.000,00			-	-			25.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	25.000.000,00	UPT Bapenda Bulungan
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						540.000.000,00					-		387.334.956,00	
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharannya						540.000.000,00					-		387.334.956,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	200.000.000,00						2 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	300.000.000,00						10 Unit	197.334.956,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		40 Unit	40 Unit	40.000.000,00						40 Unit	40.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						300.000.000,00			-	-			197.334.956,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	197.334.956,00	UPT Bapenda Bulungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40.000.000,00			-	-			40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		40 Unit	40 Unit	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Unit	40.000.000,00	UPT Bapenda Bulungan
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000.000,00			-	-			150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	150.000.000,00	UPT Bapenda Bulungan
217.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**692.500.000,00**							**688.159.646,00**	
		Peningkatan Capaian Realisasi PAD Melalui Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi						***692.500.000,00***							***688.159.646,00***	
			1.Realisasi PAD	76176163000 Nilai		70375000000 Nilai	71782500000 Nilai	692.500.000,00						73218150000 Nilai	688.159.646,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						692.500.000,00					-		688.159.646,00	
		Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah						692.500.000,00					-		688.159.646,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1500 Dokumen SSPD		1500 Dokumen SSPD	1500 Dokumen SSPD	292.500.000,00						1500 Dokumen SSPD	290.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	240.000.000,00						150 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1500 Laporan		1500 Laporan	1500 Laporan	160.000.000,00						1500 Laporan	148.159.646,00	
		Meningkatnya Kualitas Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah						692.500.000,00					-		688.159.646,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1500 Dokumen SSPD		1500 Dokumen SSPD	1500 Dokumen SSPD	292.500.000,00						1500 Dokumen SSPD	290.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	240.000.000,00						150 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1500 Laporan		1500 Laporan	1500 Laporan	160.000.000,00						1500 Laporan	148.159.646,00	
		Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daaerah						692.500.000,00					-		688.159.646,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1500 Dokumen SSPD		1500 Dokumen SSPD	1500 Dokumen SSPD	292.500.000,00						1500 Dokumen SSPD	290.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	240.000.000,00						150 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1500 Laporan		1500 Laporan	1500 Laporan	160.000.000,00						1500 Laporan	148.159.646,00	
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						240.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			250.000.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	150 Laporan		150 Laporan	12 Laporan	240.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150 Laporan	250.000.000,00	UPT Bapenda Bulungan
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						292.500.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			290.000.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1500 Dokumen SSPD		1500 Dokumen SSPD	1500 Dokumen SSPD	292.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1500 Dokumen SSPD	290.000.000,00	UPT Bapenda Bulungan
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						160.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			148.159.646,00	
		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1500 Laporan		1500 Laporan	12 Laporan Laporan	160.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1500 Laporan	148.159.646,00	UPT Bapenda Bulungan
		UPT Bapenda Tarakan						**3.000.000.000,00**							**10.574.622.907,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.000.000.000,00**							**10.574.622.907,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**3.000.000.000,00**							**10.574.622.907,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
218.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**2.509.118.000,00**							**9.519.678.907,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah						***2.159.877.300,00***							***7.307.838.907,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	2.159.877.300,00						100 %	7.307.838.907,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						140.280.000,00					-		346.600.000,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						140.280.000,00					-		346.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	140.280.000,00						12 Dokumen	346.600.000,00	
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						140.280.000,00			-	-			346.600.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	140.280.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	346.600.000,00	UPT Bapenda Tarakan
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						920.121.748,00					-		2.064.960.000,00	
		Jumlah Layanan Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah						920.121.748,00					-		2.064.960.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00						12 Dokumen	20.736.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	914 Laporan		441 Laporan	529 Laporan	200.000.345,00						636 Laporan	1.270.080.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	569.818.948,00						7 Paket	665.280.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	101.118.455,00						1 Paket	69.120.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.184.000,00						1 Paket	39.744.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						40.184.000,00			-	-			39.744.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.184.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	39.744.000,00	UPT Bapenda Tarakan
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						569.818.948,00			-	-			665.280.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	569.818.948,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7 Paket	665.280.000,00	UPT Bapenda Tarakan
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						101.118.455,00			-	-			69.120.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	101.118.455,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	69.120.000,00	UPT Bapenda Tarakan
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						9.000.000,00			-	-			20.736.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	20.736.000,00	UPT Bapenda Tarakan
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						200.000.345,00			-	-			1.270.080.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	914 Laporan		441 Laporan	150 Laporan	200.000.345,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				636 Laporan	1.270.080.000,00	UPT Bapenda Tarakan
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.099.475.552,00					-		4.896.278.907,00	
		Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan						1.099.475.552,00					-		4.896.278.907,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	365.000.000,00						12 Laporan	432.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	550.985.552,00						12 Laporan	4.149.782.907,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	162.400.000,00						12 Laporan	276.480.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.090.000,00						12 Laporan	38.016.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						21.090.000,00			-	-			38.016.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.090.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	38.016.000,00	UPT Bapenda Tarakan
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						365.000.000,00			-	-			432.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	365.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	432.000.000,00	UPT Bapenda Tarakan
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						162.400.000,00			-	-			276.480.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	162.400.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	276.480.000,00	UPT Bapenda Tarakan
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						550.985.552,00			-	-			4.149.782.907,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	550.985.552,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	4.149.782.907,00	UPT Bapenda Tarakan
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik UPTD Bapenda						***349.240.700,00***							***2.211.840.000,00***	
			1.Nilai SKM UPTD. BAPENDA	100 Nilai		100 Nilai	100 Nilai	349.240.700,00						100 Nilai	2.211.840.000,00	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						49.050.000,00					-		358.560.000,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						49.050.000,00					-		358.560.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	49.050.000,00						5 Orang	358.560.000,00	
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						49.050.000,00			-	-			358.560.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	49.050.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Orang	358.560.000,00	UPT Bapenda Tarakan
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						300.190.700,00					-		1.853.280.000,00	
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharannya						300.190.700,00					-		1.853.280.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.600.000,00						1 Unit	224.640.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit		19 Unit	19 Unit	232.710.700,00						19 Unit	1.516.320.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	40.600.000,00						1 Unit	17.280.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		15 Unit	15 Unit	23.280.000,00						15 Unit	95.040.000,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						232.710.700,00			-	-			1.516.320.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit		19 Unit	19 Unit	232.710.700,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				19 Unit	1.516.320.000,00	UPT Bapenda Tarakan
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						3.600.000,00			-	-			224.640.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.600.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	224.640.000,00	UPT Bapenda Tarakan
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						40.600.000,00			-	-			17.280.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	40.600.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	17.280.000,00	UPT Bapenda Tarakan
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						23.280.000,00			-	-			95.040.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		15 Unit	15 Unit	23.280.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Unit	95.040.000,00	UPT Bapenda Tarakan
219.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**490.882.000,00**							**1.054.944.000,00**	
		Meningkatnya Realisasi PAD Melalui Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi						***390.882.000,00***							***1.054.944.000,00***	
			1.Realisasi PAD	94539170000 Nilai		87339580000 Nilai	89086372000 Nilai	390.882.000,00						90868100000 Nilai	1.054.944.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						490.882.000,00					-		1.054.944.000,00	
		Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah						490.882.000,00					-		1.054.944.000,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1500 Dokumen SSPD		0 Dokumen SSPD	1500 Dokumen SSPD	100.000.000,00						1500 Dokumen SSPD	387.936.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	100.000.000,00						12 Laporan	324.864.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	290.882.000,00						12 Laporan	342.144.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah						490.882.000,00					-		1.054.944.000,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1500 Dokumen SSPD		0 Dokumen SSPD	1500 Dokumen SSPD	100.000.000,00						1500 Dokumen SSPD	387.936.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	100.000.000,00						12 Laporan	324.864.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	290.882.000,00						12 Laporan	342.144.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daaerah						490.882.000,00					-		1.054.944.000,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1500 Dokumen SSPD		0 Dokumen SSPD	1500 Dokumen SSPD	100.000.000,00						1500 Dokumen SSPD	387.936.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	100.000.000,00						12 Laporan	324.864.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	290.882.000,00						12 Laporan	342.144.000,00	
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						100.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			324.864.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	324.864.000,00	UPT Bapenda Tarakan
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						100.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			387.936.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1500 Dokumen SSPD		0 Dokumen SSPD	1500 Dokumen SSPD	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1500 Dokumen SSPD	387.936.000,00	UPT Bapenda Tarakan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						290.882.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			342.144.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	290.882.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	342.144.000,00	UPT Bapenda Tarakan
		UPT Bapenda Nunukan						**3.000.000.000,00**							**5.783.496.213,25**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.000.000.000,00**							**5.783.496.213,25**	
	5.02	**KEUANGAN**						**3.000.000.000,00**							**5.783.496.213,25**	
220.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**2.100.000.000,00**							**4.426.561.699,78**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah						***1.765.000.000,00***							***3.731.561.699,78***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	1.765.000.000,00						100 %	3.731.561.699,78	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						132.000.000,00					-		250.000.000,00	
		Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						132.000.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	132.000.000,00						12 Dokumen	250.000.000,00	
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						132.000.000,00			-	-			250.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	132.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	250.000.000,00	UPT Bapenda Nunukan
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						890.000.000,00					-		1.372.000.000,00	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						890.000.000,00					-		1.372.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	600 Dokumen		365 Dokumen	400 Dokumen	4.000.000,00						400 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan		140 Laporan	145 Laporan	540.000.000,00						150 Laporan	850.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	150.000.000,00						12 Paket	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	25.000.000,00						12 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket		21 Paket	22 Paket	6.000.000,00						23 Paket	13.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket		5 Paket	6 Paket	120.000.000,00						7 Paket	175.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	2 Paket	45.000.000,00						3 Paket	80.000.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.000.000,00			-	-			13.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket		21 Paket	22 Paket	6.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				23 Paket	13.000.000,00	UPT Bapenda Nunukan
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						120.000.000,00			-	-			175.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket		5 Paket	6 Paket	120.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7 Paket	175.000.000,00	UPT Bapenda Nunukan
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						45.000.000,00			-	-			80.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	2 Paket	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Paket	80.000.000,00	UPT Bapenda Nunukan
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						150.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	200.000.000,00	UPT Bapenda Nunukan
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25.000.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	50.000.000,00	UPT Bapenda Nunukan
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						4.000.000,00			-	-			4.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	600 Dokumen		365 Dokumen	400 Dokumen	4.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				400 Dokumen	4.000.000,00	UPT Bapenda Nunukan
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						540.000.000,00			-	-			850.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan		140 Laporan	145 Laporan	540.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150 Laporan	850.000.000,00	UPT Bapenda Nunukan
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						768.000.000,00					-		2.109.561.699,78	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang						768.000.000,00					-		2.109.561.699,78	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00						12 Laporan	190.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	560.000.000,00						12 Laporan	1.854.561.699,78	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00						12 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00						12 Laporan	10.000.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00			-	-			10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	10.000.000,00	UPT Bapenda Nunukan
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						180.000.000,00			-	-			190.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	190.000.000,00	UPT Bapenda Nunukan
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.000.000,00			-	-			55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	55.000.000,00	UPT Bapenda Nunukan
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						560.000.000,00			-	-			1.854.561.699,78	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	560.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	1.854.561.699,78	UPT Bapenda Nunukan
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik UPTD Bapenda						***310.000.000,00***							***695.000.000,00***	
			1.Persentase UPTD Bapenda yang melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan	100 %		100 %	100 %	310.000.000,00						100 %	695.000.000,00	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						55.000.000,00					-		130.000.000,00	
		Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai Standar Peraturan yang Berlaku						55.000.000,00					-		130.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		6 Orang	7 Orang	20.000.000,00						8 Orang	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	56 Paket		44 Paket	47 Paket	35.000.000,00						50 Paket	100.000.000,00	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						35.000.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	56 Paket		44 Paket	47 Paket	35.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Paket	100.000.000,00	UPT Bapenda Nunukan
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						20.000.000,00			-	-			30.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		6 Orang	7 Orang	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Orang	30.000.000,00	UPT Bapenda Nunukan
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						255.000.000,00					-		565.000.000,00	
		BMD yang Terpelihara						255.000.000,00					-		565.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	120.000.000,00						1 Unit	180.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		17 Unit	18 Unit	135.000.000,00						19 Unit	385.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						135.000.000,00			-	-			385.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		17 Unit	18 Unit	135.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				19 Unit	385.000.000,00	UPT Bapenda Nunukan
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						120.000.000,00			-	-			180.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	180.000.000,00	UPT Bapenda Nunukan
221.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**900.000.000,00**							**1.356.934.513,47**	
		Peningkatan Capaian PAD melalui Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi						***800.000.000,00***							***1.356.934.513,47***	
			1.Capaian Realisasi PAD Perangkat Daerah	46317550000 Rp		42790257000 Rp	43646062000 Rp	800.000.000,00						44518983000 Rp	1.356.934.513,47	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						900.000.000,00					-		1.356.934.513,47	
		Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah						900.000.000,00					-		1.356.934.513,47	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1500 Dokumen SSPD		1500 Dokumen SSPD	1500 Dokumen SSPD	100.000.000,00						1500 Dokumen SSPD	256.934.513,47	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	100.000.000,00						12 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	700.000.000,00						12 Laporan	800.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah						900.000.000,00					-		1.356.934.513,47	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1500 Dokumen SSPD		1500 Dokumen SSPD	1500 Dokumen SSPD	100.000.000,00						1500 Dokumen SSPD	256.934.513,47	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	100.000.000,00						12 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	700.000.000,00						12 Laporan	800.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daaerah						900.000.000,00					-		1.356.934.513,47	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1500 Dokumen SSPD		1500 Dokumen SSPD	1500 Dokumen SSPD	100.000.000,00						1500 Dokumen SSPD	256.934.513,47	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	100.000.000,00						12 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	700.000.000,00						12 Laporan	800.000.000,00	
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						100.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			300.000.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	300.000.000,00	UPT Bapenda Nunukan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						100.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			256.934.513,47	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1500 Dokumen SSPD		1500 Dokumen SSPD	1500 Dokumen SSPD	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1500 Dokumen SSPD	256.934.513,47	UPT Bapenda Nunukan
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						700.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			800.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	700.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	800.000.000,00	UPT Bapenda Nunukan
		UPT Bapenda Malinau						**2.100.000.000,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.100.000.000,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**2.100.000.000,00**							**0,00**	
222.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.775.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah						***1.177.000.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	1.177.000.000,00						100 %	0,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						110.000.000,00					-		0,00	
		Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						110.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	110.000.000,00						12 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						110.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	110.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	0,00	UPT Bapenda Malinau
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						624.000.000,00					-		0,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						624.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310 Laporan		240 Laporan	270 Laporan	500.000.000,00						305 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	75.000.000,00						10 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	16.000.000,00						20 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	8.000.000,00						12 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	25.000.000,00						5 Paket	0,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.000.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	6 Paket	8.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	0,00	UPT Bapenda Malinau
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.000.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	2 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Paket	0,00	UPT Bapenda Malinau
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						75.000.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	6 Paket	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Paket	0,00	UPT Bapenda Malinau
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						16.000.000,00			-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	3 Paket	16.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Paket	0,00	UPT Bapenda Malinau
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						500.000.000,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310 Laporan		240 Laporan	270 Laporan	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				305 Laporan	0,00	UPT Bapenda Malinau
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						443.000.000,00					-		0,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						443.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	88.000.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00						12 Laporan	0,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	0,00	UPT Bapenda Malinau
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						88.000.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	88.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	0,00	UPT Bapenda Malinau
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						350.000.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	0,00	UPT Bapenda Malinau
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik UPTD Bapenda						***558.000.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase UPTD Bapenda yang melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan	100 %		100 %	100 %	558.000.000,00						100 %	0,00	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						17.250.000,00					-		0,00	
		Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						17.250.000,00					-		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang		10 Orang	12 Orang	17.250.000,00						14 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						17.250.000,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang		10 Orang	12 Orang	17.250.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14 Orang	0,00	UPT Bapenda Malinau
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						190.000.000,00					-		0,00	
		Pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi						190.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	40.000.000,00						15 Paket	0,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		2 Unit	4 Unit	90.000.000,00						4 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	0,00	
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						40.000.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	1 Paket	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Paket	0,00	UPT Bapenda Malinau
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						90.000.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		2 Unit	2 Unit	90.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	0,00	UPT Bapenda Malinau
	5.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						10.000.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	0,00	UPT Bapenda Malinau
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	0,00	UPT Bapenda Malinau
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						390.750.000,00					-		0,00	
		BMD yang Terpelihara						390.750.000,00					-		0,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit	200.000.000,00						Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	140.000.000,00						15 Unit	0,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		Unit	Unit	5.750.000,00						20 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	40.000.000,00						10 Unit	0,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						140.000.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	140.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Unit	0,00	UPT Bapenda Malinau
	5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						5.750.000,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		Unit	5 Unit	5.750.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Unit	0,00	UPT Bapenda Malinau
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40.000.000,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	0,00	UPT Bapenda Malinau
	5.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						5.000.000,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	45 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	-				1 Unit	0,00	UPT Bapenda Malinau
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000.000,00			-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Unit	0,00	UPT Bapenda Malinau
223.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**325.000.000,00**							**0,00**	
		PENINGKATAN CAPAIAN REALISASI PAD MELALUI UPAYA INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI						***225.000.000,00***							***0,00***	
			1.Realisasi PAD	34515482000 Nilai		31886970000 Nilai	32524710000 Nilai	225.000.000,00						33175204000 Nilai	0,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						325.000.000,00					-		0,00	
		Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah						325.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD		12 Dokumen SSPD	12 Dokumen SSPD	100.000.000,00						12 Dokumen SSPD	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1600 Laporan		1200 Laporan	1300 Laporan	100.000.000,00						1400 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	125.000.000,00						12 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah						325.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD		12 Dokumen SSPD	12 Dokumen SSPD	100.000.000,00						12 Dokumen SSPD	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1600 Laporan		1200 Laporan	1300 Laporan	100.000.000,00						1400 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	125.000.000,00						12 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daaerah						325.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD		12 Dokumen SSPD	12 Dokumen SSPD	100.000.000,00						12 Dokumen SSPD	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1600 Laporan		1200 Laporan	1300 Laporan	100.000.000,00						1400 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	125.000.000,00						12 Laporan	0,00	
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						100.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			0,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1600 Laporan		1200 Laporan	1300 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1400 Laporan	0,00	UPT Bapenda Malinau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						100.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			0,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD		12 Dokumen SSPD	1200 Dokumen SSPD	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen SSPD	0,00	UPT Bapenda Malinau
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						125.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			0,00	
		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	0,00	UPT Bapenda Malinau
		UPT Bapenda Tana Tidung						**2.000.000.000,00**							**2.744.200.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.000.000.000,00**							**2.744.200.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**2.000.000.000,00**							**2.744.200.000,00**	
224.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.668.000.000,00**							**2.365.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah						***1.196.000.000,00***							***1.645.000.000,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	1.196.000.000,00						100 %	1.645.000.000,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						97.000.000,00					-		117.000.000,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Regulasi						97.000.000,00					-		117.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	97.000.000,00						12 Dokumen	117.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						97.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			117.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	97.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	117.000.000,00	UPT Bapenda Tana Tidung
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						863.000.000,00					-		925.000.000,00	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						863.000.000,00					-		925.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan		298 Laporan	300 Laporan	620.000.000,00						300 Laporan	650.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		34 Paket	34 Paket	93.000.000,00						35 Paket	90.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		3 Paket	3 Paket	60.000.000,00						3 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		6 Paket	7 Paket	10.000.000,00						8 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket		15 Paket	11 Paket	80.000.000,00						11 Paket	105.000.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			30.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		6 Paket	6 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Paket	30.000.000,00	UPT Bapenda Tana Tidung

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						80.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			105.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket		15 Paket	9 Paket	80.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11 Paket	105.000.000,00	UPT Bapenda Tana Tidung
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						93.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			90.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		34 Paket	9 Paket	93.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35 Paket	90.000.000,00	UPT Bapenda Tana Tidung
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						60.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		3 Paket	4 Paket	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Paket	50.000.000,00	UPT Bapenda Tana Tidung
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						620.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			650.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan		298 Laporan	310 Laporan	620.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300 Laporan	650.000.000,00	UPT Bapenda Tana Tidung

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						246.000.000,00					-		603.000.000,00	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang						246.000.000,00					-		603.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	58.000.000,00						12 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	178.000.000,00						12 Laporan	540.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00						12 Laporan	8.000.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			8.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	8.000.000,00	UPT Bapenda Tana Tidung
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						58.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	58.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	55.000.000,00	UPT Bapenda Tana Tidung
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						178.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			540.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	178.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	540.000.000,00	UPT Bapenda Tana Tidung

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik UPTD Bapenda						***462.000.000,00***							***720.000.000,00***	
			1.Persentase UPTD Bapenda yang melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan	100 %		100 %	100 %	462.000.000,00						100 %	720.000.000,00	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						97.000.000,00					-		190.000.000,00	
		Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						97.000.000,00					-		190.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang		Orang	5 Orang	85.000.000,00						5 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket		21 Paket	Paket	12.000.000,00						21 Paket	40.000.000,00	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						12.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			40.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket		21 Paket	0 Paket	12.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				21 Paket	40.000.000,00	UPT Bapenda Tana Tidung
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						85.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			150.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang		Orang	5 Orang	85.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Orang	150.000.000,00	UPT Bapenda Tana Tidung
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						40.000.000,00					-		0,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi						40.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	4 Paket	40.000.000,00						Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						40.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	4 Paket	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Paket	0,00	UPT Bapenda Tana Tidung
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						325.000.000,00					-		530.000.000,00	
		BMD Yang terpelihara						325.000.000,00					-		530.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	10 Unit	190.000.000,00						11 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit		40 Unit	40 Unit	35.000.000,00						40 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	200.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						190.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	10 Unit	190.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11 Unit	300.000.000,00	UPT Bapenda Tana Tidung
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						35.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit		40 Unit	40 Unit	35.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Unit	30.000.000,00	UPT Bapenda Tana Tidung
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	200.000.000,00	UPT Bapenda Tana Tidung
225.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**332.000.000,00**							**379.200.000,00**	
		Peningkatan Capaian Realisasi PAD Melalui Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi						***332.000.000,00***							***379.200.000,00***	
			1.Realisasi PAD	10315768000 Nilai		9530175000 Nilai	9720780000 Nilai	332.000.000,00						9915194000 Nilai	379.200.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						332.000.000,00					-		379.200.000,00	
		Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah						332.000.000,00					-		379.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1500 Dokumen SSPD		1500 Dokumen SSPD	1500 Dokumen SSPD	145.000.000,00						1500 Dokumen SSPD	115.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	87.000.000,00						12 Laporan	105.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00						12 Laporan	158.700.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah						332.000.000,00					-		379.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1500 Dokumen SSPD		1500 Dokumen SSPD	1500 Dokumen SSPD	145.000.000,00						1500 Dokumen SSPD	115.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	87.000.000,00						12 Laporan	105.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00						12 Laporan	158.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daaerah						332.000.000,00					-		379.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1500 Dokumen SSPD		1500 Dokumen SSPD	1500 Dokumen SSPD	145.000.000,00						1500 Dokumen SSPD	115.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	87.000.000,00						12 Laporan	105.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00						12 Laporan	158.700.000,00	
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						87.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			105.500.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	87.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	105.500.000,00	UPT Bapenda Tana Tidung
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						145.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			115.000.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1500 Dokumen SSPD		1500 Dokumen SSPD	1500 Dokumen SSPD	145.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1500 Dokumen SSPD	115.000.000,00	UPT Bapenda Tana Tidung

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						100.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			158.700.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	158.700.000,00	UPT Bapenda Tana Tidung
		Badan Keuangan dan Aset Daerah						**481.629.968.302,26**							**807.414.186.513,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**481.629.968.302,26**							**807.414.186.513,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**481.629.968.302,26**							**807.414.186.513,00**	
226.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**34.992.762.208,00**							**67.844.427.500,00**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah						***34.992.762.208,00***							***67.219.427.500,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	34.992.762.208,00						100 %	67.219.427.500,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						219.246.000,00					Seluruh ASN BKAD Provinsi Kalimantan Utara		890.000.000,00	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi						219.246.000,00					Seluruh ASN BKAD Provinsi Kalimantan Utara		890.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	12.050.200,00						2 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.980.000,00						1 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	57.295.000,00						2 Dokumen	278.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	12.100.800,00						2 Dokumen	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	52.410.000,00						1 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	73.410.000,00						4 Laporan	250.000.000,00	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						57.295.000,00			-	-			278.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	57.295.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	278.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						12.100.800,00			-	-			25.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	12.100.800,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	25.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						12.050.200,00			-	-			25.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	12.050.200,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	25.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						52.410.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	52.410.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	300.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						73.410.000,00			-	-			250.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	73.410.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	250.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						11.980.000,00			-	-			12.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.980.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	12.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						25.424.657.108,00					Seluruh ASN BKAD dan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara		42.850.000.000,00	
		Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						25.424.657.108,00					Seluruh ASN BKAD dan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara		42.850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.865.609.800,00						12 Dokumen	1.850.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan		90 Orang/ Bulan	90 Orang/ Bulan	23.559.047.308,00						90 Orang/ Bulan	41.000.000.000,00	
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						23.559.047.308,00			-	-			41.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan		90 Orang/ Bulan	90 Orang/ Bulan	23.559.047.308,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				90 Orang/ Bulan	41.000.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						1.865.609.800,00			-	-			1.850.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.865.609.800,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	1.850.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						36.000.000,00					Seluruh ASN BKAD Provinsi Kalimantan Utara		435.000.000,00	
		Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						36.000.000,00					Seluruh ASN BKAD Provinsi Kalimantan Utara		435.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	12.000.000,00						20 Orang	135.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		15 Orang	15 Orang	24.000.000,00						15 Orang	300.000.000,00	
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						24.000.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		15 Orang	15 Orang	24.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Orang	300.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						12.000.000,00			-	-			135.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	12.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Orang	135.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.407.071.800,00					Seluruh Perangkat Daerah di Gedung Gabungan Dinas Prov. Kalimantan Utara		5.005.080.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						2.407.071.800,00					Seluruh Perangkat Daerah di Gedung Gabungan Dinas Prov. Kalimantan Utara		5.005.080.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	105.586.000,00						12 Laporan	325.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Laporan		52 Laporan	52 Laporan	300.000.000,00						52 Laporan	980.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	279.136.100,00						1 Paket	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	41.809.000,00						2 Paket	70.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	130.540.700,00						1 Paket	129.680.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	1.550.000.000,00						10 Paket	3.000.000.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						130.540.700,00			-	-			129.680.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	130.540.700,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	129.680.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.550.000.000,00			-	-			3.000.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	1.550.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Paket	3.000.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						279.136.100,00			-	-			500.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	279.136.100,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	500.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						41.809.000,00			-	-			70.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	41.809.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	70.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						105.586.000,00			-	-			325.400.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	105.586.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	325.400.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						300.000.000,00			-	-			980.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Laporan		52 Laporan	52 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				52 Laporan	980.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.333.917.700,00					Seluruh Perangkat Daerah di Gedung Gabungan Dinas Prov. Kalimantan Utara		2.899.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						3.333.917.700,00					Seluruh Perangkat Daerah di Gedung Gabungan Dinas Prov. Kalimantan Utara		2.899.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.301.517.700,00						12 Laporan	2.850.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	32.400.000,00						12 Laporan	49.000.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						32.400.000,00			-	-			49.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	32.400.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	49.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						3.301.517.700,00			-	-			2.850.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.301.517.700,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	2.850.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.571.869.600,00					Seluruh Perangkat Daerah di Gedung Gabungan Dinas Prov. Kalimantan Utara		15.765.347.500,00	
		BMD yang terpelihara						3.571.869.600,00					Seluruh Perangkat Daerah di Gedung Gabungan Dinas Prov. Kalimantan Utara		15.765.347.500,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2.216.709.600,00						2 Unit	5.000.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit		19 Unit	19 Unit	417.217.000,00						19 Unit	397.847.500,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit		16 Unit	16 Unit	279.895.000,00						16 Unit	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	13 Unit	55.350.000,00						11 Unit	67.500.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	602.698.000,00						2 Unit	10.000.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						279.895.000,00			-	-			300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit		16 Unit	16 Unit	279.895.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16 Unit	300.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						417.217.000,00			-	-			397.847.500,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit		19 Unit	19 Unit	417.217.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				19 Unit	397.847.500,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						55.350.000,00			-	-			67.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	55.350.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11 Unit	67.500.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2.216.709.600,00			-	-			5.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2.216.709.600,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	5.000.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						602.698.000,00			-	-			10.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	602.698.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	10.000.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
227.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**443.391.756.094,26**							**736.337.882.763,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel						***443.265.822.740,26***							***735.837.882.763,00***	
			1.Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 %		100 %	100 %	443.265.822.740,26						100 %	735.837.882.763,00	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						1.300.790.500,00					Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara		4.205.058.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan						1.300.790.500,00					Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara		4.205.058.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	59.013.600,00						34 Dokumen	210.897.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	25.210.000,00						2 Dokumen	251.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	38.896.500,00						2 Dokumen	187.000.000,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	47.104.000,00						2 Dokumen	441.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	26.773.300,00						2 Dokumen	420.856.000,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	33.389.000,00						2 Dokumen	395.000.000,00	
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	46.128.000,00						34 Dokumen	245.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	66 Orang		66 Orang	66 Orang	23.405.600,00						66 Orang	225.900.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	893.913.600,00						2 Dokumen	894.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	22.426.000,00						2 Dokumen	257.400.000,00	
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	22.882.000,00						34 Dokumen	232.000.000,00	
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	29.459.200,00						34 Dokumen	228.000.000,00	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	32.189.700,00						34 Dokumen	215.805.000,00	
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						47.104.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			441.400.000,00	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	47.104.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	441.400.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUAdan Perubahan PPAS						26.773.300,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			420.856.000,00	
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	26.773.300,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	420.856.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD						32.189.700,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			215.805.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	32.189.700,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				34 Dokumen	215.805.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						29.459.200,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			228.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	29.459.200,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				34 Dokumen	228.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD						46.128.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			245.600.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	46.128.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				34 Dokumen	245.600.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD						22.882.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			232.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	22.882.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				34 Dokumen	232.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						893.913.600,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			894.000.000,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	893.913.600,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	894.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						22.426.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			257.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	22.426.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	257.400.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						33.389.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			395.000.000,00	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	33.389.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	395.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan						38.896.500,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			187.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	38.896.500,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	187.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah						59.013.600,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			210.897.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	59.013.600,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				34 Dokumen	210.897.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan						25.210.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			251.200.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	25.210.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	251.200.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi						23.405.600,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			225.900.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	66 Orang		66 Orang	66 Orang	23.405.600,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				66 Orang	225.900.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota						500.003.813,00					Seluruh Pemerintah Kab/Kota Se Provinsi Kalimantan Utara		4.168.894.265,00	
		Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam mengelola keuangan daerah						500.003.813,00					Seluruh Pemerintah Kab/Kota Se Provinsi Kalimantan Utara		4.168.894.265,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	48.118.810,00						5 Dokumen	1.428.829.044,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	86.098.295,00						5 Laporan	565.385.077,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	115.933.354,00						5 Laporan	542.116.099,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	115.933.354,00						5 Laporan	703.456.111,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	133.920.000,00						3 Laporan	929.107.934,00	
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota						115.933.354,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			703.456.111,00	
		Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	115.933.354,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Laporan	703.456.111,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota						115.933.354,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			542.116.099,00	
		Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	115.933.354,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Laporan	542.116.099,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						86.098.295,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			565.385.077,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	86.098.295,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 Laporan	565.385.077,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota						48.118.810,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			1.428.829.044,00	
		Terlaksanannya Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	48.118.810,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Dokumen	1.428.829.044,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah						133.920.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			929.107.934,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	133.920.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan	929.107.934,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						1.814.405.000,00					Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara		3.707.000.000,00	
		Persentase capaian koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan						1.814.405.000,00					Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara		3.707.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	637.804.000,00						12 Dokumen	1.452.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	367.084.000,00						48 Dokumen	847.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	381.760.000,00						4 Dokumen	440.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	376.757.000,00						9 Laporan	550.000.000,00	
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	51.000.000,00						2 Dokumen	418.000.000,00	
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						637.804.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			1.452.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	637.804.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	1.452.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						367.084.000,00			-	-			847.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	367.084.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				48 Dokumen	847.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank						381.760.000,00			-	-			440.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	381.760.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	440.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						376.757.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	376.757.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9 Laporan	550.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						51.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			418.000.000,00	
		Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	51.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	418.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						767.302.300,00					Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara		4.551.168.041,00	
		Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)						767.302.300,00					Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara		4.551.168.041,00	
			Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	2 Lembaga		2 Lembaga	2 Lembaga	10.000.000,00						2 Lembaga	318.346.875,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	79.999.800,00						2 Dokumen	484.939.250,00	
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	237.320.900,00						1 Dokumen	153.856.223,00	
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00						2 Dokumen	661.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	305.081.600,00						1 Laporan	1.503.920.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00						12 Laporan	483.887.250,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	300 Orang		300 Orang	300 Orang	10.000.000,00						300 Orang	661.982.068,00	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	114.900.000,00						2 Dokumen	282.736.125,00	
	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban						79.999.800,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			484.939.250,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	79.999.800,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	484.939.250,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						8.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			483.887.250,00	
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	483.887.250,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUDdan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						305.081.600,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			1.503.920.250,00	
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	305.081.600,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	1.503.920.250,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi						114.900.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			282.736.125,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	114.900.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	282.736.125,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						237.320.900,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			153.856.223,00	
		Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	237.320.900,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	153.856.223,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah						2.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			661.500.000,00	
		Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	661.500.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi						10.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			661.982.068,00	
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	300 Orang		300 Orang	300 Orang	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				300 Orang	661.982.068,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi						10.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			318.346.875,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	2 Lembaga		2 Lembaga	2 Lembaga	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Lembaga	318.346.875,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						438.410.931.763,26					Seluruh Pemda. Kab/Kota Se Provinsi Kalimantan Utara dan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara		718.705.762.457,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan pelaksanaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah						438.410.931.763,26					Seluruh Pemda. Kab/Kota Se Provinsi Kalimantan Utara dan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara		718.705.762.457,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	3.000.000.000,00						5 Laporan	203.705.762.457,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	431.410.931.763,26						5 Laporan	500.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.000.000.000,00						1 Laporan	15.000.000.000,00	
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						3.000.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			203.705.762.457,00	
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	3.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Laporan	203.705.762.457,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						4.000.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			15.000.000.000,00	
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	15.000.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi						431.410.931.763,26			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			500.000.000.000,00	
		Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	431.410.931.763,26	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Laporan	500.000.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						598.322.718,00					Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara		1.000.000.000,00	
		Jumlah kegiatan pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah lingkup keuangan daerah						598.322.718,00					Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara		1.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	298.927.728,00						1 Dokumen	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	240 Orang		240 Orang	240 Orang	299.394.990,00						240 Orang	500.000.000,00	
	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah						298.927.728,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			500.000.000,00	
		Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	298.927.728,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	500.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi						299.394.990,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			500.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	240 Orang		240 Orang	240 Orang	299.394.990,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				240 Orang	500.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
228.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**3.245.450.000,00**							**3.231.876.250,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan aset daerah secara optimal						***3.245.450.000,00***							***3.231.876.250,00***	
			1.Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 %		100 %	100 %	3.245.450.000,00						100 %	3.231.876.250,00	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						3.245.450.000,00					Seluruh Pemda. Kab/Kota Se Provinsi Kalimantan Utara dan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara		3.231.876.250,00	
		Presentase dokumen laporan dan pembinaan barang milik daerah yang dilaksanakan						3.245.450.000,00					Seluruh Pemda. Kab/Kota Se Provinsi Kalimantan Utara dan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara		3.231.876.250,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.209.550.000,00						1 Dokumen	1.155.277.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.350.000.000,00						1 Laporan	945.562.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	676.100.000,00						1 Laporan	961.142.500,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	9.800.000,00						2 Dokumen	169.893.750,00	
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah						9.800.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			169.893.750,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	9.800.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	169.893.750,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah						676.100.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			961.142.500,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	676.100.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	961.142.500,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						1.350.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			945.562.500,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	945.562.500,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						1.209.550.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			1.155.277.500,00	
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.209.550.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	1.155.277.500,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Badan Kepegawaian Daerah						**7.725.878.930,00**							**20.450.138.291,87**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.725.878.930,00**							**20.450.138.291,87**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**7.725.878.930,00**							**20.450.138.291,87**	
229.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**6.940.468.020,00**							**14.959.272.211,35**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah						***6.895.468.020,00***							***14.899.272.211,35***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	6.895.468.020,00						100 %	14.899.272.211,35	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.000.000,00					Aparatur Sipil Negara		243.394.532,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi						15.000.000,00					Aparatur Sipil Negara		243.394.532,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00						2 Dokumen	131.394.532,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00						4 Laporan	52.000.000,00	
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			131.394.532,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	131.394.532,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			52.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	52.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	60.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.236.073.549,00					Aparatur Sipil Negara		7.466.394.678,00	
		Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						6.236.073.549,00					Aparatur Sipil Negara		7.466.394.678,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	306.963.532,00						4 Dokumen	688.227.645,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/ Bulan		48 Orang/ Bulan	51 Orang/ Bulan	5.929.110.017,00						58 Orang/ Bulan	6.778.167.033,00	
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.929.110.017,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			6.778.167.033,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/ Bulan		48 Orang/ Bulan	42 Orang/ Bulan	5.929.110.017,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				58 Orang/ Bulan	6.778.167.033,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						306.963.532,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			688.227.645,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	306.963.532,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	688.227.645,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						20.000.000,00					Barang Milik Daerah		228.000.000,00	
		BMD perangkat daerah yang terkelola sesuai regulasi						20.000.000,00					Barang Milik Daerah		228.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	54.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	59.000.000,00	
	5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			59.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	59.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			60.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	60.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			55.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	55.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			54.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	54.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						55.000.000,00					Aparatur Sipil Negara		211.803.600,00	
		Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						55.000.000,00					Aparatur Sipil Negara		211.803.600,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang		35 Orang	35 Orang	5.000.000,00						35 Orang	42.365.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		15 Orang	15 Orang	50.000.000,00						15 Orang	169.438.600,00	
	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			169.438.600,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		15 Orang	15 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Orang	169.438.600,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			42.365.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang		35 Orang	35 Orang	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35 Orang	42.365.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						317.017.507,00					Aparatur Sipil Negara		1.749.665.245,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						317.017.507,00					Aparatur Sipil Negara		1.749.665.245,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	1.920.000,00						6 Dokumen	275.823.850,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	7.186.000,00						4 Dokumen	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	27.917.800,00						4 Laporan	64.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	174.615.507,00						100 Laporan	663.458.551,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	53.680.900,00						4 Paket	220.655.639,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	30.605.500,00						4 Paket	71.170.888,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.909.800,00						4 Paket	9.882.686,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		0 Paket	4 Paket	15.182.000,00						4 Paket	354.673.631,00	
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.909.800,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			9.882.686,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.909.800,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	9.882.686,00	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.182.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			354.673.631,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		0 Paket	4 Paket	15.182.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	354.673.631,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						53.680.900,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			220.655.639,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	53.680.900,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	220.655.639,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.605.500,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			71.170.888,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	30.605.500,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	71.170.888,00	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						1.920.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			275.823.850,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	1.920.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Dokumen	275.823.850,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						27.917.800,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			64.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	27.917.800,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	64.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						174.615.507,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			663.458.551,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	65 Laporan	174.615.507,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Laporan	663.458.551,00	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						7.186.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			90.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	7.186.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	90.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						95.666.000,00					Barang Milik Daerah		4.744.121.745,35	
		Pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi						95.666.000,00					Barang Milik Daerah		4.744.121.745,35	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.659.000,00						1 Paket	110.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	13.000.000,00						1 Unit	4.524.121.745,35	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	27.000.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	35.007.000,00						1 Unit	40.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		1 Unit	3 Unit	5.000.000,00						4 Unit	70.000.000,00	
	5.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						35.007.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			40.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	35.007.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	40.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						27.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	27.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	0,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						15.659.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			110.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.659.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	110.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			70.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		1 Unit	3 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	70.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						13.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			4.524.121.745,35	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	13.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	4.524.121.745,35	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						23.951.964,00					Aparatur Sipil Negara		38.314.302,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						23.951.964,00					Aparatur Sipil Negara		38.314.302,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.631.964,00						4 Laporan	7.274.238,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	11.320.000,00						4 Laporan	16.040.064,00	
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						11.320.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			16.040.064,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	11.320.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	16.040.064,00	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.631.964,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			7.274.238,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.631.964,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	7.274.238,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	15.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						177.759.000,00					Barang Milik Daerah		277.578.109,00	
		BMD yang terpelihara						177.759.000,00					Barang Milik Daerah		277.578.109,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	57.555.000,00						1 Unit	61.041.844,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit		15 Unit	16 Unit	92.544.000,00						16 Unit	93.371.900,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit		10 Unit	10 Unit	5.000.000,00						10 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.460.000,00						1 Unit	23.164.365,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						92.544.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			93.371.900,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit		15 Unit	16 Unit	92.544.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16 Unit	93.371.900,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						57.555.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			61.041.844,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	57.555.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	61.041.844,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit		10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	100.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.460.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			23.164.365,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.460.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	23.164.365,00	Badan Kepegawaian Daerah
		BMD yang terpelihara						177.759.000,00					Barang Milik Daerah		277.578.109,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	12.200.000,00						-	0,00	
	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						12.200.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	12.200.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	0,00	Badan Kepegawaian Daerah
230.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**785.410.910,00**							**5.490.866.080,52**	
		Meningkatnya kapasitas PNS						***152.084.904,00***							***668.076.907,00***	
			1.Persentase PNS yang meningkatkan kapasitasnya	99.40 %		98.82 %	98.90 %	34.806.814,00						99 %	329.392.855,00	
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN						152.084.904,00					Aparatur Sipil Negara		668.076.907,00	
		Meningkatnya kualitas pemenuhan Jabatan Manajerial dan Non Manajerial ASN yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya						152.084.904,00					Aparatur Sipil Negara		668.076.907,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.806.814,00						1 Dokumen	329.392.855,00	
		Terlaksananya pemetaan potensi atau kompetensi PNS						152.084.904,00					Aparatur Sipil Negara		668.076.907,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.806.814,00						1 Dokumen	329.392.855,00	
		Terpenuhinya PNS yang memenuhi kualifikasi standar komptensi Jabatan						152.084.904,00					Aparatur Sipil Negara		668.076.907,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.806.814,00						1 Dokumen	329.392.855,00	
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						34.806.814,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			329.392.855,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.806.814,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	329.392.855,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya kualitas kinerja dan disiplin ASN						***463.159.254,00***							***2.464.880.443,38***	
			1.Persentase kedisiplinan ASN	96 %		84 %	87 %	263.102.451,00						90 %	1.372.879.849,00	
			2.Persentase ASN dengan predikat kinerja "Baik" dan "Sangat Baik"	90 %		84 %	86 %	263.102.451,00						88 %	1.372.879.849,00	
		Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan ASN						235.382.131,00					Aparatur Sipil Negara		1.715.281.979,38	
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	35.325.328,00						1 Lembaga	623.281.385,00	
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian yang andal dan terintegrasi						235.382.131,00					Aparatur Sipil Negara		1.715.281.979,38	
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	35.325.328,00						1 Lembaga	623.281.385,00	
		Terlaksananya pengelolaan sistem reward dan punishment ASN yang adil dan konsisten						235.382.131,00					Aparatur Sipil Negara		1.715.281.979,38	
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	35.325.328,00						1 Lembaga	623.281.385,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						35.325.328,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			623.281.385,00	
		Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	35.325.328,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Lembaga	623.281.385,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						227.777.123,00					Aparatur Sipil Negara		749.598.464,00	
		Terlaksananya pengelolaan sistem reward dan punishment ASN yang adil dan konsisten						227.777.123,00					Aparatur Sipil Negara		749.598.464,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	12 Orang		12 Orang	12 Orang	48.458.000,00						12 Orang	93.350.000,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	541 Orang		541 Orang	541 Orang	36.718.846,00						541 Orang	53.317.589,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	250 Orang		250 Orang	250 Orang	36.881.023,00						250 Orang	227.319.029,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4697 Dokumen		4497 Dokumen	4547 Dokumen	35.886.513,00						4597 Dokumen	128.919.899,00	
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	32.032.934,00						4 Dokumen	154.294.852,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	37.799.807,00						3 Laporan	92.397.095,00	
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						35.886.513,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			128.919.899,00	
		Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4697 Dokumen		4497 Dokumen	4547 Dokumen	35.886.513,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4597 Dokumen	128.919.899,00	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						48.458.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			93.350.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	12 Orang		12 Orang	12 Orang	48.458.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Orang	93.350.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai						36.718.846,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			53.317.589,00	
		Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	541 Orang		541 Orang	541 Orang	36.718.846,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				541 Orang	53.317.589,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN						36.881.023,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			227.319.029,00	
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	250 Orang		250 Orang	250 Orang	36.881.023,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250 Orang	227.319.029,00	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						37.799.807,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			92.397.095,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	37.799.807,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan	92.397.095,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai						32.032.934,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			154.294.852,00	
		Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	32.032.934,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	154.294.852,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya kualitas Manajemen Talenta PNS						***322.251.656,00***							***3.025.985.637,14***	
			1.Persentase tingkat kesesuaian kompetensi PNS dengan kompetensi jabatan	40,10 %		26,12 %	29,35 %	157.150.615,00						33,12 %	1.986.115.076,14	
		Meningkatnya kualitas pemenuhan Jabatan Manajerial dan Non Manajerial ASN yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya						170.166.752,00					Aparatur Sipil Negara		2.357.908.730,14	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	101.226.758,00						1 Dokumen	1.835.821.201,14	
		tersedianya profil talenta						170.166.752,00					Aparatur Sipil Negara		2.357.908.730,14	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	101.226.758,00						1 Dokumen	1.835.821.201,14	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN						101.226.758,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			1.835.821.201,14	
		Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	101.226.758,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	1.835.821.201,14	Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya kualitas pemenuhan Jabatan Manajerial dan Non Manajerial ASN yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya						152.084.904,00					Aparatur Sipil Negara		668.076.907,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.923.857,00						1 Dokumen	150.293.875,00	
		Terlaksananya pemetaan potensi atau kompetensi PNS						152.084.904,00					Aparatur Sipil Negara		668.076.907,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.923.857,00						1 Dokumen	150.293.875,00	
		Terpenuhinya PNS yang memenuhi kualifikasi standar komptensi Jabatan						152.084.904,00					Aparatur Sipil Negara		668.076.907,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.923.857,00						1 Dokumen	150.293.875,00	
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center						55.923.857,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			150.293.875,00	
		Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.923.857,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	150.293.875,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya kualitas pemenuhan jabatan ASN						***557.633.787,00***							***4.741.267.616,52***	
			1.Persentase Pemenuhan Jabatan ASN berdasarkan Anjab dan ABK	80 %		70 %	72 %	211.438.271,00						74 %	1.454.092.366,38	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						235.382.131,00					Aparatur Sipil Negara		1.715.281.979,38	
		Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan ASN						235.382.131,00					Aparatur Sipil Negara		1.715.281.979,38	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.915.262,00						1 Dokumen	69.310.489,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.517.958,00						1 Dokumen	55.290.632,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.710.824,00						1 Dokumen	619.013.539,38	
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian yang andal dan terintegrasi						235.382.131,00					Aparatur Sipil Negara		1.715.281.979,38	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.915.262,00						1 Dokumen	69.310.489,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.517.958,00						1 Dokumen	55.290.632,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.710.824,00						1 Dokumen	619.013.539,38	
		Terlaksananya pengelolaan sistem reward dan punishment ASN yang adil dan konsisten						235.382.131,00					Aparatur Sipil Negara		1.715.281.979,38	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.915.262,00						1 Dokumen	69.310.489,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.517.958,00						1 Dokumen	55.290.632,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.710.824,00						1 Dokumen	619.013.539,38	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						22.517.958,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			55.290.632,00	
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.517.958,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	55.290.632,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						35.710.824,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			619.013.539,38	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.710.824,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	619.013.539,38	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						22.915.262,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			69.310.489,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.915.262,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	69.310.489,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN						170.166.752,00					Aparatur Sipil Negara		2.357.908.730,14	
		Meningkatnya kualitas pemenuhan Jabatan Manajerial dan Non Manajerial ASN yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya						170.166.752,00					Aparatur Sipil Negara		2.357.908.730,14	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	44.791.561,00						4 Dokumen	246.383.180,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	24.148.433,00						6 Laporan	275.704.349,00	
		tersedianya profil talenta						170.166.752,00					Aparatur Sipil Negara		2.357.908.730,14	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	44.791.561,00						4 Dokumen	246.383.180,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	24.148.433,00						6 Laporan	275.704.349,00	
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						44.791.561,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			246.383.180,00	
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	44.791.561,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	246.383.180,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						24.148.433,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			275.704.349,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	24.148.433,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Laporan	275.704.349,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya kualitas pemenuhan Jabatan Manajerial dan Non Manajerial ASN yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya						152.084.904,00					Aparatur Sipil Negara		668.076.907,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	424 Orang		314 Orang	334 Orang	31.354.233,00						354 Orang	138.390.177,00	
		Terlaksananya pemetaan potensi atau kompetensi PNS						152.084.904,00					Aparatur Sipil Negara		668.076.907,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	424 Orang		314 Orang	334 Orang	31.354.233,00						354 Orang	138.390.177,00	
		Terpenuhinya PNS yang memenuhi kualifikasi standar komptensi Jabatan						152.084.904,00					Aparatur Sipil Negara		668.076.907,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	424 Orang		314 Orang	334 Orang	31.354.233,00						354 Orang	138.390.177,00	
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN						31.354.233,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			138.390.177,00	
		Meningkatnya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	424 Orang		314 Orang	334 Orang	31.354.233,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				354 Orang	138.390.177,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional						30.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			50.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Sistem Layanan Kepegawaian yang terdigitalisasi						***235.382.131,00***							***1.715.281.979,38***	
			1.Persentase layanan manajemen ASN yang berbasis digital	90 %		50 %	60 %	118.912.759,00						70 %	348.385.934,00	
		Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan ASN						235.382.131,00					Aparatur Sipil Negara		1.715.281.979,38	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.549.320,00						1 Dokumen	149.302.934,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.363.439,00						1 Dokumen	199.083.000,00	
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian yang andal dan terintegrasi						235.382.131,00					Aparatur Sipil Negara		1.715.281.979,38	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.549.320,00						1 Dokumen	149.302.934,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.363.439,00						1 Dokumen	199.083.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan sistem reward dan punishment ASN yang adil dan konsisten						235.382.131,00					Aparatur Sipil Negara		1.715.281.979,38	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.549.320,00						1 Dokumen	149.302.934,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.363.439,00						1 Dokumen	199.083.000,00	
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						80.363.439,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			199.083.000,00	
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.363.439,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	199.083.000,00	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian						38.549.320,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			149.302.934,00	
		Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.549.320,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	149.302.934,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia						**10.541.409.022,00**							**16.803.324.736,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.541.409.022,00**							**16.803.324.736,00**	
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**10.541.409.022,00**							**16.803.324.736,00**	
231.	**5.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**9.334.636.486,00**							**11.351.168.136,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah						***9.304.636.486,00***							***10.901.168.136,00***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	9.304.636.486,00						100 %	10.901.168.136,00	
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						364.341.000,00					-		400.000.000,00	
		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun						364.341.000,00					-		400.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	20.000.000,00						1 Data	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	143.841.000,00						5 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	170.500.000,00						1 Laporan	150.000.000,00	
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						143.841.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	143.841.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						170.500.000,00			-	-			150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	170.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	150.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						20.000.000,00			-	-			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Pajak Rokok				1 Data	20.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						30.000.000,00			-	-			30.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Pajak Rokok				1 Dokumen	30.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.939.952.898,00					-		7.333.168.136,00	
		Jumlah dokumen Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.939.952.898,00					-		7.333.168.136,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	634.230.696,00						1 Dokumen	812.556.136,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ Bulan		37 Orang/ Bulan	38 Orang/ Bulan	6.305.722.202,00						38 Orang/ Bulan	6.520.612.000,00	
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.305.722.202,00			-	-			6.520.612.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ Bulan		37 Orang/ Bulan	38 Orang/ Bulan	6.305.722.202,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				38 Orang/ Bulan	6.520.612.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						634.230.696,00			-	-			812.556.136,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	634.230.696,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	812.556.136,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						344.546.000,00					-		350.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						344.546.000,00					-		350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	115.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		1 Paket	1 Paket	39.546.000,00						1 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang		25 Orang	30 Orang	255.000.000,00						30 Orang	200.000.000,00	
	5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						39.546.000,00			-	-			35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		1 Paket	1 Paket	39.546.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	35.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						50.000.000,00			-	-			115.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	115.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						255.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang		25 Orang	30 Orang	255.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Orang	200.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						639.394.088,00					-		1.391.000.000,00	
		Jumlah Paket Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						639.394.088,00					-		1.391.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00						1 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	97.462.000,00						1 Laporan	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	343.840.000,00						1 Laporan	1.050.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	82.960.000,00						1 Paket	130.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		3 Paket	3 Paket	23.600.000,00						3 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.500.000,00						1 Paket	8.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	69.632.088,00						1 Paket	120.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.400.000,00						1 Paket	10.000.000,00	
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.500.000,00			-	-			8.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	8.500.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						69.632.088,00			-	-			120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	69.632.088,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	120.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.400.000,00			-	-			10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.400.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	10.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						82.960.000,00			-	-			130.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	82.960.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	130.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						23.600.000,00			-	-			25.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		3 Paket	3 Paket	23.600.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Paket	25.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						6.000.000,00			-	-			7.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	7.500.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						97.462.000,00			-	-			40.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	97.462.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	40.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						343.840.000,00			-	-			1.050.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	343.840.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	1.050.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						88.723.500,00					-		400.000.000,00	
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah						88.723.500,00					-		400.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		2 Unit	10 Unit	8.723.500,00						12 Unit	400.000.000,00	
	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						80.000.000,00			-	-			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	0,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.723.500,00			-	-			400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		2 Unit	1 Unit	8.723.500,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Unit	400.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						634.096.000,00					-		717.000.000,00	
		Jumlah Laporan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan						634.096.000,00					-		717.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	566.596.000,00						1 Laporan	655.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.500.000,00						1 Laporan	12.000.000,00	
	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						16.500.000,00			-	-			12.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	12.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						566.596.000,00			-	-			655.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	566.596.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	655.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						51.000.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	50.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						323.583.000,00					-		760.000.000,00	
		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						323.583.000,00					-		760.000.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit		17 Unit	17 Unit	104.267.000,00						17 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	106.116.000,00						4 Unit	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit		70 Unit	70 Unit	73.200.000,00						80 Unit	90.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	180 Unit		155 Unit	160 Unit	30.000.000,00						165 Unit	70.000.000,00	
	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						106.116.000,00			-	-			250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	106.116.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	250.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						104.267.000,00			-	-			250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit		17 Unit	17 Unit	104.267.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				17 Unit	250.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						73.200.000,00			-	-			90.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit		70 Unit	70 Unit	73.200.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				80 Unit	90.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						10.000.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	100.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30.000.000,00			-	-			70.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	180 Unit		155 Unit	160 Unit	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				165 Unit	70.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
232.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**1.206.772.536,00**							**5.452.156.600,00**	
		Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional						***772.984.136,00***							***3.922.156.600,00***	
			1.Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, managerial dan fungsional	76 %		72 %	73 %	772.984.136,00						74 %	3.922.156.600,00	
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						772.984.136,00					ASN		3.922.156.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Akreditasi yang tersusun						772.984.136,00					ASN		3.922.156.600,00	
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	250 Orang		180 Orang	200 Orang	41.012.400,00						200 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1800 Orang		1500 Orang	1550 Orang	575.384.000,00						1600 Orang	3.037.156.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.458.968,00						2 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	17 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	127.928.768,00						17 Dokumen	180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	7.200.000,00						2 Laporan	175.000.000,00	
		Jumlah dokumen laporan tim penjamin mutu						772.984.136,00					ASN		3.922.156.600,00	
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	250 Orang		180 Orang	200 Orang	41.012.400,00						200 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1800 Orang		1500 Orang	1550 Orang	575.384.000,00						1600 Orang	3.037.156.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.458.968,00						2 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	17 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	127.928.768,00						17 Dokumen	180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	7.200.000,00						2 Laporan	175.000.000,00	
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota						41.012.400,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			500.000.000,00	
		Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	250 Orang		180 Orang	200 Orang	41.012.400,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200 Orang	500.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar						7.200.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			175.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	7.200.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	175.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga						127.928.768,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			180.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	17 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	127.928.768,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				17 Dokumen	180.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						575.384.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			3.037.156.600,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1800 Orang		1500 Orang	1600 Orang	575.384.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1600 Orang	3.037.156.600,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan						21.458.968,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.458.968,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	30.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya Pelayanan Pengembangan Kompetensi Teknis						***433.788.400,00***							***1.530.000.000,00***	
			1.Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis	90 Persentase		65 Persentase	70 Persentase	433.788.400,00						75 Persentase	1.530.000.000,00	
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis						433.788.400,00					ASN		1.530.000.000,00	
		Jumlah ASN yang memiliki Kompetensi Teknis						433.788.400,00					ASN		1.530.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	5453 Orang		3933 Orang	4236 Orang	388.055.400,00						4539 Orang	1.500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.733.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						388.055.400,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			1.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	5453 Orang		3933 Orang	4236 Orang	388.055.400,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4539 Orang	1.500.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						45.733.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			30.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.733.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	30.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Badan Pengelola Perbatasan Daerah						**5.665.395.003,00**							**10.424.240.600,15**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.665.395.003,00**							**10.424.240.600,15**	
	5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**						**5.665.395.003,00**							**10.424.240.600,15**	
233.	**5.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**5.588.645.003,00**							**7.175.755.934,15**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah						***5.583.645.003,00***							***7.175.755.934,15***	
			1.Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	5.583.645.003,00						100 %	7.175.755.934,15	
	5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						400.000,00					BPPD		400.000,00	
		Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi						400.000,00					BPPD		400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	400.000,00						2 Dokumen	400.000,00	
	5.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						400.000,00			-	-			400.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	400.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	400.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.081.446.083,00					ASN BPPD		5.287.266.527,00	
		Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi						5.081.446.083,00					ASN BPPD		5.287.266.527,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	73.140.000,00						12 Dokumen	222.840.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ Bulan		33 Orang/ Bulan	33 Orang/ Bulan	5.008.306.083,00						33 Orang/ Bulan	5.064.426.527,00	
	5.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.008.306.083,00			-	-			5.064.426.527,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ Bulan		33 Orang/ Bulan	32 Orang/ Bulan	5.008.306.083,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				33 Orang/ Bulan	5.064.426.527,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						73.140.000,00			-	-			222.840.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	73.140.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	222.840.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5.000.000,00					ASN BPPD		200.000.000,00	
		Terpenuhinya kelengkapan dokumen administrasi kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku						5.000.000,00					ASN BPPD		200.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		4 Orang	10 Orang	5.000.000,00						10 Orang	200.000.000,00	
	5.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						5.000.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		4 Orang	1 Orang	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Orang	200.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						144.815.444,00					ASN dan Non ASN BPPD		1.051.161.103,15	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						144.815.444,00					ASN dan Non ASN BPPD		1.051.161.103,15	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	102.231.244,00						12 Laporan	896.118.748,15	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	24.870.000,00						12 Paket	103.320.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	4.144.000,00						12 Paket	18.225.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	13.570.200,00						1 Paket	33.497.355,00	
	5.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.570.200,00			-	-			33.497.355,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	13.570.200,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	33.497.355,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						24.870.000,00			-	-			103.320.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	24.870.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	103.320.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.144.000,00			-	-			18.225.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	4.144.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	18.225.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						102.231.244,00			-	-			896.118.748,15	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	102.231.244,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	896.118.748,15	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						12.970.000,00					ASN dan Non ASN		19.000.000,00	
		Pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi						12.970.000,00					ASN dan Non ASN		19.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		2 Unit	2 Unit	12.970.000,00						2 Unit	19.000.000,00	
	5.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12.970.000,00			-	-			19.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		2 Unit	1 Unit	12.970.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	19.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						242.561.476,00					ASN dan Non ASN BPPD		328.563.304,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang						242.561.476,00					ASN dan Non ASN BPPD		328.563.304,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00						12 Laporan	8.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	232.624.776,00						12 Laporan	315.163.304,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.536.700,00						1 Laporan	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.536.700,00			-	-			5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.536.700,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	5.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.400.000,00			-	-			8.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	8.400.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						232.624.776,00			-	-			315.163.304,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	232.624.776,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	315.163.304,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						101.452.000,00					BMD BPPD		289.365.000,00	
		Barang milik daerah yang terpelihara						101.452.000,00					BMD BPPD		289.365.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		Unit	1 Unit	5.000.000,00						1 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	40.933.000,00						1 Unit	67.825.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	48.869.000,00						18 Unit	183.240.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	6.650.000,00						10 Unit	13.300.000,00	
	5.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						48.869.000,00			-	-			183.240.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	48.869.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18 Unit	183.240.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						40.933.000,00			-	-			67.825.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	40.933.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	67.825.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.650.000,00			-	-			13.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	6.650.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	13.300.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						5.000.000,00			-	-			25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	25.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
234.	**5.06.03**	**PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA**						**76.750.000,00**							**3.248.484.666,00**	
		Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pengelolaan kawasan perbatasan dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah						***150.000,00***							***107.249.976,00***	
			1.Persentase Kegiatan Rencana Induk yang Diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah Pengampu	75 %		25 %	40 %	150.000,00						50 %	107.249.976,00	
	5.06.03.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama						150.000,00					Perangkat Daerah Pengampu Renduk		107.249.976,00	
		Meningkatnya dokumen perencanaan pengelolaan kawasan perbatasan dijadikan pedoman oleh Perangkat Daerah dalam merencanakan kegiatan di kawasan perbatasan						150.000,00					Perangkat Daerah Pengampu Renduk		107.249.976,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00						1 Dokumen	107.249.976,00	
	5.06.03.1.01.0001	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara						150.000,00			-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera			107.249.976,00	
		Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	107.249.976,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
		Meningkatnya koordinasi pengelolaan kawasan perbatasan						***48.150.000,00***							***1.862.134.690,00***	
			1.Persentase jumlah sub kegiatan pada Rencana Aksi berdasarkan Rencana Induk yang direalisasikan oleh Perangkat Daerah pengampu	100 %		80 %	85 %	48.150.000,00						90 %	1.862.134.690,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.06.03.1.02	Pelaksanaan Pembangunan Perbatasan Negara						18.450.000,00					Perangkat Daerah Pengampu Renduk, Kecamatan di Kawasan Perbatasan, dan Masyarakat di Kawasan Perbatasan		899.112.414,00	
		Meningkatnya koordinasi atau fasilitasi pengelolaan batas wilayah negara						18.450.000,00					Perangkat Daerah Pengampu Renduk, Kecamatan di Kawasan Perbatasan, dan Masyarakat di Kawasan Perbatasan		899.112.414,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00						1 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00						1 Dokumen	199.112.414,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan Negara	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	18.000.000,00						4 Dokumen	200.000.000,00	
		Meningkatnya koordinasi atau fasilitasi pengelolaan potensi di kawasan perbatasan						18.450.000,00					Perangkat Daerah Pengampu Renduk, Kecamatan di Kawasan Perbatasan, dan Masyarakat di Kawasan Perbatasan		899.112.414,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00						1 Dokumen	400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00						1 Dokumen	199.112.414,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan Negara	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	18.000.000,00						4 Dokumen	200.000.000,00	
		Terwujudnya koordinasi dalam pelaksanaan renaksi						18.450.000,00					Perangkat Daerah Pengampu Renduk, Kecamatan di Kawasan Perbatasan, dan Masyarakat di Kawasan Perbatasan		899.112.414,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00						1 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00						1 Dokumen	199.112.414,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan Negara	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	18.000.000,00						4 Dokumen	200.000.000,00	
	5.06.03.1.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara						150.000,00			-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera			199.112.414,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	199.112.414,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.03.1.02.0002	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara						150.000,00			-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera			100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.06.03.1.02.0003	Inventarisasi Potensi dan Pemanfaatan Sumber daya dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan						150.000,00			-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera			400.000.000,00	
		Terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumber Daya dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	400.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.03.1.02.0004	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara.						18.000.000,00			-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera			200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan Negara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan Negara	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	18.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.03.1.03	Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Kawasan Perbatasan Negara						10.000.000,00					Masyarakat di Kawasan Perbatasan		963.022.276,00	
		Meningkatnya koordinasi atau fasilitasi Kerjasama dalam pengelolaan kawasan perbatasan						10.000.000,00					Masyarakat di Kawasan Perbatasan		963.022.276,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan koordinasi kerjasama antar negara	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00						2 Dokumen	963.022.276,00	
	5.06.03.1.03.0001	Fasilitasi dan koordinasi kerjasama antar negara						10.000.000,00			-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera			963.022.276,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi kerjasama antar negara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan koordinasi kerjasama antar negara	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	963.022.276,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.03.1.06	Fasilitasi Pembinaan Masyarakat Perbatasan Negara						20.000.000,00					Masyarakat di Kawasan Perbatasan		100.000.000,00	
		Terwujudnya pelibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan batas wilayah negara						20.000.000,00					Masyarakat di Kawasan Perbatasan		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan negara dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	5.06.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan negara dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara						20.000.000,00			-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan negara dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan negara dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	100.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
		Meningkatnya tindaklanjut atas rekomendasi hasil monev						***28.150.000,00***							***1.179.100.000,00***	
			1.Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti	100 %		80 %	85 %	28.150.000,00						90 %	1.179.100.000,00	
	5.06.03.1.05	Monitoring dan Evaluasi						28.150.000,00					Perangkat Daerah Pengampu Renduk, Kecamatan di Kawasan Perbatasan, dan Masyarakat di Kawasan Perbatasan		1.179.100.000,00	
		Terlaksananya monev secara komprehensif						28.150.000,00					Perangkat Daerah Pengampu Renduk, Kecamatan di Kawasan Perbatasan, dan Masyarakat di Kawasan Perbatasan		1.179.100.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	28.000.000,00						1 Laporan	725.200.000,00	
			Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000,00						1 Laporan	453.900.000,00	
		Tersedianya data dan informasi pada sistem informasi monev yang terintegrasi secara komprehensif						28.150.000,00					Perangkat Daerah Pengampu Renduk, Kecamatan di Kawasan Perbatasan, dan Masyarakat di Kawasan Perbatasan		1.179.100.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	28.000.000,00						1 Laporan	725.200.000,00	
			Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000,00						1 Laporan	453.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.06.03.1.05.0001	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara						150.000,00			-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera			453.900.000,00	
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	453.900.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	5.06.03.1.05.0003	Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara						28.000.000,00			-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera			725.200.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	28.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	725.200.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
		Badan Penghubung						**15.891.611.157,00**							**18.699.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**15.891.611.157,00**							**18.699.000.000,00**	
	5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**						**15.891.611.157,00**							**18.699.000.000,00**	
235.	**5.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**12.175.198.157,00**							**14.509.000.000,00**	
		Terlaksananya dukungan fasilitasi, koordinasi, dan representasi Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien di tingkat nasional						***12.175.198.157,00***							***14.509.000.000,00***	
			2.Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	97.5 %		95.5 %	96 %	12.175.198.157,00						96.5 %	14.509.000.000,00	
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						27.000.000,00					Aparatur dan Masyarakat		49.000.000,00	
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang menjadi dasar penyelenggaraan program dan kegiatan Perangkat Daerah						27.000.000,00					Aparatur dan Masyarakat		49.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	27.000.000,00						2 Dokumen	49.000.000,00	
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						27.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			49.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	27.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				2 Dokumen	49.000.000,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.191.011.157,00					Aparatur		4.270.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya tata kelola administrasi keuangan yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan						4.191.011.157,00					Aparatur		4.270.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000,00						12 Dokumen	370.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan		25 Orang/ Bulan	25 Orang/ Bulan	3.891.011.157,00						25 Orang/ Bulan	3.900.000.000,00	
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.891.011.157,00			-	-			3.900.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan		25 Orang/ Bulan	30 Orang/ Bulan	3.891.011.157,00	Provinsi Kalimantan Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)				25 Orang/ Bulan	3.900.000.000,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						300.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			370.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				12 Dokumen	370.000.000,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.159.812.000,00					Aparatur dan Masyarakat		1.654.000.000,00	
		Terlaksananya layanan administrasi umum yang mendukung kelancaran operasional Perangkat Daerah secara keseluruhan						1.159.812.000,00					Aparatur dan Masyarakat		1.654.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	825.000.000,00						12 Laporan	1.200.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	300.810.000,00						12 Paket	320.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	13.271.000,00						12 Paket	88.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	20.731.000,00						4 Paket	46.000.000,00	
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						20.731.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			46.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	20.731.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				4 Paket	46.000.000,00	Badan Penghubung

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						300.810.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			320.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	300.810.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				12 Paket	320.000.000,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13.271.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			88.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	13.271.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				12 Paket	88.000.000,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						825.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			1.200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	825.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				12 Laporan	1.200.000.000,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.798.000.000,00					Aparatur dan Masyarakat		2.980.000.000,00	
		Tersedianya barang milik daerah (BMD)						1.798.000.000,00					Aparatur dan Masyarakat		2.980.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00						4 Unit	2.700.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	0 Unit	98.000.000,00						4 Unit	80.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	200.000.000,00						4 Unit	200.000.000,00	
	5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						98.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			80.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	3 Unit	98.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				4 Unit	80.000.000,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						200.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	10 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				4 Unit	200.000.000,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.500.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			2.700.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				4 Unit	2.700.000.000,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.542.625.000,00					Aparatur dan Masyarakat		3.908.000.000,00	
		Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan						3.542.625.000,00					Aparatur dan Masyarakat		3.908.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	896.625.000,00						12 Laporan	1.150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.451.000.000,00						12 Laporan	2.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00						12 Laporan	175.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00						12 Laporan	83.000.000,00	
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						30.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			83.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				12 Laporan	83.000.000,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						896.625.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			1.150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	896.625.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				12 Laporan	1.150.000.000,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						165.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			175.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				12 Laporan	175.000.000,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.451.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			2.500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.451.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				12 Laporan	2.500.000.000,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.456.750.000,00					Aparatur dan Masyarakat		1.648.000.000,00	
		Terpeliharanya kondisi dan fungsi Barang Milik Daerah (BMD) yang digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah						1.456.750.000,00					Aparatur dan Masyarakat		1.648.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	350.000.000,00						3 Unit	420.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit		45 Unit	45 Unit	830.000.000,00						48 Unit	950.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		15 Unit	15 Unit	276.750.000,00						15 Unit	278.000.000,00	
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						830.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			950.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit		45 Unit	47 Unit	830.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				48 Unit	950.000.000,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						276.750.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			278.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		15 Unit	12 Unit	276.750.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				15 Unit	278.000.000,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						350.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			420.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				3 Unit	420.000.000,00	Badan Penghubung
236.	**5.07.02**	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**						**3.716.413.000,00**							**4.190.000.000,00**	
		Meningkatnya efektivitas koordinasi, komunikasi, dan fasilitasi kepentingan Pemerintah Daerah di tingkat pusat.						***3.716.413.000,00***							***4.190.000.000,00***	
			1.Persentase kegiatan pelayanan pejabat daerah tamu penting lainnya yang terlayani	100 %		100 %	100 %	3.716.413.000,00						100 %	4.190.000.000,00	
			2.Persentase penyelenggaraan kegiatan hubungan antar lembaga yang terlayani	100 %		100 %	100 %	3.716.413.000,00						100 %	4.190.000.000,00	
			3.Persentase pembinaan masyarakat Kalimantan Utara yang terlayani	100 %		100 %	100 %	3.716.413.000,00						100 %	4.190.000.000,00	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung						3.716.413.000,00					Aparatur dan Masyarakat		4.190.000.000,00	
		Terlaksananya pelayanan fasilitasi kedinasan, representasi, dan promosi daerah oleh Badan Penghubung kepada pimpinan daerah, ASN, dan pihak terkait di tingkat pusat.						3.716.413.000,00					Aparatur dan Masyarakat		4.190.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.610.413.000,00						12 Laporan	2.100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.981.000.000,00						12 Laporan	2.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00						12 Laporan	90.000.000,00	
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagiAparatur dan Masyarakat						1.610.413.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			2.100.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.610.413.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				12 Laporan	2.100.000.000,00	Badan Penghubung
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur danMasyarakat						1.981.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.981.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				12 Laporan	2.000.000.000,00	Badan Penghubung
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi ProdukUnggulan dan Pelestarian Seni Budaya						125.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			90.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				12 Laporan	90.000.000,00	Badan Penghubung
		Inspektorat						**19.646.161.663,08**							**42.419.711.368,95**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**19.646.161.663,08**							**42.419.711.368,95**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**19.646.161.663,08**							**42.419.711.368,95**	
237.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**17.332.689.263,08**							**28.142.821.809,37**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dilingkungan Inspektorat						***17.332.689.263,08***							***26.742.821.809,37***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	93 Nilai		82 Nilai	85 Nilai	17.303.459.263,08						87 Nilai	26.454.821.809,37	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	93 Nilai		82 Nilai	90 Nilai	29.230.000,00						87 Nilai	288.000.000,00	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						29.230.000,00					-		288.000.000,00	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						29.230.000,00					-		288.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	29.230.000,00						2 Dokumen	288.000.000,00	
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						29.230.000,00			-	-			288.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	29.230.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	288.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.551.815.975,00					-		13.418.725.980,78	
		Dokumen pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar						13.551.815.975,00					-		13.418.725.980,78	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	335.280.000,00						12 Dokumen	541.320.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan		61 Orang/ Bulan	61 Orang/ Bulan	13.216.535.975,00						61 Orang/ Bulan	12.877.405.980,78	
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13.216.535.975,00			-	-			12.877.405.980,78	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan		61 Orang/ Bulan	60 Orang/ Bulan	13.216.535.975,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				61 Orang/ Bulan	12.877.405.980,78	Inspektorat
	6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						335.280.000,00			-	-			541.320.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	335.280.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	541.320.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						1.017.071.888,00					-		1.824.000.000,00	
		Dokumen administrasi BMD yang tertib dan sesuai ketentuan						1.017.071.888,00					-		1.824.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.017.071.888,00						121 Dokumen	1.824.000.000,00	
	6.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						1.017.071.888,00			-	-			1.824.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.017.071.888,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				121 Dokumen	1.824.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						864.000.000,00					-		3.550.000.000,00	
		Terselenggaranya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, tepat waktu, dan sesuai peraturan perundang-undangan						864.000.000,00					-		3.550.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		60 Paket	0 Paket	0,00						60 Paket	350.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 Orang		56 Orang	56 Orang	864.000.000,00						56 Orang	3.200.000.000,00	
	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00			-	-			350.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		60 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60 Paket	350.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						864.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			3.200.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 Orang		56 Orang	60 Orang	864.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				56 Orang	3.200.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						192.939.000,00					-		2.090.000.000,00	
		Dokumen administrasi umum tersusun dan terdokumentasi						192.939.000,00					-		2.090.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	97.380.000,00						12 Laporan	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	7.000.000,00						100 Laporan	600.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	55.000.000,00						4 Paket	750.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	32.500.000,00						10 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	1.059.000,00						5 Paket	40.000.000,00	
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						32.500.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	32.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Paket	200.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.059.000,00			-	-			40.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	1.059.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Paket	40.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						55.000.000,00			-	-			750.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	750.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						97.380.000,00			-	-			500.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	97.380.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	500.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						7.000.000,00			-	-			600.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		10 Laporan	100 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Laporan	600.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					-		4.592.095.828,59	
		Barang milik daerah yang tersedia dan siap digunakan						0,00					-		4.592.095.828,59	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	0,00						4 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00						5 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	1.342.095.828,59	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						2 Unit	800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						2 Unit	2.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	0,00						10 Unit	200.000.000,00	
	6.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00			-	-			2.000.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	2.000.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00			-	-			800.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	800.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00			-	-			150.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	150.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00			-	-			200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	200.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						0,00			-	-			100.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	100.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00			-	-			1.342.095.828,59	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	1.342.095.828,59	Inspektorat
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						817.762.400,08					-		1.050.000.000,00	
		Tersedianya jasa pendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kantor						817.762.400,08					-		1.050.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	629.602.400,08						12 Laporan	850.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	188.160.000,00						12 Laporan	200.000.000,00	
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						629.602.400,08			-	-			850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	629.602.400,08	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	850.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						188.160.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	188.160.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	200.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						859.870.000,00					-		1.330.000.000,00	
		Terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang operasional perangkat daerah dalam kondisi baik dan berfungsi optimal						859.870.000,00					-		1.330.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	8.000.000,00						20 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		1 Unit	1 Unit	151.410.000,00						1 Unit	200.000.000,00	
	6.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						8.000.000,00			-	-			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	8.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Unit	50.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						151.410.000,00			-	-			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		1 Unit	1 Unit	151.410.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	200.000.000,00	Inspektorat
		Terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang operasional perangkat daerah dalam kondisi baik dan berfungsi optimal						859.870.000,00					-		1.330.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	614.500.000,00						-	800.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	85.960.000,00						-	280.000.000,00	
	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						614.500.000,00			-	-			800.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	28 Unit	614.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	800.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						85.960.000,00			-	-			280.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	30 Unit	85.960.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	280.000.000,00	Inspektorat
238.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**1.602.528.000,00**							**8.044.683.187,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah						***1.602.528.000,00***							***7.444.683.187,00***	
			1.Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	95 %		92 %	81 %	1.602.528.000,00						93 %	7.444.683.187,00	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						1.398.528.000,00					-		7.094.683.187,00	
		Audit Kepatuhan yang dilaksanakan						1.398.528.000,00					-		7.094.683.187,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	282.164.000,00						10 Dokumen	800.000.000,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	86.364.000,00						1 Kesepakatan	650.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00						12 Laporan	600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	666.000.000,00						30 Laporan	2.863.916.647,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	60.000.000,00						5 Laporan	830.766.540,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	248.000.000,00						18 Laporan	850.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00						4 Laporan	500.000.000,00	
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						666.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			2.863.916.647,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	666.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Laporan	2.863.916.647,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						36.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			600.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	600.000.000,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						20.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			500.000.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	500.000.000,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						248.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			850.000.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	248.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18 Laporan	850.000.000,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan TeknisKabupaten/Kota						60.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			830.766.540,00	
		Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Laporan	830.766.540,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal						86.364.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			650.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	86.364.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Kesepakatan	650.000.000,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						282.164.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			800.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	282.164.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Dokumen	800.000.000,00	Inspektorat
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						204.000.000,00					-		950.000.000,00	
		Terlaksananya Audit dengan tujuan tertentu						204.000.000,00					-		950.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	114.000.000,00						1 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	90.000.000,00						4 Laporan	600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah						90.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			600.000.000,00	
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	90.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	600.000.000,00	Inspektorat
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						114.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			350.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	114.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	350.000.000,00	Inspektorat
239.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**710.944.400,00**							**6.232.206.372,58**	
		Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standar Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel						***710.944.400,00***							***6.232.206.372,58***	
			1.Persentase Pemenuhan Elemen dalam Penilaian Kapabilitas APIP	100 %		100 %	100 %	710.944.400,00						100 %	6.232.206.372,58	
			2.Nilai MCP KPK sektor pengawasan	90 Angka		80 Angka	85 Angka	710.944.400,00						85 Angka	6.232.206.372,58	
			3.Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	3.5 %		3.1 %	100 %	710.944.400,00						3.4 %	6.232.206.372,58	
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di BidangPengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						324.500.000,00					-		2.702.206.372,58	
		Dokumen Penilaian Kapabilitas APIP yang Terverifikasi oleh BPKP						324.500.000,00					-		2.702.206.372,58	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi		2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	101.300.000,00						2 Rekomendasi	1.000.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi		2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	223.200.000,00						2 Rekomendasi	1.702.206.372,58	
		Terlaksananya Sosialisasi dan Pelatihan SPIP secara Berkala di Seluruh OPD						324.500.000,00					-		2.702.206.372,58	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi		2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	101.300.000,00						2 Rekomendasi	1.000.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi		2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	223.200.000,00						2 Rekomendasi	1.702.206.372,58	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di BidangPengawasan						223.200.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			1.702.206.372,58	
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi		2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	223.200.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Rekomendasi	1.702.206.372,58	Inspektorat
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di BidangFasilitasi Pengawasan						101.300.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi		2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	101.300.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Rekomendasi	1.000.000.000,00	Inspektorat
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi						386.444.400,00					-		3.530.000.000,00	
		Monitoring dan Evaluasi Berkala terhadap Area Rawan Korupsi oleh APIP						386.444.400,00					-		3.530.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan		6 Kegiatan	6 Kegiatan	170.752.400,00						6 Kegiatan	2.300.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 Perangkat Daerah		2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	60.000.000,00						2 Perangkat Daerah	180.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42 Perangkat Daerah		42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	80.000.000,00						42 Perangkat Daerah	200.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	42 Perangkat Daerah		42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	75.692.000,00						42 Perangkat Daerah	850.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan Daerah						386.444.400,00					-		3.530.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan		6 Kegiatan	6 Kegiatan	170.752.400,00						6 Kegiatan	2.300.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 Perangkat Daerah		2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	60.000.000,00						2 Perangkat Daerah	180.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42 Perangkat Daerah		42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	80.000.000,00						42 Perangkat Daerah	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	42 Perangkat Daerah		42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	75.692.000,00						42 Perangkat Daerah	850.000.000,00	
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi UrusanPemerintahan Daerah						75.692.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			850.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	42 Perangkat Daerah		42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	75.692.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				42 Perangkat Daerah	850.000.000,00	Inspektorat
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, danPenilaian Reformasi Birokrasi						80.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42 Perangkat Daerah		42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	80.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				42 Perangkat Daerah	200.000.000,00	Inspektorat
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						170.752.400,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			2.300.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan		6 Kegiatan	6 Kegiatan	170.752.400,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Kegiatan	2.300.000.000,00	Inspektorat
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan VerifikasiPenegakan Integritas						60.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif			180.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 Perangkat Daerah		2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Perangkat Daerah	180.000.000,00	Inspektorat
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						**12.636.002.630,00**							**18.158.972.216,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**12.636.002.630,00**							**18.158.972.216,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**12.636.002.630,00**							**18.158.972.216,00**	
240.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**7.193.286.521,00**							**7.698.325.318,00**	
		Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran						***7.193.286.521,00***							***7.698.325.318,00***	
			1.Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %		100 %	100 %	7.193.286.521,00						100 %	7.698.325.318,00	
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.247.241.375,00					-		6.413.024.112,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.247.241.375,00					-		6.413.024.112,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	225.480.000,00						100 Dokumen	205.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan		100 Orang/ Bulan	100 Orang/ Bulan	6.021.761.375,00						100 Orang/ Bulan	6.207.824.112,00	
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.021.761.375,00			-	-			6.207.824.112,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan		100 Orang/ Bulan	36 Orang/ Bulan	6.021.761.375,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Orang/ Bulan	6.207.824.112,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						225.480.000,00			-	-			205.200.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	4 Dokumen	225.480.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Dokumen	205.200.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						70.000.000,00					-		59.571.847,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						70.000.000,00					-		59.571.847,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	70.000.000,00						5 Orang	59.571.847,00	
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						70.000.000,00			-	-			59.571.847,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	70.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Orang	59.571.847,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						345.472.494,00					-		436.106.821,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						345.472.494,00					-		436.106.821,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan		200 Laporan	200 Laporan	175.505.646,00						200 Laporan	252.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	145.266.800,00						1 Paket	139.215.821,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	19.689.648,00						1 Paket	44.238.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.010.400,00						1 Paket	652.500,00	
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.010.400,00			-	-			652.500,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.010.400,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	652.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						145.266.800,00			-	-			139.215.821,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	145.266.800,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	139.215.821,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						19.689.648,00			-	-			44.238.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	19.689.648,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	44.238.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						175.505.646,00			-	-			252.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan		200 Laporan	200 Laporan	175.505.646,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200 Laporan	252.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						376.964.052,00					-		669.526.569,00	
		Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan						376.964.052,00					-		669.526.569,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	370.956.952,00						1 Laporan	664.526.569,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.007.100,00						1 Laporan	5.000.000,00	
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.007.100,00			-	-			5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	6.007.100,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	5.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						370.956.952,00			-	-			664.526.569,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	370.956.952,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	664.526.569,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						153.608.600,00					-		120.095.969,00	
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya						153.608.600,00					-		120.095.969,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	33 Unit		33 Unit	33 Unit	133.278.600,00						33 Unit	107.370.969,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	20.330.000,00						12 Unit	12.725.000,00	
	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						133.278.600,00			-	-			107.370.969,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	33 Unit		33 Unit	31 Unit	133.278.600,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				33 Unit	107.370.969,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.330.000,00			-	-			12.725.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	20 Unit	20.330.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Unit	12.725.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
241.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**999.642.514,00**							**2.513.283.764,00**	
		Terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa						***999.642.514,00***							***2.513.283.764,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	999.642.514,00						100 Persentase	2.513.283.764,00	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						999.642.514,00					-		2.513.283.764,00	
		Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan						999.642.514,00					-		2.513.283.764,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	0,00						50 Orang	91.025.640,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	476.885.864,00						50 Orang	172.258.124,00	
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	522.756.650,00						1 Dokumen	2.250.000.000,00	
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						476.885.864,00			-	-			172.258.124,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	476.885.864,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	172.258.124,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						0,00			-	-			91.025.640,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	91.025.640,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka						522.756.650,00			-	-			2.250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	522.756.650,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	2.250.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
242.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**3.150.071.195,00**							**3.342.250.000,00**	
		Meningkatnya Peran Parpol dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik						***3.150.071.195,00***							***3.342.250.000,00***	
			1.Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada / Pilpres / Pilleg	84 %		80 %	82 %	3.150.071.195,00						84 %	3.342.250.000,00	
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						3.150.071.195,00					-		3.342.250.000,00	
		Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang Menggunakan Hak Suara dibagi Jumlah DPT dikali 100%						3.150.071.195,00					-		3.342.250.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	66.845.400,00						1 Laporan	112.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang		50 Orang	50 Orang	119.725.000,00						50 Orang	255.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang		50 Orang	50 Orang	2.963.500.795,00						50 Orang	2.975.250.000,00	
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						2.963.500.795,00			-	-			2.975.250.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang		50 Orang	70 Orang	2.963.500.795,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	2.975.250.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						119.725.000,00			-	-			255.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang		50 Orang	70 Orang	119.725.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	255.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						66.845.400,00			-	-			112.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	66.845.400,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	112.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
243.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**242.492.000,00**							**2.100.000.000,00**	
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas						***242.492.000,00***							***2.100.000.000,00***	
			1.Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	242.492.000,00						100 Persentase	2.100.000.000,00	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						242.492.000,00					-		2.100.000.000,00	
		Jumlah Ormas yang dibina dan diawasi dibagi Jumlah Ormas yang terdaftar dan terlapor dikali 100%						242.492.000,00					-		2.100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang		50 Orang	50 Orang	222.492.000,00						50 Orang	2.000.000.000,00	
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						222.492.000,00			-	-			2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang		50 Orang	50 Orang	222.492.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	2.000.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						20.000.000,00			-	-			100.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	100.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
244.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**146.329.000,00**							**277.450.000,00**	
		Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya						***146.329.000,00***							***277.450.000,00***	
			1.Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi	100		100	100	146.329.000,00						100	277.450.000,00	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						146.329.000,00					-		277.450.000,00	
		Jumlah Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan dibagi Jumlah Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang seharusnya dilaksanakan dikali 100%						146.329.000,00					-		277.450.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang		50 Orang	50 Orang	53.837.000,00						50 Orang	125.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang		50 Orang	50 Orang	92.492.000,00						50 Orang	152.250.000,00	
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						92.492.000,00			-	-			152.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang		50 Orang	50 Orang	92.492.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	152.250.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					53.837.000,00			-	-			125.200.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang		50 Orang	50 Orang	53.837.000,00	Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	125.200.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
245.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**904.181.400,00**							**2.227.663.134,00**	
		Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial						***904.181.400,00***							***2.227.663.134,00***	
			1.Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	904.181.400,00						100 Persentase	2.227.663.134,00	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						904.181.400,00					-		2.227.663.134,00	
		Jumlah Konflik Sosial yang Difasilitasi dibagi Jumlah Konflik Sosial yang Terjadi dikali 100%						904.181.400,00					-		2.227.663.134,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	585.489.000,00						1 Dokumen	1.520.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	168.692.400,00						1 Laporan	255.794.176,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang		50 Orang	50 Orang	150.000.000,00						50 Orang	169.062.971,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang		50 Orang	50 Orang	0,00						50 Orang	282.805.987,00	
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						0,00			-	-			282.805.987,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang		50 Orang	50 Orang	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	282.805.987,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						150.000.000,00			-	-			169.062.971,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang		50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	169.062.971,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						168.692.400,00			-	-			255.794.176,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	168.692.400,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	255.794.176,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi PimpinanDaerah Provinsi						585.489.000,00			-	-			1.520.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	585.489.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Bulungan || Kecamatan Tanjung Selor || Kelurahan Tanjung Selor Hilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	1.520.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	J U M L A H							**2.294.017.962.563,45**							**4.279.296.146.137,69**	